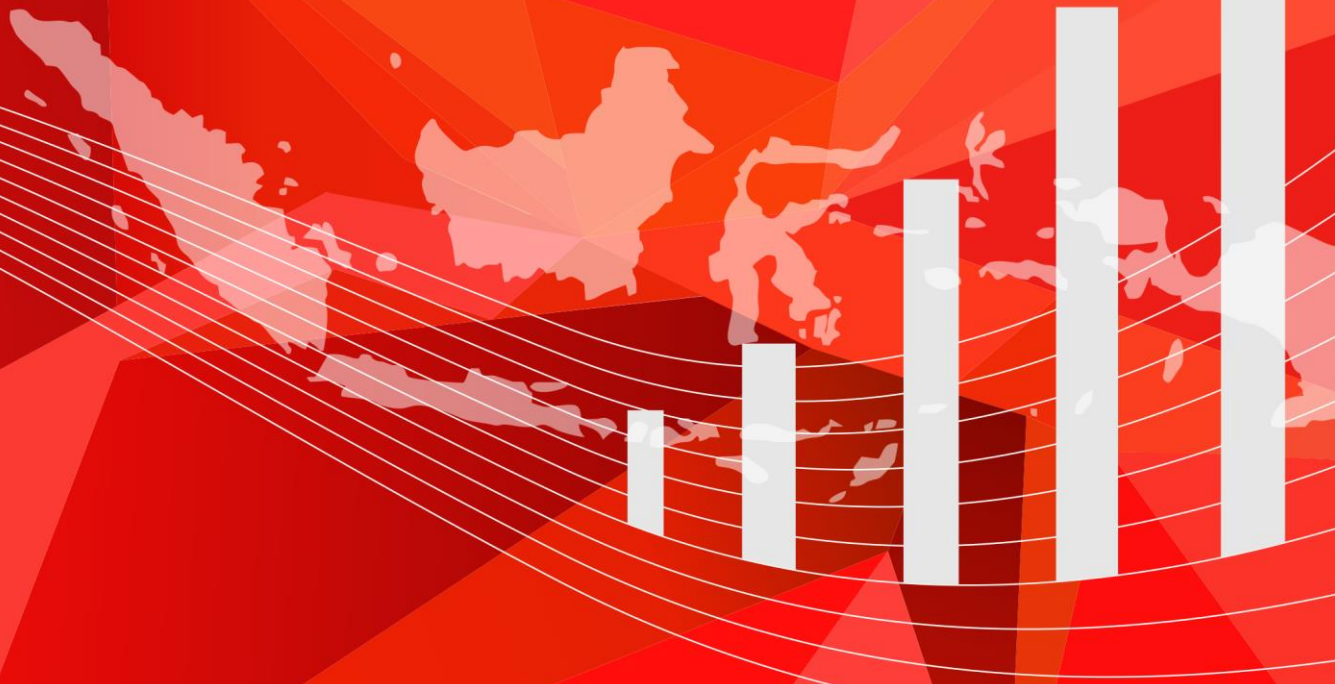




Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia



2015

PROFIL KESEHATAN INDONESIA





2015

**PROFIL KESEHATAN
INDONESIA**

PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2015

351.077 Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI
Ind
p Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal
 Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015. --
 Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2016

ISBN 978-602-416-065-4
1. Judul I. HEALTH STATISTICS

Buku ini diterbitkan oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950
Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277168
Fax no: 62-21-5277168
E-mail: datainformasi.pusdatin@kemkes.go.id
Website: <http://www.kemkes.go.id>

Tim Penyusun

Pengarah

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Sekretaris Jenderal Kemenkes RI

Ketua

dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS
Kepala Pusat Data dan Informasi

Editor

Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes
Yudianto, SKM, M.Si
Boga Hardhana, S.Si, MM
drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes

Anggota

Cecep Slamet Budiono, SKM, MSc.PH; Nuning Kurniasih, S.Si.Apt, Msi; Wardah, SKM, MKM; dr. Fetty Ismandari, M.Epid; Evida V Manullang, S.Si, MKM; Marlina Indah Susanti, SKM, M.Epid; Supriyono Pangribowo, SKM, MKM; Annisa Harpini, SKM, MKM; Eka Satriani Sakti, SKM; dr. Yoeyoen Aryantin Indrayani; Khairani SKM, MKM; Ratri Aprianda, SKM, MKM; dr. Ellysa; Erwin Susetyoaji, SKM, M.Kes; Hira Ahmad Habibi, S.Sn; Dian Mulya Sari, S.Ds; B. B. Sigit; Sinin; Hellena Maslinda

Kontributor

Kementerian Dalam Negeri; Badan Pusat Statistik; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Keuangan dan BMN; Biro Kepegawaian; Pusat Promosi Kesehatan; Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; Pusat Krisis Kesehatan; Setditjen. Pelayanan Kesehatan; Dit. Pelayanan Kesehatan Primer; Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan; Dit. Pelayanan Kesehatan Tradisional; Dit. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Setditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan; Dit. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; Dit. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik; Dit. Penyehatan Lingkungan; Setditjen. Kesehatan Masyarakat; Dit. Kesehatan Keluarga; Dit. Kesehatan Lingkungan; Dit. Kesehatan Kerja dan Olahraga; Dit. Gizi Masyarakat; Dit. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Setditjen. Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Set. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; Set Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

KATA PENGANTAR

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI



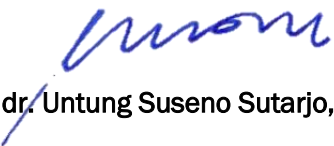
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2015. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2015 ini.

Profil Kesehatan Indonesia merupakan salah satu media publikasi data dan informasi yang berisi situasi dan kondisi kesehatan yang cukup komprehensif. Profil Kesehatan Indonesia disusun berdasarkan ketersediaan data, informasi, dan indikator kesehatan yang bersumber dari unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan serta institusi lain terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Dalam Profil Kesehatan Indonesia 2015 ini, pembaca dapat memperoleh data dan informasi mengenai Demografi, Sarana Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Kesehatan Keluarga, serta Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Data dan informasi yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Indonesia dapat membantu dalam membandingkan capaian pembangunan kesehatan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, mengukur capaian pembangunan kesehatan di Indonesia, serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya.

Buku Profil Kesehatan Indonesia 2015 ini disajikan dalam bentuk cetakan dan *soft copy* yang dapat diunduh melalui *website* www.kemkes.go.id. Semoga publikasi ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat serta berkontribusi secara positif bagi pembangunan kesehatan di Indonesia. Kritik dan saran kami harapkan sebagai penyempurnaan profil yang akan datang.

Jakarta, Agustus 2016
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan


dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

MENTERI KESEHATAN RI



Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk mewujudkan Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia. Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Efektivitas dan efisiensi serta pelaksanaan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi program, pendekatan yang tepat serta sasaran yang jelas. Dukungan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat sangat menentukan dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat.

Saya menyambut gembira atas terbitnya Profil Kesehatan Indonesia 2015 sebagai publikasi data dan informasi kesehatan yang komprehensif. Tentunya publikasi seperti ini agar digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dalam setiap proses manajemen kesehatan. Selain itu Profil Kesehatan juga merupakan pemenuhan hak terhadap akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Saya berharap upaya peningkatan kualitas Profil Kesehatan Indonesia terus dilakukan, baik dari segi ketepatan waktu, validitas, kelengkapan, dan konsistensi data, sehingga di masa mendatang Profil Kesehatan Indonesia dapat terbit lebih cepat. Penguatan komitmen terhadap integrasi data dan informasi serta koordinasi antara pusat dan daerah juga harus ditingkatkan.

Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang berkontribusi, khususnya pengelola data di pusat, daerah, dan lintas sektor dalam penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2015. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan yang berbasis data.

Jakarta, Agustus 2016
Menteri Kesehatan RI

Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek Sp.M (K)

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. DEMOGRAFI

- Lampiran 1.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 1.2 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 1.3 Estimasi Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015
- Lampiran 1.4 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 1.5 Estimasi Jumlah Lahir Hidup, Jumlah Bayi (0 Tahun), Jumlah Balita (0 - 2 Tahun), Jumlah Balita (0 - 4 Tahun) Jumlah Anak Balita (1 - 4 Tahun), Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 1.6 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Penduduk Usia Muda, Usia Produktif dan Usia Non Produktif Menurut Jenis Kelamin Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 1.7 Estimasi Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 Tahun), WUS Imunisasi (15 - 39 Tahun), Ibu Hamil, Ibu Bersalin Dan Ibu Nifas Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 1.8 Estimasi Jumlah Anak Pra Sekolah, Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat, dan Jumlah Anak Usia SD/Setingkat Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 1.9 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2000 - 2015
- Lampiran 1.10 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Tipe Daerah Tahun 2015
- Lampiran 1.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 1.12 Indeks Gini Menurut Provinsi Tahun 2011 - 2015
- Lampiran 1.13 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Tahun 2014
- Lampiran 1.14 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Bukan Makanan Perkapita Perbulan Tahun 2014
- Lampiran 1.15 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 1.16 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2015
- Lampiran 1.17 Persentase Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki (Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan) Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2015
- Lampiran 1.18 Angka Melek Huruf (Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Yang Melek Huruf) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2015
- Lampiran 1.19 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi Tahun 2012 - 2015

- Lampiran 1.20 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2015
- Lampiran 1.21 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2012 – 2015
- Lampiran 1.22 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2015
- Lampiran 1.23 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2012 – 2015
- Lampiran 1.24 Indeks Pembangunan Manusia dan Peringkat Tahun 2010 – 2015
- Lampiran 1.25 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Menurut Provinsi Tahun 2010 - 2015

BAB II. SARANA KESEHATAN

- Lampiran 2.1 Jumlah Puskesmas dan Rasionya Terhadap Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2011 – 2015
- Lampiran 2.2 Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut Provinsi Tahun 2011 - 2015
- Lampiran 2.3 Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit dengan Pelayanan Pengembangan Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 2.4 Jumlah Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 2.5 Jumlah Rumah Sakit di Indonesia Menurut Pengelola dan Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 2.6 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Tempat Tidur Menurut Pengelola Tahun 2011 - 2015
- Lampiran 2.7 Jumlah Rumah Sakit Khusus dan Tempat Tidur Menurut Jenis Rumah Sakit Tahun 2011 - 2015
- Lampiran 2.8 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur , Dan Rasio Tempat Tidur Per 1.000 Penduduk Menurut Kelas Rumah Sakit dan Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 2.9 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Menurut Kelas Perawatan dan Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 2.10 Jumlah Layanan HIV Aids dan Infeksi Penyakit Menular Seksual (IMS) Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 2.11 Jumlah Program Studi Diploma IV Institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Sampai Dengan Desember Tahun 2015
- Lampiran 2.12 Jumlah Peserta Didik Program Diploma IV Poltekkes Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2015
- Lampiran 2.13 Jumlah Jurusan/Program Studi Diploma III Institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Menurut Jurusan dan Provinsi Tahun 2015

- Lampiran 2.14 Jumlah Peserta Didik Program Diploma III Poltekkes Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2015
- Lampiran 2.15 Jumlah Peserta Didik Diploma III Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun Ajaran 2013/2014 Sampai Dengan 2015/2016
- Lampiran 2.16 Jumlah Sarana Produksi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut provinsi Tahun 2015
- Lampiran 2.17 Jumlah Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 2.18 Persentase Puskesmas yang Menyediakan Obat dan Vaksin Menurut *Item* Obat Triwulan IV Tahun 2015
- Lampiran 2.19 Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Triwulan IV Tahun 2015

BAB III. TENAGA KESEHATAN

- Lampiran 3.1 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Menurut Jenis Tenaga dan Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 3.2 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Puskesmas Menurut Jenis Tenaga dan Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 3.3 Kecukupan Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, dan Bidan di Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 3.4 Jumlah Puskesmas yang Memiliki Lima Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 3.5 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 3.6 Jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di Rumah Sakit Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 3.7 Persentase Rumah Sakit Kabupaten/Kota Kelas C yang Memiliki 4 Dokter spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 3.8 Jumlah Dokter umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang Memiliki Surat Tanda Registrasi Menurut Provinsi Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2015
- Lampiran 3.9 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Tanda Registrasi Menurut Provinsi Tahun 2012-2015
- Lampiran 3.10 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Tanda Registrasi Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 3.11 Jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang Diangkat dan Aktif Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut kriteria Wilayah dan Provinsi Per 31 Desember 2015

- Lampiran 3.12 Jumlah Dokter Umum yang Diangkat dan Aktif Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Per 31 Desember 2015
- Lampiran 3.13 Jumlah Dokter Gigi yang Diangkat dan Aktif Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Per 31 Desember 2015
- Lampiran 3.14 Jumlah Bidan yang Diangkat dan Aktif Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Per 31 Desember 2015
- Lampiran 3.15 Jumlah Pengangkatan dan Keberadaan Aktif Tenaga Residen di Kabupaten Prioritas DTPK dan DBK Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 3.16 Jumlah Lulusan Program Studi Diploma III Poltekes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2013-2015
- Lampiran 3.17 Jumlah Lulusan Program Studi Diploma III Poltekes Menurut Jenis Program Studi Tahun 2015
- Lampiran 3.18 Jumlah Lulusan Program Diploma IV Poltekkes Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2015
- Lampiran 3.19 Jumlah Dokter Peserta Internship Menurut Bulan Pemberangkatan dan Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 3.20 Jumlah Kabupaten/Kota dan Puskesmas Penempatan Nusantara Sehat Menurut Periode Tahun 2015
- Lampiran 3.21 Penempatan Nusantara Sehat Menurut Kabupaten/Kota dan Puskesmas Tahun 2015
- Lampiran 3.22 Jumlah Penempatan Tenaga Kesehatan Pada Tim Nusantara Sehat Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 3.23 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia (TKKI) Menurut Jenis Permintaan Negara Pengguna tahun 2015
- Lampiran 3.24 Jumlah Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Menurut Negara Asal Tahun 2015

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

- Lampiran 4.1 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan RI Menurut Eselon I Tahun 2015
- Lampiran 4.2 Laporan realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan Kondisi Per 31 Desember 2015 Berdasarkan Jenis Belanja
- Lampiran 4.3 Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2015 Kondisi Per 31 Desember Berdasarkan Sumber Dana
- Lampiran 4.4 Realisasi Dana Dekonsentrasi Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 4.5 Alokasi Dan Realisasi Tugas Pembantuan Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 4.6 Alokasi dan Realisasi TP – BOK Menurut Provinsi Sampai Dengan Desember Tahun 2015
- Lampiran 4.7 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Per 31 Desember 2015

- Lampiran 4.8 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan Per 31 Desember Tahun 2015
- Lampiran 4.9 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan Per 31 Desember Tahun 2015

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

- Lampiran 5.1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1, K4, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, dan Kunjungan Nifas Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.2 Cakupan Pemberian 90 Tablet Tambah Darah Pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.3 Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.4 Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga kesehatan Menurut Tempat Persalinan dan Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.5 Cakupan Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.6 Persentase Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.7 Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.8 Persentase Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan dan Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.9 Jumlah Tempat Pelayanan KB Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.10 Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Pasca Persalinan/Pasca Keguguran (PP/PK) Menurut Metode kontrasepsi Tahun 2015
- Lampiran 5.11 Jumlah dan Persentase PUS Bukan Peserta KB (Unmet Need) Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015
- Lampiran 5.12 Cakupan Imunisasi TT Pada Wanita Usia Subur Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.13 Cakupan Imunisasi TT Pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.14 Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.15 Cakupan Penanganan Neonatal Dengan Komplikasi Menurut Provinsi Tahun Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.16 Cakupan Imunisasi Dasar Pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.17 *Drop Out Rate* Cakupan Imunisasi DPT/HB(1)- Campak dan Cakupan Imunisasi DPT/HB(1)- DPT/(HB(3) Pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2013 - 2015
- Lampiran 5.18 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Menurut Provinsi Tahun 2013 - 2015
- Lampiran 5.19 Cakupan Imunisasi Anak Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.20 Persentase Kabupaten/Kota yang Melakukan Tata Laksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Provinsi Tahun 2015

- Lampiran 5.21 Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Kegiatan Kesehatan Remaja Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.22 Cakupan Puskesmas yang Melaksanakan Penjaringan Kesehatan Peserta Didik Kelas I Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.23 Cakupan Puskesmas yang Melaksanakan Penjaringan Kesehatan Peserta Didik Kelas VII dan X Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.24 Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Pada Balita 6 – 59 Bulan Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.25 Cakupan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi 0 – 6 Bulan Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.26 Cakupan Balita Ditimbang menurut Provnsi Tahun 2015
- Lampiran 5.27 Kasus Gizi Buruk Pada Balita Ditemukan dan Mendapat Perawatan Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 5.28 Rerata Tingkat Kecukupan Energi Pada Umur 0 – 59 Bulan Menurut Tipe Daerah dan Provinsi, Sudi Diet Total 2014
- Lampiran 5.29 Rerata Tingkat Kecukupan Energi Pada Penduduk Umur >55 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, Studi Diet Total 2014
- Lampiran 5.30 Proporsi Penduduk Menurut Klasifikasi Tingkat Kecukupan Energi dan Provinsi, Studi Diet Total 2014
- Lampiran 5.31 Rerata Tingkat Kecukupan Protein Pada Umur 0 – 59 Bulan Menurut Tipe Daerah dan Provinsi, Studi Diet Total 2014
- Lampiran 5.32 Rerata Tingkat Kecukupan Protein Pada Penduduk Umur > 55 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, Studi Diet Total 2014
- Lampiran 5.33 Proporsi Penduduk Menurut Klasifikasi Tingkat Kecukupan Protein dan Provinsi, Studi Diet Total 2014

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

- Lampiran 6.1 Jumlah Kasus Baru Tuberkulosis Paru BTA Positif Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.2 Jumlah Kasus Baru Tuberkulosis Paru BTA Positif Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.3 Hasil Cakupan Penemuan Kasus Penyakit Tuberkulosis Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.4 Cakupan Tuberkulosis Paru BTA Positif Sembuh, Pengobatan Lengkap dan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.5 Jumlah Kasus Baru dan Kasus Kumulatif Aids Menurut Provinsi sampai dengan Desember 2015
- Lampiran 6.6 Jumlah Kasus Baru Infeksi HIV Menurut Provinsi Tahun 2013-2015
- Lampiran 6.7 Jumlah Dan Persentase Kasus Aids pada Pengguna Napza Suntikan (IDU) Menurut Provinsi Sampai Dengan Desember 2015

- Lampiran 6.8 Jumlah Layanan dan Kunjungan Konseling Dan Tes HIV Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.9 Jumlah Kasus Pneumonia Pada Balita Menurut Provinsi Dan Kelompok Umur Tahun 2015
- Lampiran 6.10 *Case Fatality Rate* Pneumonia Pada Balita Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2015
- Lampiran 6.11 Penemuan Kasus Diare Ditangani Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.12 Jumlah Kasus Baru Kusta dan *Case Detection Rate (CDR)* Per 100.000 Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2015
- Lampiran 6.13 Proporsi Kecacatan Kusta dan Kasus Kusta Pada Anak 0-14 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.14 Jumlah Kasus Kusta Yang Tercatat Dan Angka Prevalensi Per 100.000 Penduduk Menurut Provinsi Dan Jenis Kelamin Tahun 2015
- Lampiran 6.15 Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum dan Faktor Risiko Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.16 Jumlah Kasus, Meninggal, dan *Incidence Rate (IR)* Campak Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.17 Jumlah Kasus Campak dan Kasus Campak yang Divaksinasi Menurut Kelompok Umur dan Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.18 Frekuensi KLB Dan Jumlah Kasus pada KLB Campak Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.19 KLB Campak Berdasarkan Konfirmasi Laboratorium Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.20 Jumlah Kasus Difteri Menurut Kelompok Umur Dan Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.21 *Non Polio AFP Rate* Per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun dan Persentase Spesimen Adekuat Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.22 Jumlah Kasus dan Angka Kesakitan Malaria Per 1.000 Penduduk Berisiko Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.23 *Annual Parasite Incidence (API)* Malaria Menurut Provinsi Tahun 2012-2015
- Lampiran 6.24 Jumlah Penderita, *Incidence Rate* Per 100.000 Penduduk, Kasus Meninggal, dan *Case Fatality Rate (%)* Demam Berdarah Dengue (DBD/DHF) Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.25 Jumlah Kabupaten/Kota Yang Terjangkit Demam Berdarah Dengue Menurut Provinsi Tahun 2013 - 2015
- Lampiran 6.26 Kabupaten/Kota yang Melaporkan KLB DBD Menurut Provinsi Tahun 2015
- Lampiran 6.27 Situasi Rabies Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2013 - 2015
- Lampiran 6.28 Jumlah Kasus, Meninggal, dan *Case Fatality Rate (CFR)* Leptospirosis Menurut Provinsi Tahun 2013 - 2015
- Lampiran 6.29 Jumlah Bencana dan Korban Menurut Jenis Bencana Tahun 2015
- Lampiran 6.30 Jumlah Bencana dan Korban Menurut Provinsi Tahun 2015

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

- Lampiran 7.1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2013 – 2015
- Lampiran 7.2 Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat Tahun 2015
- Lampiran 7.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Layak Tahun 2014 - 2015
- Lampiran 7.4 Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan Tahun 2015
- Lampiran 7.5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Provinsi Tahun 2014 - 2015
- Lampiran 7.6 Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2015
- Lampiran 7.7 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2015
- Lampiran 7.8 Persentase Rumah Sakit yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar Tahun 2015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Kata Sambutan	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	xvi
Daftar Lampiran	xvii
Daftar Isi	xxv
BAB I DEMOGRAFI	
A. KEADAAN PENDUDUK	1
B. KEADAAN EKONOMI	7
C. KEADAAN PENDIDIKAN	15
D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA.....	21
BAB II SARANA KESEHATAN	
A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.....	25
1. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Kerja	29
2. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Olahraga.....	30
3. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer.....	32
B. RUMAH SAKIT	34
1. Jenis Rumah Sakit.....	34
2. Kelas Rumah Sakit.....	36
3. Tempat Tidur Rumah Sakit.....	37
C. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN.....	38
1. Sarana Produksi dan Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan	38
2. Ketersediaan Obat dan Vaksin.....	41
3. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar.....	41
D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN.....	42
1. Jumlah Politeknik Kesehatan.....	42
2. Peserta Didik	44
BAB III TENAGA KESEHATAN	
A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN	45
1. Tenaga Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat	47
2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	58
B. RASIO TENAGA KESEHATAN.....	61
C. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN.....	65
D. JUMLAH LULUSAN POLITEKNIK KESEHATAN	68
E. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN	70
1. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tetap (PTT)	70
2. Tenaga Kesehatan dengan Status Penugasan Khusus	72
3. Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia (TKKI)	77
4. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA)	78

BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN

A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN	80
B. ALOKASI DAN REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015.....	83
C. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	86
D. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.....	89

BAB V KESEHATAN KELUARGA

A. KESEHATAN IBU.....	104
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.....	105
2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil...	109
3. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.....	112
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas.....	114
5. Pelayanan/Penanganan Komplikasi Kebidanan.....	116
6. Pelayanan Kontrasepsi.....	120
B. KESEHATAN ANAK	124
1. Pelayanan Kesehatan Neonatal.....	126
2. Penanganan Komplikasi Neonatal	129
3. Imunisasi.....	131
4. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah.....	136
5. Pelayanan Kesehatan Pada Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA).....	139
6. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).....	142
C. GIZI	144
1. Pemberian ASI Eksklusif.....	144
2. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita usia 6 - 59 Bulan	145
3. Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu (D/S)	147
4. Penemuan dan Penanganan Gizi Buruk.....	149
5. Tingkat Kecukupan Energi.....	149
6. Tingkat Kecukupan Protein	155

BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	160
1. Tuberkulosis	160
2. HIV/AIDS	167
3. Pneumonia.....	172
4. Kusta.....	175
5. Diare.....	179
B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)	181
1. Tetanus Neonatorum	181
2. Campak.....	182
3. Difteri.....	184
4. Polio dan AFP (<i>Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut</i>).....	185

C.	PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZONOSIS.....	187
1.	Demam Berdarah Dengue (DBD).....	187
2.	Chikungunya.....	191
3.	Filariasis.....	192
4.	Malaria.....	194
5.	Rabies.....	197
6.	Leptospirosis.....	198
7.	Antraks.....	199
8.	Flu Burung.....	200
D.	DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA.....	202

BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN

A.	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.....	208
B.	TATANAN KAWASAN SEHAT.....	211
C.	AIR MINUM.....	213
D.	AKSES SANITASI LAYAK.....	215
E.	TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN.....	217
F.	TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM).....	218
G.	PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS.....	220



BAB I

DEMOGRAFI



Bab I

DEMOGRAFI

Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, Benua Asia dan Australia, di antara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Secara astronomis Indonesia terletak antara 6° Lintang Utara sampai 11° Lintang Selatan dan 95° sampai 141° Bujur Timur yang meliputi rangkaian pulau antara Sabang sampai Merauke. Data yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 13.466, luas daratan sebesar 1.922.570 km² dan luas perairan sebesar 3.257.483 km².

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, secara administratif wilayah Indonesia terbagi atas 34 provinsi, 514 kabupaten/kota (416 kabupaten dan 98 kota), 7.094 kecamatan, 8.412 kelurahan dan 74.093 desa. Jumlah provinsi bertambah satu dari tahun 2013, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, dengan 5 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Malinau, Bulungan, Tana Tidung, Nunukan dan Kota Tarakan. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan menurut provinsi pada tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 1.1.

Pada Bab ini akan diulas mengenai keadaan penduduk, ekonomi, pendidikan dan indeks pembangunan manusia (IPM).

A. KEADAAN PENDUDUK

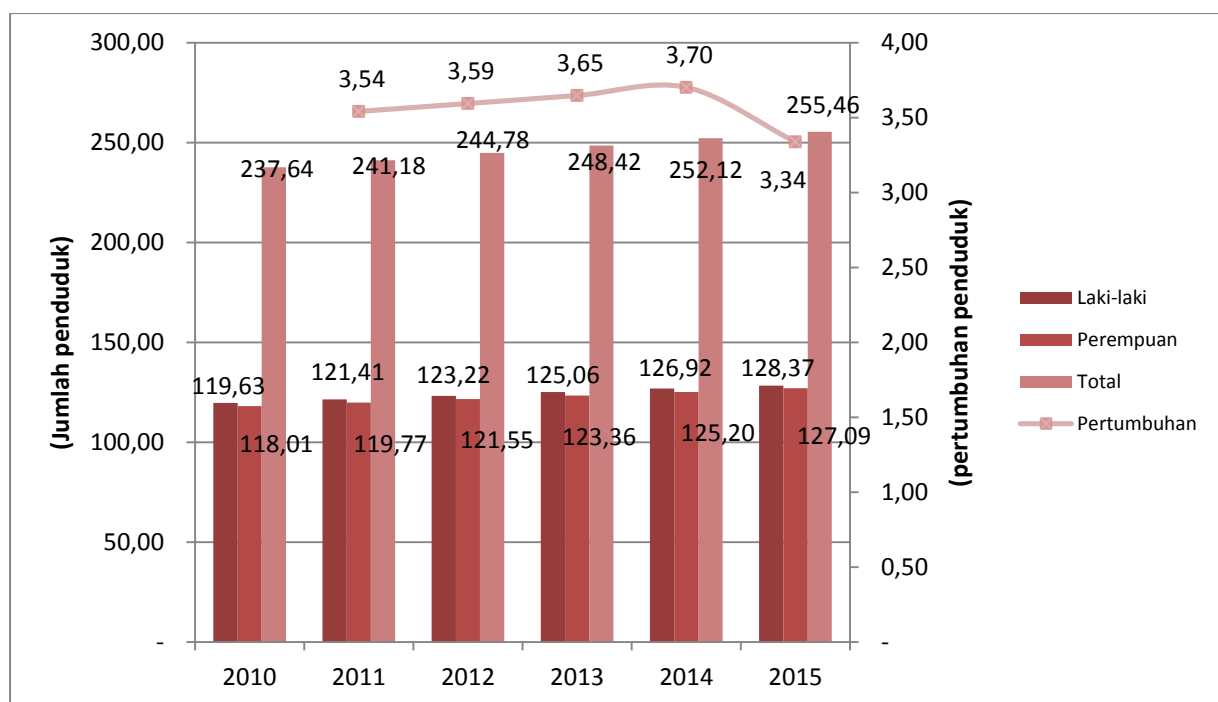
Hasil estimasi jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 255.461.686 jiwa, yang terdiri atas 128.366.718 jiwa penduduk laki-laki dan 127.094.968 jiwa penduduk perempuan. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan dengan bimbingan dari Badan Pusat Statistik dengan menggunakan metode geometrik. Metode ini menggunakan prinsip bahwa parameter

dasar demografi yaitu parameter fertilitas, mortalitas, dan migrasi per tahun tumbuh konstan.

Gambar 1.1 memperlihatkan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia tahun 2010 hingga 2015. Dari tahun 2010-2014 pertumbuhan penduduk per tahun terus meningkat, dari 3,54 juta per tahun menjadi 3,70 juta per tahun. Tahun 2015 pertumbuhan penduduk sedikit menurun dibandingkan tahun 2014 menjadi 3,34 juta per tahun. Rasio jenis kelamin pada tahun 2015 sebesar 101, yang artinya terdapat 101 laki-laki di antara 100 perempuan.

GAMBAR 1.1

**JUMLAH PENDUDUK INDONESIA (Dalam Jutaan)
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2010 – 2015**

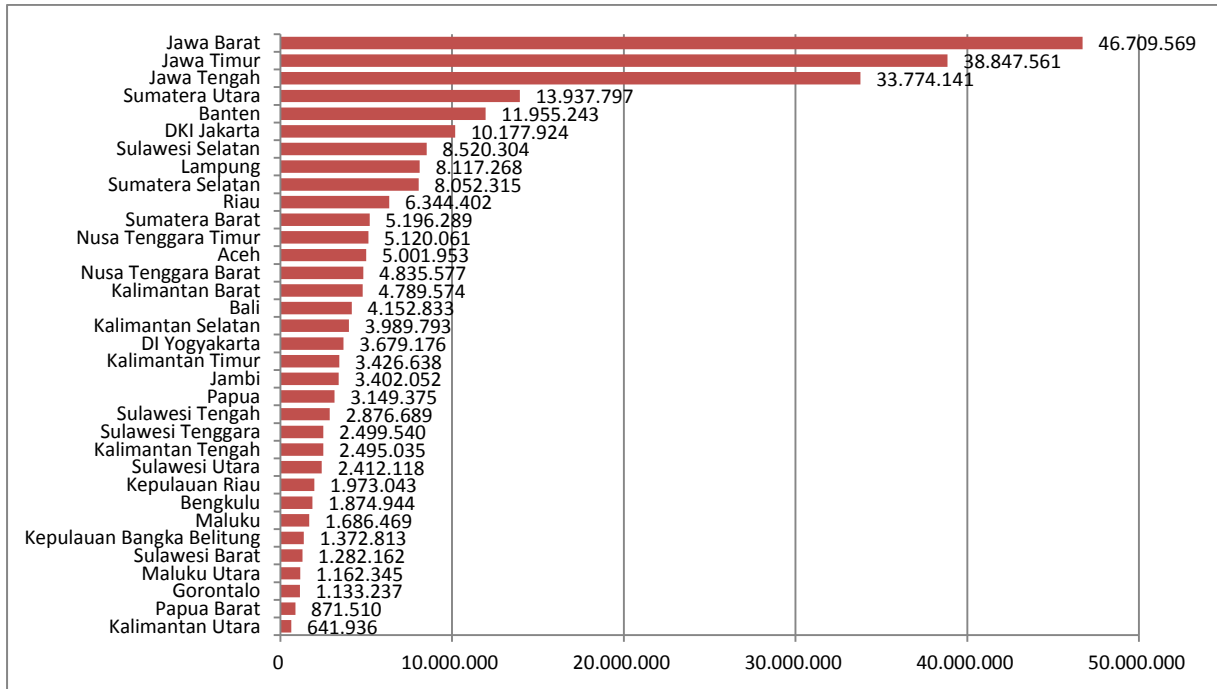


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010, Hasil Sensus Penduduk; Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015, Hasil Estimasi

Pada Gambar 1.2, berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 46.709.569 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk sebesar 641.936 jiwa.

GAMBAR 1.2

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2015

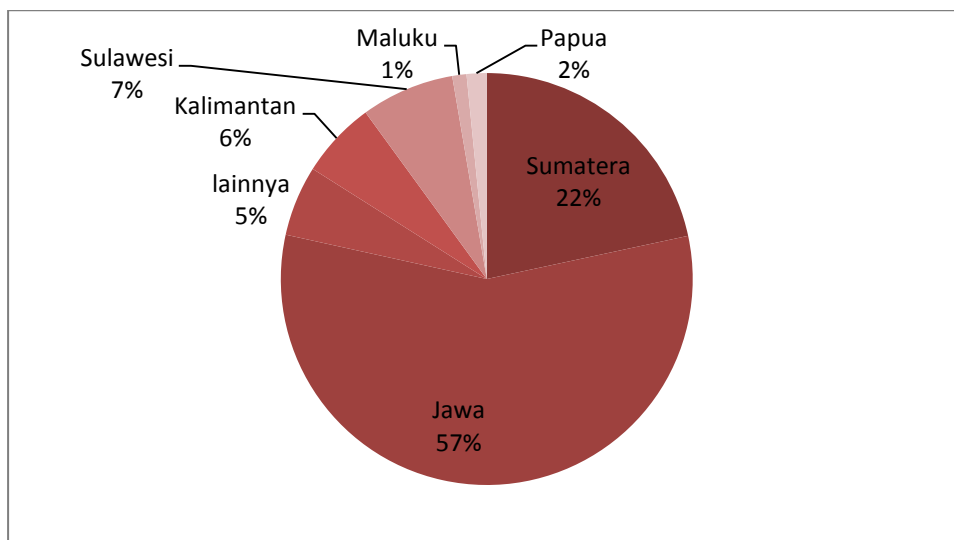


Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015, Hasil Estimasi

Dari gambar di bawah tampak pulau Jawa merupakan wilayah yang memiliki populasi penduduk Indonesia paling banyak. Dan penduduk yang paling sedikit yaitu berada di wilayah timur Indonesia yakni Maluku dan Papua.

GAMBAR 1.3

PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2015

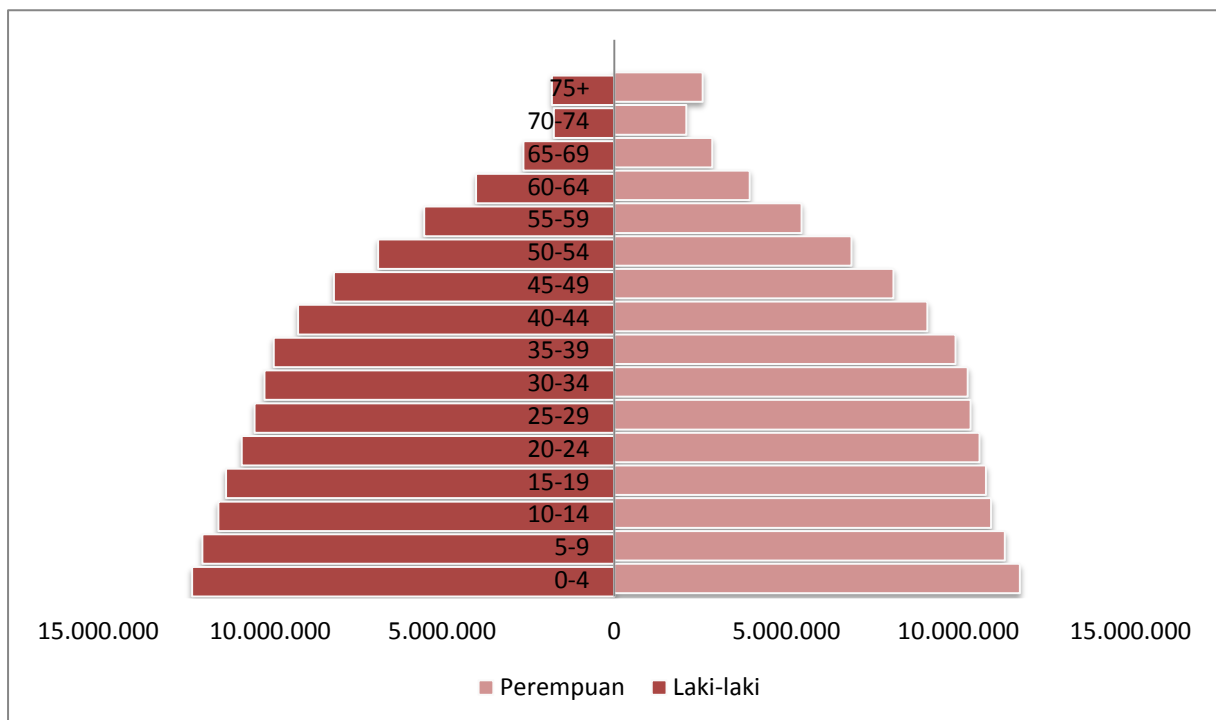


Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015, Hasil Estimasi

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Berdasarkan estimasi jumlah penduduk, dapat disusun sebuah piramida penduduk tahun 2015. Dasar piramida menunjukkan jumlah penduduk, badan piramida bagian kiri menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan badan piramida bagian kanan menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi.

GAMBAR 1.4

PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2015



Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015, Hasil Estimasi

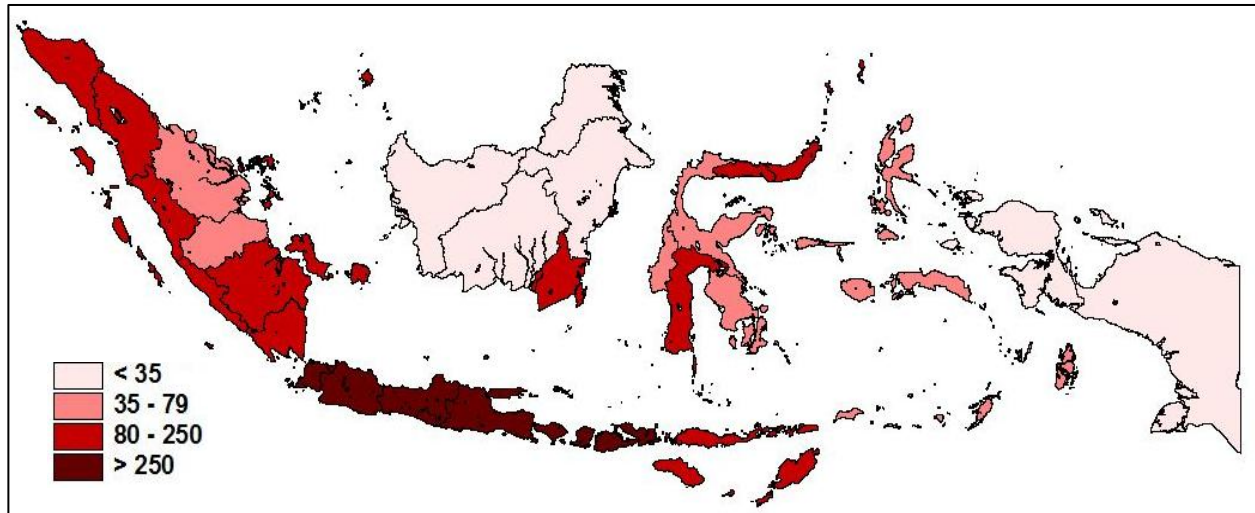
Pada Gambar 1.4 ditunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesia termasuk struktur penduduk muda. Hal ini dapat diketahui dari usia 0-14 tahun (usia muda) lebih banyak jumlahnya dibandingkan usia di atasnya. Lebih melebarnya grafik pada usia muda membuktikan bahwa penduduk Indonesia memiliki struktur muda. Bagian atas yang lebih pendek pada piramida tersebut menunjukkan angka kematian yang masih tinggi pada penduduk usia tua. Kondisi ini menuntut kebijakan terhadap penduduk usia tua.

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat dipelajari dengan menggunakan ukuran kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2015 berdasarkan hasil estimasi sebesar 133,5 jiwa per km², keadaan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 132 jiwa per km². Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran

penduduk. Kepadatan penduduk menurut provinsi tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 1.4.

GAMBAR 1.5

PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2015



Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015, Hasil Estimasi

Pada Gambar 1.5, terlihat bahwa kepadatan penduduk di Indonesia belum merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 15.327,97 jiwa per km². Kepadatan penduduk terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 8,51 jiwa per km². Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya. Dalam rangka pemerataan penduduk, pemerintah melaksanakan beberapa cara, antara lain: (1) transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya; (2) pemerataan lapangan kerja dengan mengembangkan industri, terutama untuk provinsi yang berada di luar Pulau Jawa; (3) pengendalian jumlah penduduk dengan menurunkan jumlah kelahiran melalui program keluarga berencana atau penundaan umur nikah pertama.

Indikator penting terkait distribusi penduduk menurut umur yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk yaitu Angka Beban Tanggungan atau *Dependency Ratio*. Angka Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang berumur tidak produktif (belum produktif/umur di bawah 15 tahun dan tidak produktif lagi/umur 65 tahun ke atas) dengan yang berumur produktif (umur 15–64 tahun). Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Tanggungan penduduk Indonesia pada tahun 2015 sebesar 48,63. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Indonesia yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung 48-49 orang yang tidak produktif.

Penduduk sebagai determinan pembangunan perlu mendapat perhatian yang serius. Program pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan, harus didasarkan pada dinamika kependudukan. Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian derajat kesehatan yang optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, namun sektor terkait lainnya seperti sektor pendidikan, ekonomi, sosial dan pemerintahan juga memiliki peranan yang cukup besar. Kesehatan merupakan hak semua penduduk, sehingga ditetapkan target dan sasaran pembangunan kesehatan. Tabel 1.1 memperlihatkan data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2015 menurut jenis kelamin.

Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan diperlukan bagi pengelola program terutama untuk menyusun perencanaan serta evaluasi hasil pencapaian upaya kesehatan yang telah dilaksanakan. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2015 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 1.5, 1.6, 1.7 dan 1.8.

TABEL 1.1

**PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2015**

No	Sasaran Program	Kelompok Umur/Formula	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Lahir Hidup	-	-	-	4.893.435
2	Bayi	0 Tahun	2.448.045	2.346.746	4.749.791
3	Batita (di Bawah Tiga Tahun)	0 - 2 Tahun	7.348.945	7.045.809	14.403.754
4	Anak Balita	1 - 4 Tahun	9.825.271	9.445.444	19.270.715
5	Balita (di Bawah Lima Tahun)	0 - 4 Tahun	12.273.316	11.792.190	24.065.506
6	Pra Sekolah	5 - 6 Tahun	4.849.350	3.602.593	9.451.943
7	Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat	7 Tahun	2.388.714	2.260.214	4.648.928

8	Anak Usia SD/Setingkat	7 - 12 Tahun	14.040.775	13.340.905	27.381.680
9	Penduduk Usia Muda	< 15 Tahun	35.754.920	34.102.486	69.857.406
10	Penduduk Usia Produktif	15 - 64 Tahun	86.394.793	85.479.495	171.874.288
11	Penduduk Usia Non Produktif	≥ 65 Tahun	6.217.005	7.521.987	13.729.992
12	Penduduk Usia Lanjut	≥ 60 Tahun	10.234.499	11.450.827	21.685.326
13	Penduduk Usia Lanjut Risiko Tinggi	≥ 70 Tahun	3.357.404	4.667.009	8.240.413
14	Wanita Usia Subur (WUS)	15 - 49 Tahun	-	69.195.283	69.195.283
15	Wanita Usia Subur Imunisasi	15 - 39 Tahun	-	51.981.127	51.981.127
16	Ibu Hamil	1,1 X lahir hidup	-	5.382.779	5.382.779
17	Ibu Bersalin/Nifas	1,05 X lahir hidup	-	5.138.107	5.138.107

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015, Hasil Estimasi

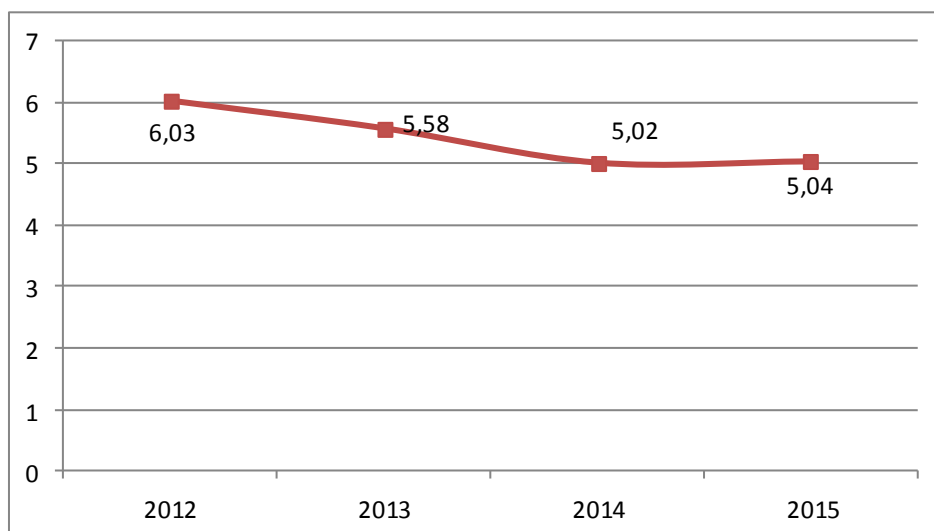
B. KEADAAN EKONOMI

Kondisi perekonomian merupakan salah satu aspek yang diukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Berdasarkan data BPS, besaran pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2015 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 11.540,8 triliun. Produk Domestik Bruto per kapita pada tahun 2015 yang merupakan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun mencapai Rp.45,2 juta.

Gambar 1.6 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2015 sebesar 5,04%, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 namun lebih rendah dibandingkan tahun 2012 dan 2013. Hal tersebut disebabkan masih terjadi krisis pada perekonomian global, walaupun pemulihan terus berlangsung di berbagai ekonomi utama dunia namun dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak merata, dan diperberat dengan berbagai permasalahan struktural pada perekonomian domestik yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan struktural tersebut antara lain ekspor yang masih didominasi produk berbasis SDA (sumber daya alam), ketahanan pangan dan energi yang masih rendah, pasar keuangan yang masih dangkal serta ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang meningkat.

GAMBAR 1.6

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2012 – 2015 (DALAM PERSEN)



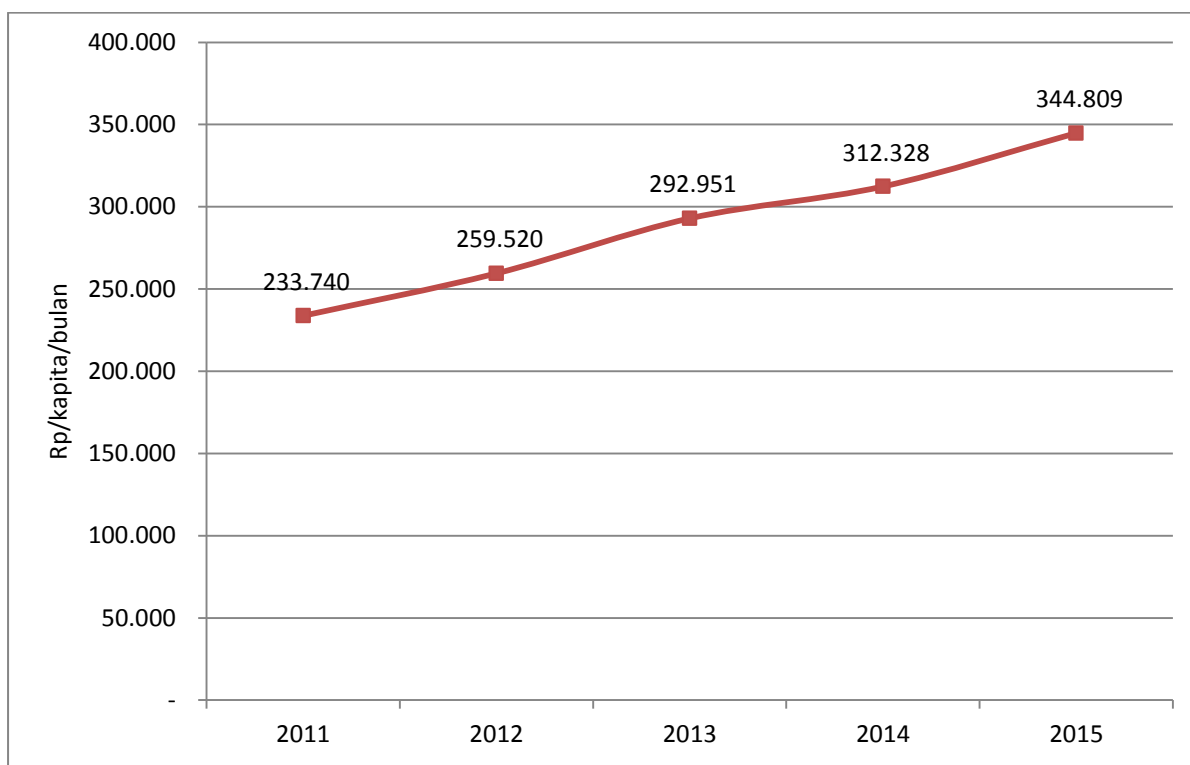
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

BPS melakukan pengukuran kemiskinan menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan juga dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non makanan yang diukur dari pengeluaran. Distribusi pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Namun karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan menggunakan pendekatan data pengeluaran.

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun untuk non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai garis pembatas untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis pembatas tersebut yang sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari atau di bawah garis kemiskinan dikategorikan miskin. Gambar 1.7 menunjukkan peningkatan garis kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2015. Batas kemiskinan atau tingkat pengeluaran per kapita per bulan tahun 2015 sebesar Rp 344.809.

GAMBAR 1.7

GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

BPS mengukur kemiskinan pada bulan Maret dan September. Kondisi September 2015 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 28,51 juta orang (11,13%) berkurang 0,08 juta orang dibandingkan kondisi Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22%). Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi Maret-September 2015 yaitu laju inflasi umum cenderung rendah, perbaikan penghasilan petani, dan harga eceran beberapa komoditas bahan pokok mengalami penurunan.

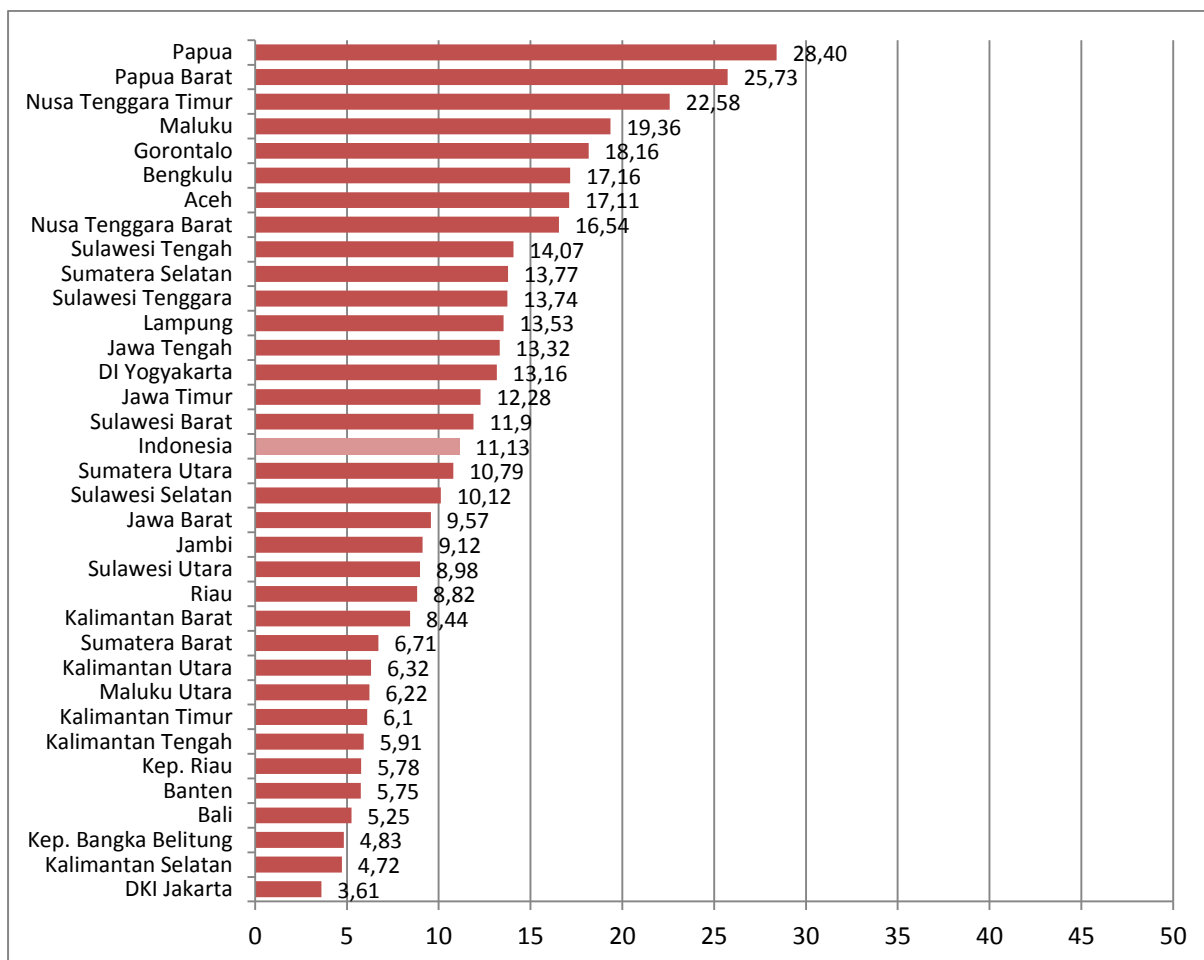
Jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan menurun lebih banyak dibanding penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan. Selama periode Maret 2015-September 2015, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sekitar 0,03 juta orang, sementara di daerah pedesaan menurun sekitar 0,05 juta orang.

Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan. Pada September 2015, penduduk miskin yang tinggal di pedesaan sebesar 62,76% dari seluruh penduduk miskin, tidak berbeda jauh dengan kondisi Maret 2015 sebesar 62,74%.

Berdasarkan provinsi pada tahun 2015, persentase penduduk miskin terbesar yaitu Papua (28,40%), Papua Barat (25,73%) dan Nusa Tenggara Timur (22,58%). Sedangkan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah yaitu DKI Jakarta (3,61%), Kalimantan Selatan (4,72%) dan Kepulauan Bangka Belitung (4,83%).

GAMBAR 1.8

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Persebaran jumlah dan proporsi penduduk miskin berdasarkan kelompok pulau tahun 2012-2015 pada tabel di bawah ini memperlihatkan persentase penduduk miskin terbesar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu

TABEL 1.2**PERSEBARAN JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MISKIN
MENURUT KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2012 - 2015**

No	Kelompok Pulau	2012		2013		2014		2015	
		Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%
1	Sumatera	6.177,2	21,6	6.190,1	21,7	6.070,4	21,9	6.309,1	22,1
2	Jawa	15.882,6	55,3	15.546,9	54,4	15.143,8	54,6	15.312,3	53,7
3	Kalimantan	932,9	3,3	978,7	3,4	972,9	3,5	994,0	3,5
4	Bali dan Nusa	1.989,6	7,0	1.998,1	7,0	2.004,5	7,2	2.181,6	7,7
5	Sulawesi	2.045,6	7,1	2.139,6	7,5	2.054,9	7,4	2.192,8	7,7
6	Maluku dan Papua	1.626,8	5,7	1.700,5	6,0	1.481,4	5,3	1.524,2	5,3
Indonesia		28.594,7	100	28.553,9	100	27.727,8	100	28.513,6	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

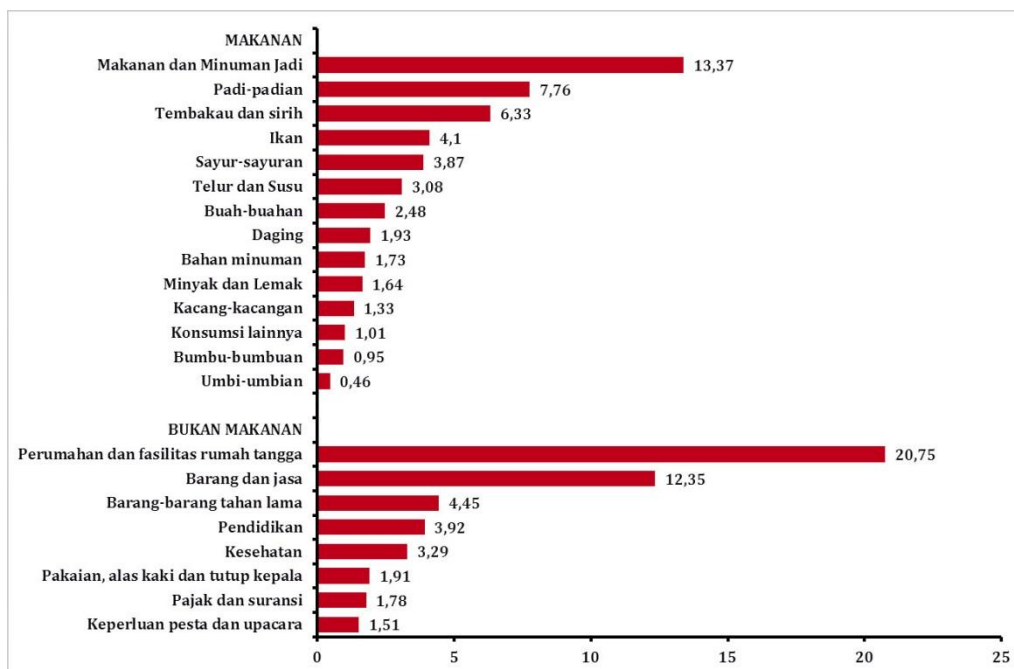
Masalah kemiskinan juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan secara nasional tahun 2015 sebesar 1,84. Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan secara nasional tahun 2015 sebesar 0,51. Rincian mengenai indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.11.

Ukuran yang dapat menggambarkan ketimpangan pendapatan yaitu Koefisien Gini/Indeks Gini (*Gini Ratio*). Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau pemerataan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini ada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Apabila nilai Indeks Gini 0 artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1 berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Selama bertahun-tahun, Indonesia memiliki Indeks Gini yang konstan yaitu sebesar 0,41. Rincian mengenai Indeks Gini dapat dilihat pada Lampiran 1.12.

Pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Namun informasi mengenai pendapatan rumah tangga yang akurat sulit diperoleh, sehingga dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Data pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan, kedua kelompok tersebut dapat menggambarkan bagaimana rumah tangga mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Menurut hukum ekonomi (Ernest Engel, 1857) bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Dengan demikian secara umum semakin meningkat pendapatan (kesejahteraan), semakin berkurang persentase pengeluaran untuk makanan.

Pada Gambar 1.9, berdasarkan hasil Susenas Maret 2014, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan (50,04%) masih lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk non makanan (49,96%). Tiga pengeluaran terbesar yaitu untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga (20,75%), makanan dan minuman jadi (13,37%) dan pengeluaran untuk barang dan jasa (12,35%). Sedangkan pengeluaran untuk kesehatan sebesar 3,29% dari total pengeluaran sebulan. Persentase rata-rata pengeluaran kesehatan tersebut masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan terhadap pengeluaran untuk tembakau dan sirih sebesar 6,33%.

GAMBAR 1.9
PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN
TAHUN 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kesempatan kerja di Indonesia. Penduduk dilihat dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja, namun hanya penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) yang dapat menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (aktif bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran (penduduk yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/putus asa). Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk sedang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Pada Tabel 1.3 menunjukkan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2012-2015. Pada periode Agustus 2012 hingga Agustus 2015 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan jumlah pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2012 sebesar 119,84 juta orang, meningkat menjadi 122,38 juta orang pada Agustus 2015. Namun terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 67,76% pada Agustus 2012 menjadi 65,76% pada Agustus 2015. TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif suplai tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TABEL 1.3

**PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA 2012-2015
(JUTA ORANG)**

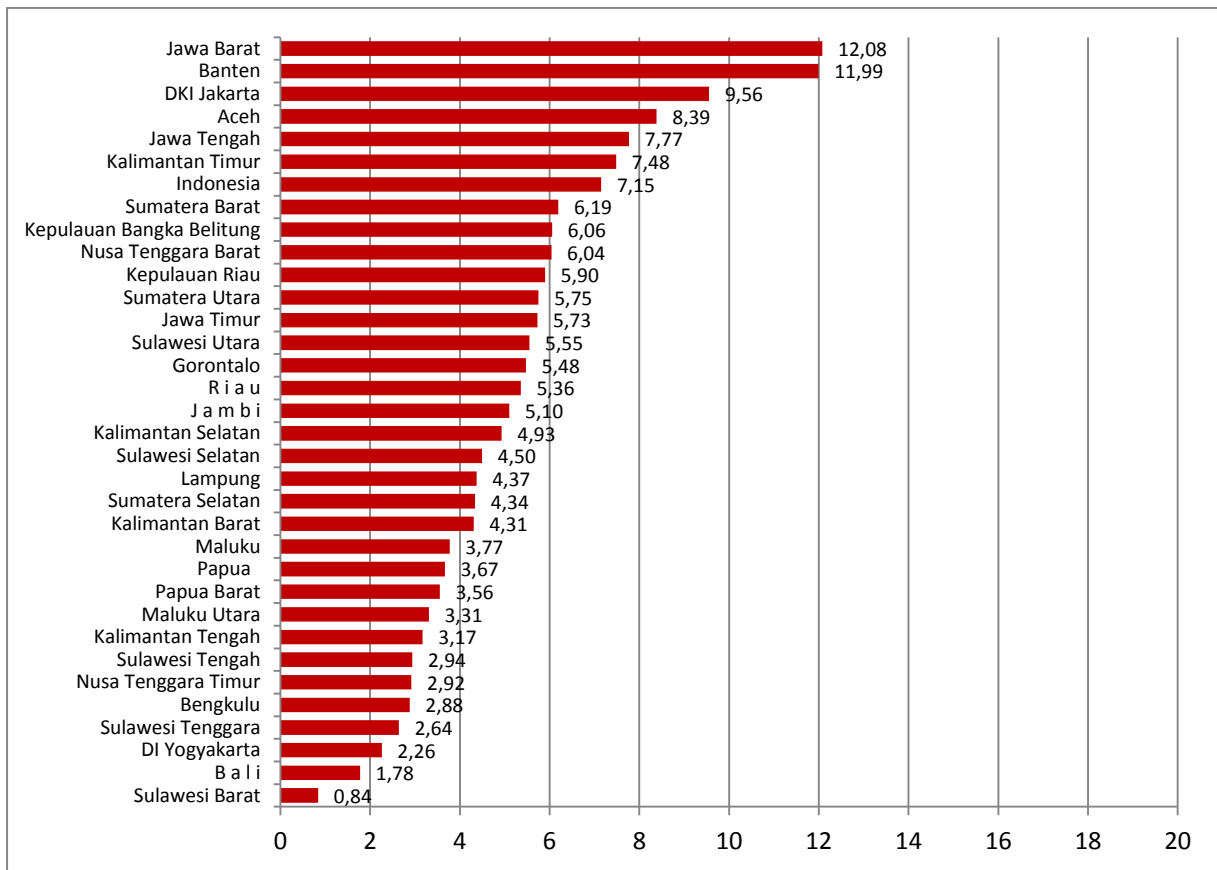
Angkatan Kerja	2012		2013		2014		2015	
	Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt
Jumlah Angkatan Kerja	121,82	119,84	123,17	120,17	125,32	121,87	128,30	122,38
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,59	67,76	69,15	66,77	69,17	66,60	69,50	65,76
Jumlah penduduk yang bekerja	114,06	112,50	115,93	112,76	118,17	114,63	120,85	114,82
Jumlah pengangguran terbuka	7,76	7,34	7,25	7,41	7,15	7,24	7,45	7,56
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,37	6,13	5,88	6,17	5,70	5,94	5,81	6,18

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2012-2015 meningkat dari 7,34 juta pada Agustus 2012 menjadi 7,56 pada Agustus 2015. Sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 6,13% pada Agustus 2012 menjadi 6,18% pada Agustus 2015. TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja, atau perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.

GAMBAR 1.10

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TAHUN 2015



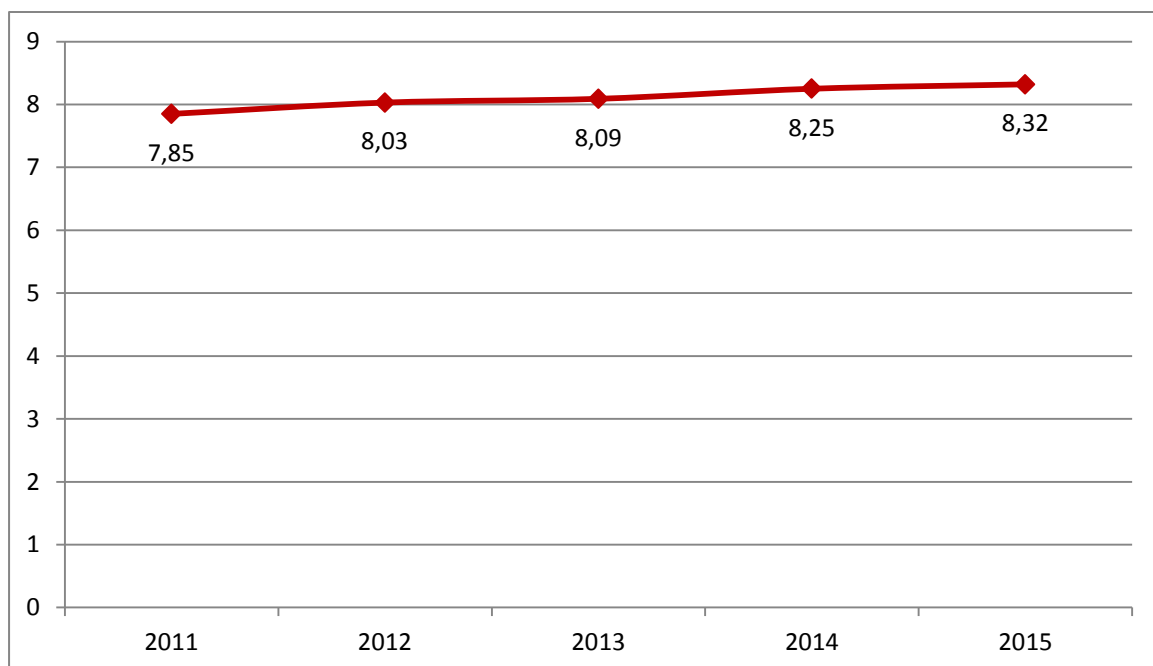
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Dari gambar di atas tampak Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan provinsi tahun 2015 yang paling tinggi adalah Jawa Barat (12,08%), Banten (11,99%) dan DKI Jakarta (9,56%). Sedangkan TPT yang paling rendah adalah Sulawesi Barat (0,84%), Bali (1,78%) dan DI Yogyakarta (2,26%). Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka biasanya seiring dengan penambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja.

C. KEADAAN PENDIDIKAN

Komponen pengukuran tingkat pembangunan manusia suatu negara yang cukup berpengaruh yaitu komponen pendidikan. Perubahan yang terjadi secara terus menerus pada perilaku masyarakat disebabkan oleh semakin meningkatnya tingkat pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu syarat mutlak pencapaian tujuan pembangunan manusia, dan merupakan target pembangunan sekaligus sarana pembangunan nasional. Pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satu indikator yang secara sensitif dapat mengukur tingkat pendidikan masyarakat yaitu rata-rata lama sekolah.

GAMBAR 1.11
RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS (DALAM TAHUN)
TAHUN 2011 - 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

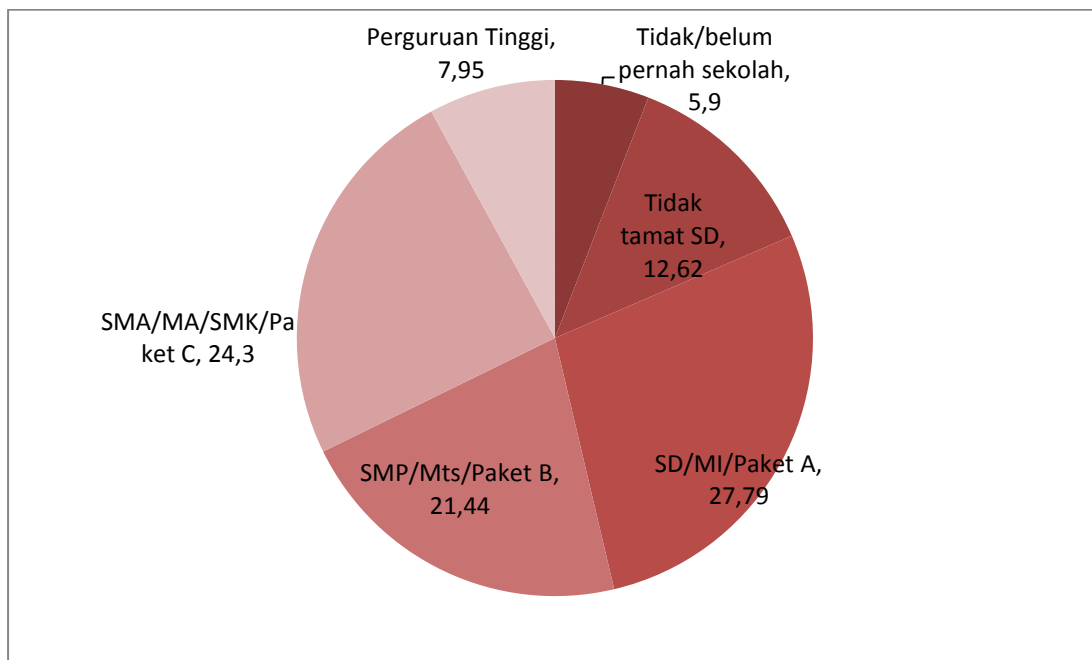
Rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas cenderung meningkat, yaitu 7,85 tahun pada tahun 2011 menjadi 8,32 tahun pada tahun 2015. Namun begitu angka ini belum memenuhi tujuan program wajib belajar 9 tahun. Pada tahun 2015, terlihat kecenderungan rata-rata lama sekolah di perkotaan (9,61 tahun) lebih besar dibandingkan di perdesaan (6,98 tahun). Hal ini terkait dengan keberadaan fasilitas sekolah yang lebih banyak di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Menurut jenis kelamin, laki-laki (8,69 tahun) cenderung lebih lama bersekolah dibandingkan perempuan (7,96 tahun). Sebanyak sembilan provinsi telah mencapai program wajib belajar 9 tahun, yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Maluku, Kalimantan Timur, Papua Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan Sulawesi Utara. Rata-rata lama bersekolah yang paling rendah di Provinsi Papua sebesar 6,27 tahun dan yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,90 tahun. Rincian

rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut provinsi dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 1.16.

Salah satu capaian dalam bidang pendidikan yaitu kepemilikan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang pada akhirnya akan menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau menjadi dasar untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Selain itu, ijazah/STTB biasanya juga menjadi tolok ukur dalam pergaulan atau hubungan sosial. Terkait dengan kualitas hidup manusia, ada kecenderungan semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki maka pengetahuan pun semakin banyak dan berakibat pada meningkatnya kualitas hidup terutama di bidang kesehatan dan perumahan.

GAMBAR 1.12

**PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KEATAS
MENURUT KEPEMILIKAN IJAZAH/STTB TERTINGGI YANG DIMILIKI TAHUN 2015**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Pada tahun 2015, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kepemilikan ijazah/STTB tertinggi yaitu yang memiliki ijazah/STTB SD/ sederajat sebesar 27,79%, yang memiliki ijazah/STTB SMA/ sederajat sebesar 24,3%, dan yang memiliki ijazah/STTB SMP/ sederajat sebesar 21,44%.

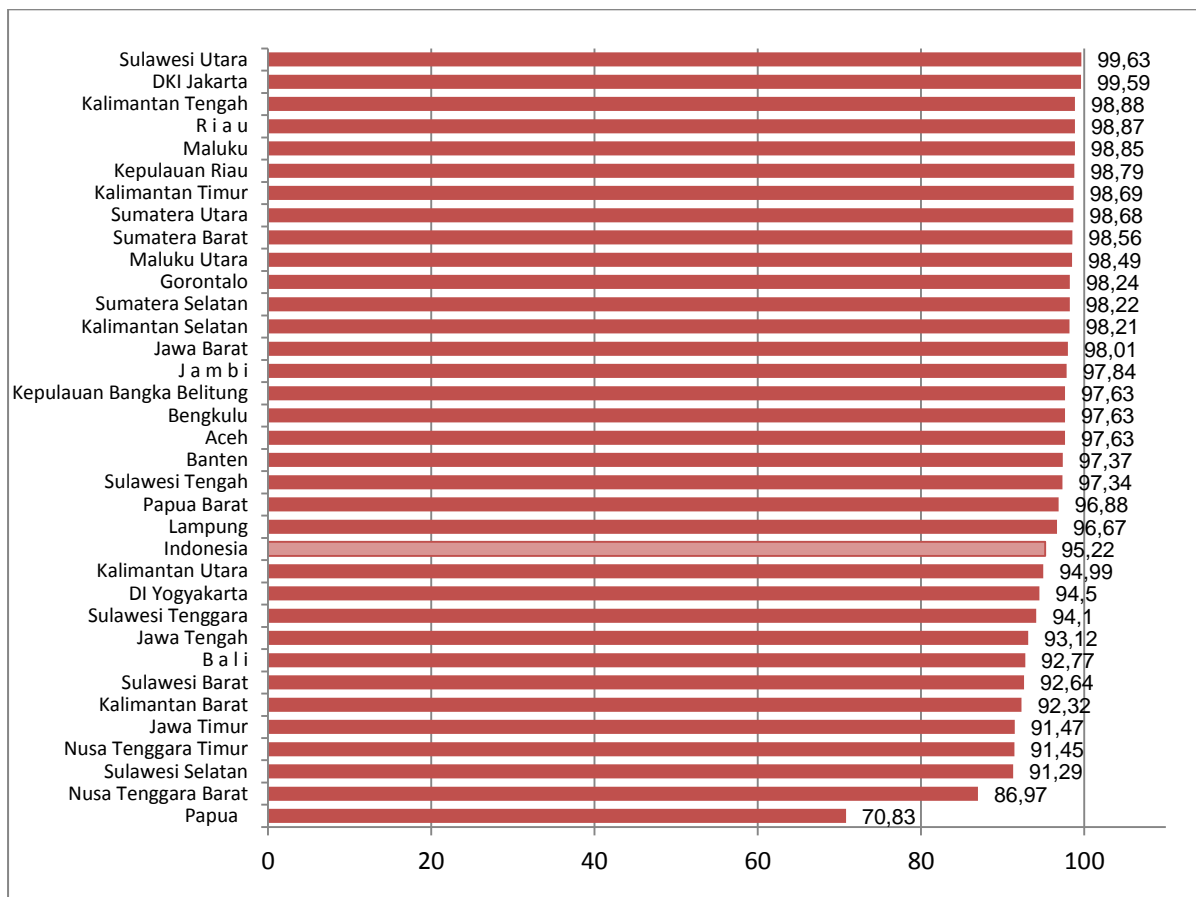
Hal mendasar yang dibutuhkan oleh penduduk untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera yaitu kemampuan membaca dan menulis. Penduduk yang bisa membaca dan menulis secara umum memiliki akses ke berbagai hal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang tidak memiliki kemampuan tersebut, sehingga peluang untuk hidup lebih sejahtera dimiliki oleh penduduk yang bisa membaca dan menulis.

Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf.

Angka Buta Huruf menjadi dasar pelaksanaan program pemberantasan buta huruf, dan diharapkan Angka Buta Huruf terus menurun. Tahun 2011-2015 Angka Buta Huruf cenderung menurun dari 7,56% tahun 2011 menjadi 4,78% pada tahun 2015. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan kebalikan dari Angka Buta Huruf. AMH merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka Melek Huruf menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Angka Melek Huruf yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat.

GAMBAR 1.13

ANGKA MELEK HURUF (DALAM PERSEN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Pada Gambar 1.13, AMH secara nasional tahun 2015 sebesar 95,22%. Provinsi Sulawesi Utara memiliki Angka Melek Huruf tertinggi (99,63%) dan terendah di Provinsi

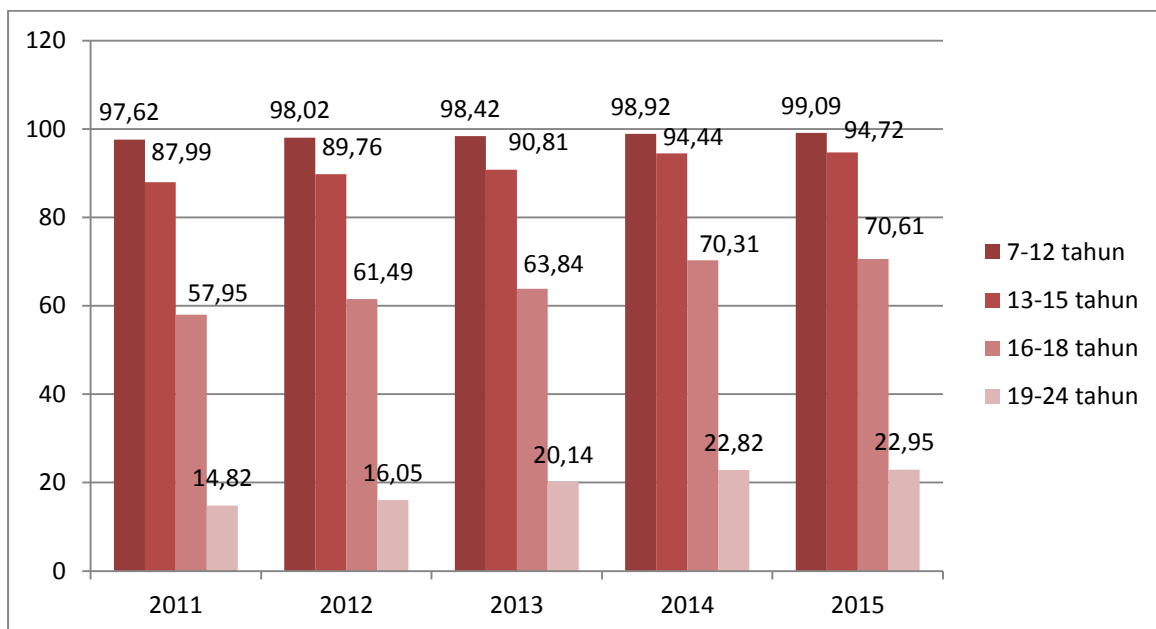
Papua (70,83%). Secara umum di 34 provinsi, AMH laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Disparitas Angka Melek Huruf antara laki-laki dan perempuan berkisar antara 0,13% sampai dengan 10,2%, terendah di Provinsi Sulawesi Utara dan tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat. Rincian Angka Melek Huruf (persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf) menurut provinsi dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 1.18.

Indikator angka partisipasi merupakan indikator pendidikan yang mengukur tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Ada tiga jenis indikator yang memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APS merupakan persentase jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dibagi dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang masih bersekolah di semua jenjang pendidikan. APS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK dan 19-24 tahun mewakili umur setingkat perguruan tinggi. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah.

GAMBAR 1.14

PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2011 - 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Gambar 1.14 memperlihatkan APS tahun 2011 sampai dengan 2015 untuk tiap kelompok umur sekolah cenderung meningkat. Semakin tinggi kelompok umur maka tingkat partisipasi sekolahnya semakin kecil, hal ini dimungkinkan pada kelompok

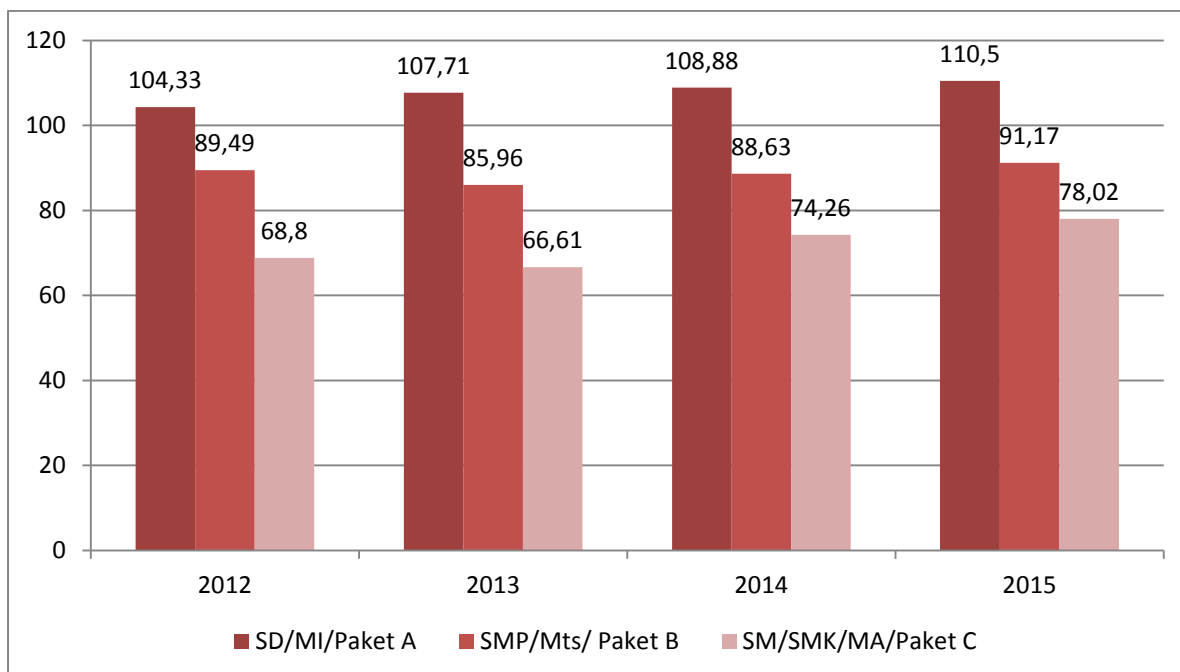
umur 16-18 tahun dan 19-24 tahun telah masuk dalam angkatan kerja dan bekerja. Peningkatan terbesar terjadi pada kelompok umur 16-18 tahun atau kelompok umur SMA/ sederajat, hal ini sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun. Peningkatan APS pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun juga terjadi dan sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun yang mendahului program wajib belajar 12 tahun. Rincian APS menurut provinsi dan kelompok umur tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Lampiran 1.19, sedangkan rincian APS menurut provinsi, jenis kelamin, dan kelompok umur tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 1.20.

APK merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Pada Gambar 1.15 diketahui nilai APK untuk SD/MI tahun 2012-2015 melebihi 100 persen yang menunjukkan masih adanya penduduk yang terlalu cepat sekolah (penduduk usia di bawah 7 tahun yang sudah bersekolah) atau terlambat bersekolah (penduduk usia lebih dari 12 tahun masih bersekolah di SD/ sederajat). Dari tahun 2012-2015 APK meningkat pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2015 nilai APK untuk SD/ sederajat sebesar 110,5%, SMP/ sederajat sebesar 91,17%, SMA/ sederajat sebesar 78,02%. Rincian APK menurut provinsi tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Lampiran 1.21. Secara umum APK penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki di semua jenjang pendidikan, kecuali SD/ sederajat. Hal ini menunjukkan lebih banyak penduduk perempuan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Rincian APK menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2015 terdapat pada Lampiran 1.22.

GAMBAR 1.15

PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN TAHUN 2012 – 2015



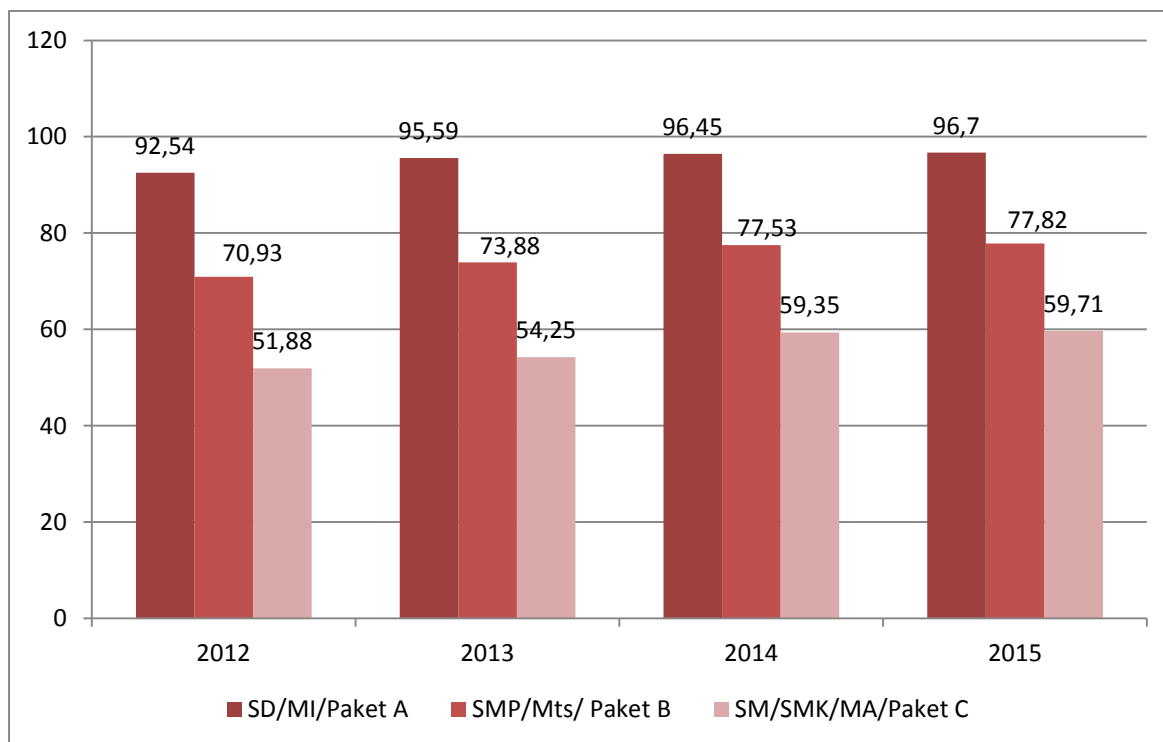
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Indikator pendidikan lainnya yaitu Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Berbeda dengan APK, APM menggunakan batasan kelompok umur. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Pada Gambar 1.16, tahun 2015 nilai APM untuk SD/ sederajat sebesar 96,7%, SMP/ sederajat sebesar 77,82% dan SMA/ sederajat sebesar 59,71%. Kondisi ini terus meningkat pada semua jenjang pendidikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Nilai APM lebih mencerminkan kondisi partisipasi sekolah dibandingkan nilai APK. Rincian APM menurut provinsi tahun 2012-2015 terdapat pada Lampiran 1.23.

GAMBAR 1.16

PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN TAHUN 2011 – 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, sebagai ukuran kualitas hidup, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat (dimensi kesehatan) digunakan Angka Harapan Hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Sedangkan untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak, digunakan indikator Kemampuan Daya Beli (*purchasing power parity*) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita (PDB).

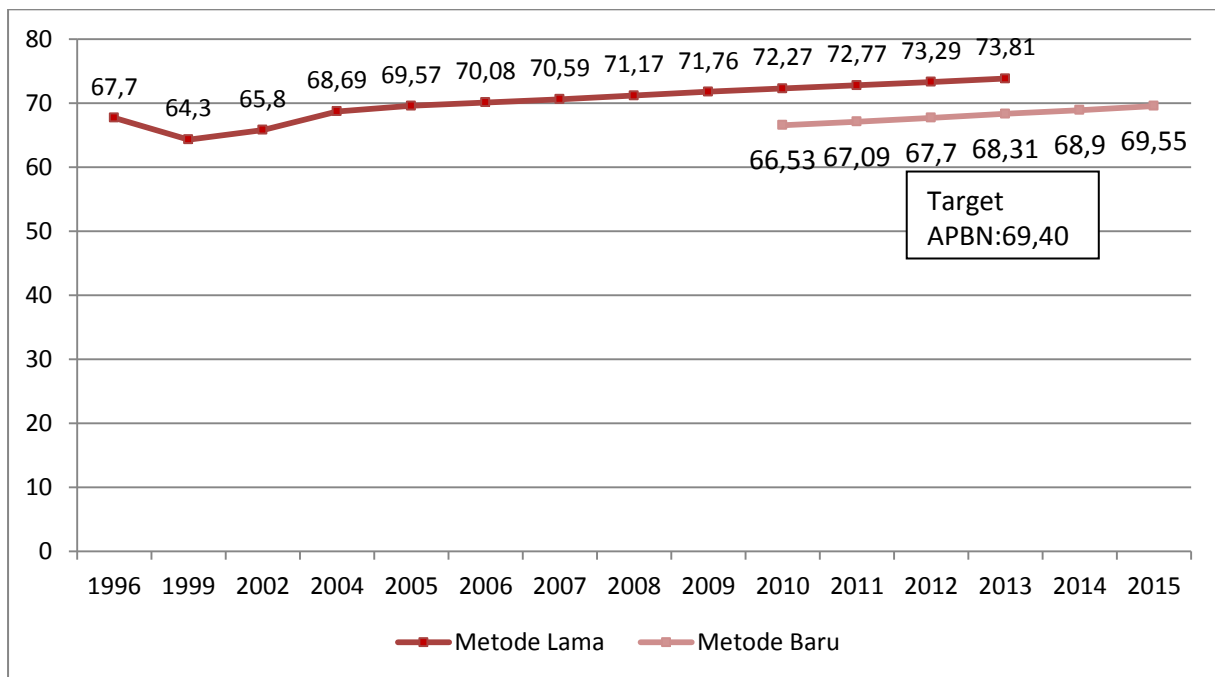
Pada tahun 2014 terjadi perubahan metodologi IPM. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dengan metode lama (1996-2013) maupun dengan metode baru (2010-2015). Dengan metode baru selama periode 2010-2015, nilai IPM Indonesia telah meningkat

3,02 poin, yaitu dari 66,53 tahun 2010 menjadi 69,55 pada tahun 2015. Bila dilihat berdasarkan target APBN, yang menargetkan IPM sebesar 69,40 sudah mencapai target (IPM 2015=69,55). Akselerasi yang tinggi diduga merupakan salah satu penyebab tercapainya target APBN tersebut. Pada tahun 2015, IPM Indonesia tumbuh 0,94% atau bertambah 0,65 poin dibandingkan IPM tahun 2014. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,87% dan merupakan pertumbuhan tertinggi selama 2010-2015.

GAMBAR 1.17

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA TAHUN 1996 - 2015

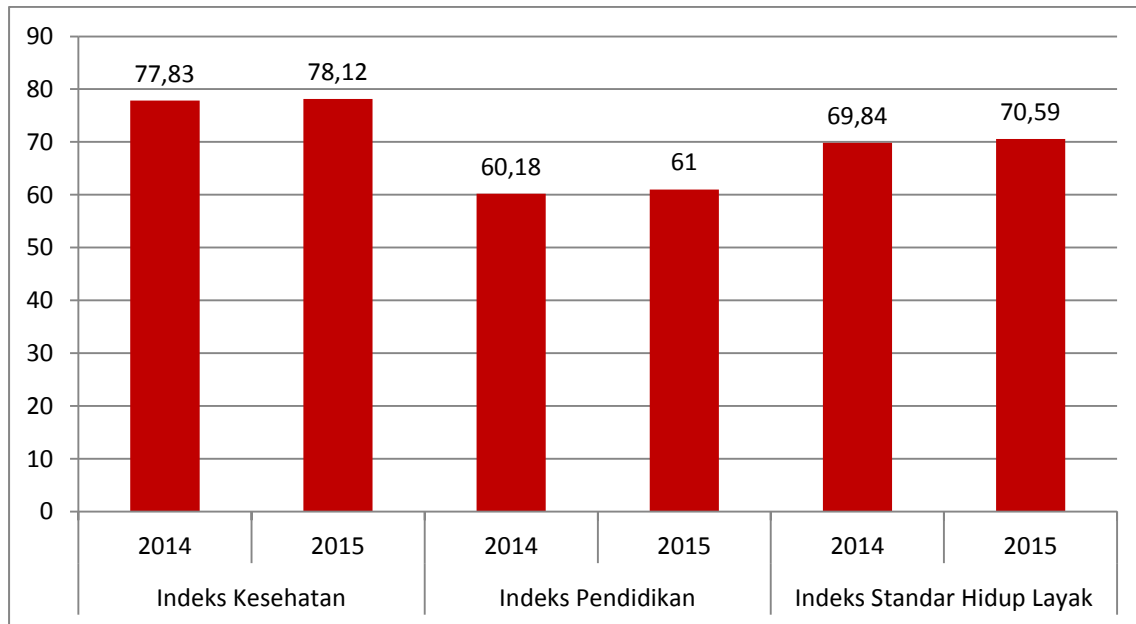


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Pertumbuhan IPM yang tinggi pada tahun 2015 didorong oleh peningkatan semua indeks komponen pembentuknya. Indeks pendidikan merupakan komponen IPM yang mengalami akselerasi paling tinggi. Pada tahun 2015 indeks pendidikan mencapai 61 atau meningkat 0,82 poin dari tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan indeks standar hidup layak yang mengalami peningkatan 0,75 poin. Sementara itu indeks kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup saat lahir peningkatannya yang tidak terlalu signifikan.

GAMBAR 1.18

KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA TAHUN 1996 - 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Pada periode 2014-2015, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Nusa Tenggara Barat (1,37%), Jawa Timur (1,19%) dan Sulawesi Barat (1,16%). Sebaliknya pada periode yang sama, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling lambat, yaitu Kalimantan Utara (0,17%), Maluku (0,46%) dan Kalimantan Timur (0,47%).

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

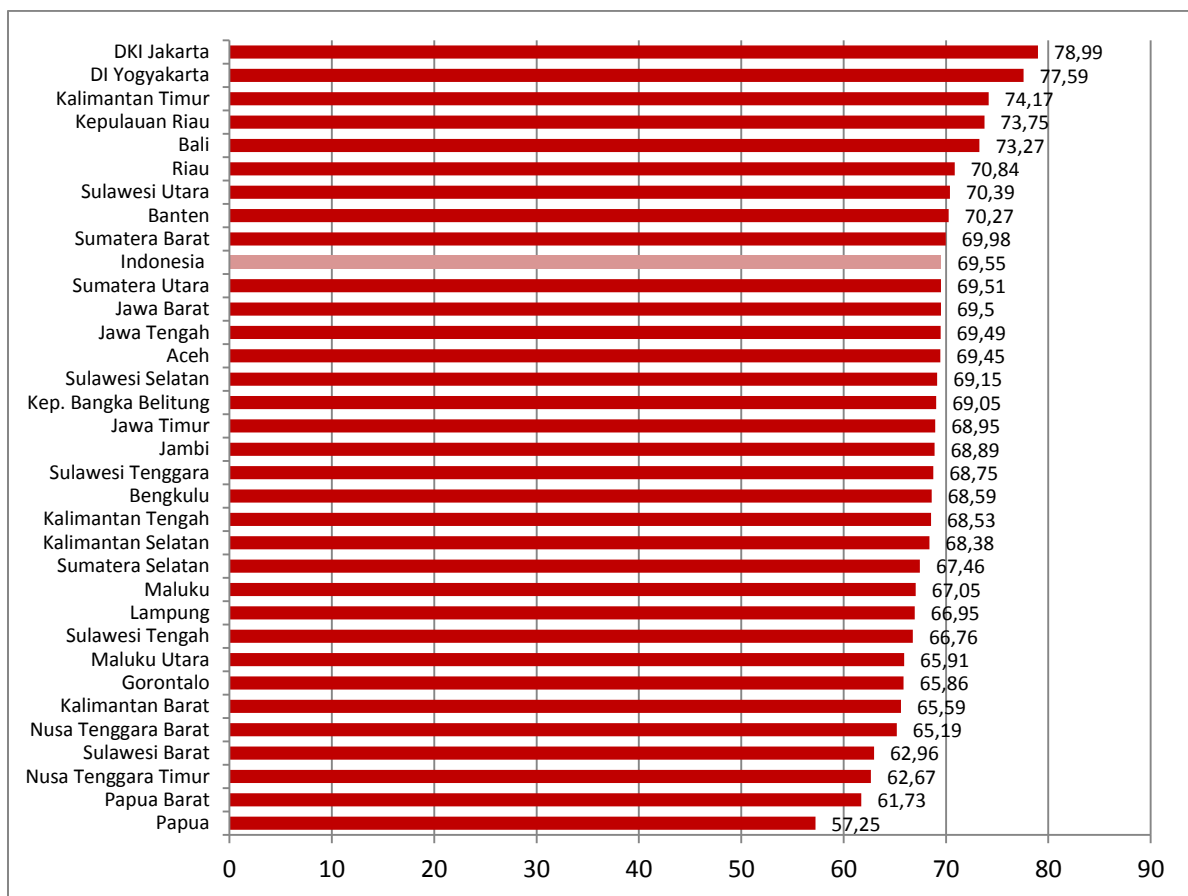
- $IPM < 60$: IPM rendah
- $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang
- $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi
- ≥ 80 : IPM sangat tinggi

Gambar 1.17 menunjukkan nilai IPM menurut provinsi tahun 2015. Berdasarkan pembagian tersebut, belum ada provinsi di Indonesia yang mempunyai nilai IPM kategori sangat tinggi. Ada 8 provinsi (23,53%) masuk dalam kategori IPM tinggi, 25 provinsi (73,53%) masuk kategori IPM sedang. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2015, masih terdapat satu provinsi di Indonesia masuk dalam kategori IPM rendah yaitu Papua. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemajuan pembangunan khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Provinsi dengan peringkat IPM tertinggi yaitu DKI Jakarta. Sejak pertama kali dihitung hingga tahun 2013, capaian IPM Provinsi DKI Jakarta selalu paling tinggi di antara provinsi lainnya. Ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian serta kemudahan akses terhadap semua sarana tersebut membuat Provinsi DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendorong tingginya capaian pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta.

GAMBAR 1.19

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015



BAB II

SARANA KESEHATAN



Bab II

SARANA KESEHATAN

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Sarana kesehatan yang diulas pada bagian ini terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan, sarana kefarmasian dan alat kesehatan, dan institusi pendidikan kesehatan milik pemerintah yang menghasilkan tenaga kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibahas pada bagian ini terdiri dari Puskesmas dan rumah sakit.

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

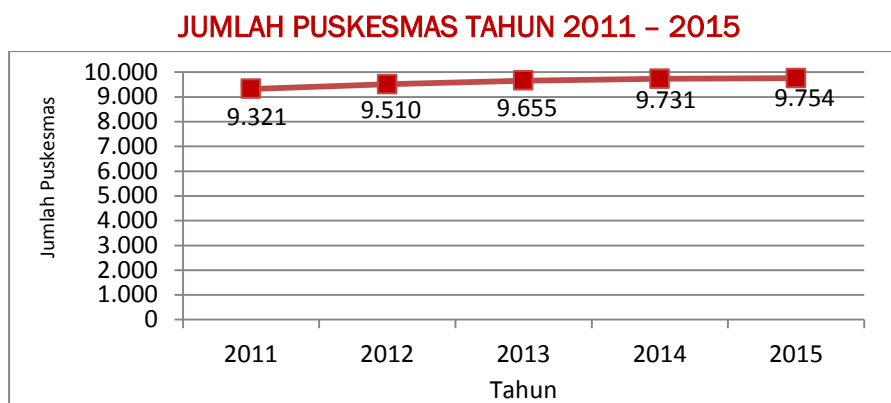
Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan Sehat. Selain melaksanakan tugas tersebut, Puskesmas memiliki fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama serta sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan

yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Jumlah Puskesmas di Indonesia sampai dengan Desember 2015 sebanyak 9.754 unit, yang terdiri dari 3.396 unit Puskesmas rawat inap dan 6.358 unit Puskesmas non rawat inap. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2014 yaitu sebanyak 9.731 unit, dengan jumlah Puskesmas rawat inap sebanyak 3.378 unit dan Puskesmas non rawat inap sebanyak 6.353 unit. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah Puskesmas yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

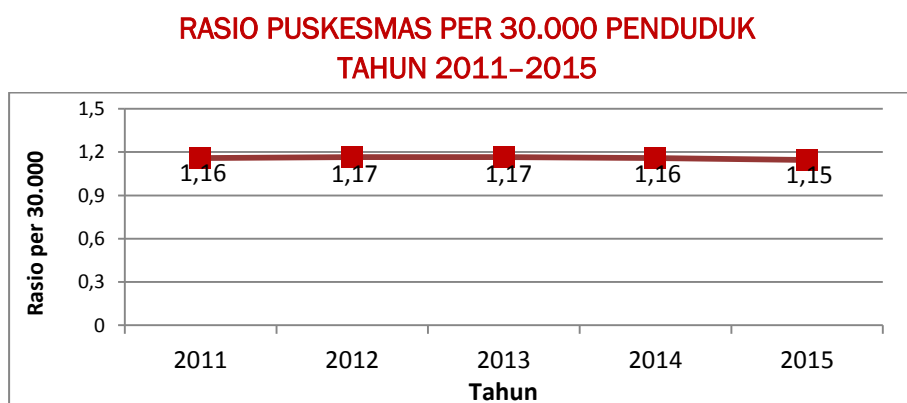
GAMBAR 2.1



Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2016

Sejak tahun 2011 jumlah Puskesmas semakin meningkat, yaitu sebanyak 9.321 unit menjadi 9.754 unit pada tahun 2015. Namun demikian, peningkatan jumlah Puskesmas tidak secara langsung menggambarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di suatu wilayah. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dapat dilihat secara umum oleh indikator rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk cenderung meningkat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, namun menurun pada tahun 2014 sebesar 1,16 dan tahun 2015 sebesar 1,15. Hal ini disebabkan laju pertambahan jumlah Puskesmas lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk.

GAMBAR 2.2

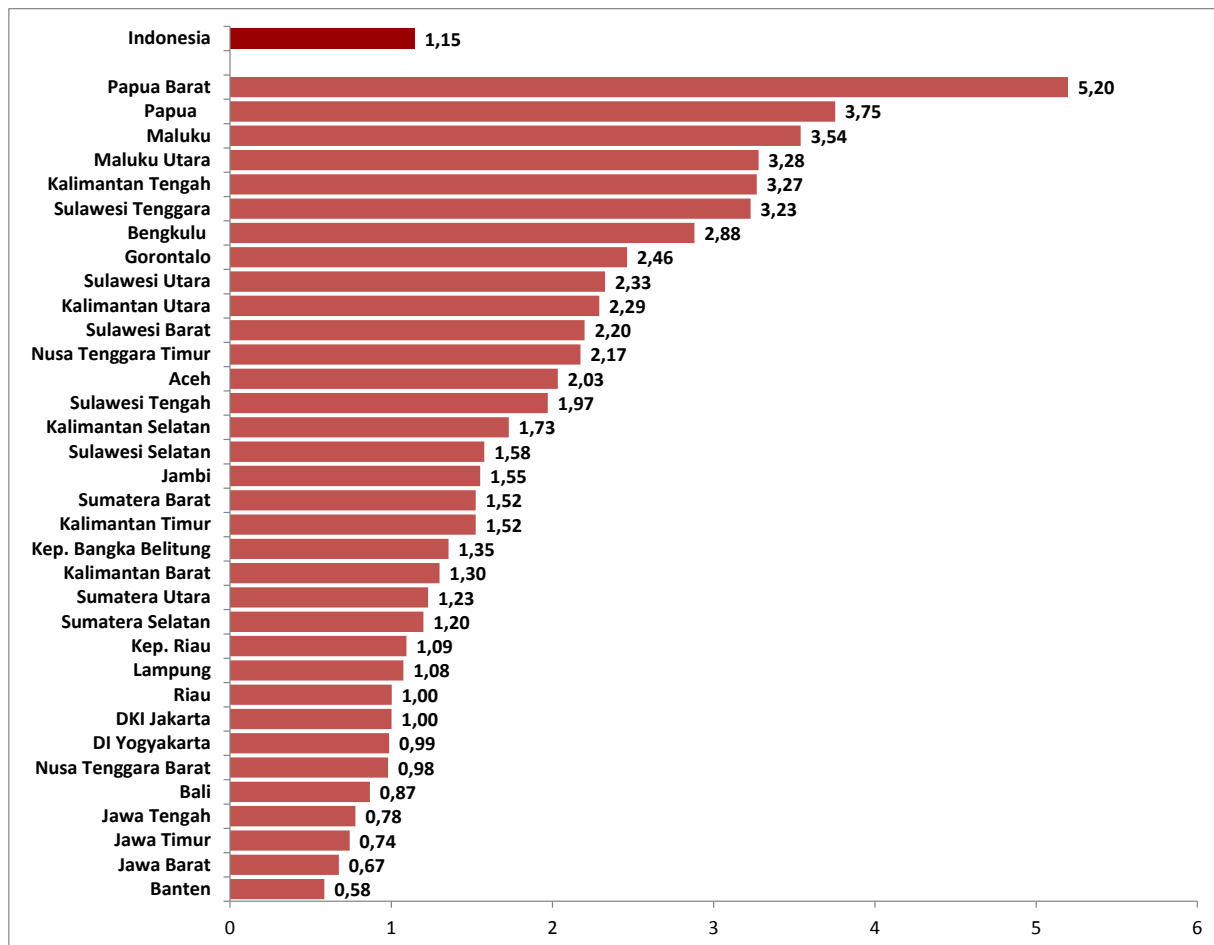


Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2016

Provinsi dengan rasio Puskesmas tertinggi yaitu Papua Barat sebesar 5,20 per 30.000 penduduk, sedangkan Banten memiliki rasio terendah sebesar 0,58 per 30.000 penduduk. Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Sebagai contoh, tiga provinsi dengan rasio tertinggi seluruhnya berada di wilayah timur yaitu Papua Barat, Maluku, dan Papua. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah penduduk yang relatif sedikit sedangkan wilayah kerja yang luas.

GAMBAR 2.3

**RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK DI INDONESIA
TAHUN 2015**



Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2016

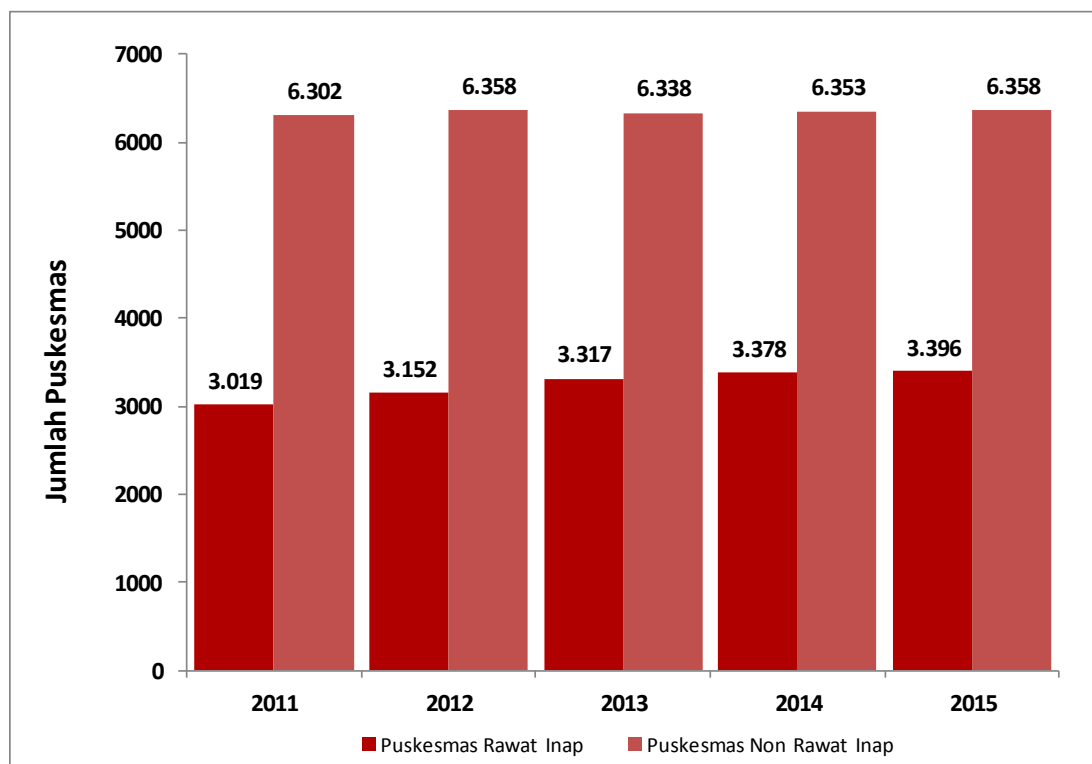
Selain Banten, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah juga memiliki rasio rendah yaitu sebesar 0,54, 0,67 dan 0,74 per 30.000 penduduk. Selain 3 provinsi tersebut, provinsi lainnya di Pulau Jawa juga memiliki rasio Puskesmas yang rendah. Hal tersebut disebabkan jumlah dan kepadatan populasi yang tinggi. Selain berasal dari sektor pemerintah, pelayanan kesehatan di Pulau Jawa juga didukung oleh sektor swasta, sehingga pemenuhan pelayanan kesehatan tidak hanya berasal dari pelayanan kesehatan dasar.

Namun demikian, kondisi seperti ini tetap harus diperhatikan, karena walaupun kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dapat dipenuhi oleh sektor swasta, suatu wilayah tetap membutuhkan entitas yang berperan sebagai penanggungjawab upaya kesehatan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Upaya kesehatan perseorangan yang diberikan terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk Puskesmas tertentu jika dianggap diperlukan. Meskipun pelayanan kesehatan masyarakat merupakan inti dari Puskesmas, pelayanan kesehatan perseorangan juga menjadi perhatian dari pemerintah. Bagi daerah yang termasuk Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK), Dana Alokasi Khusus (DAK) digelontorkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota untuk pembangunan Puskesmas pembantu (Pustu) dan Puskesmas serta peningkatan Puskesmas non rawat inap menjadi Puskesmas rawat inap. Bagi daerah di luar kategori DTPK, DAK bisa digunakan untuk rehabilitasi Puskesmas/rumah dinas, dan peningkatan kemampuan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED).

Berikut ini disajikan perkembangan jumlah Puskesmas rawat inap dan non rawat inap dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

GAMBAR 2.4
JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP
TAHUN 2011 – 2015



Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2016

Jumlah Puskesmas rawat inap selama lima tahun terakhir terus meningkat, yaitu sebanyak 3.019 unit pada tahun 2011, lalu meningkat menjadi 3.396 unit pada tahun 2015. Jumlah Puskesmas non rawat inap juga mengalami peningkatan, yaitu 6.302 unit pada tahun 2011 menjadi 6.358 unit pada tahun 2015. Namun, jika dilihat per tahun jumlah Puskesmas non rawat inap pada tahun 2013 menurun dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2014.

Selain memberikan pelayanan kesehatan ibu, anak, gizi, promosi kesehatan serta penyelenggaraan Puskesmas PONEB, Puskesmas juga memberikan layanan terkait berbagai program kesehatan lainnya, yaitu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan olahraga, dan tatalaksana kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA). Bentuk pelayanan kesehatan tersebut diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah kerja. Sebagai contoh upaya kesehatan kerja dibutuhkan pada Puskesmas dengan wilayah kerja yang memiliki banyak pusat industri. Gambaran lebih rinci tentang jumlah dan jenis Puskesmas menurut provinsi terdapat pada Lampiran 2.1 dan Lampiran 2.2.

1. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Kerja

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab XII Kesehatan Kerja, Pasal 164-166 menyebutkan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Selain itu, pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan baik pada sektor formal (usaha besar dan menengah) maupun sektor informal (usaha mandiri/individu, rumah tangga, mikro dan kecil).

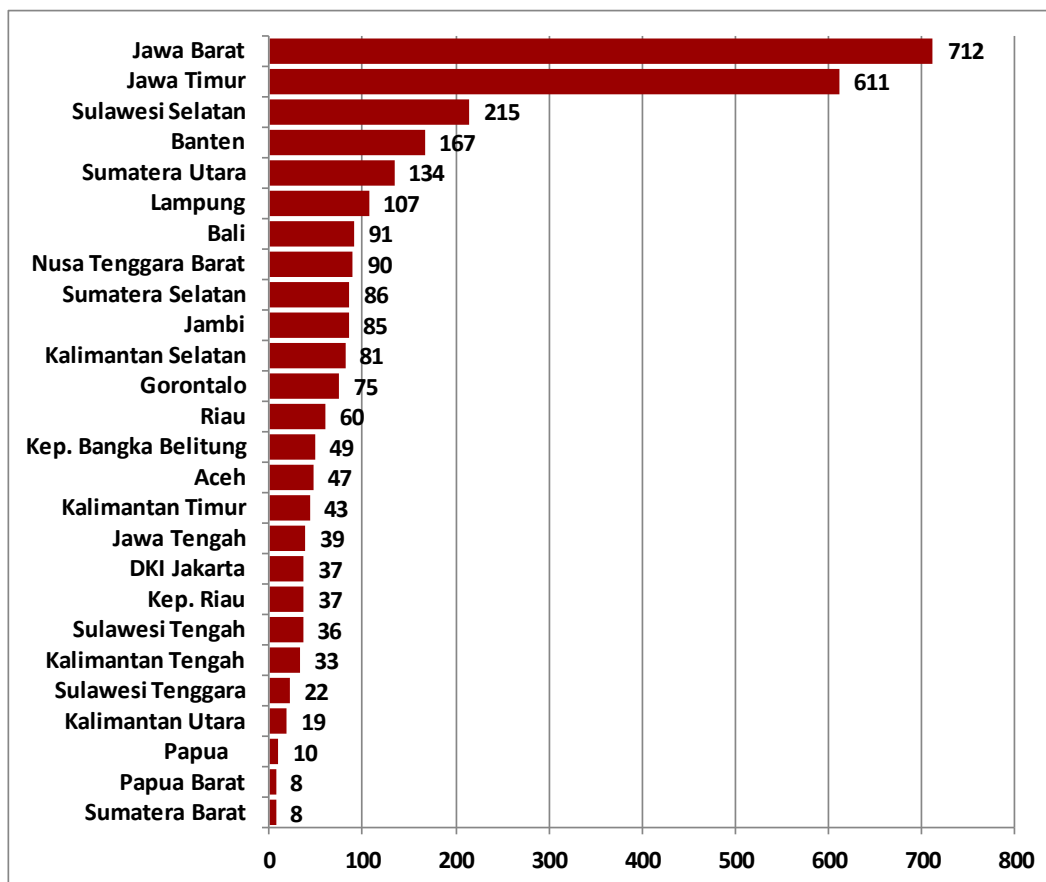
Puskesmas memiliki peran strategis dalam upaya kesehatan kerja kedua sektor tersebut, utamanya pada sektor informal. Upaya kesehatan kerja di Puskesmas diselenggarakan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada di wilayah Puskesmas atau spesifik lokal. Dengan demikian sampai saat ini upaya kesehatan kerja di Puskesmas lebih dititikberatkan pada wilayah industri.

Pembinaan upaya kesehatan kerja dilaksanakan melalui kegiatan penguatan pelayanan kesehatan kerja, yaitu :

1. Pelatihan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam bidang kesehatan kerja,
2. Pelatihan diagnosa Penyakit Akibat Kerja (PAK),
3. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan bidang kesehatan kerja,
4. Gerakan pekerja perempuan sehat dan produktif termasuk kesehatan reproduksi di tempat kerja dan pembinaan pelayanan kesehatan kerja di sektor informal dan formal termasuk perkantoran.
5. Pembinaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan fokus kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

GAMBAR 2.5

**JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
DI INDONESIA TAHUN 2015**



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Berdasarkan Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja (LBKP) di Puskesmas, jumlah Puskesmas yang telah menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di internal Puskesmas dan telah melaksanakan kegiatan baik promotif, preventif, kuratif ataupun rehabilitatif terhadap pekerja yang ada di wilayah kerjanya pada tahun 2015 adalah sebanyak 2.902 Puskesmas. Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah Puskesmas terbanyak yang telah menyelenggarakan kesehatan kerja dasar, yaitu sejumlah 712 Puskesmas dan 611 Puskesmas.

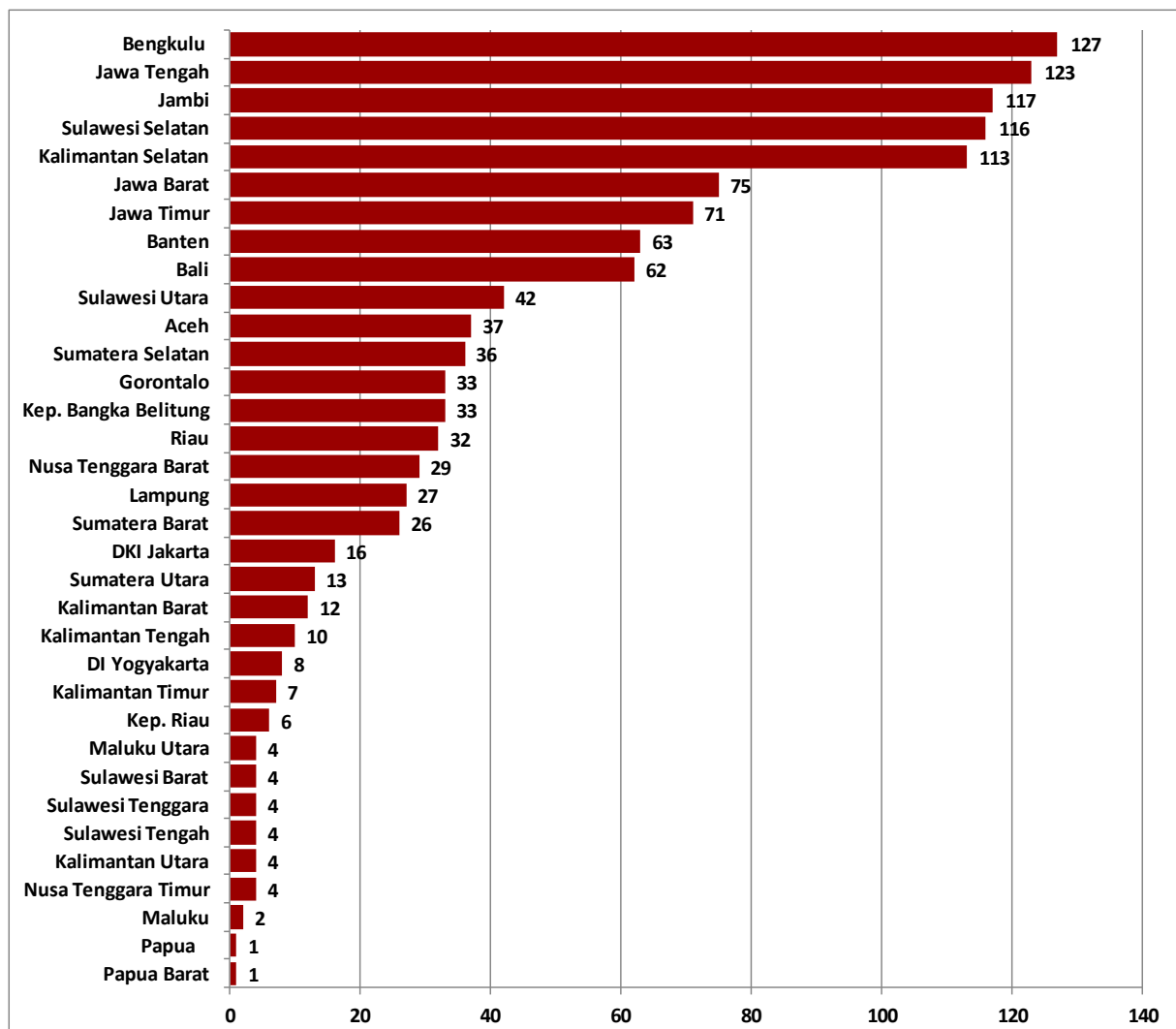
2. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Olahraga

Upaya kesehatan olahraga diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. Kesehatan olahraga merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, prestasi kerja dan prestasi olahraga melalui aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009. Upaya kesehatan olahraga dapat dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas maupun pelayanan kesehatan rujukan.

Upaya kesehatan olahraga yang diselenggarakan di Puskesmas meliputi pembinaan dan pelayanan kesehatan olahraga. Pembinaan kesehatan olahraga berupa pendataan kelompok, pemeriksaan kesehatan, dan penyuluhan kesehatan olahraga. Pembinaan tersebut ditujukan pada kelompok olahraga di sekolah, klub jantung sehat, Posyandu usia lanjut, kelompok senam ibu hamil, kelompok senam diabetes, kelompok senam pencegahan osteoporosis, pembinaan kebugaran jasmani jemaah calon haji, *fitness center*, dan kelompok olahraga/latihan fisik lain. Pelayanan kesehatan olahraga berupa konsultasi kesehatan olahraga, pengukuran tingkat kebugaran jasmani, penanganan cedera olahraga akut, dan sebagai tim kesehatan pada event olahraga.

GAMBAR 2.6

JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN OLARAHAGA DI INDONESIA TAHUN 2015



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Gambar 2.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Provinsi Bengkulu memiliki Puskesmas terbanyak yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya yaitu sejumlah 127 Puskesmas. Sementara itu, Papua dan Papua Barat memiliki Puskesmas dengan pelayanan kesehatan olahraga paling sedikit, masing-masing hanya 1 Puskesmas. Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 diharapkan pada tahun 2015 terdapat 20% Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya. Namun, pada tahun 2015 berdasarkan Laporan Bulanan Kesehatan Olahraga (LBKO) di Puskesmas terdapat 1.262 Puskesmas atau sebesar 12,9% Puskesmas yang telah melaksanakan kegiatan olahraga, sehingga belum mencapai target Renstra.

3. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer

Pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan tradisional dengan meningkatkan kelembagaan struktur yang menangani bidang pelayanan kesehatan tradisional melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Per/Menkes/2010, yaitu Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer, dibawah naungan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Pelayanan kesehatan tradisional berperan dalam siklus kehidupan atau *continuum of care* sejak dalam masa kandungan sampai usia lanjut, diberikan baik dengan metode keterampilan maupun ramuan. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional menyatakan bahwa pelayanan kesehatan tradisional dibagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional empiris, pelayanan kesehatan tradisional komplementer dan pelayanan kesehatan tradisional integrasi.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer menetapkan target sasaran Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, dimana pada tahun 2015 diharapkan sebesar 15% Puskesmas telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional. Puskesmas telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini, yaitu :

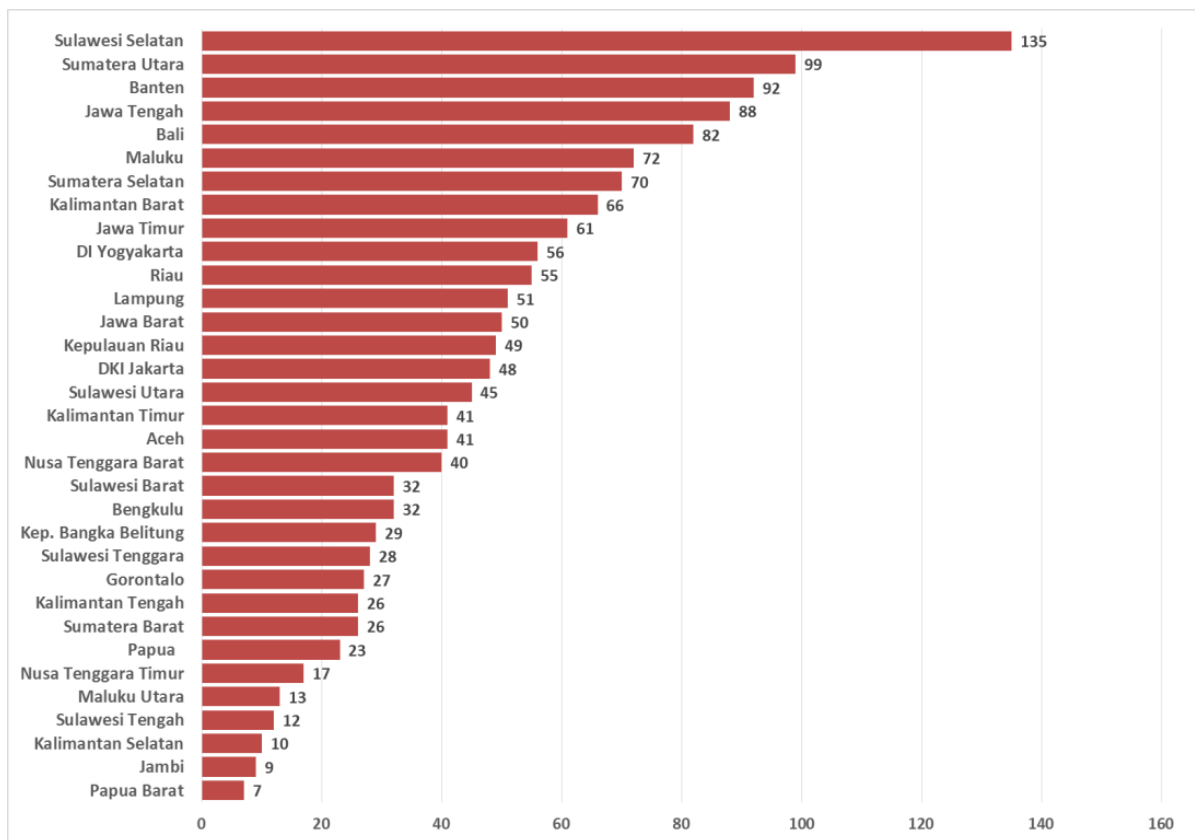
1. Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih pelayanan kesehatan tradisional.
2. Puskesmas melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan ketrampilan
3. Puskesmas melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi pengumpulan data kesehatan tradisional, fasilitas registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta pemantauan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer.

Untuk meningkatkan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional perlu dilakukan upaya yang komprehensif dan sistematis dalam rencana aksi sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019.

Pada tahun 2015 terdapat 1.532 Puskesmas yang telah menyelenggarakan kesehatan tradisional, atau 15,7%. dari 9.754 Puskesmas di 34 provinsi di Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa target Renstra pada tahun 2015 telah tercapai.

GAMBAR 2.7

**JUMLAH PUSKESMAS YANG TELAH MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
DI INDONESIA TAHUN 2015**



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Jumlah Puskesmas yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional tertinggi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 135 Puskesmas, diikuti oleh Sumatera Utara sebanyak 99 Puskesmas, dan Banten sebanyak 92 Puskesmas. Provinsi Papua Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan jumlah Puskesmas yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional paling sedikit, yaitu masing-masing sebanyak 7, 9, dan 10 Puskesmas.

Gambaran menurut provinsi mengenai rumah sakit yang dilatih akupuntur dan herbal, serta jumlah Puskesmas, kabupaten/kota, dan persentase kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dapat dilihat pada Lampiran 2.3 dan Lampiran 2.4.

B. RUMAH SAKIT

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan kepemilikan, yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

1. Jenis Rumah Sakit

Pada tahun 2015, rumah sakit di Indonesia sebanyak 2.488 RS yang terbagi menjadi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. Rumah sakit publik di Indonesia dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/POLRI, kementerian lain serta swasta non profit (organisasi keagamaan dan organisasi sosial). Jumlah rumah sakit publik di Indonesia sampai dengan tahun 2015 sebanyak 1.593 RS, yang terdiri dari 1.341 Rumah Sakit Umum (RSU) dan 252 Rumah Sakit Khusus (RSK).

Berbeda dengan rumah sakit publik, rumah sakit privat dikelola oleh BUMN dan swasta (perorangan, perusahaan dan swasta lainnya). Pada tahun 2015 terdapat 895 rumah sakit privat di Indonesia, yang terdiri dari 608 RSU dan 287 RSK.

Jumlah rumah sakit publik maupun privat menunjukkan peningkatan pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2014, dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2015 sesuai yang ditampilkan pada Tabel 2.1.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

TABEL 2.1

**PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KEPEMILIKAN
DI INDONESIA TAHUN 2013 – 2015**

No	Pengelola/Keperilikan	2013	2014	2015
1	Publik			
	Kemkes dan Pemda	676	687	713
	TNI/Polri	159	169	167
	Kementerian Lain	3	7	8
	Swasta Non Profit	724	736	705
	Jumlah RS Publik	1.562	1.599	1.593
2	Privat			
	BUMN	67	67	62
	Swasta	599	740	833
	Jumlah RS Privat	666	807	895
	Total RS	2.228	2.406	2.488

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus pada tahun 2015 sebanyak 1.949 RSU dan 539 RSK. Jumlah rumah sakit umum terus meningkat sejak tahun 2011, sedangkan jumlah rumah sakit khusus sedikit menurun pada tahun 2015. Perkembangan jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.8

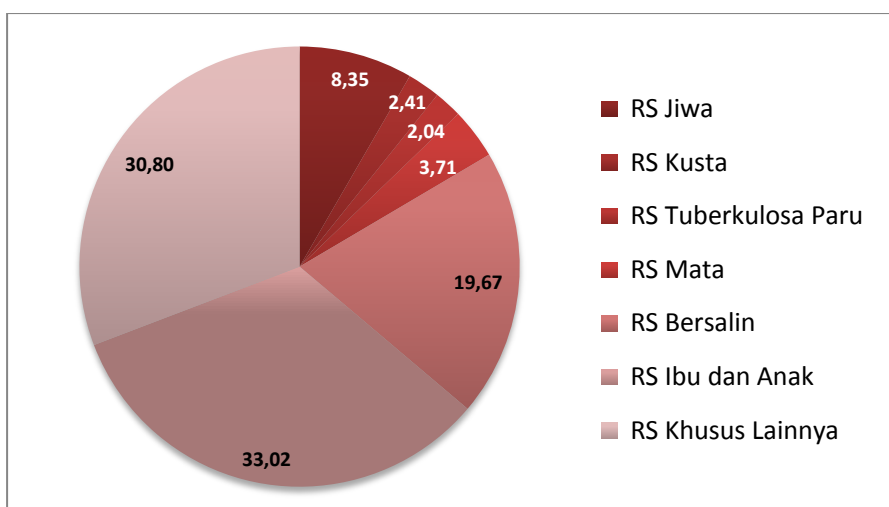
**PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS
DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2015**



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

GAMBAR 2.9

PERSENTASE RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK) MENURUT JENIS DI INDONESIA TAHUN 2015



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

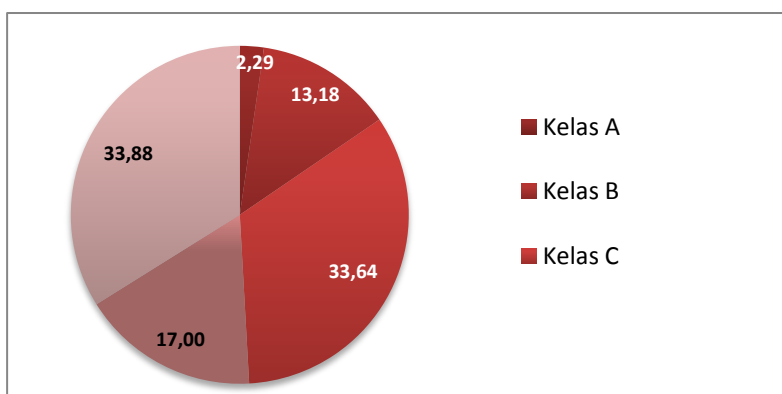
Gambar 2.9 di atas menunjukkan bahwa Rumah Sakit Ibu dan Anak merupakan RSK terbanyak di Indonesia, yaitu sebesar 33,02% dari 539 RSK. Selain itu, Rumah Sakit Bersalin juga memiliki proporsi yang cukup besar yaitu 19,67%. Sementara itu, Rumah Sakit Tuberkulosa Paru dan Rumah Sakit Kusta hanya sebesar 2,04% dan 2,41% dari seluruh RSK di Indonesia.

2. Kelas Rumah Sakit

Selain berdasarkan jenis pelayanannya, rumah sakit juga dikelompokkan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan menjadi Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D. Pada tahun 2015, terdapat 57 RS kelas A, 328 kelas B, 837 RS kelas C, 423 RS kelas D, dan sebanyak 843 unit RS lainnya belum ditetapkan kelas.

GAMBAR 2.10

PERSENTASE RUMAH SAKIT MENURUT KELAS DI INDONESIA TAHUN 2015



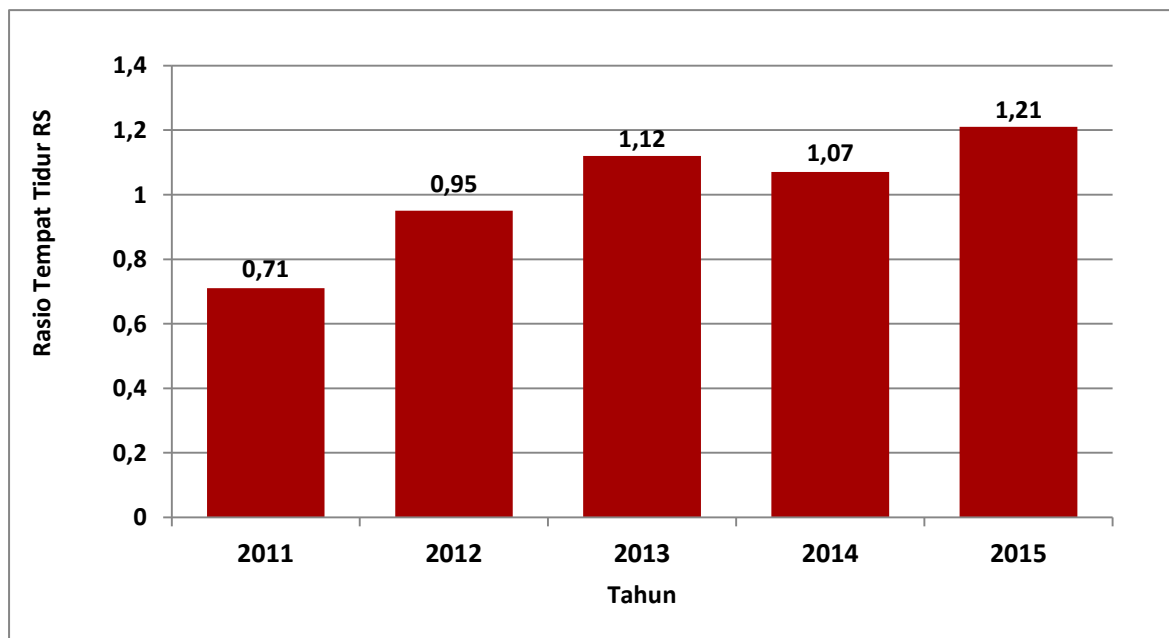
Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

3. Tempat Tidur Rumah Sakit

Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 1,21 per 1.000 penduduk. Rasio ini meningkat dibandingkan tahun 2014, yaitu sebesar 1,07 per 1.000 penduduk. Dengan peningkatan ini diharapkan kebutuhan tempat tidur dapat tercukupi. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 ditampilkan pada Gambar 2.11.

GAMBAR 2.11

**RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT
PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2015**

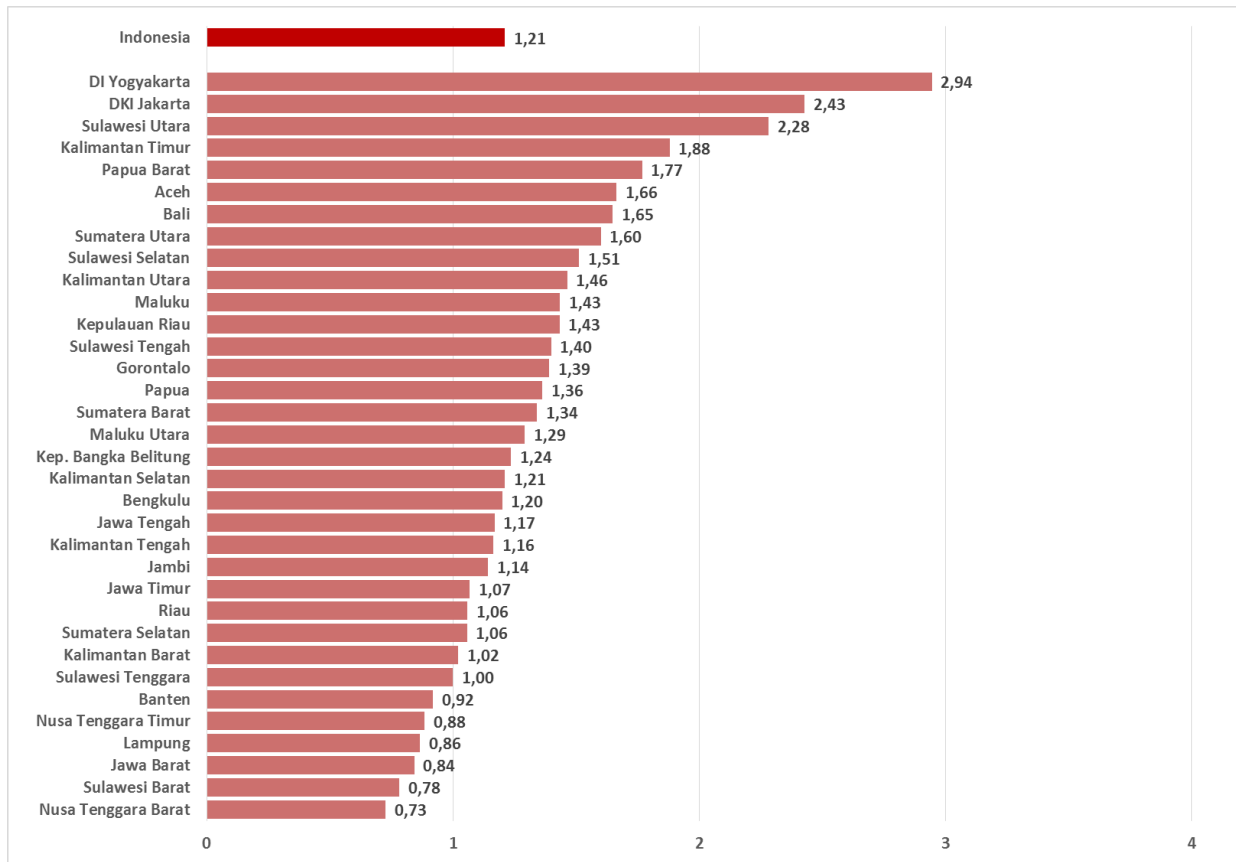


Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Walaupun rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2015 telah mencukupi, namun ketika dijabarkan per provinsi maka ditemukan masih ada enam provinsi dengan rasio tempat tidur terhadap penduduknya kurang mencukupi, yaitu Banten (0,92), Nusa Tenggara Timur (0,88), Lampung (0,86), Jawa Barat (0,84), Sulawesi Barat (0,78), dan Nusa Tenggara Barat (0,73). Rincian rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk selengkapnya disajikan pada Gambar 2.12.

GAMBAR 2.12

**RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT
PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2015**



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Rasio tempat tidur rumah sakit tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 2,94, DKI Jakarta sebesar 2,43, dan Sulawesi Utara sebesar 2,28. Informasi lebih rinci tentang rumah sakit menurut provinsi terdapat pada Lampiran 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, dan 2.9.

C. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

1. Sarana Produksi dan Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Ketersediaan farmasi dan alat kesehatan memiliki peran yang signifikan dalam pelayanan kesehatan. Akses masyarakat terhadap obat khususnya obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan demikian penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintah dan institusi pelayanan kesehatan baik publik maupun privat. Sebagai komoditi khusus, semua obat yang beredar harus terjamin keamanan, khasiat dan mutunya agar dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, selain meningkatkan jumlah tenaga pengelola yang terlatih, salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin mutu obat hingga diterima konsumen adalah menyediakan sarana

penyimpanan obat dan alat kesehatan yang dapat menjaga keamanan secara fisik serta dapat mempertahankan kualitas obat.

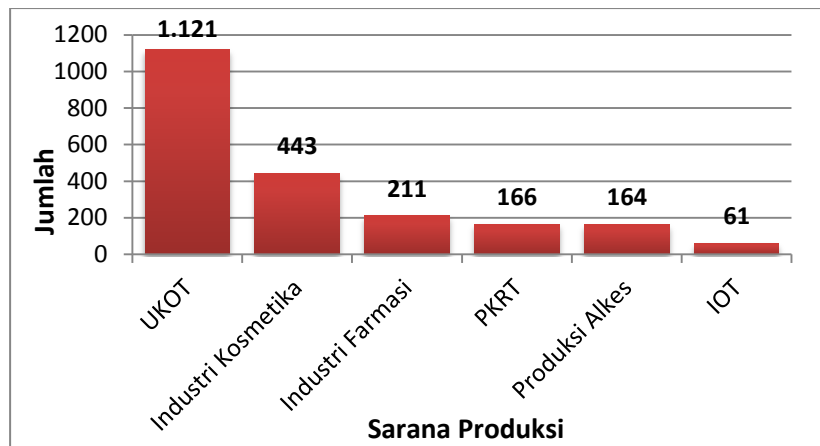
Salah satu kebijakan dalam Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatkan akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yaitu meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan atau penggunaan yang salah/tidak tepat serta tidak memenuhi mutu keamanan dan pemanfaatan yang dilakukan sejak proses produksi, distribusi hingga penggunaannya di masyarakat. Cakupan sarana produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional/Usaha Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT), Produksi Alat Kesehatan (Alkes) dan Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan Industri Kosmetika.

Sarana produksi dan distribusi di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal persebaran jumlah. Sebagian besar sarana produksi maupun distribusi berlokasi di Pulau Sumatera dan Jawa sebesar 94,7% sarana produksi dan 77,0% sarana distribusi. Ketersediaan ini terkait dengan sumber daya yang dimiliki dan kebutuhan pada wilayah setempat. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam kebijakan untuk mengembangkan jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di wilayah Indonesia lainnya, sehingga terjadi pemerataan jumlah sarana tersebut di seluruh Indonesia. Selain itu, hal ini bertujuan untuk membuka akses keterjangkauan masyarakat terhadap sarana kesehatan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

Jumlah sarana produksi pada tahun 2015 sebesar 2.166 sarana. Provinsi dengan jumlah sarana produksi terbanyak adalah Jawa Barat, yaitu sebesar 504 sarana. Hal ini dapat disebabkan karena Jawa Barat memiliki populasi yang besar dan wilayah yang luas. Jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2015 terdapat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.13

**JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2015**

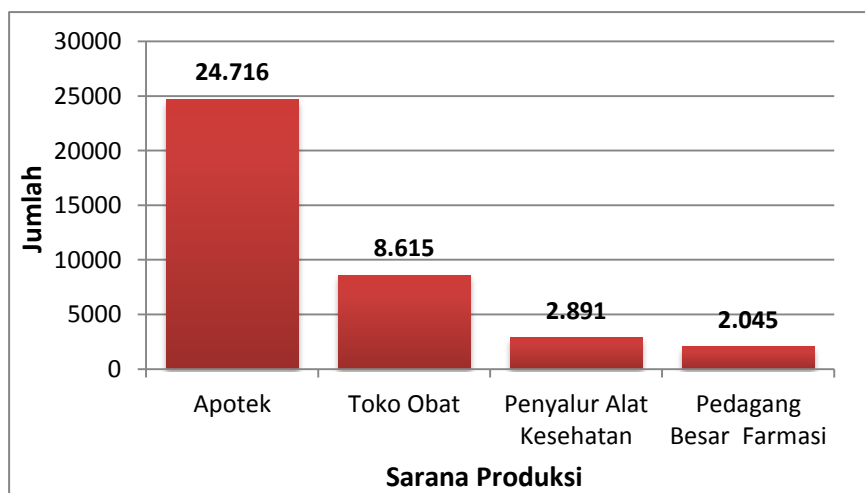


Sumber : Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang dipantau jumlahnya oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan antara lain Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2015 sebesar 38.267 sarana. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 35.566 sarana. Gambar berikut menyajikan jumlah sarana distribusi kefarmasian pada tahun 2015.

GAMBAR 2.14

**JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2014**



Sumber : Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Data lebih rinci mengenai jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian menurut provinsi terdapat pada Lampiran 2.16 dan Lampiran 2.17.

2. Ketersediaan Obat dan Vaksin

Dalam upaya peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan melalui tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah, Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator rencana strategis tahun 2015-2019 terkait program kefarmasian dan alat kesehatan, yaitu meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT). Indikator tercapainya sasaran hasil tersebut pada tahun 2015 yaitu persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 77%.

Pemantauan ketersediaan obat tahun 2015 digunakan untuk mengetahui kondisi tingkat ketersediaan obat di Puskesmas. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang. Di era otonomi daerah, pengelolaan obat merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan ke kabupaten/kota, kemudian didistribusikan ke Puskesmas tiap kabupaten/kota tersebut. Tidak adanya laporan secara periodik yang dikirim oleh Puskesmas, maka relatif sulit bagi pemerintah pusat untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Adanya data ketersediaan obat di provinsi atau kabupaten/kota akan mempermudah penyusunan prioritas bantuan maupun intervensi program di masa yang akan datang.

Untuk mendapatkan gambaran ketersediaan obat dan vaksin di Indonesia, dilakukan pemantauan ketersediaan obat dan vaksin. Obat yang dipantau ketersediaannya merupakan obat indikator yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar dan obat yang mendukung pelaksanaan program kesehatan. Jumlah *item* obat yang dipantau adalah 20 *item* obat dan vaksin. Pemantauan ketersediaan obat dan vaksin dilaksanakan kepada 1.328 Puskesmas terpilih. Pemilihan Puskesmas yang dipantau berdasarkan metode *proportional random sampling* berbasis provinsi sesuai jumlah Puskesmas dan rasio Puskesmas perawatan dan non perawatan.

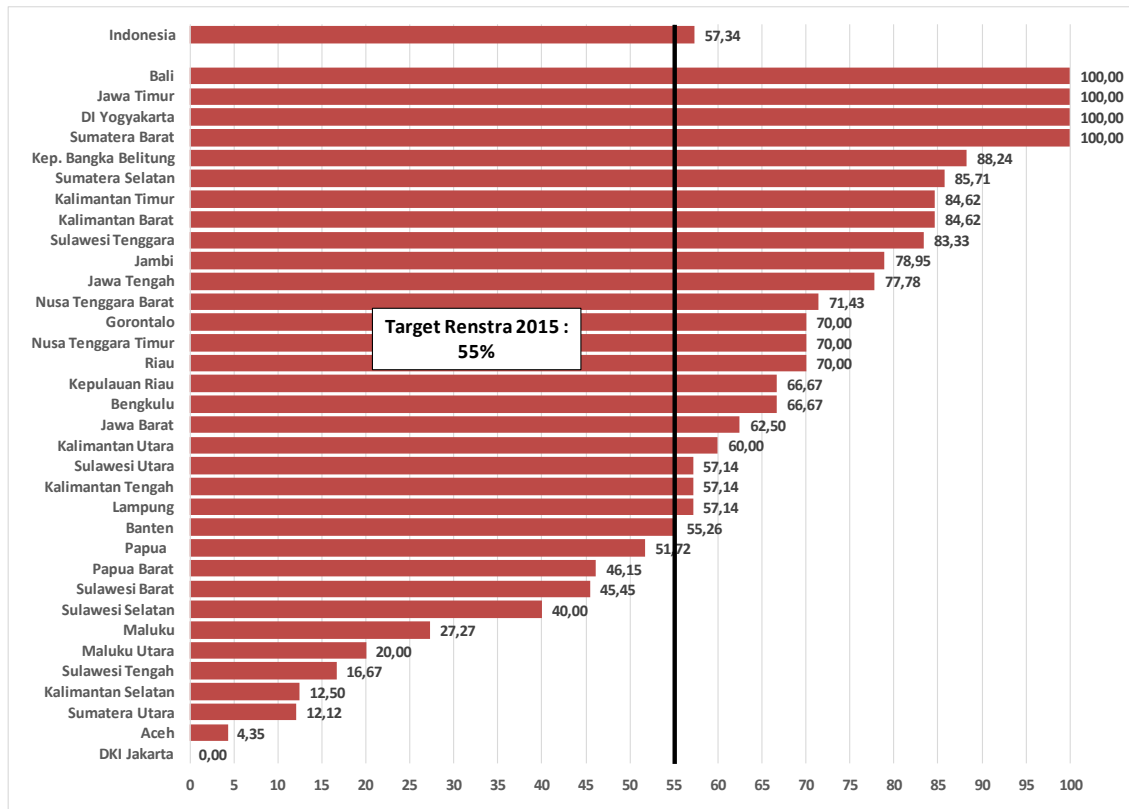
Berdasarkan data dan perhitungan yang dilakukan oleh Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan didapatkan bahwa 79,38% *item* obat dan vaksin esensial tersedia di Puskesmas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas telah mencapai target Renstra tahun 2015 yang sebesar 77%. Data dan informasi lebih rinci mengenai Puskesmas yang menyediakan 20 *item* obat dan vaksin terdapat pada Lampiran 2.18.

3. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan juga memantau instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar. Pada tahun 2015 di Indonesia terdapat 57,34% instalasi farmasi kabupaten/kota yang telah melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar. Penggunaan tersebut telah memenuhi target Renstra tahun 2015 yaitu sebesar 55%.

GAMBAR 2.15

PERSENTASE INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN SESUAI STANDAR DI INDONESIA TAHUN 2015



Sumber : Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar provinsi telah memenuhi target 55%, yaitu 23 provinsi (67,65%). Terdapat 11 provinsi yang belum mencapai target Renstra 2015. Data dan informasi lebih rinci mengenai instalasi farmasi kabupaten/kota yang telah melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar menurut provinsi terdapat pada Lampiran 2.19.

D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN

1. Jumlah Politeknik Kesehatan

Pembangunan kesehatan berkelanjutan membutuhkan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jenis, jumlah maupun kualitas. Untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas tentu saja dibutuhkan proses pendidikan yang berkualitas pula. Kementerian Kesehatan RI merupakan institusi dari sektor pemerintah yang berperan di dalam penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kesehatan melalui penjaminan mutu dan kompetensi lulusan institusi pendidikan tenaga kesehatan, dikeluarkan Surat Keputusan

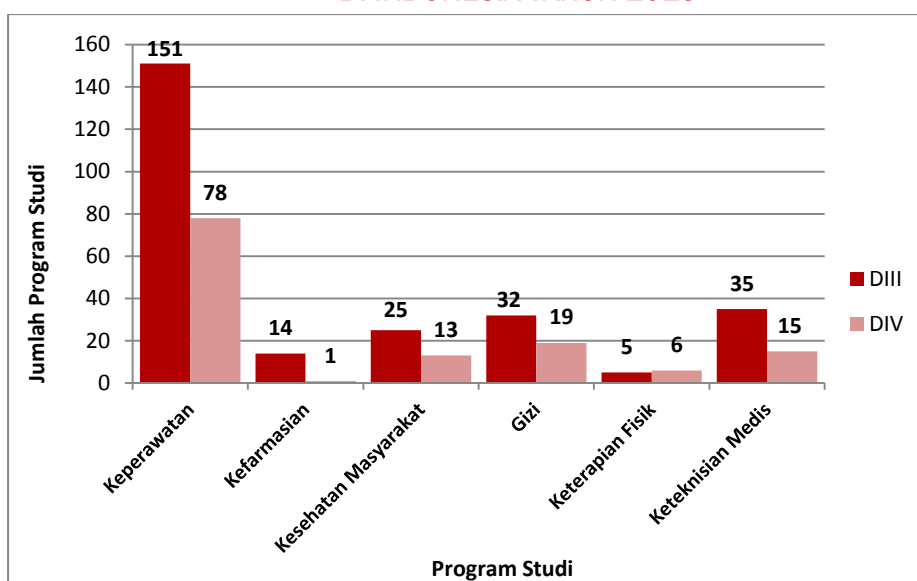
Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012. Dengan demikian, pembinaan akademik Politeknik Kesehatan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun pengaturan di luar akademik, yaitu pembinaan teknis tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Institusi pendidikan tenaga kesehatan selain tenaga medis terdiri dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan Non Politeknik Kesehatan (Non Poltekkes). Kementerian Kesehatan bertanggung jawab terhadap pembinaan teknis institusi Poltekkes. Sampai dengan Desember 2015 terdapat 38 Poltekkes di Indonesia, yang terdiri dari program studi strata Diploma IV sebanyak 132 jurusan/program studi, dan strata Diploma III terdiri dari 262 jurusan/program studi. Terdapat 6 kelompok jurusan/program studi di Poltekkes yaitu :

1. Keperawatan, yang terdiri dari keperawatan, kebidanan, dan keperawatan gigi.
2. Kefarmasian, yang terdiri dari farmasi.
3. Kesehatan masyarakat, yang terdiri dari kesehatan lingkungan.
4. Gizi.
5. Keterampilan fisik, yang terdiri dari fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, dan akupunktur.
6. Keteknisian medis, yang terdiri dari analis kesehatan, teknik elektromedik, teknik radiodiagnostik, dan ortotik prostetik.

GAMBAR 2.16

**JUMLAH PROGRAM STUDI POLTEKKES DIPLOMA III DAN IV
DI INDONESIA TAHUN 2015**



Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

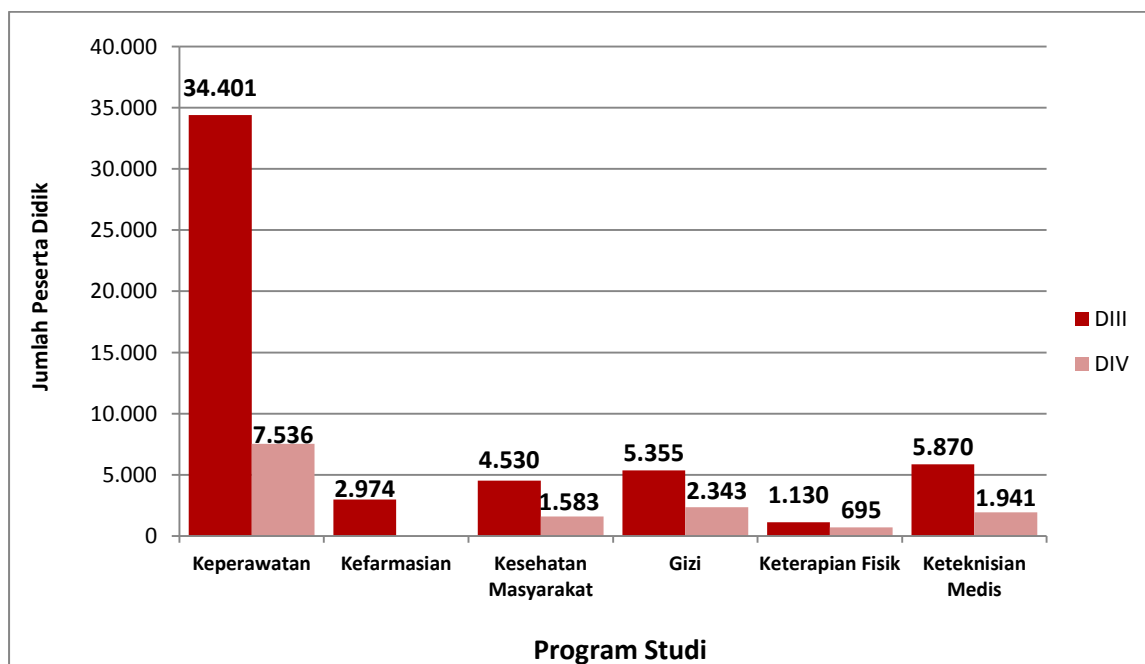
Program studi keperawatan merupakan program studi terbanyak pada Poltekkes di Indonesia, baik untuk jenjang Diploma II maupun Diploma IV, yaitu sebanyak 151 program studi untuk jenjang Diploma III (57,6%) dan 78 program studi untuk jenjang Diploma IV (59,4%). Keterampilan fisik merupakan program studi dengan jumlah paling sedikit, yaitu 5 program studi untuk jenjang Diploma III dan 6 program studi untuk jenjang Diploma IV. Sementara itu, untuk program studi kefarmasian pada jenjang Diploma IV hanya berjumlah 1 program studi, yaitu di Poltekkes Makassar. Data dan informasi lebih rinci mengenai jumlah program studi di institusi Poltekkes terdapat pada Lampiran 2.11 dan 2.13.

2. Peserta Didik

Peserta didik jenjang Diploma III pada seluruh Poltekkes di Indonesia sampai dengan Desember 2015 berjumlah 54.260 orang, sementara peserta didik jenjang Diploma IV berjumlah 14.098 orang. Jumlah peserta didik terbesar berasal dari program studi keperawatan, yaitu sebanyak 34.401 mahasiswa untuk jenjang Diploma III dan sebanyak 7.536 mahasiswa untuk jenjang Diploma IV.

GAMBAR 2.17

JUMLAH PESERTA DIDIK DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLTEKES DI INDONESIA TAHUN 2015



Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2015

Data dan informasi lebih rinci mengenai jumlah peserta didik di institusi Poltekkes terdapat pada Lampiran 2.12 dan 2.14.



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



Bab III

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) merupakan salah satu sub sistem dalam sistem kesehatan nasional yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya dan pelayanan kesehatan. Upaya dan pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral tinggi, keahlian, dan berwenang.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pada bab ini, akan dibahas mengenai SDMK terutama jumlah, rasio, registrasi, jumlah lulusan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan.

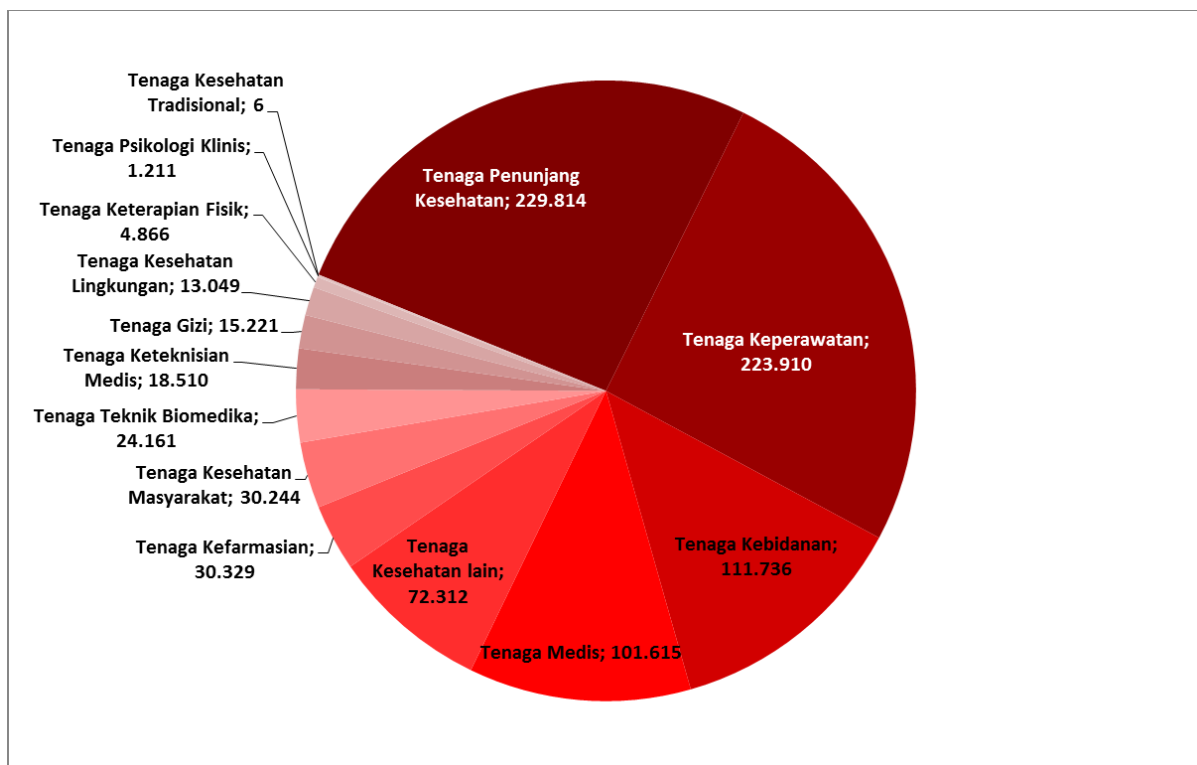
A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN

Tenaga di bidang kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi beberapa rumpun dan sub rumpun. Rumpun tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 adalah tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Pada tahun 2015, total SDM di Indonesia sebanyak 876.984 orang yang terdiri dari 647.170 orang tenaga kesehatan (73,8%) dan 229.814 orang tenaga penunjang kesehatan (26,2%). Tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyak pada tahun 2015 yaitu perawat sebanyak 223.910 orang atau 34,6% dari total tenaga kesehatan, sedangkan tenaga kesehatan dengan jumlah paling sedikit yaitu tenaga kesehatan tradisional sebanyak 6 orang atau 0,001% dari total tenaga kesehatan. Provinsi dengan tenaga kesehatan paling banyak terpusat di Pulau Jawa yaitu Jawa Tengah (76.819 orang), Jawa Timur (69.405 orang), dan Jawa Barat (66.152 orang). Provinsi dengan jumlah tenaga kesehatan paling sedikit yaitu Kalimantan Utara sebanyak 2.887 orang. Rincian lengkap mengenai rekapitulasi SDM di Indonesia dapat dilihat di Lampiran 3.1.

GAMBAR 3.1

REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2015



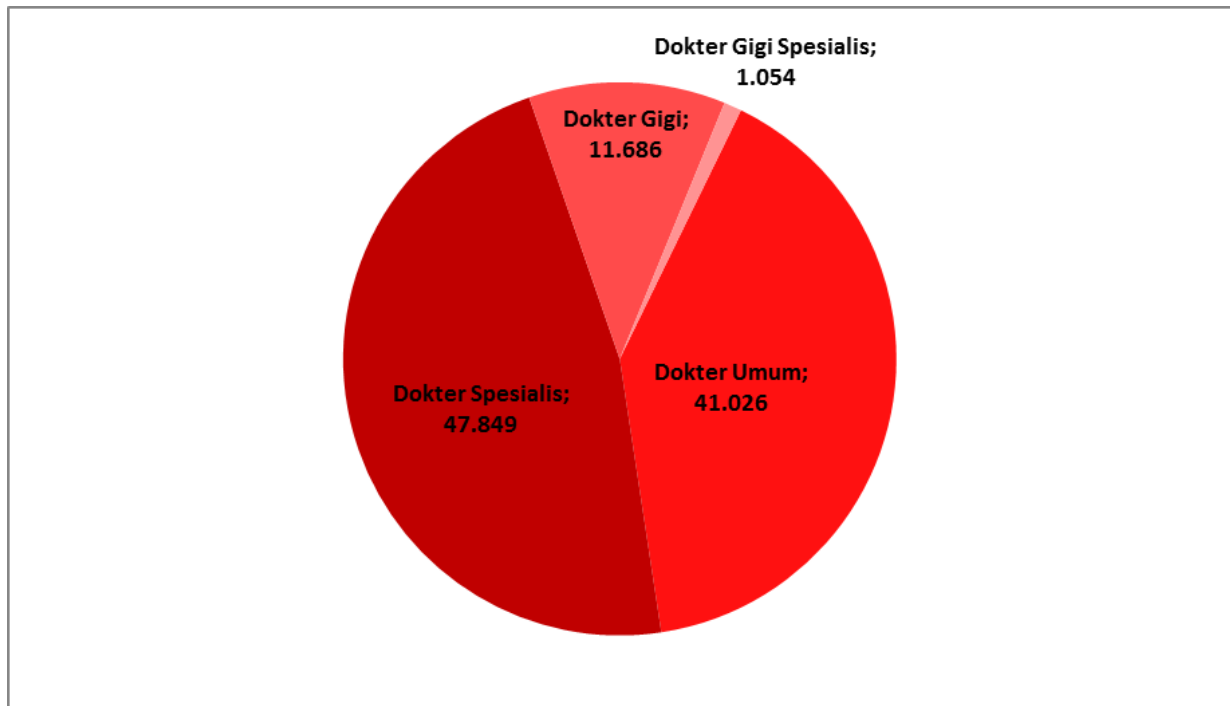
Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

Tenaga medis berdasarkan fungsi yaitu tenaga medis yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai fungsinya. Jumlah tenaga medis terbanyak yaitu dokter spesialis sebanyak 47.849 orang (47,1%). Dokter spesialis lebih banyak daripada dokter umum dimungkinkan karena banyak dokter umum yang bekerja di luar fungsi pelayanan medis, yaitu di bidang manajemen. Selain itu, data ini belum termasuk data dokter praktik mandiri. Sebanyak 54,2% tenaga medis berada di Pulau Jawa dengan jumlah terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat (14.272 orang), Jawa Timur (12.205 orang), dan Jawa Tengah (11.782 orang). Provinsi dengan tenaga

medis paling sedikit adalah Sulawesi Barat (310 orang), Kalimantan Utara (314 orang), dan Papua Barat (372 orang).

GAMBAR 3.2

JUMLAH TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2015



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

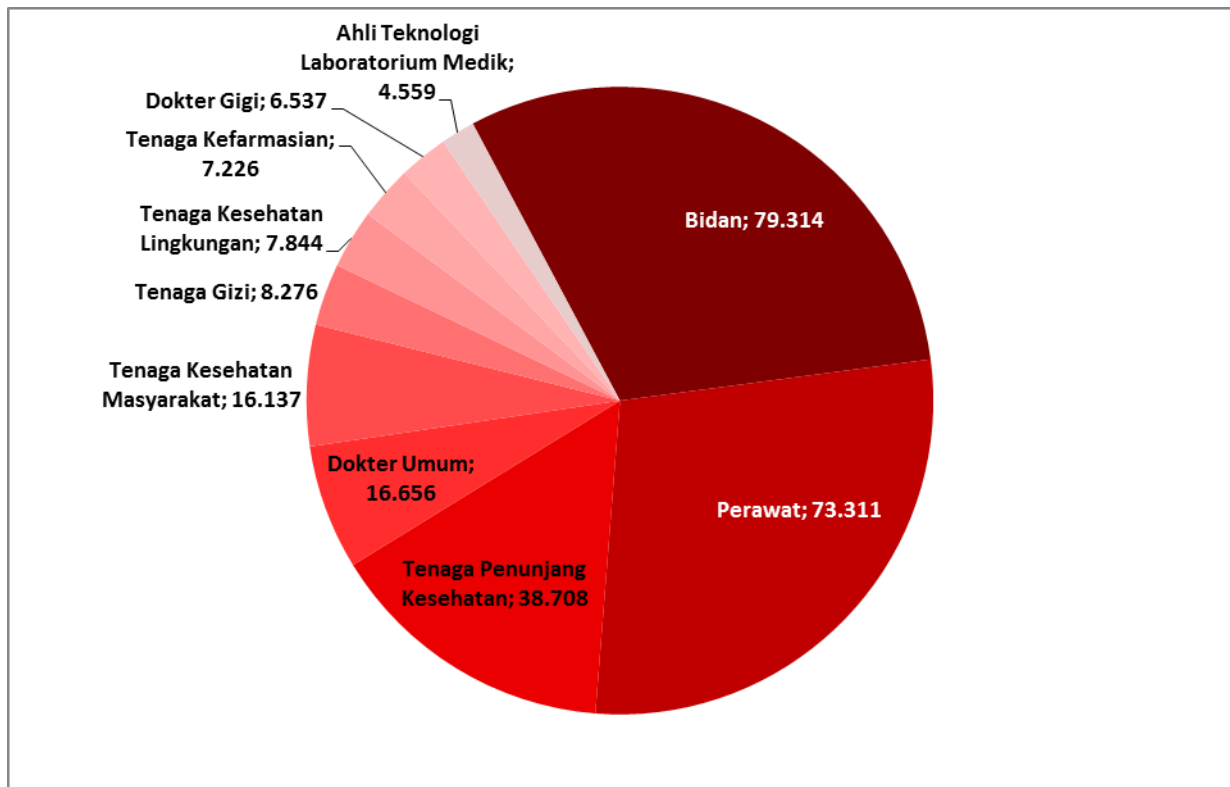
1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Untuk mendukung fungsi dan tujuan Puskesmas diperlukan sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan.

Pada peraturan yang sama di Pasal 16 Ayat 3 disebutkan bahwa minimal tenaga kesehatan di Puskesmas terdiri dari dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Sedangkan tenaga penunjang kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lainnya.

GAMBAR 3.3

**JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2015**



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

Total SDM di Puskesmas di Indonesia tahun 2015 sebanyak 258.568 orang yang terdiri dari 219.860 orang tenaga kesehatan (85,03%) dan 38.708 orang tenaga penunjang kesehatan (14,97%). Proporsi tenaga kesehatan di Puskesmas terbanyak yaitu bidan sebanyak 30,67% (79.314 orang), sedangkan proporsi tenaga kesehatan di Puskesmas yang paling sedikit yaitu ahli teknologi laboratorium klinik sebesar 1,76% (4.559 orang).

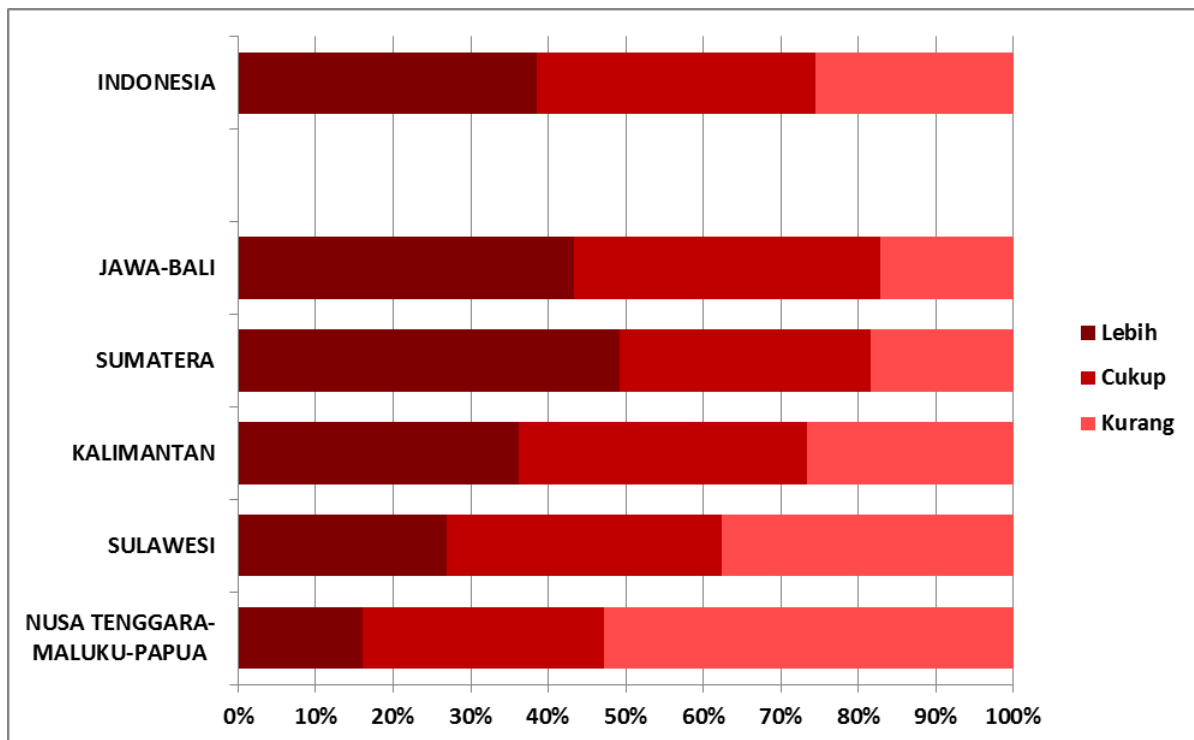
Jumlah dan jenis tenaga kesehatan Puskesmas dihitung berdasarkan analisis beban kerja dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerjanya, dan pembagian waktu kerja.

Kecukupan Dokter di Puskesmas

Pada Puskesmas non rawat inap, minimal jumlah dokter yaitu satu orang, sedangkan pada Puskesmas rawat inap minimal jumlah dokter dua orang, baik pada wilayah perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil. Pada Gambar 3.4, diketahui bahwa di Indonesia pada tahun 2015 terdapat 38,53% Puskesmas yang memiliki dokter melebihi jumlah standar yang ditetapkan, 35,9% Puskesmas sudah cukup dokter, dan 25,57% Puskesmas kekurangan dokter. Berdasarkan regional, proporsi terbesar Puskesmas yang cukup dan kelebihan jumlah dokter terdapat di regional Jawa-Bali (82,8%) dan Sumatera (81,7%), sedangkan proporsi terbesar Puskesmas yang kekurangan dokter terdapat di regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua (52,78%).

GAMBAR 3.4

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT REGIONAL DI INDONESIA TAHUN 2015

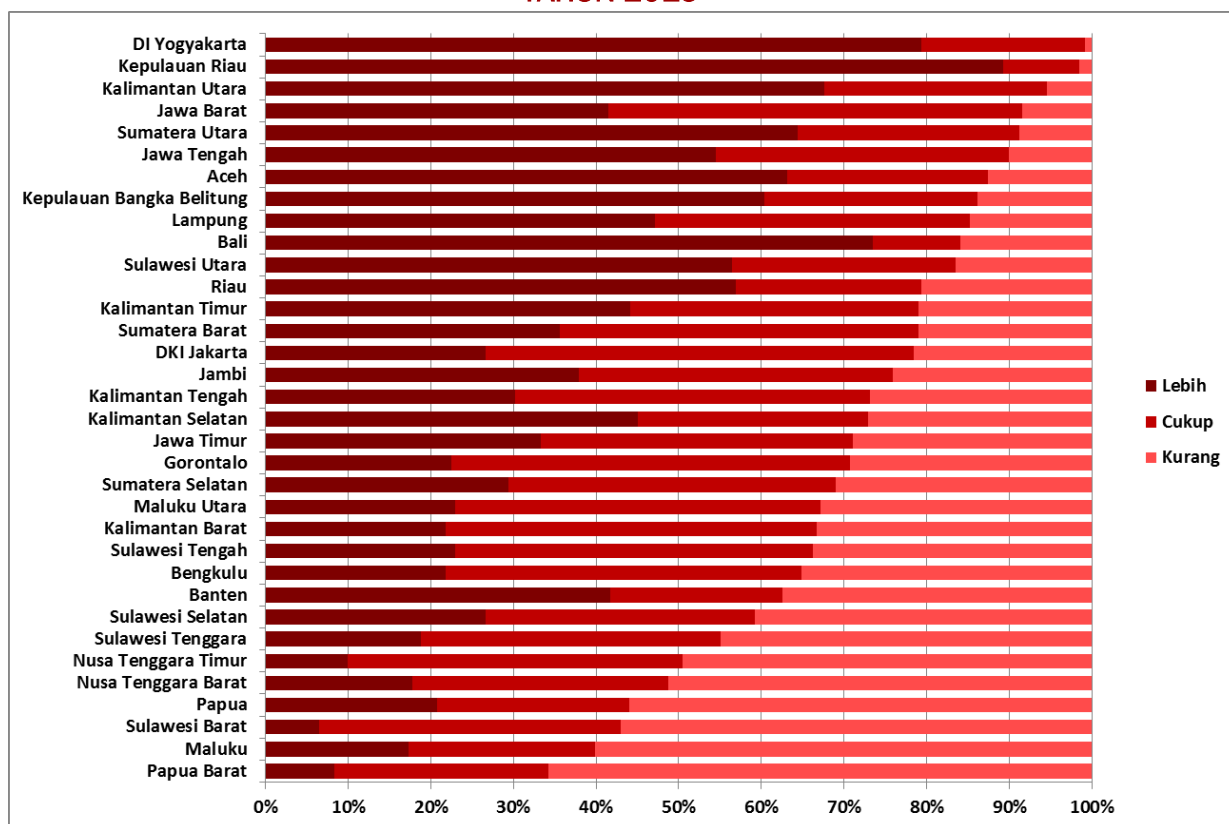


Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>) dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi

Jika dilihat berdasarkan provinsi, provinsi dengan persentase tertinggi Puskesmas yang cukup dan berlebih jumlah dokter yaitu DI Yogyakarta (99,17%), Kepulauan Riau (98,46%), dan Kalimantan Utara (94,59%). Provinsi dengan persentase tertinggi Puskesmas dengan kekurangan dokter yaitu Papua Barat (65,74%), Maluku (60,12%), dan Sulawesi Barat (56,99%). Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter dapat dilihat di Lampiran 3.3.

GAMBAR 3.5

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



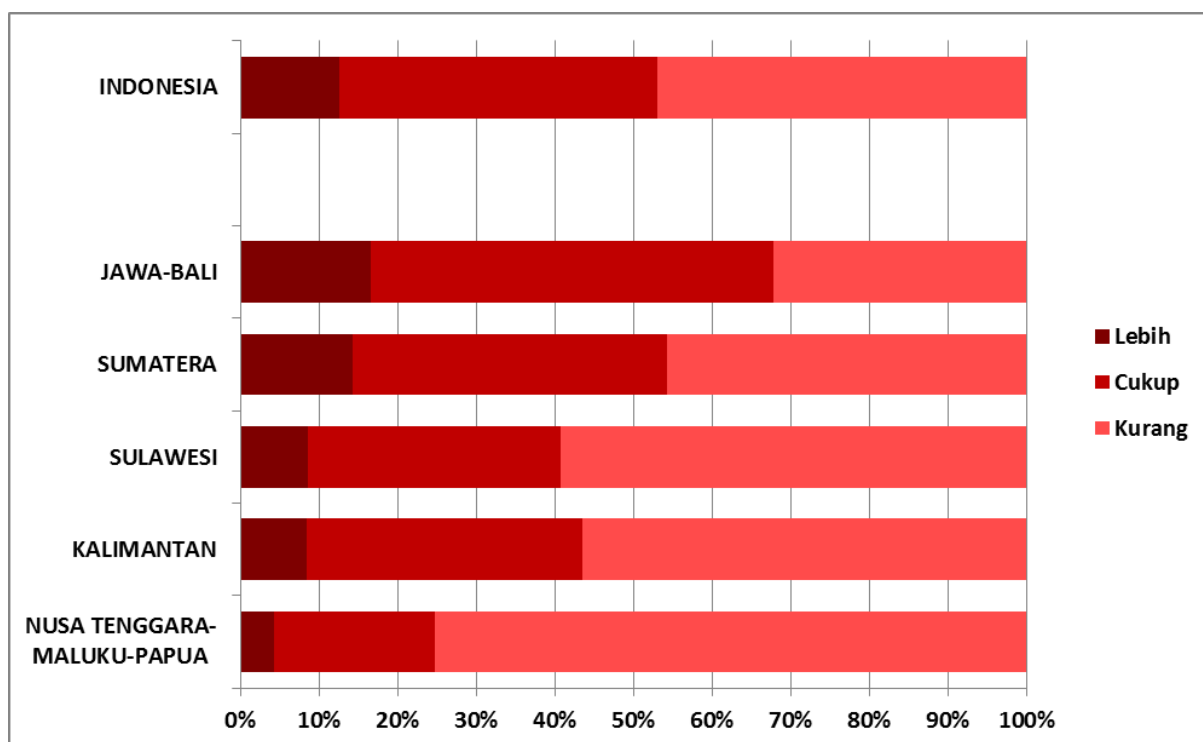
Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>) dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi

Kecukupan Dokter Gigi di Puskesmas

Jumlah dokter gigi di Puskesmas minimal satu orang, baik di Puskesmas rawat inap dan non rawat inap dan di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Di Indonesia pada tahun 2015, terdapat 12,56% Puskesmas melebihi jumlah standar dokter gigi, 40,46% Puskesmas dengan jumlah dokter gigi cukup, dan 46,97% Puskesmas tidak memiliki dokter gigi. Berdasarkan regional, proporsi terbesar Puskesmas dengan dokter gigi cukup dan lebih terdapat di regional Jawa-Bali (67,76%) dan Sumatera (54,29%), sedangkan proporsi terbesar Puskesmas yang kekurangan dokter gigi terdapat di regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua (75,31%).

GAMBAR 3.6

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI
DI INDONESIA TAHUN 2015

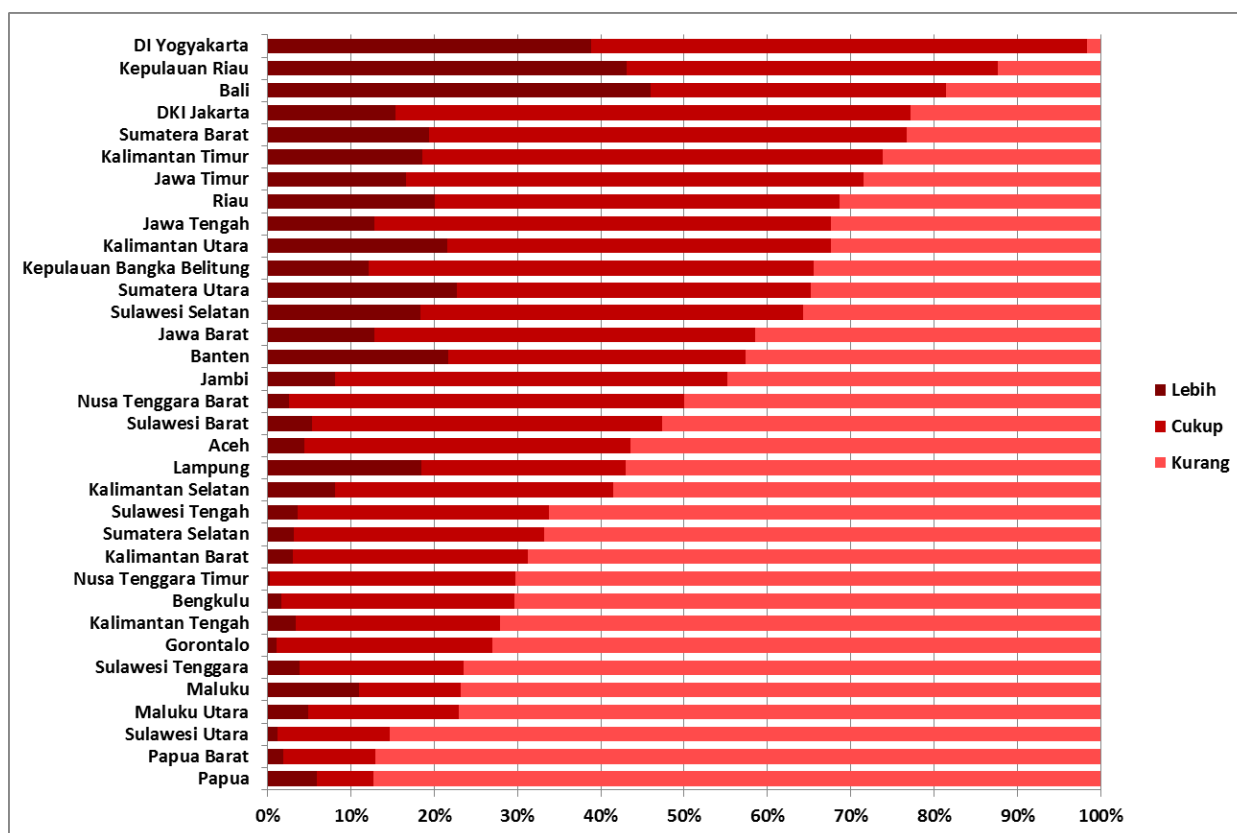


Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>) dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi

Berdasarkan provinsi, provinsi dengan persentase tertinggi Puskesmas yang cukup dan berlebih jumlah dokter gigi yaitu DI Yogyakarta (98,35%), Kepulauan Riau (87,69%), dan Bali (81,42%). Sedangkan persentase tertinggi Puskesmas yang kekurangan dokter gigi adalah Papua (87,31%), Papua Barat (87,04%), dan Sulawesi Utara (85,29%). Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter gigi dapat dilihat di Lampiran 3.3.

GAMBAR 3.7

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



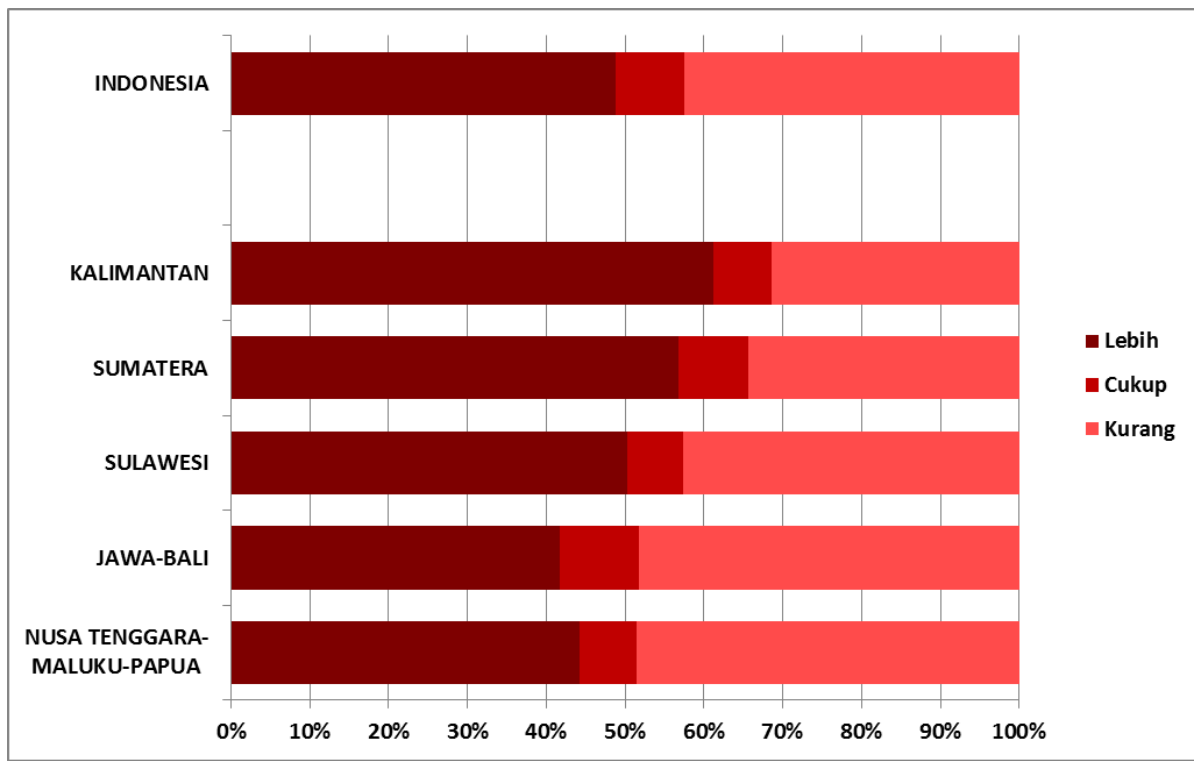
Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>) dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi

Kecukupan Perawat di Puskesmas

Perawat pada Puskesmas non rawat inap minimal berjumlah lima orang sedangkan pada Puskesmas rawat inap minimal berjumlah delapan orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Di Indonesia pada tahun 2015, terdapat 48,78% Puskesmas memiliki jumlah perawat lebih dari standar yang ditetapkan, 8,76% Puskesmas dengan jumlah perawat cukup, dan 42,46% Puskesmas kekurangan perawat. Secara regional, proporsi terbesar Puskesmas dengan jumlah perawat cukup dan berlebih terdapat pada regional Kalimantan (68,6%) dan Sumatera (65,66%). Proporsi terbesar Puskesmas yang kekurangan jumlah perawat yaitu regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua (48,47%) dan regional Jawa - Bali (48,20%).

GAMBAR 3.8

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT DI INDONESIA
TAHUN 2015

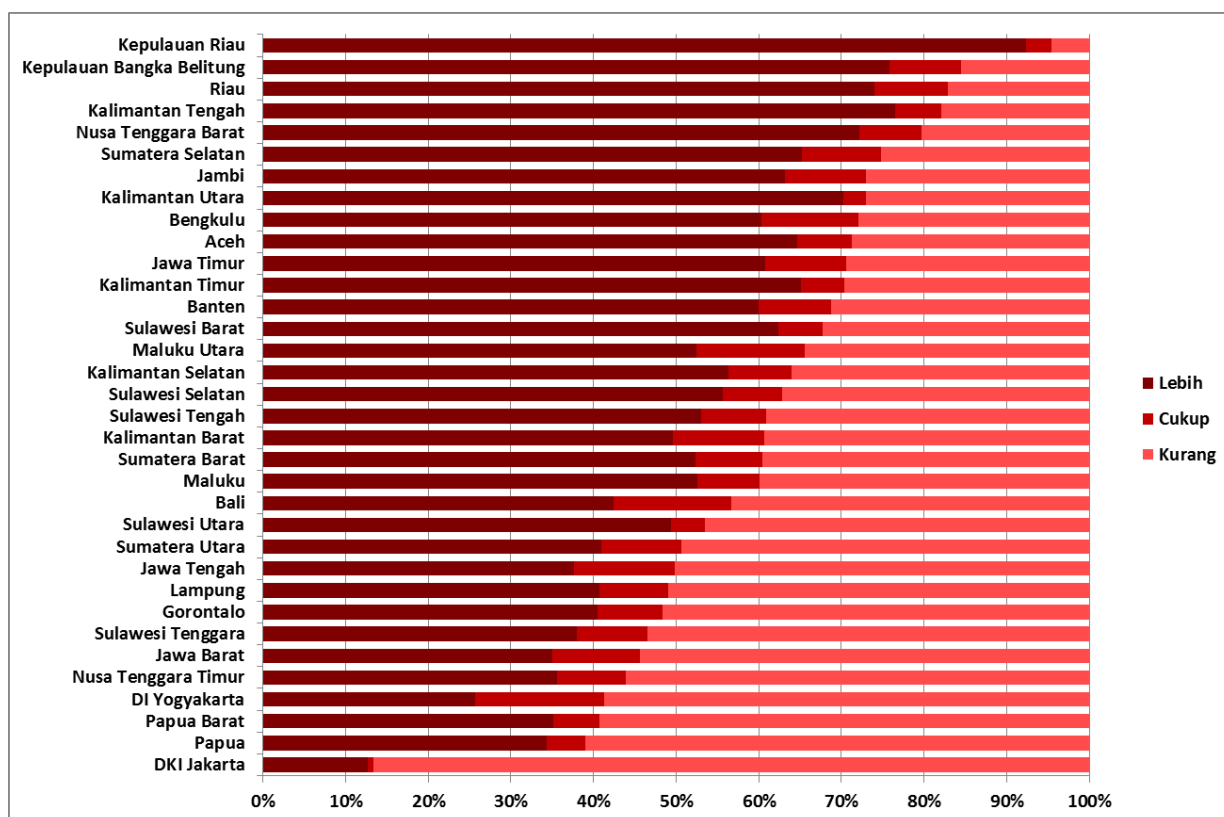


Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>) dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi

Jika dilihat persebarannya, provinsi dengan persentase tertinggi Puskesmas yang cukup dan berlebih jumlah perawat adalah Kepulauan Riau (95,38%), Kepulauan Bangka Belitung (84,48%), dan Riau (82,84%). Provinsi dengan persentase tertinggi Puskesmas yang kekurangan jumlah perawat adalah DKI Jakarta (86,69%), Papua (60,99%), dan Papua Barat (59,26%). Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas dengan kecukupan perawat dapat dilihat di Lampiran 3.3.

GAMBAR 3.9

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



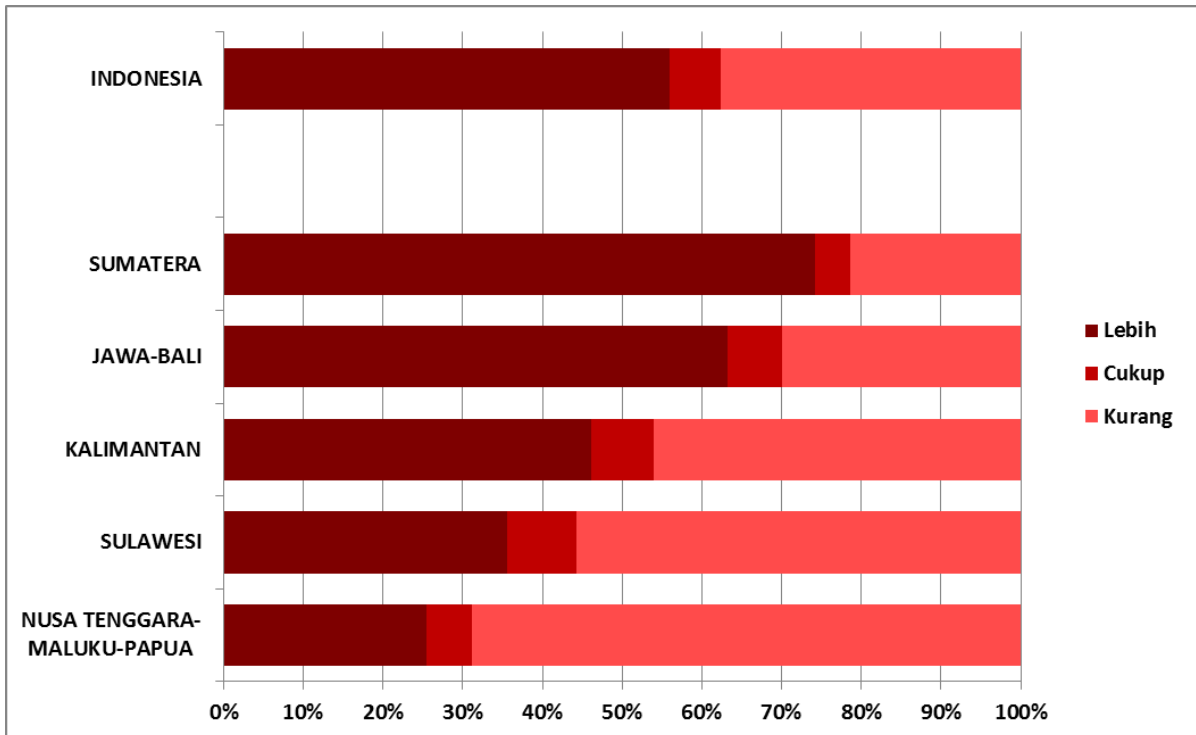
Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>) dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi

Kecukupan Bidan di Puskesmas

Jumlah bidan di Puskesmas non rawat inap minimal empat orang dan di Puskesmas rawat inap minimal tujuh orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Pada Gambar 3.10, diketahui bahwa di Indonesia tahun 2015 terdapat 56% memiliki bidan melebihi jumlah standar yang ditetapkan, 6,4% Puskesmas sudah cukup bidan, dan 37,6% Puskesmas kekurangan bidan. Berdasarkan regional, proporsi terbesar Puskesmas yang cukup dan berlebih jumlah bidan terdapat di regional Sumatera (78,57%) dan Jawa-Bali (70,11%), sedangkan proporsi terbesar Puskesmas yang kekurangan bidan terdapat di regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua (68,85%).

GAMBAR 3.10

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA
TAHUN 2015

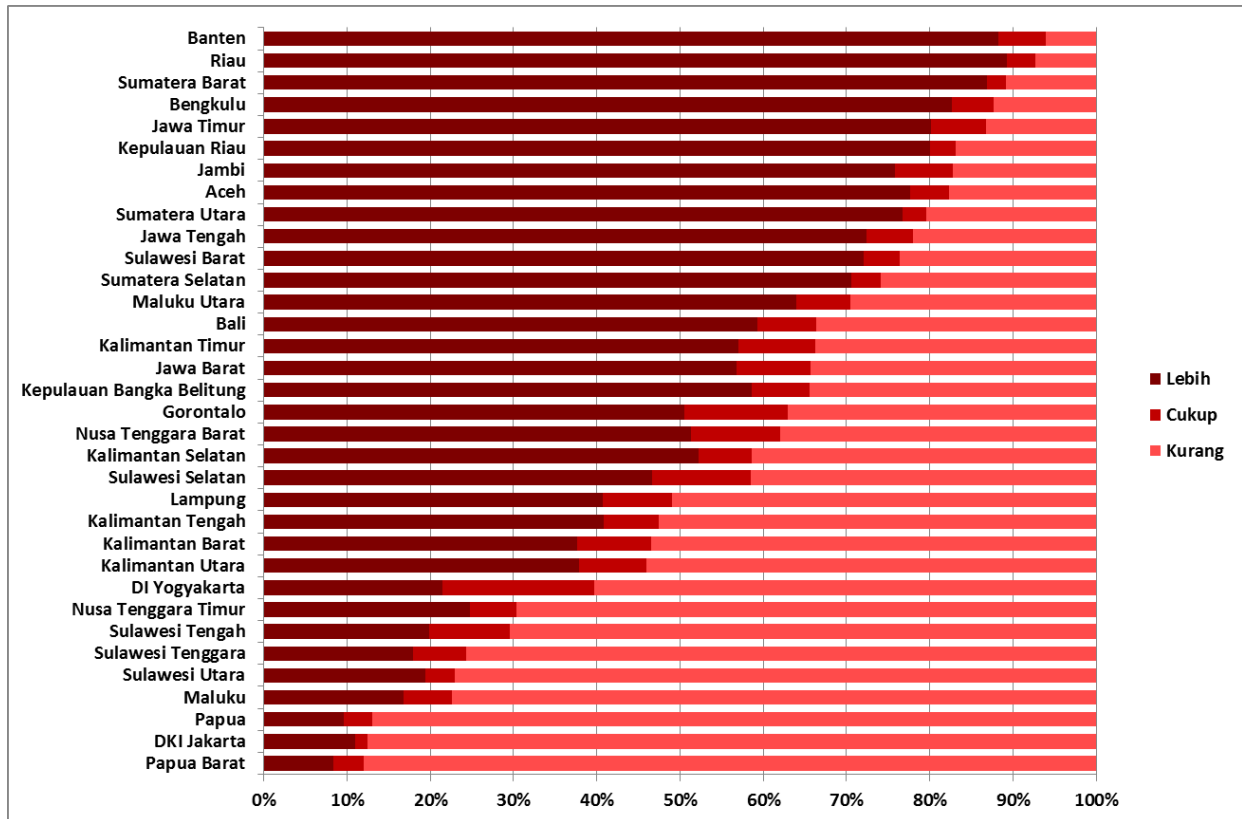


Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>) dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi

Berdasarkan provinsi, provinsi dengan persentase tertinggi Puskesmas dengan jumlah bidan cukup dan berlebih yaitu Banten (93,91%), Riau (92,65%), dan Sumatera Barat (89,15%). Provinsi dengan persentase tertinggi Puskesmas yang kekurangan bidan adalah Papua Barat (87,96%), DKI Jakarta (87,57%), dan Papua (87%). Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas dengan kecukupan bidan dapat dilihat di Lampiran 3.3.

GAMBAR 3.11

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>) dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi

Analisis kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas ini dilakukan berdasarkan standar jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlampir pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Hasil analisis ini berdasarkan data yang terkumpul dari dinas kesehatan provinsi dan belum seluruhnya dimutakhirkan.

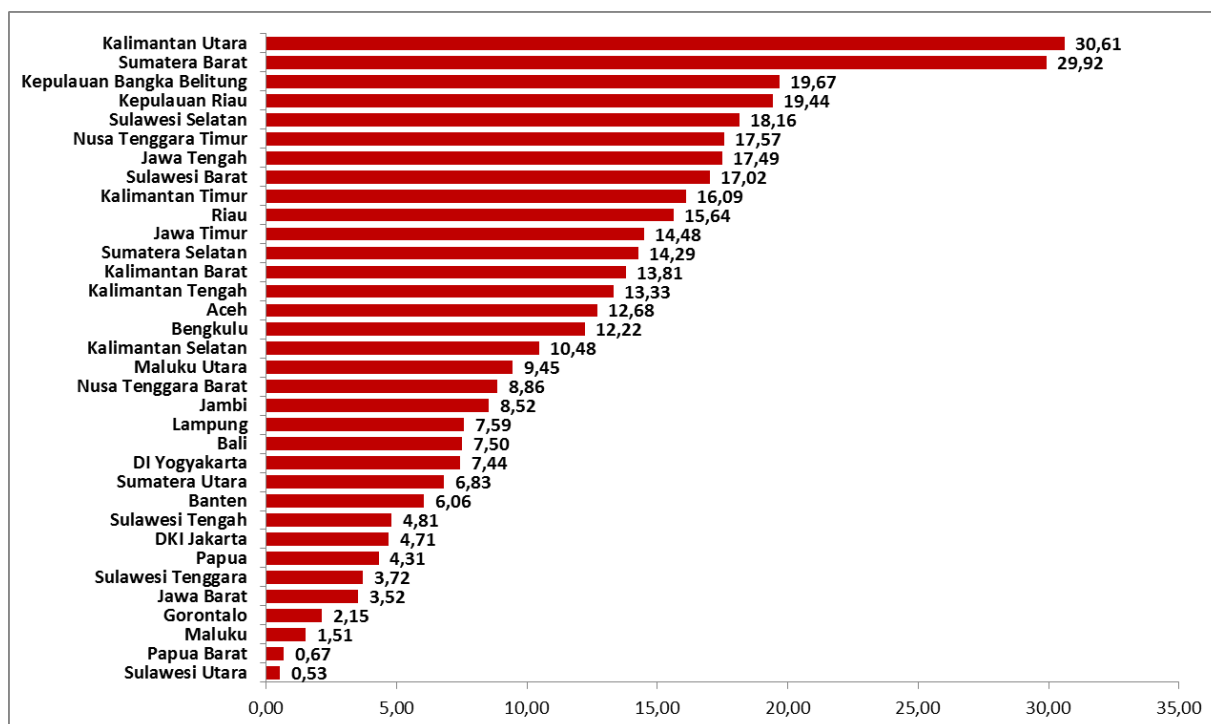
Jumlah Puskesmas yang Memiliki Lima Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, bahwa tenaga kesehatan di Puskesmas tidak hanya tenaga medis tetapi juga tenaga promotif dan preventif untuk mendukung tugas Puskesmas dalam melaksanakan upaya kesehatan masyarakat. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, salah satu indikator dalam meningkatkan ketersediaan dan mutu SDMK sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yaitu jumlah Puskesmas yang memiliki lima jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif. Tenaga kesehatan yang dimaksud

adalah tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan analis kesehatan.

GAMBAR 3.12

PERSENTASE PUSKESMAS YANG MEMILIKI LIMA JENIS TENAGA KESEHATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

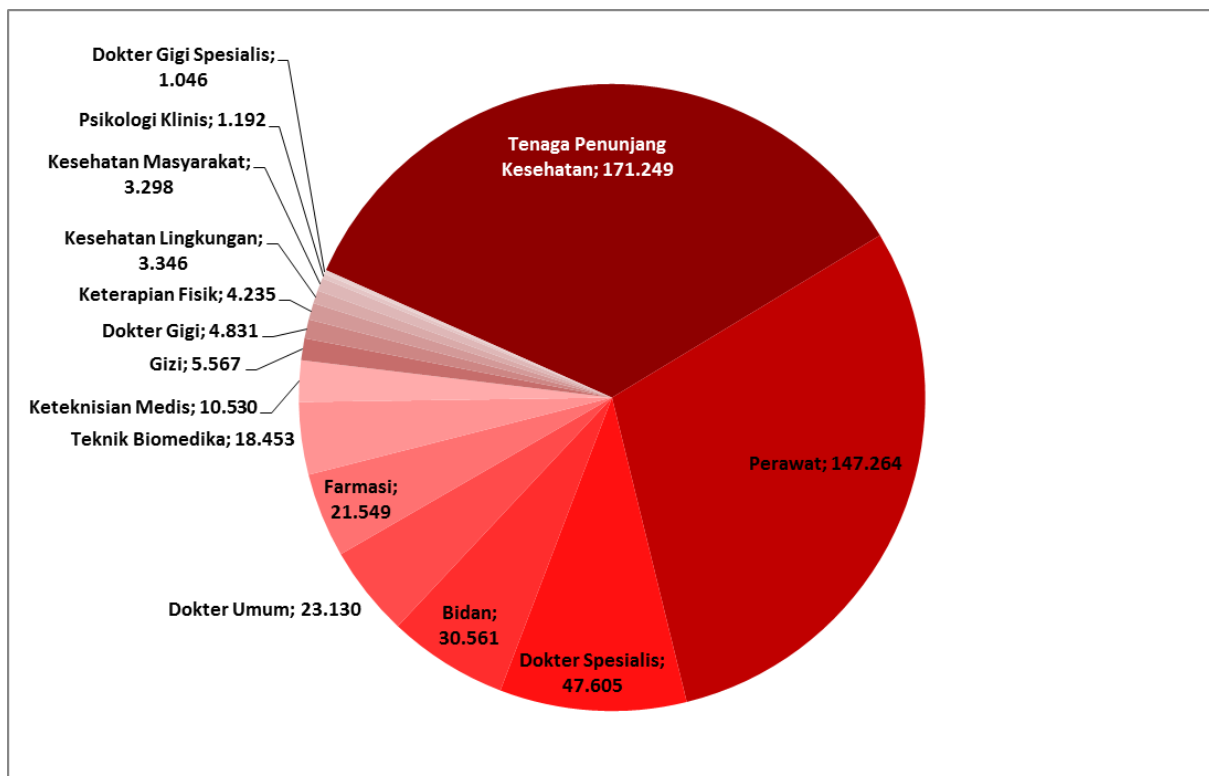
Pada tahun 2015 terdapat 1.059 Puskesmas yang memiliki lima jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif dari 9.742 Puskesmas yang melaporkan data. Hal ini masih belum memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 yaitu sebesar 1.200 Puskesmas. Provinsi dengan persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki lima jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif yaitu Provinsi Kalimantan Utara (30,61%) dan Sumatera Barat (29,92%). Sedangkan provinsi terendah yaitu Provinsi Sulawesi Utara (0,53%) dan Papua Barat (0,67%). Rincian lengkap mengenai jumlah Puskesmas yang memiliki lima jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif dapat dilihat di Lampiran 3.4.

2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit dapat didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Sedangkan menurut pelayanan yang diberikan, rumah sakit terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.

GAMBAR 3.13

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2015



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

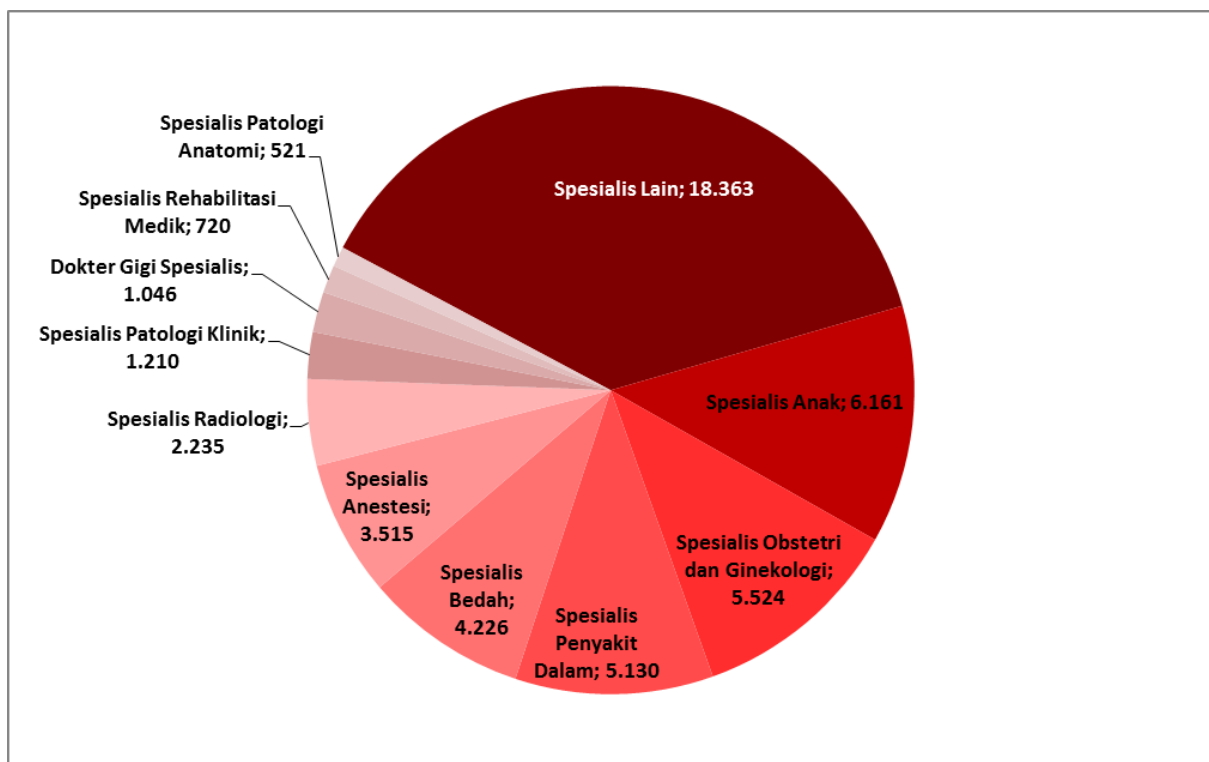
Total SDM di rumah sakit pada tahun 2015 sebanyak 493.856 orang yang terdiri dari 322.607 orang tenaga kesehatan (65,32%) dan 171.249 orang tenaga penunjang kesehatan (34,68%). Jumlah tenaga kesehatan terbanyak yaitu perawat sebanyak 147.264 orang (45,65%) sedangkan jumlah tenaga kesehatan paling sedikit yaitu dokter gigi spesialis sebanyak 1.046 orang (0,32%). Provinsi dengan jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit terbanyak yaitu Jawa Tengah (44.885 orang),

Jawa Timur (39.742 orang), dan Jawa Barat (39.008 orang). Provinsi dengan jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit paling sedikit yaitu Kalimantan Utara (1.163 orang). Rincian lengkap mengenai jumlah sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit dapat dilihat di Lampiran 3.5.

Pelayanan spesialis yang ada di rumah sakit di antaranya pelayanan spesialis dasar, spesialis penunjang, spesialis lain, subspecialis, dan spesialis gigi dan mulut. Pelayanan spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. Pelayanan spesialis penunjang meliputi pelayanan anesthesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan rehabilitasi medik. Pelayanan spesialis lain meliputi pelayanan mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik, dan kedokteran forensik.

GAMBAR 3.14

JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2015



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

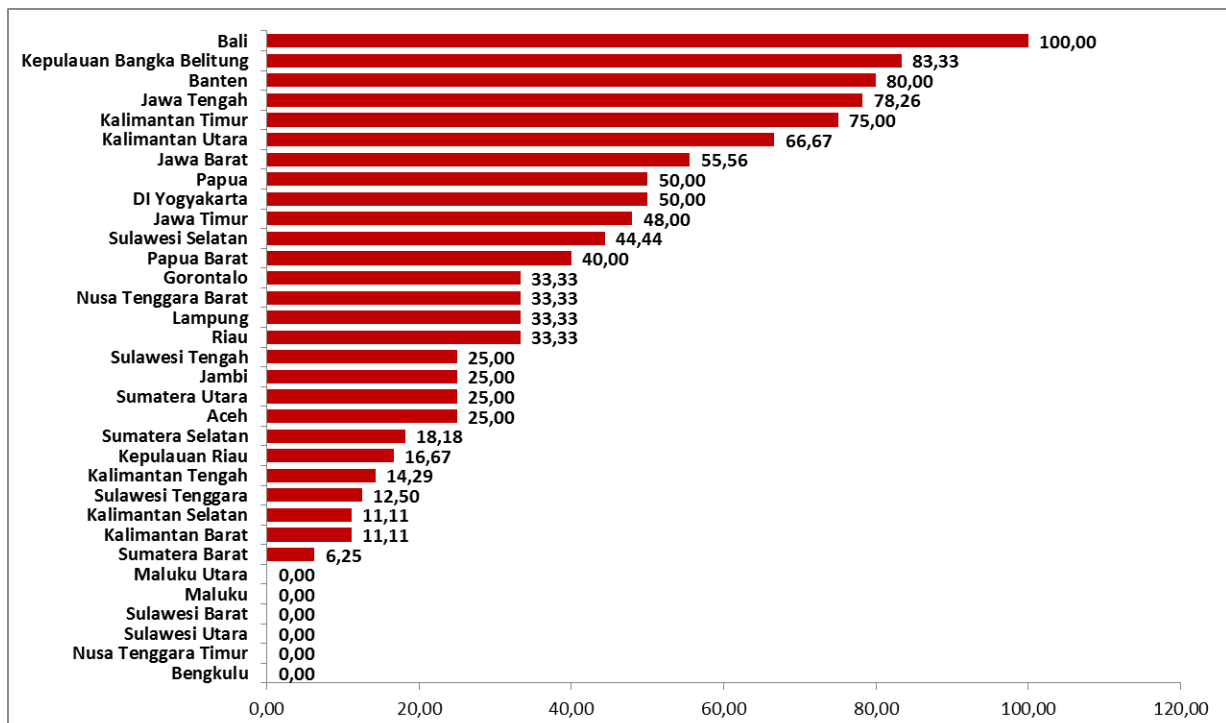
Total dokter spesialis di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 48.651 orang yang terdiri dari 21.041 orang dokter spesialis dasar (43,25%), 8.201 orang dokter spesialis penunjang (16,86%), 18.363 orang dokter spesialis lain (37,74%),

dan 1.046 orang dokter gigi spesialis (2,15%). Menurut jenis spesialisasinya, dokter spesialis terbanyak yaitu dokter spesialis anak dengan jumlah 6.161 orang (12,66%). Provinsi dengan jumlah dokter spesialis terbanyak yaitu Jawa Barat (7.474 orang) dan Jawa Timur (6.240 orang), sedangkan provinsi dengan jumlah dokter spesialis paling sedikit yaitu Kalimantan Utara (59 orang), Sulawesi Barat (79 orang), dan Maluku Utara (83 orang). Rincian lengkap mengenai jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di rumah sakit dapat dilihat di Lampiran 3.6.

Untuk meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan menetapkan indikator Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu persentase rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga dokter spesialis penunjang. Empat dokter spesialis dasar yang dimaksud yaitu dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter bedah, sedangkan tiga dokter spesialis penunjang yaitu dokter spesialis radiologi, dokter spesialis anestesi, dan dokter spesialis patologi klinik.

GAMBAR 3.15

PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI EMPAT DOKTER SPESIALIS DASAR DAN TIGA DOKTER SPESIALIS PENUNJANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

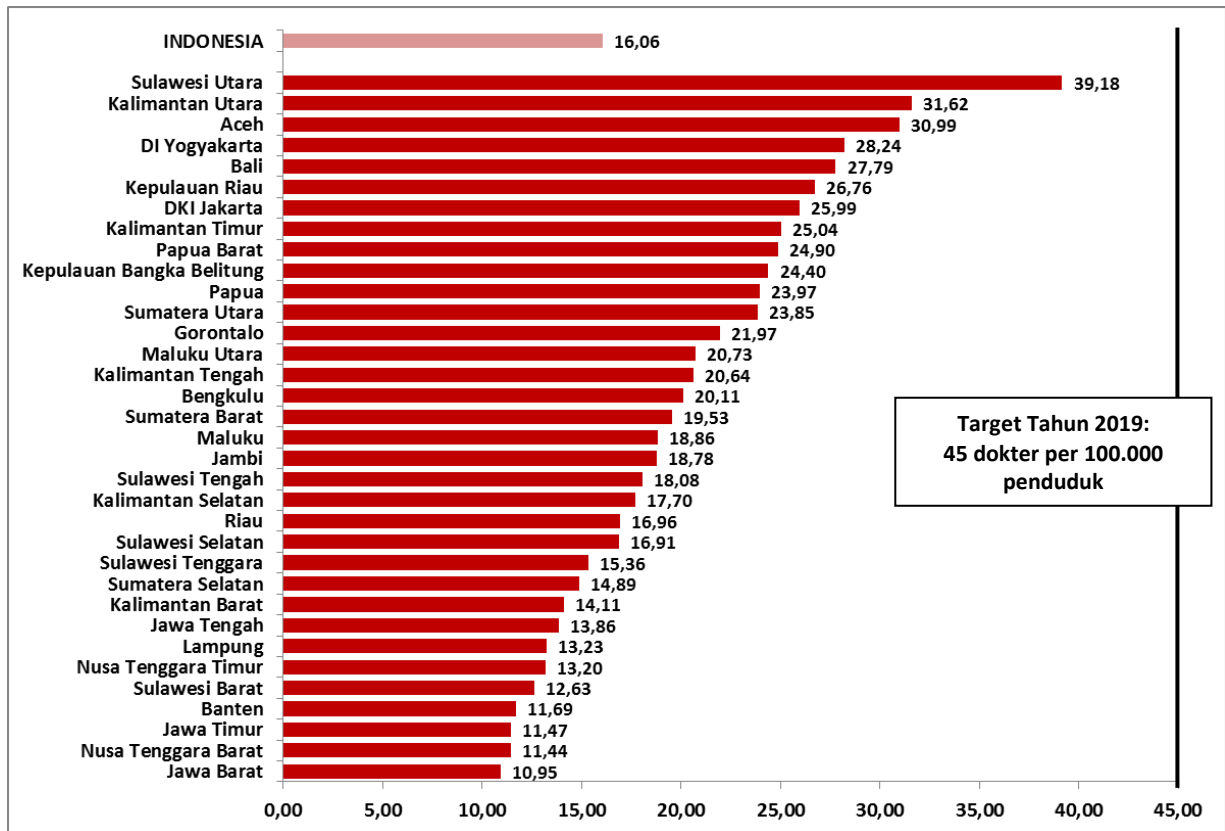
Pada tahun 2015 terdapat 35,14% rumah sakit (dari rumah sakit kabupaten/kota kelas C di Indonesia yang melaporkan data) yang telah memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga dokter spesialis penunjang. Hal ini telah memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 yang sebesar 30%. Provinsi dengan persentase tertinggi rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang telah memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga dokter spesialis penunjang yaitu Bali sebesar 100%. Provinsi yang belum ada rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang telah memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga dokter spesialis penunjang yaitu Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Provinsi DKI Jakarta tidak melaporkan data. Rincian lengkap mengenai rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang telah memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga dokter spesialis penunjang dapat dilihat di Lampiran 3.7.

B. RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan tertentu. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 - 2025, target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2019 di antaranya rasio dokter umum 45 per 100.000 penduduk, rasio dokter gigi 13 per 100.000 penduduk, rasio perawat 180 per 100.000 penduduk, dan rasio bidan 120 per 100.000 penduduk.

GAMBAR 3.16

RASIO DOKTER TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2015

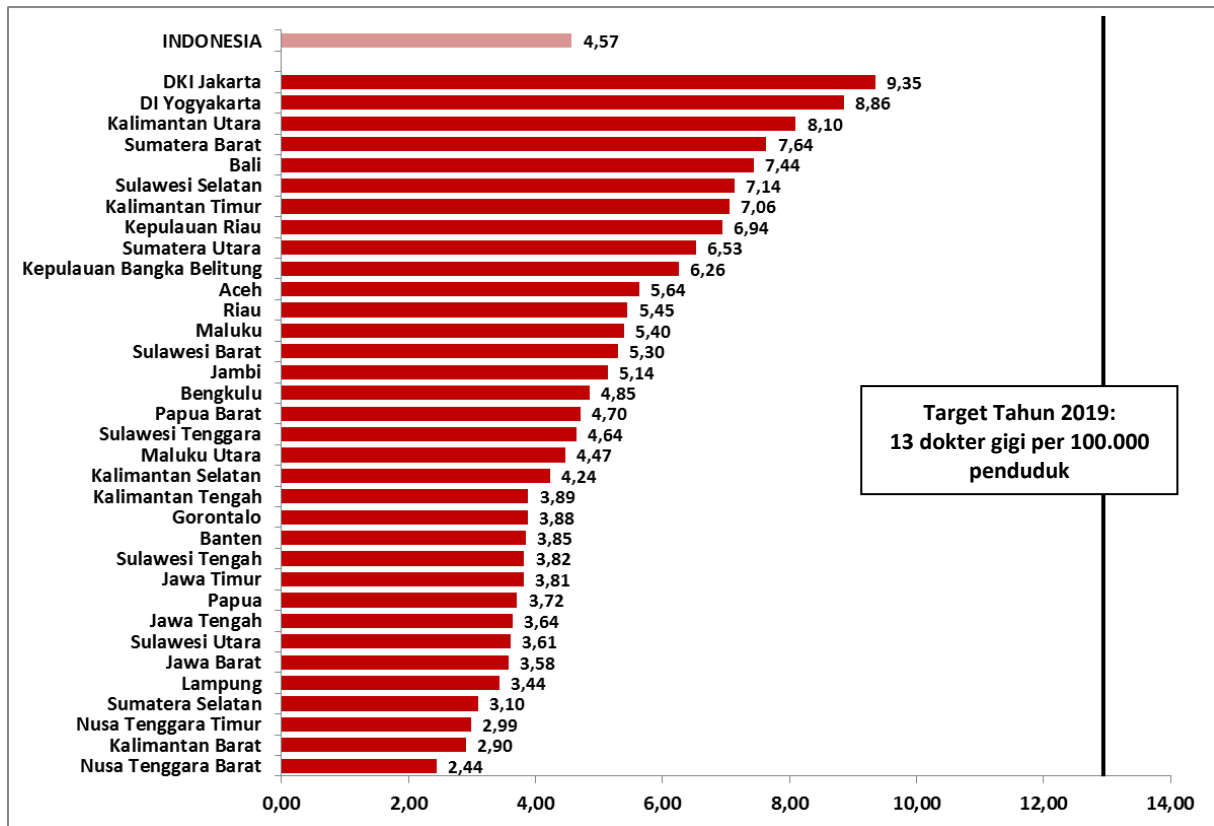


Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>) dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi

Pada Gambar 3.16, diketahui bahwa rasio dokter terhadap 100.000 penduduk baik secara nasional maupun provinsi masih jauh dari target rasio dokter pada tahun 2019 yaitu 45 per 100.000 penduduk. Secara nasional, rasio dokter di Indonesia sebesar 16,06 per 100.000 penduduk. Angka ini masih belum mencapai target tahun 2014 yaitu 40 per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio tertinggi yaitu Sulawesi Utara (39,18 per 100.000 penduduk) dan provinsi dengan rasio terendah yaitu Jawa Barat (10,95 per 100.000 penduduk).

GAMBAR 3.17

RASIO DOKTER GIGI TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2015

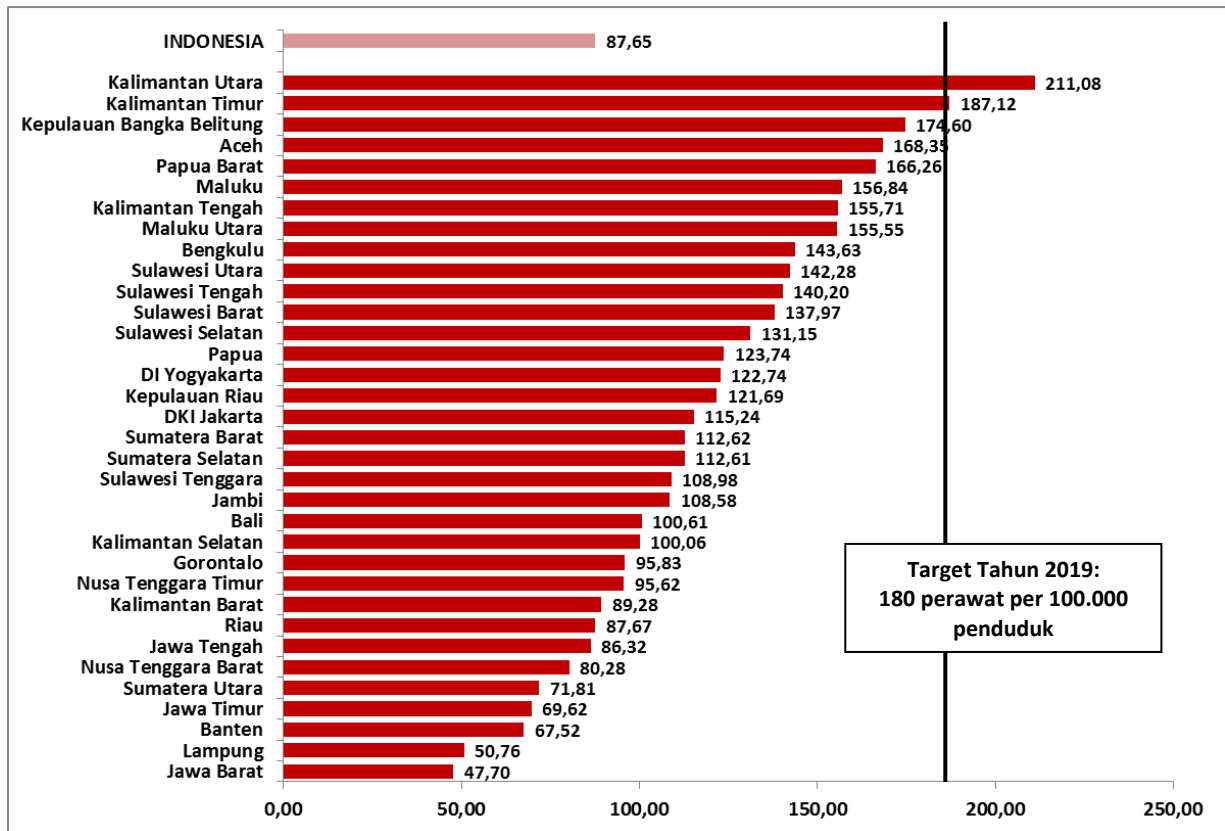


Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>) dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi

Rasio dokter gigi di Indonesia sebesar 4,57 per 100.000 penduduk. Angka ini masih jauh dari target rasio dokter gigi tahun 2019 yang sebesar 13 per 100.000 penduduk. Jika dibandingkan dengan target tahun 2014 (12 per 100.000 penduduk) juga masih belum tercapai. Provinsi dengan rasio tertinggi yaitu DKI Jakarta sebesar 9,35 per 100.000 penduduk dan provinsi dengan rasio terendah yaitu Nusa Tenggara Barat sebesar 2,44 per 100.000 penduduk.

GAMBAR 3.18

RASIO PERAWAT TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2015

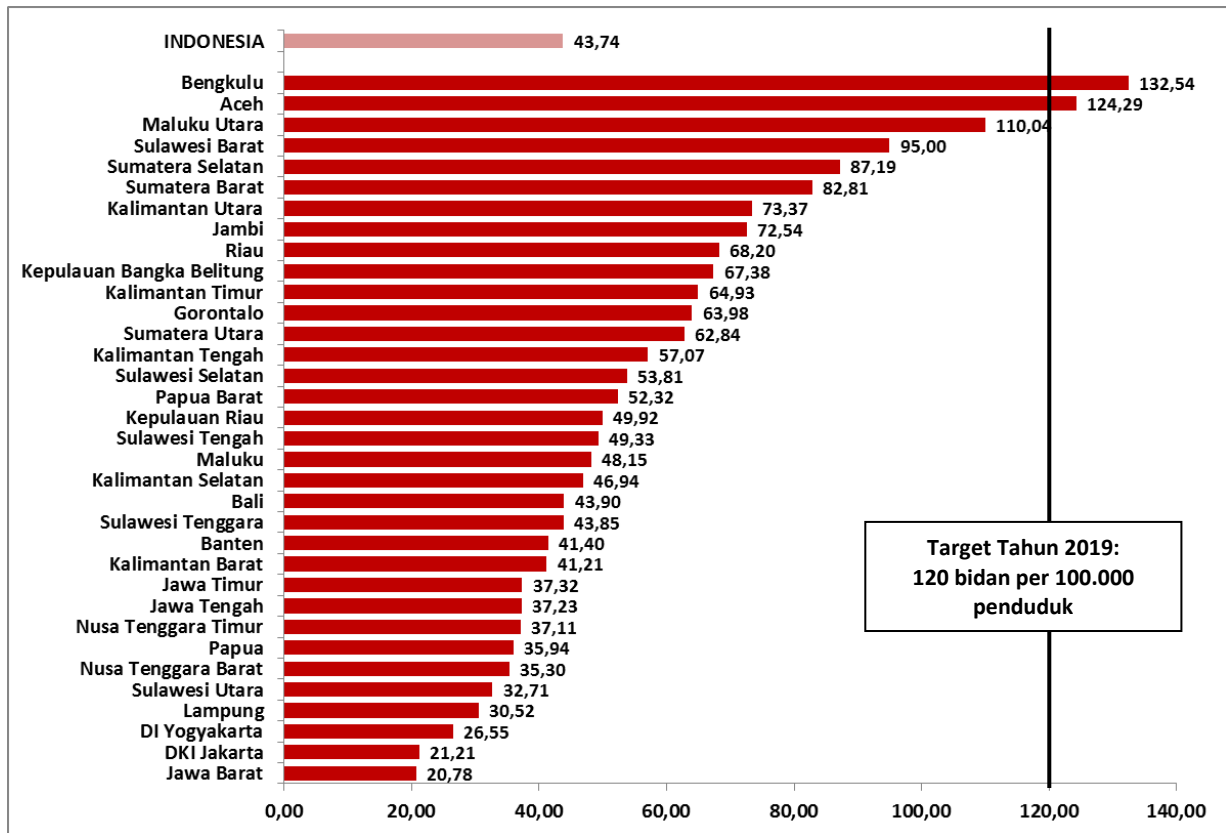


Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>) dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi

Secara nasional, rasio perawat adalah 87,65 per 100.000 penduduk. Hal ini masih jauh dari target tahun 2019 yaitu 180 per 100.000 penduduk. Angka ini juga masih belum mencapai target tahun 2014 yang sebesar 158 per 100.000 penduduk. Namun, terdapat dua provinsi dengan rasio perawat yang sudah memenuhi target tahun 2019 yaitu Kalimantan Utara (211,08 per 100.000 penduduk) dan Kalimantan Timur (187,12 per 100.000 penduduk). Provinsi dengan rasio perawat terendah yaitu Jawa Barat sebesar 47,70 per 100.000 penduduk.

GAMBAR 3.19

RASIO BIDAN TERHADAP 100.00 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2015



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>) dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi

Rasio bidan di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 43,74 per 100.000 penduduk. Angka ini masih jauh dari target 2019 yang sebesar 120 per 100.000 penduduk dan juga belum mencapai target tahun sebelumnya yaitu 100 per 100.000 penduduk. Terdapat dua provinsi yang telah memenuhi target tahun 2019 yaitu Bengkulu (132,54 per 100.000 penduduk) dan Aceh (124,29 per 100.000 penduduk). Provinsi dengan rasio terendah yaitu Jawa Barat sebesar 20,78 per 100.000 penduduk.

C. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

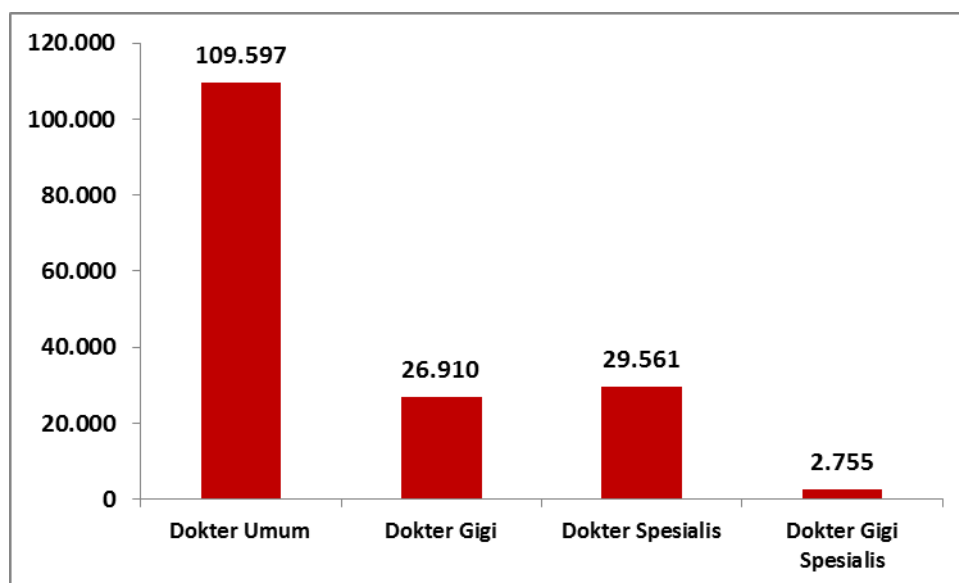
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 44 menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki surat tanda registrasi (STR). STR berlaku selama lima tahun dan dapat diregistrasi ulang. STR diberikan oleh masing-masing konsil tenaga kesehatan setelah memenuhi persyaratan.

Registrasi tenaga medis dikelola oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Registrasi dokter dan dokter gigi diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi. Registrasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Selain itu dengan adanya registrasi, KKI memiliki pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya.

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Pasal 2 disebutkan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang telah menjadi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PPDGS) wajib memiliki STR Peserta PPDS/PPDGS. PPDS/PPDGS adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dan dokter gigi dengan metode pembelajaran secara mandiri dan di bawah pengawasan untuk menjadi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

GAMBAR 3.20

**JUMLAH DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS,
DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI STR PER 31 DESEMBER 2015**



Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2016

Catatan:

- Data dokter umum dan dokter gigi merupakan data kumulatif dari awal tahun pengumpulan data STR (tahun 2006)
- Data dokter spesialis dan dokter gigi spesialis merupakan data daftar ulang STR selama lima tahun terakhir

Jumlah tenaga medis yang telah memiliki STR per 31 Desember 2015 sebanyak 168.823 orang yang terdiri dari 109.597 orang dokter umum, 26.910 orang dokter gigi, 29.561 orang dokter spesialis, dan 2.755 orang dokter gigi spesialis. Walaupun jumlah dokter umum yang memiliki STR sebanyak 109.597 orang, tetapi dari angka tersebut, tidak semua bekerja sesuai fungsinya, yaitu di pelayanan medis. Hal ini merupakan salah satu penyebab persebaran dokter yang kurang merata dan adanya kekurangan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan di beberapa provinsi. Rincian lengkap mengenai jumlah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang memiliki STR dapat dilihat di Lampiran 3.8.

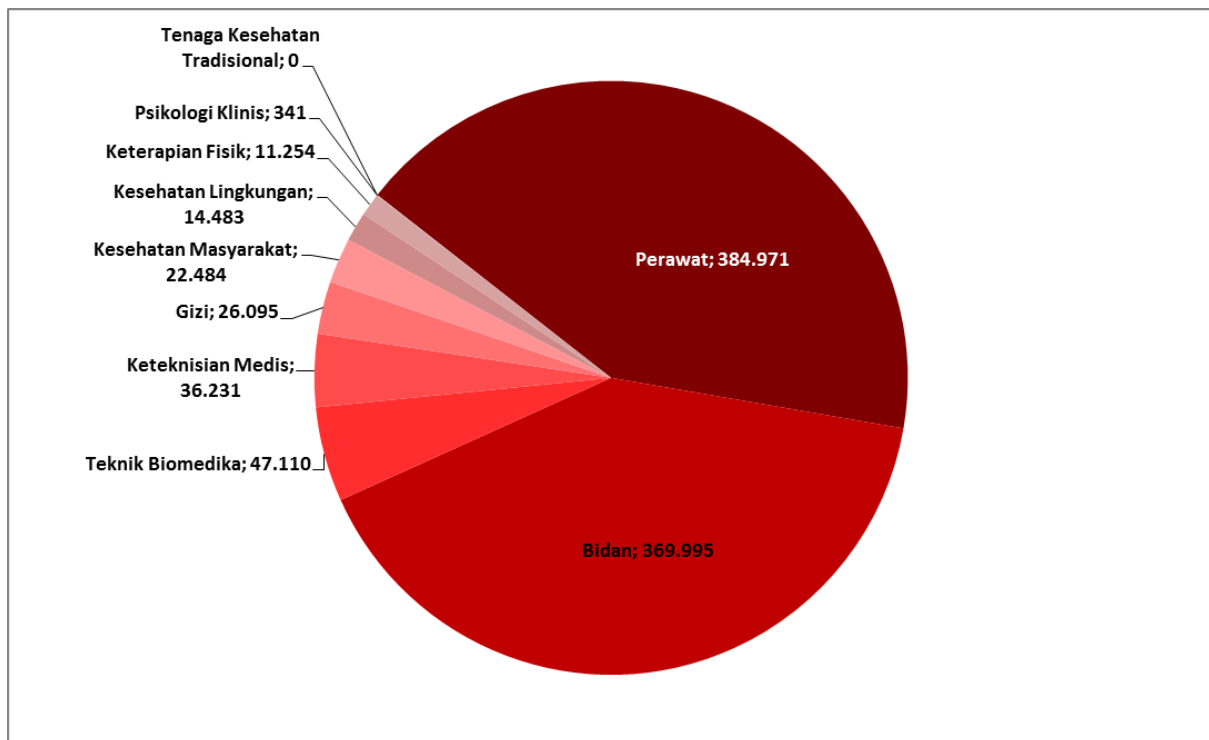
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker.

Pada Pasal 2 di peraturan yang sama disebutkan bahwa setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki STR. STR bagi tenaga kefarmasian berupa Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) bagi apoteker dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) bagi tenaga teknis kefarmasian. STRA dan STRTTK dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan dalam hal pemberiannya didelegasikan kepada Komite Farmasi Nasional (KFN) untuk STRA dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk STRTTK.

STR tenaga kesehatan selain tenaga medis dan tenaga kefarmasian dikelola oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Hingga tahun 2015, jumlah tenaga kesehatan yang telah memiliki STR adalah 912.964 orang. Jumlah terbanyak tenaga kesehatan yang memiliki STR yaitu perawat sebanyak 384.971 orang (42,17%) dan bidan sebanyak 369.995 orang (40,53%). Rincian lengkap mengenai jumlah tenaga kesehatan yang memiliki STR dapat dilihat di Lampiran 3.9 dan 3.10.

GAMBAR 3.21

**JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI STR
MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2015**



Sumber: Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2016

Selain tenaga kesehatan di atas, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Pasal 8 menyatakan bahwa tenaga kesehatan warga negara asing atau tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan profesi atau vokasinya di Indonesia harus memiliki Sertifikat Kompetensi atau pengakuan kompetensi dari institusi pendidikannya yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari negara asal. Tenaga kesehatan ini harus mengikuti evaluasi kompetensi dan memiliki STR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. JUMLAH LULUSAN POLITEKNIK KESEHATAN

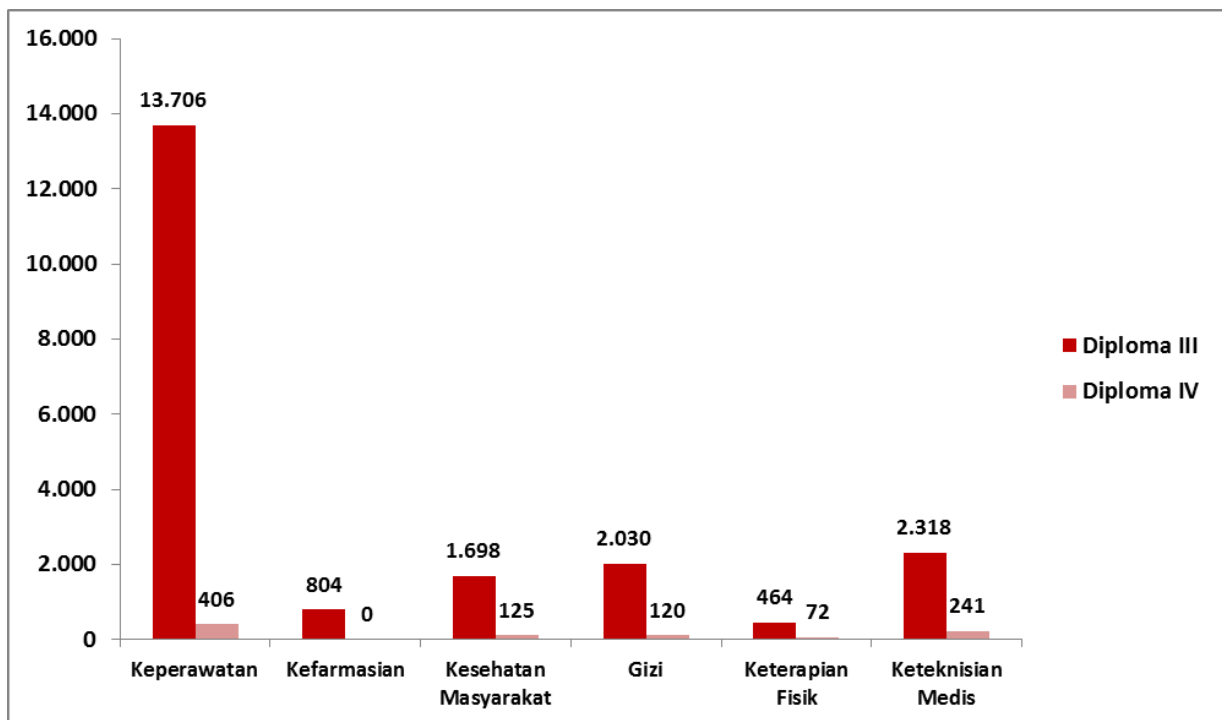
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 9, tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimal Diploma III kecuali tenaga medis. Lebih lanjut pada Pasal 17 dijelaskan bahwa pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan. Pendidikan tinggi bidang kesehatan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan

penyelenggaraan upaya kesehatan dan dinamika kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri, keseimbangan antara kemampuan produksi tenaga kesehatan dan sumber daya yang tersedia, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan tinggi bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan adalah Politeknik Kesehatan (Poltekkes) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK). Di Indonesia, terdapat 38 Poltekkes yang tersebar di 33 provinsi. Total program studi Poltekkes terdiri dari 18 program studi Diploma III dan 14 program studi Diploma IV.

GAMBAR 3.22

**JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHATAN
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2015**



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Pada tahun 2015, total jumlah lulusan Poltekkes sebanyak 21.984 orang yang terdiri dari Diploma III adalah 21.020 orang dan Diploma IV 964 orang. Jumlah lulusan terbanyak yaitu program studi keperawatan sebanyak 14.112 orang (64,29%) yang terdiri dari 13.706 orang lulusan Diploma III dan 406 orang lulusan Diploma IV. Jumlah lulusan terendah yaitu program studi keterampilan fisik untuk Diploma III (464 orang) dan program studi kefarmasian untuk Diploma IV (tidak ada lulusan). Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan program Diploma III dan Diploma IV

Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 3.17 dan 3.18. Selain lulusan Poltekkes yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, kebutuhan tenaga kesehatan juga dipenuhi oleh lulusan sekolah tinggi ilmu kesehatan swasta. Data tersebut tidak termasuk data yang disajikan dalam profil ini.

E. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

1. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT)

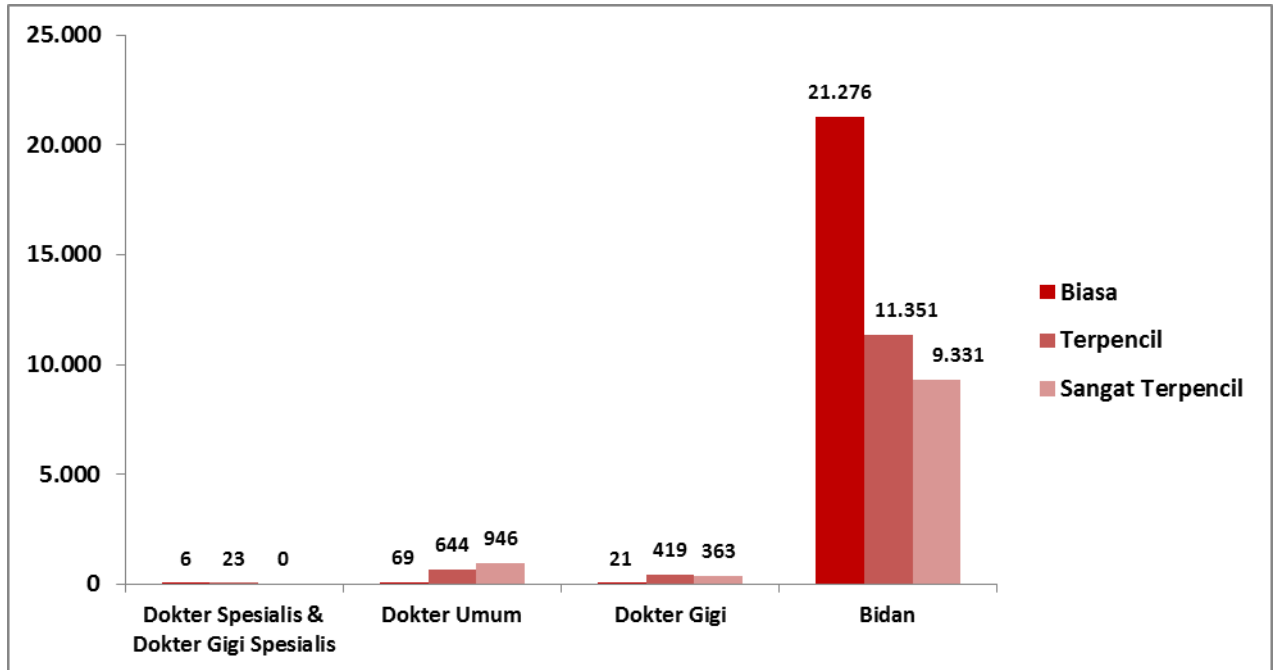
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap, pegawai tidak tetap (PTT) adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pemerintah pusat dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, sedangkan pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota.

Dokter PTT dalam hal ini terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Tujuan pengangkatan dokter PTT di antaranya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah bermasalah kesehatan, daerah rawan konflik; rumah sakit provinsi sebagai dokter brigade siaga bencana; dan kantor kesehatan pelabuhan pada wilayah terpencil dan sangat terpencil. Masa penugasan dokter PTT adalah satu tahun untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dua tahun untuk dokter atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dan tiga tahun untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa.

Bidan PTT ditugaskan sebagai bidan di desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil. Bidan PTT ditugaskan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali atau diperpanjang paling banyak dua kali masa penugasan.

GAMBAR 3.23

JUMLAH DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA PER 31 DESEMBER 2015

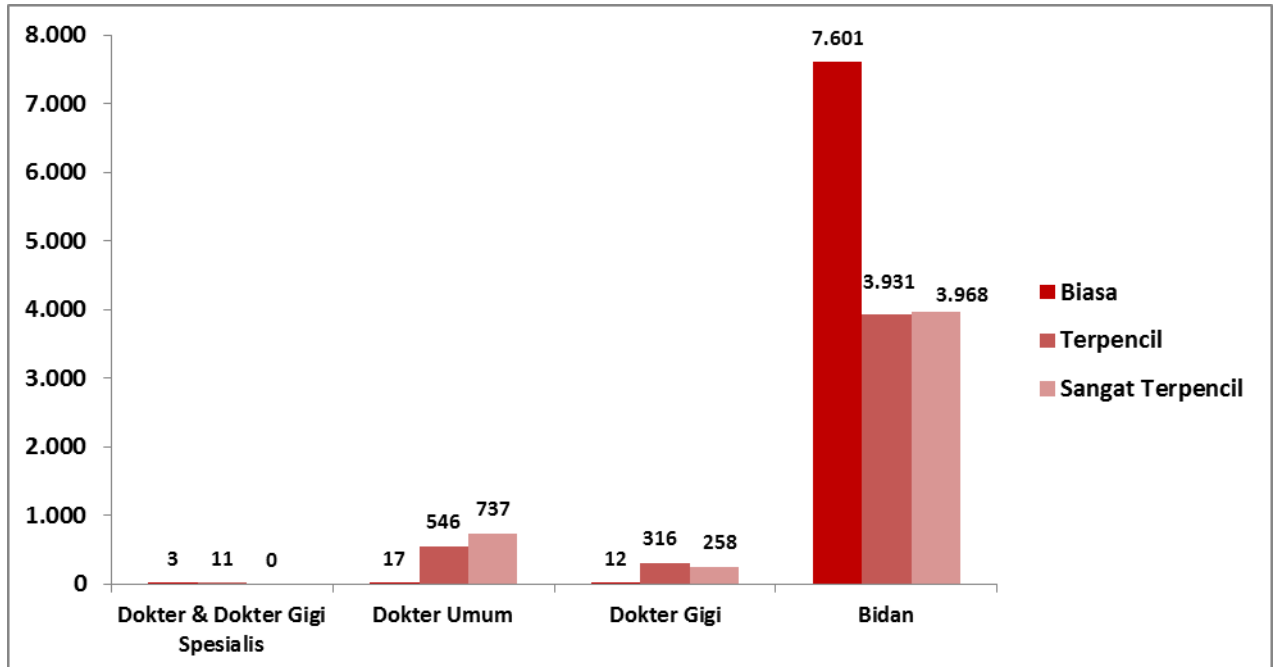


Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2016

Total tenaga kesehatan dengan status PTT pada tahun 2015 sebanyak 29 orang dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, 1.659 orang dokter umum, 803 orang dokter gigi, dan 41.958 orang bidan. Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis PTT ditempatkan di daerah biasa dan terpencil. Dokter umum PTT dan dokter gigi PTT lebih banyak ditempatkan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Sedangkan bidan PTT mayoritas ditempatkan di daerah dengan kriteria biasa.

GAMBAR 3.24

JUMLAH PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA TAHUN 2015



Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2016

Pada tahun 2015 diadakan pengangkatan 17.400 orang tenaga kesehatan dengan status PTT yang terdiri dari 14 orang dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, 1.300 orang dokter umum, 586 orang dokter gigi, dan 15.500 orang bidan. Rincian lengkap mengenai jumlah tenaga kesehatan yang diangkat dan aktif sebagai PTT tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 3.11, 3.12, 3.13, dan 3.14.

2. Tenaga Kesehatan dengan Status Penugasan Khusus

a. Penugasan Khusus Tenaga Residen

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa penugasan khusus merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), daerah bermasalah kesehatan (DBK), serta rumah sakit kelas C dan Kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. Jenis tenaga kesehatan yang diangkat dalam penugasan khusus adalah residen dan tenaga kesehatan dengan pendidikan Diploma III.

Residen adalah dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Residen dalam penugasan khusus terdiri dari residen senior dan residen pasca jenjang I. Residen senior ditugaskan antara tiga sampai dengan enam bulan. Residen pasca jenjang I ditugaskan selama enam bulan.

Berdasarkan data dari Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, jumlah keberadaan aktif residen dalam penugasan khusus di kabupaten prioritas DTPK dan DBK di Indonesia tahun 2015 sebanyak 246 orang. Provinsi dengan jumlah keberadaan aktif residen terbanyak yaitu Riau dan Sulawesi Tenggara yaitu 17 orang, sedangkan provinsi yang tidak ada residen dalam penugasan khusus yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Barat.

Pada tahun 2015 telah diangkat 748 residen untuk penugasan khusus. Provinsi dengan pengangkatan dan penempatan residen terbanyak yaitu Sumatera Utara yaitu 61 orang. Provinsi yang tidak ada pengangkatan dan penempatan residen untuk penugasan khusus yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. Rincian lengkap mengenai jumlah pengangkatan dan keberadaan aktif tenaga residen di kabupaten prioritas DTPK dan DBK dapat dilihat di Lampiran 3.15.

b. Penugasan Khusus Dokter Peserta Internsip

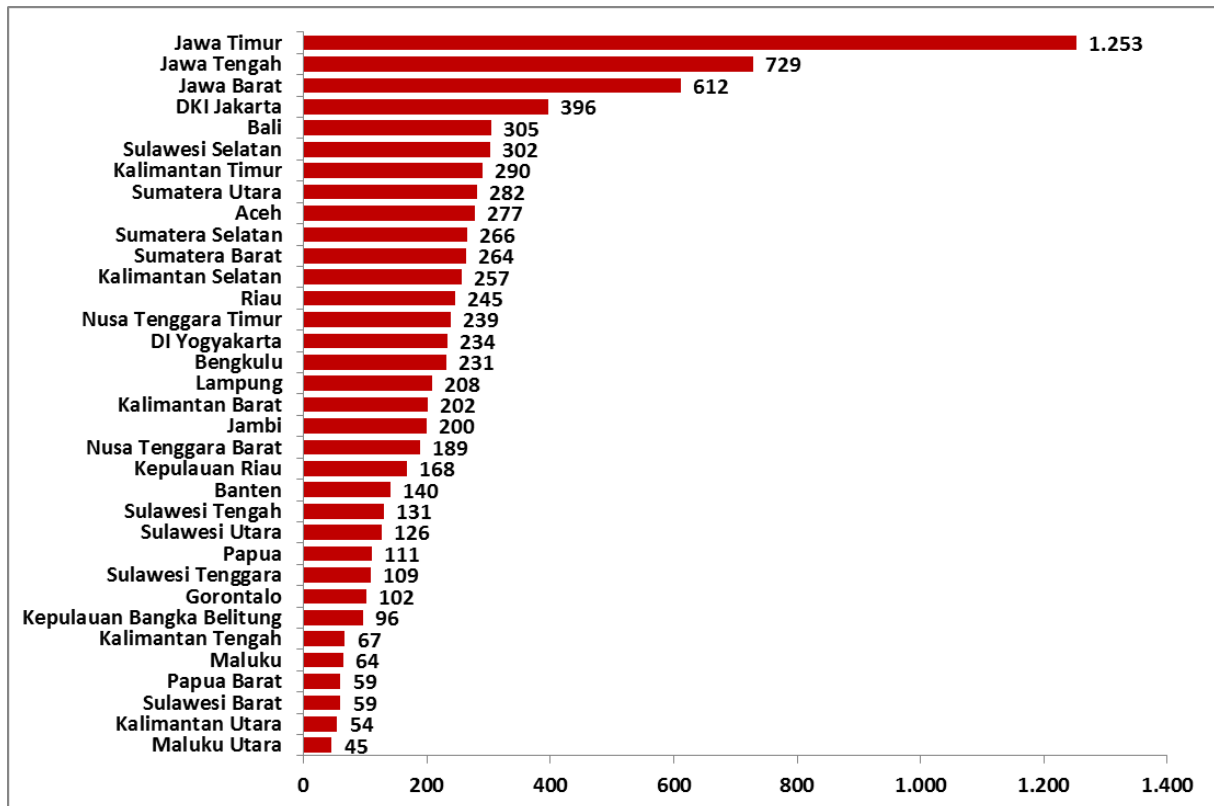
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip menjelaskan bahwa internsip adalah proses pematapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. Penempatan dokter program internsip di fasilitas pelayanan kesehatan perlu disinergikan dengan program pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan.

Peserta program internsip adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis. Dokter peserta program internsip harus memiliki STR untuk kewenangan internsip yang dikeluarkan oleh KKI dan Surat Izin Praktek (SIP) internsip yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. STR untuk kewenangan internsip dan SIP internsip hanya berlaku selama menjalani internsip.

Program internsip terdiri dari program internsip ikatan dinas dan program internsip mandiri. Dokter peserta program internsip ikatan dinas ditempatkan selama satu tahun dan wajib melaksanakan tugas pasca internsip di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk Kementerian Kesehatan.

GAMBAR 3.25

JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSIP TAHUN 2015



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Pemberangkatan dokter peserta internsip dilakukan sebanyak empat kali dalam satu tahun. Pada tahun 2015, jumlah dokter peserta internsip yang diberangkatkan pada bulan Februari sebanyak 2.286 orang, bulan Mei sebanyak 2.158 orang, bulan Oktober sebanyak 378 orang, dan bulan November sebanyak 3.490 orang. Provinsi dengan jumlah dokter peserta internsip tertinggi yaitu Jawa Timur (1.253 orang) dan provinsi dengan jumlah dokter peserta internsip terendah yaitu Maluku Utara (45 orang). Rincian lengkap mengenai jumlah dokter peserta internsip tahun 2015 dapat dilihat di Lampiran 3.19.

c. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*)

Program penugasan khusus yang baru diluncurkan pada tahun 2015 adalah penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (*team based*). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, penugasan khusus ini merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan

berbasis tim dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah dan jenis tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.

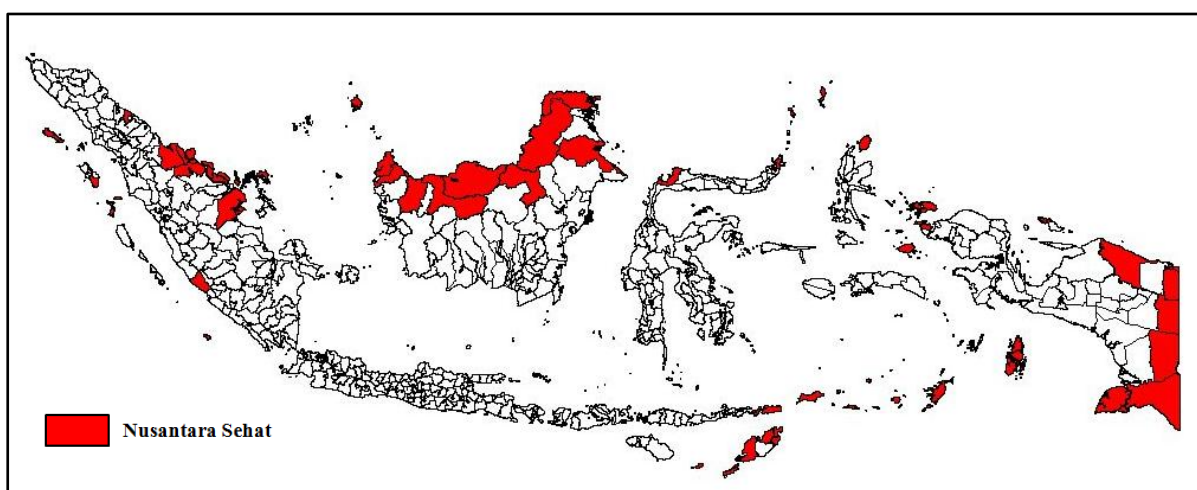
Tujuan dari program penugasan khusus ini yaitu:

1. Memberikan pelayanan kesehatan untuk menjangkau *remote area*.
2. Menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan.
3. Menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
4. Meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas.
5. Penggerakan pemberdayaan masyarakat.
6. Pelayanan terintegrasi.
7. Peningkatan dan pemerataan pelayanan.

Tenaga kesehatan dalam penugasan khusus berbasis tim dalam mendukung program Nusantara Sehat minimal terdiri dari lima jenis tenaga kesehatan, yaitu dokter, perawat, bidan, dan dua tenaga kesehatan lainnya (dokter gigi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan masyarakat). Masa penugasan khusus berbasis tim adalah dua tahun. Tim akan ditempatkan di Puskesmas terutama dengan kriteria sangat terpencil di wilayah DTPK dan/atau DBK. Pemerintah daerah dapat memberdayakan tenaga kesehatan pasca penugasan khusus ini berdasarkan kompetensi, standar ketenagaan, dan kebutuhan daerah sehingga tercapai kemandirian pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GAMBAR 3.26

KABUPATEN/KOTA PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT TAHUN 2015

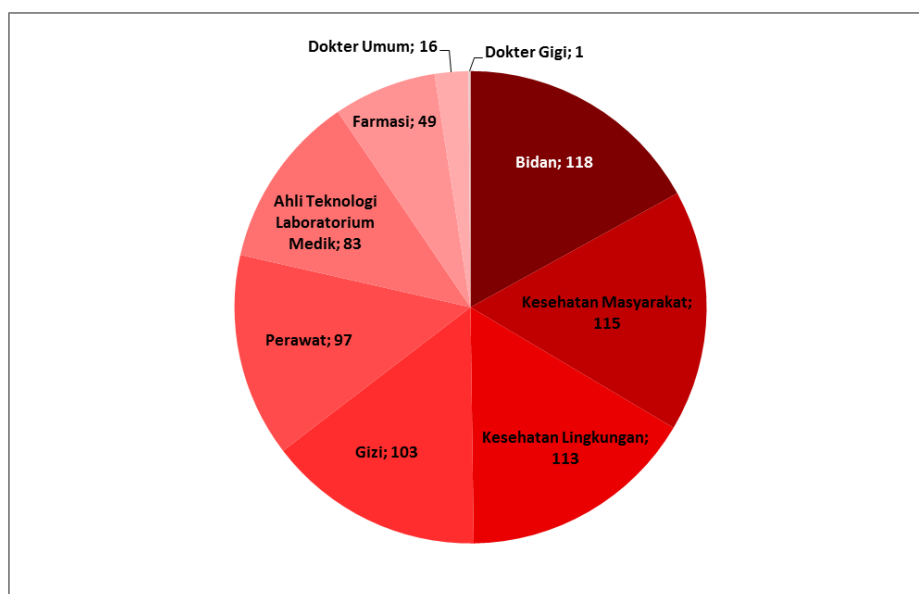


Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Pada tahun 2015, telah dilaksanakan penugasan khusus berbasis tim dengan dua periode keberangkatan. Periode pertama yang dilaksanakan pada bulan Mei 2015 memberangkatkan 142 orang tenaga kesehatan yang telah lulus seleksi dan ditempatkan di 19 kabupaten dengan total penempatan 20 Puskesmas. Periode kedua dilaksanakan pada bulan Desember 2015 dengan 553 orang tenaga kesehatan dan ditempatkan di 46 kabupaten dengan total 100 Puskesmas. Rincian lengkap mengenai penempatan Nusantara Sehat dapat dilihat di Lampiran 3.20 dan 3.21.

GAMBAR 3.27

JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT TAHUN 2015



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Jenis tenaga yang paling banyak diberangkatkan yaitu bidan (16,98%), tenaga kesehatan masyarakat (16,55%), dan tenaga kesehatan lingkungan (16,26%). Provinsi dengan jumlah penempatan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim terbanyak adalah NTT yaitu 162 orang dengan ditempatkan di 8 kabupaten dan 28 Puskesmas. Provinsi dengan jumlah penempatan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim paling sedikit yaitu Sulawesi Tengah sebanyak 5 orang dan ditempatkan pada satu kabupaten dan satu Puskesmas. Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada tim Nusantara Sehat dapat dilihat di Lampiran 3.22.

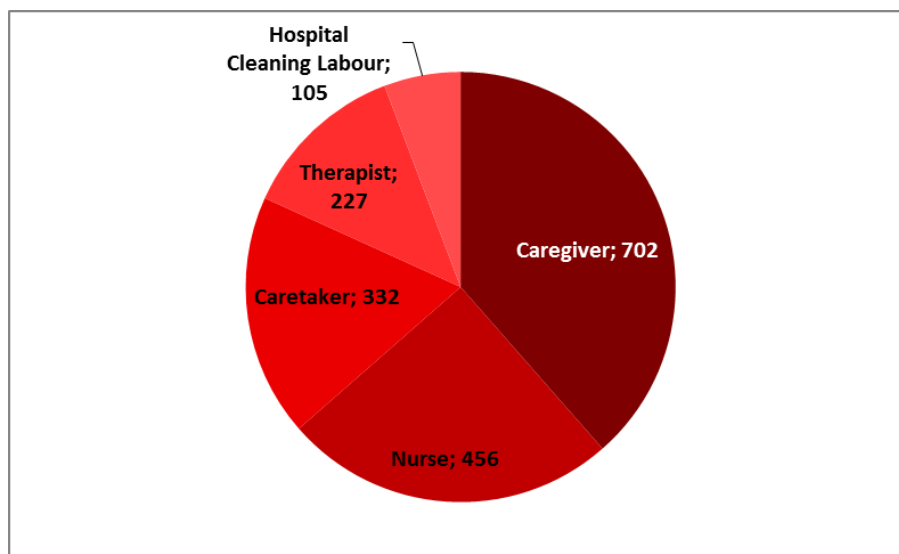
3. Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia (TKKI)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri, tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri adalah setiap tenaga kesehatan warga negara Indonesia yang melakukan upaya kesehatan baik langsung maupun tidak langsung untuk didayagunakan di luar negeri yang di dalamnya termasuk alih ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jangka waktu tertentu. Pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia dan peluang kerja bagi tenaga kesehatan Indonesia di luar negeri. Negara tujuan harus membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia dan/atau memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi warga negara asing.

Pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri dilakukan dalam rangka penempatan TKKI ke luar negeri dan bakti sosial. TKKI adalah TKI tenaga kesehatan yang berpraktik/bekerja pada bidang kesehatan. TKKI dapat berasal dari tenaga kesehatan dengan status pegawai negeri sipil atau perseorangan/mandiri. TKKI harus bekerja sesuai dengan kompetensi dan telah teregistrasi. Penempatan TKKI dilakukan atas dasar permintaan dari pengguna (instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, dan Badan Hukum Swasta) di negara tujuan. Penempatan TKKI dilaksanakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

GAMBAR 3.28

JUMLAH PENEMPATAN TKKI MENURUT JENIS PERMINTAAN NEGARA PENGGUNA TAHUN 2015



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Total TKKI yang bekerja di luar negeri pada tahun 2015 sebanyak 1.822 orang yang tersebar di 24 negara. Negara pengguna TKKI 99,6% berada di Benua Asia, selebihnya tersebar di Benua Afrika, Amerika, dan Republik Palau. Negara di Asia Tenggara yang menjadi negara pengguna TKKI pada tahun 2015 yaitu Singapura (177 orang), Malaysia (64 orang), dan Brunai Darussalam (9 orang). Negara tujuan yang paling banyak mendayagunakan TKKI yaitu Taiwan sebanyak 625 orang dengan mayoritas bekerja sebagai *caregiver* (433 orang). Jenis permintaan TKKI pada tahun 2015 yaitu 38,53% sebagai *caregiver* (*caregiver* dan *female caregiver*), 25,03% sebagai *nurse* (*nurse*, *assistant nurse*, *operation theatre nurse*, *ICU staff nurse*, *house nurse*, dan *child nurse*), 18,22% sebagai *caretaker*, 12,46% sebagai *therapist* (*therapist* dan *speech therapist*), dan 5,76% sebagai *hospital cleaning labour*. Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan TKKI menurut negara pengguna dapat dilihat di Lampiran 3.23.

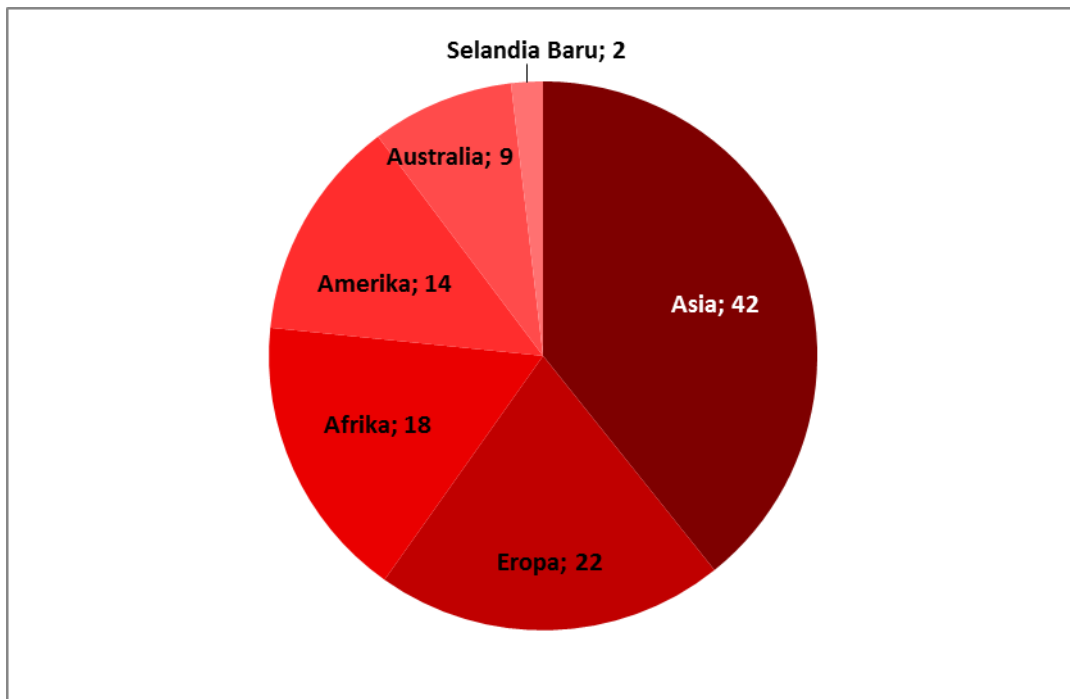
4. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing menyebutkan bahwa tenaga kesehatan warga negara asing (TK-WNA) adalah warga negara asing yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh pemerintah. Pendayagunaan TK-WNA dapat dilakukan sepanjang terdapat hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara asal TK-WNA. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 53 Ayat 2, pendayagunaan TK-WNA dilakukan dengan mempertimbangkan alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta ketersediaan tenaga kesehatan setempat.

Kegiatan pendayagunaan TK-WNA meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, bakti sosial di bidang kesehatan, dan penelitian kesehatan. Jenis TK-WNA yang dapat didayagunakan di antaranya dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain. TK-WNA yang akan menjalankan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi yang dilakukan melalui penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan untuk menjalankan praktik. Sebelum menjalankan praktik, TK-WNA harus memiliki STR sementara dan SIP yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk satu tahun berikutnya.

GAMBAR 3.29

**PROPORSI JUMLAH TK-WNA MENURUT BENUA NEGARA ASAL
TAHUN 2015**



Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Total TK-WNA yang bekerja di Indonesia tahun 2015 sebanyak 107 orang. Jumlah TK-WNA paling banyak berasal dari Benua Asia (39,25%) dan paling sedikit dari Selandia Baru (1,87%). Jumlah TK-WNA dari Asia Tenggara sebanyak 17 orang yang berasal dari Malaysia (7 orang), Singapura (5 orang), Filipina (4 orang), dan Kamboja (1 orang). Menurut jenis kegiatan, 93 orang bekerja di bidang manajerial, 7 orang di bidang pendidikan, dan 7 orang di bidang pelatihan. Rincian lengkap mengenai jumlah TK-WNA menurut negara asal dapat dilihat di Lampiran 3.24.



BAB IV

PEMBIAYAAN KESEHATAN



Bab IV

Pembiayaan Kesehatan

Salah satu sub sistem dalam kesehatan nasional adalah sub sistem pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan sendiri merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Secara umum, sumber biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran masyarakat.

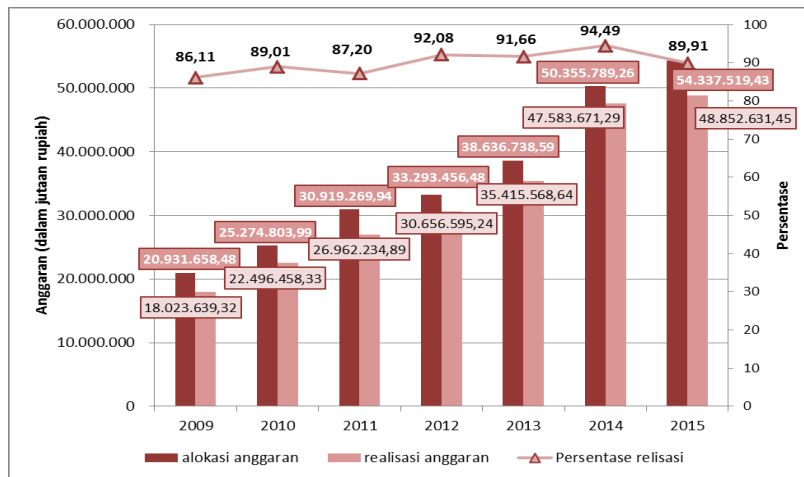
Di dalam Bab Pembiayaan Kesehatan ini selanjutnya akan dibahas mengenai alokasi dan realisasi anggaran kesehatan baik di pusat maupun di daerah. Anggaran kesehatan adalah anggaran kesehatan yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pemerintah. Anggaran tersebut meliputi anggaran kesehatan di Kementerian Kesehatan, dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kesehatan, dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Selain itu, juga dijelaskan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Alokasi anggaran kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 sebesar 54,3 trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 48,9 trilyun rupiah. Besar alokasi maupun realisasi anggaran tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014, yaitu alokasi sebesar 50,4 trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 47,6 trilyun rupiah. Namun demikian, jika dilihat dari persentase realisasi tahun sebelumnya, angkanya mengalami penurunan, dimana persentase realisasi anggaran Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 sebesar 89,1%, turun dari tahun 2014 yang sebesar 94,99%.

GAMBAR 4.1

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2009 – 2015**

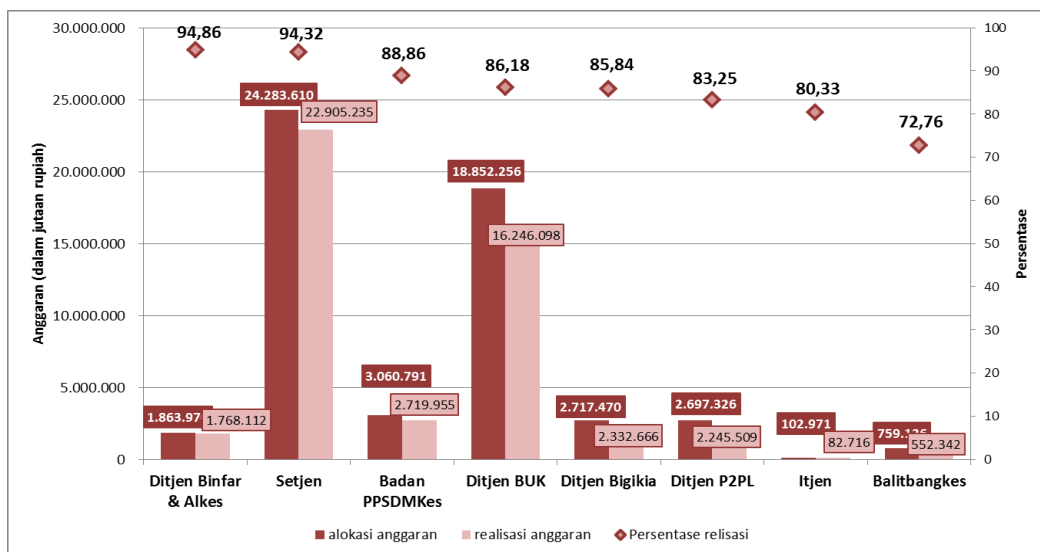


Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2016

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan dalam tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2009 Kementerian Kesehatan RI memiliki alokasi anggaran sebesar 20,93 trilyun rupiah dengan realisasi 18,05 trilyun rupiah dan persentase realisasi sebesar 86,11%, jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2015 menjadi 54,3 trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 48,9 trilyun rupiah sehingga persentase realisasi sebesar 89,91%.

GAMBAR 4.2

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT UNIT ESELON I
TAHUN 2015**



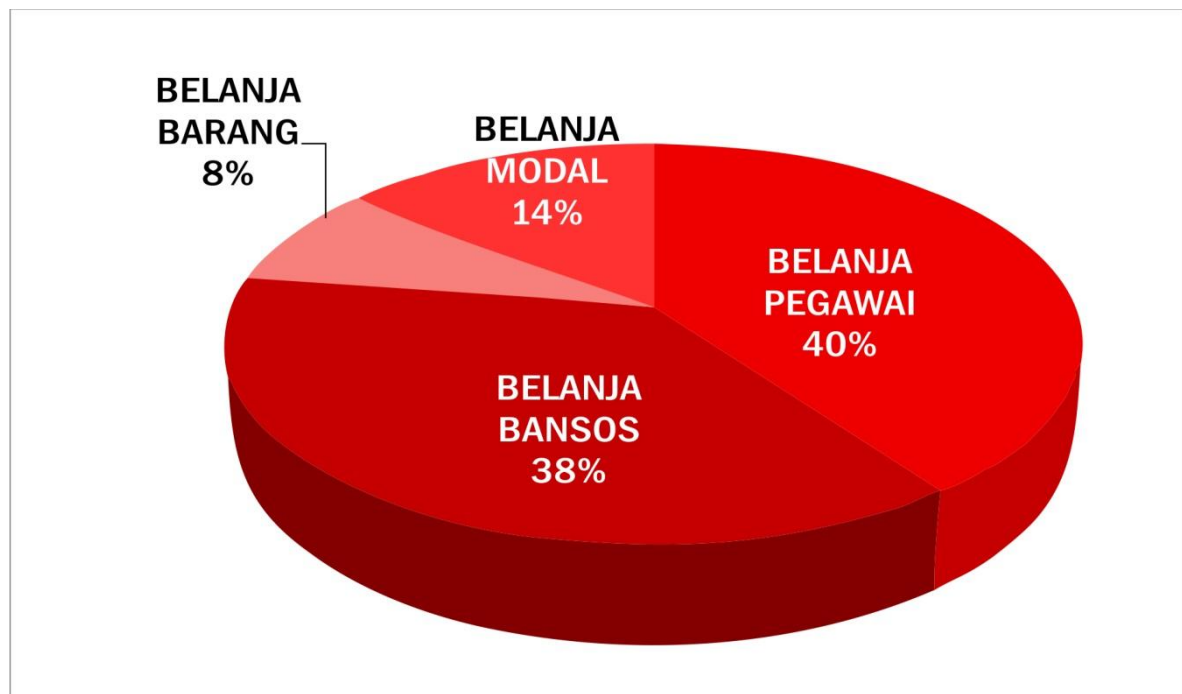
Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2016

Distribusi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut unit kerja eselon I menunjukkan bahwa alokasi terbesar terdapat pada Sekretariat Jenderal (Setjen) sebesar 24,3 trilyun rupiah, sedangkan alokasi terendah pada Inspektorat Jenderal sebesar 103 miliar rupiah. Unit Eselon I dengan persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Binfar dan Alkes) sebesar 94,86%, sedangkan realisasi terendah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) dengan persentase realisasi sebesar 72,76%. Data dan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut unit eselon I pada tahun 2015 terdapat pada Lampiran 4.1.

Dari keseluruhan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan yang sebesar 54,3 trilyun rupiah, sebanyak 20,36 trilyun rupiah atau sebesar 38% nya merupakan dana untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dana tersebut diwujudkan melalui anggaran belanja bantuan sosial (Bansos) Kementerian Kesehatan. Selain itu, 40% anggaran Kementerian Kesehatan lainnya dialokasikan untuk belanja pegawai, 14% lainnya merupakan belanja modal, dan sisanya sebesar 8% digunakan untuk belanja barang.

GAMBAR 4.3

PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2015



Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2016

B. ALOKASI DAN REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Sesuai ketentuan yang diatur dalam PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan PMK No. 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah disempurnakan dengan PMK No. 248/PMK.07/2010 dalam rangka pelaksanaan pelimpahan wewenang dan penugasan kepada kepala daerah yang didanai oleh pemerintah, untuk mendukung pencapaian pembangunan yang menjadi fokus/ prioritas nasional, serta meningkatkan peran provinsi dalam kerangka *good governance* dalam mengawal pelaksanaan program kementerian/lembaga (K/L) di daerah dan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut, maka pemerintah melalui K/L mengatur pemberian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Prinsip pendanaan dekonsentrasi adalah untuk mendanai pelaksanaan tugas dan kewenangan gubernur selaku wakil pemerintah di daerah, sifat kegiatan yang didanai ialah kegiatan non-fisik seperti sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian. Proses penganggaran dana dekonsentrasi ini melalui beberapa tahap/mekanisme, di antaranya penetapan pagu alokasi dana dekonsentrasi pada masing-masing pemerintah daerah (dalam hal ini dinas kesehatan provinsi) oleh satuan kerja (satker) pengampu program di tingkat pusat, pengajuan usulan kegiatan oleh dinas kesehatan provinsi dengan mengacu pada menu dekonsentrasi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pemeriksaan terhadap usulan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa unit pusat terkait. Dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan hanya bisa dialokasikan kepada dinas kesehatan provinsi, yang selanjutnya dikelola untuk membiayai kegiatan non fisik yang dimungkinkan melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota. Data dan informasi lebih rinci mengenai alokasi dan realisasi dana dekonsentrasi pada tahun 2015 disajikan pada Lampiran 4.4.

Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan dapat dialokasikan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap antara lain pengadaan tanah,

bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya.

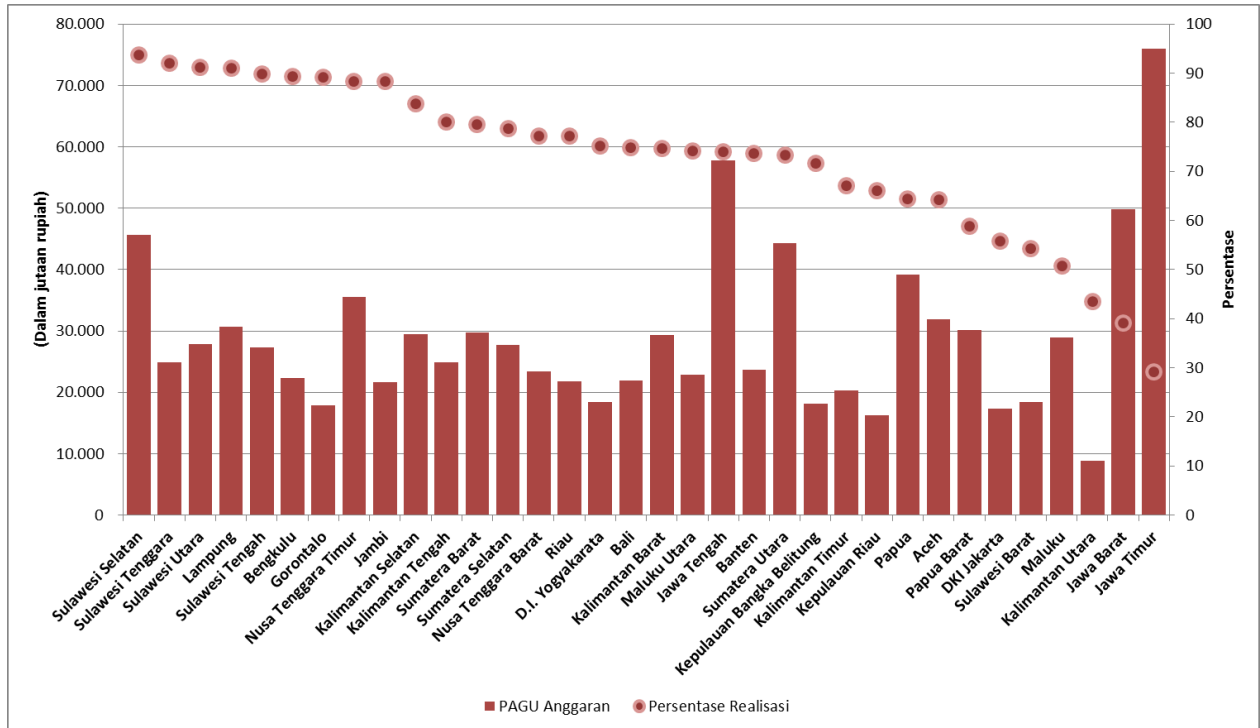
Pada tahun 2015, anggaran kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan sebesar Rp 54.337.519.430.000,-. Dari alokasi tersebut, sebesar 1,81% atau senilai Rp 983.955.658.000,- dialokasikan untuk dana dekonsentrasi yang tersebar di 34 dinas kesehatan provinsi di seluruh Indonesia dalam enam program. Enam program tersebut yaitu : (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, (2) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, (3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan, (4) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, (5) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan (6) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dana dekonsentrasi dialokasikan untuk mencapai sasaran program yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagi kesinambungan program antara pusat dan daerah dengan memperhatikan menu wajib dan pilihan yang telah ditetapkan.

Untuk alokasi pagu anggaran Tugas Pembantuan (TP) tahun 2015, Kementerian Kesehatan mengalokasikan dana sebesar 8,44% atau Rp. 4.588.306.686.000,- yang tersebar di berbagai daerah dalam 3 program, yaitu : (1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, (2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan, dan (3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Alokasi dana dekonsentrasi yang ada di Kementerian Kesehatan didistribusikan ke seluruh dinas kesehatan provinsi di Indonesia.

Pagu dan realisasi dana dekonsentrasi kesehatan menurut provinsi tahun 2015 disajikan pada Gambar 4.4. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi dana dekonsentrasi paling rendah terdapat pada Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 29,10%, sedangkan alokasi anggaran dana dekonsentrasinya paling tinggi di antara provinsi lainnya. Realisasi terendah ke dua yaitu Provinsi Jawa Barat (39,12%) meski alokasi anggaran dekonsentrasinya merupakan yang tertinggi ke tiga setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan provinsi yang realisasinya paling tinggi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 93,65%. Hal ini perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terutama mengenai penyebab rendahnya penyerapan anggaran dekonsentrasi pada beberapa provinsi, termasuk di dalamnya analisis mengenai kecukupan alokasi anggaran dekonsentrasi pada setiap program di tiap provinsi itu sendiri.

GAMBAR 4.4

REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2015



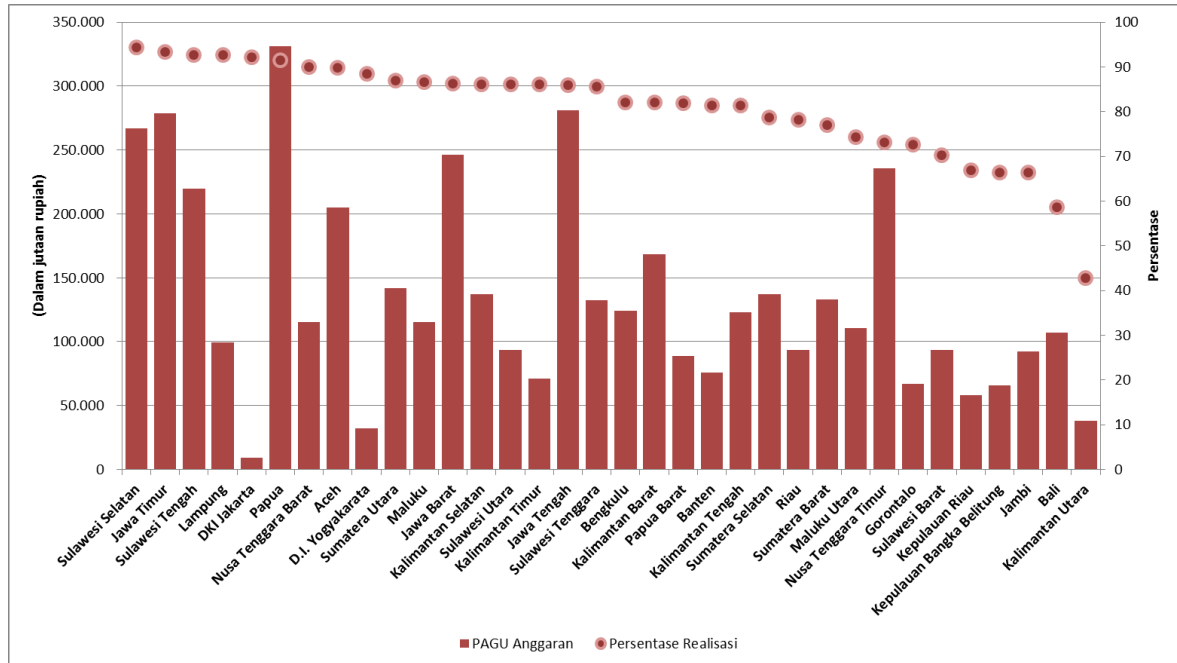
Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2016

Realisasi dana TP Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 3.836.633.602.922,- dari total alokasi Rp 4.588.306.686.000,- atau sebanyak 83,62%. Alokasi dana TP yang ada di Kementerian Kesehatan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Gambaran mengenai persentase penyerapan anggaran TP Kementerian Kesehatan menurut provinsi tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Dari Gambar 4.5 tersebut dapat diketahui bahwa realisasi persentase dana TP tertinggi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 94,36%, sedangkan realisasi terendah terdapat pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 42,83%. Sedangkan jika dilihat dari alokasi anggaran, alokasi anggaran Tugas Pembantuan terbesar pada Provinsi Papua dan yang terendah yaitu Provinsi DKI Jakarta. Data dan informasi lebih rinci mengenai alokasi dan realisasi dana TP pada tahun 2015 terdapat pada Lampiran 4.5.

GAMBAR 4.5

PAGU DAN REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN KESEHATAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2015



Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2016

C. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk percepatan pencapaian MDGs bidang kesehatan tahun 2015, melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes, Posyandu dan UKBM lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Dana BOK adalah dana APBN Kementerian Kesehatan yang disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme Tugas Pembantuan. Selain itu diharapkan dengan bantuan ini dapat meningkatkan kualitas manajemen puskesmas, terutama dalam perencanaan tingkat puskesmas dan lokakarya mini puskesmas, meningkatkan upaya untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya, dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh puskesmas dan jaringannya serta poskesdes dan posyandu.

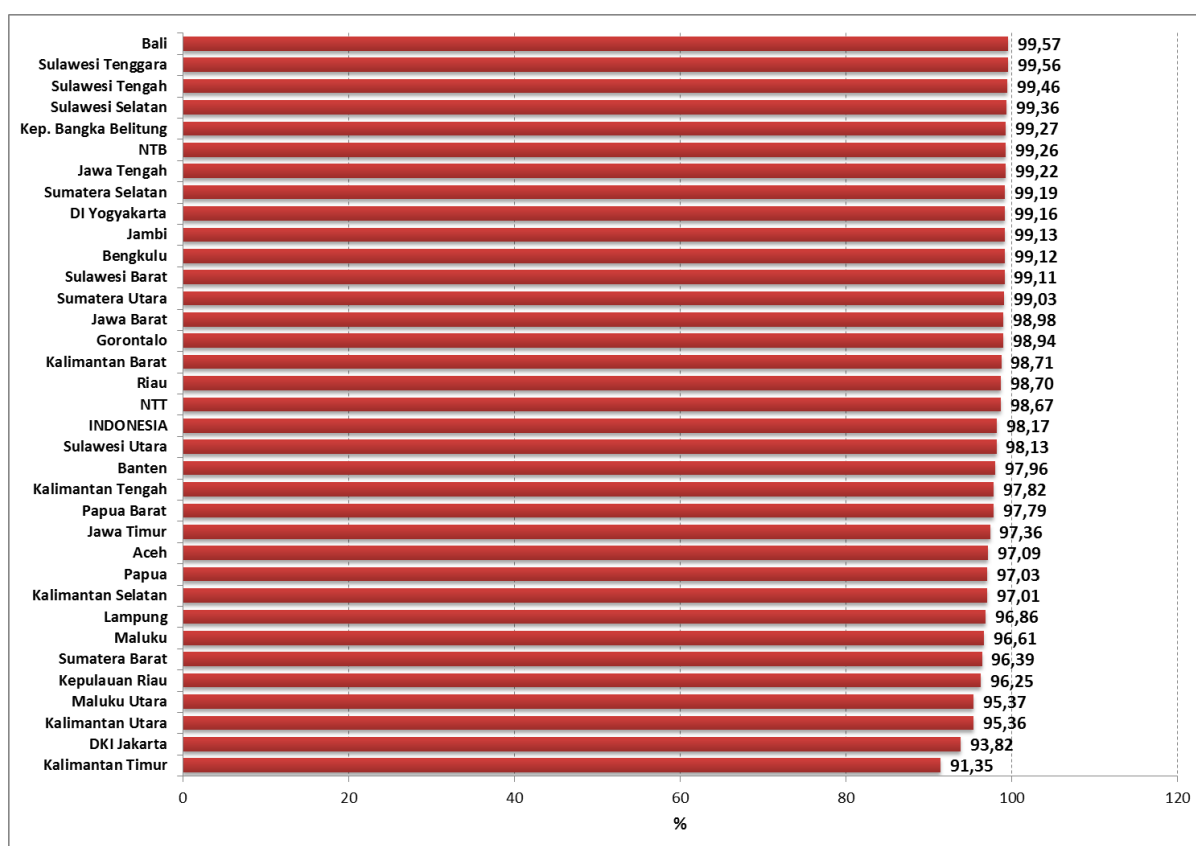
Pemanfaatan dana BOK difokuskan pada beberapa upaya kesehatan promotif dan preventif meliputi kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit, dan upaya kesehatan lain sesuai risiko dan masalah utama

kesehatan di wilayah setempat dengan tetap mengacu pada pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan serta target MDGs Bidang Kesehatan tahun 2015.

Pada proses pelaksanaannya, berbagai upaya penyempurnaan telah dilakukan dalam penyaluran dana BOK melalui Tugas Pembantuan. Realisasi pemanfaatan dana BOK pada tahun 2015 sebesar Rp 1.354.055.978.464,- dari alokasi sebesar Rp 1.379.267.771.000,- dengan persentase realisasi 98,17%. Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 97,98%.

GAMBAR 4.6

**PERSENTASE PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**



Sumber : Ditjen. Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Dari gambar di atas dapat diketahui provinsi yang memiliki penyerapan dana BOK tertinggi yaitu Provinsi Bali sebesar 99,57% dan Provinsi Kalimantan Timur memiliki penyerapan terendah sebesar 91,35%. Data dan informasi mengenai alokasi serta realisasi dana BOK menurut provinsi tahun 2015 terdapat pada Lampiran 4.6.

BOK sebagai suplemen pembiayaan operasional puskesmas diharapkan mampu berkontribusi dalam pencapaian indikator pembangunan kesehatan secara nasional melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas. Dinas kesehatan provinsi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan juga memiliki peran serta yaitu melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan BOK di kabupaten/kota. Dengan kehadiran BOK diharapkan petugas kesehatan/kader kesehatan tidak lagi mengalami kendala dalam melakukan kegiatan untuk mendekatkan akses kesehatan pada masyarakat.

BOK bukan merupakan dana utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di puskesmas dan jaringannya, namun hanya dana tambahan yang sifatnya bantuan. Pemerintah daerah tetap berkewajiban mengalokasikan dana operasional untuk puskesmas yang berada di wilayahnya.

BOK tahun 2015 sebesar Rp. 1.379.267.771.000,- dialokasikan untuk 9.719 Puskesmas, 506 Satuan Kerja. Mekanisme penyaluran dana BOK tahun 2015 masih tetap menggunakan mekanisme Tugas Pembantuan.

BOK berkontribusi dalam peningkatan kinerja petugas kesehatan di Puskesmas dalam pelaksanaan program bersifat promotif dan preventif terutama kegiatan operasional di lapangan. Sebagian besar dana BOK di puskesmas digunakan untuk mendukung program KIA, diikuti dengan program Gizi, Promosi Kesehatan, Imunisasi dan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Sesuai dengan Petunjuk Teknis BOK Tahun 2015, dana BOK minimal 60% digunakan untuk mendukung program kesehatan prioritas nasional khususnya target MDGs. Hasil evaluasi tahun 2015 secara umum terjadi peningkatan capaian target indikator program, khususnya untuk Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Pengendalian Penyakit (HIV AIDS, TB dan Malaria) serta Kesehatan Lingkungan (khususnya sanitasi). Hasil evaluasi di beberapa kabupaten juga menunjukkan adanya peningkatan cakupan program dibandingkan tahun sebelumnya.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan BOK adalah kurangnya jumlah tenaga keuangan dan kemampuan petugas puskesmas dalam menyusun pertanggung jawaban keuangan, kurangnya motivasi tim pengelola Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, kurangnya koordinasi antar program di Dinas Kesehatan dalam melakukan verifikasi *Plan of Action* (POA) dan pertanggung jawaban keuangan, kualitas POA yang disusun Puskesmas masih belum optimal. Permasalahan program terutama adalah jumlah, distribusi dan kualitas SDM kesehatan; dan kurangnya sarana prasarana serta alat kesehatan untuk mendukung pelaksanaan program. Selain itu yang harus menjadi perhatian adalah kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan dana operasional program kesehatan di puskesmas. Umumnya puskesmas, mengalami pengurangan dana operasional sejak adanya BOK.

Pengaruh dana BOK terhadap cakupan program peningkatan kesehatan dapat dilihat berdasarkan data capaian program yang diberikan dinas kesehatan kab/kota dari tahun 2013 sampai 2014. Tampak peningkatan setelah adanya kontribusi dana BOK, terutama program pelayanan kesehatan dasar. Salah satu contohnya adalah indikator

kunjungan ibu hamil (K4), berdasarkan data capaian program, persentasenya mengalami peningkatan dari 86,70% pada tahun 2014 menjadi 87,45% pada tahun 2015.

Berdasarkan masukan daerah pada saat monitoring evaluasi permasalahan dalam pelaksanaan BOK dapat diatasi dengan 3 kata kunci yaitu : **PROAKTIF**, **VERIFIKASI** lebih cepat, **KOORDINASI** antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dinas kesehatan, puskesmas baik dari segi program maupun keuangan.

D. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Untuk mewujudkan komitmen global sebagaimana amanat resolusi WHA ke-58 tahun 2005 di Jenewa yang menginginkan setiap negara mengembangkan *Universal Health Coverage* (UHC) bagi seluruh penduduk, maka pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, di antaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah pusat memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan pemerintah daerah dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi atau terbagi-bagi, sehingga biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali.

Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2014. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program JKN.

JKN diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Manfaat JKN terdiri atas dua jenis, yaitu manfaat medis dan manfaat non-medis. Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non-medis meliputi akomodasi

dan ambulans. Manfaat akomodasi untuk layanan rawat inap sesuai hak kelas perawatan peserta. Manfaat ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan, dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Manfaat JKN mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Seperti misalnya untuk pelayanan pencegahan (promotif dan preventif), peserta JKN akan mendapatkan pelayanan: penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat; imunisasi dasar, meliputi *Baccille Calmett Guerin* (BCG), difteri pertusis tetanus dan Hepatitis B (DPT-HB), Polio dan Campak; keluarga berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi; skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu, jenis penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal).

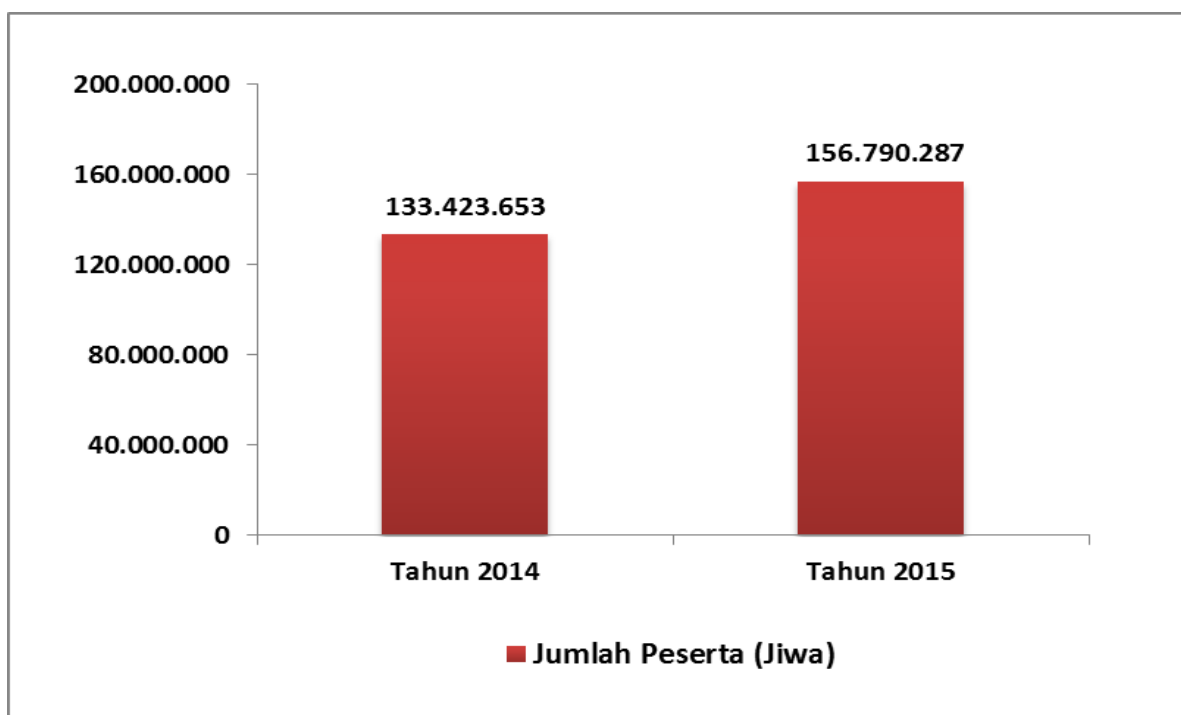
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN, peserta dalam program JKN meliputi setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar pemerintah. Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri atas dua kelompok yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan peserta bukan PBI jaminan kesehatan. Peserta PBI jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta bukan PBI jaminan kesehatan adalah Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Pada tahap awal kepersertaan program JKN yang dimulai pada 1 Januari 2014 terdiri dari peserta PBI JKN (pengalihan dari program Jamkesmas), anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya, anggota POLRI dan PNS di lingkungan POLRI dan anggota keluarganya, peserta asuransi kesehatan sosial dari PT. Askes (Persero) beserta anggota keluarganya, peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dari PT. (Persero) Jamsostek dan anggota keluarganya, peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang telah berintegrasi, dan peserta mandiri (pekerja bukan penerima upah dan pekerja penerima upah).

Sampai dengan Desember 2015, cakupan kepesertaan program JKN berjumlah 156.790.287 peserta. Bila dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah peserta BPJS Kesehatan meningkat sebesar 17,51% yaitu dari 133.423.653 jiwa pada tahun 2014 menjadi 156.790.287 jiwa pada tahun 2015.

GAMBAR 4.7

PERKEMBANGAN JUMLAH PESERTA BPJS KESEHATAN TAHUN 2014 DAN 2015



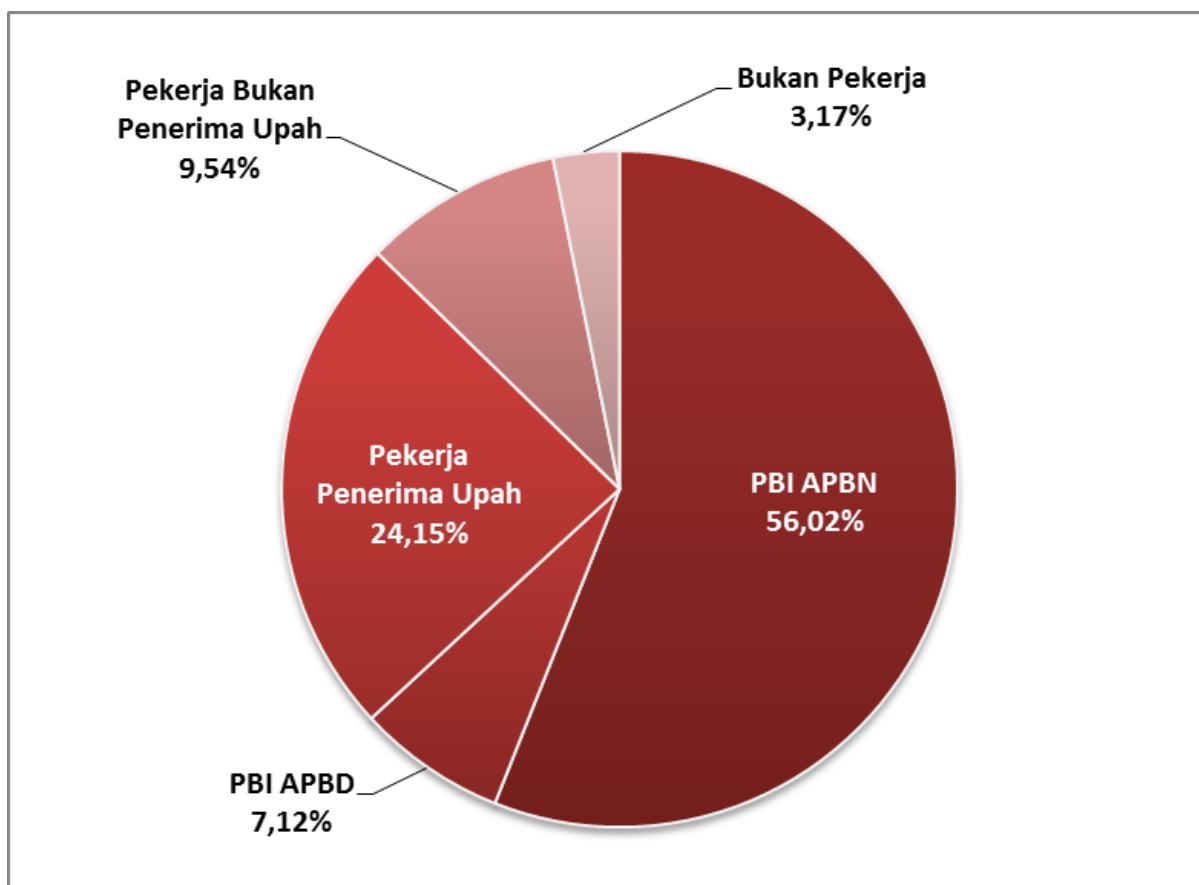
Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2015 terdiri dari peserta PBI yang berjumlah 98.999.228 jiwa dan peserta non PBI yang berjumlah 57.791.059 jiwa. Peserta PBI terdiri dari peserta dengan iuran bersumber dari APBN sebanyak 87.828.613 peserta dan yang bersumber dari APBD berjumlah 11.170.615 peserta. Sedangkan peserta non PBI terdiri atas pekerja penerima upah yang berjumlah 37.862.522 peserta, pekerja bukan penerima upah yang berjumlah 14.961.768 peserta, dan bukan pekerja yang berjumlah 4.966.769 peserta.

Menurut proporsinya, jumlah peserta BPJS Kesehatan tertinggi pada tahun 2015 yaitu segmen peserta PBI APBN sebesar 56,02%, disusul kemudian oleh segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 24,15%, dan segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 9,54%. Proporsi jumlah peserta BPJS Kesehatan terendah yaitu dari segmen peserta Bukan Pekerja (BP) sebesar 3,17%. Proporsi jumlah peserta BPJS Kesehatan per 31 Desember 2015 menurut segmen peserta dapat dilihat pada gambar berikut.

GAMBAR 4.8

PROPORSI JUMLAH PESERTA BPJS KESEHATAN PER 31 DESEMBER 2015

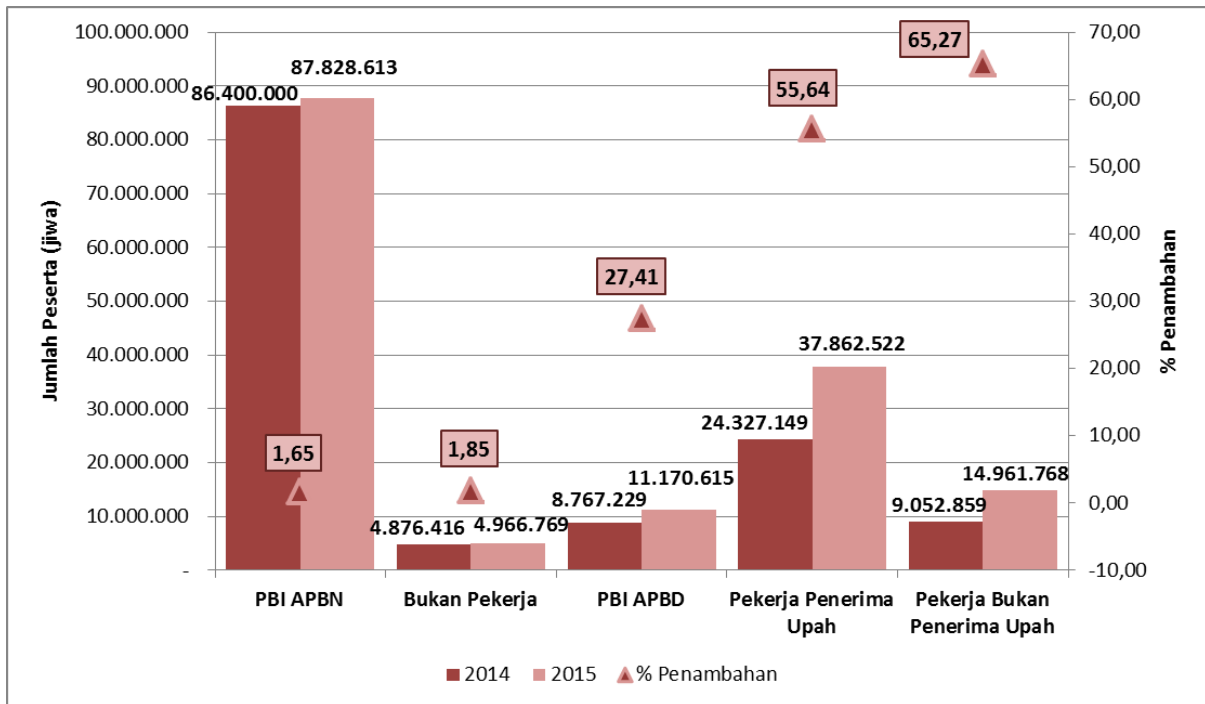


Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Namun jika dilihat dari persentase penambahan dari tahun sebelumnya, jumlah peserta BPJS Kesehatan yang persentase penambahannya terbesar yaitu pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 65,27% dan kemudian segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 55,64%. Jumlah peserta BPJS Kesehatan dan persentase penambahannya tahun 2014 - 2015 menurut segmen peserta dapat dilihat pada Gambar 4.9.

GAMBAR 4.9

**GAMBARAN JUMLAH PESERTA BPJS KESEHATAN
MENURUT JENIS DAN PERSENTASE PENAMBAHANNYA
TAHUN 2014 – 2015**

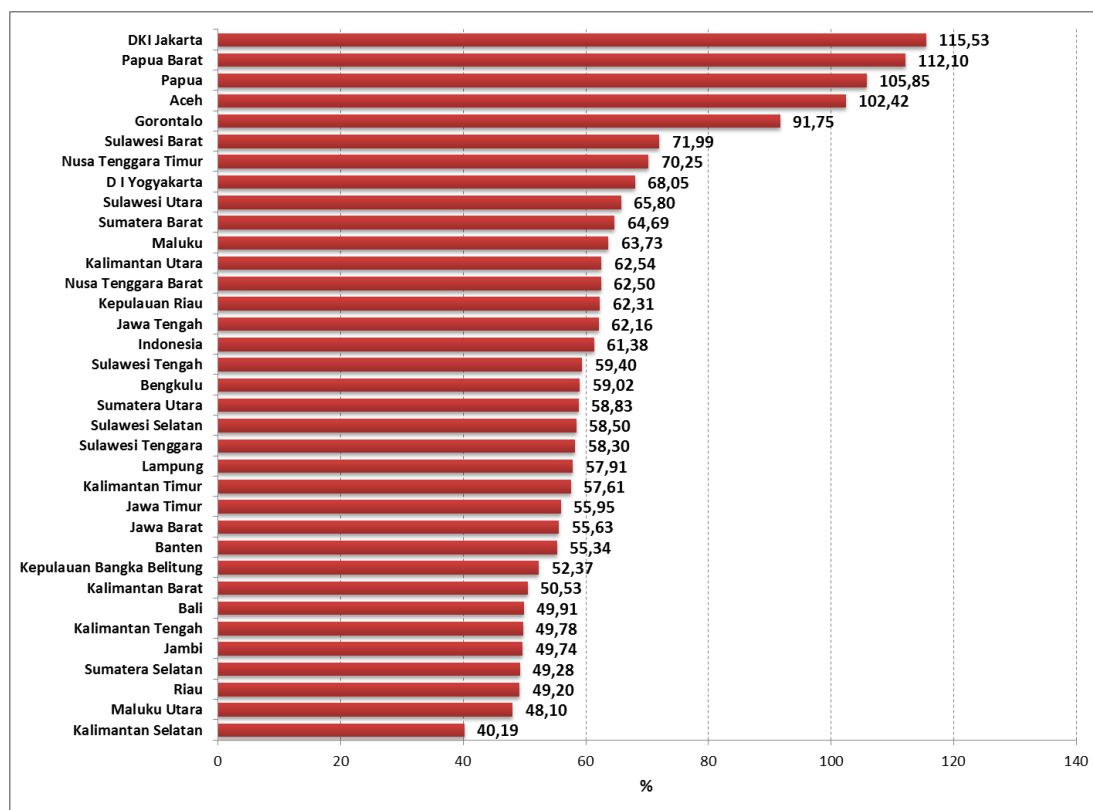


Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Jumlah peserta BPJS Kesehatan per 31 Desember 2015 sebesar 61,38% dari seluruh jumlah penduduk. Provinsi dengan cakupan kepesertaan tertinggi yaitu DKI Jakarta dengan 115,53% penduduk. Sedangkan provinsi dengan cakupan kepesertaan terendah yaitu Kalimantan Selatan dengan 40,19% penduduk. Data dan informasi lebih rinci mengenai jumlah peserta BPJS Kesehatan menurut provinsi pada tahun 2015 disajikan pada Lampiran 4.7.

GAMBAR 4.10

PERSENTASE KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI
PER 31 DESEMBER 2015



Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

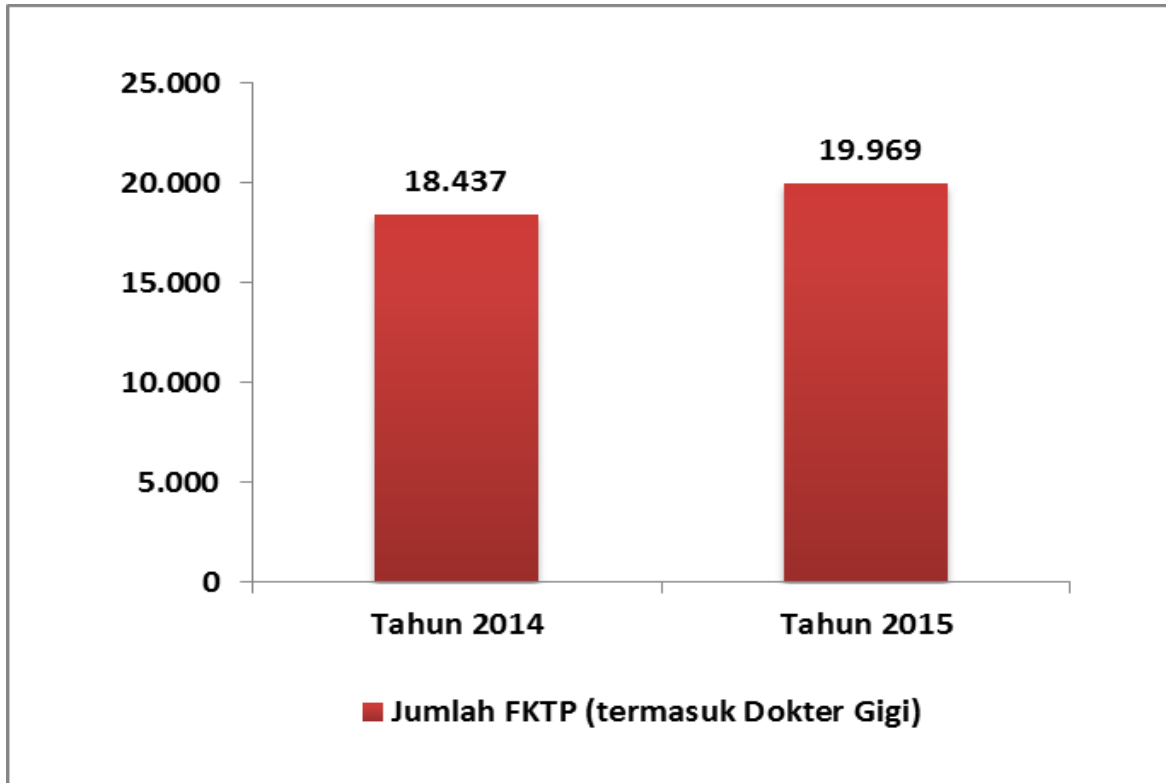
Setiap peserta JKN mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), pelayanan gawat darurat, dan pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat peserta terdaftar, kecuali dalam keadaan tertentu yaitu bagi peserta yang berada di luar wilayah FKTP tempat peserta terdaftar atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis. Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, FKTP harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terdekat sesuai dengan sistem rujukan.

Bila dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan meningkat 8,31% yaitu dari 18.437 FKTP pada tahun 2014 menjadi 19.969 FKTP pada tahun 2015.

GAMBAR 4.11

**PERKEMBANGAN JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
TAHUN 2014 DAN 2015**

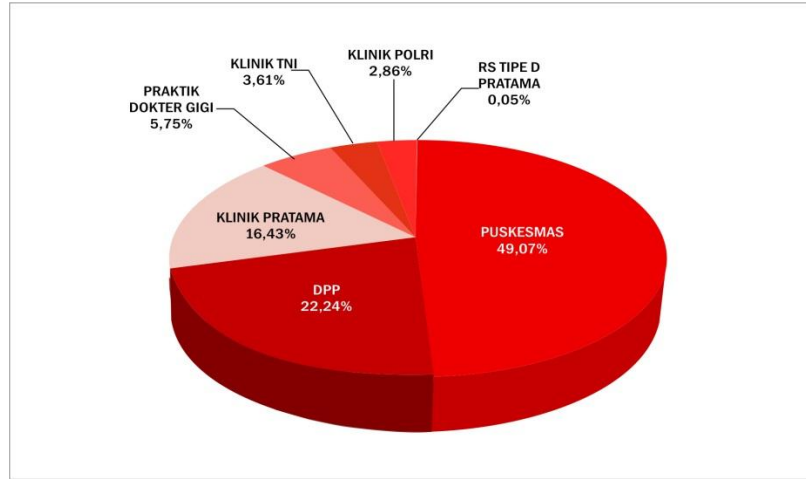


Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Proporsi jumlah FKTP tertinggi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2015 yaitu Puskesmas sebesar 49,07%, disusul kemudian oleh Dokter Praktik Perorangan (DPP) sebesar 22,24%, dan Klinik Pratama sebesar 16,43%. Sedangkan proporsi jumlah FKTP terendah yaitu RS tipe D Pratama sebesar 0,05%. Proporsi jumlah FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2015 menurut jenis FKTP dapat dilihat pada Gambar 4.12.

GAMBAR 4.12

**PROPORSI JENIS FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2015**

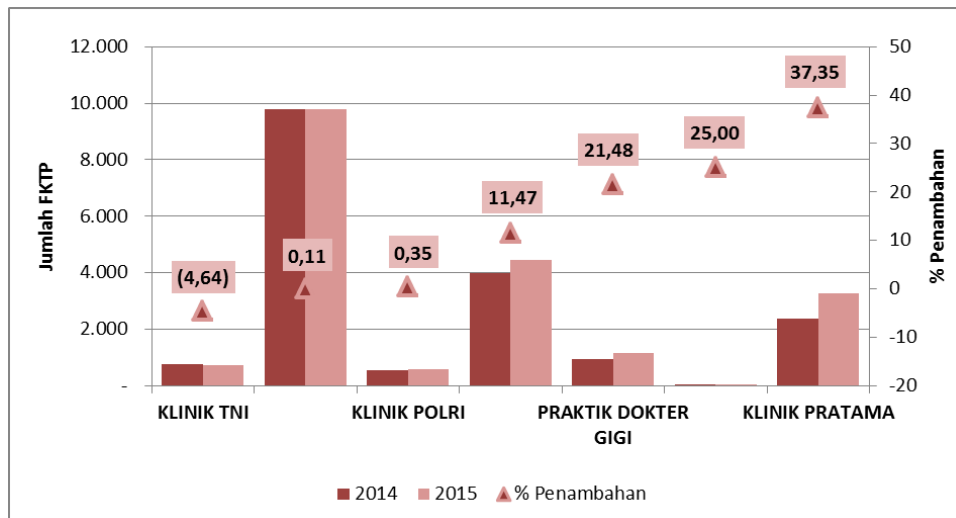


Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Jenis FKTP yang paling banyak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2015 yaitu Puskesmas, kemudian diikuti oleh Dokter Praktik Perorangan (DPP) sebanyak 4.441, Klinik Pratama sejumlah 3.280, dan yang terendah yaitu RS Tipe D Pratama sebanyak 10. Namun jika dilihat dari persentase penambahan dari tahun sebelumnya, FKTP yang persentase penambahannya terbesar ialah Klinik Pratama sebesar 37,35% dan kemudian RS Tipe D Pratama sebesar 25%.

GAMBAR 4.13

**GAMBARAN JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DAN PERSENTASE PENAMBAHANNYA
MENURUT JENIS TAHUN 2014 - 2015**

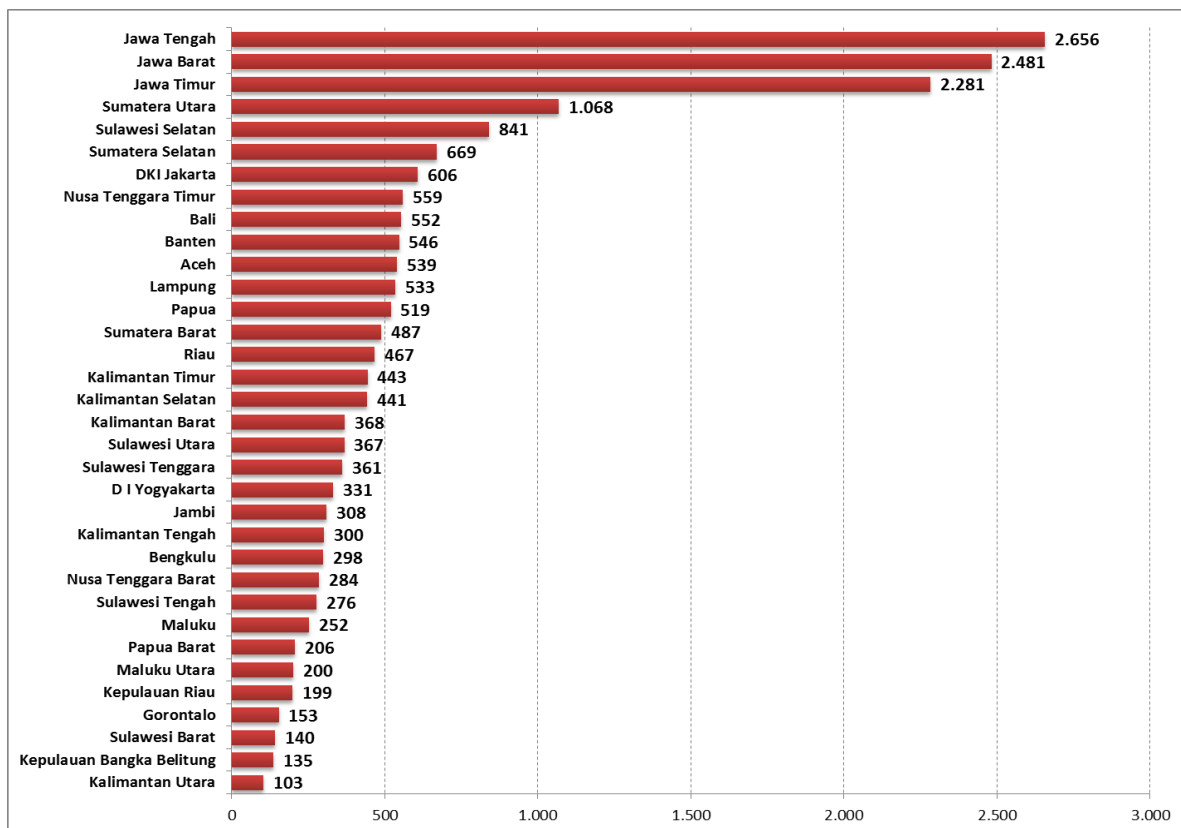


Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Bila dilihat dari distribusi jumlah FKTP yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan, jumlah FKTP tertinggi ada pada Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 2.656. Sedangkan jumlah FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terendah berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah 103 FKTP. Data dan informasi mengenai FKTP yang bekerja sama dengan BPJS pada tahun 2015 disajikan pada Lampiran 4.8.

GAMBAR 4.14

**JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI
PER 31 DESEMBER 2015**

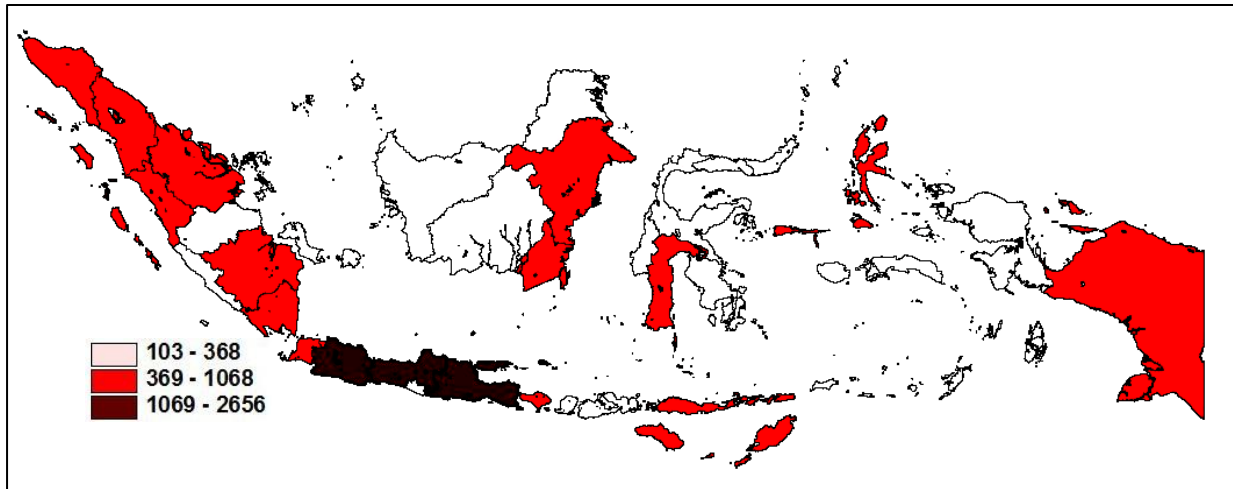


Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Gambar 4.15 memberikan gambaran mengenai sebaran jumlah FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2015. Gambaran distribusi jumlah FKTP ini dibagi menjadi tiga kelompok. Ketiga kelompok tersebut yaitu (1) yang berwarna merah muda ialah provinsi yang jumlah FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berkisar antara 103 – 368 FKTP, (2) yang berwarna merah berjumlah antara 369 – 1068 FKTP, dan (3) yang berwarna merah tua berjumlah 1.069 – 2.656 FKTP.

GAMBAR 4.15

**SEBARAN JUMLAH FKTP YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
TAHUN 2015**

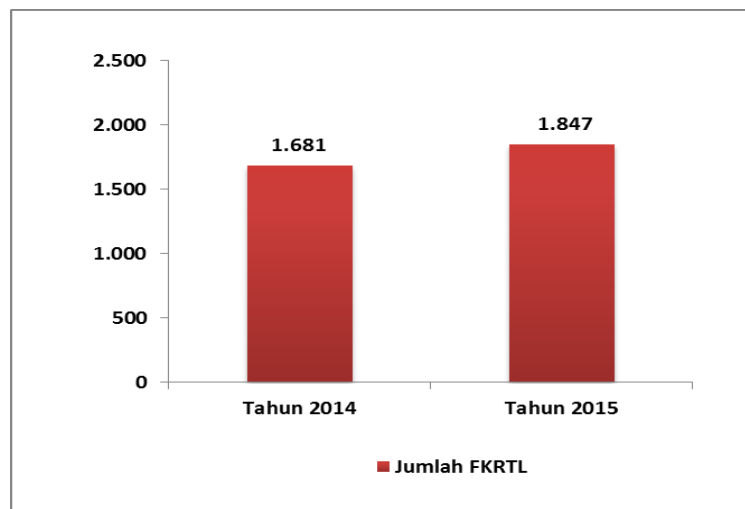


Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Jumlah Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2015 yaitu sebanyak 1.847 FKRTL. Bila dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan meningkat sebesar 9,88% yaitu dari 1.681 FKRTL pada tahun 2014 menjadi 1.847 FKRTL pada tahun 2015. FKRTL penerima rujukan wajib merujuk kembali peserta JKN disertai jawaban dan tindak lanjut yang harus dilakukan jika secara medis peserta sudah dapat dilayani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang merujuk.

GAMBAR 4.16

**PERKEMBANGAN JUMLAH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN (FKRTL)
YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
TAHUN 2014 DAN 2015**

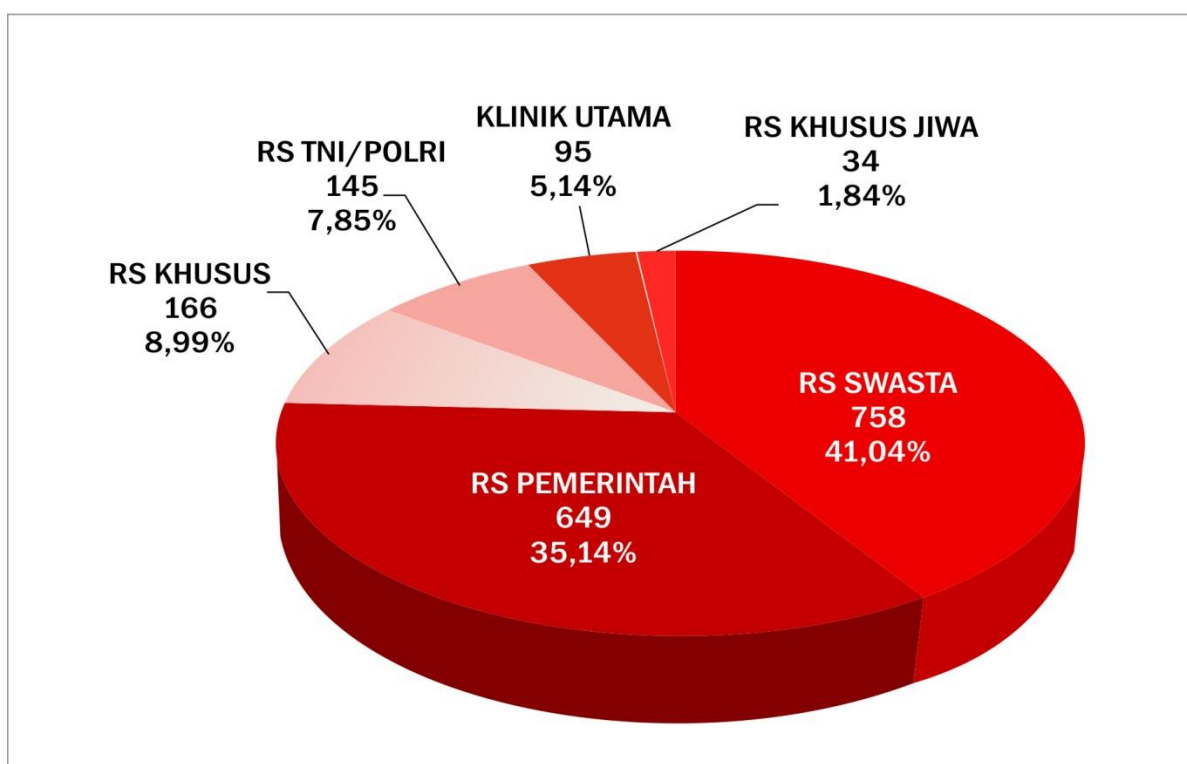


Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Proporsi jumlah FKRTL tertinggi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2015 yaitu RS Swasta sebesar 41,04%, disusul kemudian oleh RS Pemerintah (Tipe A, B, C, dan D) sebesar 35,14%, dan RS Khusus sebesar 8,99%. Proporsi jumlah FKRTL terendah yaitu RS Khusus Jiwa sebesar 1,84%. Proporsi jumlah FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2015 menurut jenis FKRTL dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.9.

GAMBAR 4.17

**PROPORSI JENIS FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN (FKRTL)
YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2015**

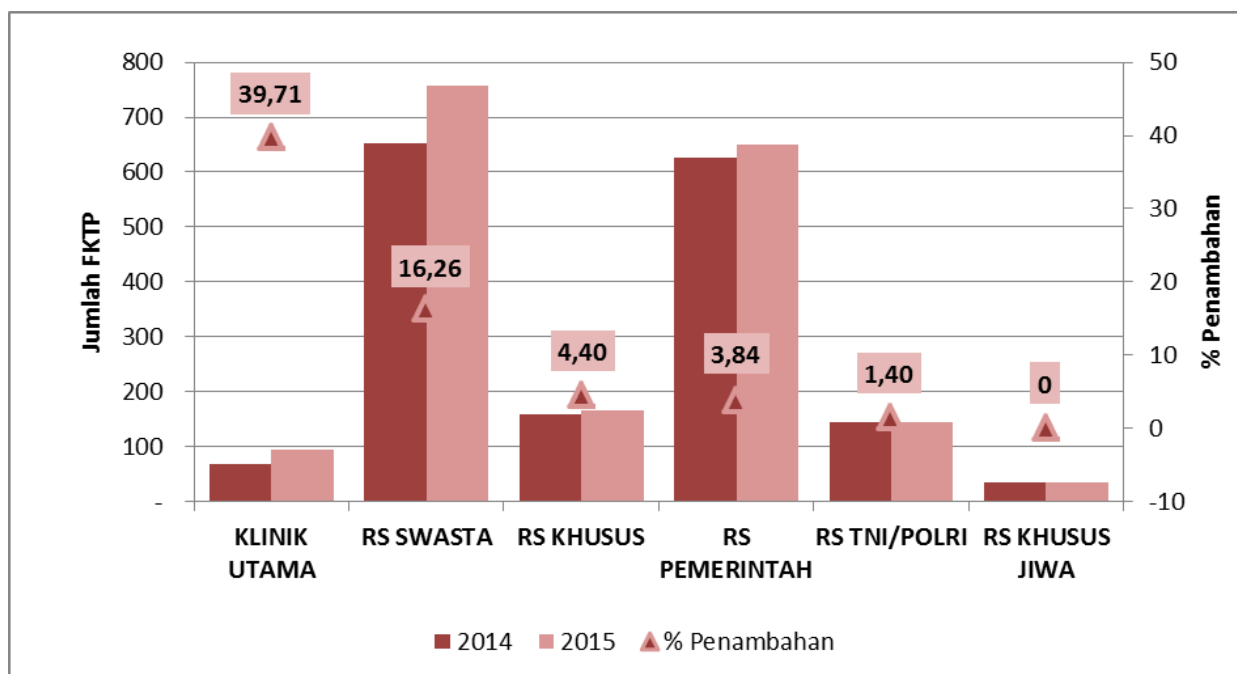


Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Jenis FKRTL yang paling banyak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2015 adalah RS Swasta yaitu sebanyak 758, kemudian diikuti oleh RS Pemerintah sebanyak 649, RS Khusus sejumlah 166, dan yang terendah adalah RS Khusus Jiwa sebanyak 34. Namun jika dilihat dari persentase penambahannya dari tahun sebelumnya, FKRTL yang persentase penambahannya terbesar ialah Klinik Utama sebesar 39,71%, kemudian RS Swasta sebesar 16,26%.

GAMBAR 4.18

GAMBARAN JUMLAH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL)
YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DAN PERSENTASE PENAMBAHANNYA
MENURUT JENIS TAHUN 2014 – 2015

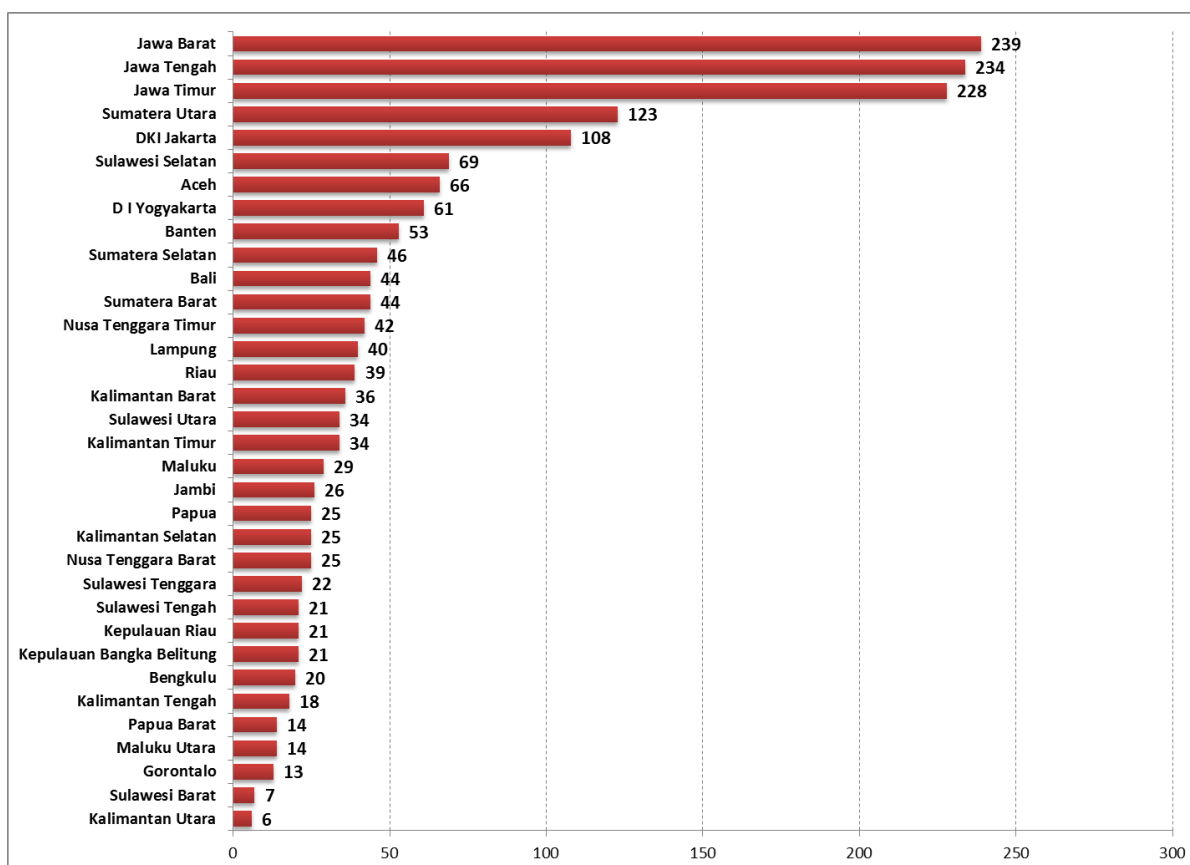


Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

Jumlah FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan menurut provinsi tertinggi ada pada Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 239 FKRTL. Sedangkan jumlah FKRTL terendah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berada di Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebanyak 6 FKRTL. Data dan informasi lebih lengkap mengenai jumlah FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2015 menurut jenis dan provinsi terdapat pada Lampiran 4.9.

GAMBAR 4.19

JUMLAH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN (FKRTL)
YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2015



Sumber : BPJS Kesehatan, 2015

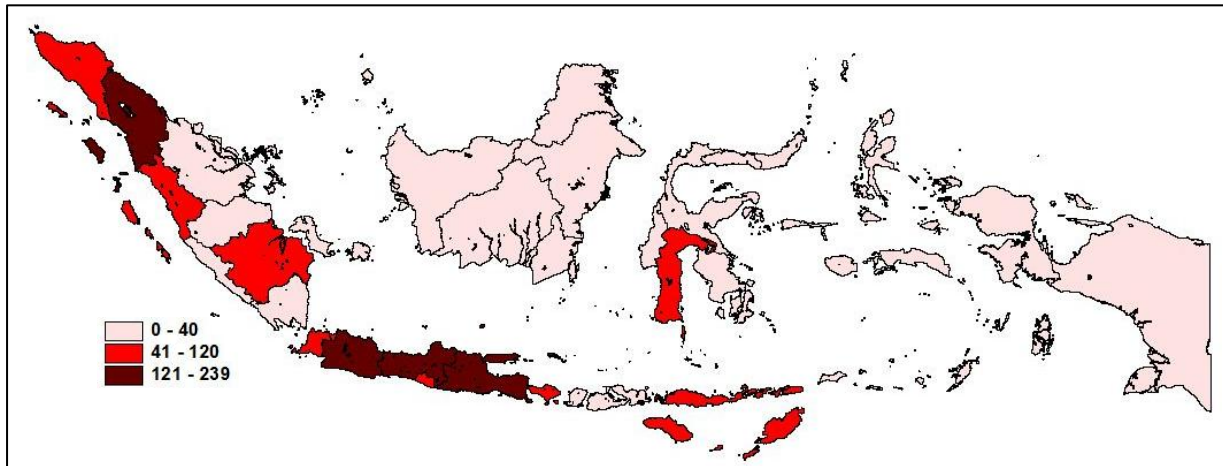
Secara umum, terjadi peningkatan jumlah FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sejak tahun 2014 hingga tahun 2015, yaitu meningkat sebanyak 14,51%. Pada tahun 2014, terdapat 1.613 FKRTL dan jumlah ini meningkat menjadi 1.847 FKRTL pada 2015. Jika dilihat dari jenisnya, peningkatan jumlah terbanyak terdapat pada rumah sakit khusus. Selain itu, pada tahun 2014 tidak terdapat klinik utama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, namun pada tahun 2015 telah terdapat 95 klinik utama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Gambar 4.19 memberikan gambaran mengenai sebaran jumlah FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2015. Gambaran distribusi jumlah FKRTL ini dibagi menjadi tiga kategori. Ketiga kategori tersebut yakni (1) yang berwarna merah muda ialah provinsi yang jumlah FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatannya berkisar antara 0 - 40 fasilitas kesehatan, (2) yang berwarna merah

berjumlah antara 41 - 120 FKRTL, dan (3) yang berwarna merah tua berjumlah 121 - 239 FKRTL.

GAMBAR 4.20

**SEBARAN JUMLAH FKRTL YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
TAHUN 2015**



Sumber : BPJS Kesehatan, 2015



BAB V

KESEHATAN KELUARGA



Bab V

KESEHATAN KELUARGA

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Menurut Salvicion dan Cells (1998), di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Lebih jauh lagi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, menyebutkan bahwa pembangunan keluarga dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Selain lingkungan yang sehat, masih menurut peraturan pemerintah tersebut, kondisi kesehatan dari tiap anggota keluarga sendiri juga merupakan salah satu syarat dari keluarga yang berkualitas.

Sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari masyarakat, keluarga memiliki peran signifikan dalam status kesehatan. Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga. Di dalam komponen keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan kelompok rentan

terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum. Sehingga penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan.

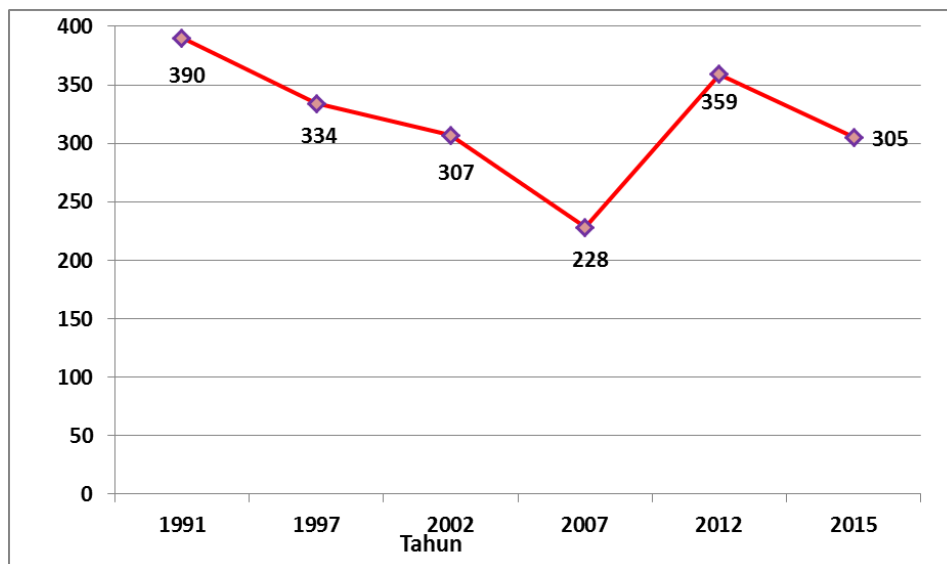
A. KESEHATAN IBU

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Indikator ini tidak hanya mampu menilai program kesehatan ibu, terlebih lagi mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Penurunan AKI di Indonesia terjadi sejak tahun 1991 sampai dengan 2007, yaitu dari 390 menjadi 228. Namun demikian, SDKI tahun 2012 menunjukkan peningkatan AKI yang signifikan yaitu menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. AKI kembali menunjukkan penurunan menjadi 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015. Gambaran AKI di Indonesia dari tahun 1991 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut ini.

GAMBAR 5.1

ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 1991 - 2015



Sumber: BPS, SDKI 1991-2012

Sebagai upaya penurunan AKI, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sejak tahun 1990 telah meluncurkan *safe motherhood initiative*, sebuah program yang memastikan semua wanita mendapatkan perawatan yang dibutuhkan sehingga selamat

dan sehat selama kehamilan dan persalinannya. Upaya tersebut dilanjutkan dengan program Gerakan Sayang Ibu di tahun 1996 oleh Presiden Republik Indonesia. Program ini melibatkan sektor lain di luar kesehatan. Salah satu program utama yang ditujukan untuk mengatasi masalah kematian ibu yaitu penempatan bidan di tingkat desa secara besar-besaran yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir ke masyarakat. Upaya lain yang juga telah dilakukan yaitu strategi *Making Pregnancy Safer* yang dicanangkan pada tahun 2000.

Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan meluncurkan program *Expanding Maternal and Neonatal Survival* (EMAS) dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan neonatal sebesar 25%. Program ini dilaksanakan di provinsi dan kabupaten dengan jumlah kematian ibu dan neonatal yang besar, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dasar pemilihan provinsi tersebut disebabkan 52,6% dari jumlah total kejadian kematian ibu di Indonesia berasal dari enam provinsi tersebut. Sehingga dengan menurunkan angka kematian ibu di enam provinsi tersebut diharapkan akan dapat menurunkan angka kematian ibu di Indonesia secara signifikan.

Program EMAS berupaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal dengan cara : 1) meningkatkan kualitas pelayanan emergensi obstetri dan bayi baru lahir minimal di 150 Rumah Sakit PONEK dan 300 Puskesmas/Balkesmas PONEK; dan 2) memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antar puskesmas dan rumah sakit.

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, kemudahan mendapatkan cuti hamil dan melahirkan, dan pelayanan keluarga berencana.

Pada bagian berikut, gambaran upaya kesehatan ibu yang disajikan terdiri dari : (1) Pelayanan kesehatan ibu hamil, (2) Pelayanan imunisasi Tetanus Toksoid wanita usia subur dan ibu hamil, (3) pelayanan kesehatan ibu bersalin, (4) pelayanan kesehatan ibu nifas, (5) pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan, dan (6) pelayanan kontrasepsi.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan kepada ibu hamil yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi elemen pelayanan sebagai berikut :

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan;
2. Pengukuran tekanan darah;
3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA);
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (*fundus uteri*);
5. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi;
6. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;

7. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);
8. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana);
9. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya); dan
10. Tatalaksana kasus.

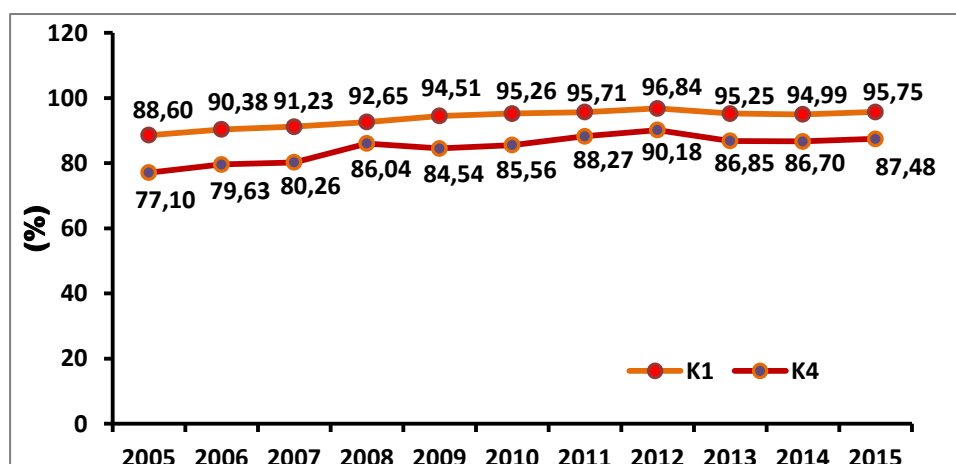
Selain elemen tindakan yang harus dipenuhi, pelayanan kesehatan ibu hamil juga harus memenuhi frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Capaian K1 dan K4 dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 disajikan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5.2

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K1 DAN K4 DI INDONESIA
TAHUN 2005 – 2015**

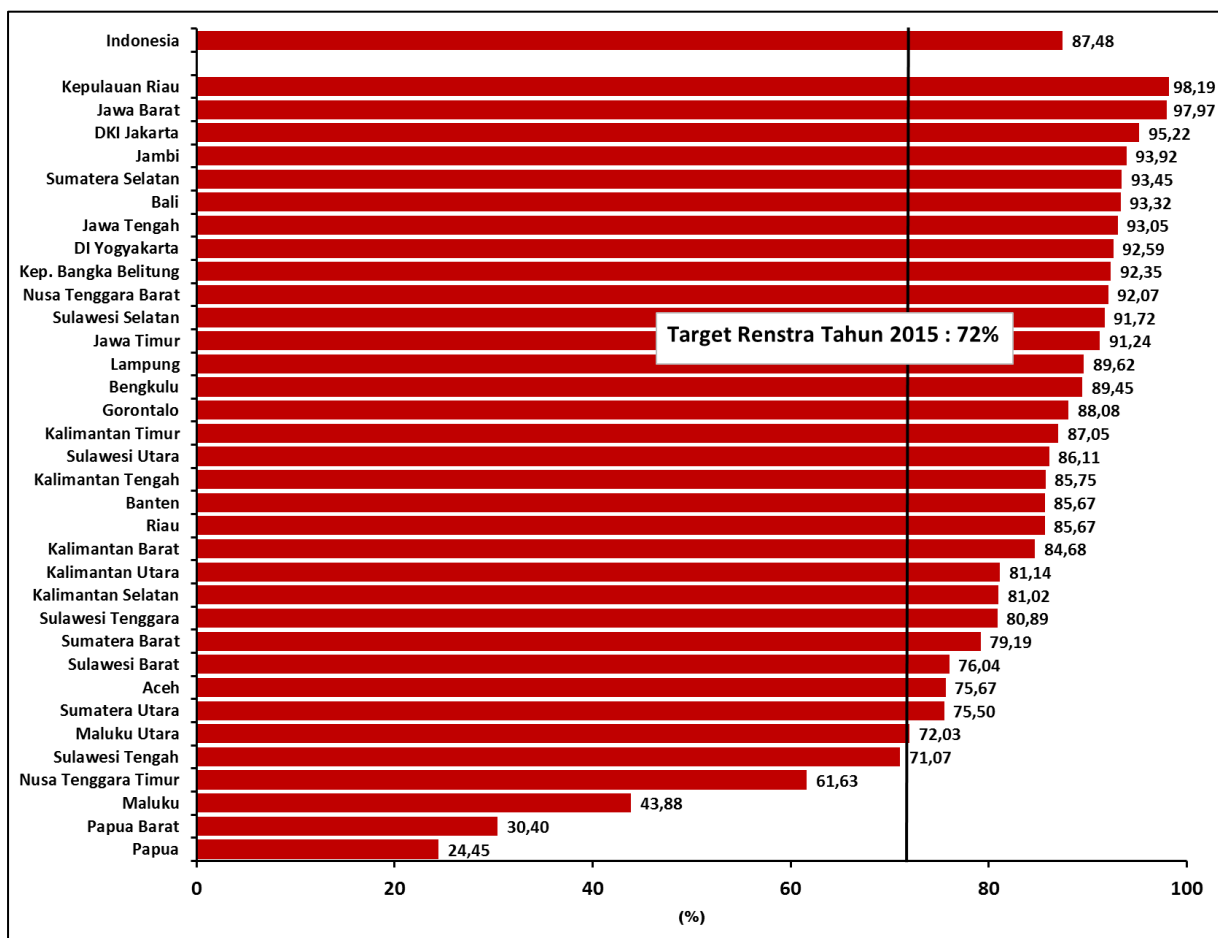


Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Gambar di atas menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan untuk kedua indikator, baik cakupan K1 maupun K4. Peningkatan kecenderungan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil.

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 pada tahun 2015 telah memenuhi target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan sebesar 72%. Namun demikian, terdapat lima provinsi yang belum mencapai target tersebut yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Gambaran capaian kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2015 di 34 provinsi disajikan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5.3
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil tidak hanya dari sisi akses. Kualitas pelayanan yang diberikan juga harus ditingkatkan, di antaranya pemenuhan semua komponen pelayanan kesehatan ibu hamil harus diberikan saat kunjungan. Dalam hal ketersediaan sarana kesehatan, hingga bulan Desember 2015,

terdapat 9.754 puskesmas di seluruh Indonesia dengan rasio 1,15 puskesmas per 30.000 penduduk. Dengan demikian, rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk sudah mencapai rasio ideal 1:30.000 penduduk, namun penyebarannya masih belum merata. Keberadaan puskesmas secara ideal harus didukung dengan aksesibilitas yang baik. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan aspek geografis dan kemudahan sarana dan prasarana transportasi. Dalam mendukung penjangkauan terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, puskesmas juga sudah menerapkan konsep satelit dengan menyediakan puskesmas pembantu. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 terdapat pada Lampiran 5.1.

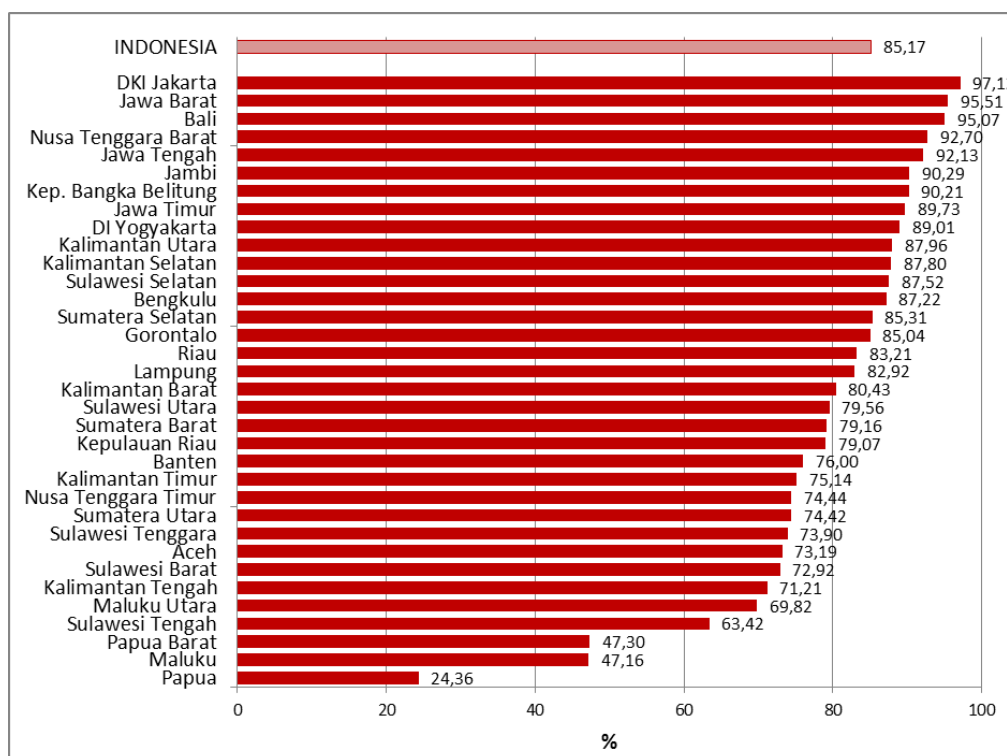
Salah satu komponen pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu pemberian zat besi sebanyak 90 tablet (Fe3). Zat besi merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel darah merah (hemoglobin). Selain digunakan untuk pembentukan sel darah merah, zat besi juga berperan sebagai salah satu komponen dalam membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat pada tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim.

Zat besi memiliki peran vital terhadap pertumbuhan janin. Selama hamil, asupan zat besi harus ditambah mengingat selama kehamilan, volume darah pada tubuh ibu meningkat. Sehingga, untuk dapat tetap memenuhi kebutuhan ibu dan menyuplai makanan serta oksigen pada janin melalui plasenta, dibutuhkan asupan zat besi yang lebih banyak. Asupan zat besi yang diberikan oleh ibu hamil kepada janinnya melalui plasenta akan digunakan janin untuk kebutuhan tumbuh kembangnya, termasuk untuk perkembangan otaknya, sekaligus menyimpannya dalam hati sebagai cadangan hingga bayi berusia 6 bulan.

Selain itu, zat besi juga membantu dalam mempercepat proses penyembuhan luka khususnya luka yang timbul dalam proses persalinan. Kekurangan zat besi sejak sebelum kehamilan bila tidak diatasi dapat mengakibatkan ibu hamil menderita anemia. Anemia merupakan salah satu risiko kematian ibu, kejadian bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), infeksi terhadap janin dan ibu, keguguran, dan kelahiran prematur.

GAMBAR 5.4

CAKUPAN PEMBERIAN 90 TABLET TAMBAH DARAH (ZAT BESI) PADA IBU HAMIL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Secara nasional cakupan ibu hamil mendapat tablet Fe₃ tahun 2015 sebesar 85,17%, tidak berbeda jauh dibanding tahun 2014 yang sebesar 85,1%. Provinsi dengan cakupan Fe₃ tertinggi yaitu DKI Jakarta (97,12%) dan yang terendah Provinsi Papua (24,36%). Data dan informasi mengenai cakupan pemberian 90 tablet tambah darah pada ibu hamil dapat dilihat di Lampiran 5.2.

2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil

Salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi yaitu infeksi tetanus yang disebabkan oleh bakteri *Clostridium tetani* sebagai akibat dari proses persalinan yang tidak aman/steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. *Clostridium Tetani* masuk melalui luka terbuka dan menghasilkan racun yang menyerang sistem syaraf pusat.

Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan kematian bayi, maka dilaksanakan program imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu hamil. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengamankan bahwa wanita usia subur dan ibu hamil merupakan salah satu kelompok populasi yang menjadi sasaran imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan adalah kegiatan yang bertujuan untuk melengkapi

imunisasi dasar pada bayi yang diberikan kepada anak Batita, anak usia sekolah, dan wanita usia subur termasuk ibu hamil.

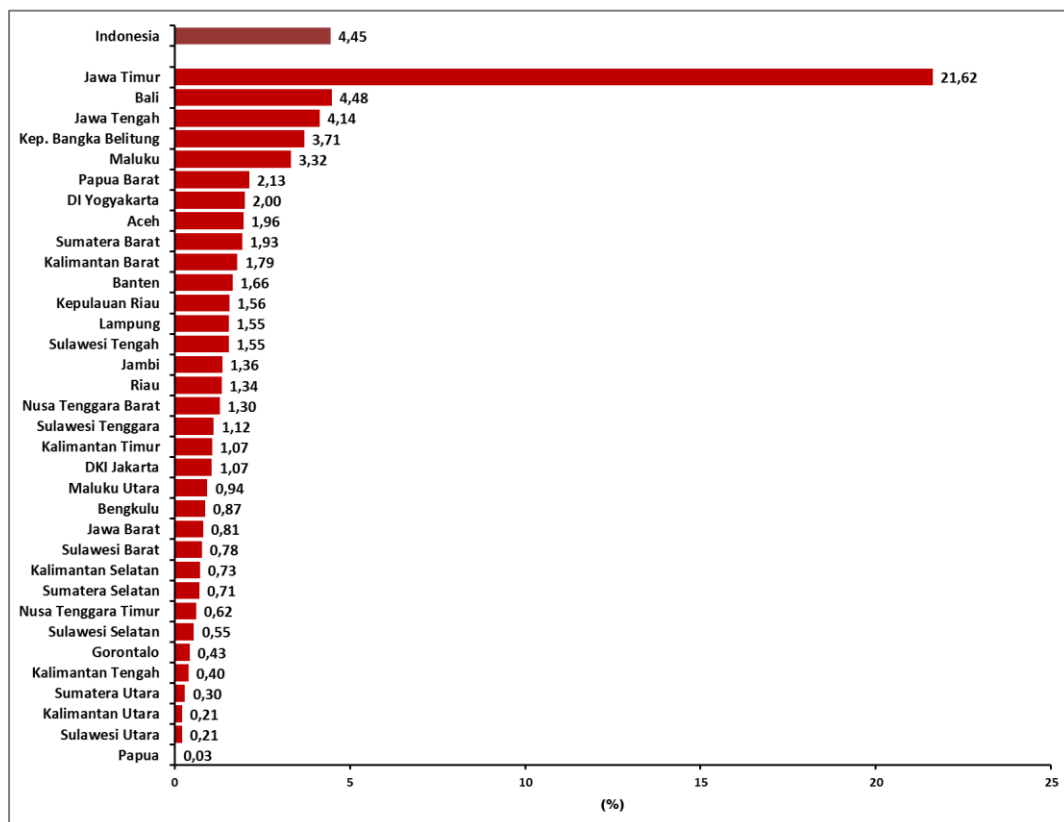
Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi TT adalah wanita berusia antara 15-49 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil. Imunisasi lanjutan pada WUS salah satunya dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan antenatal. Imunisasi TT pada WUS diberikan sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu, dimulai sebelum dan atau saat hamil yang berguna bagi kekebalan seumur hidup. Interval pemberian imunisasi TT dan lama masa perlindungan yang diberikan sebagai berikut:

- a. TT2 memiliki interval minimal 4 minggu setelah TT1 dengan masa perlindungan 3 tahun.
- b. TT3 memiliki interval minimal 6 bulan setelah TT2 dengan masa perlindungan 5 tahun.
- c. TT4 memiliki interval minimal 1 tahun setelah TT3 dengan masa perlindungan 10 tahun.
- d. TT5 memiliki interval minimal 1 tahun setelah TT4 dengan masa perlindungan 25 tahun.

Screening status imunisasi TT harus dilakukan sebelum pemberian vaksin. Pemberian imunisasi TT tidak perlu dilakukan bila hasil *screening* menunjukkan wanita usia subur telah mendapatkan imunisasi TT5 yang harus dibuktikan dengan buku KIA, rekam medis, dan atau kohort. Kelompok ibu hamil yang sudah mendapatkan TT2 sampai dengan TT5 dikatakan mendapatkan imunisasi TT2+. Gambar berikut menampilkan cakupan imunisasi TT5 pada wanita usia subur dan cakupan imunisasi TT2+ pada ibu hamil.

GAMBAR 5.5

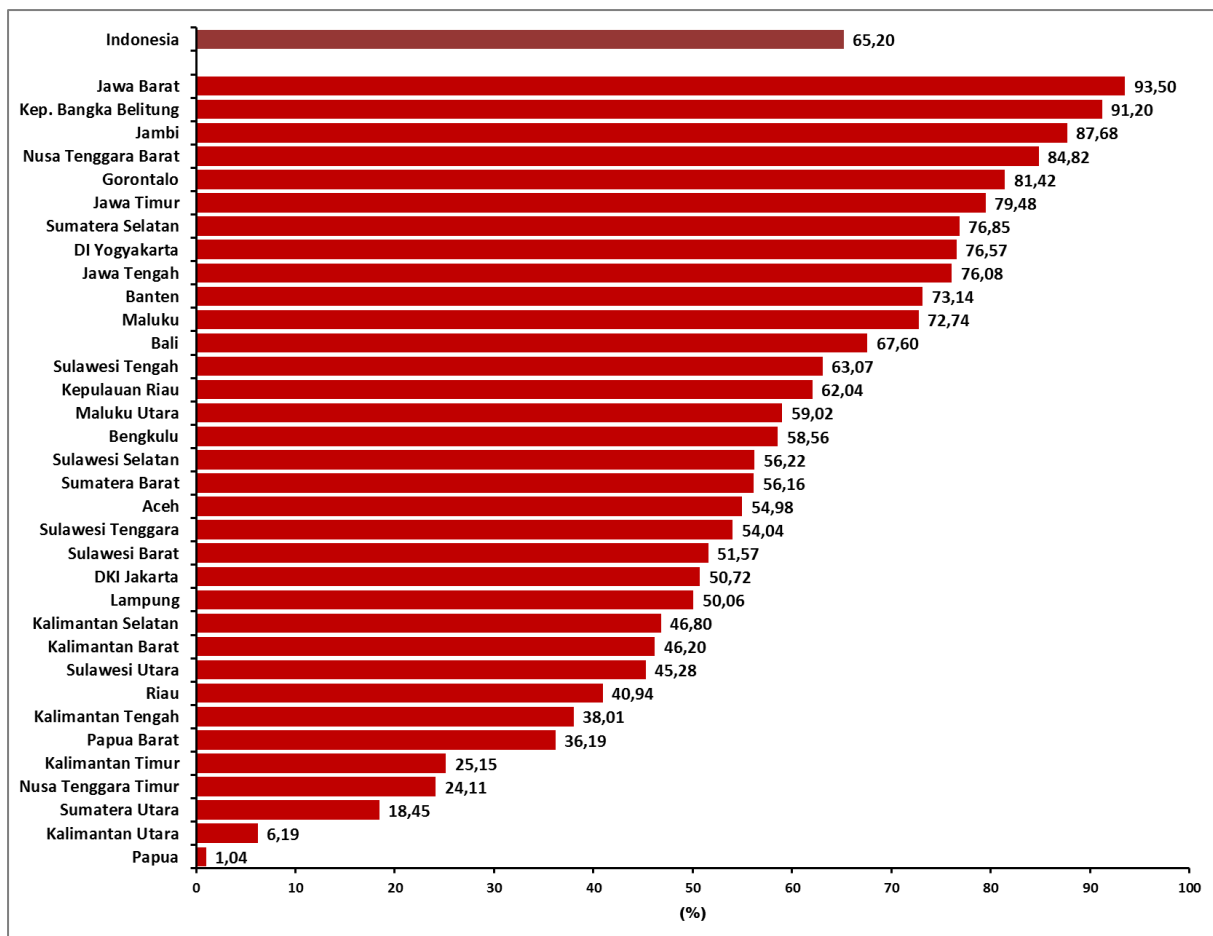
**CAKUPAN IMUNISASI TT5 PADA WANITA USIA SUBUR
DI INDONESIA TAHUN 2015**



Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2016

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Jawa Tengah memiliki capaian imunisasi TT5 pada WUS tertinggi di Indonesia sebesar 21,62%, 4,48%, dan 4,14%. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Papua sebesar 0,03%, Sulawesi Utara sebesar 0,21%, dan Kalimantan Utara sebesar 0,21%.

GAMBAR 5.6
CAKUPAN IMUNISASI TT2+ PADA IBU HAMIL
DI INDONESIA TAHUN 2015



Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2016

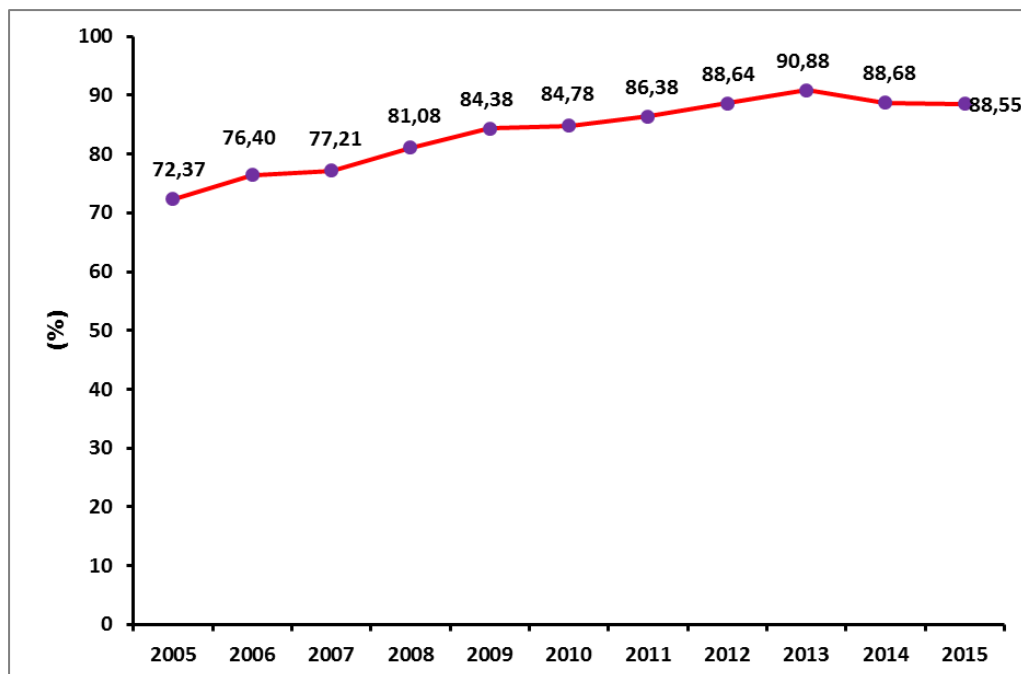
Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jambi memiliki capaian imunisasi TT2+ pada ibu hamil tertinggi di Indonesia masing-masing sebesar 93,5%, 91,2%, dan 87,68%. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Papua sebesar 1,04% dan Kalimantan Utara sebesar 6,19. Informasi lebih rinci mengenai imunisasi TT pada wanita usia subur dan ibu hamil dapat dilihat pada Lampiran 5.12 dan Lampiran 5.13.

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan PN) dan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (cakupan PF).

GAMBAR 5.7

CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2015



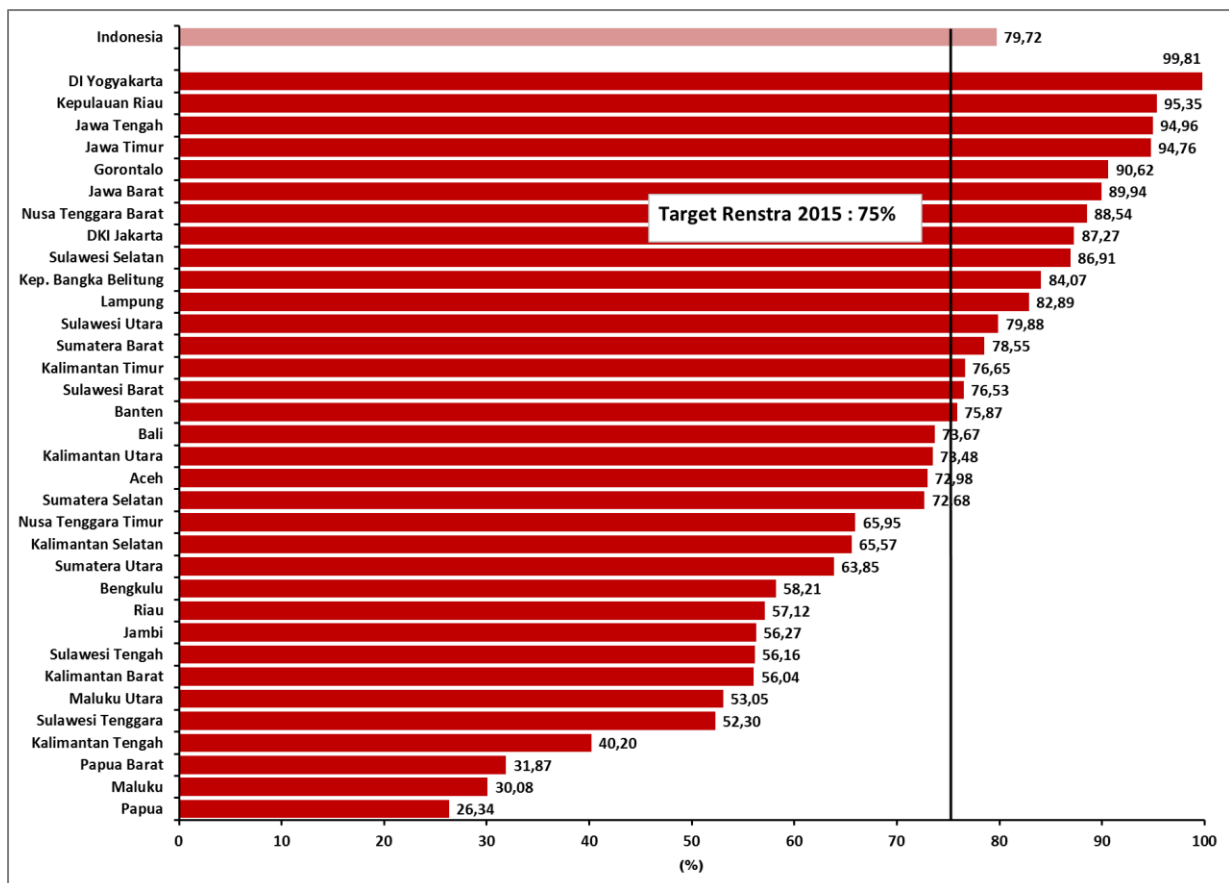
Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015. Namun demikian, terdapat penurunan dari 90,88% pada tahun 2013 menjadi 88,55% pada tahun 2015. Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam dekade terakhir menekankan agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dalam rangka menurunkan kematian ibu dan kematian bayi. Namun demikian, meskipun persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan tetapi tidak dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, dianggap menjadi salah satu penyebab masih tingginya Angka Kematian Ibu. Oleh karena itu mulai tahun 2015, penekanan persalinan yang aman adalah persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019

menetapkan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai salah satu indikator upaya kesehatan ibu, menggantikan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Berikut ini disajikan gambaran cakupan persalinan di fasilitas kesehatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2015.

GAMBAR 5.8
CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat 79,72% ibu hamil yang menjalani persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Secara nasional, indikator tersebut telah memenuhi target Renstra sebesar 75%. Namun demikian masih terdapat 18 provinsi (52,9%) yang belum memenuhi target tersebut. Provinsi DI Yogyakarta memiliki capaian tertinggi sebesar 99,81% dan Provinsi Papua memiliki capaian terendah sebesar 26,34%. Informasi lebih rinci mengenai persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilihat pada Lampiran 5.4.

Analisis kematian ibu yang dilakukan Direktorat Bina Kesehatan Ibu pada tahun 2010 membuktikan bahwa kematian ibu terkait erat dengan penolong persalinan dan tempat/fasilitas persalinan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian pula dengan tempat/fasilitas, jika persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, juga akan semakin menekan risiko kematian ibu.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan tetap konsisten dalam menerapkan kebijakan bahwa seluruh persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan dan didorong untuk dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan menggariskan bahwa pembangunan puskesmas harus satu paket dengan rumah dinas tenaga kesehatan. Demikian pula dengan pembangunan poskesdes yang harus bisa sekaligus menjadi rumah tinggal bagi bidan di desa. Dengan disediakan rumah tinggal, maka tenaga kesehatan termasuk bidan akan siaga di tempat tugasnya dan dapat memberikan pertolongan persalinan setiap saat.

Untuk daerah dengan akses sulit, kebijakan Kementerian Kesehatan yaitu mengembangkan program Kemitraan Bidan dan Dukun serta Rumah Tunggu Kelahiran. Para dukun diupayakan bermitra dengan bidan dengan hak dan kewajiban yang jelas. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan tidak lagi dikerjakan oleh dukun, namun dirujuk ke bidan.

Bagi ibu hamil yang di daerah tempat tinggalnya tidak ada bidan atau jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, maka menjelang hari taksiran persalinan diupayakan sudah berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu di Rumah Tunggu Kelahiran. Rumah Tunggu Kelahiran tersebut dapat berupa rumah tunggu khusus yang dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat maupun di rumah sanak saudara yang letak rumahnya berdekatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

4. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

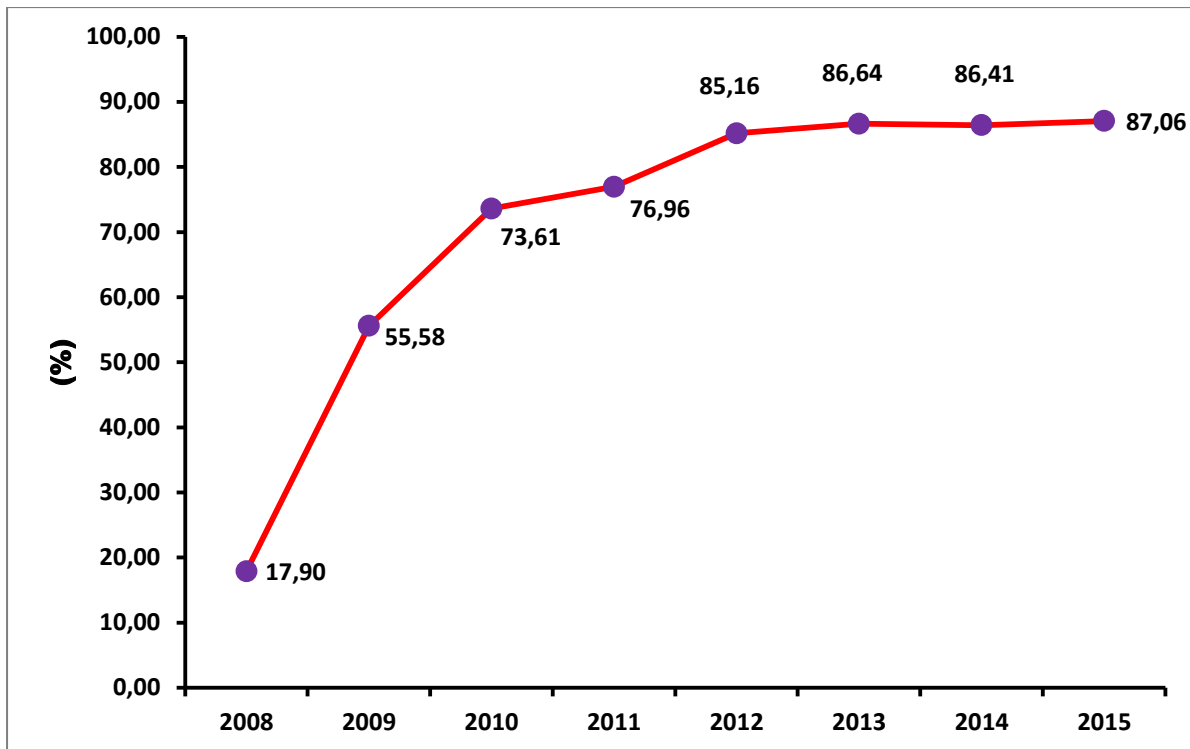
Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Masa nifas dimulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan.

Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari :

- a) Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu);
- b) Pemeriksaan tinggi puncak rahim (*fundus uteri*);
- c) Pemeriksaan lochia dan cairan *per vaginam* lain;
- d) Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif;
- e) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana;
- f) Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

Gambar berikut menyajikan cakupan kunjungan nifas di Indonesia sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.

GAMBAR 5.9
CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA
TAHUN 2008 – 2015

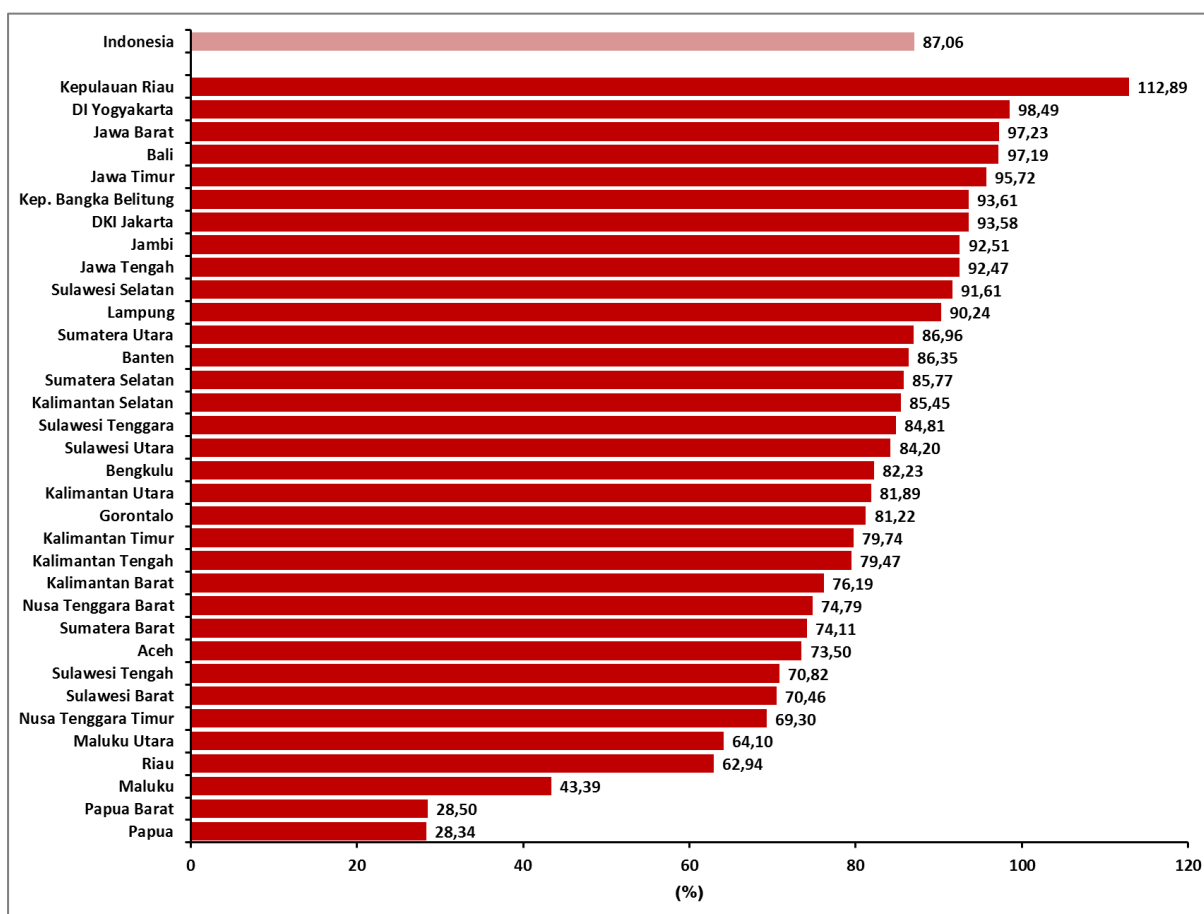


Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Cakupan kunjungan nifas (KF3) di Indonesia dalam kurun waktu delapan tahun terakhir secara umum mengalami kenaikan. Capaian indikator KF3 yang meningkat dalam delapan tahun terakhir merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat termasuk sektor swasta. Program penempatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk dokter dan bidan terus dilaksanakan. Selain itu, dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejak tahun 2010, puskesmas, poskesdes, dan posyandu lebih terbantu dalam mengintensifkan implementasi upaya kesehatan termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan ibu nifas. Pelayanan kesehatan ibu nifas termasuk di antaranya kegiatan *sweeping* atau kunjungan rumah bagi yang tidak datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Capaian kunjungan nifas menurut provinsi di Indonesia terdapat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5.10

CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki capaian tertinggi diikuti oleh DI Yogyakarta sebesar 98,49%, dan Jawa Barat sebesar 97,23%. Sedangkan provinsi dengan cakupan kunjungan nifas terendah yaitu Papua sebesar 28,34%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 28,5%, dan Maluku sebesar 43,39%. Data dan informasi lebih rinci mengenai pelayanan ibu nifas tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 5.1.

5. Pelayanan/Penanganan Komplikasi Kebidanan

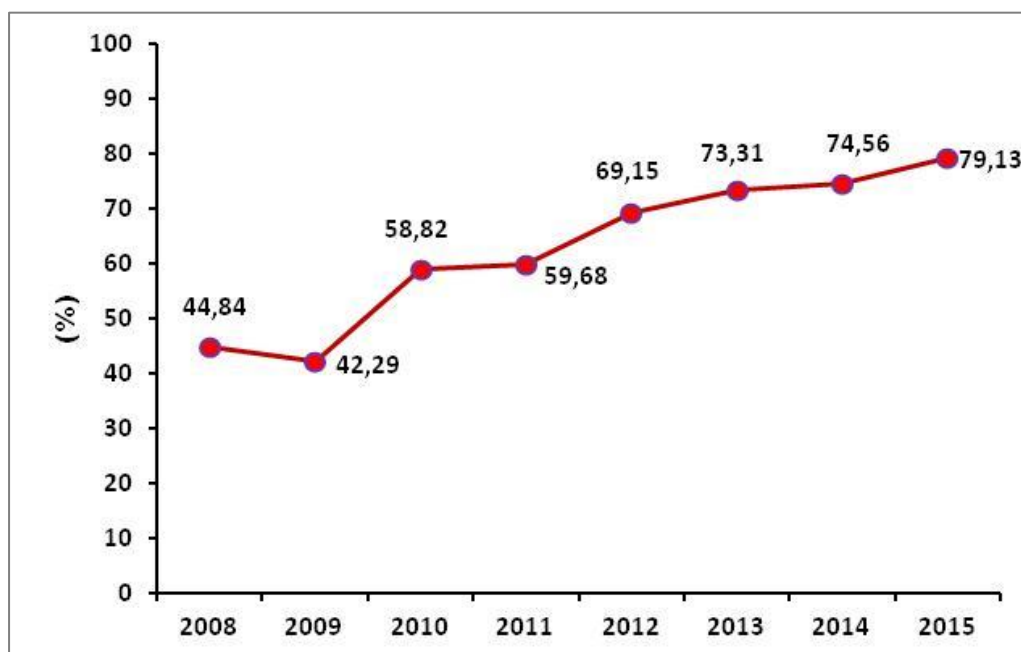
Komplikasi pada proses kehamilan, persalinan dan nifas juga merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin. Sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi maka dilakukan pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan. pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu hamil, bersalin, atau nifas untuk

memberikan perlindungan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.

Keberhasilan program ini dapat diukur melalui indikator cakupan penanganan komplikasi kebidanan (Cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi. Capaian indikator penanganan komplikasi kebidanan di Indonesia dari tahun 2008 hingga tahun 2015 disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 5.11

**CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DI INDONESIA
TAHUN 2008 – 2015**

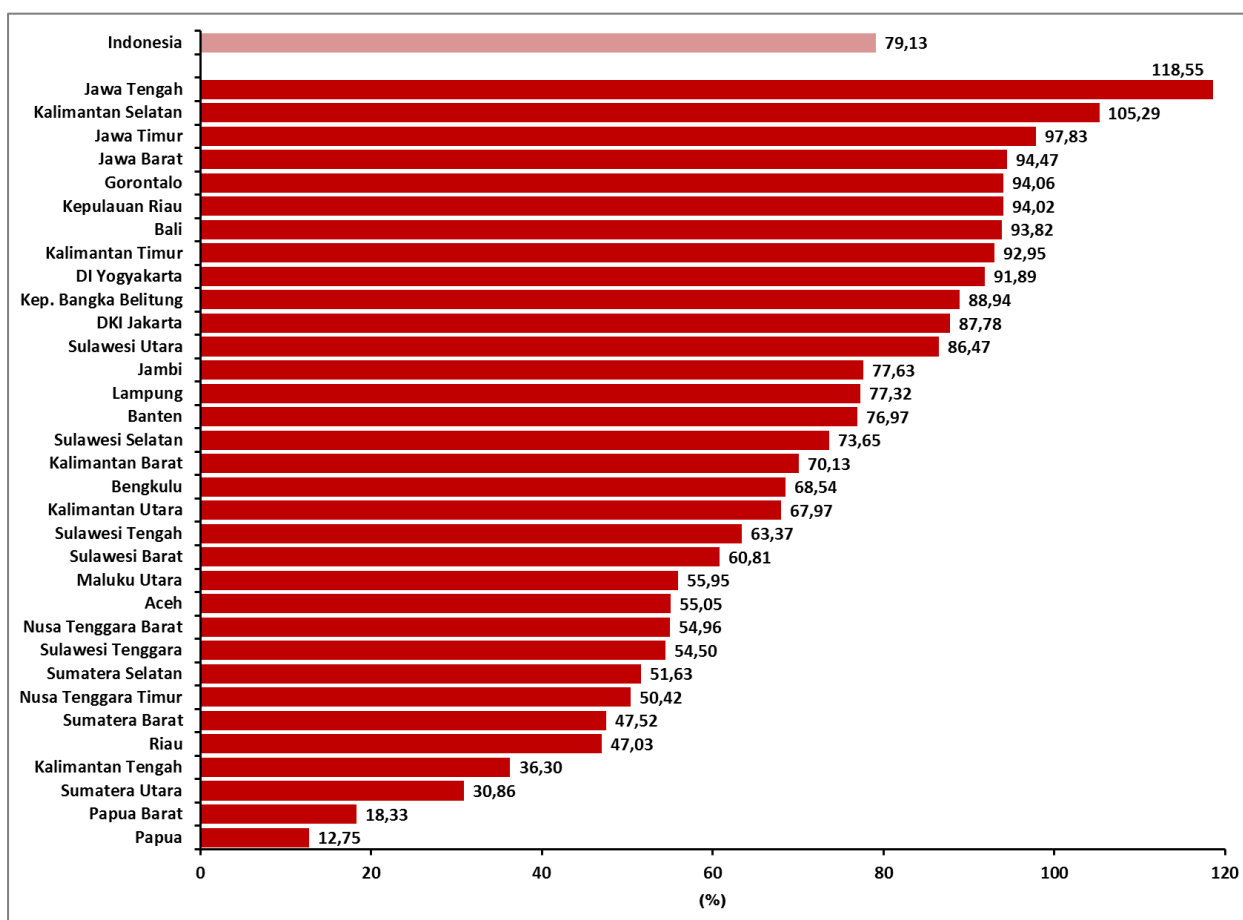


Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Gambar di atas memperlihatkan bahwa secara umum, cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 cenderung meningkat. Capaian pada tahun 2008 sebesar 44,84% meningkat menjadi 79,13% pada tahun 2015.

GAMBAR 5.12

CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN MENURUT PROVINSI
DI INDONESIA TAHUN 2015



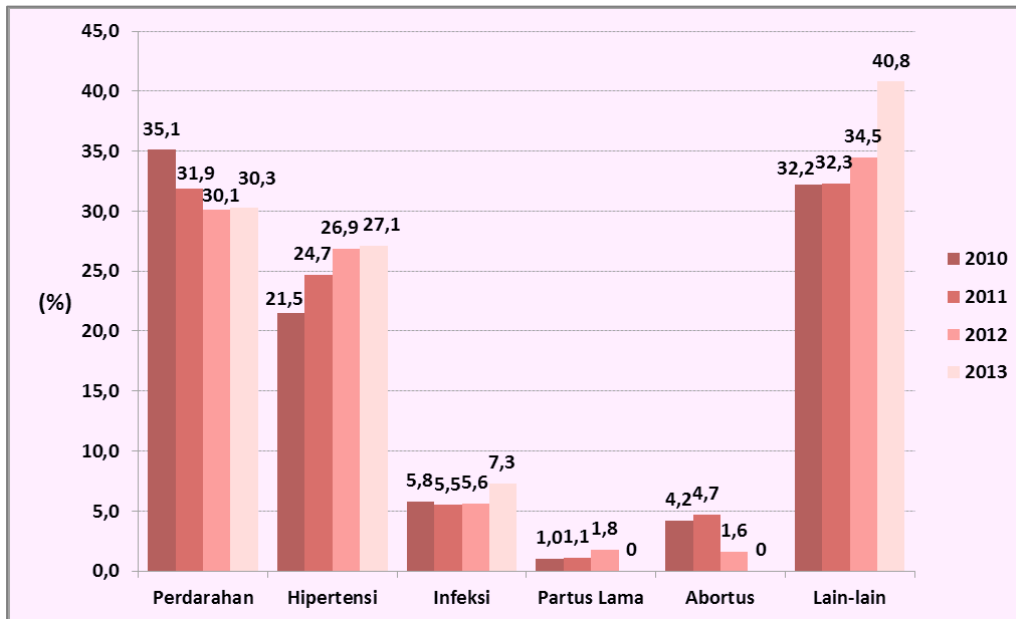
Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Pada tingkat nasional, capaian indikator penanganan komplikasi kebidanan sebesar 79,13%. Gambaran capaian antar provinsi menunjukkan Jawa Tengah memiliki persentase tertinggi, diikuti oleh Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Sedangkan cakupan terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 12,75%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 18,33% dan Sumatera Utara sebesar 30,86%. Pada gambaran capaian antar provinsi ini dapat diketahui adanya disparitas yang cukup tinggi antara provinsi dengan capaian tertinggi dan provinsi dengan capaian terendah.

Lima penyebab kematian ibu terbesar yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), infeksi, partus lama/macet, dan abortus. Kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), dan infeksi. Namun proporsinya telah berubah, dimana perdarahan dan infeksi cenderung mengalami penurunan sedangkan HDK proporsinya semakin meningkat. Lebih dari 25% kematian ibu di Indonesia pada tahun 2013 disebabkan oleh HDK. Lebih jelasnya mengenai hal itu dapat dilihat pada Gambar 5.13.

GAMBAR 5.13

**PENYEBAB KEMATIAN IBU DI INDONESIA
TAHUN 2010 – 2013**



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Sebesar 20% dari kehamilan diprediksi akan mengalami komplikasi. Komplikasi yang tidak tertangani dapat menyebabkan kematian, namun demikian sebagian besar komplikasi dapat dicegah dan ditangani bila : 1) ibu segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan; 2) tenaga kesehatan melakukan prosedur penanganan yang sesuai, antara lain penggunaan partograf untuk memantau perkembangan persalinan, dan pelaksanaan manajemen aktif kala III (MAK III) untuk mencegah perdarahan pasca-salin; 3) tenaga kesehatan mampu melakukan identifikasi dini komplikasi; 4) apabila komplikasi terjadi, tenaga kesehatan dapat memberikan pertolongan pertama dan melakukan tindakan stabilisasi pasien sebelum melakukan rujukan; 5) proses rujukan efektif; 6) pelayanan di RS yang cepat dan tepat guna.

Intervensi yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan neonatal yaitu melalui : 1) peningkatan pelayanan antenatal yang mampu mendeteksi dan menangani kasus risiko tinggi secara memadai; 2) pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil, pelayanan pasca persalinan dan kelahiran; serta 3) pelayanan emergensi obstetrik dan neonatal dasar (PONED) dan komprehensif (PONEK) yang dapat dijangkau secara tepat waktu oleh masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa terobosan dalam penurunan AKI dan AKB di Indonesia telah dilakukan, salah satunya Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Program tersebut menitikberatkan kepedulian dan peran keluarga dan masyarakat dalam melakukan upaya deteksi dini, menghindari risiko kesehatan pada ibu hamil, serta menyediakan akses dan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar di tingkat Puskesmas (PONED)

dan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal komprehensif di Rumah Sakit (PONEK). Dalam implementasinya, P4K merupakan salah satu unsur dari Desa Siaga. P4K mulai diperkenalkan oleh Menteri Kesehatan pada tahun 2007. Pelaksanaan P4K di desa-desa tersebut perlu dipastikan agar mampu membantu keluarga dalam membuat perencanaan persalinan yang baik dan meningkatkan kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas agar dapat mengambil tindakan yang tepat.

Dilakukan pula kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP), yang merupakan upaya dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kegiatan ini dilakukan melalui pembahasan kasus kematian ibu atau bayi baru lahir sejak di level masyarakat sampai di level fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu hasil kajian yang didapat dari AMP adalah kendala yang timbul dalam upaya penyelamatan ibu pada saat terjadi kegawatdaruratan maternal dan bayi baru lahir. Kajian tersebut juga menghasilkan rekomendasi intervensi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi di masa mendatang. Data dan informasi lebih tentang penanganan komplikasi kebidanan menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.3.

6. Pelayanan Kontrasepsi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa program keluarga berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

KB merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenang, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

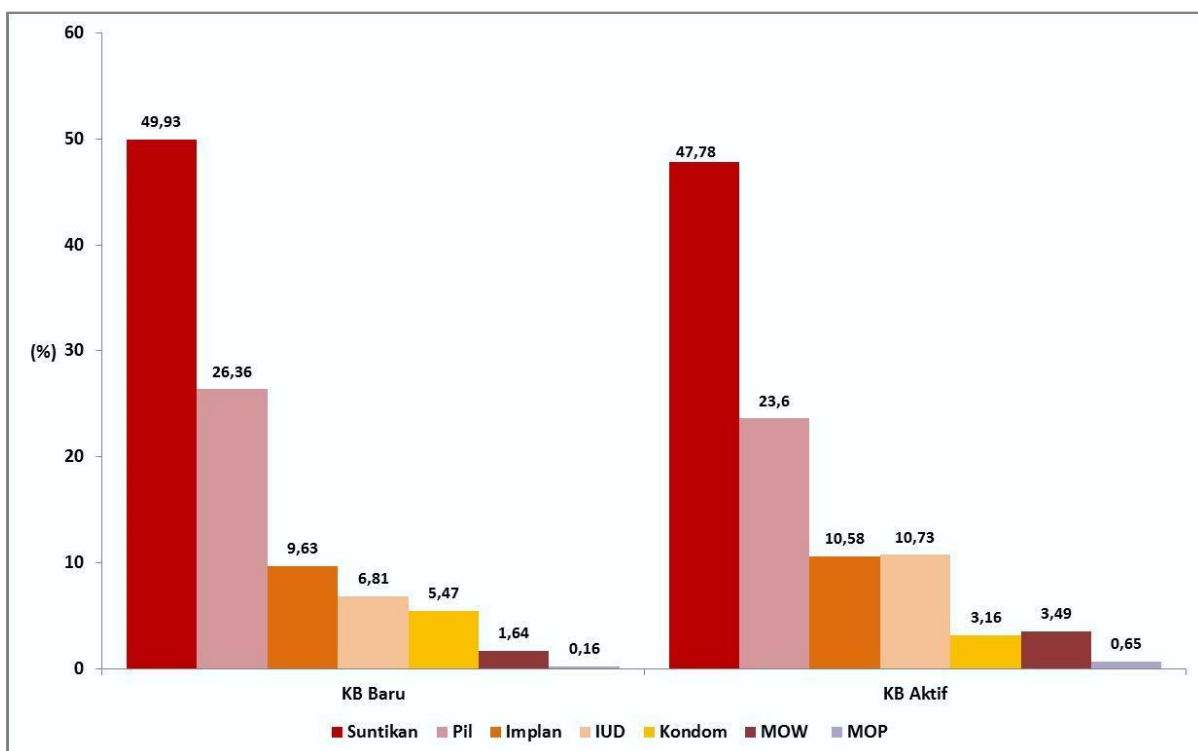
KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB menyediakan informasi, pendidikan, dan cara-cara bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak.

Melalui tahapan konseling pelayanan KB, Pasangan Usia Subur (PUS) dapat menentukan pilihan kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya berdasarkan informasi yang telah mereka pahami, termasuk keuntungan dan kerugian, risiko metode kontrasepsi dari petugas kesehatan. Program Keluarga Berencana (KB) dilakukan diantaranya dalam rangka mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran. Sasaran program KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang lebih dititikberatkan pada kelompok Wanita Usia Subur (WUS) yang berada pada kisaran usia 15-49 tahun.

Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Peserta KB Baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.

GAMBAR 5.14

**CAKUPAN PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF
MENURUT JENIS KONTRASEPSI TAHUN 2015**

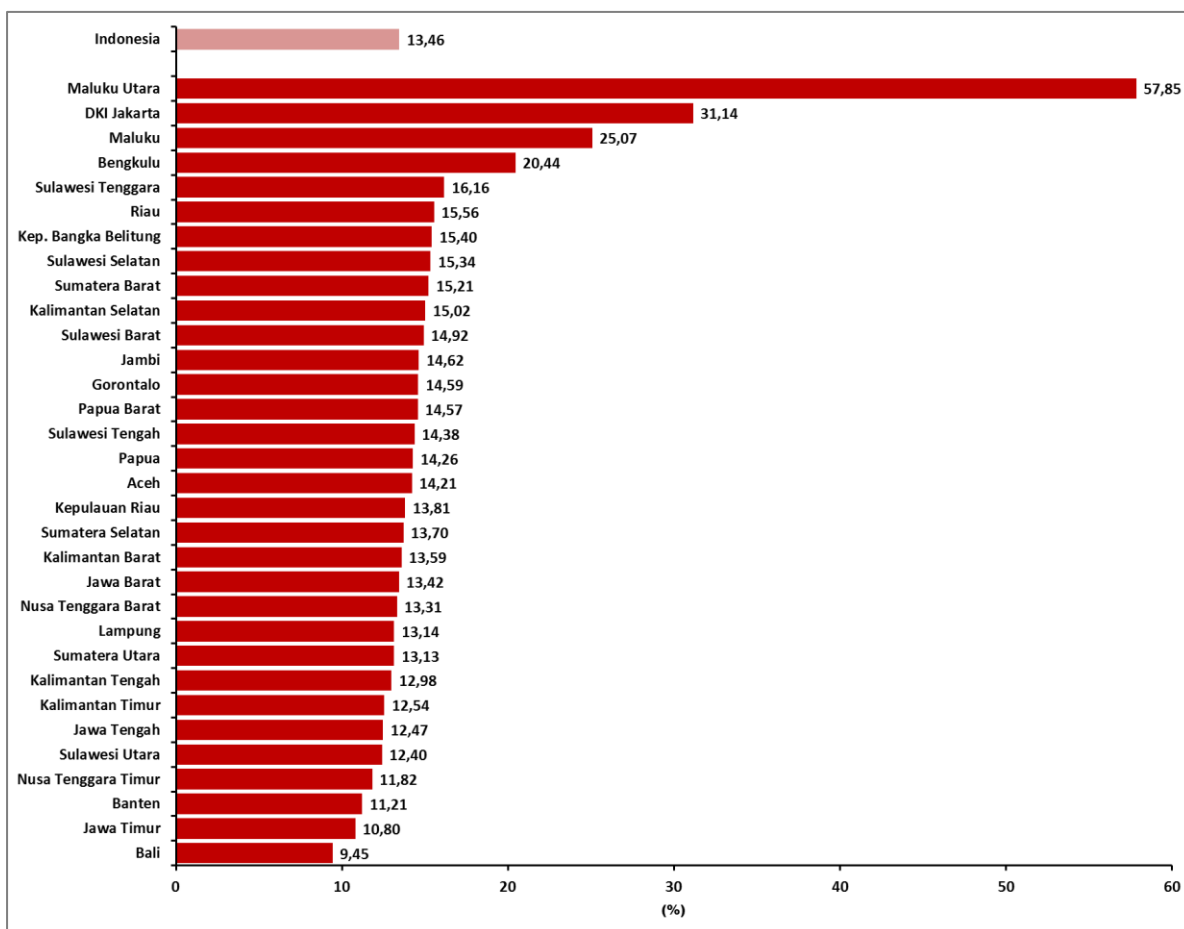


Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2016

Peserta KB baru dan KB aktif menunjukkan pola yang sama dalam pemilihan jenis alat kontrasepsi seperti yang disajikan pada gambar di atas. Sebagian besar peserta KB baru maupun KB aktif memilih suntikan dan pil sebagai alat kontrasepsi. Kedua jenis alat kontrasepsi ini dianggap mudah diperoleh dan digunakan oleh pasangan usia subur. Namun demikian perlu diperhatikan tingkat efektifitas suntikan dan pil dalam pengendalian kehamilan dibandingkan jenis kontrasepsi lainnya.

GAMBAR 5.15

CAKUPAN PESERTA KB BARU DI INDONESIA TAHUN 2015

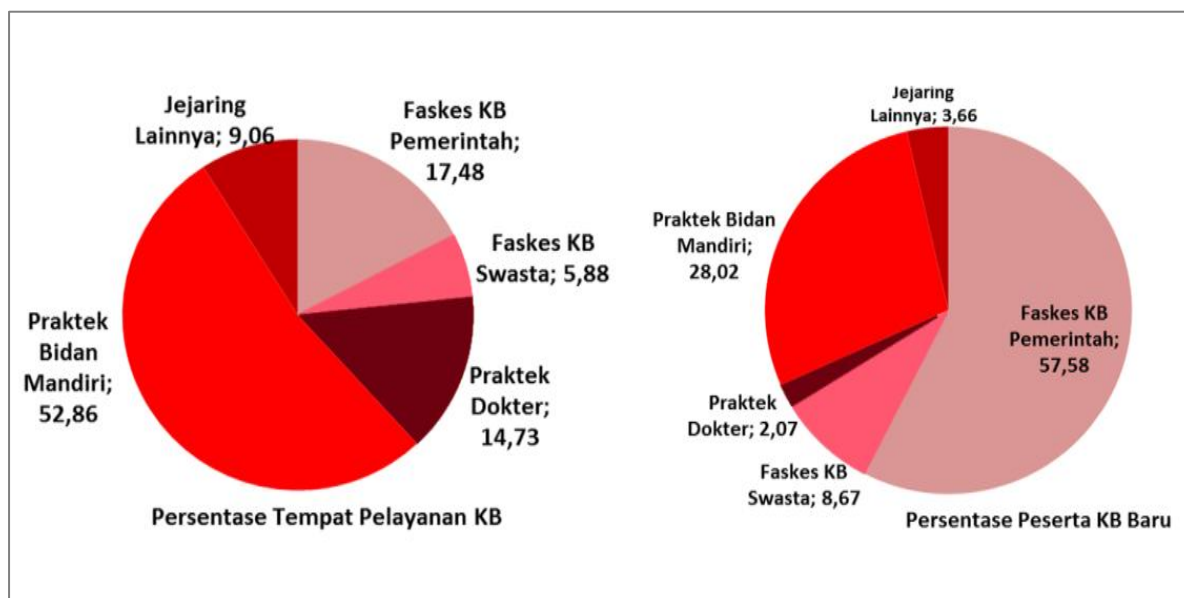


Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2016

Persentase peserta KB baru terhadap pasangan usia subur di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 13,46%. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2014 yang sebesar 16,51%. Tiga provinsi yang memiliki persentase tertinggi yaitu Maluku Utara sebesar 57,85%, DKI Jakarta sebesar 31,14%, dan Maluku sebesar 25,07%. Sedangkan capaian terendah terdapat di Provinsi Bali sebesar 9,45%, Jawa Timur sebesar 10,8%, dan Banten sebesar 11,21%.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Pasangan Usia Subur bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat-tempat yang melayani program KB. Gambaran mengenai tempat pelayanan KB di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.16 berikut ini.

GAMBAR 5.16
PERSENTASE TEMPAT PELAYANAN KB DI INDONESIA
DAN PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT JENIS LAYANAN
TAHUN 2015



Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2016

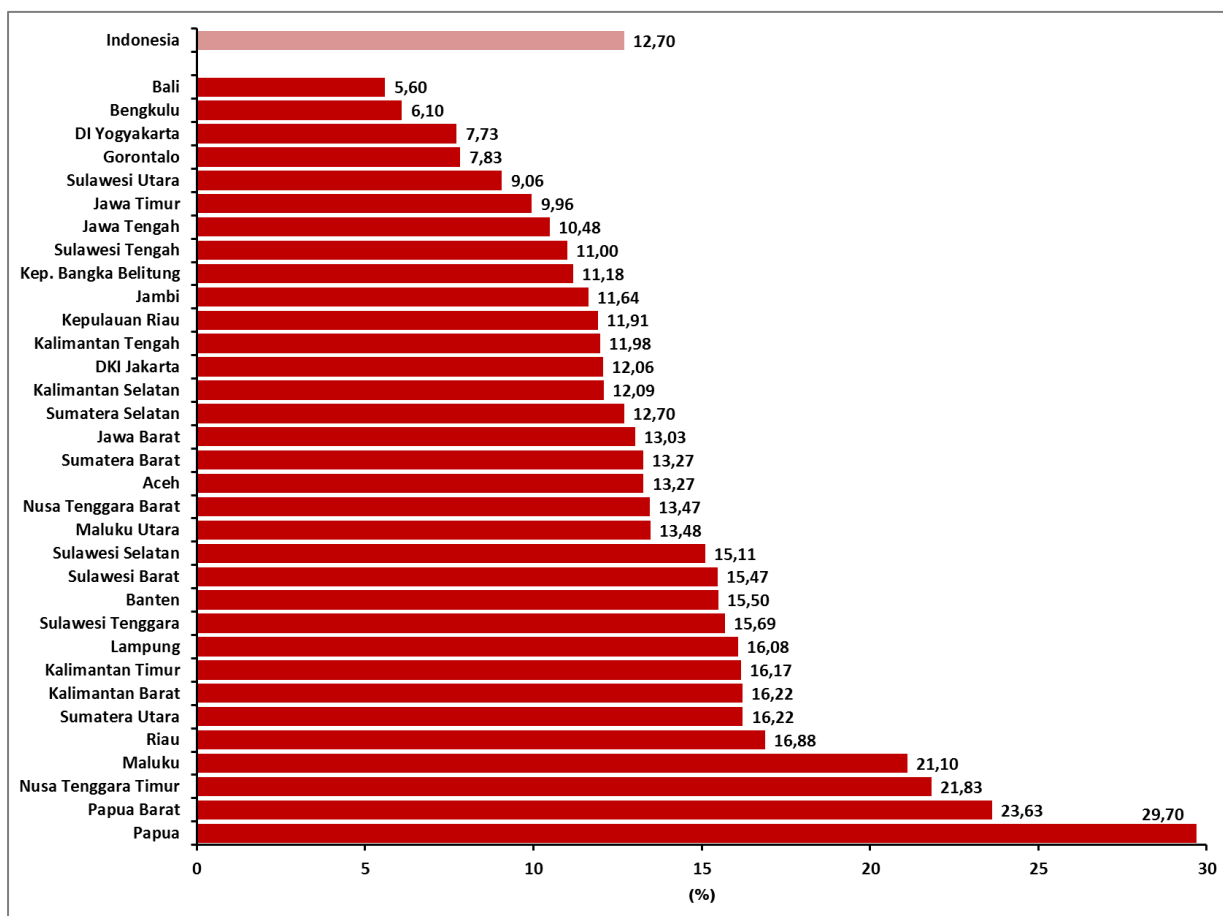
Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa dari sisi input atau keberadaan fasilitas KB, sebagian besar berasal dari praktek bidan mandiri. Jenis fasilitas KB ini memiliki proporsi yang sangat besar (52,86%). Sedangkan fasilitas KB milik pemerintah memiliki persentase sebesar 17,48%. Pemerintah melalui BKKBN dan Kementerian Kesehatan bertanggungjawab terhadap semua jenis fasilitas KB tersebut, tidak hanya kepada fasilitas KB milik pemerintah saja. Hal ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi program KB.

Meskipun secara proporsi fasilitas milik pemerintah lebih sedikit dibandingkan praktek bidan mandiri, namun sebagian besar peserta KB (57,58%) lebih memilih fasilitas milik pemerintah sebagai tempat untuk mendapatkan layanan KB. Dengan tingginya tingkat pemanfaatan masyarakat terhadap fasilitas milik pemerintah maka hal ini bisa menjadi peluang bagi BKKBN dan Kementerian Kesehatan untuk lebih mengendalikan penyelenggaraan program KB.

Dari seluruh pasangan usia subur yang menjadi sasaran program KB, terdapat sebagian yang memutuskan untuk tidak memanfaatkan program tersebut dengan berbagai alasan di antaranya ingin menunda memiliki anak atau tidak ingin memiliki anak lagi. Kelompok PUS ini disebut sebagai *unmet need*. Persentase PUS yang merupakan kelompok *unmet need* di Indonesia sebesar 12,7%. Dari seluruh PUS yang memutuskan tidak memanfaatkan program KB, sebanyak 6,15% beralasan ingin menunda memiliki anak, dan sebanyak 6,55% beralasan tidak ingin memiliki anak lagi. Total angka *unmet need* tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 14,87%.

GAMBAR 5.17

PERSENTASE PUS BUKAN PESERTA KB (*UNMET NEED*) DI INDONESIA TAHUN 2015



Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2016

Semakin rendah angka *unmet need* dapat mengindikasikan keberhasilan penyelenggaraan program KB. Provinsi Bali memiliki persentase *unmet need* terendah sebesar 5,6%, diikuti oleh Bengkulu sebesar 6,1%, dan DI Yogyakarta sebesar 7,73%. Sedangkan Provinsi Papua memiliki angka *unmet need* tertinggi sebesar 29,7%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 23,63%, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 21,83%. Gambaran lebih rinci mengenai pelaksanaan program KB menurut provinsi di Indonesia terdapat pada Lampiran 5.5 sampai dengan Lampiran 5.11.

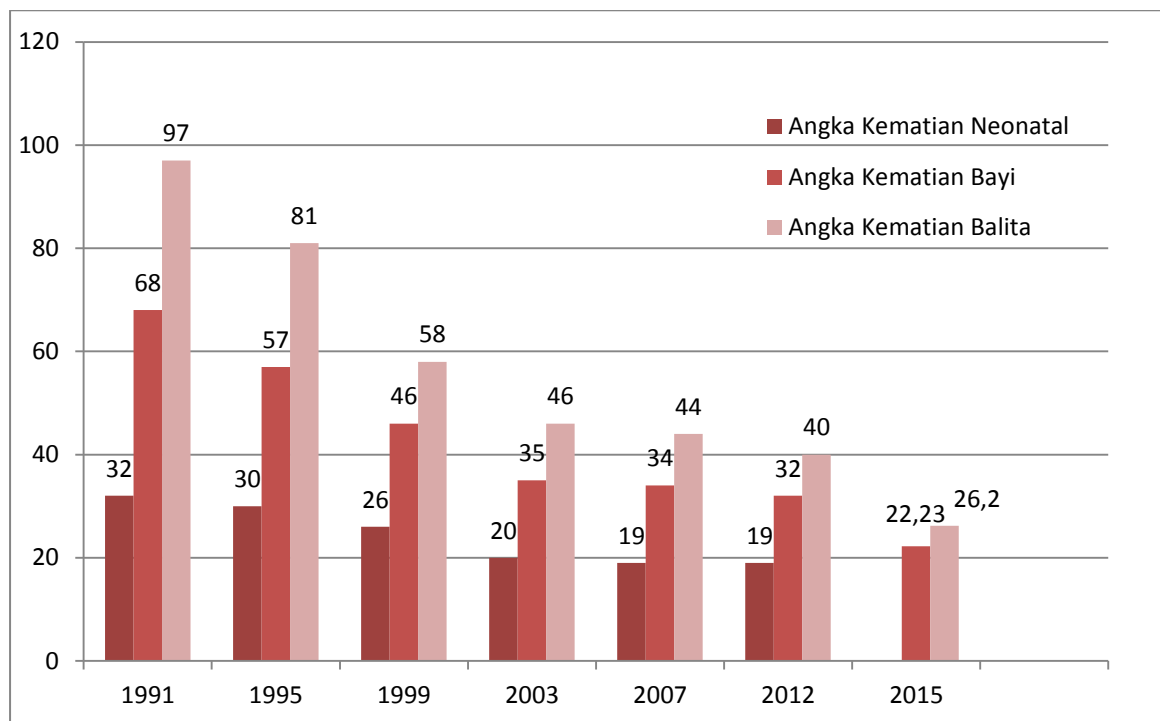
B. KESEHATAN ANAK

Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia delapan belas tahun.

Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka Kematian Neonatus (AKN) pada tahun 2012 sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini sama dengan AKN berdasarkan SDKI tahun 2007 dan hanya menurun 1 poin dibanding SDKI tahun 2002-2003 yaitu 20 per 1.000 kelahiran hidup.

GAMBAR 5.18

TREN ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA



Sumber: SDKI tahun 1991-2012, SUPAS tahun 2015

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan AKB sebesar 22,23 per 1.000 kelahiran hidup, yang artinya sudah mencapai target MDG 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Begitu pula dengan Angka Kematian Balita (AKABA) hasil SUPAS 2015 sebesar 26,29 per 1.000 kelahiran hidup, juga sudah memenuhi target MDG 2015 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup.

Data dan informasi yang akan disajikan berikut ini menerangkan berbagai indikator kesehatan anak yang meliputi, penanganan komplikasi neonatal, pelayanan kesehatan

neonatal, imunisasi dasar, pelayanan kesehatan pada siswa SD/setingkat, dan pelayanan kesehatan peduli remaja.

1. Pelayanan Kesehatan Neonatal

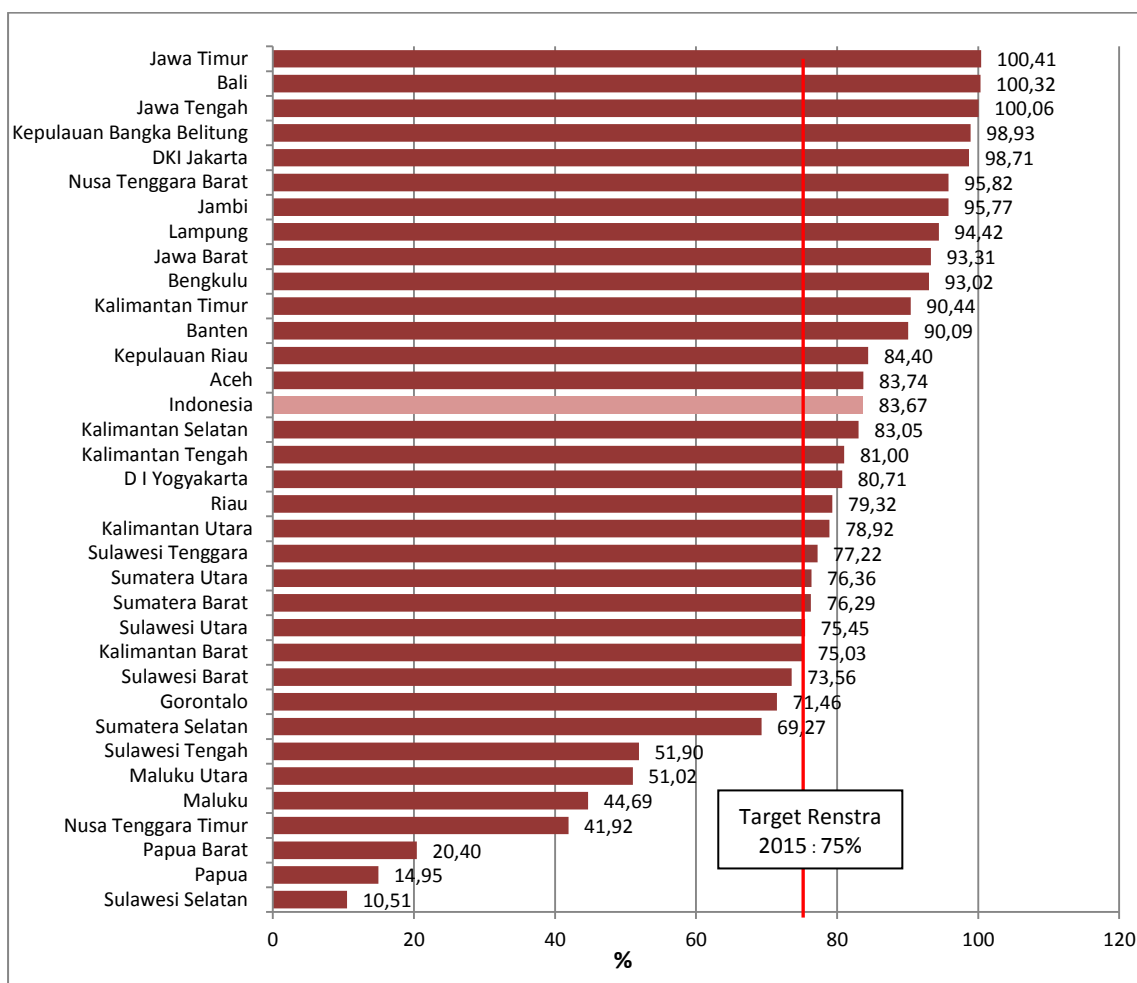
Neonatus adalah bayi baru lahir yang berusia sampai dengan 28 hari. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi, berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 merupakan indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir yang meliputi, antara lain kunjungan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi, dan Hepatitis B0 injeksi bila belum diberikan.

Selama periode tahun 2010-2014, indikator KN1 selalu mencapai target Renstra dengan rata-rata peningkatan cakupan dari tahun 2010-2014 sebesar 3,2%. Pada akhir tahun 2014 cakupan KN1 telah mencapai 97%. Target KN1 pada tahun 2015 sebesar 75%, lebih rendah dari tahun sebelumnya, karena perubahan definisi operasional indikator KN1. Sebelumnya cakupan KN1 merupakan indikator KN1 akses kemudian pada Renstra 2015 berubah definisi dengan peningkatan kualitas kunjungan neonatal.

GAMBAR 5.19

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

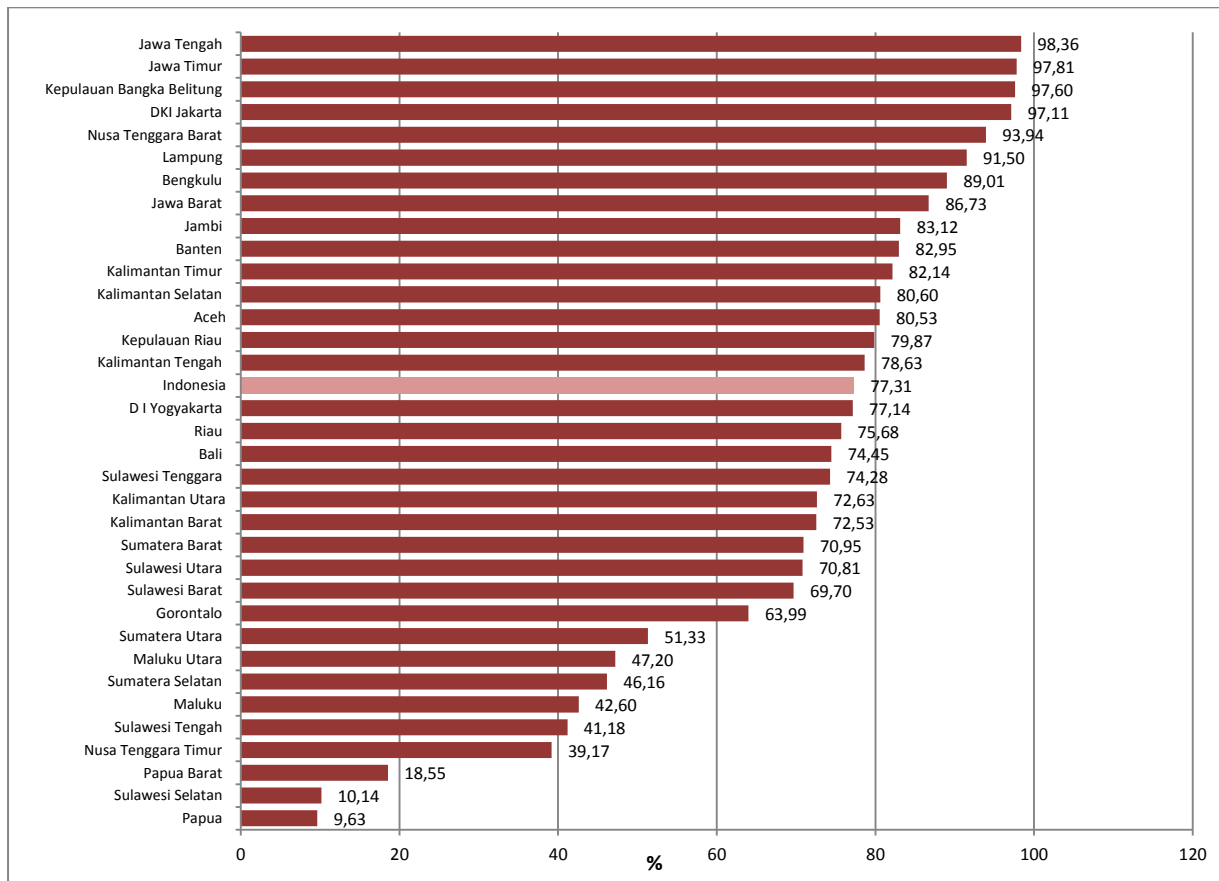
Kunjungan neonatal pertama (KN1) adalah cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (umur 6 jam-48 jam) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan saat kunjungan neonatal yaitu pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis B0 (bila belum diberikan pada saat lahir). Cakupan indikator kunjungan neonatal pertama menurut provinsi digambarkan pada Gambar 5.19.

Capaian KN1 Indonesia pada tahun 2015 sebesar 83,67%. Capaian ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2015 yang sebesar 75%. Terdapat 24 provinsi yang telah memenuhi target tersebut.

Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah Kunjungan Neonatal Lengkap (KN lengkap) yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan Kunjungan Neonatal minimal tiga kali sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Gambaran cakupan kunjungan KN lengkap menurut provinsi di Indonesia terdapat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5.20

**CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

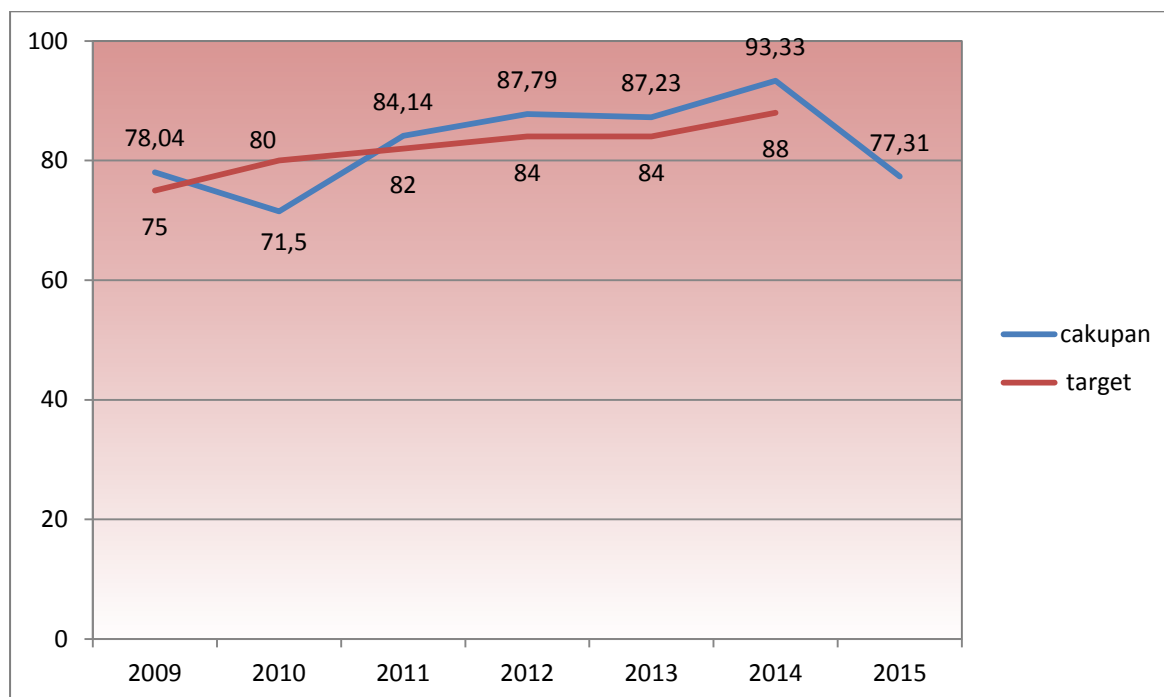


Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Capaian KN lengkap di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 77,31%. Pada gambar di atas terlihat bahwa pencapaian indikator KN lengkap di Indonesia cukup baik yang dapat dilihat dari capaian yang cukup tinggi di sebagian besar provinsi. Capaian tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah, diikuti oleh Jawa Timur, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan dua provinsi dengan capaian terendah yaitu Papua dan Sulawesi Selatan. Gambar berikut ini menampilkan cakupan KN lengkap dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.

GAMBAR 5.21

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP
DI INDONESIA TAHUN 2009-2015



Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Selama periode tujuh tahun terakhir cakupan KN lengkap menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 78,04% pada tahun 2009 menjadi 93,33% pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan cakupan KN lengkap menjadi 77,31%. Sama halnya dengan cakupan KN1, penurunan cakupan KN lengkap disebabkan oleh perubahan definisi operasional KN1 yang dulunya lebih ke arah akses kemudian berubah menjadi ke arah peningkatan kualitas pada Renstra 2015. Informasi lebih lanjut mengenai kunjungan neonatal lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.14.

2. Penanganan Komplikasi Neonatal

Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit dan atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian, seperti *asfiksia*, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan pernafasan, dan kelainan kongenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning dan merah pada pemeriksaan dengan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).

Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak yaitu asfiksia, bayi berat lahir rendah, dan infeksi (Risksdas, 2007). Komplikasi ini sebetulnya dapat dicegah dan ditangani, namun terkendala oleh akses ke pelayanan kesehatan, kemampuan tenaga

kesehatan, keadaan sosial ekonomi, sistem rujukan yang belum berjalan dengan baik, terlambatnya deteksi dini, dan kesadaran orang tua untuk mencari pertolongan kesehatan.

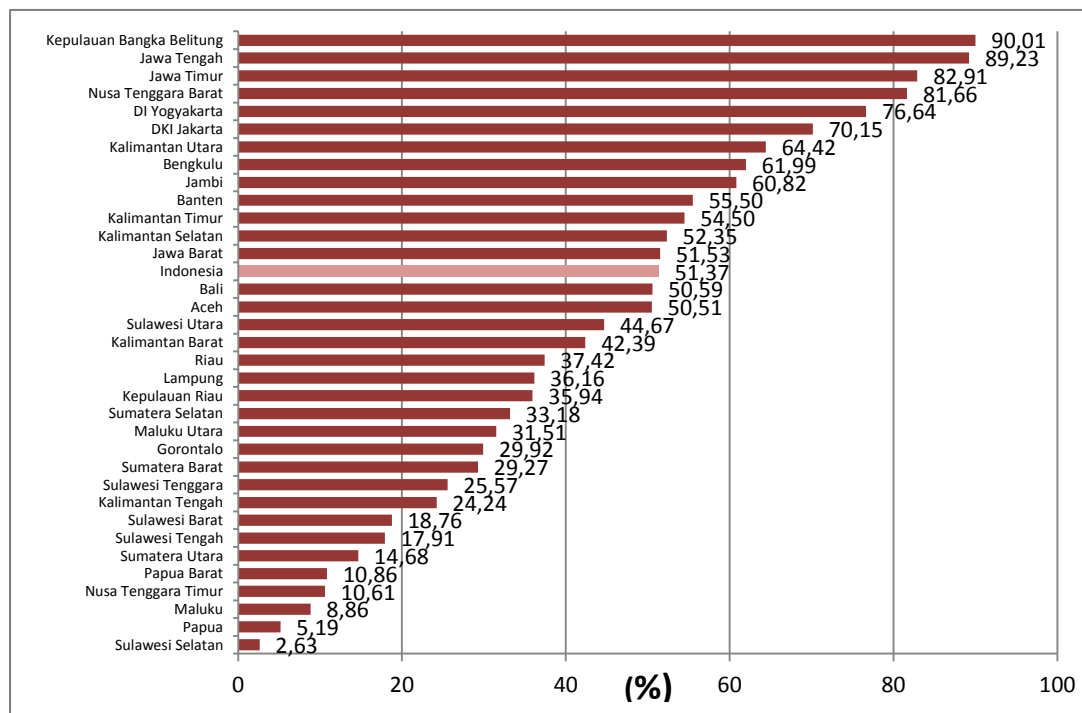
Penanganan neonatal dengan komplikasi adalah penanganan terhadap neonatal sakit dan atau neonatal dengan kelainan atau komplikasi/kegawatdaruratan yang mendapat pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan atau perawat) terlatih baik di rumah, sarana pelayanan kesehatan dasar maupun sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pelayanan sesuai standar antara lain sesuai dengan standar MTBM, Manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir, Manajemen Bayi Berat Lahir Rendah, pedoman pelayanan neonatal essensial di tingkat pelayanan kesehatan dasar, PONED, PONEK atau standar operasional pelayanan lainnya.

Capaian penanganan neonatal dengan komplikasi mengalami penurunan dari tahun 2014 yang sebesar 59,68% menjadi 51,37% pada tahun 2015. Selain menurunnya capaian, masih terdapat disparitas yang cukup besar antar provinsi. Pada tahun 2015 capaian tertinggi diperoleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan angka sebesar 90,01% diikuti Jawa Tengah sebesar 89,23%, dan Jawa Timur sebesar 82,91%. Tiga provinsi dengan capaian terendah ialah Sulawesi Selatan (2,63%), Papua (5,19%), dan Maluku (8,86%). Informasi lebih rinci menurut provinsi tentang penanganan komplikasi neonatal terdapat pada Lampiran 5.15.

Pada gambar berikut disajikan gambaran cakupan penanganan neonatal dengan komplikasi menurut provinsi tahun 2015.

GAMBAR 5.22

CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

3. Imunisasi

Setiap tahun lebih dari 1,4 juta anak di dunia meninggal karena berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain TBC, Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Pertusis, Campak, Polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian.

Proses perjalanan penyakit diawali ketika virus/bakteri/protozoa/jamur, masuk ke dalam tubuh. Setiap makhluk hidup yang masuk ke dalam tubuh manusia akan dianggap benda asing oleh tubuh atau yang disebut dengan antigen. Secara alamiah sistem kekebalan tubuh akan membentuk zat anti yang disebut antibodi untuk melumpuhkan antigen. Pada saat pertama kali antibodi berinteraksi dengan antigen, respon yang diberikan tidak terlalu kuat. Hal ini disebabkan antibodi belum mengenali antigen. Pada interaksi antibodi-antigen yang kedua dan seterusnya, sistem kekebalan tubuh sudah mengenali antigen yang masuk ke dalam tubuh, sehingga antibodi yang terbentuk lebih banyak dan dalam waktu yang lebih cepat.

Proses pembentukan antibodi untuk melawan antigen secara alamiah disebut imunisasi alamiah. Sedangkan program imunisasi melalui pemberian vaksin adalah upaya stimulasi terhadap sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam upaya melawan penyakit dengan melumpuhkan antigen yang telah dilemahkan yang berasal dari vaksin.

Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu. Program imunisasi diberikan kepada populasi yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular, yaitu bayi, balita, anak-anak, wanita usia subur, dan ibu hamil.

a. Imunisasi Dasar pada Bayi

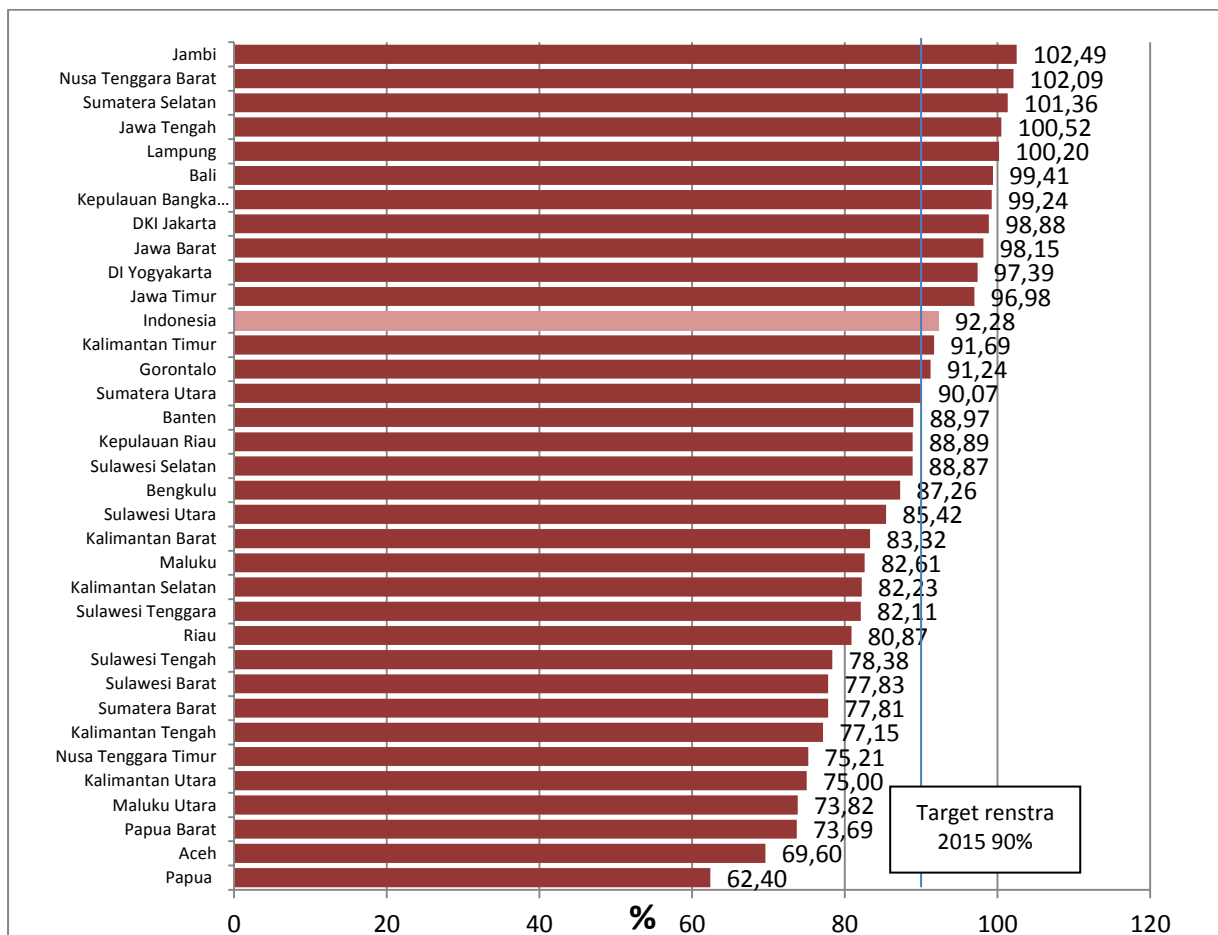
Imunisasi melindungi anak terhadap beberapa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Seorang anak diimunisasi dengan vaksin yang disuntikkan pada lokasi tertentu atau diteteskan melalui mulut.

Sebagai salah satu kelompok yang menjadi sasaran program imunisasi, setiap bayi wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB dan atau DPT-HB-Hib, 4 dosis polio, dan 1 dosis campak. Dari imunisasi dasar lengkap yang diwajibkan tersebut, campak merupakan imunisasi yang mendapat perhatian lebih, hal ini sesuai komitmen Indonesia pada global untuk mempertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90% secara tinggi dan merata. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak adalah salah satu penyebab utama kematian pada balita. Dengan demikian pencegahan campak memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kematian balita.

Indonesia memiliki cakupan imunisasi campak yang sedikit lebih rendah daripada tahun 2014, yaitu sebesar 92,3% pada tahun 2015. Menurut provinsi, terdapat empat belas

provinsi yang telah berhasil mencapai target 90% seperti yang disajikan pada Gambar 5.23 berikut.

GAMBAR 5.23
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2016

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa seluruh bayi di Provinsi Jambi, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Lampung telah mendapatkan imunisasi campak. Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah yaitu Papua sebesar 62,40%, diikuti oleh Aceh sebesar 69,60% dan Papua Barat sebesar 73,69%.

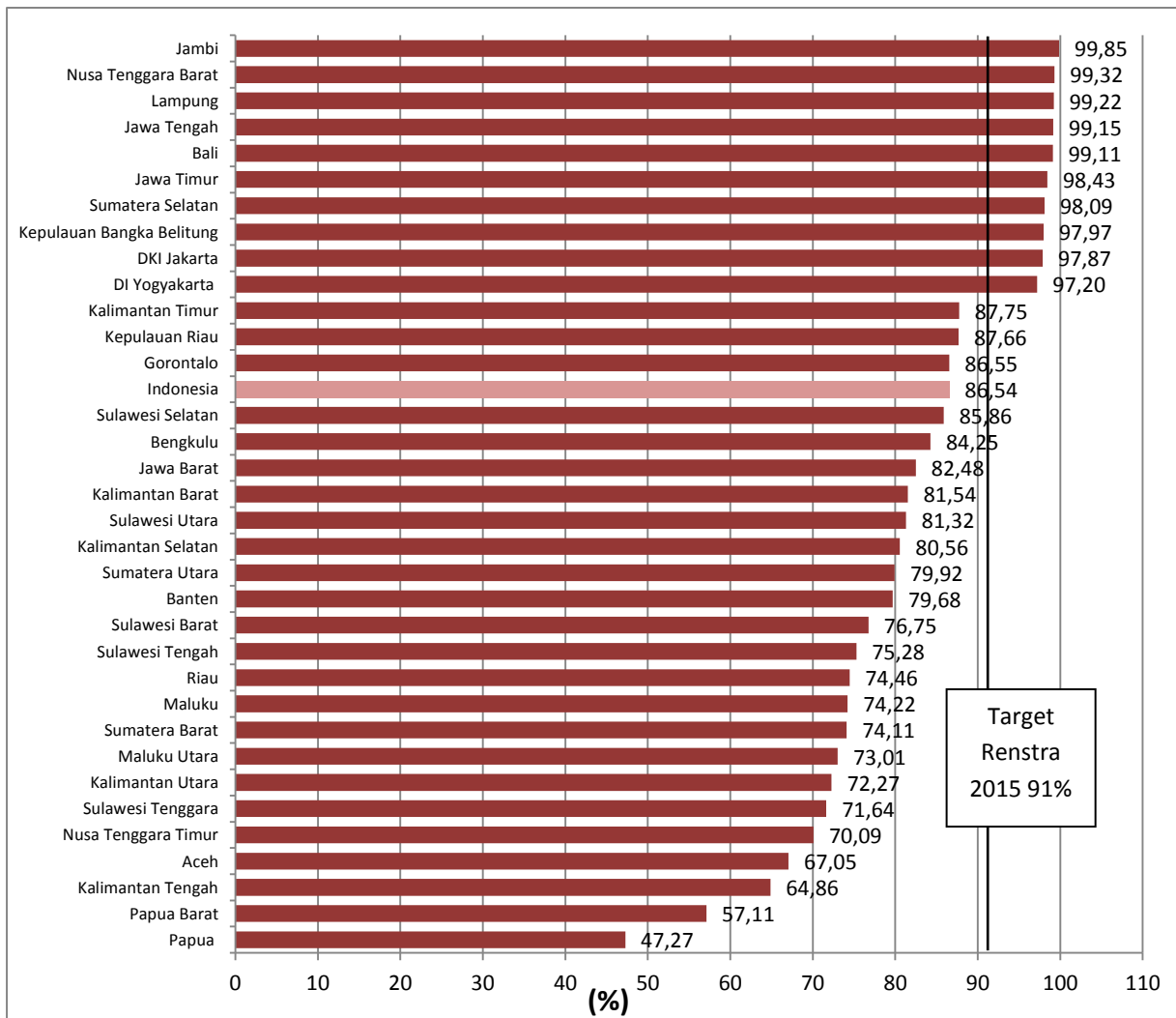
b. Imunisasi Lengkap pada Bayi

Program imunisasi pada bayi bertujuan agar setiap bayi mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Keberhasilan seorang bayi dalam mendapatkan imunisasi dasar tersebut diukur melalui indikator imunisasi dasar lengkap. Capaian indikator ini di Indonesia pada

tahun 2015 sebesar 86,54%. Angka ini belum mencapai target Renstra pada tahun 2015 yang sebesar 91%. Sedangkan menurut provinsi, terdapat sepuluh provinsi (29%) yang mencapai target Renstra tahun 2015.

GAMBAR 5.24

**CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**



Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2016

Tiga provinsi dengan capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi yang tertinggi pada tahun 2015 yaitu Jambi (99,85%), Nusa Tenggara Barat (99,32%), dan Lampung (99,22%). Sedangkan tiga provinsi dengan capaian terendah yaitu Papua (47,27%), diikuti oleh Papua Barat (57,11%), dan Kalimantan Tengah (64,86%). Data dan informasi terkait imunisasi dasar pada bayi yang dirinci menurut provinsi tahun 2015 terdapat pada Lampiran 5.16.

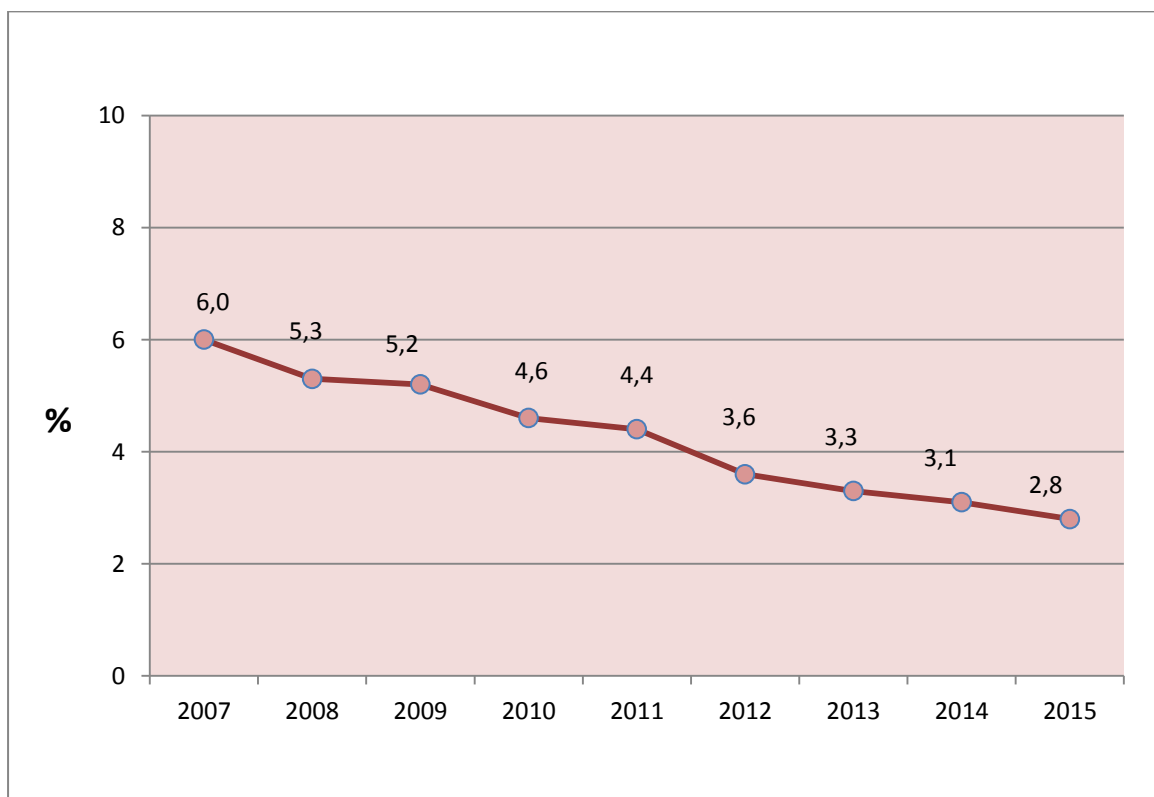
c. Angka Drop Out Cakupan Imunisasi DPT/HB1-Campak

Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai dengan umurnya. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal. Namun demikian, pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut dengan *drop out* (DO) imunisasi. Bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 pada awal pemberian imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak, disebut angka *drop out* imunisasi DPT/HB1-Campak. Indikator ini diperoleh dengan menghitung selisih penurunan cakupan imunisasi Campak terhadap cakupan imunisasi DPT/HB1.

Angka *drop out* imunisasi DPT/HB1-Campak pada tahun 2015 sebesar 2,8%. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 3,1%. Angka *drop out* imunisasi DPT/HB1-Campak menunjukkan kecenderungan penurunan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 yang asumsinya semakin banyak bayi yang mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kecenderungan penurunan tersebut dijelaskan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5.25

ANGKA DROP OUT CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB1-CAMPAK PADA BAYI TAHUN 2007-2015



Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2016

DO rate DPT/HB1-Campak diharapkan agar tidak melebihi 5%. Batas maksimal tersebut telah berhasil dipenuhi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Data dan informasi lebih rinci mengenai angka *drop out* cakupan imunisasi DPT/HB1-Campak dan DPT/HB(1)-DPT/HB(3) pada tahun 2013-2015 terdapat pada Lampiran 5.17.

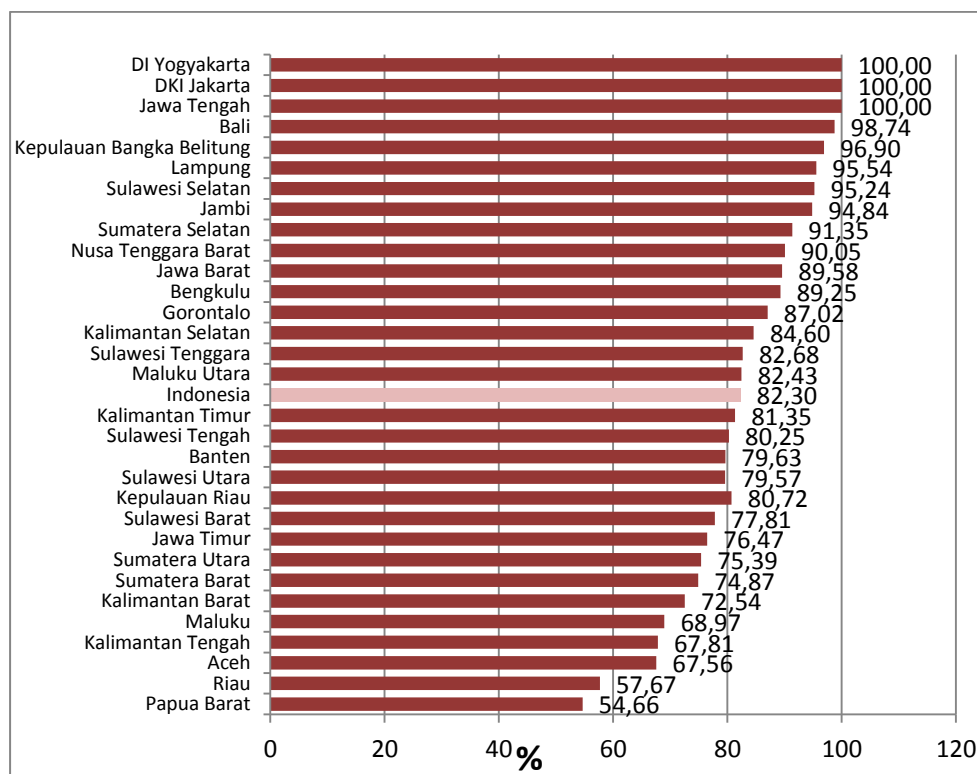
d. Desa/Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*)

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi yaitu *Universal Child Immunization* (UCI) desa/kelurahan. Desa/kelurahan UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Cakupan desa/kelurahan UCI menurut provinsi terdapat pada Gambar 5.26.

Pada tahun 2015 terdapat tiga provinsi yang memiliki capaian tertinggi yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah sebesar 100%. Sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki capaian terendah (54,66%), diikuti oleh Riau sebesar 57,67%, dan Aceh sebesar 67,56%. Informasi terkait capaian desa UCI pada tahun 2013-2015 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.18.

GAMBAR 5.26

CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2016

4. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Mulai masuk sekolah merupakan hal penting bagi tahap perkembangan anak. Banyak masalah kesehatan terjadi pada anak usia sekolah, misalnya pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, karies gigi, kecacingan, kelainan refraksi/ketajaman penglihatan dan masalah gizi. Pelayanan kesehatan pada anak termasuk pula intervensi pada anak usia sekolah.

Anak usia sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini diutamakan untuk siswa SD/ sederajat kelas satu. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih (guru UKS/UKGS dan dokter kecil). Tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu tenaga medis, tenaga keperawatan atau petugas puskesmas lainnya yang telah dilatih sebagai tenaga pelaksana UKS/UKGS. Guru UKS/UKGS adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKGS di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKGS. Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil.

Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan gigi bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan pada umumnya.

Upaya kesehatan pada kelompok ini yang dilakukan melalui penjangkaran kesehatan terhadap murid SD/MI kelas satu juga menjadi salah satu indikator yang dievaluasi keberhasilannya melalui Renstra Kementerian Kesehatan. Kegiatan penjangkaran kesehatan selain untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk, juga untuk memperoleh data atau informasi dalam menilai perkembangan kesehatan anak sekolah, maupun untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

4.a Penjangkaran Kesehatan Peserta Didik Kelas I

Indikator Penjangkaran pada Renstra 2010–2014, berbeda dengan Renstra 2015–2019. Jika pada akhir tahun 2014 indikator difokuskan kepada sekolah, maka pada Renstra 2015 lebih difokuskan kepada Puskesmas. Penentuan target didapatkan dari data dasar akhir tahun 2014 dimana cakupan sekolah yang melaksanakan sebesar 82% (bila dikonversi kedalam jumlah Puskesmas menjadi sebesar minimal 40%) dari target sebesar 95% dengan rata-rata peningkatan indikator ini sebesar 5% dan peningkatan sebesar 8,3% dibandingkan tahun 2013. Pada capaian tahun 2015, Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas I mencapai target yang telah ditetapkan.

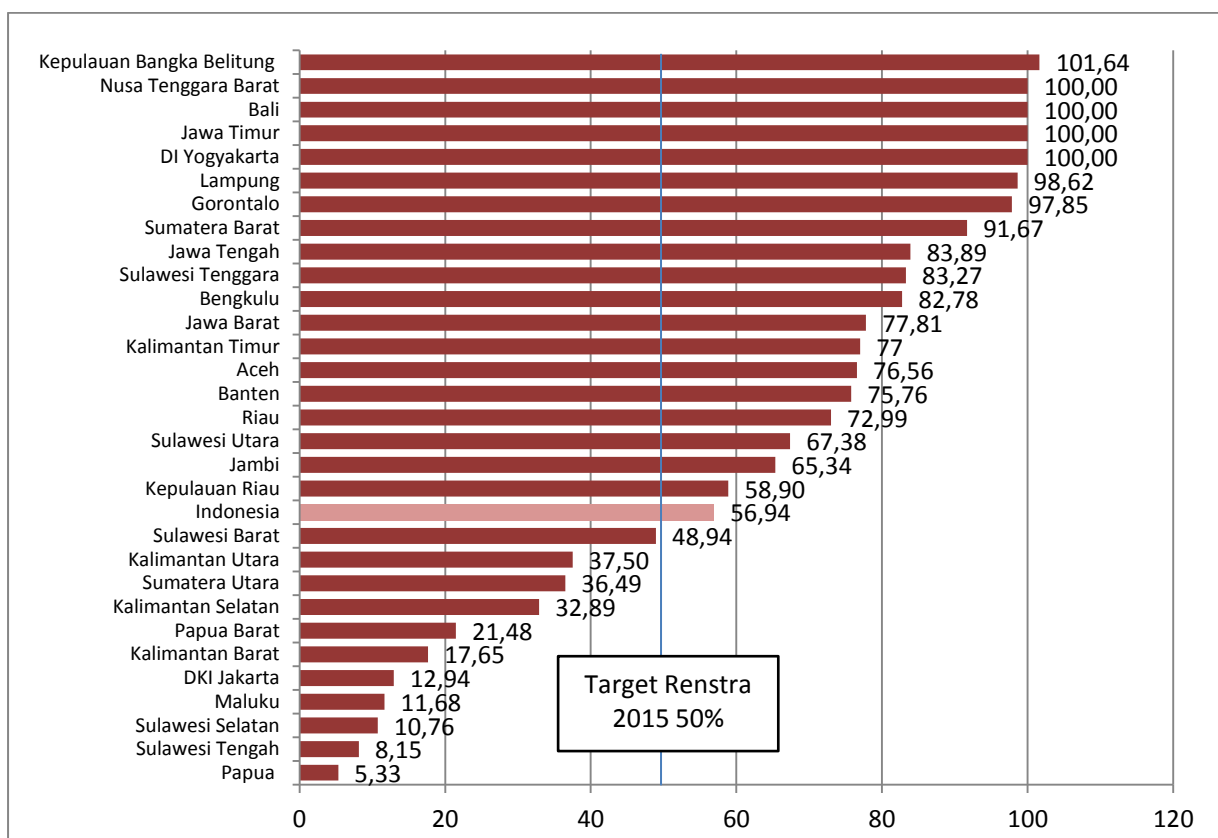
Capaian pada tahun 2015 sebesar 57% yang berarti sebanyak 5.541 puskesmas sudah melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas I. Sedangkan target nasional tahun 2015

sebesar 50%, dengan demikian dari 34 provinsi terdapat 19 provinsi yang mencapai target Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas I.

Gambaran pencapaian cakupan Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas I memiliki disparitas yang cukup besar antar provinsi seperti terlihat pada Gambar 5.27. Terdapat empat provinsi yang belum mengirimkan data penjangkaran kesehatan peserta didik kelas I, yaitu Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara.

GAMBAR 5.27

**CAKUPAN PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENJANGKARAN KESEHATAN
PESERTA DIDIK KELAS I MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

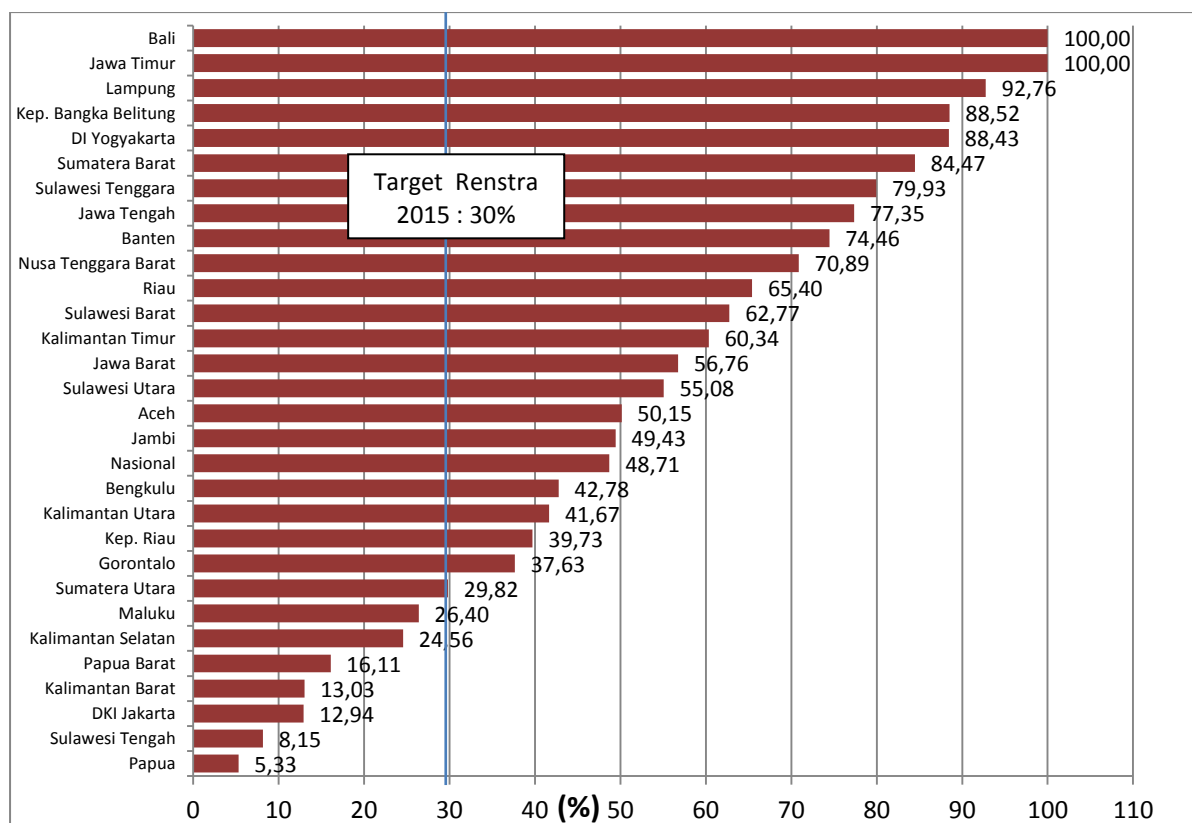


Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

4.b Penjaringan Kesehatan Peserta Didik Kelas VII dan X

GAMBAR 5.28

CAKUPAN PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN PESERTA DIDIK KELAS VII DAN X MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Dari Gambar 5.28 diketahui bahwa sebagian besar provinsi sudah memenuhi target Renstra 2015 yang sebesar 30%, hanya delapan provinsi yang belum mencapai target. Terdapat dua provinsi dengan capaian 100%, yakni Jawa Timur dan Bali. Capaian terendah terdapat di Provinsi Papua dan Sulawesi Tengah. Sedangkan Provinsi Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara belum mengirimkan data, sehingga tidak ditampilkan pada grafik.

Sulitnya memenuhi target Puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan peserta didik kelas I, VII, dan X dapat disebabkan oleh beberapa masalah. Masalah utama yang sering ditemukan di daerah yaitu kurangnya tenaga di Puskesmas sedangkan jumlah SD/MI dan SMP cukup banyak, sehingga untuk melaksanakan penjaringan kesehatan membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu juga manajemen pelaporan belum terintegrasi dengan baik. Walaupun kegiatan penjaringan kesehatan telah dilaksanakan di Puskesmas namun di beberapa provinsi, pengelola program UKS di kabupaten/kota berada pada

struktur organisasi yang berbeda sehingga menjadi penyebab koordinasi pencatatan dan pelaporan tidak berjalan dengan baik. Selain itu terjadi perubahan definisi operasional indikator penjangkaran kesehatan peserta didik oleh sekolah pada Renstra 2014 menjadi penjangkaran kesehatan peserta didik oleh Puskesmas pada Renstra 2015.

Data dan informasi tentang cakupan Puskesmas yang melakukan penjangkaran peserta didik kelas VII dan X menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.23.

5. Pelayanan Kesehatan pada Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Organisasi Kesehatan Dunia/WHO mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai semua bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi, komersial atau lainnya yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Menurut KOMNAS Perlindungan Anak (2006), pemicu kekerasan terhadap anak di antaranya yaitu 1) Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua, 2) Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi, 3) Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. 4) Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan demikian pola asuh apapun berhak dilakukan oleh orang tua. Di samping itu, kekerasan pada anak terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi maupun media-media lainnya yang tersebar di lingkungan masyarakat.

Dalam bidang kesehatan, pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk penyediaan akses pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan pada anak yang terdiri dari pelayanan di tingkat dasar melalui puskesmas. Pendekatan pelayanan kesehatan KtA di puskesmas dilakukan melalui tiga aspek yaitu meliputi aspek medis (pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang), mediko legal (*visum et repertum*) dan psikososial (rumah aman). Penatalaksanaan kasus merupakan multidisiplin dengan melibatkan lembaga pelayanan kesehatan, lembaga perlindungan anak, lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum dan lembaga sosial lainnya, yang terbentuk dalam mekanisme kerja jejaring.

Pelayanan kesehatan lebih difokuskan pada upaya promotif dan preventif seperti penyuluhan mengenai dampak KtA terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikologis di sekolah melalui program UKS dan di tingkat masyarakat memberikan penyuluhan kepada

ibu-ibu PKK dan lain-lain. Selain itu, Puskesmas juga memberikan pelayanan kuratif yaitu penanganan darurat medis, pelayanan rehabilitatif dengan memberikan konseling. pelayanan rujukan mediko legal dan psikososial.

Program KtA diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan secara komprehensif di pelayanan tingkat dasar dan rujukan. Target Puskesmas mampu tata laksana KtA adalah setiap kabupaten/kota memiliki minimal dua Puskesmas mampu tata laksana KtA. Kriterianya adalah memiliki tenaga terlatih tata laksana kasus KtA (dokter atau dokter gigi dan perawat atau bidan) dan melakukan pelayanan rujukan kasus KtA.

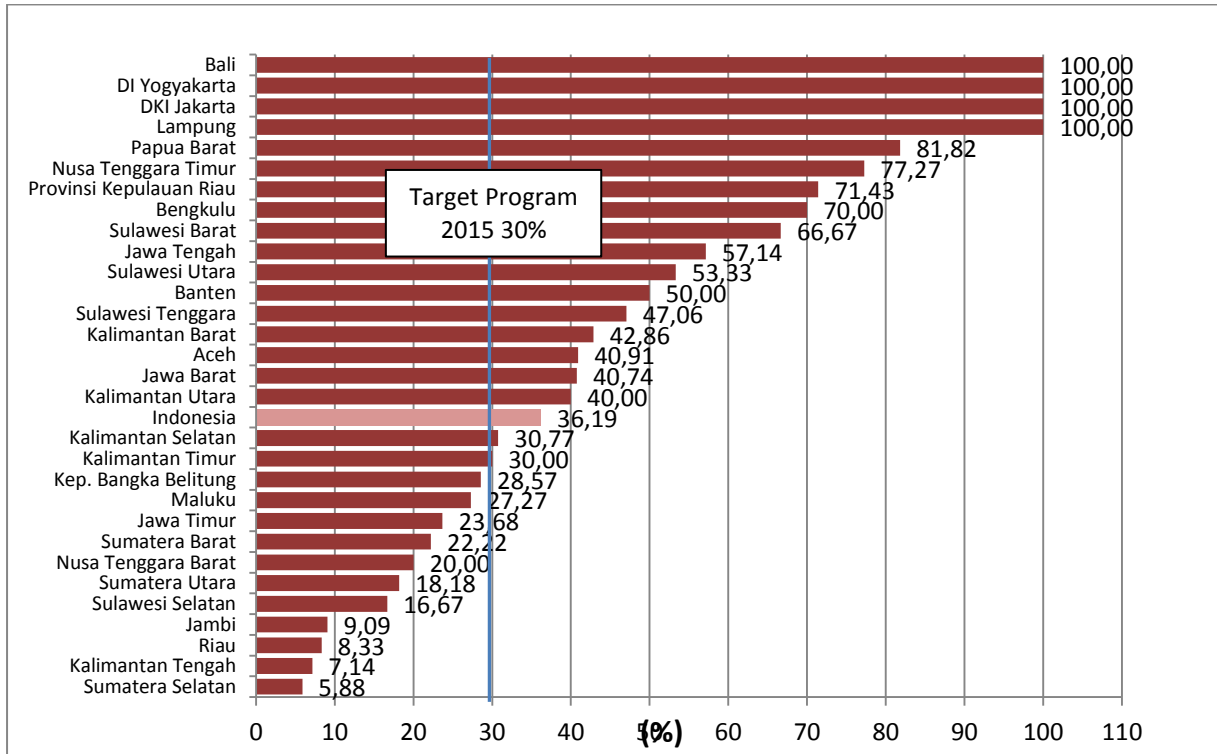
Upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyiapan fasilitator pusat dan daerah serta tenaga pemberi pelayanan di Puskesmas yang dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan (*training of trainer*) secara berjenjang dalam rangka menyediakan Puskesmas mampu tata laksana KtA dengan menggunakan dana APBN maupun dekonsentrasi. Selain itu, pada tahun 2012–2013 telah dilaksanakan penguatan pelayanan rujukan di rumah sakit. Jumlah Puskesmas mampu tata laksana KtA pada tahun 2014 sebanyak 1.694 Puskesmas. Persentase kabupaten/kota dengan minimal dua Puskesmas mampu tata laksana KtA yaitu 78,07%, meningkat dibanding tahun 2013 yang sebesar 76,26%. Saat ini, sudah tersedia 71 RS Umum/RS Bhayangkara di 28 provinsi yang memiliki PPT/PKT (menjadi Pusat Pelayanan Terpadu untuk korban KtA) dan 39 RS di 33 provinsi yang melakukan pelayanan KtA di IGD oleh tenaga kesehatan terlatih.

Pada tahun 2014 target program perlindungan kesehatan anak yaitu Puskesmas mampu tata laksana KtA dengan indikator tiap kabupaten/kota memiliki minimal dua Puskesmas yang mampu tata laksana kasus KtA sebesar 90% belum tercapai. Hal itu disebabkan karena program tersebut bukan merupakan program prioritas. Akibatnya dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap program KtA dirasakan kurang. Hal itu dapat dilihat dari dukungan anggaran yang belum memadai dan sebagian besar tenaga kesehatan yang telah dilatih penanganan KtA dimutasi khususnya dokter.

Pada Pasal 108 KUHAP ayat (3) dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Untuk itu, telah dibuat Permenkes Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk memberikan informasi atas adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Diharapkan dengan Permenkes ini, tenaga kesehatan dapat bekerja lebih profesional.

GAMBAR 5.29

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA
DENGAN MINIMAL 4 PUSKESMAS MAMPU TATA LAKSANA KTA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Pada tahun 2014 indikator ini hanya menghitung persentase kabupaten/kota dengan dua Puskesmas yang mampu melaksanakan tata laksana KtA, maka pada tahun 2015 terjadi perubahan jumlah Puskesmas. Jumlah Puskesmas mampu melaksanakan tata laksana KtA bertambah dari 2 menjadi 4 Puskesmas, karena itu cakupan provinsi menjadi rendah. Atau dengan kata lain kriteria kabupaten bertambah jumlah Puskesmasnya, namun tidak didukung dengan anggaran yang ada sehingga cakupan program tidak dapat berjalan dengan baik.

Pada Gambar 5.29 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 36,19% kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki empat puskesmas mampu tata laksana KtA. Pada tahun 2015 terdapat empat provinsi dengan persentase 100%. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014 dimana terdapat empat belas provinsi dengan persentase 100%. Provinsi dengan persentase 100% artinya seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut telah memiliki sedikitnya empat puskesmas mampu tata laksana KtA.

Terdapat empat provinsi yang belum mengirimkan data persentase kabupaten/kota dengan empat Puskesmas mampu melaksanakan tata laksana kekerasan terhadap anak, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi terkait persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas mampu tata laksana KtA disajikan pada Lampiran 5.20.

6. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

Salah satu upaya kesehatan anak yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden yaitu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas. Program ini mulai dikembangkan pada tahun 2003 yang bertujuan khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksi dan perilaku hidup sehat serta memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada remaja.

Puskesmas yang memiliki program PKPR memberikan layanan baik di dalam maupun di luar gedung yang ditujukan bagi kelompok remaja berbasis sekolah ataupun masyarakat. Hal ini dilakukan agar layanan yang diberikan dapat menjangkau semua kelompok remaja (usia 10-18 tahun). Kriteria yang ditetapkan bagi Puskesmas yang mampu laksana PKPR yaitu :

- 1) Melakukan pembinaan pada minimal satu sekolah (sekolah umum, sekolah berbasis agama) dengan melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di sekolah binaan minimal dua kali dalam setahun;
- 2) Melatih kader kesehatan remaja di sekolah minimal sebanyak 10% dari jumlah murid di sekolah binaan; dan
- 3) Memberikan pelayanan konseling pada semua remaja yang memerlukan konseling yang kontak dengan petugas PKPR.

Layanan PKPR merupakan pendekatan yang komprehensif dan menekankan pada upaya promotif/preventif berupa pembekalan kesehatan dan peningkatan keterampilan psikososial dengan Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS). Layanan konseling menjadi ciri dari PKPR mengingat permasalahan remaja yang tidak hanya berhubungan dengan fisik tetapi juga psikososial. Upaya penjangkauan terhadap kelompok remaja juga dilakukan melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), *Focus Group Discussion* (FGD), dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kelompok remaja lainnya.

Fenomena *peer groups* (kelompok sebaya) juga menjadi perhatian pada program PKPR. Oleh karena itu, program ini juga memberdayakan remaja sebagai konselor sebaya yang diharapkan mampu menjadi agen pengubah (*agent of change*) di kelompoknya. Konselor sebaya ini sangat potensial karena adanya kecenderungan pada remaja untuk memilih teman sebaya sebagai tempat berdiskusi dan rujukan informasi.

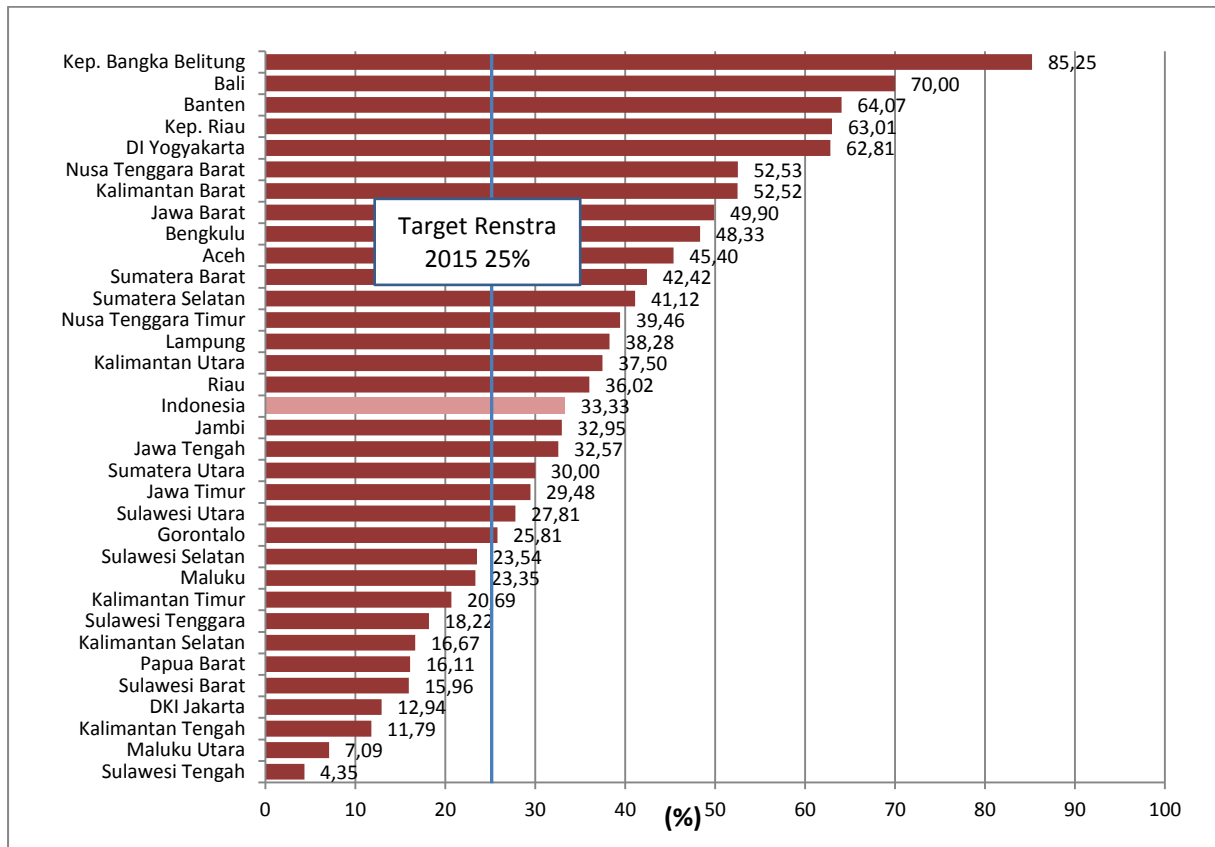
Selain pemberian informasi, edukasi, dan kegiatan seperti disebutkan di atas, pelayanan kesehatan sekolah ini meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan perkembangan kecerdasan, pemberian imunisasi, penemuan kasus-kasus dini yang mungkin terjadi,

pengobatan sederhana, pertolongan pertama serta rujukan bila menemukan kasus yang tidak dapat ditanggulangi di sekolah.

Persentase kabupaten/kota dengan minimal empat Puskesmas mampu tata laksana PKPR menurut provinsi pada tahun 2015 terdapat pada Gambar 5.30.

GAMBAR 5.30

**PERSENTASE PUSKESMAS MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN REMAJA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Persentase kabupaten/kota dengan minimal empat puskesmas mampu tata laksana PKPR di Indonesia tahun 2015 sebesar 33,33%. Terdapat sebelas provinsi (33,33%) belum mencapai target Renstra tahun 2015 yang sebesar 25%.

Jumlah Puskesmas PKPR tahun 2015 sebanyak 3.243 Puskesmas yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi terkait persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas mampu laksana PKPR disajikan pada Lampiran 5.21.

C. Gizi

Pada subbab gizi ini akan dibahas upaya peningkatan gizi balita yaitu pemberian ASI eksklusif, cakupan pemberian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, cakupan penimbangan balita di posyandu serta penemuan dan penanganan gizi buruk. Selain itu pada subbab ini juga dibahas tingkat kecukupan energi dan protein pada balita, lansia juga pada penduduk secara keseluruhan.

1. Pemberian ASI Eksklusif

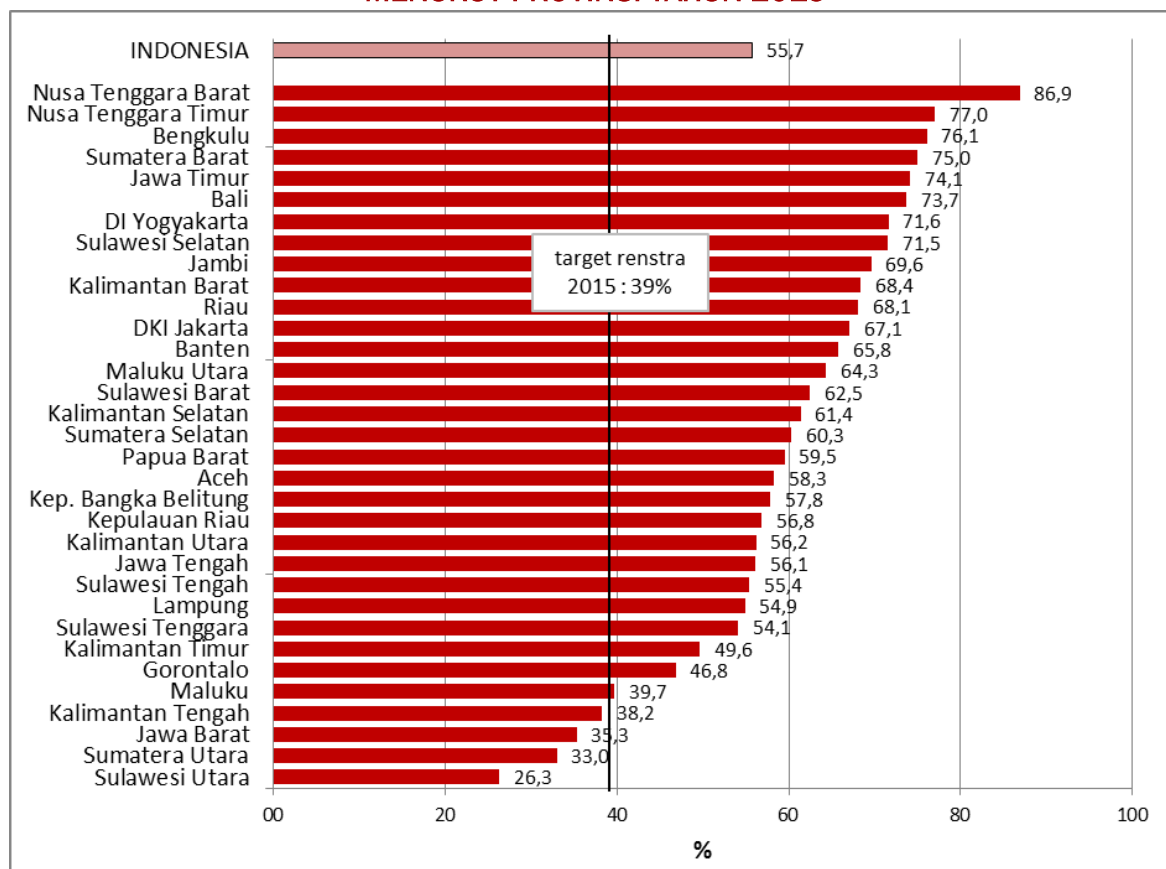
Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral).

ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi karena mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan pembunuh kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi risiko kematian pada bayi. Kolostrum berwarna kekuningan dihasilkan pada hari pertama sampai hari ketiga. Hari keempat sampai hari kesepuluh ASI mengandung immunoglobulin, protein, dan laktosa lebih sedikit dibandingkan kolostrum tetapi lemak dan kalori lebih tinggi dengan warna susu lebih putih. Selain mengandung zat-zat makanan, ASI juga mengandung zat penyerap berupa enzim tersendiri yang tidak akan mengganggu enzim di usus. Susu formula tidak mengandung enzim sehingga penyerapan makanan tergantung pada enzim yang terdapat di usus bayi.

Menurut Riskesdas 2013, proses mulai menyusui terbanyak terjadi pada 1-6 jam setelah kelahiran (35,2%) dan kurang dari 1 jam (inisiasi menyusui dini) sebesar 34,5%. Sedangkan proses mulai menyusui terendah terjadi pada 7-23 jam setelah kelahiran yaitu sebesar 3,7%.

GAMBAR 5.31

CAKUPAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI UMUR 0-6 BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Mengacu pada target renstra pada tahun 2015 yang sebesar 39%, maka secara nasional cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari enam bulan sebesar 55,7% telah mencapai target. Menurut provinsi, kisaran cakupan ASI eksklusif pada bayi umur 0-6 bulan antara 26,3% (Sulawesi Utara) sampai 86,9% (Nusa Tenggara Barat). Dari 33 provinsi yang melapor, sebanyak 29 di antaranya (88%) berhasil mencapai target renstra 2015.

2. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6-59 Bulan

Vitamin A adalah salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak, disimpan dalam hati, dan tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari luar tubuh.

Kekurangan Vitamin A (KVA) dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh balita serta meningkatkan risiko kesakitan dan kematian. Kekurangan Vitamin A juga merupakan penyebab utama kebutaan pada anak yang dapat dicegah.

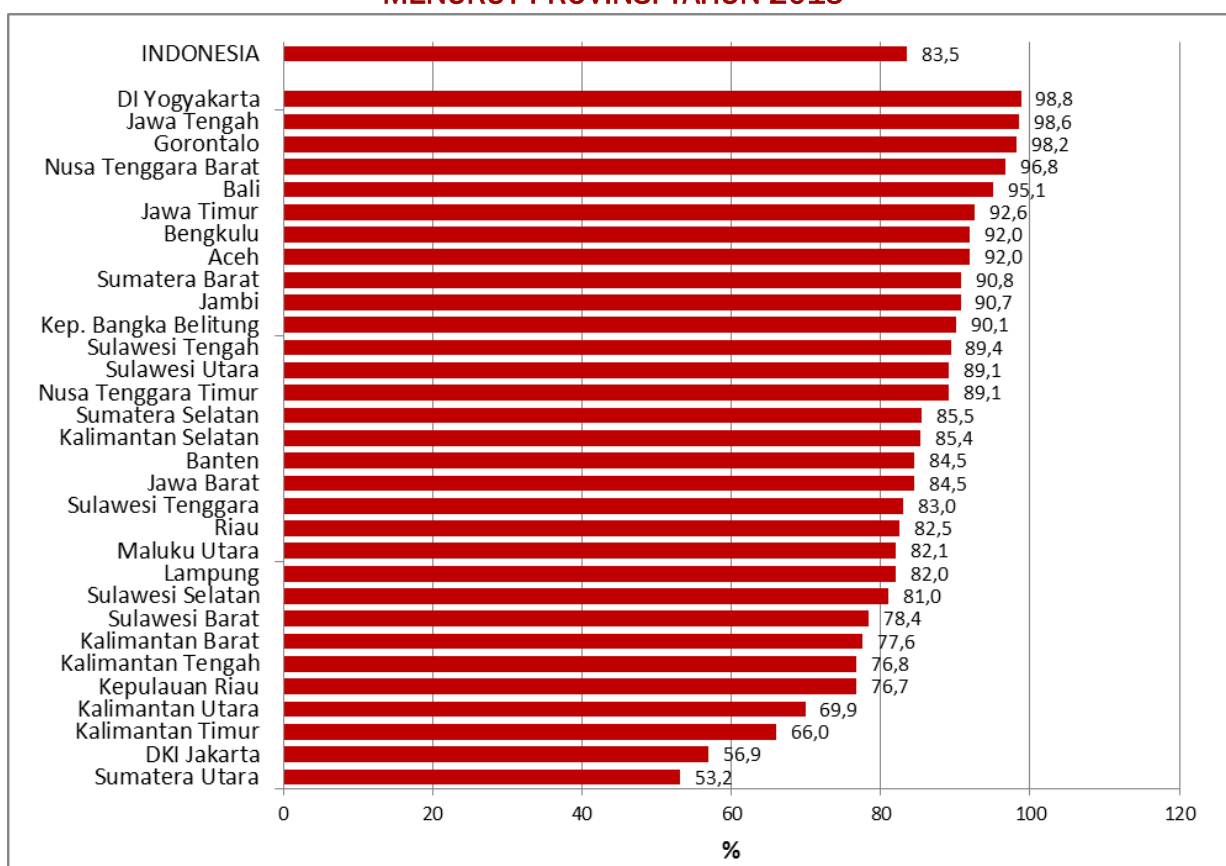
Dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 dinyatakan bahwa untuk mengurangi risiko kesakitan dan kematian pada balita dengan kekurangan Vitamin A, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemberian Vitamin A dalam bentuk kapsul vitamin A biru 100.000 IU bagi bayi usia enam sampai dengan sebelas bulan, kapsul vitamin A merah 200.000 IU untuk anak balita usia dua belas sampai dengan lima puluh sembilan bulan, dan ibu nifas.

Menurut Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A, pemberian suplementasi Vitamin A diberikan kepada seluruh balita umur 6-59 bulan secara serentak melalui posyandu yaitu; bulan Februari atau Agustus pada bayi umur 6-11 bulan serta bulan Februari dan Agustus pada anak balita 12-59 bulan.

Pada tahun 2015 cakupan pemberian Vitamin A pada balita 6-59 bulan di Indonesia sebesar 83,5%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 85,4%. Dari 31 provinsi yang melapor, sebelas provinsi di antaranya (35%) telah mencapai cakupan pemberian Vitamin A 90%. Cakupan pemberian Vitamin A pada balita 6-59 bulan tertinggi yaitu DI Yogyakarta sebesar 98,8% dan terendah di Sumatera Utara sebesar 53,2%.

GAMBAR 5.32

CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Menurut sasarannya, cakupan pemberian Vitamin A pada bayi 6-11 bulan sebesar 75,4% dengan kisaran 16,4% (Sumatera Utara) sampai 99,3% (DI Yogyakarta). Sedangkan pemberian Vitamin A pada anak 12-59 bulan sebesar 84,9% dengan kisaran antara 55,3% (DKI Jakarta) sampai 98,7% (DI Yogyakarta).

Besarnya cakupan Vitamin A antara lain disebabkan kondisi geografis dan keterjangkauan akses menuju lokasi posyandu dalam pendistribusian Vitamin A. Provinsi yang memiliki cakupan Vitamin A yang tinggi, cakupan penimbangan balita di posyandu juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, provinsi yang memiliki cakupan Vitamin A yang rendah seperti Papua dan Papua Barat disebabkan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam penimbangan balita di posyandu (D/S) juga rendah karena kendala geografis.

Pemberian kapsul Vitamin A pada provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Utara sangat rendah dikarenakan pencatatan dan pelaporan yang tidak lengkap. Tidak semua kegiatan di wilayah tersebut dilaporkan, termasuk kegiatan *sweeping* pemberian kapsul Vitamin A oleh tenaga kesehatan.

Capaian pemberian Vitamin A pada bayi, anak balita, dan balita menurut provinsi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 5.24.

3. Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu (D/S)

Cakupan penimbangan balita di posyandu (D/S) adalah jumlah balita yang ditimbang di seluruh posyandu yang melapor di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh balita yang ada di seluruh posyandu yang melapor di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

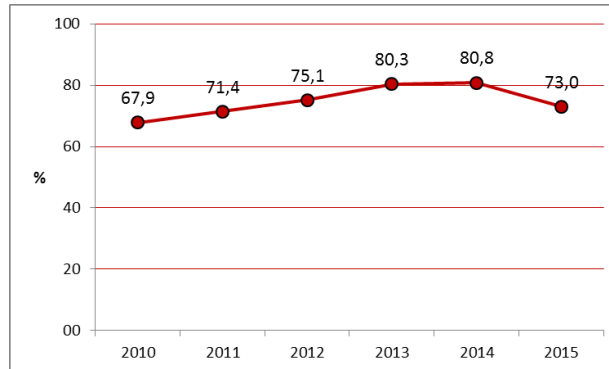
Peran serta masyarakat dalam penimbangan balita menjadi sangat penting dalam deteksi dini kasus gizi kurang dan gizi buruk. Dengan rajin menimbang balita, maka pertumbuhan balita dapat dipantau secara intensif. Sehingga bila berat badan anak tidak naik ataupun jika ditemukan penyakit akan dapat segera dilakukan upaya pemulihan dan pencegahan supaya tidak menjadi gizi kurang atau gizi buruk. Semakin cepat ditemukan, maka penanganan kasus gizi kurang atau gizi buruk akan semakin baik. Penanganan yang cepat dan tepat sesuai tata laksana kasus anak gizi buruk akan mengurangi risiko kematian sehingga angka kematian akibat gizi buruk dapat ditekan.

Tindak lanjut dari hasil penimbangan selain penyuluhan juga pemberian makanan tambahan dan pemberian suplemen gizi.

Gizi buruk dapat terjadi pada semua kelompok umur, tetapi yang perlu lebih diperhatikan yaitu pada kelompok bayi dan balita. Pada usia 0-2 tahun merupakan masa tumbuh kembang yang optimal (*golden period*) terutama untuk pertumbuhan janin sehingga bila terjadi gangguan pada masa ini tidak dapat dicukupi pada masa berikutnya dan akan berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus.

GAMBAR 5.33

TREN CAKUPAN PENIMBANGAN BALITA (D/S) DI INDONESIA TAHUN 2010-2015

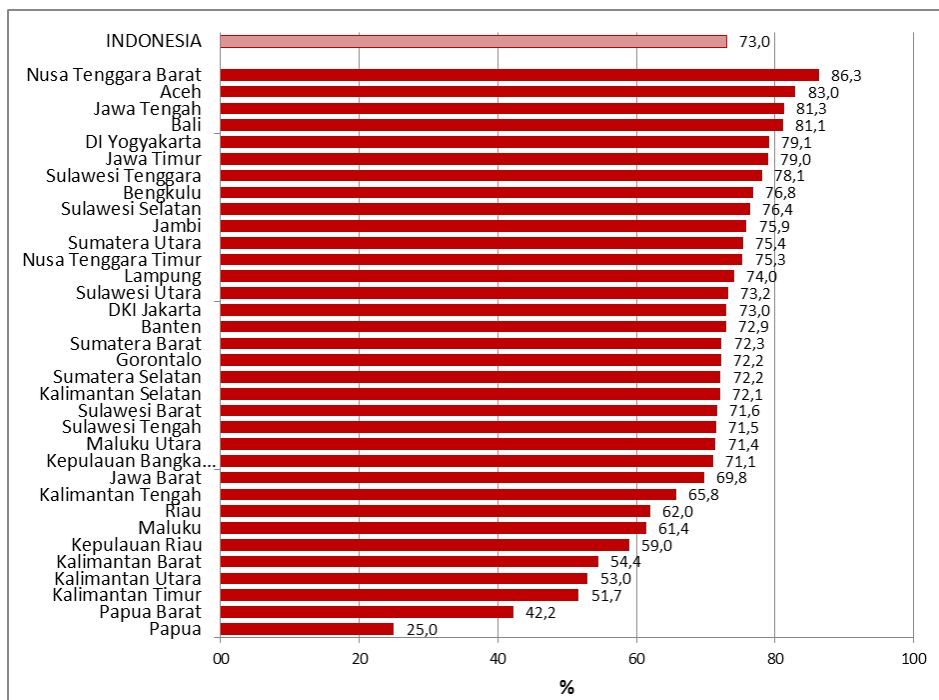


Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Cakupan penimbangan balita dari tahun 2010 sampai tahun 2014 di Indonesia cenderung meningkat. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 73,0%, hal itu disebabkan pada tahun 2015 terjadi peralihan RPJMN tahun 2015-2019 dimana terdapat pengembangan sasaran program dan penambahan indikator baru terkait Renstra Kemenkes sehingga cakupan dan target penimbangan balita di posyandu belum tersosialisasikan dengan baik.

GAMBAR 5.34

CAKUPAN PENIMBANGAN BALITA (D/S) MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Cakupan tertinggi penimbangan balita terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 86,3%. Sedangkan cakupan penimbangan terendah terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Cakupan penimbangan balita di posyandu per provinsi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 5.26.

4. Penemuan dan Penanganan Gizi Buruk

Berdasarkan penimbangan balita di posyandu, ditemukan sebanyak 26.518 balita gizi buruk secara nasional. Kasus gizi buruk yang dimaksud ditentukan berdasarkan perhitungan berat badan menurut tinggi badan balita $Z_{score} < -3$ standar deviasi (balita sangat kurus). Sedangkan menurut hasil Riskesdas 2013 prevalensi gizi sangat kurus pada balita sebesar 5,3%. Jika diestimasi terhadap jumlah sasaran balita (S) yang terdaftar di posyandu yang melapor (21.436.940) maka perkiraan jumlah balita gizi buruk (sangat kurus) sebanyak sekitar 1,1 juta jiwa.

Dengan demikian penemuan kasus balita gizi buruk masih jauh dibandingkan perkiraan kasus gizi buruk yang ada di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menimbang balitanya karena cakupan penimbangan balita belum mencapai tiga perempat dari jumlah balita yang terdaftar di posyandu yang melapor. Sedangkan kegiatan penimbangan balita yang dilakukan di posyandu diharapkan bisa mencapai minimal 80% dan sisanya dapat dicapai melalui penjangkaran (*sweeping*) oleh tenaga kesehatan ke rumah balita. Selain itu peningkatan keterampilan petugas (kader) posyandu untuk mendeteksi status gizi balita juga perlu ditingkatkan.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penimbangan balita di posyandu yaitu melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam penimbangan balita.

5. Tingkat Kecukupan Energi

Tingkat kecukupan energi yaitu persentase asupan energi per orang per hari terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin. AKE yang digunakan didasarkan pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2013 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia.

a) Proporsi Penduduk Menurut Klasifikasi Tingkat Kecukupan Energi

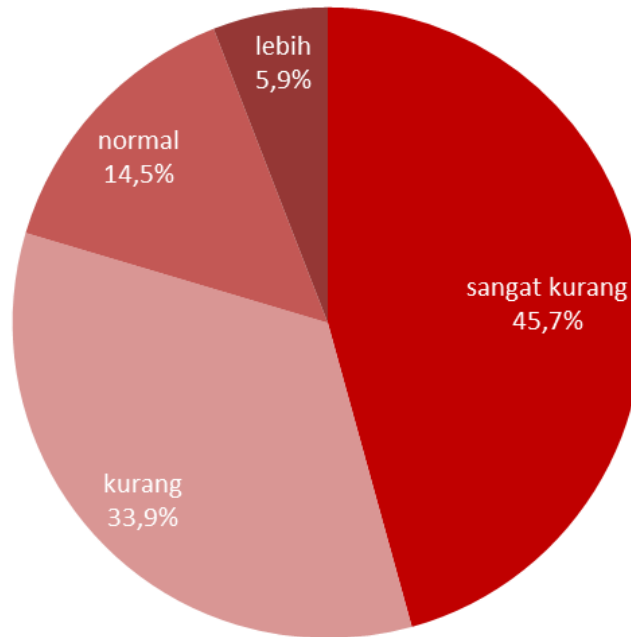
Klasifikasi tingkat kecukupan energi penduduk secara nasional dan provinsi digambarkan sebagai berikut:

- tingkat kecukupan energi **minimal** atau **sangat kurang** dari AKG (<70% AKE) artinya mengonsumsi energi kurang dari 70% AKE
- tingkat kecukupan energi **kurang** dari AKG (70 - <100% AKE) artinya mengonsumsi energi antara 70 sampai kurang dari 100% AKE

- tingkat kecukupan energi **sesuai AKG** atau **normal** (100 - <130% AKE) artinya mengonsumsi energi antara 100 sampai kurang dari 130% AKE
- tingkat kecukupan energi **lebih besar** dari AKG ($\geq 130\%$ AKE) artinya mengonsumsi energi sama atau lebih besar dari 130% AKE

GAMBAR 5.35

PROPORSI PENDUDUK MENURUT KLASIFIKASI TINGKAT KECUKUPAN ENERGI TAHUN 2014

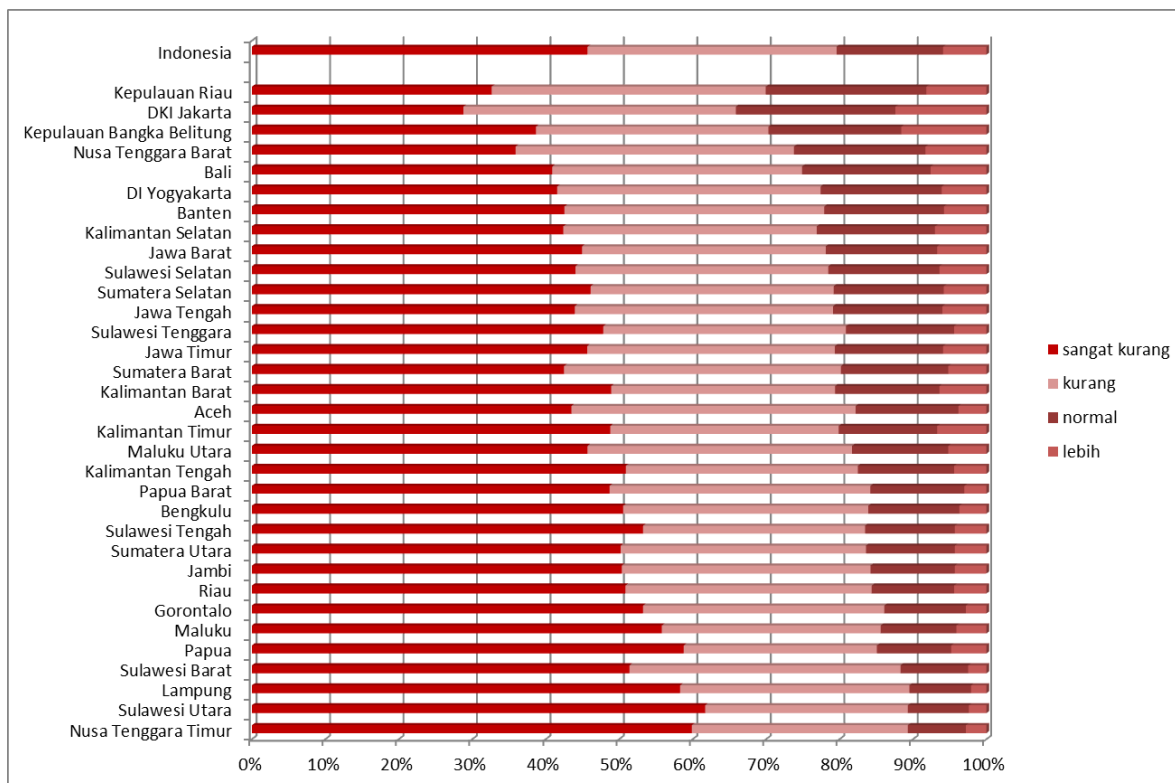


Sumber: Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI, Studi Diet Total 2014

Menurut Survei Diet Total tahun 2014, sebagian besar penduduk di Indonesia memiliki tingkat kecukupan energi sangat kurang dan kurang yaitu sebesar 79,6%, terdiri dari 45,7% penduduk dengan tingkat kecukupan energi sangat kurang/minimal dan 33,9% penduduk dengan tingkat kecukupan energi kurang.

GAMBAR 5.36

SEBARAN KLASIFIKASI TINGKAT KECUKUPAN ENERGI PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014



Sumber: Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI, Studi Diet Total 2014

Menurut provinsi, tingkat kecukupan energi sangat kurang dan kurang tertinggi terjadi di Lampung (89,5%), serta Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur masing-masing sebesar 89,3%. Sedangkan persentase terendah yaitu DKI Jakarta (65,9%). Selain memiliki tingkat kecukupan energi sangat kurang dan kurang terendah, DKI Jakarta memiliki persentase tingkat kecukupan energi lebih tertinggi yaitu sebesar 12,4%.

Berikut proporsi penduduk menurut klasifikasi tingkat kecukupan energi dan karakteristiknya:

TABEL 5.1

PROPORSI PENDUDUK MENURUT KLASIFIKASI TINGKAT KECUKUPAN ENERGI DAN KARAKTERISTIK TAHUN 2014

Karakteristik	Sangat kurang	Kurang	Normal	Lebih
Kelompok Umur				
0-59 bulan	6,8	48,9	27,1	17,1
5-12 tahun	29,7	40,1	19,9	10,2
13-18 tahun	52,5	30,3	12,2	5,0
19-55 tahun	50,0	32,5	12,9	4,6
>55 tahun	44,6	33,5	15,5	6,3
Jenis Kelamin				
Laki-laki	44,7	34,3	14,9	6,1
Perempuan	46,7	33,4	14,1	5,8
Tempat Tinggal				
Perkotaan	42,4	34,8	16,1	6,9
Perdesaan	49,2	32,9	12,9	4,9
Kuintil Indeks Kepemilikan				
Terbawah	55,0	30,8	10,5	3,7
Menengah Bawah	48,9	33,6	12,6	4,9
Menengah	45,7	34,0	14,8	5,5
Menengah Atas	42,7	34,3	16,0	7,0
Teratas	39,4	35,8	17,1	7,7

Sumber: Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI, Studi Diet Total 2014

Pada kelompok tingkat kecukupan energi normal, semakin tinggi kelompok umur maka semakin rendah persentase penduduk dengan tingkat kecukupan energi normal. Kecuali pada kelompok umur >55 tahun. Begitu juga yang terjadi pada kelompok tingkat kecukupan energi normal. Dan sebaliknya terjadi pada kelompok tingkat kecukupan energi sangat kurang.

Pola sebaran penduduk di perkotaan menurut kelompok tingkat energi sama dengan yang terjadi di perdesaan. Perbedaan sedikit terjadi pada besaran angkanya, pada perdesaan persentase kelompok tingkat energi sangat kurang lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Dan sebaliknya persentase kelompok tingkat energi normal dan lebih, lebih banyak terjadi di perkotaan dibandingkan di perdesaan.

Semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan (tingkat ekonomi semakin tinggi), semakin rendah proporsi penduduk dengan tingkat kecukupan energi sangat kurang. Semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan semakin tinggi pula proporsi penduduk dengan tingkat kecukupan energi normal dan lebih.

Tidak ada perbedaan signifikan seluruh klasifikasi tingkat kecukupan energi pada laki-laki dan perempuan.

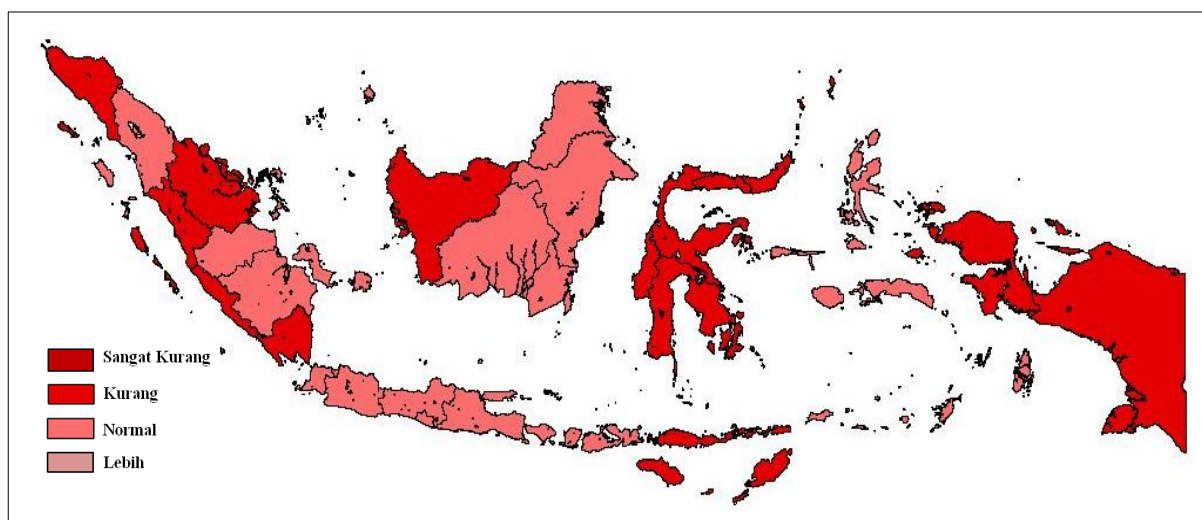
b) Rerata Tingkat Kecukupan Energi pada Balita Umur 0-59 Bulan

Secara nasional rerata asupan energi penduduk umur 0-59 bulan di Indonesia sebesar 1.137 Kkal, lebih tinggi dibandingkan energi yang dianjurkan (1.118 Kkal). Rerata asupan energi di perkotaan (1.190 Kkal) lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (1.081 Kkal).

Menurut tingkat kecukupan energi, rerata tingkat kecukupan energi penduduk umur 0-59 bulan di Indonesia sebesar 101,0%, di perkotaan 104,1% dan di perdesaan 97,7%.

GAMBAR 5.37

SEBARAN TINGKAT KECUKUPAN ENERGI PADA BALITA UMUR 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014



Sumber: Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI, Studi Diet Total 2014

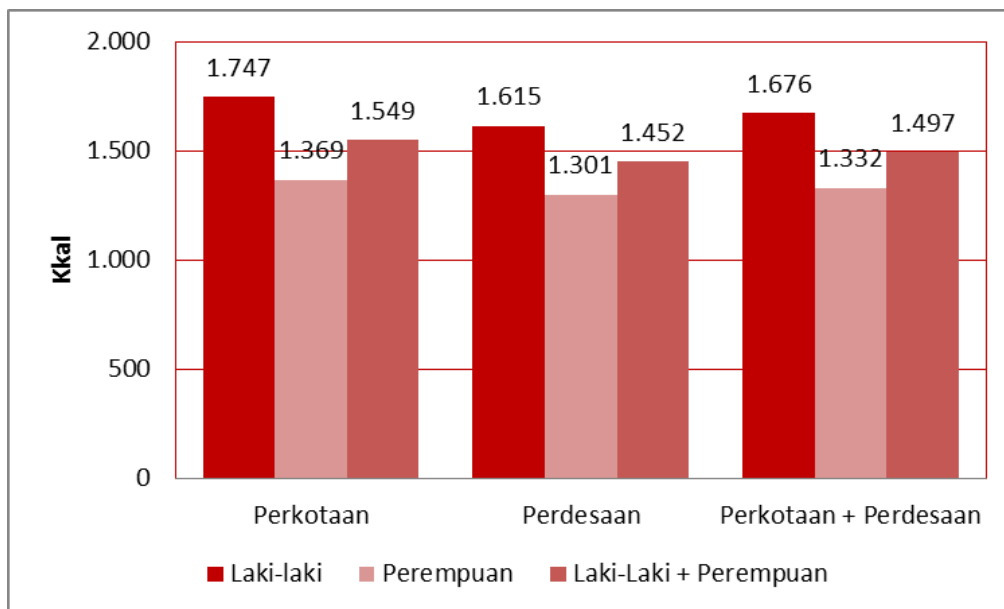
Sebanyak 18 provinsi (55%) memiliki rerata tingkat asupan energi penduduk umur 0-59 bulan normal. Sedangkan 15 lainnya (45%) memiliki rerata tingkat asupan energi penduduk kurang. Tidak satu pun provinsi dengan rerata tingkat asupan energi sangat kurang maupun lebih. Rerata tingkat asupan energi penduduk umur 0-59 bulan tertinggi yaitu DKI Jakarta (114,4%) dan terendah Nusa Tenggara Timur (92,3%).

c) Rerata Asupan dan Tingkat Kecukupan Energi pada Penduduk Umur >55 Tahun

Rerata asupan energi pada penduduk umur >55 tahun sebesar 1.497 Kkal, pada laki-laki sebesar 1.676 Kkal dan pada perempuan sebesar 1.332 Kkal. Berikut rincian rerata asupan energi pada penduduk umur >55 tahun menurut tipe daerah dan jenis kelamin:

GAMBAR 5.38

**RERATA ASUPAN ENERGI PADA PENDUDUK UMUR >55 TAHUN
MENURUT TIPE DAERAH DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2014**



Sumber: Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI, Studi Diet Total 2014

Berbeda dengan balita, rerata tingkat kecukupan energi pada penduduk umur >55 tahun lebih rendah. Rerata tingkat kecukupan energi pada penduduk umur >55 tahun sebesar 78% dari angka kecukupan gizi. Tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, pada laki-laki sebesar 78,8% dan pada perempuan sebesar 77,3%.

Lebih dari separuh provinsi (19 provinsi) memiliki rerata tingkat kecukupan energi kurang pada penduduk umur >55 tahun. Sedangkan Kepulauan Riau merupakan satu-satunya provinsi dengan rerata tingkat kecukupan energi lebih.

6. Tingkat Kecukupan Protein

Tingkat kecukupan protein yaitu persentase asupan protein per orang per hari terhadap Angka Kecukupan Protein (AKP) yang dianjurkan untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin. AKP yang digunakan didasarkan pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2013.

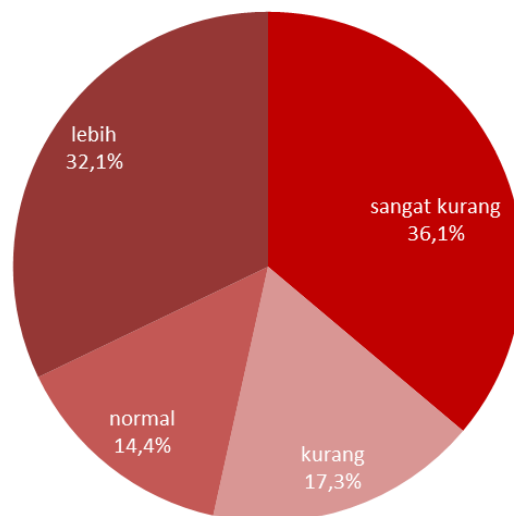
a) Proporsi Penduduk Menurut Klasifikasi Tingkat Kecukupan Protein

Klasifikasi tingkat kecukupan protein penduduk secara nasional dan provinsi sebagai berikut:

- tingkat kecukupan protein minimal atau sangat kurang dari AKG (<80% AKP) artinya mengonsumsi protein kurang dari 80% AKP
- tingkat kecukupan protein kurang dari AKG (80 - <100% AKP) artinya mengonsumsi protein antara 80 sampai kurang dari 100% AKP
- tingkat kecukupan protein sesuai AKG atau normal (100 - <120% AKP) artinya mengonsumsi protein antara 100 sampai kurang dari 120% AKP
- tingkat kecukupan protein lebih besar dari AKG (\geq 120% AKP) artinya mengonsumsi protein sama atau lebih besar dari 120% AKP

GAMBAR 5.39

PROPORSI PENDUDUK MENURUT KLASIFIKASI TINGKAT KECUKUPAN PROTEIN TAHUN 2014

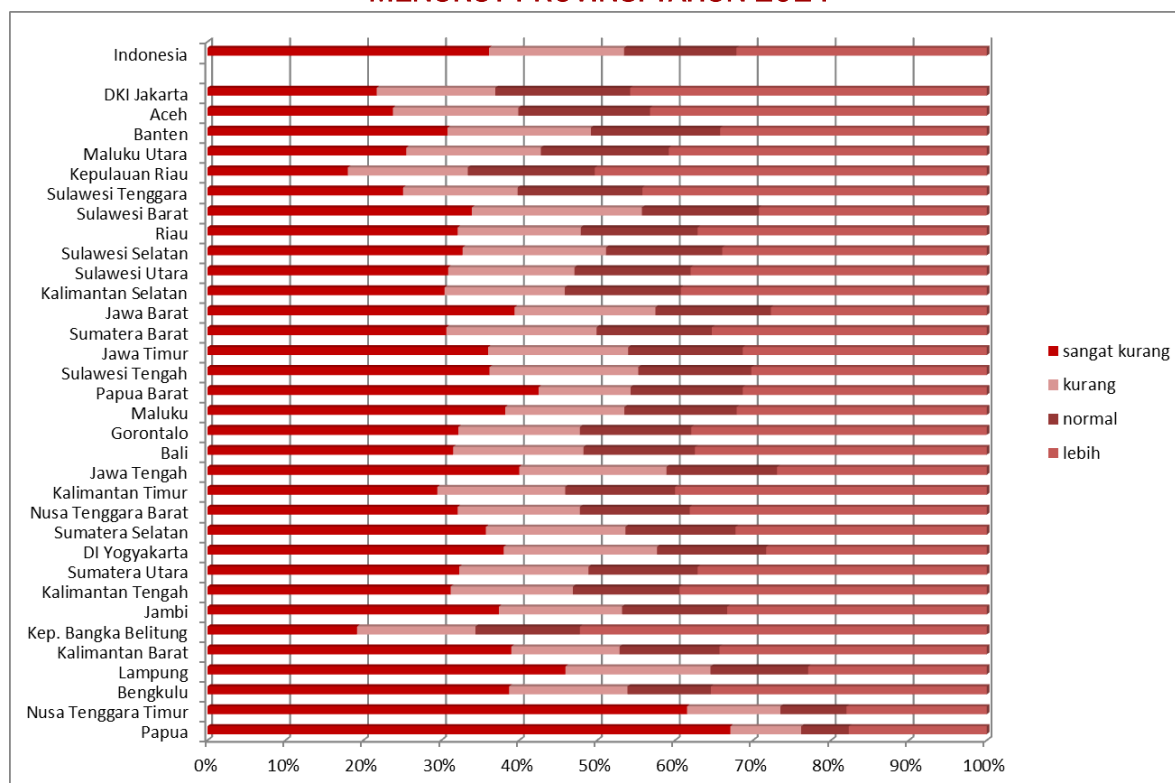


Sumber: Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI, Studi Diet Total 2014

Menurut Survei Diet Total tahun 2014, lebih dari separuh penduduk di Indonesia memiliki tingkat kecukupan protein sangat kurang dan kurang yaitu total sebesar 53,4%, terdiri dari 36,1% penduduk dengan tingkat kecukupan protein sangat kurang/minimal dan 17,3% penduduk dengan tingkat kecukupan protein kurang.

GAMBAR 5.40

SEBARAN KLASIFIKASI TINGKAT KECUKUPAN PROTEIN PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014



Sumber: Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI, Studi Diet Total 2014

Menurut provinsi, tingkat kecukupan protein sangat kurang dan kurang tertinggi terjadi di Papua (76,2%) dan Nusa Tenggara Timur (73,6%). Sedangkan persentase terendah yaitu di Kepulauan Riau (33,4%). Provinsi dengan tingkat energi protein lebih tertinggi terjadi di Kepulauan Bangka Belitung (52,5%)

Berikut proporsi penduduk menurut klasifikasi tingkat kecukupan energi dan karakteristiknya:

TABEL 5.2

PROPORSI PENDUDUK MENURUT KLASIFIKASI TINGKAT KECUKUPAN PROTEIN DAN
KARAKTERISTIK
TAHUN 2014

Karakteristik	Sangat Kurang	Kurang	Normal	Lebih
Kelompok Umur				
0-59 bulan	23,6	10,6	11,5	54,2
5-12 tahun	29,3	16,1	14,7	39,9

Karakteristik	Sangat Kurang	Kurang	Normal	Lebih
13-18 tahun	48,1	18,1	13,4	20,1
19-55 tahun	33,8	17,9	15,1	33,3
>55 tahun	45,8	17,4	13,1	23,7
Jenis Kelamin				
Laki-laki	33,3	17,4	14,8	34,4
Perempuan	39,0	17,3	14,0	29,7
Tempat Tinggal				
Perkotaan	31,1	17,5	15,3	36,1
Perdesaan	41,2	17,2	13,6	28,0
Kuintil Indeks				
Kepemilikan	51,2	16,4	11,5	21,0
Terbawah	41,5	17,9	14,5	26,1
Menengah Bawah	36,4	18,7	14,2	30,7
Menengah	31,4	17,4	15,2	36,1
Menengah Atas	25,5	16,0	15,9	42,6
Teratas				

Sumber: Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI, Studi Diet Total 2014

Menurut karakteristik, tingkat kecukupan protein sangat kurang lebih banyak terjadi pada perempuan, penduduk yang tinggal di perdesaan, dan kuintil indeks kepemilikan terbawah. Semakin rendah kuintil indeks kepemilikan maka semakin tinggi persentase kekurangan protein.

b) Rerata Tingkat Kecukupan Protein pada Balita Umur 0-59 Bulan

Rerata AKP (gram) di masing-masing provinsi dihitung berdasarkan AKP yang dianjurkan menurut umur dan jenis kelamin serta disesuaikan dengan struktur sampel di masing-masing provinsi.

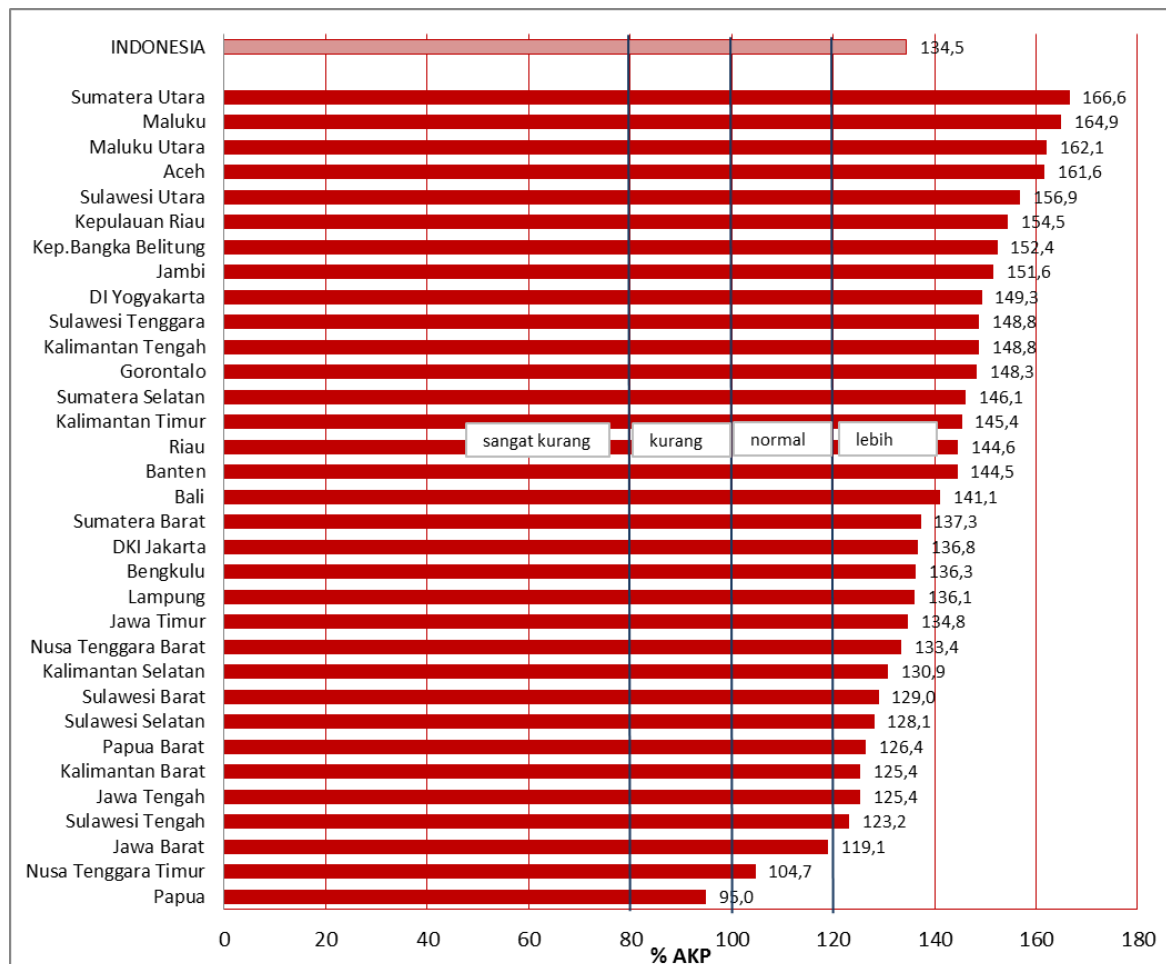
Secara nasional rerata asupan protein penduduk umur 0-59 bulan di Indonesia sebesar 36,8 gram, di atas AKP (25,5 gram). Asupan protein di perkotaan lebih tinggi (39,2 gram) dibandingkan dengan perdesaan (34,4 gram), baik di perkotaan maupun di perdesaan telah mencapai AKP 25,5 gram.

Menurut tingkat kecukupan protein, rerata tingkat kecukupan protein kelompok umur 0-59 bulan di Indonesia telah melebihi AKP yaitu sebesar 134,5%. Dari 33 provinsi, hanya

Papua dengan tingkat kecukupan protein dibawah 100% (95%). Rerata tingkat kecukupan protein di perkotaan lebih tinggi (142,5%) dibandingkan dengan di perdesaan (126,2%).

GAMBAR 5.41

RERATA TINGKAT KECUKUPAN PROTEIN PADA BALITA UMUR 0-59 BULAN TAHUN 2014



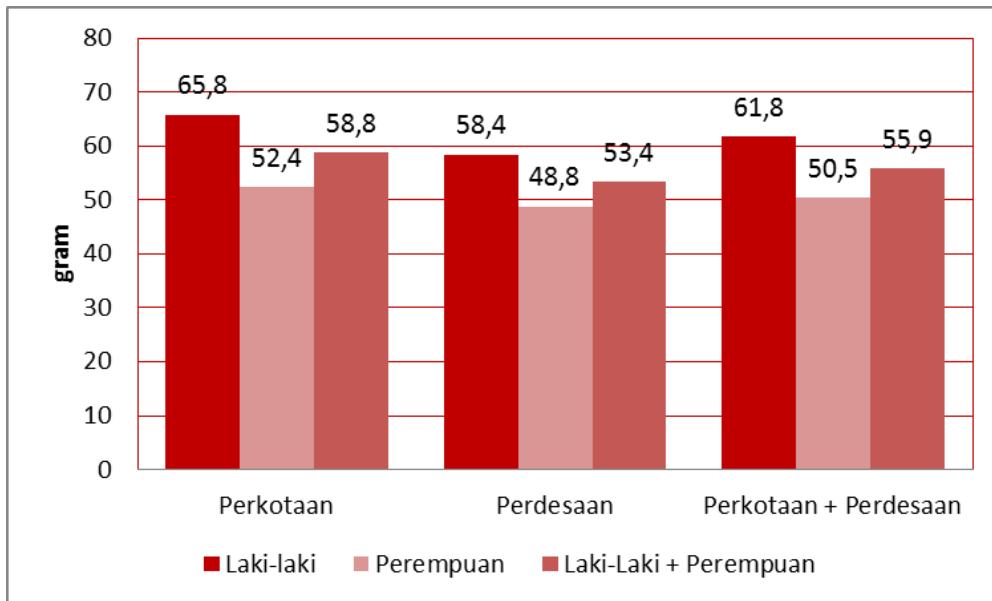
Sumber: Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI, Studi Diet Total 2014

Hanya 2 provinsi dengan rerata asupan protein penduduk umur 0-59 bulan normal, yaitu Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan 30 provinsi lainnya memiliki asupan protein penduduk umur 0-59 bulan lebih dari 120% AKP.

c) Rerata Asupan dan Tingkat Kecukupan Protein pada Penduduk Umur >55 Tahun

Rerata asupan protein pada penduduk umur >55 tahun sebesar 55,9 gram, lebih besar pada laki-laki (61,8 gram) dibandingkan pada perempuan (50,5 gram). Berikut ini rincian rerata asupan protein pada penduduk umur >55 tahun menurut tipe daerah dan jenis kelamin.

GAMBAR 5.42
RERATA ASUPAN PROTEIN PADA PENDUDUK UMUR >55 TAHUN
MENURUT TIPE DAERAH DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2014



Sumber: Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI, Studi Diet Total 2014

Berbeda dengan balita, rerata tingkat kecukupan protein pada penduduk umur >55 tahun relatif lebih rendah. Rerata tingkat kecukupan protein pada penduduk umur >55 tahun 93% dari angka kecukupan gizi. Pada laki-laki rerata tingkat kecukupan gizi selebih tinggi (96,9%) dibandingkan pada perempuan (89,3%).

Sebanyak 19 provinsi (58%) memiliki rerata tingkat kecukupan protein pada penduduk umur >55 tahun <100% AKP. Sedangkan Kepulauan Riau merupakan satu-satunya provinsi dengan rerata tingkat kecukupan protein $\geq 120\%$ AKP.



BAB VI

PENGENDALIAN PENYAKIT



Bab VI

PENGENDALIAN PENYAKIT

Pengendalian penyakit adalah upaya penurunan insidens, prevalens, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Angka kesakitan dan kematian penyakit merupakan indikator dalam menilai derajat kesehatan suatu masyarakat.

Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengendalian penyakit menular, meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi, penyakit yang ditularkan melalui vektor dan zoonosis, dan dampak kesehatan akibat bencana.

A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1. Tuberkulosis

Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global. Dengan berbagai upaya pengendalian yang dilakukan, insidens dan kematian akibat tuberkulosis telah menurun, namun tuberkulosis diperkirakan masih menyerang 9,6 juta orang dan menyebabkan 1,2 juta kematian pada tahun 2014. India, Indonesia dan China merupakan negara dengan penderita tuberkulosis terbanyak yaitu berturut-turut 23%, 10% dan 10% dari seluruh penderita di dunia (WHO, Global Tuberculosis Report, 2015).

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Sumber penularan yaitu pasien TB BTA (bakteri tahan asam) positif melalui percik renik dahak yang dikeluarkannya. TB dengan BTA negatif juga masih memiliki kemungkinan menularkan penyakit TB meskipun dengan tingkat penularan yang kecil.

Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur dengan *Case Notification Rate* (CNR), prevalensi, dan mortalitas/kematian.

a. Prevalensi Tuberkulosis

Pada tahun 2013-2014 dilakukan survei prevalensi tuberkulosis yang bertujuan untuk menghitung prevalensi tuberkulosis paru dengan konfirmasi bakteriologis pada populasi yang berusia 15 tahun ke atas di Indonesia. Pada survei ini dilakukan penambahan metode pemeriksaan selain menggunakan pemeriksaan dahak mikroskopis dan pemeriksaan foto toraks ditambahkan pemeriksaan *x-ray*, *gen expert* dan kultur. Dengan penambahan metode pemeriksaan dalam penetapan kasus tuberkulosis ini maka jumlah penderita tuberkulosis yang terjaring menjadi lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya.

Angka prevalensi TB pada tahun 2014 menjadi sebesar 647/ 100.000 penduduk meningkat dari 272/100.000 penduduk pada tahun sebelumnya, angka insidensi tahun 2014 sebesar 399/100.000 penduduk dari sebelumnya sebesar 183/100.000 penduduk pada tahun 2013, demikian juga dengan angka mortalitas pada tahun 2014 sebesar 41/100.000 penduduk, dari 25/100.000 penduduk pada tahun 2013 (WHO, Global Tuberculosis Report, 2015).

b. Kasus Tuberkulosis

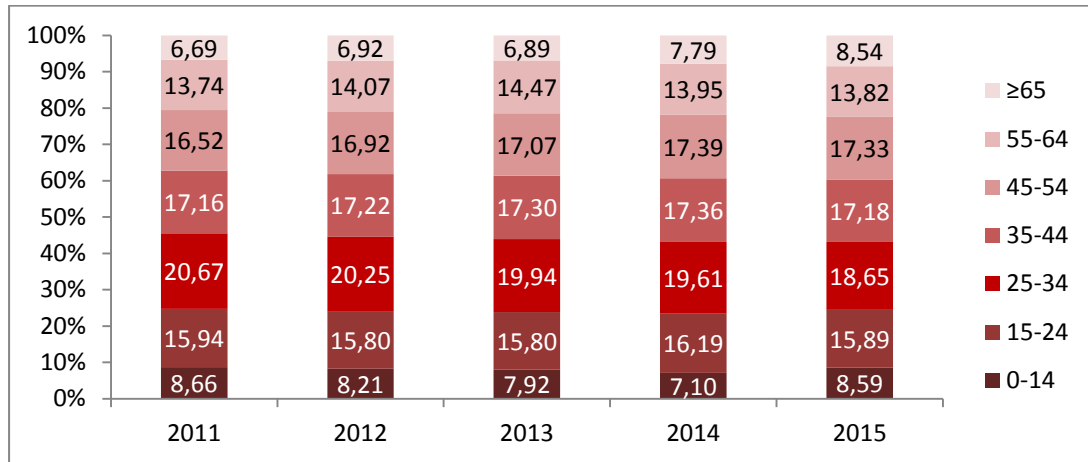
Pada tahun 2015 ditemukan jumlah kasus tuberkulosis sebanyak 330.910 kasus, meningkat bila dibandingkan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan pada tahun 2014 yang sebesar 324.539 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kasus tuberkulosis di tiga provinsi tersebut sebesar 38% dari jumlah seluruh kasus baru di Indonesia.

Menurut jenis kelamin, jumlah kasus pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan yaitu 1,5 kali dibandingkan pada perempuan. Pada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia kasus lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan.

Menurut kelompok umur, kasus tuberkulosis pada tahun 2015 paling banyak ditemukan pada kelompok umur 25-34 tahun yaitu sebesar 18,65% diikuti kelompok umur 45-54 tahun sebesar 17,33% dan pada kelompok umur 35-44 tahun sebesar 17,18%. Proporsi kasus TB menurut kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 6.1 berikut ini.

GAMBAR 6.1

**PROPORSI KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2011-2015**



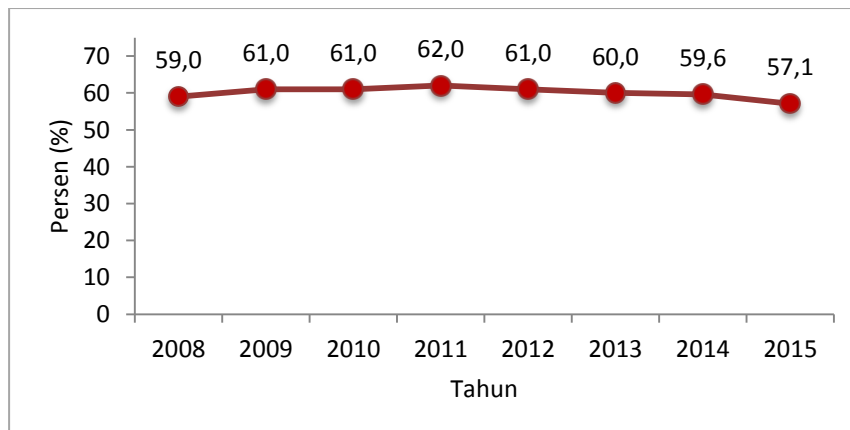
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

c. Proporsi Pasien Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis di antara Semua Pasien Tuberkulosis Paru Tercatat/Diobati

Persentase pasien tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis di antara semua pasien tuberkulosis paru tercatat (bakteriologis dan klinis), merupakan indikator yang menggambarkan prioritas penemuan pasien tuberkulosis yang menular di antara seluruh pasien tuberkulosis yang diobati. Angka ini minimal 70%, bila jauh lebih rendah, berarti diagnosis kurang memberikan prioritas untuk menemukan pasien yang menular.

GAMBAR 6.2

**PROPORSI PASIEN TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS
DI ANTARA SEMUA PASIEN TUBERKULOSIS PARU TERCATAT/DIOBATI
TAHUN 2008-2015**

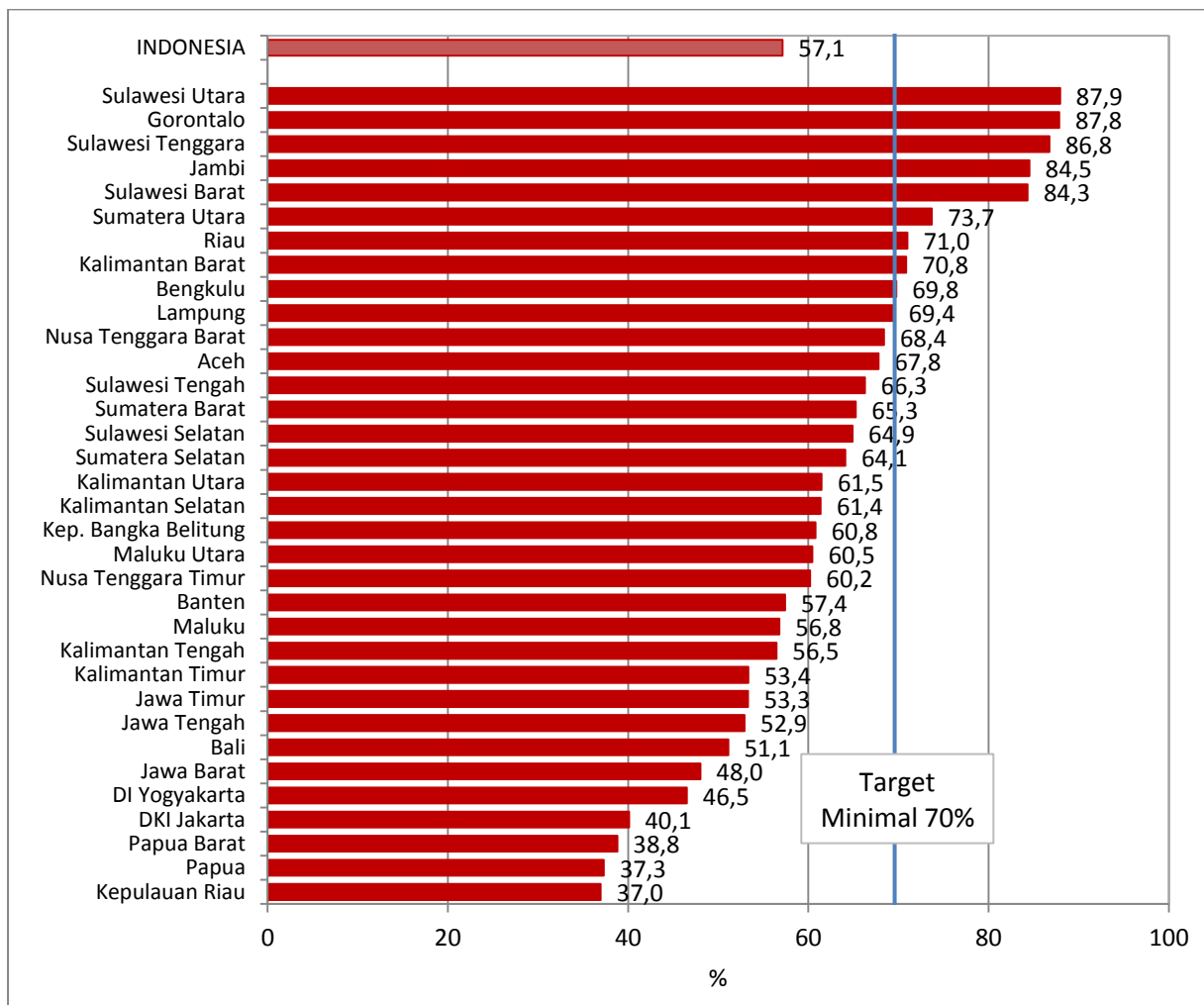


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Gambar 6.2 memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2015 (data per Juni 2016), proporsi pasien tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis di antara semua pasien tuberkulosis paru tercatat/diobati belum mencapai target yang diharapkan. Hal itu mengindikasikan diagnosis kurang memberikan prioritas untuk menemukan pasien yang menular di Indonesia. Namun, sebanyak 8 provinsi telah mencapai target tersebut. Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan proporsi pasien tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis di antara semua pasien tuberkulosis paru tercatat/diobati yang terendah yaitu 37,0%.

GAMBAR 6.3

**PROPORSI PASIEN TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS
DI ANTARA SEMUA PASIEN TUBERKULOSI PARU TERCATAT/DIOBATI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**



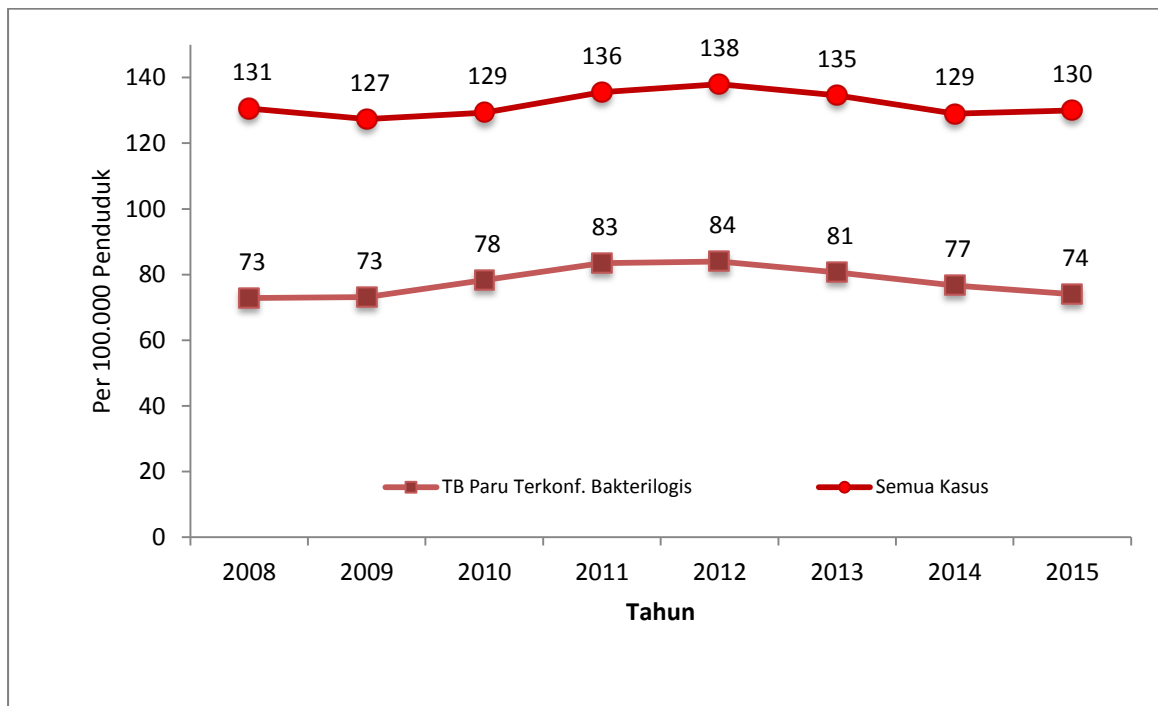
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

d. Angka Notifikasi Kasus atau Case Notification Rate (CNR)

Angka notifikasi kasus adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat di antara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial akan menggambarkan kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di wilayah tersebut. Angka ini berguna untuk menunjukkan kecenderungan (tren) meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut.

Gambar 6.4 menunjukkan angka notifikasi kasus baru tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis dan angka notifikasi seluruh kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk dari tahun 2008-2015. Angka notifikasi kasus baru tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis pada tahun 2015 di Indonesia sebesar 74 per 100.000 penduduk, menurun dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 77 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka notifikasi seluruh kasus tuberkulosis pada tahun 2015 sebesar 130 per 100.000 penduduk meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 129 per 100.000 penduduk.

GAMBAR 6.4
ANGKA NOTIFIKASI KASUS TB
PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008-2015

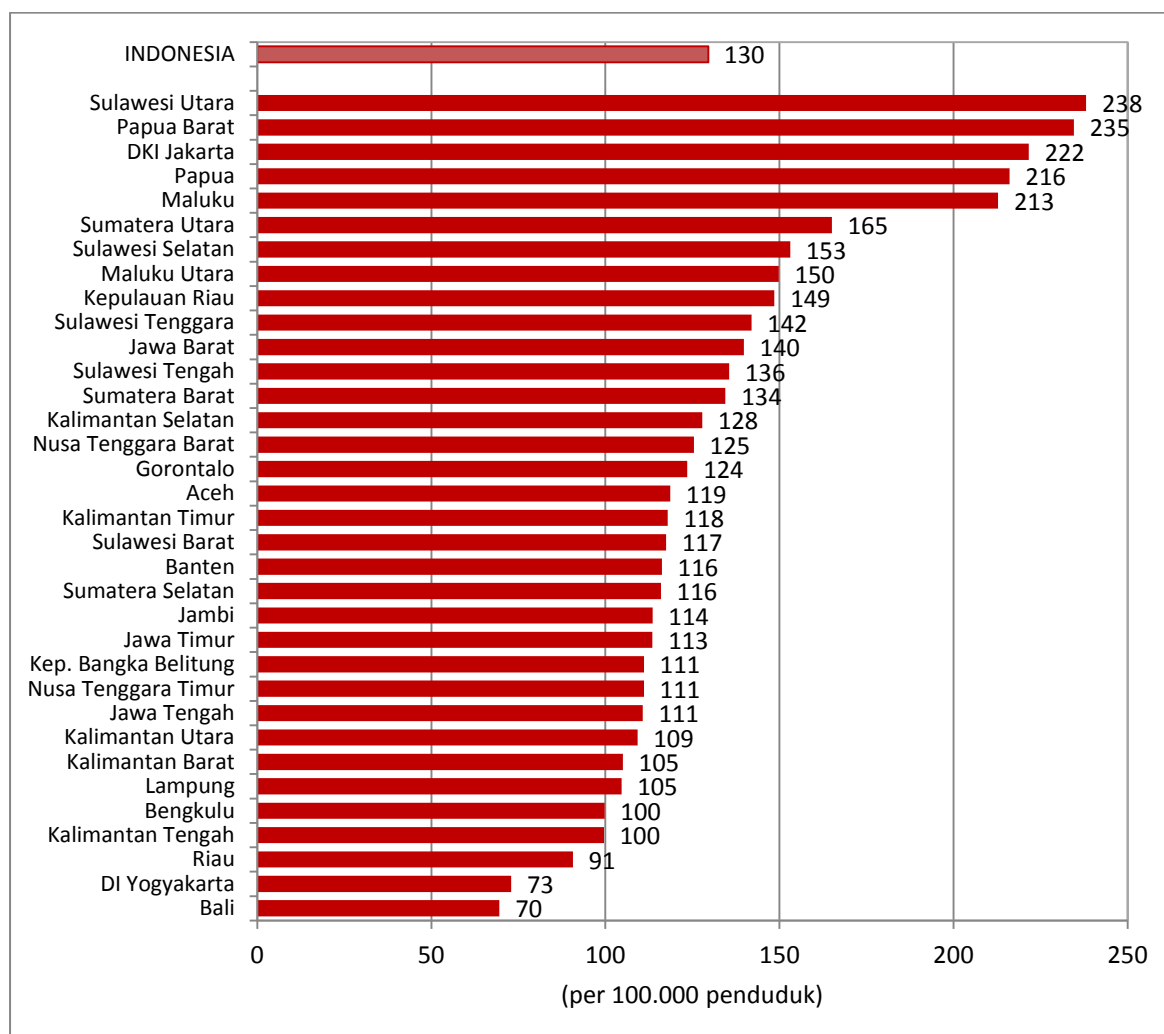


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Gambar 6.5 berikut memperlihatkan besarnya angka notifikasi atau Case Notification Rate (CNR) semua kasus tuberkulosis menurut provinsi tahun 2015.

GAMBAR 6.5

ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

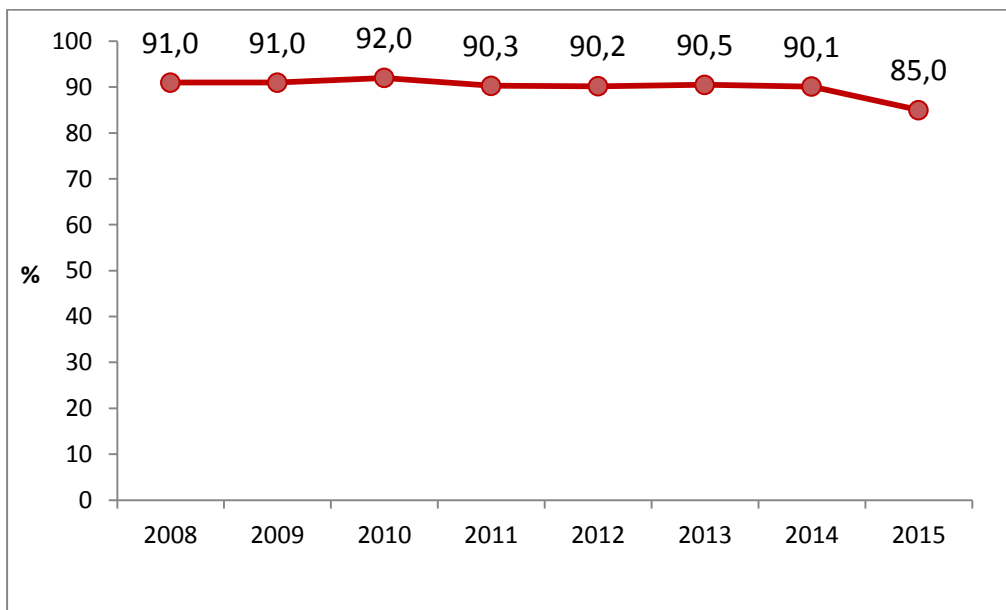
Provinsi dengan CNR semua kasus tuberkulosis tertinggi yaitu Sulawesi Utara (238), Papua Barat (235), dan DKI Jakarta (222). Sedangkan CNR semua kasus tuberkulosis terendah yaitu Provinsi Bali (70), DI Yogyakarta (73), dan Riau (91). CNR dianggap baik jika terjadi peningkatan minimal 5% dibandingkan dengan sebelumnya.

e. Angka Keberhasilan Pengobatan

Salah satu upaya untuk mengendalikan tuberkulosis yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan yaitu angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*). Angka keberhasilan pengobatan ini dibentuk dari penjumlahan angka kesembuhan (*Cure Rate*) dan angka pengobatan lengkap. Berikut ini digambarkan angka keberhasilan pengobatan tahun 2008-2015.

GAMBAR 6.6

**ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS
DI INDONESIA TAHUN 2008-2015**

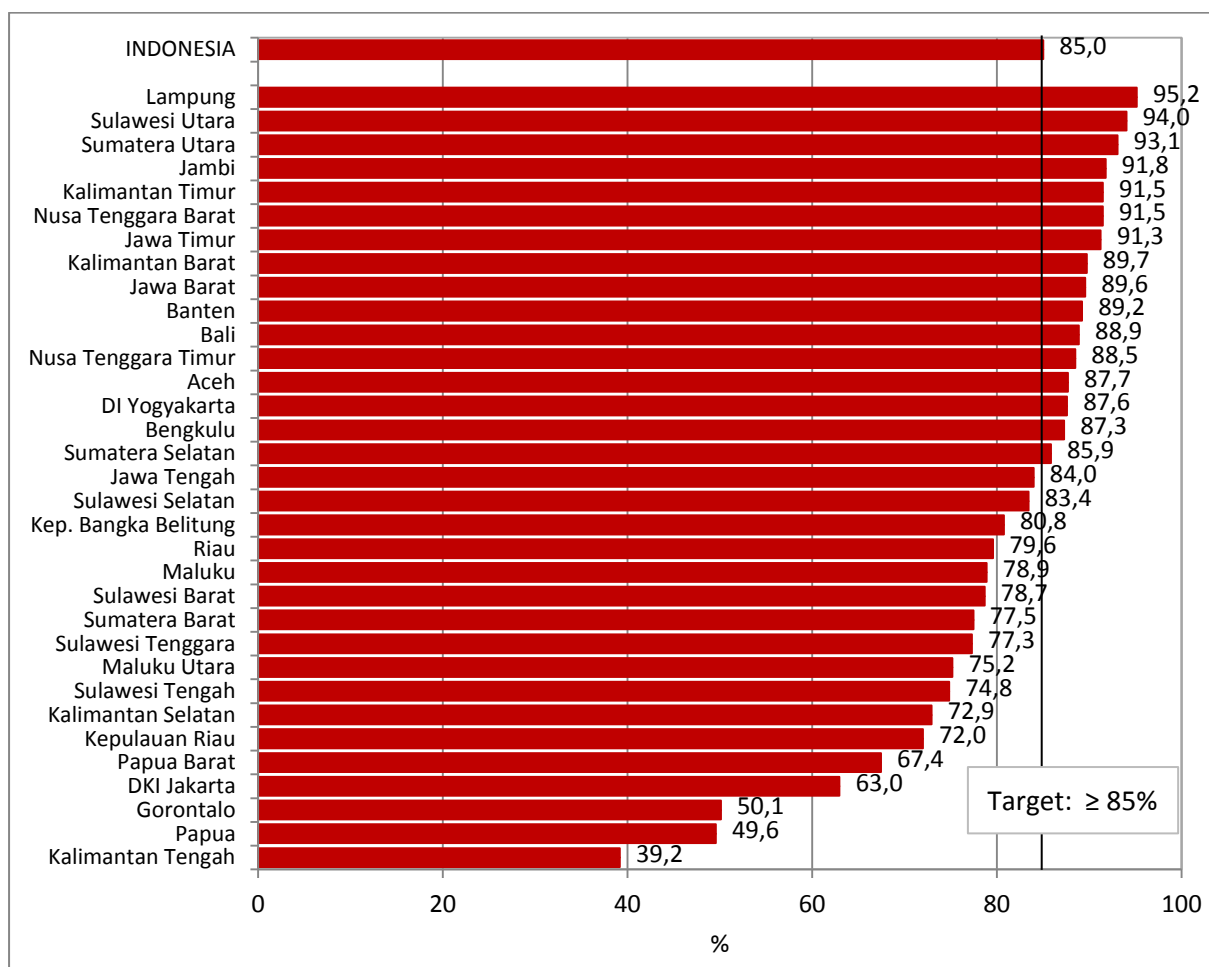


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Pada Gambar 6.6 terlihat penurunan angka keberhasilan pengobatan pada tahun 2015 dibandingkan 7 tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 angka keberhasilan pengobatan sebesar 85,0% (data per Juni 2016). WHO menetapkan standar angka keberhasilan pengobatan sebesar 85%.

GAMBAR 6.7

ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan angka keberhasilan pengobatan per provinsi tertinggi Lampung dan terendah Kalimantan Tengah. Provinsi dengan angka keberhasilan pengobatan $\geq 85\%$ sebanyak 16 provinsi (48,5%).

Informasi mengenai tuberkulosis menurut indikator, jenis kelamin, dan provinsi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 6.1-6.4.

2. HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain.

Estimasi dan proyeksi jumlah orang dengan HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 2015 adalah sebanyak 735.256 orang dengan jumlah infeksi baru sebanyak 85.523 orang (Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS di Indonesia Tahun 2011-2016, Kemenkes RI).

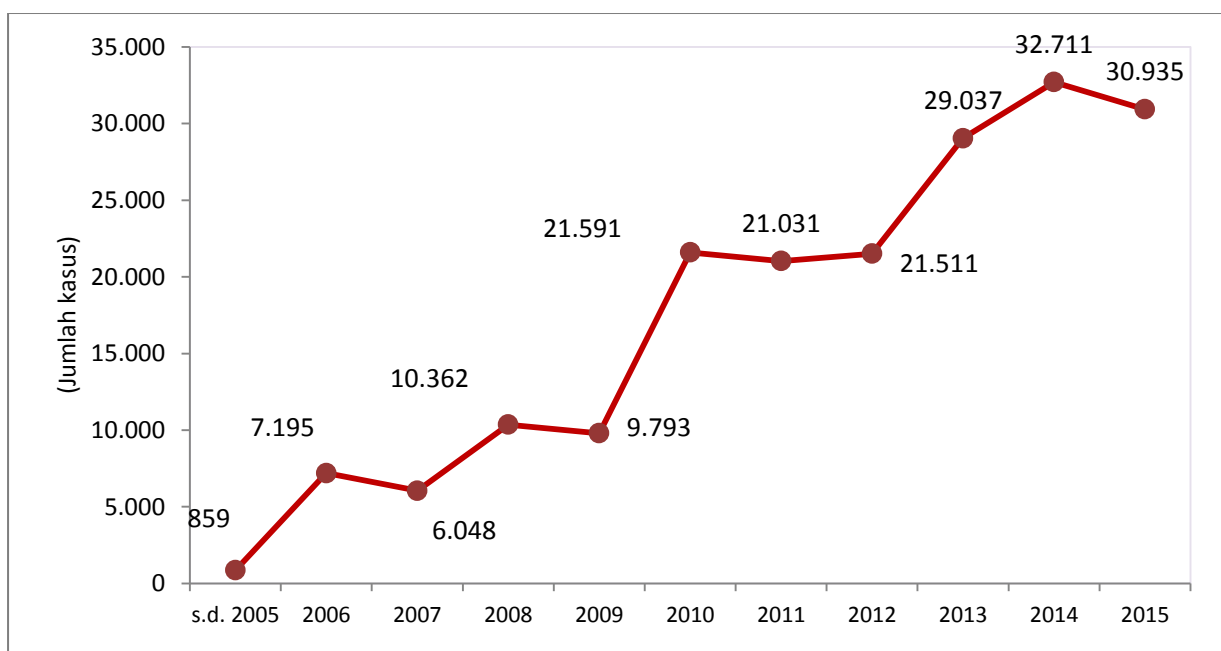
a. Jumlah Kasus HIV Positif dan AIDS

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan *Voluntary, Counseling, and Testing (VCT)*, *sero survey*, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

Jumlah kasus baru HIV positif yang dilaporkan pada tahun 2015 sebanyak 30.935 kasus, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah kasus baru HIV positif per tahun sampai tahun 2015 disajikan pada Gambar 6.8.

GAMBAR 6.8

JUMLAH KASUS BARU HIV POSITIF SAMPAI TAHUN 2015

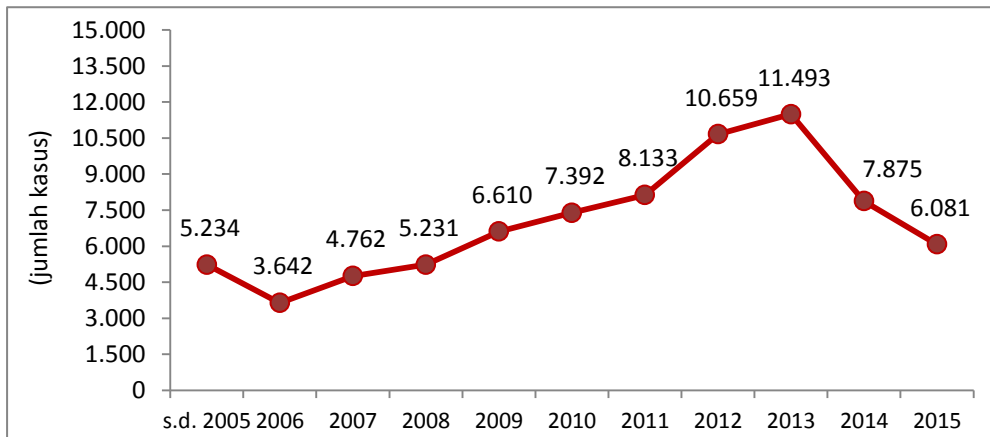


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Sedangkan jumlah kasus AIDS yang dilaporkan sampai dengan tahun 2015 disajikan dalam Gambar 6.9.

GAMBAR 6.9

JUMLAH KASUS BARU AIDS SAMPAI TAHUN 2015



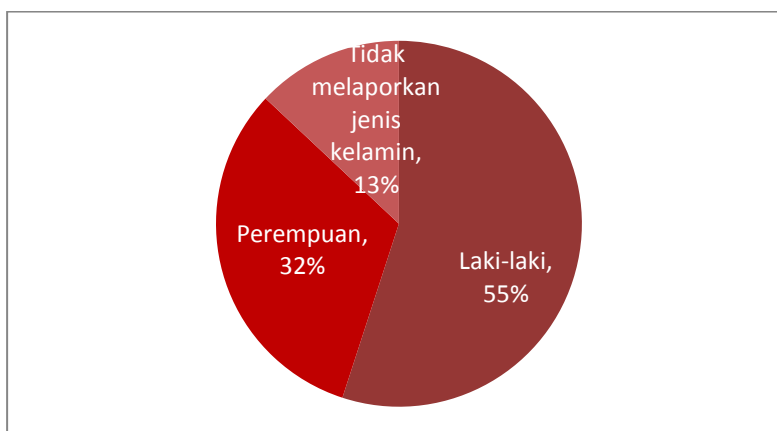
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Pada gambar di atas terlihat adanya kecenderungan peningkatan penemuan kasus baru sampai tahun 2013. Namun pada tahun 2014 dan 2015 terjadi penurunan kasus AIDS menjadi sebesar 7.875 kasus pada tahun 2014 dan 6.081 kasus pada tahun 2015. Diperkirakan hal tersebut terjadi karena jumlah pelaporan kasus AIDS dari daerah masih rendah. Namun demikian, tren penemuan kasus AIDS yang menurun tersebut sejalan dengan penurunan penemuan kasus HIV. Secara kumulatif, kasus AIDS sampai dengan tahun 2015 sebesar 77.112 kasus.

Menurut jenis kelamin, persentase kasus baru AIDS tahun 2015 pada kelompok laki-laki lebih besar dibandingkan pada kelompok perempuan seperti digambarkan di bawah ini.

GAMBAR 6.10

PROPORSI KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2015

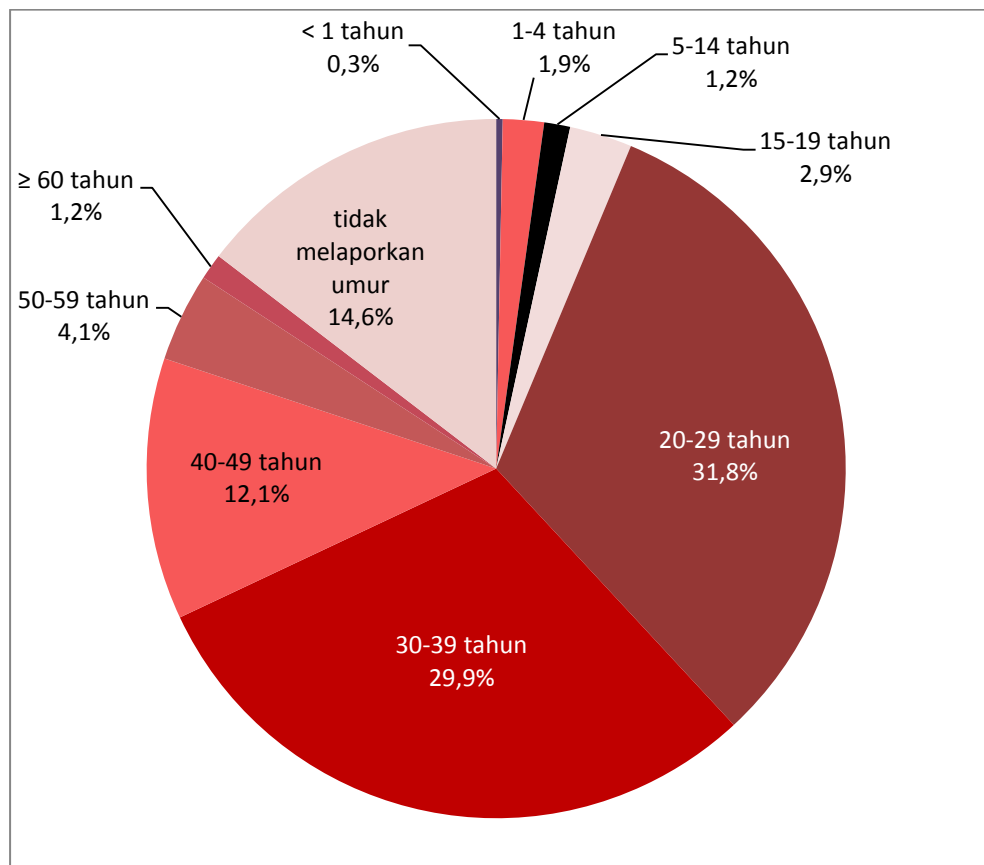


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Penderita AIDS pada laki-laki sebesar 55% dan pada perempuan sebesar 32%. Adanya peningkatan proporsi kasus baru yang tidak dilaporkan jenis kelaminnya, yaitu sebesar 13% pada tahun 2015 dari sebesar 4% pada tahun sebelumnya, disebabkan variabel jenis kelamin sering tidak terisi terutama dari laporan Provinsi DKI Jakarta dan Papua Barat.

GAMBAR 6.11

PERSENTASE KASUS BARU AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2015



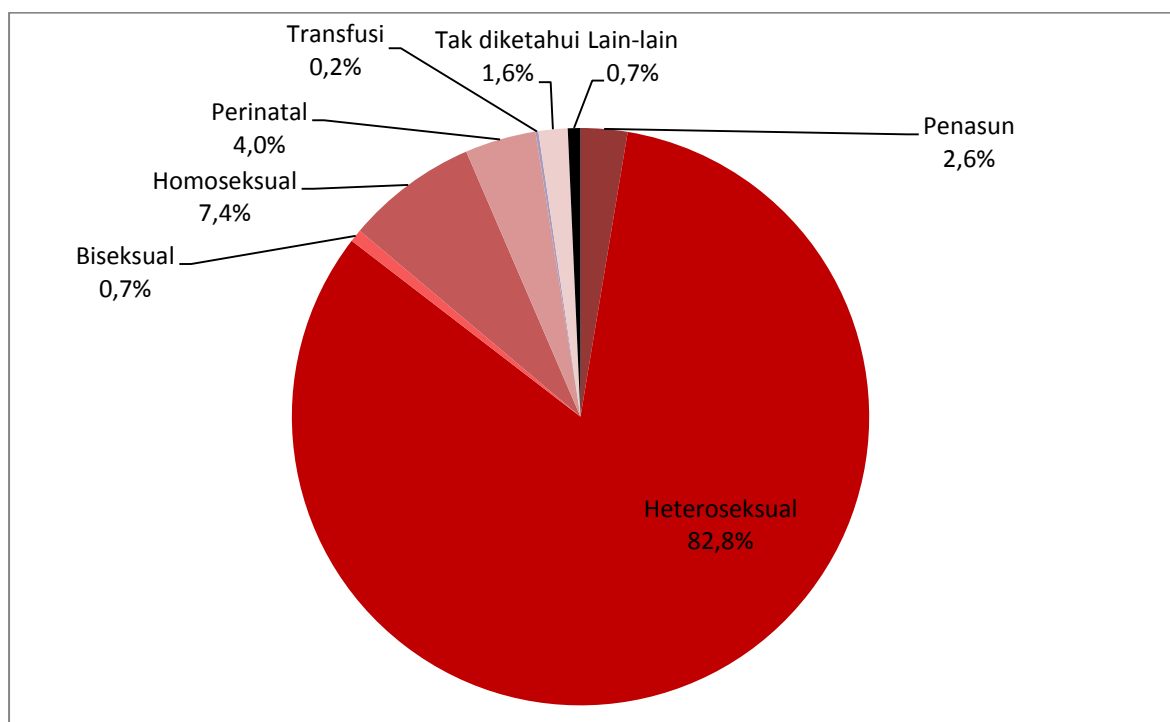
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Gambaran kasus baru AIDS menurut kelompok umur (Gambar 6.11) menunjukkan bahwa sebagian besar kasus baru AIDS terdapat pada umur 20-29 tahun, 30-39 tahun, dan 40-49 tahun. Kelompok umur tersebut masuk ke dalam kelompok umur produktif yang aktif secara seksual dan termasuk kelompok umur yang menggunakan NAPZA suntik.

HIV dapat ditularkan melalui hubungan seks, tranfusi darah, penggunaan jarum suntik bergantian dan penularan dari ibu ke anak (perinatal). Berikut ini disajikan persentase kasus AIDS yang dilaporkan pada tahun 2015 menurut faktor risiko penularan.

GAMBAR 6.12

**PERSENTASE KASUS AIDS MENURUT FAKTOR RISIKO
DI INDONESIA TAHUN 2015**



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Pada gambar di atas terlihat bahwa pada kasus yang dilaporkan pada tahun 2015, proporsi kasus AIDS dengan faktor risiko heteroseksual merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 82,8%, diikuti oleh homoseksual sebesar 7,4% dan perinatal sebesar 4,0%. Sedangkan pengguna narkoba suntikan (penasun) mengalami penurunan proporsi dari 9,3% pada tahun 2013 menjadi 3,3% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 kembali menurun menjadi 2,6%. Penurunan tersebut dimungkinkan karena jumlah penasun yang juga turun dari tahun ke tahun. Selain itu kesadaran dari penasun yang telah terpapar program pencegahan HIV pada penasun yaitu dengan menggunakan alat suntik steril ataupun akses ke layanan PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon).

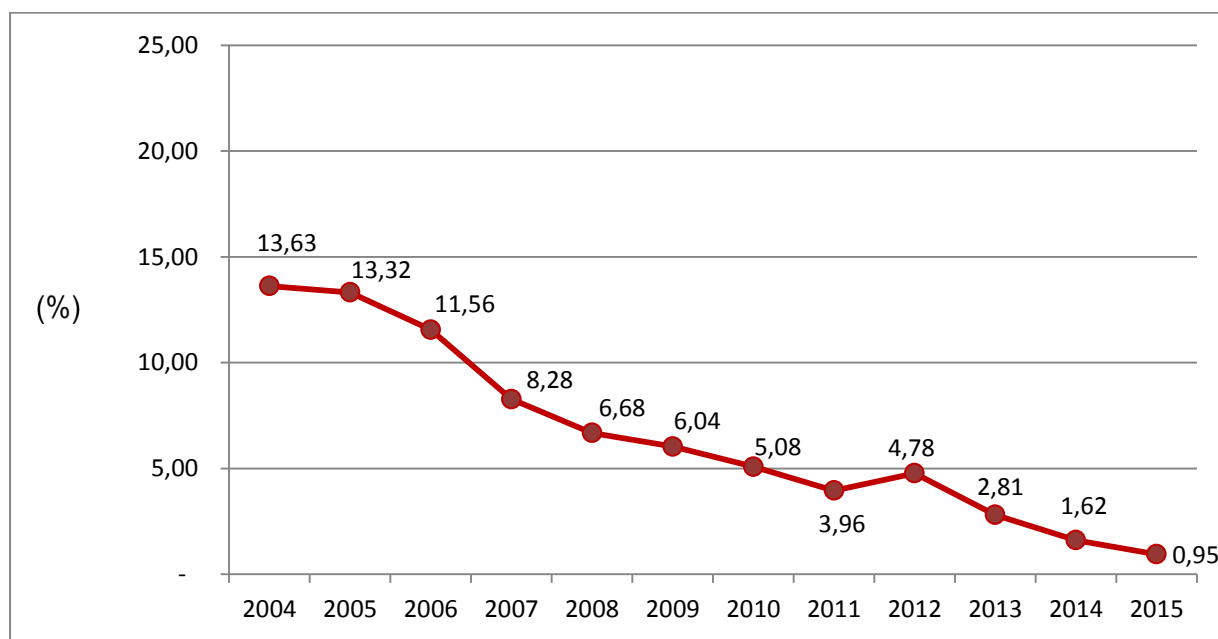
AIDS dilaporkan bersamaan dengan penyakit penyerta. Pada tahun 2015 penyakit tuberkulosis, kandidiasis, dan diare merupakan penyakit penyerta AIDS tertinggi masing-masing sebanyak 275 kasus, 191 kasus, dan 187 kasus.

b. Angka Kematian akibat AIDS

Angka kematian atau *Case Fatality Rate* (CFR) akibat AIDS sejak 2004 cenderung menurun seperti terlihat pada Gambar 6.13 berikut ini. Pada tahun 2015 CFR AIDS di Indonesia sebesar 0,95%.

GAMBAR 6.13

**ANGKA KEMATIAN AKIBAT AIDS YANG DILAPORKAN
TAHUN 2004-2015**



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

3. PNEUMONIA

Pneumonia merupakan penyebab dari 15% kematian balita, yaitu diperkirakan sebanyak 922.000 balita di tahun 2015. Pneumonia menyerang semua umur di semua wilayah, namun terbanyak terjadi di Asia Selatan dan Afrika sub-Sahara (www.who.int). Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 tahun, usia lanjut lebih dari 65 tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imunologi).

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, jamur dan bakteri. Gejala penyakit pneumonia yaitu menggigil, demam, sakit kepala, batuk, mengeluarkan dahak, dan sesak napas.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Perkiraan kasus pneumonia secara nasional sebesar 3.55% namun angka perkiraan kasus di masing-masing provinsi menggunakan angka yang berbeda-beda sesuai angka yang telah ditetapkan.

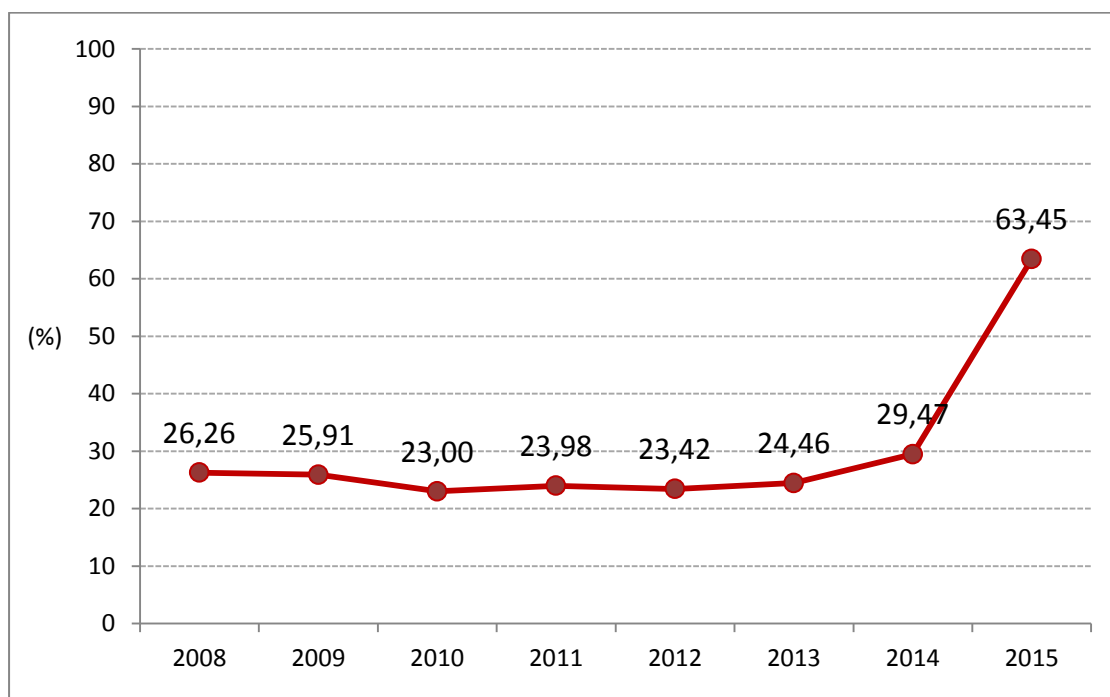
TABEL 6.1**PERKIRAAN PERSENTASE KASUS PNEUMONIA PADA BALITA MENURUT PROVINSI
DI INDONESIA**

No	Provinsi	Perkiraan Kasus (%)	No	Provinsi	Perkiraan Kasus (%)
1	Aceh	4,46	18	Nusa Tenggara Barat	6,38
2	Sumatera Utara	2,99	19	Nusa Tenggara Timur	4,28
3	Sumatera Barat	3,91	20	Kalimantan Barat	2,12
4	Riau	2,67	21	Kalimantan Tengah	4,37
5	Jambi	3,15	22	Kalimantan Selatan	5,53
6	Sumatera Selatan	3,61	23	Kalimantan Timur	2,86
7	Bengkulu	2,00	24	Sulawesi Utara	2,68
8	Lampung	2,23	25	Sulawesi Tengah	5,19
9	Kep. Bangka Belitung	6,05	26	Sulawesi Selatan	3,79
10	Kepulauan Riau	3,98	27	Sulawesi Tenggara	3,84
11	DKI Jakarta	4,24	28	Gorontalo	4,84
12	Jawa Barat	4,62	29	Sulawesi Barat	4,88
13	Jawa Tengah	3,61	30	Maluku	3,74
14	DI Yogyakarta	4,32	31	Maluku Utara	2,29
15	Jawa Timur	4,45	32	Papua Barat	2,88
16	Banten	4,12	33	Papua	2,80
17	Bali	2,05		INDONESIA	3,55

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI

GAMBAR 6.14

**CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA
DI INDONESIA TAHUN 2008-2015**



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Sampai dengan tahun 2014, angka cakupan penemuan pneumonia balita tidak mengalami perkembangan berarti yaitu berkisar antara 20%-30%. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 63,45%. Salah satu penyebab peningkatan penemuan yaitu menurunnya sasaran penemuan pneumonia, yang sebelumnya sama untuk semua provinsi (10%), pada tahun 2015 menggunakan hasil Riskesdas 2013 yang berbeda-beda untuk setiap provinsi dan secara nasional sebesar 3,55%.

Sejak tahun 2015 indikator Renstra yang digunakan yaitu persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS. Pencapaian untuk tahun 2015 baru tercapai 14,64% sedangkan target sebesar 20% dari seluruh kab/kota yang ada.

Angka kematian akibat pneumonia pada balita sebesar 0,16%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 0,08%. Pada kelompok bayi angka kematian sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 0,17% dibandingkan pada kelompok umur 1-4 tahun yang sebesar 0,15%. Cakupan penemuan pneumonia dan kematiannya menurut provinsi dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 6.9 dan 6.10.

4. KUSTA

Jumlah penderita kusta yang dilaporkan dari 121 negara di 5 regional WHO sebanyak 175.554 kasus di akhir tahun 2014 dengan 213.899 kasus baru (www.who.int). Penatalaksanaan kasus kusta yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.

Penyakit kusta disebut juga sebagai penyakit Lepra atau penyakit Hansen disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium leprae*. Bakteri ini mengalami proses pembelahan cukup lama antara 2–3 minggu. Daya tahan hidup kuman kusta mencapai 9 hari di luar tubuh manusia. Kuman kusta memiliki masa inkubasi 2–5 tahun bahkan juga dapat memakan waktu lebih dari 5 tahun.

a. Angka Prevalensi dan Angka Penemuan Kasus Baru

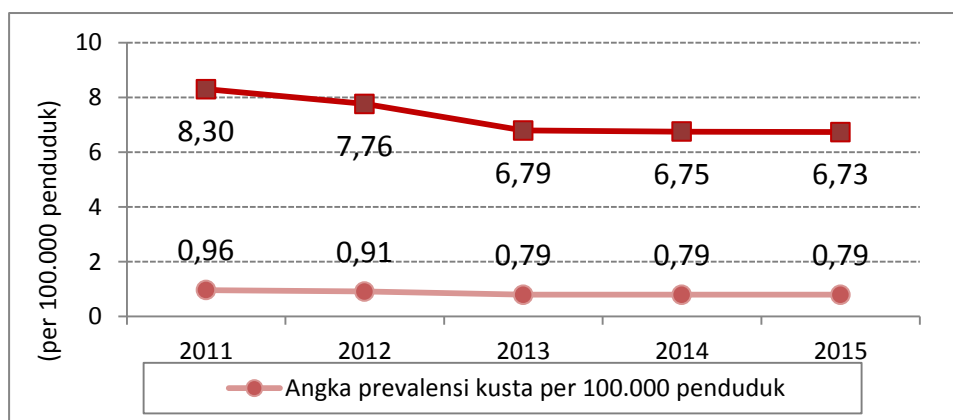
Sejak tercapainya status eliminasi kusta pada tahun 2000, situasi kusta di Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif statis. Hal tersebut dapat terlihat dari angka penemuan kasus baru kusta selama lebih dari dua belas tahun yang menunjukkan kisaran angka antara enam hingga delapan per 100.000 penduduk dan angka prevalensi yang berkisar antara delapan hingga sepuluh per 100.000 penduduk per tahunnya. Namun, sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 angka tersebut menunjukkan penurunan.

Target prevalensi kusta sebesar <1 per 10.000 penduduk (<10 per 100.000 penduduk). Situasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.16. Dengan demikian prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2015 yang sebesar 0,79 per 10.000 penduduk telah mencapai target program.

Pada tahun 2015 dilaporkan 17.202 kasus baru kusta dengan 84,5% kasus di antaranya merupakan tipe *Multi Basiler* (MB). Sedangkan menurut jenis kelamin, 62,7% penderita baru kusta berjenis kelamin laki-laki dan sebesar 37,3% lainnya berjenis kelamin perempuan.

GAMBAR 6.15

ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2011-2015



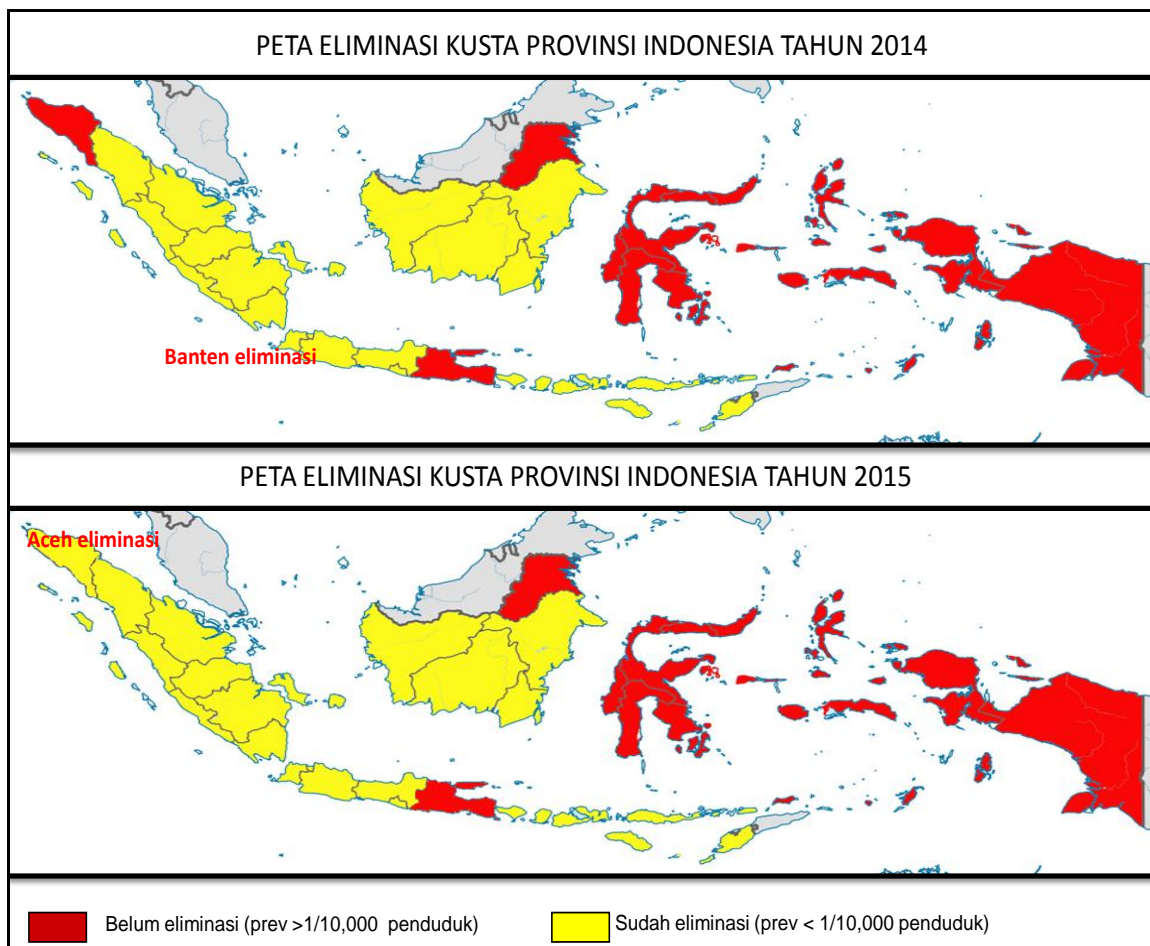
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Berdasarkan status eliminasi, kusta dibagi menjadi 2 kelompok yaitu provinsi yang belum eliminasi dan provinsi yang sudah mencapai eliminasi. Provinsi yang belum mencapai eliminasi jika angka prevalensi > 1 per 10.000 penduduk, sedangkan provinsi yang sudah mencapai eliminasi jika angka prevalensi < 1 per 10.000 penduduk.

Pada Gambar 6.16 terlihat bahwa dari 34 provinsi, sebanyak 12 provinsi (35,3%) termasuk dalam provinsi yang belum eliminasi. Sedangkan 22 provinsi lainnya (64,7%) termasuk dalam provinsi yang sudah eliminasi. Seluruh provinsi di bagian timur Indonesia merupakan daerah yang belum mencapai eliminasi.

GAMBAR 6.16

**PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2014 DAN 2015**



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

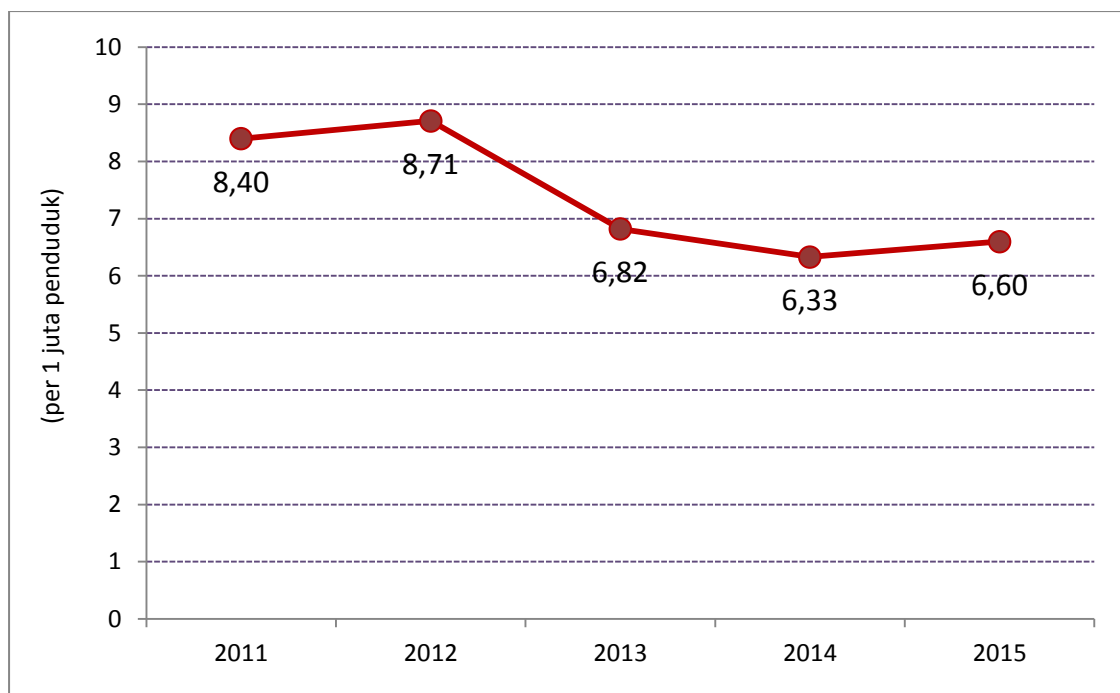
Provinsi Aceh dan Banten di tahun 2013 angka prevalensinya > 1 per 10.000 penduduk (belum eliminasi) namun di tahun 2014 dan 2015 kedua provinsi ini berhasil mencapai eliminasi.

b. Angka cacat tingkat 2

Pengendalian kasus kusta antara lain dengan meningkatkan deteksi kasus sejak dini. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru kusta yaitu angka cacat tingkat 2. Angka cacat tingkat 2 pada tahun 2015 sebesar 6,60 per 1 juta penduduk, menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 6,33 per 1 juta penduduk. Berikut ini grafik angka cacat tingkat II tahun 2011-2015.

GAMBAR 6.17

ANGKA CACAT TINGKAT II PER 1.000.000 PENDUDUK TAHUN 2011-2015

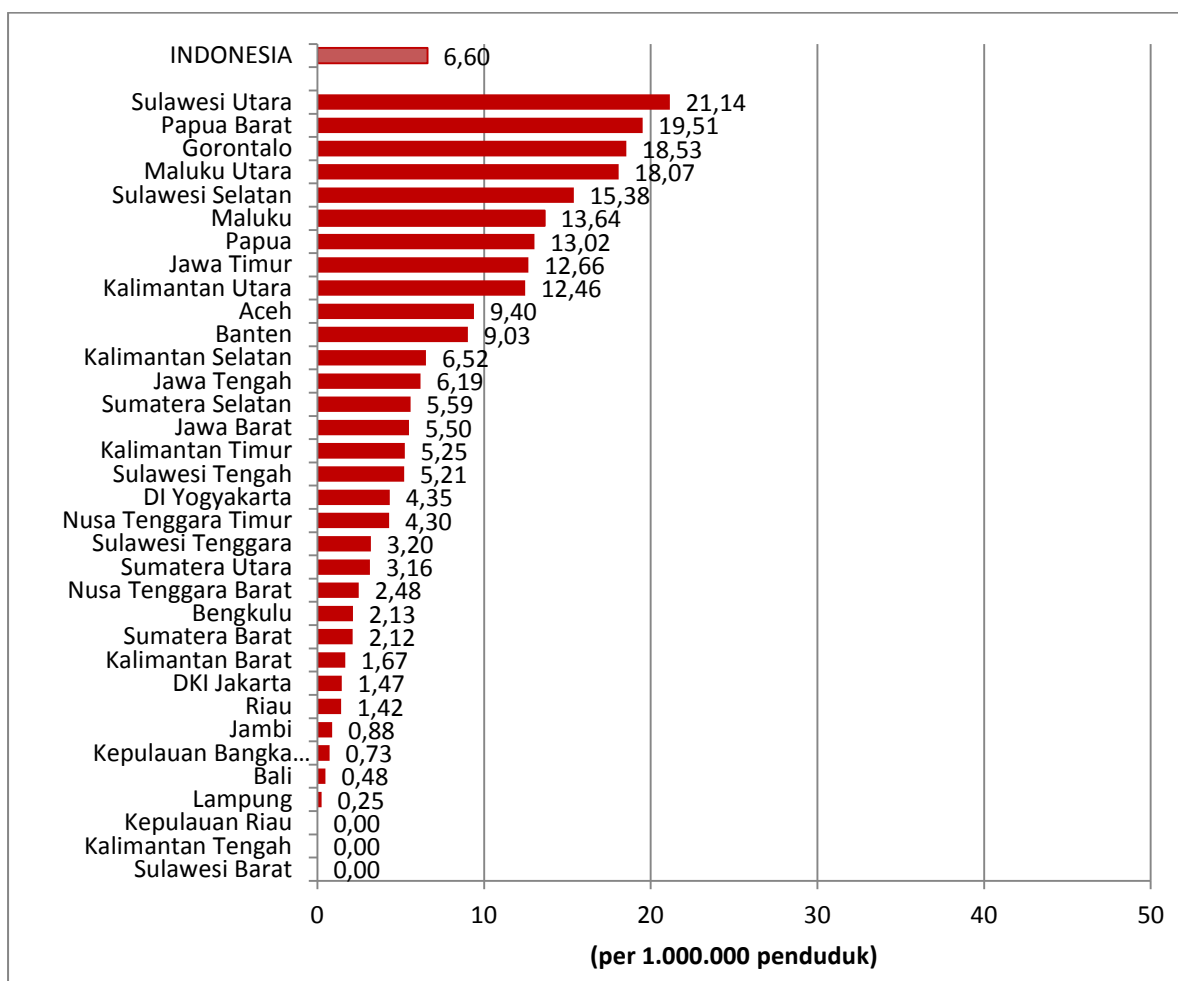


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Provinsi dengan angka cacat tingkat 2 per 1.000.000 penduduk tertinggi pada tahun 2015 yaitu Sulawesi Utara (21,14%), Papua Barat (19,51%) dan Gorontalo (18,53%). Hal itu menunjukkan kinerja penemuan kasus baru kusta di provinsi tersebut masih rendah.

GAMBAR 6.18

**ANGKA CACAT TINGKAT II KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK
PER PROVINSI TAHUN 2015**



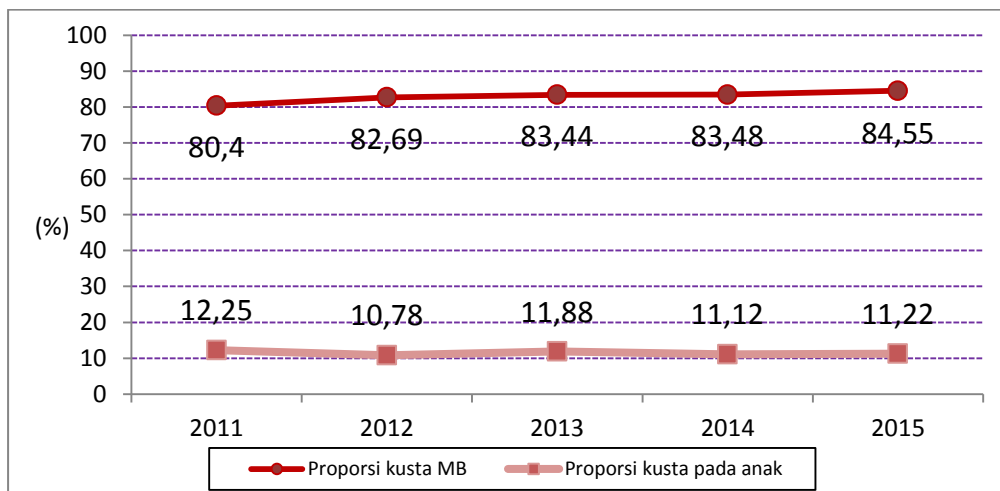
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

c. Proporsi kusta MB dan proporsi penderita kusta pada anak

Indikator lain yang digunakan pada penyakit kusta yaitu proporsi kusta MB dan proporsi penderita kusta pada anak (0-14 tahun) di antara penderita baru yang memperlihatkan sumber utama dan tingkat penularan di masyarakat. Proporsi kusta MB dan proporsi pada anak periode 2011-2015 ditunjukkan pada grafik berikut ini.

GAMBAR 6.19

**PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK
TAHUN 2008-2015**



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Proporsi kusta MB periode 2011-2015 relatif menunjukkan peningkatan yaitu dari 80,4% meningkat hingga 84,5%. Provinsi dengan proporsi kusta MB tertinggi pada tahun 2015 yaitu Bengkulu, Kalimantan Tengah (100%), Lampung (94,34%) dan Gorontalo (91,03%).

Sedangkan proporsi kusta anak pada periode yang sama yaitu sekitar 10%-12%. Provinsi dengan proporsi kusta pada anak tertinggi yaitu Papua Barat (30,82), Papua (23,62%), dan Maluku Utara (19,49%).

Data/informasi terkait penyakit kusta menurut provinsi terdapat pada Lampiran 6.12 sampai Lampiran 6.14.

5. DIARE

Penyakit diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering disertai dengan kematian. Pada tahun 2015 terjadi 18 kali KLB Diare yang tersebar di 11 provinsi, 18 kabupaten/kota, dengan jumlah penderita 1. 213 orang dan kematian 30 orang (CFR 2,47%).

TABEL 6.2
REKAPITULASI KLB DIARE TAHUN 2015

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kasus	Kematian	CFR (%)
1	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	452	6	1,33
2	Kalimantan Barat	Sangau	4	1	25,00
3	Sulawesi Tengah	Donggala	10	1	10,00
4	Sulawesi Tenggara	Muna	60	0	0,00
5	Sumatera Utara	Deliserdang	186	4	2,15
		Serdang Bedagai	14	3	21,43
		Langkat	10	1	10,00
		Batubara	20	1	5,00
		Asahan	38	0	0,00
		Tapanuli	163	1	0,61
		Labuhan Batu	59	4	6,78
6	Lampung	Pesisir Barat	3	3	100,00
		Pesawaran	30	1	3,33
7	Gorontalo	Gorontalo	18	0	0,00
8	Jawa Tengah	Semarang	116	0	0,00
9	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	2	2	100,00
10	Sulawesi Selatan	Sinjai	9	1	11,11
11	Banten	Pandeglang	19	1	5,26
	Total		1.213	30	2,47

Angka kematian (CFR) saat KLB diare diharapkan <1%. Pada tabel berikut dapat dilihat rekapitulasi KLB diare dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, terlihat bahwa CFR saat KLB masih cukup tinggi (>1%) kecuali pada tahun 2011 CFR saat KLB 0,40%, sedangkan tahun 2015 CFR diare saat KLB bahkan meningkat menjadi 2,47%.

TABEL 6.3
REKAPITULASI KLB DIARE DI INDONESIA
TAHUN 2008-2015

Tahun	Jumlah Provinsi	Jumlah Kejadian	Kasus	Kematian	CFR
2008	15	47	8.133	239	2.94
2009	14	24	5.756	100	1.74
2010	11	33	4.204	73	1.74
2011	15	19	3.003	12	0.40
2012	17	34	1.625	25	1.53
2013	6	8	633	7	1.11
2014	5	6	2.549	29	1,14
2015	13	21	1.213	30	2.47

Perkiraan jumlah penderita diare yang datang ke sarana kesehatan dan kader kesehatan sebesar 10% dari angka kesakitan dikali jumlah penduduk di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun. Angka kesakitan nasional hasil Survei Morbiditas Diare tahun 2012 yaitu sebesar 214/1.000 penduduk. Maka diperkirakan jumlah penderita diare di fasilitas kesehatan sebanyak 5.097.247 orang, sedangkan jumlah penderita diare yang dilaporkan ditangani di fasilitas kesehatan sebanyak 4.017.861 orang atau 74,33% dan targetnya sebesar 5.405.235 atau 100%. Rincian menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6.11.

B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

1. Tetanus Neonatorum

Tetanus neonatorum disebabkan oleh basil *Clostridium tetani*, yang masuk ke tubuh melalui luka. Penyakit ini menginfeksi bayi baru lahir yang salah satunya disebabkan oleh pemotongan tali pusat dengan alat yang tidak steril. Kasus tetanus neonatorum banyak ditemukan di negara berkembang khususnya negara dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang rendah.

Pada tahun 2015, dilaporkan terdapat 53 kasus dari 13 provinsi dengan jumlah meninggal 27 kasus atau CFR 50,9%. Dibandingkan tahun 2014, terjadi penurunan baik jumlah kasus maupun CFR-nya, yaitu 84 kasus dari 15 provinsi dengan CFR sebesar 64,3%.

Gambaran kasus menurut faktor risiko penolong persalinan, 33 kasus (62%) ditolong oleh penolong persalinan tradisional, misalnya dukun. Menurut cara perawatan tali pusat, hanya 6 kasus (11%) yang dirawat menggunakan alkohol/iodium, sedangkan yang lain menggunakan cara tradisional, lain-lain dan tidak diketahui. Menurut alat yang digunakan

untuk pemotongan tali pusat, 22 kasus (42%) menggunakan gunting 12 kasus (59%) menggunakan bambu dan sisanya menggunakan alat lain atau tidak diketahui. Menurut status imunisasi sebanyak 32 kasus (60%) terjadi pada kelompok yang tidak diimunisasi. Rincian kasus tetanus neonatorum beserta persentase kasus menurut faktor risiko dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6.15.

2. Campak

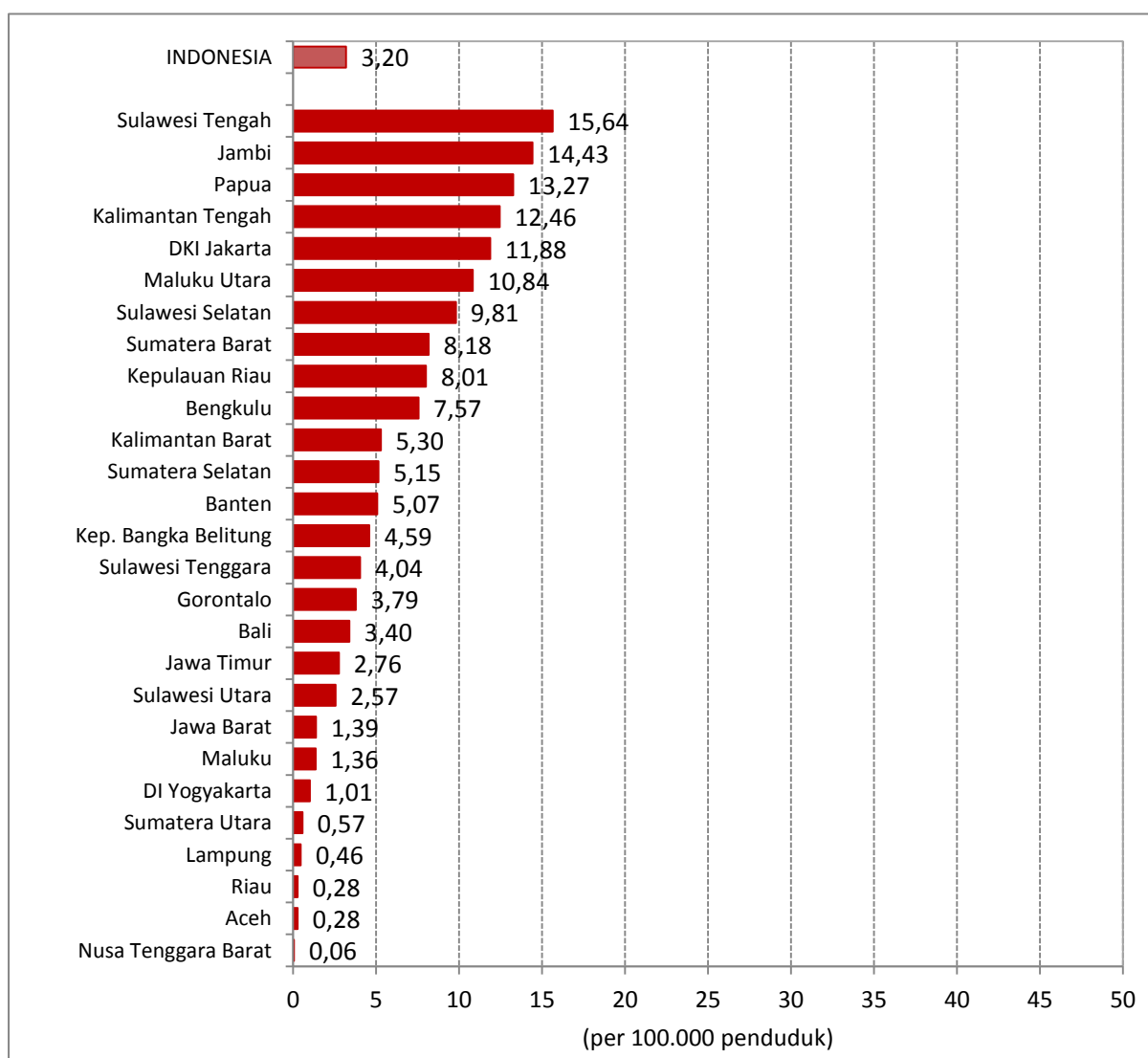
Penyakit campak disebabkan oleh virus campak golongan *Paramyxovirus*. Penularan dapat terjadi melalui udara yang telah terkontaminasi oleh *droplet* (ludah) orang yang telah terinfeksi. Sebagian besar kasus campak menyerang anak-anak usia pra sekolah dan usia SD. Jika seseorang pernah menderita campak, maka dia akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Pada tahun 2015, dilaporkan terdapat 8.185 kasus campak, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 12.943 kasus. Jumlah kasus meninggal sebanyak 1 kasus, yang terjadi di Provinsi Jambi. *Incidence Rate* (IR) campak pada tahun 2015 sebesar 3,20 per 100.000 penduduk, menurun dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 5,13 per 100.000 penduduk. Kondisi di atas dengan catatan data tahun 2015 dari 7 provinsi belum tersedia.

Gambar 6.22 menyajikan IR campak menurut provinsi. Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Riau merupakan provinsi dengan IR campak terendah. Sedangkan Sulawesi Tengah, Jambi dan Papua merupakan provinsi dengan IR campak tertinggi.

GAMBAR 6.20

INCIDENCE RATE (IR) CAMPAK PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2015

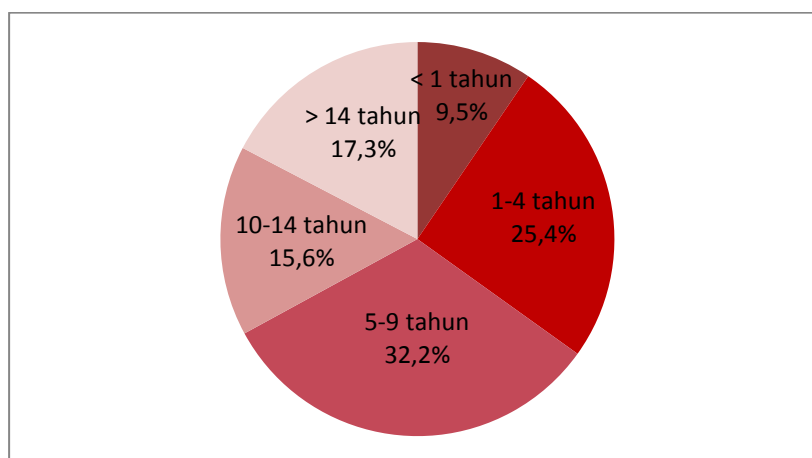


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Menurut kelompok umur, proporsi kasus campak terbesar terdapat pada kelompok umur 5-9 tahun dan kelompok umur 1-4 tahun dengan proporsi masing-masing sebesar 32,2% dan 25,4%. Namun jika dihitung rata-rata umur tunggal, kasus campak pada bayi <1 tahun merupakan kasus yang tertinggi, yaitu sebanyak 778 kasus (9,5%). Gambar 6.21 berikut memperlihatkan proporsi kasus campak per kelompok umur.

GAMBAR 6.21

**PROPORSI KASUS CAMPAK PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2015**



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Rincian kasus campak per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6. 16 dan 6.17

Campak dinyatakan sebagai KLB apabila terdapat 5 atau lebih kasus klinis dalam waktu 4 minggu berturut-turut yang terjadi secara mengelompok dan dibuktikan adanya hubungan epidemiologis. Pada tahun 2015, jumlah KLB campak yang terjadi sebanyak 68 KLB dengan jumlah kasus sebanyak 831 kasus, menurun dibandingkan tahun 2013 dengan 173 KLB dan jumlah kasus sebanyak 2.104 kasus.

Frekuensi KLB campak tertinggi terjadi di Papua sebanyak 14 kejadian dengan 335 kasus. Diikuti Kalimantan Barat sebanyak 10 KLB dan Sumatera Barat 8 KLB. Tidak ada kasus yang meninggal pada KLB campak selama tahun 2015. Frekuensi dan jumlah kasus pada KLB campak menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6.18

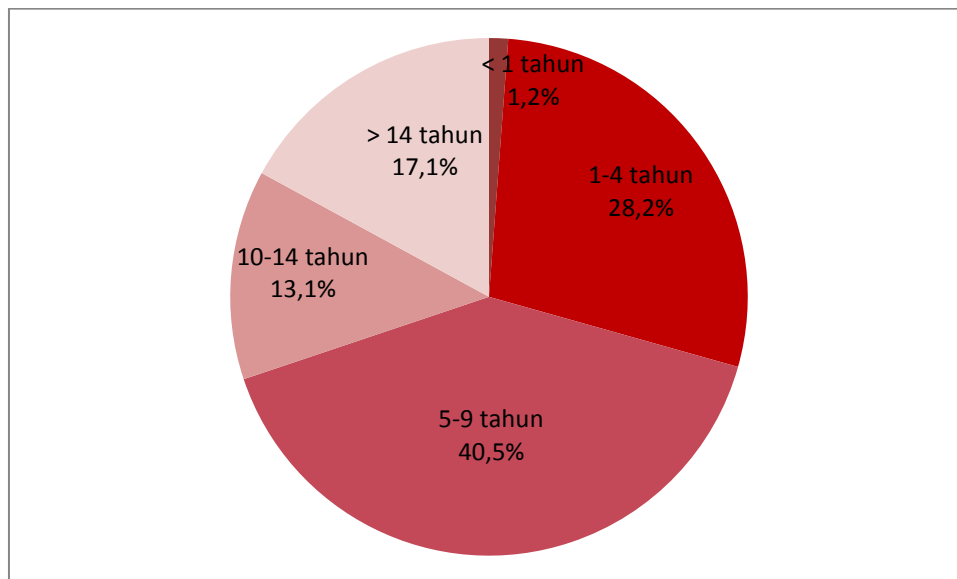
3. Difteri

Penyakit difteri disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheriae* yang menyerang sistem pernapasan bagian atas. Penyakit difteri pada umumnya menyerang anak-anak usia 1-10 tahun.

Jumlah kasus difteri pada tahun 2015 sebanyak 252 kasus dengan jumlah kasus meninggal sebanyak 5 kasus sehingga CFR difteri sebesar 1,98%. Dari 13 provinsi yang melaporkan adanya kasus difteri, kasus tertinggi terjadi di Sumatera Barat dengan 110 kasus dan Jawa Timur sebanyak 67 kasus. Terjadi peningkatan kasus yang besar di Provinsi Sumatera Barat (KLB) dibandingkan tahun 2014 yang hanya sejumlah 9 kasus. Untuk itu telah dilaksanakan *Outbreak Respons Immunization (ORI)*. Sedangkan jumlah kasus difteri di Jawa Timur telah menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2014 (396 kasus) dan 2013 (610 kasus). Dari seluruh kasus difteri, sebesar 37% tidak mendapatkan vaksinasi.

GAMBAR 6.22

PROPORSI KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2015



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Gambaran kasus menurut kelompok umur pada tahun 2015 menunjukkan jumlah distribusi kasus tertinggi terjadi pada kelompok umur 5-9 tahun dan 1-4 tahun. Kelompok umur ≥ 14 tahun memiliki rentang usia yang panjang dibanding kelompok umur lainnya sehingga meskipun proporsinya besar, jika dihitung per umur tunggal, kelompok ini memiliki jumlah kasus yang rendah.

Rincian kasus difteri per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6. 20.

4. Polio dan AFP (*Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut*)

Polio disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem syaraf, utamanya menyerang anak balita dan menular terutama melalui fekal-oral. Polio ditandai dengan gejala awal demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher, serta sakit di tungkai dan lengan. Pada 1 dari 200 infeksi menyebabkan kelumpuhan permanen (biasanya pada tungkai), dan 5-10% dari yang menderita kelumpuhan meninggal karena kelumpuhan pada otot-otot pernafasan.

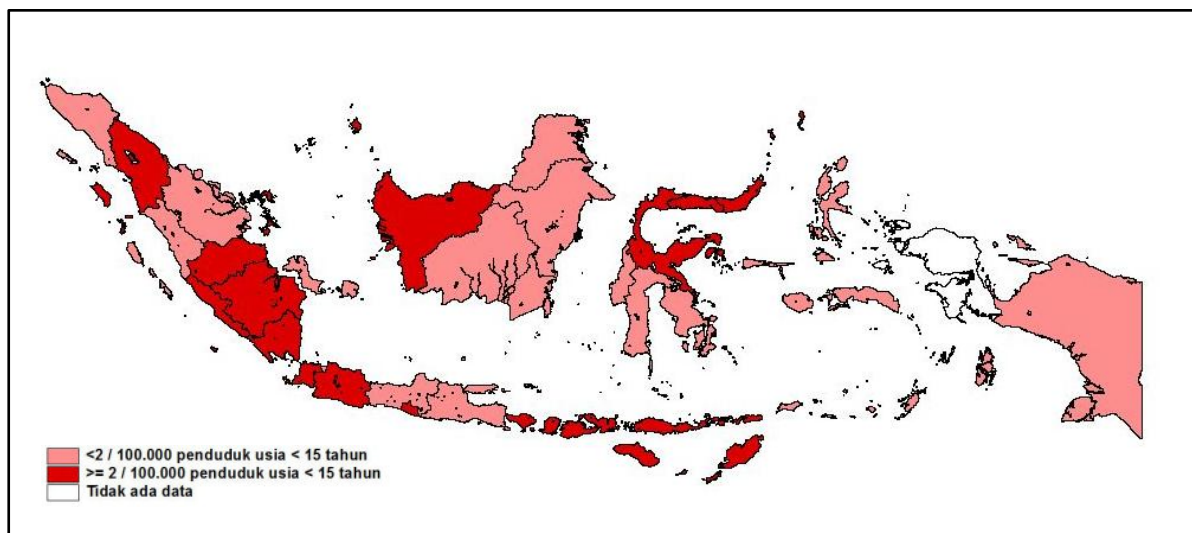
Indonesia telah berhasil mendapatkan sertifikasi bebas polio bersama negara-negara *South East Asia Region (SEARO)* pada tanggal 27 Maret 2014. Saat ini tinggal 2 negara, yaitu Afghanistan dan Pakistan yang masih endemik polio. Setelah Indonesia dinyatakan bebas polio, bukan berarti Indonesia menurunkan upaya imunisasi dan surveilans AFP, upaya pencegahan harus terus ditingkatkan hingga seluruh dunia benar-benar terbebas dari polio.

Surveilans AFP adalah pengamatan yang dilakukan terhadap semua kasus lumpuh layuh akut (AFP) pada anak usia < 15 tahun, yang merupakan kelompok yang rentan terhadap penyakit polio, dalam upaya untuk menemukan adanya transmisi virus polio liar. Surveilans AFP merupakan indikator sensitivitas deteksi virus polio liar. Surveilans AFP juga penting untuk dokumentasi tidak adanya virus polio liar untuk sertifikasi bebas polio.

Non polio AFP adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Kementerian Kesehatan menetapkan *non polio AFP rate* minimal 2/100.000 populasi anak usia <15 tahun. Pada tahun 2015, secara nasional *non polio AFP rate* sebesar 1,93/100.000 populasi anak <15 tahun yang berarti belum mencapai standar minimal penemuan.

GAMBAR 6.23

NON POLIO AFP RATE PER 100.000 ANAK < 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2015



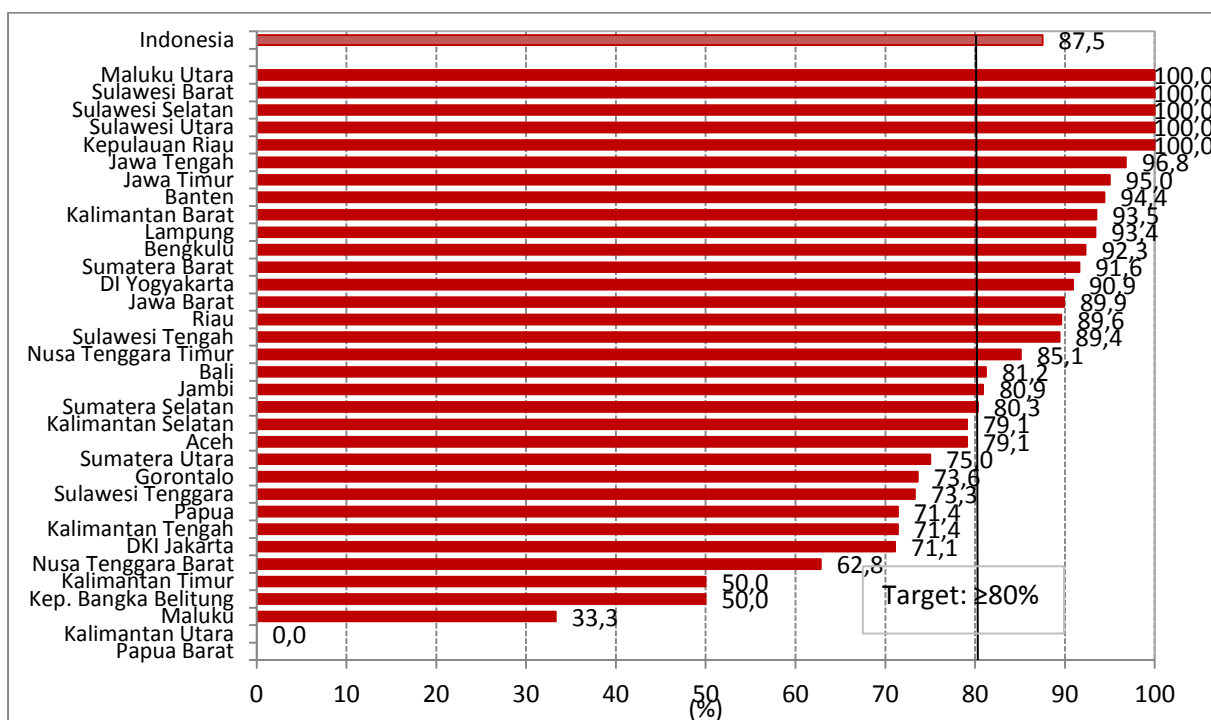
Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

Dari 34 provinsi 16 di antaranya (47%) telah mencapai target *non polio AFP rate* ≥ 2 per 100.000 penduduk kurang dari 15 tahun pada tahun 2015, 17 provinsi masih <2 dan 1 provinsi yaitu Papua Barat belum menyampaikan laporannya.

Setiap kasus AFP yang ditemukan dalam kegiatan intensifikasi surveilans, akan dilakukan pemeriksaan spesimen tinja untuk mengetahui ada tidaknya virus polio liar. Untuk itu diperlukan spesimen adekuat yang sesuai dengan persyaratan yaitu diambil ≤ 14 hari setelah kelumpuhan dan suhu spesimen 0°C - 8°C sampai di laboratorium.

GAMBAR 6.24

PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Standar spesimen adekuat yaitu $\geq 80\%$. Pada tahun 2015 spesimen adekuat di Indonesia sebesar 87,5%. Dengan demikian spesimen adekuat secara nasional telah sesuai standar.

Sebanyak 20 provinsi (58,8%) telah mencapai standar spesimen adekuat pada tahun 2015, 13 provinsi belum mencapai standar dan 1 provinsi yaitu Papua Barat belum menyampaikan laporan.

Informasi lebih rinci mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menurut provinsi dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 6.15 - 6.21.

C. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZONOSIS

1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong *Arthropod-Borne Virus*, genus *Flavivirus*, dan famili *Flaviviridae*. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus *Aedes*, terutama *Aedes aegypti* atau *Aedes*

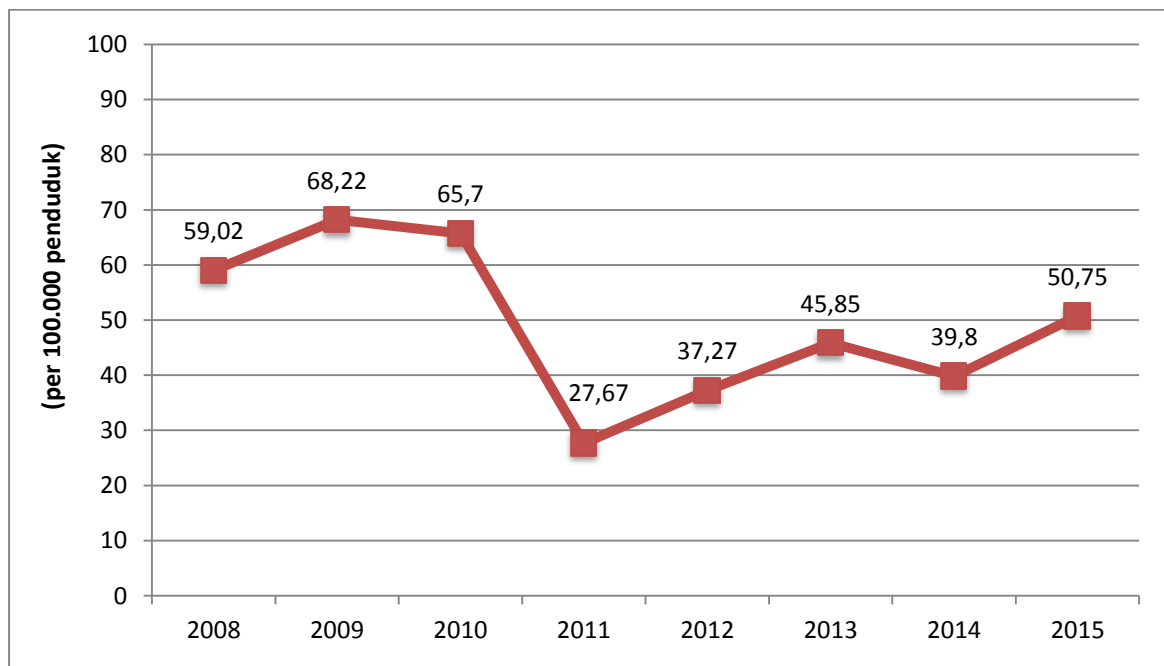
albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

a. Incidence Rate dan Case Fatality Rate

Pada tahun 2015 jumlah penderita DBD yang dilaporkan sebanyak 129.650 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 1.071 orang ($IR/\text{Angka kesakitan} = 50,75$ per 100.000 penduduk dan $CFR/\text{angka kematian} = 0,83\%$). Dibandingkan tahun 2014 dengan kasus sebanyak 100.347 serta IR 39,80 terjadi peningkatan kasus pada tahun 2015. Target Renstra Kementerian Kesehatan untuk angka kesakitan DBD tahun 2015 sebesar < 49 per 100.000 penduduk, dengan demikian Indonesia belum mencapai target Renstra 2015. Berikut tren angka kesakitan DBD selama kurun waktu 2008-2015.

GAMBAR 6.25

ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008-2015

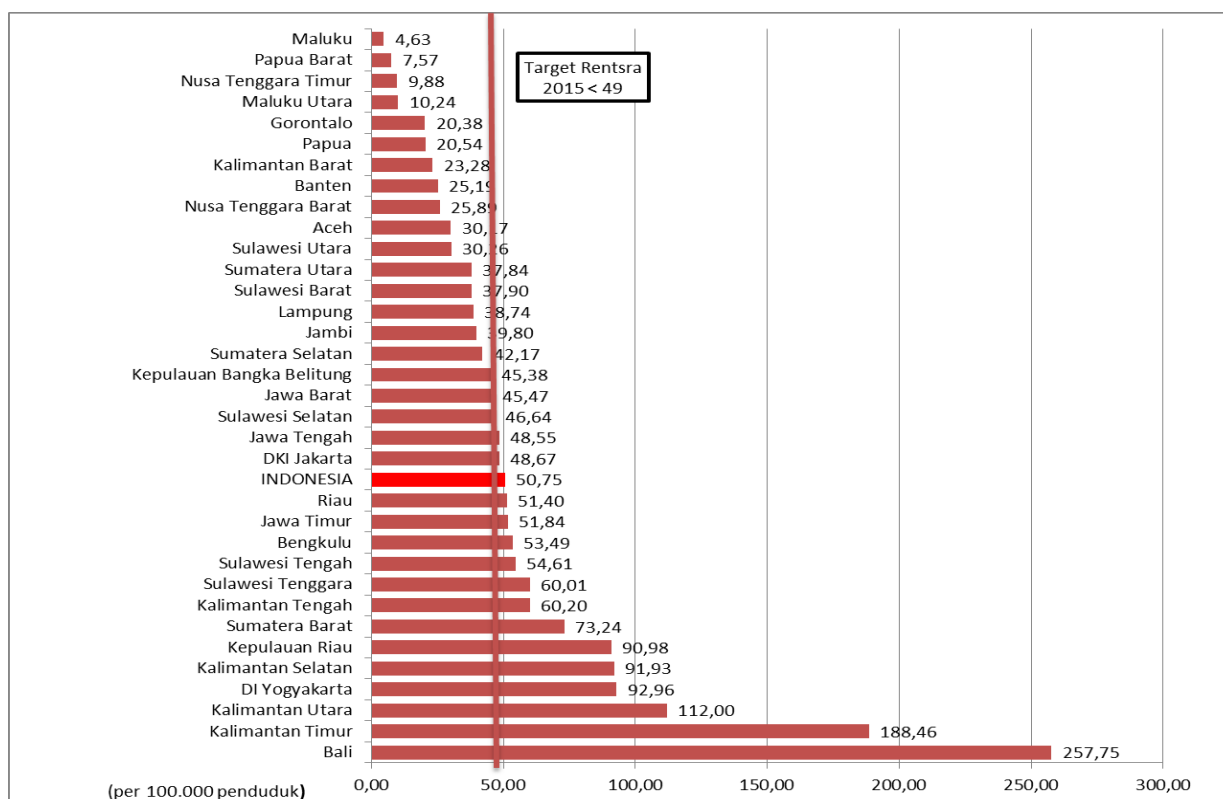


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Gambaran angka kesakitan DBD menurut provinsi tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 6.26. Pada tahun 2015 terdapat sebanyak 21 provinsi (61,8%) yang telah mencapai target renstra 2015. Provinsi dengan angka kesakitan DBD tertinggi tahun 2015 yaitu Bali sebesar 257,75, Kalimantan Timur sebesar 188,46, dan Kalimantan Utara sebesar 112,00 per 100.000 penduduk.

GAMBAR 6.26

ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Kematian akibat DBD dikategorikan tinggi jika CFR >1%. Dengan demikian pada tahun 2015 terdapat 5 provinsi yang memiliki CFR tinggi yaitu Maluku (7,69%), Gorontalo (6,06%), Papua Barat (4,55%), Sulawesi Utara (2,33%), dan Bengkulu (1,99%). Pada provinsi tersebut masih perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan di rumah sakit dan puskesmas (dokter, perawat dan lain-lain) termasuk peningkatan sarana-sarana penunjang diagnostik dan penatalaksanaan bagi penderita di sarana-sarana pelayanan kesehatan.

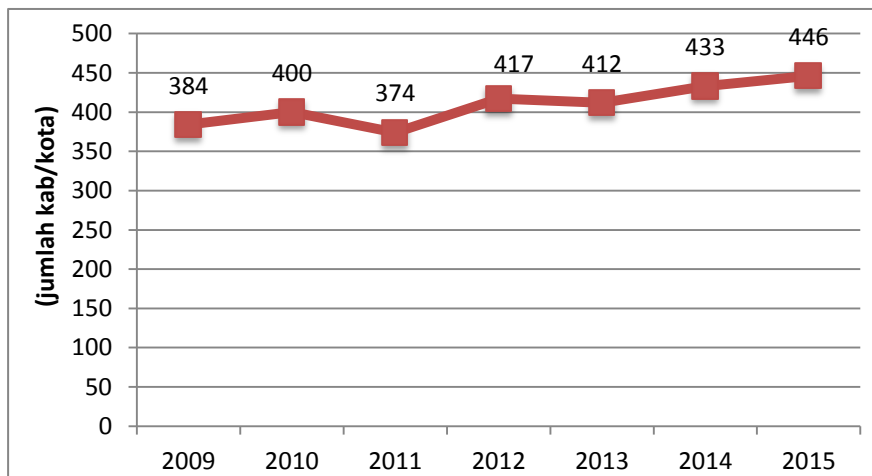
Sedangkan menurut jumlah kematian, jumlah kematian tertinggi terjadi di Jawa Timur sebanyak 283 kematian, diikuti oleh Jawa Tengah (255 kematian) dan Kalimantan Timur (65 kematian).

b. Kabupaten/kota terjangkit DBD

Angka kesakitan DBD dan jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD pada tahun 2015 sama-sama mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar 433 (84,74%) menjadi 446 Kabupaten/Kota (86,77%) pada tahun 2015. Berikut ini gambaran jumlah kabupaten/kota terjangkit tahun 2009-2015. Selama periode tahun 2009 sampai tahun 2015 jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD cenderung meningkat.

GAMBAR 6.27

JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD
DI INDONESIA TAHUN 2009-2015



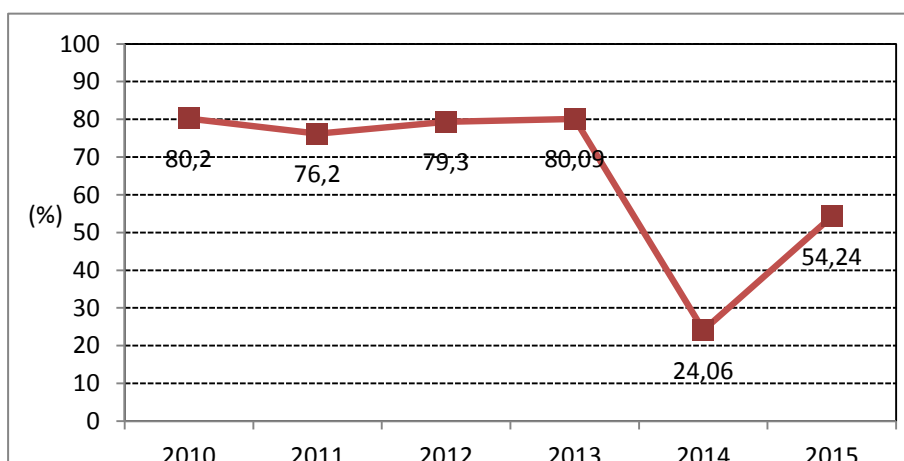
Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2016

c. Angka Bebas Jentik

Indikator lain yang digunakan untuk upaya pengendalian penyakit DBD yaitu angka bebas jentik (ABJ). Sampai tahun 2015 ABJ secara nasional belum mencapai target program yang sebesar $\geq 95\%$.

GAMBAR 6.28

ANGKA BEBAS JENTIK
DI INDONESIA TAHUN 2010-2015



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Pada tahun 2015 ABJ di Indonesia terlihat peningkatan yang cukup signifikan dari 24,06% pada tahun 2014 menjadi 54,24% pada tahun 2015. Hal ini bisa disebabkan pelaporan data ABJ sudah mulai mencakup sebagian wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Puskesmas sudah mulai menggalakkan kembali kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) secara rutin, kegiatan kader Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) sudah mulai di galakkan kembali. Walaupun jika dibandingkan dengan tahun 2010-2013 masih lebih kecil dan masih belum mencapai target program yang sebesar $\geq 95\%$.

Informasi lebih rinci menurut provinsi terkait dengan penyakit DBD dapat dilihat pada Lampiran 6.24 dan Lampiran 6.26.

2. Chikungunya

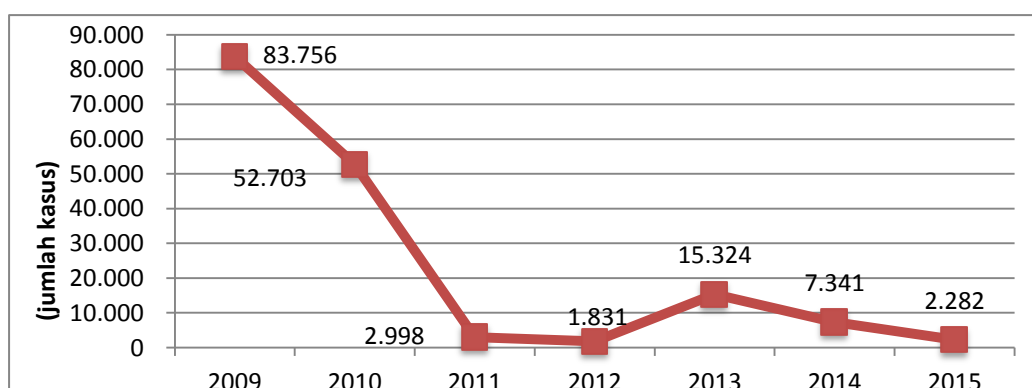
Demam chikungunya (demam chik) adalah suatu penyakit menular dengan gejala utama demam mendadak, nyeri pada persendian, terutama pada sendi lutut, pergelangan, jari kaki dan tangan serta tulang belakang, serta ruam pada kulit. Demam chik ditularkan oleh nyamuk *Aedes albopictus* dan *Aedes aegypty* yang juga merupakan nyamuk penular penyakit DBD.

Demam chik dijumpai terutama di daerah tropis/subtropis dan sering menimbulkan epidemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya demam chik yaitu rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan.

Selama tahun 2015 terdapat 10 kabupaten/kota terjadi KLB demam chikungunya dari 8 provinsi yaitu Aceh (Kabupaten Aceh Selatan), Riau (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak), Bengkulu (Kota Bengkulu), Lampung (Kota Bandar Lampung), Jawa Tengah (Kabupaten Pekalongan), Jawa Timur (Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pasuruan), Sulawesi Tengah (Kabupaten Parigi Moutong), dan Sulawesi Selatan (Kabupaten Sinjai).

GAMBAR 6.29

JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2009-2015



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Kejadian Demam Chikungunya mengalami penurunan kasus yang sangat signifikan pada tahun 2009-2012, namun kembali meningkat cukup signifikan pada tahun 2013 dan turun kembali sampai tahun 2015. Hingga saat ini belum pernah dilaporkan adanya kematian akibat Chikungunya. Faktor penyebab turunnya kasus antara lain kondisi cuaca yang relatif kering dengan curah hujan yang rendah, adanya imunitas pada daerah yang pernah terjangkit, sebagian daerah tidak melaporkan kasus Chikungunya dan lain-lain.

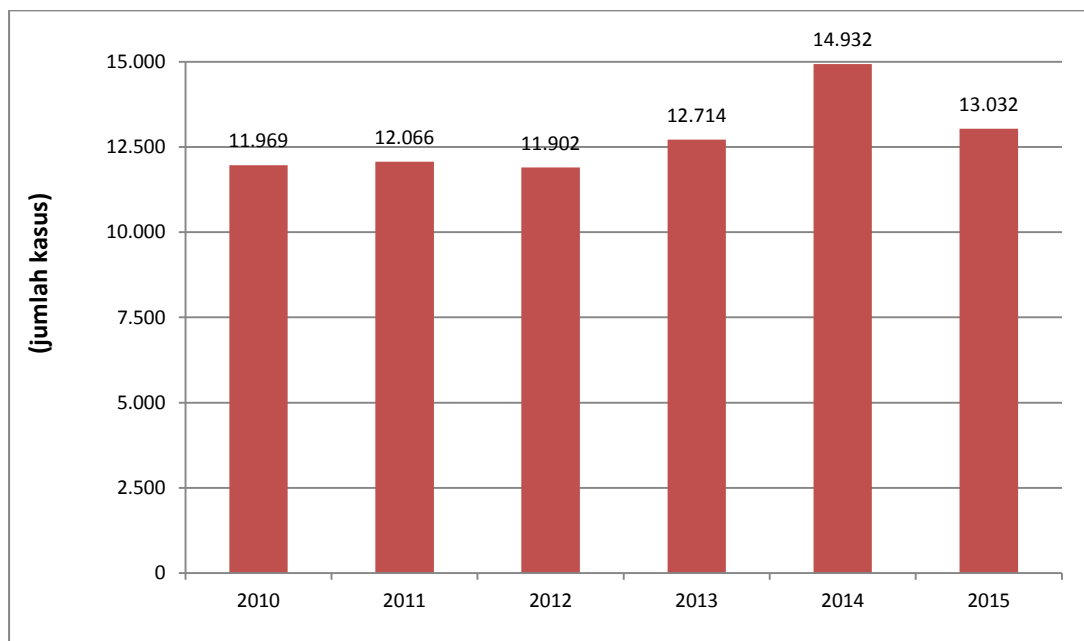
3. Filariasis

Filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh parasit berupa cacing filaria, yang terdiri dari tiga spesies yaitu *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi* dan *Brugia timori*. Penyakit ini menginfeksi jaringan limfe (getah bening). Filariasis menular melalui gigitan nyamuk yang mengandung cacing filaria dalam tubuhnya. Dalam tubuh manusia, cacing tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di jaringan limfe sehingga menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital.

WHO menetapkan kesepakatan global untuk mengeliminasi filariasis pada tahun 2020 (*The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health problem by The Year 2020*). Di dunia terdapat 1,3 miliar penduduk yang berisiko tertular penyakit kaki gajah di lebih dari 83 negara dan 60% kasus berada di Asia Tenggara. Di Indonesia, pada tahun 2015 terdapat 13.032 kasus filariasis. Grafik berikut menggambarkan peningkatan kasus filariasis di Indonesia sejak tahun 2010.

GAMBAR 6.30

JUMLAH KASUS KLINIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2015



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Lima provinsi dengan kasus klinis filariasis tertinggi pada tahun 2015 yaitu Nusa Tenggara Timur (2.864), Aceh (2.372), dan Papua Barat (1.244), Papua (1.184), dan Jawa Barat (904).

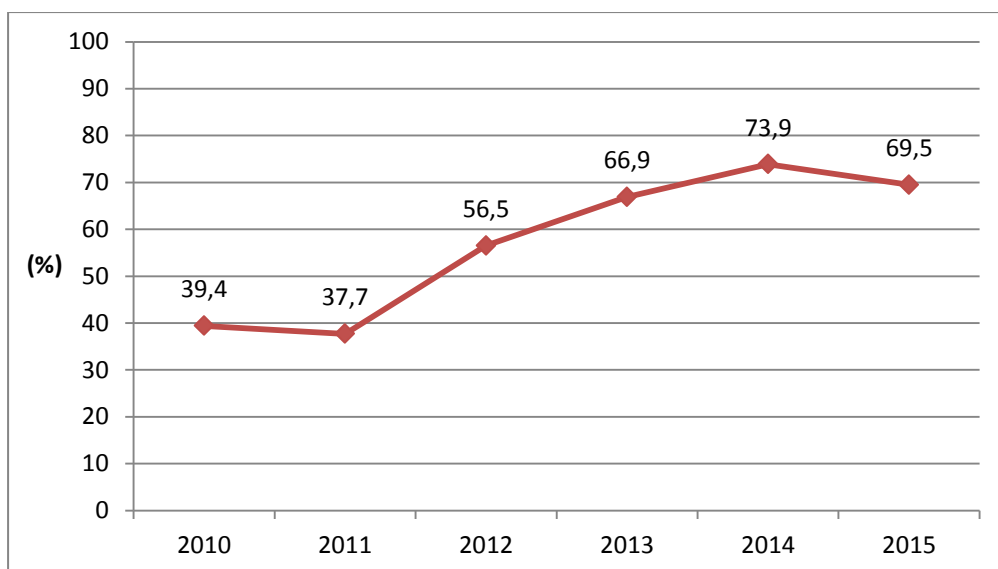
Indonesia memberantas filariasis sebagai bagian dari eliminasi filariasis global melalui dua pilar kegiatan yaitu: 1. memutuskan mata rantai penularan filariasis dengan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis di daerah endemis sekali setahun selama lima tahun berturut-turut (obat yang dipakai: DEC (*Diethylcarbamazine Citrate*) 6 mg/kg BB dikombinasikan dengan Albendazole 400 mg); 2. mencegah dan membatasi kecacatan dengan penatalaksanaan kasus filariasis mandiri.

Pada tahun 2015, berdasarkan hasil pemetaan daerah endemis di Indonesia diperoleh sebanyak 241 kabupaten/kota merupakan daerah endemis Filariasis sedangkan daerah non endemis sebanyak 273 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hampir sebagian dari penduduk Indonesia tinggal di daerah endemis sehingga berisiko tertular Filariasis. Dari 241 kabupaten/kota endemis Filariasis sebanyak 54% kabupaten sedang melaksanakan POPM Filariasis dan 22% telah selesai POPM 5 Putaran. Namun, masih ada 18% kabupaten/kota yang belum mulai melaksanakan dan 6% putus POPM Filariasis.

Cakupan POPM filariasis selama empat tahun terakhir terus meningkat, dari 56,5% pada tahun 2012 menjadi 69,5% pada tahun 2015 seperti terlihat pada Gambar 6.31 berikut ini.

GAMBAR 6.31

**CAKUPAN POPM FILARIASIS
TAHUN 2010 – 2015**



Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2015

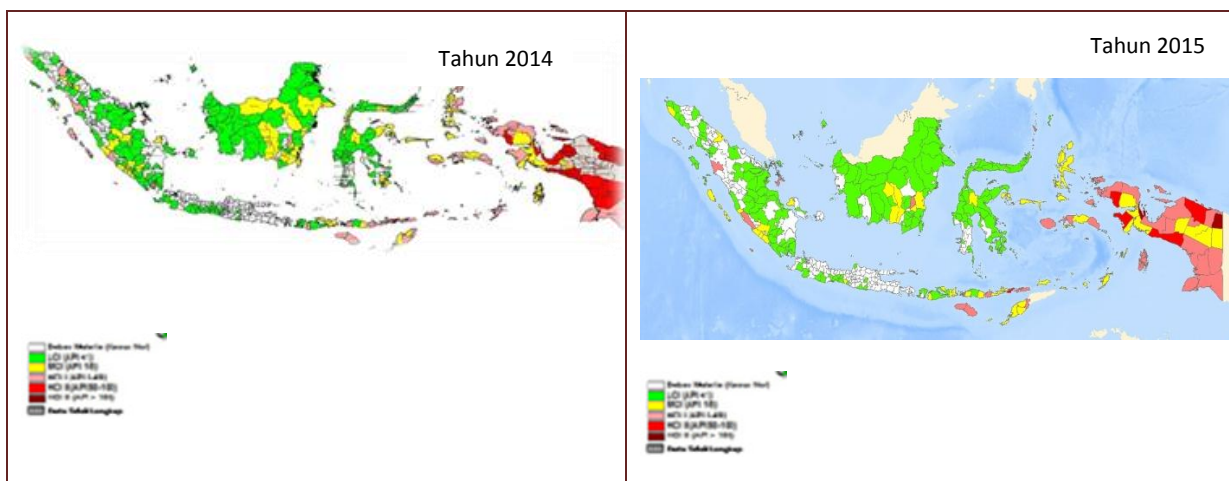
Untuk meningkatkan cakupan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya minum obat pencegahan filariasis yang diberikan setahun sekali pada daerah endemis

4. Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles*) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki ataupun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa. Berikut gambaran peta endemisitas malaria per kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 dan 2015.

GAMBAR 6.32

**PETA ENDEMISITAS MALARIA DI INDONESIA
TAHUN 2014 DAN 2015**

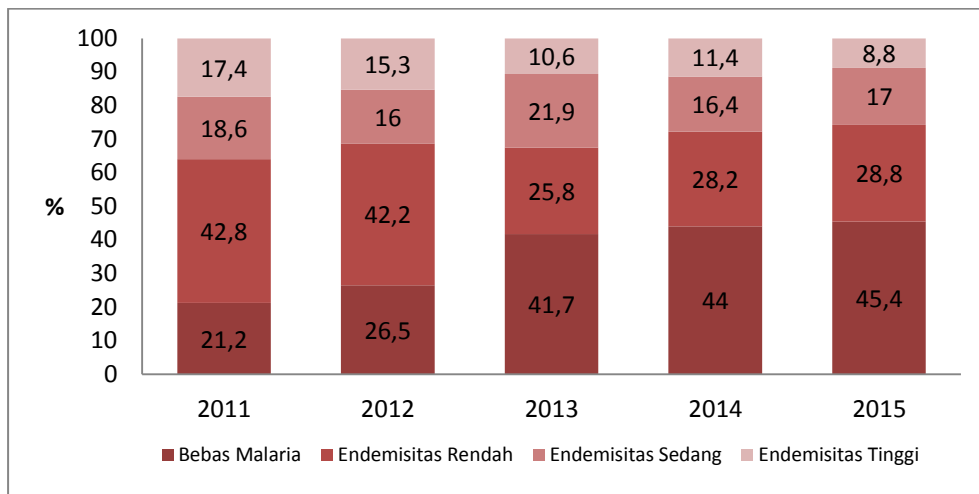


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Dari gambaran peta endemisitas malaria di kabupaten/kota terlihat penurunan jumlah yang sangat tajam daerah endemis tinggi dari 17,4% pada tahun 2011 menjadi 8,8% pada tahun 2015. Dan daerah endemis sedang juga menurun dari 18,6% tahun 2011 menjadi 17% pada tahun 2015, serta daerah endemis rendah juga mengalami menurun yang tajam dari 42,8% pada tahun 2011 menjadi 28,8% pada tahun 2015. Sebaliknya daerah bebas malaria mengalami peningkatan dari 21,5% pada tahun 2011 menjadi 45,4% pada tahun 2015. Pada RPJM 2015-2019 indikator yang pakai adalah jumlah kumulatif kabupaten/kota mencapai status eliminasi. Saat ini terdapat 232 kabupaten/kota yang telah mencapai status eliminasi dari 225 kabupaten /kota yang ditargetkan.

GAMBAR 6.33

**PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENURUT TINGKAT ENDEMISITAS
TAHUN 2011-2015**



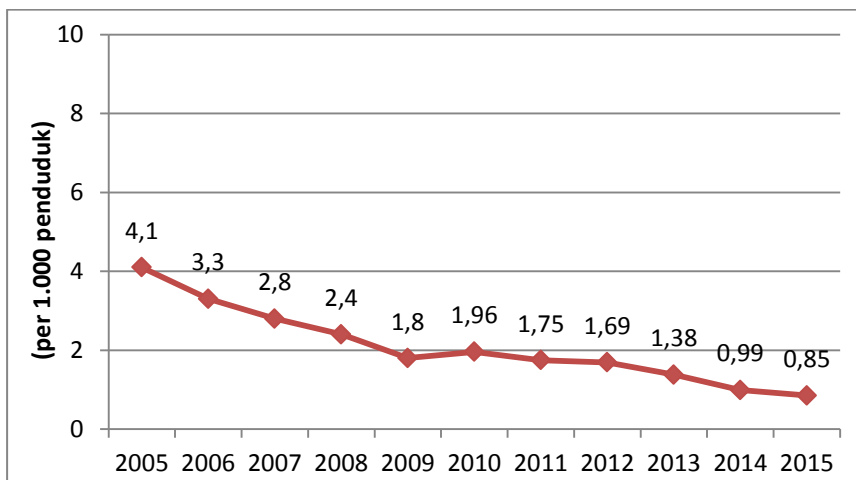
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

a. Angka Kesakitan Malaria

Secara nasional angka kesakitan malaria selama tahun 2005–2015 cenderung menurun yaitu dari 4,1 per 1.000 penduduk berisiko pada tahun 2005 menjadi 0,85 per 1.000 penduduk berisiko pada tahun 2015. Sementara target Rencana Strategi Kementerian Kesehatan untuk angka kesakitan malaria (API/*annual parasite incidence*) tahun 2015 <1 per 1.000 penduduk berisiko. Dengan demikian cakupan API 2015 mencapai target Renstra 2015. Penurunan API tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 6.34

ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API)
PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO TAHUN 2005-2015



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Lima provinsi dengan API per 1.000 penduduk tertinggi yaitu Papua (31,93), Papua Barat (31,29), Nusa Tenggara Timur (7,04), Maluku (5,81), dan Maluku Utara (2,77). Sedangkan provinsi dengan API terendah yaitu Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Timur masing-masing sebesar 0,00. Sebanyak 82% kasus berasal dari Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Secara nasional, sebesar 78% sediaan darah dites dengan pemeriksaan mikroskopis dan 22% lainnya dites dengan *Rapid Diagnostic Test*. Terdapat lima provinsi dengan proporsi *Rapid Diagnostic Test* lebih tinggi di bandingkan dengan pemeriksaan mikroskopis, yaitu Sumatera Utara, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Papua Barat. Informasi lengkap mengenai jumlah kasus malaria dan jenis tes sediaan darah menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6.22 dan Lampiran 6.23.

Menurut Riset Kesehatan Dasar 2013, insiden malaria berdasarkan diagnosis sebesar 0,35% atau 3,5 per 1.000 penduduk. Pada survei ini tiga provinsi dengan insiden tertinggi sama dengan hasil laporan rutin yaitu Papua (6,1%), Papua Barat (4,5%), dan Nusa Tenggara Timur (2,6%). Sementara insiden malaria berdasarkan diagnosis/gejala sebesar 1,9% atau 19 per 1.000 penduduk.

b. Pengobatan Malaria

Pengobatan malaria harus dilakukan secara efektif. Pemberian jenis obat harus benar dan cara meminumnya harus tepat waktu yang sesuai dengan acuan program pengendalian malaria. Pengobatan efektif adalah pemberian ACT (*Artemicin-based Combination Therapy*) pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus diminum habis dalam tiga hari. Hasil Riskesdas 2013 menyatakan bahwa proporsi pengobatan efektif Indonesia sebesar 45,5%. Lima provinsi tertinggi dalam mengobati malaria secara efektif

yaitu Kep. Bangka Belitung (59,2%), Sumatera Utara (55,7%), Bengkulu (53,6%), Kalimantan Tengah (50,5%), dan Papua (50,0%).

5. Rabies

Rabies merupakan penyakit mematikan baik pada manusia maupun hewan yang disebabkan oleh infeksi virus (golongan Rhabdovirus) yang ditularkan melalui gigitan hewan seperti anjing, kucing, kelelawar, kera, musang dan serigala yang di dalam tubuhnya mengandung virus.

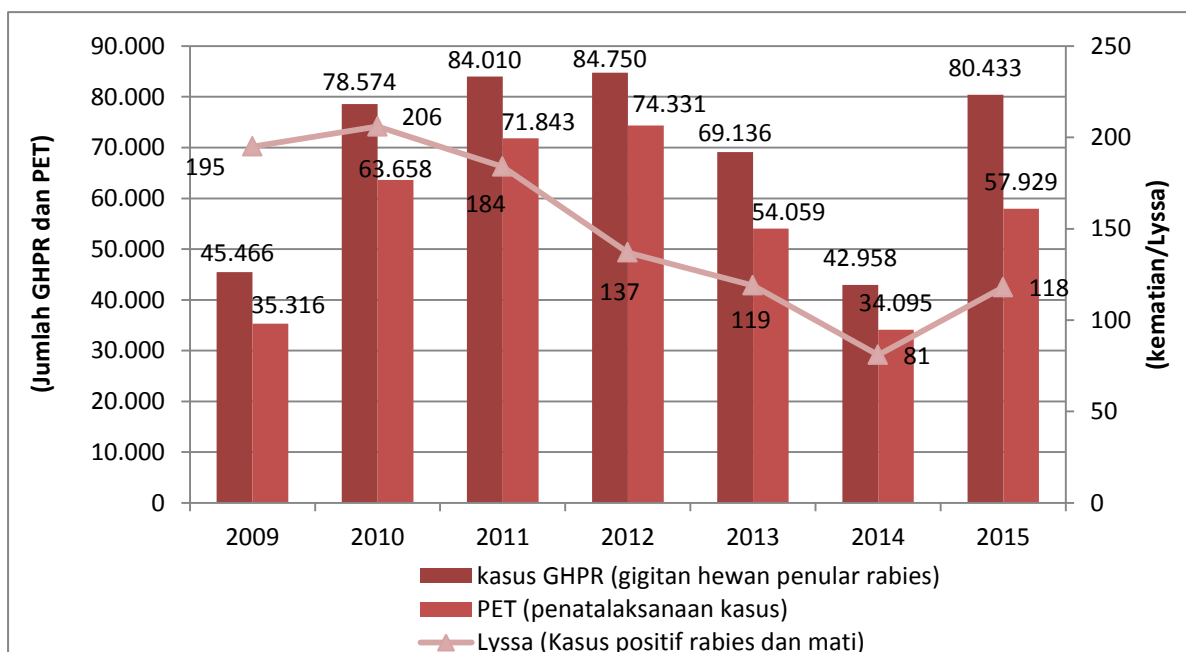
Tahun 2015 terdapat 25 provinsi tertular rabies dari 34 provinsi di Indonesia (SK Kementerian Pertanian). Sebanyak sembilan provinsi lainnya bebas rabies, lima diantaranya provinsi bebas historis (Papua, Papua Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan NTB), dan empat provinsi dibebaskan (Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan DKI Jakarta).

Kasus kematian karena rabies (*Lyssa*) di tahun 2015 mengalami penurunan dari 195 pada tahun 2009 menjadi 118 kasus *Lyssa* pada tahun 2015. Namun, kasus GHPR mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebesar 80.433 kasus.

Gambar 6.35 memperlihatkan bahwa terjadi penurunan kematian akibat rabies (*Lyssa*).

GAMBAR 6.35

SITUASI RABIES DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2015



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Pada tahun 2015 terdapat 80.433 kasus GHPR. Kasus GHPR paling banyak terjadi di Bali yaitu sebanyak 42.630 kasus, diikuti oleh NTT yaitu sebanyak 7.386 kasus. Sedangkan untuk kematian akibat rabies (*Lyssa*) terdapat 118 kasus, terjadi paling banyak di Sulawesi Utara sebanyak 28 kasus dan Bali sebanyak 15 kasus.

6. Leptospirosis

Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan bakteri *Leptospira sp.* Sumber infeksi pada manusia biasanya akibat kontak secara langsung atau tidak langsung dengan *urine* hewan yang terinfeksi. Namun, dikarenakan sulitnya diagnosa klinis dan mahalnya biaya pemeriksaan laboratorium, banyak kasus leptospirosis yang tidak dilaporkan.

Terdapat 6 provinsi yang melaporkan adanya kasus leptospirosis tahun 2015 yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.

Dibandingkan tahun 2014, terdapat penurunan jumlah kasus dari 550 kasus menjadi 366 kasus pada tahun 2015. Penurunan kasus leptospirosis secara signifikan terjadi di DKI Jakarta (dari 106 kasus pada tahun 2014 menjadi 37 kasus pada tahun 2015) dan Jawa Timur (dari 61 kasus pada tahun 2014 menjadi 3 kasus pada tahun 2015). Namun di Banten yang pada tahun 2014 tidak ada kasus menjadi 31 kasus pada tahun 2015.

TABEL 6.4

**DISTRIBUSI KASUS LEPTOSPIROSIS DI 6 PROVINSI
DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2015**

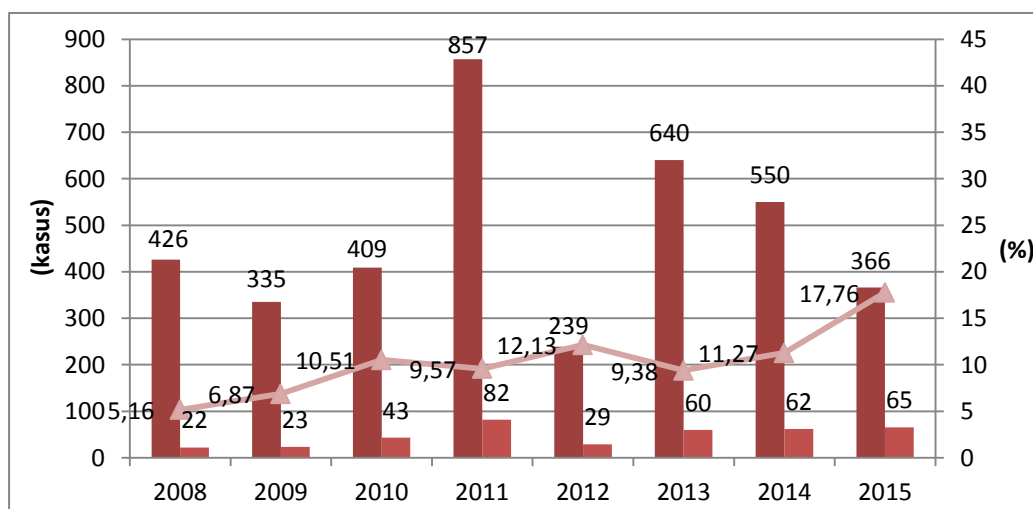
Provinsi	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DKI Jakarta	8	15	11	10	66	106	37
Jawa Barat	0	1	29	0	1	26	2
Jawa Tengah	232	133	184	129	156	198	149
DI Yogyakarta	95	230	626	72	163	154	144
Jawa Timur	0	19	5	28	244	61	3
Banten	0	0	0	0	10	0	31
Total	335	398	855	239	640	545	336

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Angka kematian akibat leptospirosis tertinggi terjadi di DKI Jakarta dengan CFR sebesar 16,98%. Gambar 6.36 berikut ini merupakan gambaran jumlah kasus dan jumlah kasus meninggal akibat leptospirosis selama delapan tahun terakhir.

GAMBAR 6.36

SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA
TAHUN 2008 – 2015



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Walaupun jumlah kasus pada tahun 2015 menurun dibandingkan tahun 2014, namun CFR akibat leptospirosis meningkat dari 11,27 % pada tahun 2014 menjadi 17,76% pada tahun 2015.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam pengendalian leptospirosis antara lain Surat Edaran Kewaspadaan Leptospirosis setiap tahunnya; pengadaan *Rapid Test Diagnostic* (RDT) sebagai *buffer stock*; mendistribusikan media KIE seperti buku petunjuk teknis, leaflet, poster, roll banner, dll.

7. Antraks

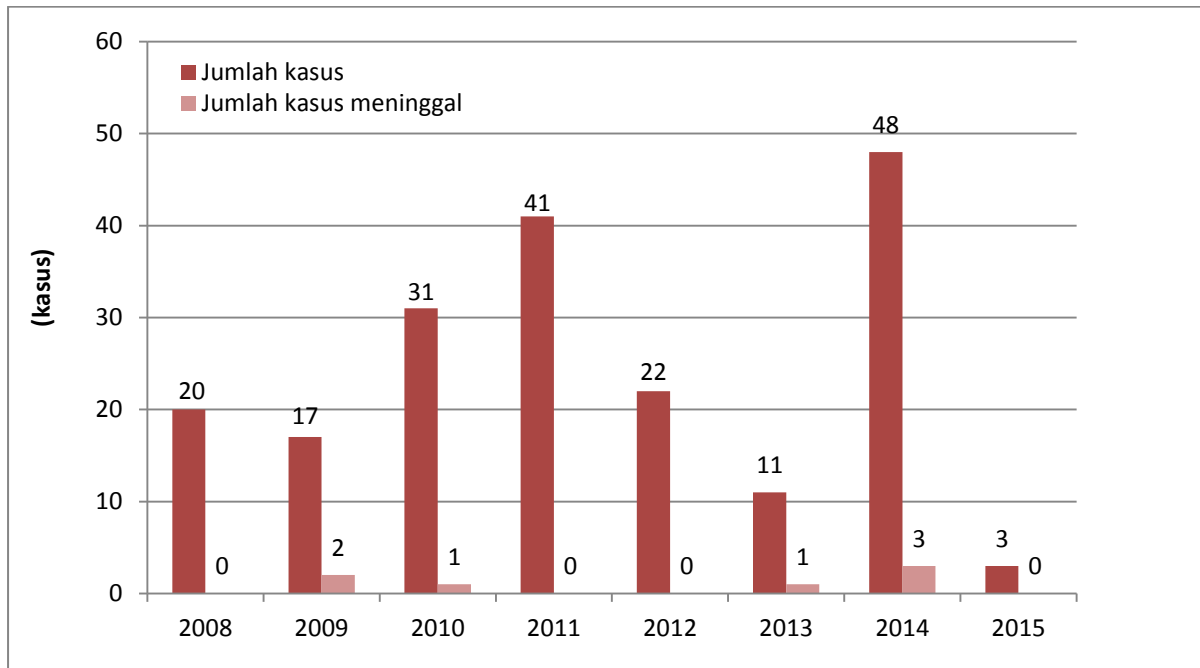
Penyakit antraks disebabkan oleh kuman antraks (*Bacillus anthracis*). Kuman ini dapat membentuk spora yang tahan terhadap perubahan lingkungan dan dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama didalam tanah, sehingga sulit dimusnahkan. Sumber penularan antraks yaitu hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, kambing dan domba yang terinfeksi *Bacillus anthracis*.

Pada tahun 2015 telah dilaporkan sebanyak 3 kasus antraks (tipe kulit) di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan tanpa kejadian meninggal (CFR=0%).

Berikut ini digambarkan distribusi kasus antraks selama delapan tahun terakhir.

GAMBAR 6.37

**JUMLAH KASUS DAN CFR ANTRAKS
DI INDONESIA TAHUN 2008-2015**



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

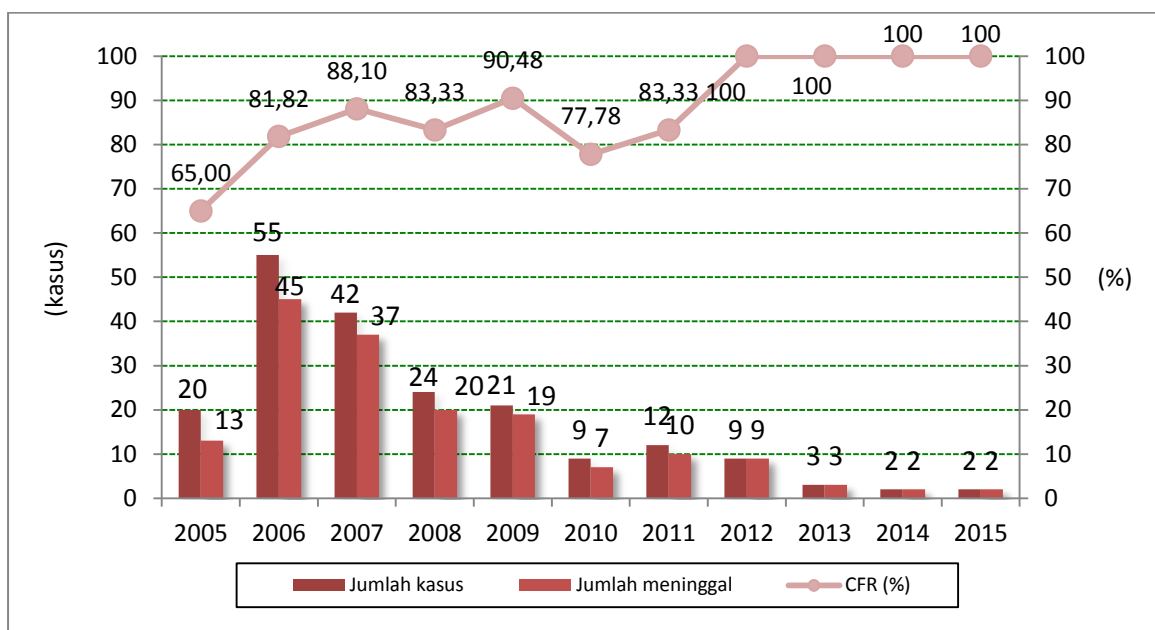
Pengendalian kasus antraks dapat dilakukan dengan peningkatan kegiatan surveilans yang intensif terhadap kasus antraks dengan fokus daerah endemis atau daerah rawan lainnya. Kegiatan surveilans diintensifkan pada hari-hari perayaan agama seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal ataupun perayaan hari besar lainnya dan juga saat dimungkinkan konsumsi daging meningkat.

8. Flu Burung

Pengendalian flu burung yang dilakukan secara terpadu secara signifikan telah berhasil menurunkan jumlah kasus konfirmasi flu burung H5N1 di Indonesia pada tahun 2015. Sejak munculnya penyakit flu burung pertama kali pada tahun 2005, jumlah kasus terus menurun pada periode tahun 2006-2015 dari 55 kasus pada tahun 2006 menjadi dua kasus pada tahun 2015. Namun, keseluruhan kasus konfirmasi flu burung pada tahun 2015 tersebut meninggal (CFR=100%). Gambaran penurunan jumlah kasus konfirmasi flu burung H5N1 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

GAMBAR 6.38

JUMLAH KASUS, KEMATIAN, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) FLU BURUNG DI INDONESIA TAHUN 2005-2015



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Sejak dilaporkan kasus pertama pada tahun 2005, penyebaran kasus flu burung H5N1 pada manusia telah terjadi secara sporadis di 15 provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, dan Sulawesi Selatan. Secara kumulatif, jumlah kasus tertinggi ditemukan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 53 kasus, Jawa Barat sebesar 51 kasus, dan Banten sebesar 34 kasus.

Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh tim terpadu (Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan) terdapat beberapa hal yang mempengaruhi tingginya CFR pada tahun 2014 yaitu:

1. Keterlambatan deteksi dini ;
2. Keterlambatan pemberian Oseltamivir;
3. Sifat virus yang mudah bermutasi;
4. Kurangnya kewaspadaan di masyarakat terhadap bahaya Flu Burung.

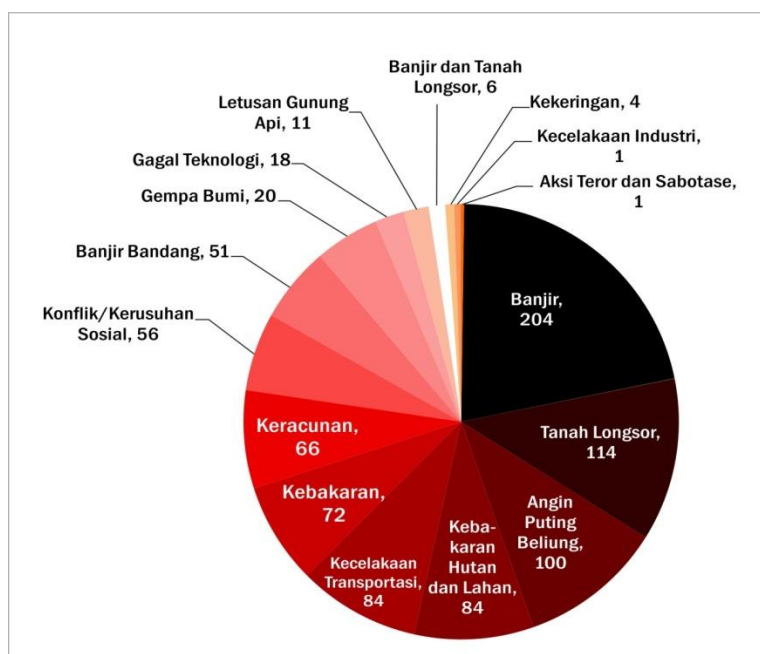
C. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA

Menurut UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dikategorikan menjadi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Di Indonesia selama tahun 2015 tercatat 937 kejadian bencana yang menimbulkan krisis kesehatan terdiri dari 17 jenis bencana. Pada tahun 2015, banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi dan provinsi yang paling banyak terkena. Frekuensi banjir sebanyak 204 kejadian (22%) dan meliputi 28 provinsi. Jumlah total korban meninggal akibat banjir sebanyak 35 orang, luka berat/rawat inap sebanyak 40 orang, luka ringan/rawat jalan sebanyak 24.292 orang serta 3 orang meninggal. Adapun jumlah pengungsi akibat kebakaran mencapai 191.105 orang. Berikut ini gambaran frekuensi kejadian bencana selama tahun 2015.

GAMBAR 6.39

FREKUENSI KEJADIAN BENCANA MENURUT JENISNYA DI INDONESIA TAHUN 2015

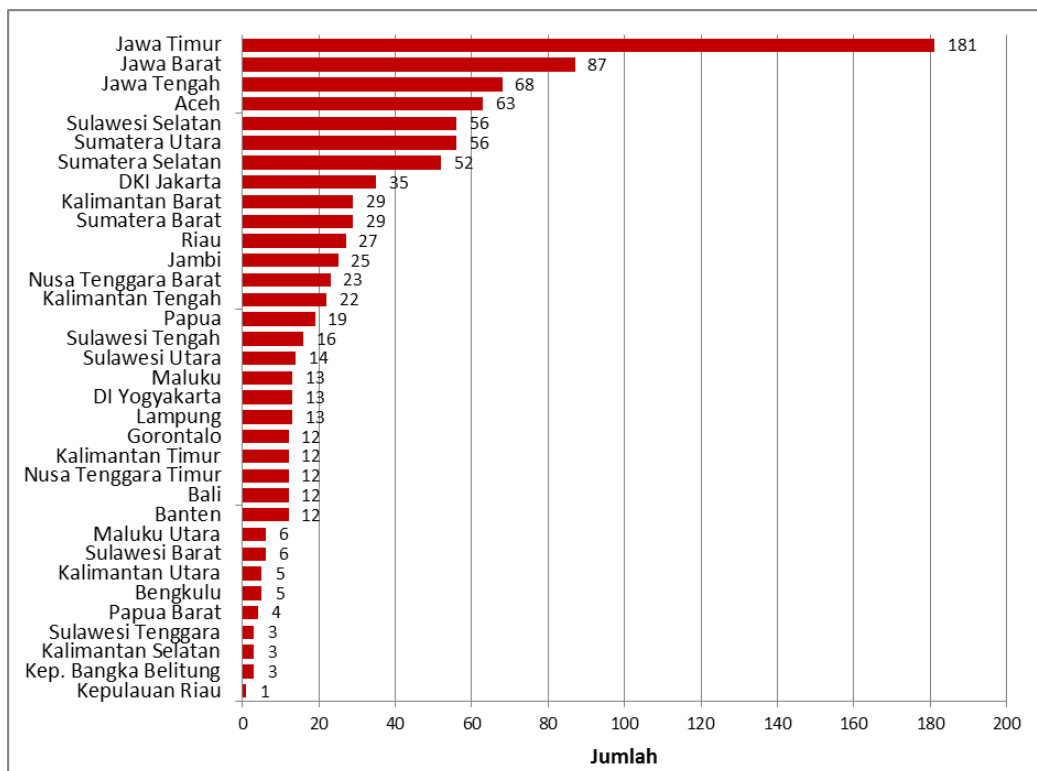


Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2016

Korban meninggal dunia paling banyak disebabkan oleh kejadian kecelakaan transportasi dengan jumlah 475 jiwa dari 893 kematian (53%). Jumlah pengungsi terbanyak diakibatkan banjir yaitu sebanyak 75% dari total seluruh pengungsi. Rincian jumlah korban dan pengungsi berdasarkan jenis bencana dan keadaan korban selama tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 6.29.

GAMBAR 6.40

**FREKUENSI KEJADIAN BENCANA MENURUT PROVINSI
DI INDONESIA TAHUN 2015**



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2016

Menurut provinsi, kejadian bencana paling banyak terjadi di Jawa Timur dengan kejadian sebanyak 181 (19%). Sedangkan Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan kejadian bencana paling sedikit yang dicatat oleh Pusat Krisis Kesehatan, yaitu hanya 1 kejadian dan tanpa terdapat korban meninggal.



BAB VII

KESEHATAN LINGKUNGAN



Bab VII

KESEHATAN LINGKUNGAN

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, di antaranya limbah (cair, padat, dan gas), sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Sedangkan menurut WHO, kesehatan lingkungan meliputi seluruh faktor fisik, kimia, dan biologi dari luar tubuh manusia dan segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan kontrol dari kesehatan lingkungan berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, peranan lingkungan sangat penting di samping faktor lain seperti kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat. Untuk itu program penyehatan lingkungan berupa penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, higiene sanitasi pangan dan pengamanan limbah udara dan radiasi melalui kegiatan teknis penyehatan, pengamanan dan pengendalian pada media air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan dan vektor atau binatang pembawa penyakit sangat diperlukan untuk percepatan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat.

A. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang dimaksud dengan STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam pelaksanaan STBM berpedoman pada lima pilar yaitu:

1. Stop buang air besar sembarangan (BABS).
2. Cuci tangan pakai sabun.
3. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga.
4. Pengamanan sampah rumah tangga.
5. Pengamanan limbah cair rumah tangga.

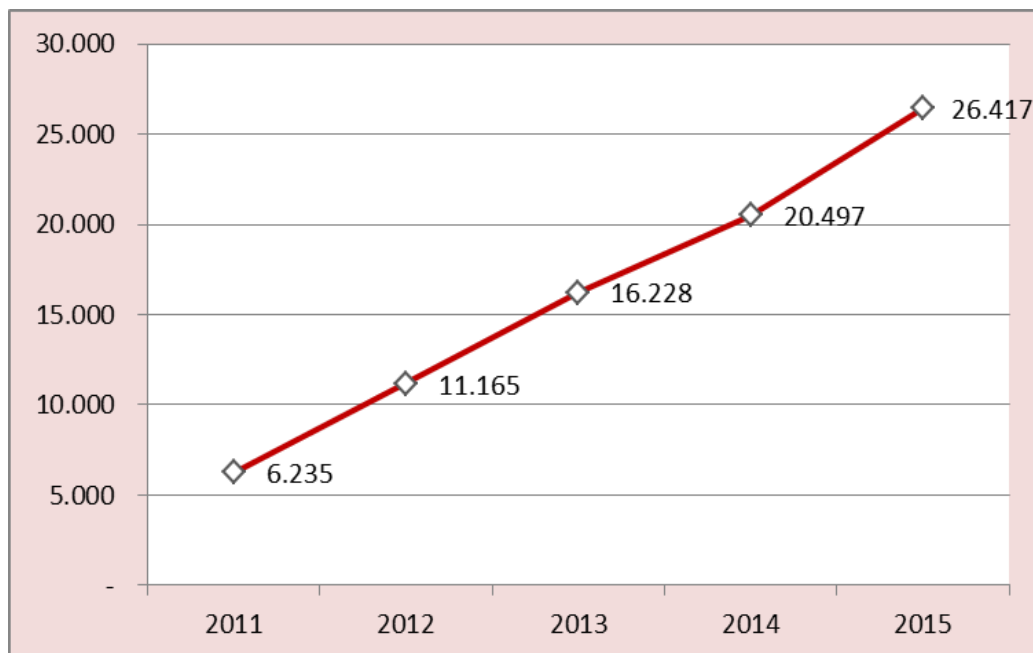
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah jumlah kumulatif desa/kelurahan yg terverifikasi melaksanakan STBM. Jumlah kumulatif desa/kelurahan yg terverifikasi sebagai desa melaksanakan STBM dengan memenuhi kriteria :

1. Telah dilakukan pemicuan STBM.
2. Telah memiliki *natural leader*.
3. Telah memiliki Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Jumlah desa/kelurahan STBM mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2011-2015, dapat dilihat pada Gambar 7.1 berikut:

GAMBAR 7.1

JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2011 - 2015



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Pada tahun 2015 jumlah desa STBM mencapai 26.417 desa/kelurahan, mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 yang sebanyak 25.000 desa/kelurahan. Berdasarkan jumlah desa/kelurahan, yang terbanyak yaitu Provinsi Jawa Timur sebanyak 5.197 desa/kelurahan, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

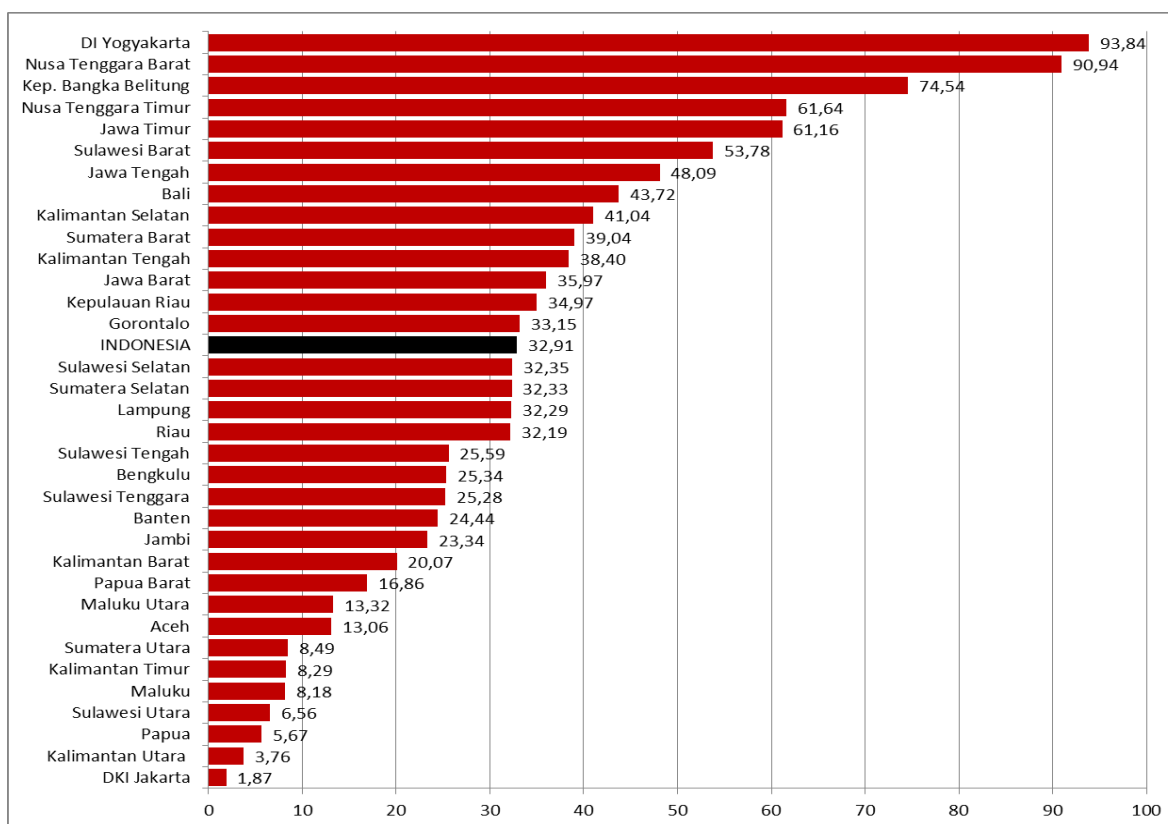
Rata-rata capaian tiap provinsi tahun 2015 sebesar 32,63%. Baik secara kumulatif maupun proporsi, 7 provinsi dengan realisasi desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tertinggi yaitu Provinsi Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Hal ini terjadi disebabkan provinsi-provinsi tersebut termasuk dalam 13 provinsi prioritas pertama dalam pengintervensian karena memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Selain itu dalam hal pemetaan wilayah dan penduduk juga masuk dalam klasifikasi mudah sehingga menjadi lokasi pengintervensian prioritas pertama.

Adanya dukungan yang besar dari pemerintah pun tak lepas dari keberhasilan pencapaian tersebut, seperti diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 440/11841/031/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Program STBM yang ditindaklanjuti dengan instruksi Bupati se-provinsi Jawa Timur, adanya kecukupan alokasi anggaran, bersinergi dengan lintas sektor, lintas program serta mitra terkait termasuk lembaga swadaya masyarakat serta perguruan tinggi, terbangunnya komitmen di tingkat kabupaten/kota untuk menindaklanjuti kebijakan dan komitmen di tingkat provinsi, sosialisasi yang intensif tentang STBM termasuk jamban murah melalui kegiatan wirausaha sanitasi, melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat dan terus menerus, melaksanakan kegiatan yang memiliki daya ungkit besar misalnya gotong royong. Pemda yang juga sangat mendukung yaitu NTB, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur NTB tentang Buang Air Besar Sembarangan No (BASNO) yang dilengkapi dengan adanya sanksi bagi siapa yang melanggarnya. Adanya bantuan kemudahan dari lintas sektor seperti perbankan dalam hal pemberian pinjaman untuk wirausahawan sanitasi sehingga masyarakat mudah mendapatkan kebutuhannya.

Jika dibandingkan dengan total desa dan kelurahan di setiap provinsi, maka persentase tertinggi desa yang melaksanakan STBM yaitu Provinsi DI Yogyakarta (93,84%) dan Nusa Tenggara Barat (90,94%). Sedangkan persentase terendah desa yang melaksanakan STBM yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,87% dan Kalimantan Utara sebesar 3,76% (Gambar 7.2). Rincian lengkap tentang persentase desa yang melaksanakan STBM tahun 2013-2015 dapat dilihat pada Lampiran 7.1.

GAMBAR 7.2

PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2015



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Dalam upaya pencapaian ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi di antaranya proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara instan, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan pendampingan petugas kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan. Adanya disparitas capaian desa/kelurahan melaksanakan STBM sebagai akibat dari belum semua petugas yang terkait melaporkan hasil kegiatannya. Dari 9.738 tenaga kesehatan lingkungan yang terdaftar baru sebanyak 4.285 tenaga kesehatan lingkungan (44%) yang melaksanakan monitoring kegiatan STBM sampai dengan tahun 2015.

Untuk mengatasi kendala ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti melakukan advokasi dan sosialisasi secara terpadu bersama lintas program/sector serta mitra terkait (Promkes, Poltekes, Bappenas, Kemendagri, Kemen PU) dalam rangka internalisasi program di provinsi/kabupaten/kota. Meningkatkan dan memperkuat strategi kemitraan pemerintah-swasta (KPS) dalam rangka efektivitas intervensi kegiatan. Peningkatan dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi STBM menggunakan sistem monev berbasis web dan SMS gateway dalam skala nasional.

B. Tatanan Kawasan Sehat

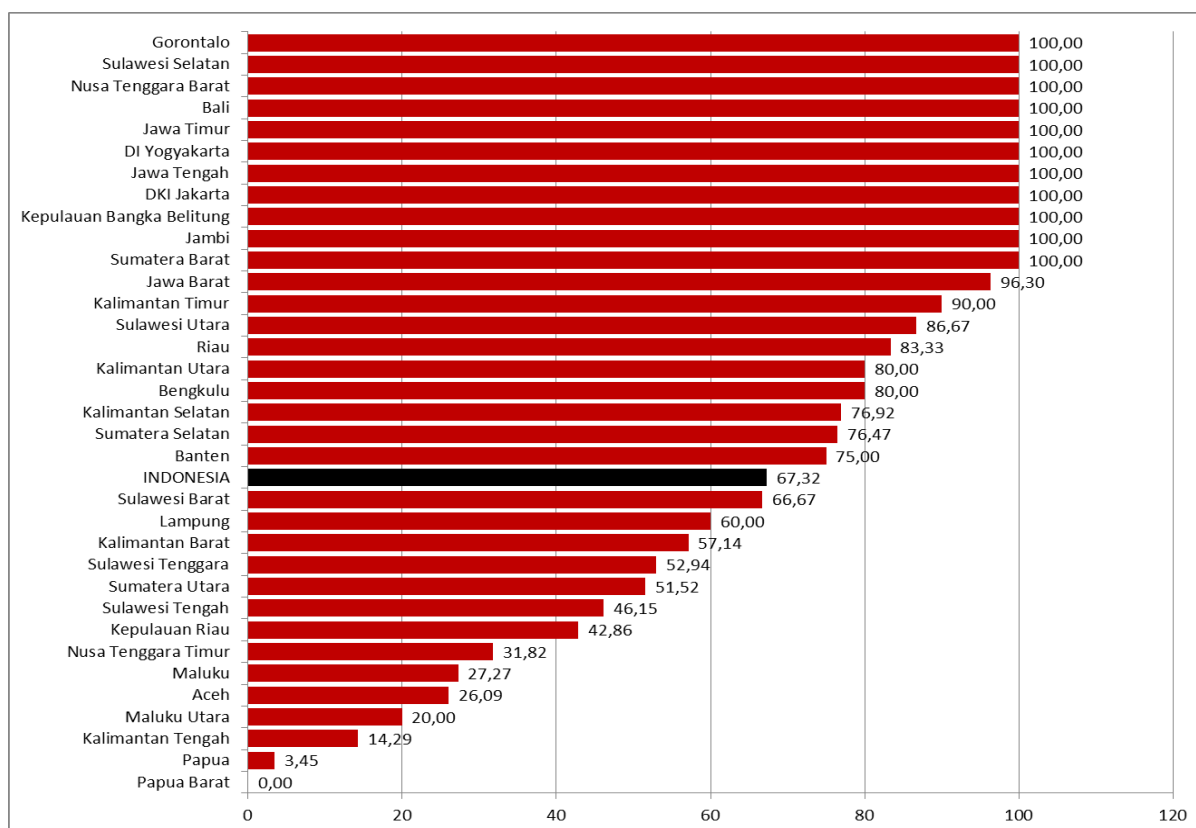
Tatanan Kawasan Sehat (TKS) merupakan salah satu indikator pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan dalam Renstra 2015-2019. Dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat adalah juga merupakan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam mewujudkan kabupaten/kota sehat berbasis masyarakat yang berkesinambungan, melalui forum yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang menyelenggarakan kawasan sehat adalah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pendekatan Kabupaten/Kota Sehat dengan membentuk Tim Pembina dan Forum Kab/Kota Sehat yang menerapkan minimal 2 Tatanan dari 9 Tatanan Kawasan Sehat yaitu : (1) Kawasan Permukiman, Sarana, dan Prasarana Umum, (2) Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi, (3) Kawasan Pertambangan Sehat, (4) Kawasan Hutan Sehat, (5) Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat, (6) Kawasan Pariwisata Sehat, (7) Ketahanan Pangan dan Gizi, (8) Kehidupan Masyarakat yang Mandiri, (9) Kehidupan Sosial yang Sehat.

Pada tahun 2015, jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program TKS sebanyak 346 kabupaten/kota. Provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah mencapai TKS (100%) sebanyak sebelas provinsi. Terdapat satu provinsi yang kabupaten/kotanya belum menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat yaitu Papua Barat. Rincian lengkap tentang jumlah kabupaten/kota penyelenggara Tatanan Kawasan Sehat tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 7.2.

GAMBAR 7.3

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA TATANAN KAWASAN SEHAT
TAHUN 2015



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Dalam pelaksanaan kegiatan TKS ini, masih terdapat masalah yang dihadapi, di antaranya masih belum sepenuhnya standar indikator pelaksanaan kegiatan per-Tatanan (9 Tatanan) dalam Kabupaten/Kota Sehat, masih sulitnya koordinasi Lintas Sektor Kementerian/Lembaga terkait dalam merespon kerja sama dengan Kemenkes untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat, kurangnya sosialisasi dan komitmen pemda dalam pengambilan keputusan akibat seringnya mutasi kepegawaian di daerah, kurang optimalnya fungsi tim pembina, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Kurangnya advokasi dan sosialisasi kegiatan penyehatan kawasan yang terdiri dari Kabupaten/Kota Sehat, Pasar sehat, pelabuhan sehat dan DTPK di setiap provinsi. Untuk mengatasi masalah tersebut, upaya yang dapat dilakukan yaitu mengembangkan jejaring dengan lintas sektor dan lintas program yang terkait dengan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dan menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Sehat.

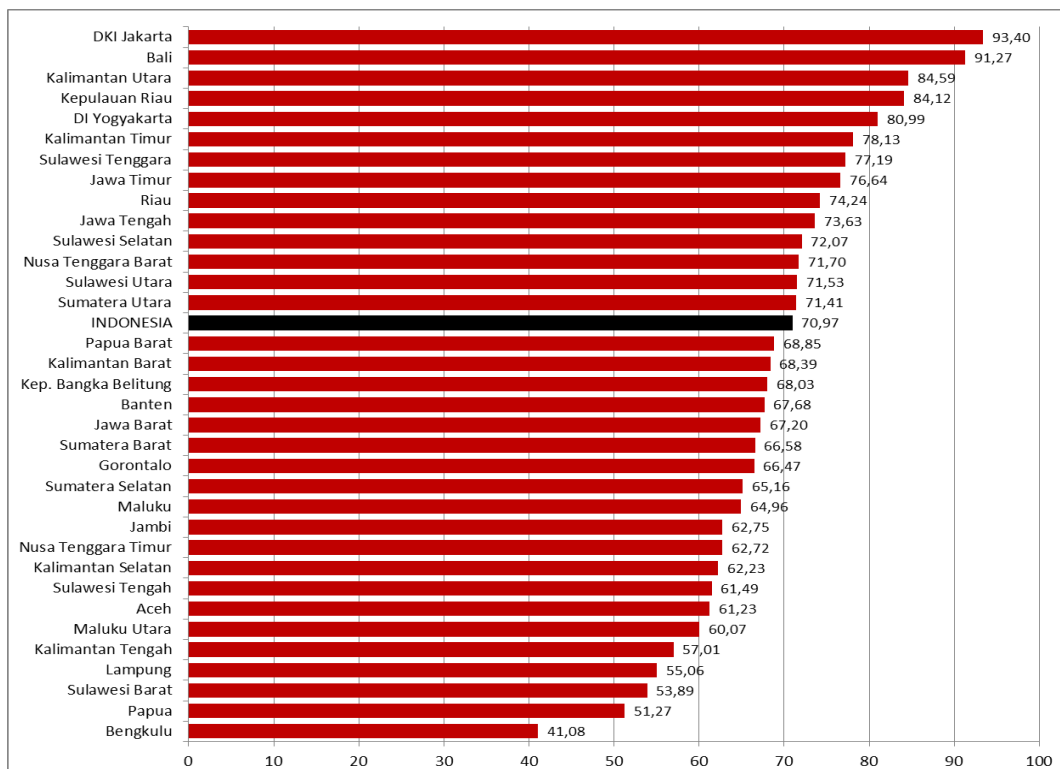
C. Air Minum

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pada Permenkes tersebut juga disebutkan bahwa penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Dalam hal ini penyelenggara air minum di antaranya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang menyelenggarakan penyediaan air minum.

Air minum yang aman bagi kesehatan adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air minum yang sehat adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna serta memiliki total zat padat terlarut, kekeruhan, dan suhu sesuai ambang batas yang ditetapkan. Secara mikrobiologis, air minum yang sehat harus bebas dari bakteri *E.Coli* dan total bakteri koliform. Secara kimiawi, zat kimia yang terkandung dalam air minum seperti besi, aluminium, klor, arsen, dan lainnya harus di bawah ambang batas yang ditentukan. Secara radioaktif, kadar *gross alpha activity* tidak boleh melebihi 0,1 becquerel per liter (Bq/l) dan kadar *gross beta activity* tidak boleh melebihi 1 Bq/l.

GAMBAR 7.4

PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM LAYAK TAHUN 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Kor 2015

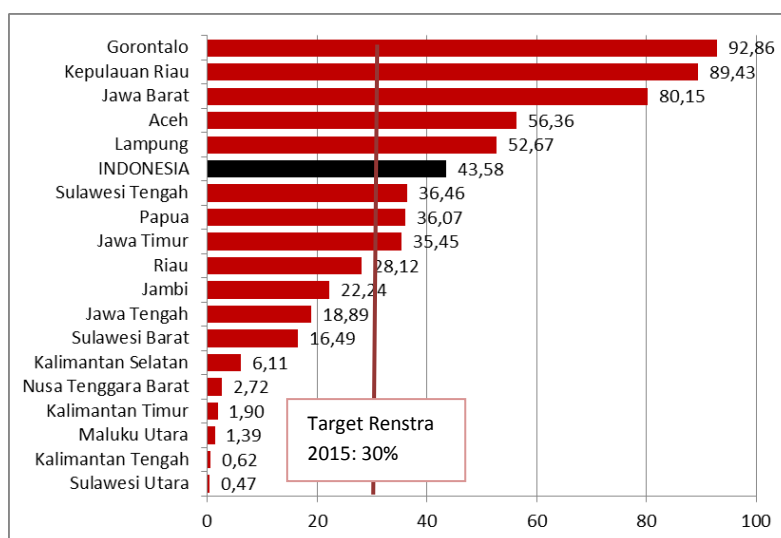
Gambar 7.4 menunjukkan bahwa secara nasional persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak sebesar 70,97%. Provinsi dengan persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak tertinggi yaitu DKI Jakarta (93,40%), Bali (91,27%) dan Kalimantan Utara (84,59%). Sedangkan Provinsi dengan persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak terendah adalah Bengkulu (41,08%), Papua (51,27%) dan Sulawesi Barat (53,89%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 7.3.

Pengawasan kualitas air minum diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana dan Pengawasan Kualitas Air Minum, bahwa pengawasan internal dilakukan oleh penyelenggara air minum komersial dan pengawasan eksternal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pengawasan kualitas air minum adalah penyelenggara air minum yang diawasi kualitas hasil produksinya secara eksternal oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan KKP yang dibuktikan dengan jumlah sampel pengujian kualitas air. Penyelenggara air minum adalah PDAM/BPAM/PT yang terdaftar di Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi); Sarana air minum perpipaan non PDAM; dan Sarana air minum bukan jaringan perpipaan komunal.

Pada tahun 2015, secara nasional dari 234.002 sarana air minum terdapat 101.972 sarana air minum yang diawasi atau sekitar 43,58% (Gambar 7.5). Hasil ini mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 yang sebesar 30% sarana air minum yang dilakukan pengawasan. Menurut provinsi, terdapat delapan provinsi yang sudah memenuhi target Renstra Kemenkes tahun 2015. Namun masih ada enam belas provinsi yang belum dilakukan pengawasan terhadap sarana air minumnya. Rincian lengkap tentang persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 7.4.

GAMBAR 7.5

PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN TAHUN 2015



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Belum optimalnya pelaksanaan pengambilan sampel uji kualitas air minum disebabkan pengawasan kualitas air minum belum menjadi prioritas kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota sehingga dukungan kebijakan dan pendanaan masih minim. Selain itu belum semua kabupaten/kota memiliki laboratorium uji kualitas air minum, peralatan uji kualitas air yang memenuhi standar dan SDM yang kompeten. Peran aktif unit pelaksana teknis (UPT) yaitu Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (B/BTKLPP) dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dalam hal pengawasan, pembinaan, dan koordinasi dengan lintas sektor terutama PDAM juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan uji kualitas air minum.

Untuk mengatasi masalah tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan advokasi dan sosialisasi Permenkes nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Permenkes nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, meningkatkan Kemitraan Pemerintah - Swasta (KPS) serta melibatkan lintas program, lintas sektor dan lembaga Internasional seperti WHO, mendukung ketersediaan peralatan pengawasan kualitas air minum untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota, mengoptimalkan peran UPT (B/BTKLPP), dan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

D. Akses Sanitasi Layak

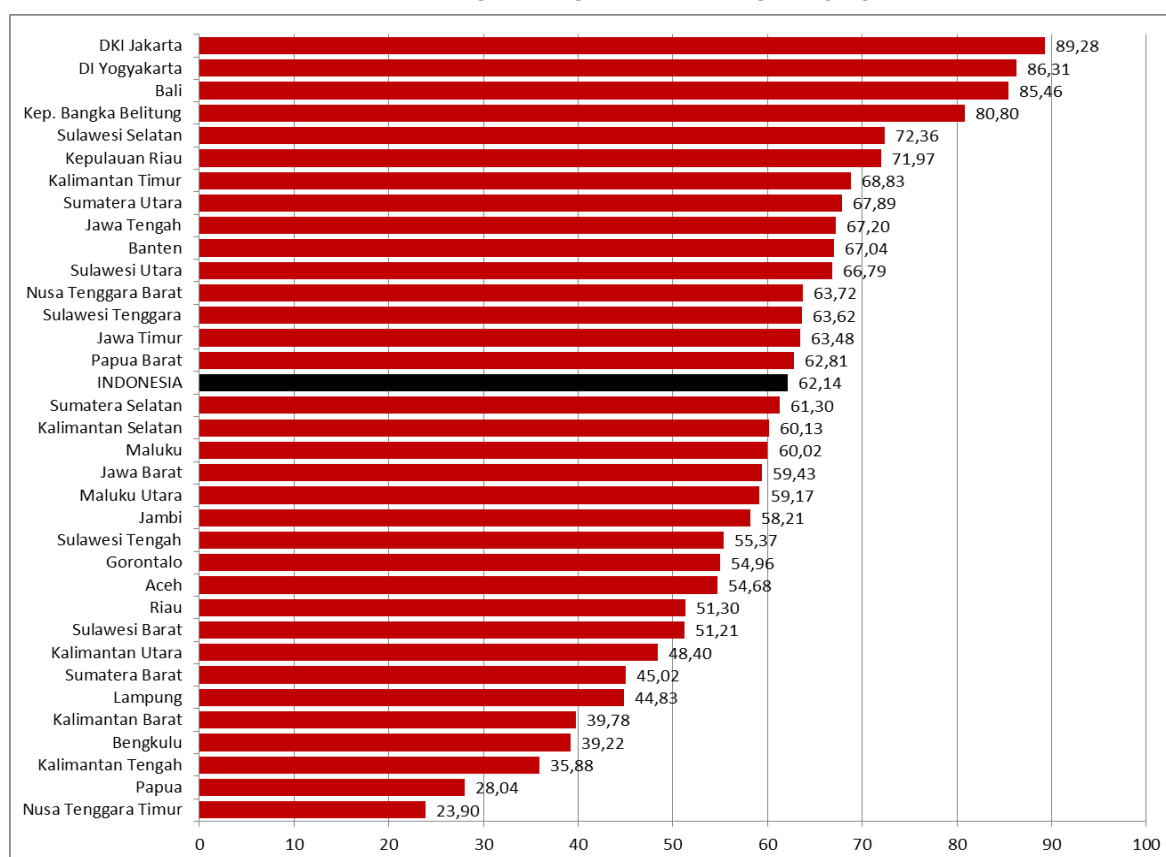
Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Berdasarkan konsep dan definisi MDGs, rumah tangga memiliki akses sanitasi layak apabila fasilitas sanitasi yang digunakan memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tanki septik (*septic tank*)/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri atau bersama. Metode pembuangan tinja yang baik yaitu menggunakan jamban dengan syarat sebagai berikut:

1. Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi.
2. Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur.
3. Tidak boleh terkontaminasi air permukaan.
4. Tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain.
5. Tidak boleh terjadi penanganan tinja segar, atau bila memang benar-benar diperlukan, harus dibatasi seminimal mungkin.
6. Jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang.
7. Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal.

GAMBAR 7.6

**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES
TERHADAP SANITASI LAYAK TAHUN 2015**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Kor 2015

Gambar 7.6 menunjukkan hasil Susenas Kor 2015 mengenai persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Secara nasional, terdapat 62,14% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tertinggi yaitu DKI Jakarta sebesar 89,28%, DI Yogyakarta sebesar 86,31% dan Bali sebesar 85,46%. Sedangkan provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak terendah adalah Nusa Tenggara Timur (23,90%), Papua (28,04%) dan Kalimantan Tengah (35,88%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 7.5.

E. Tempat-Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

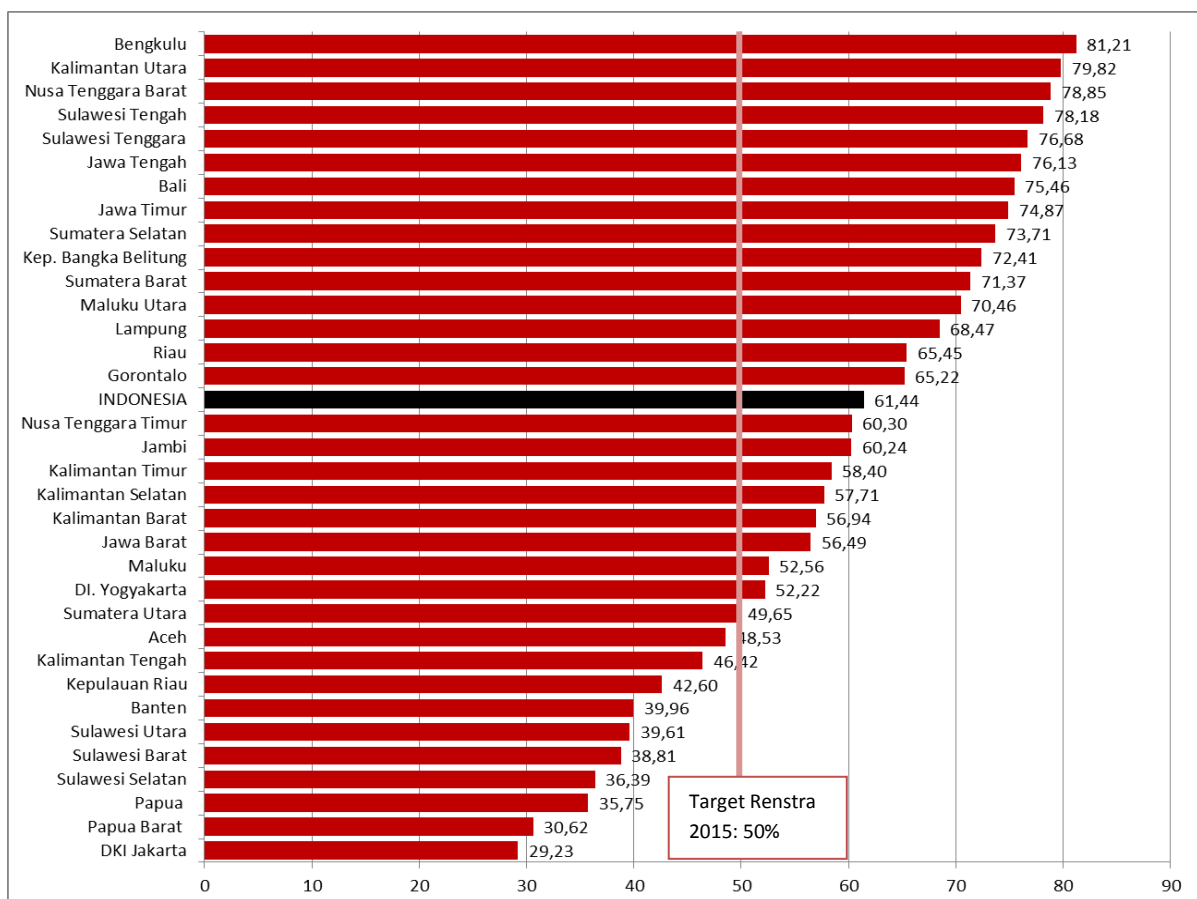
Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah tempat atau sarana umum yang digunakan untuk kegiatan masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan, antara lain pasar rakyat, sekolah, fasyankes, terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, bioskop, hotel dan tempat umum lainnya (minimal wajib mengelola 2 tempat-tempat umum, contoh pasar rakyat dan sekolah).

TTU yang memenuhi syarat kesehatan adalah tempat dan fasilitas umum minimal sarana pendidikan dan pasar rakyat yang memenuhi syarat kesehatan. TTU dinyatakan sehat apabila memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni, dan masyarakat sekitarnya serta memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya masalah kesehatan.

1. Sarana pendidikan dasar yang dimaksud adalah Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) dan yang sederajat milik pemerintah dan swasta yang terintegrasi.
2. Pasar rakyat yang dimaksud adalah pasar yang berlokasi permanen, ada pengelola, sebagian besar barang yang diperjual belikan yaitu kebutuhan dasar sehari-hari dengan fasilitas infrastruktur sederhana, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

GAMBAR 7.7

PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN TAHUN 2015



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Pada Gambar 7.7, secara nasional TTU yang telah memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2015 sebesar 61,44% telah mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan

2015 yang sebesar 50%. Namun cenderung menurun dibandingkan capaian tahun 2014 yang sebesar 68,24%. Provinsi dengan persentase tertinggi yaitu Bengkulu dengan persentase 81,21%. Provinsi dengan persentase terendah yaitu DKI Jakarta (29,23%). Rincian lengkap tentang persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 7.6.

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan meningkatkan jumlah TTU yang memenuhi syarat diantaranya anggaran daerah untuk program kesehatan lingkungan masih rendah, belum semua daerah (kabupaten/kota termasuk puskesmas) memiliki peralatan pengukuran parameter kualitas lingkungan yang sesuai, pendataan ulang di daerah untuk akurasi data yang tercatat, tumpang tindih regulasi antar kementerian/lembaga, yang belum sinergi dan masih belum optimalnya koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor serta institusi terkait, baik di pusat maupun daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan TTU di antaranya melakukan advokasi dan sosialisasi secara terpadu bersama lintas program di lingkungan Kemenkes), dan lintas sektor (Kemendagri, Kemenparekraf, Kemendikbud dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah/SKPD terkait, serta institusi (perguruan tinggi, HAKLI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia/PHRI, dan lainnya), serta mitra yang terkait lainnya baik di pusat dan daerah, melengkapi daerah dengan peralatan pengukuran parameter kualitas lingkungan, meningkatkan dan memperkuat strategi kemitraan, dan meningkatkan kapasitas pemilik/penyelenggara TTU agar ikut serta dalam peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.

F. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Tempat pengelolaan makanan (TPM) adalah usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasaboga atau katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan. TPM dinyatakan sehat sesuai dengan Kepmenkes Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.

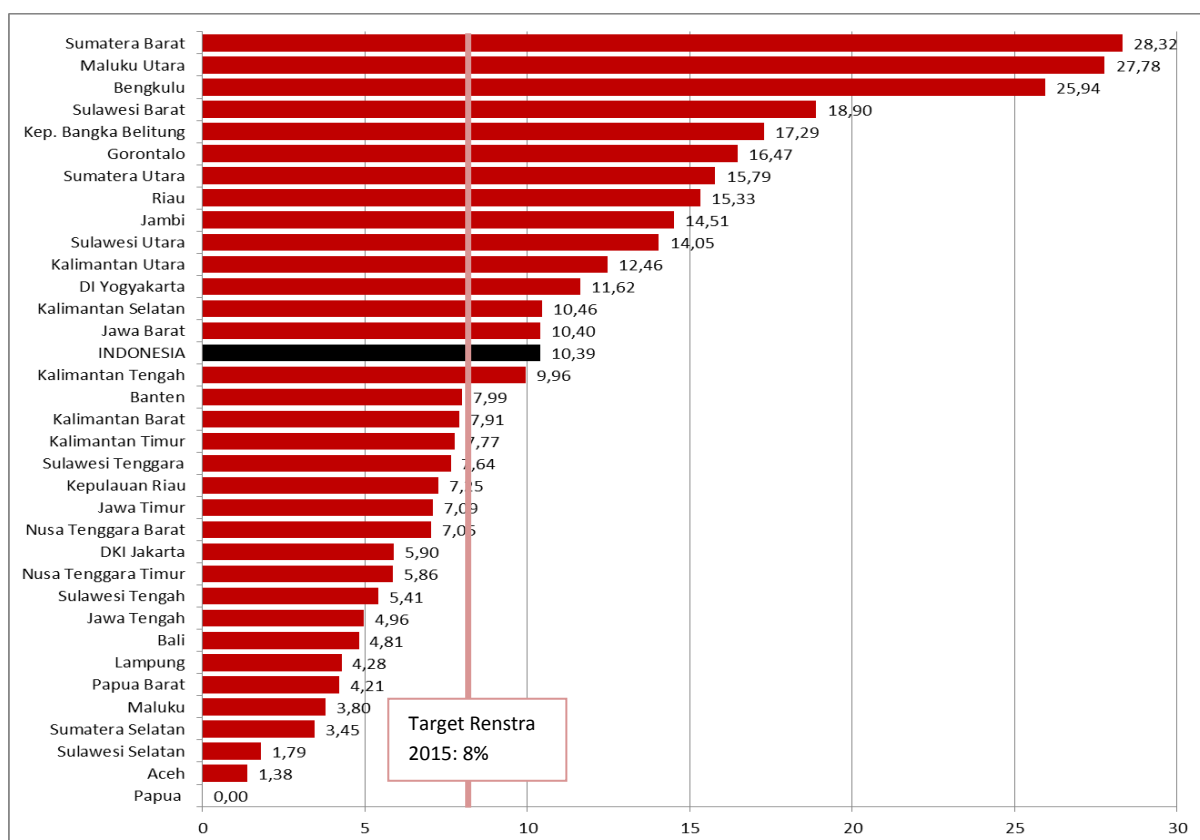
Berdasarkan Kepmenkes Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran, persyaratan higiene sanitasi yang harus dipenuhi meliputi:

1. Persyaratan lokasi dan bangunan.
2. Persyaratan fasilitas sanitasi.
3. Persyaratan dapur, rumah makan, dan gudang makanan.
4. Persyaratan bahan makanan dan makanan jadi.
5. Persyaratan pengolahan makanan.
6. Persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi.
7. Persyaratan penyajian makanan jadi.
8. Persyaratan peralatan yang digunakan.

Pelaksanaan kegiatan higiene sanitasi pangan merupakan salah satu aspek dalam menjaga keamanan pangan yang harus dilaksanakan secara terstruktur dan terukur dengan kegiatan, sasaran dan ukuran kinerja yang jelas, salah satunya dengan mewujudkan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan. TPM adalah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) siap saji yang terdiri dari Rumah Makan/Restoran, Jasa Boga, Depot Air Minum, Sentra Makanan Jajanan, Kantin Sekolah. TPM yang memenuhi syarat kesehatan adalah TPM yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi yang dibuktikan dengan sertifikat laik higiene sanitasi.

GAMBAR 7.8

PERSENTASE TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN TAHUN 2015



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Gambar 7.8 menunjukkan bahwa persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan secara nasional 10,39%. Hasil ini sudah memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 yang sebesar 8%. Provinsi dengan persentase tertinggi TPM yang memenuhi syarat kesehatan yaitu Sumatera Barat (28,32%), Maluku Utara (27,78%) dan Bengkulu (25,94%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah TPM yang memenuhi syarat kesehatan yaitu Aceh (1,38%), Sulawesi Selatan (1,79%) dan Sumatera Selatan (3,45%).

Rincian lengkap tentang persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 7.7.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah TPM yang memenuhi syarat di antaranya dengan memberikan dukungan aspek legal untuk operasionalisasi pembinaan dan pengawasan TPM dan Tempat Pengolahan Pangan (TPP), meningkatkan jejaring kemitraan, meningkatkan kapasitas SDM, menyediakan sarana dan prasarana seperti media KIE tentang higiene sanitasi pangan dan alat deteksi cepat sistem kewaspadaan dini KLB keracunan pangan, menyediakan pengelolaan data dan informasi yang *up to date* dan *real time* dengan e-monev Higiene Sanitasi Pangan (HSP), mengembangkan daerah intervensi kabupaten/kota yang berkomitmen untuk pelaksanaan pembinaan dan pengendalian TPM terstandar, dan memfasilitasi tugas perbantuan sentra pangan jajanan di kabupaten/kota.

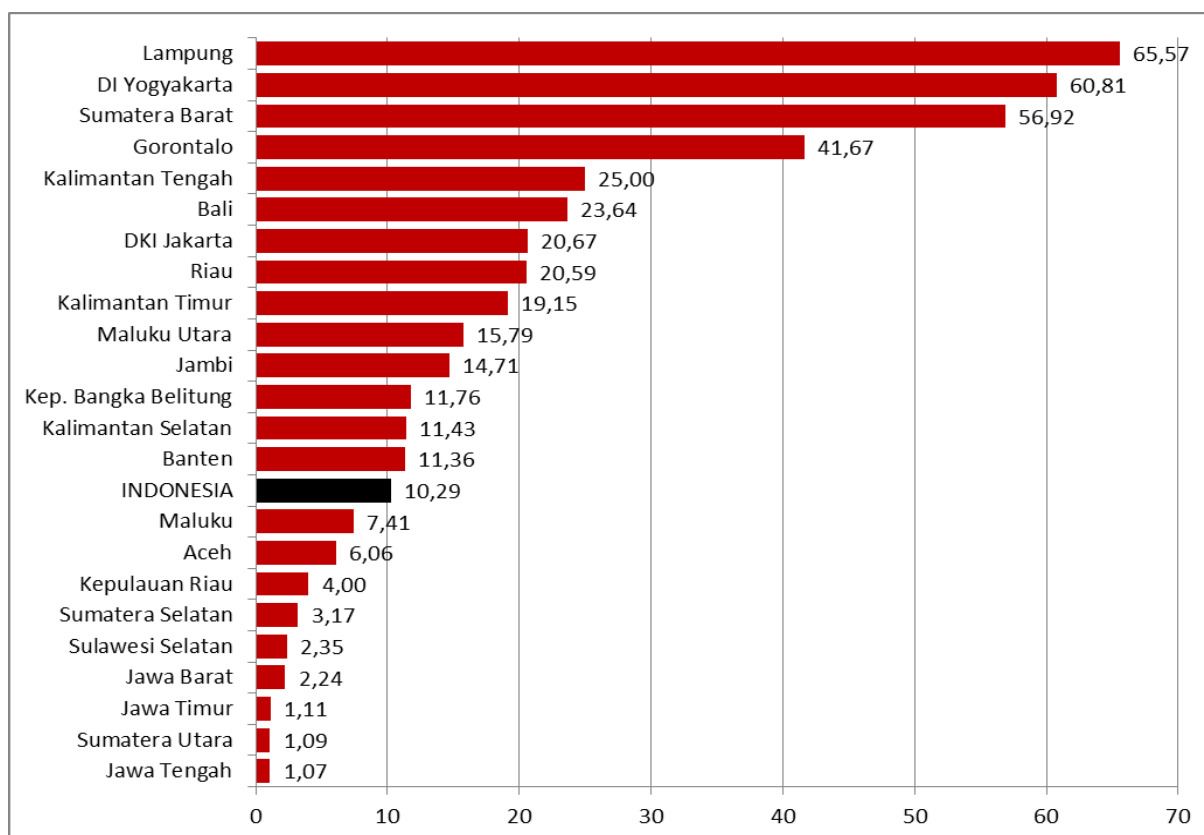
G. Pengelolaan Limbah Medis

Berdasarkan lampiran dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, limbah medis merupakan semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat tinggi. Limbah cair adalah semua buangan air termasuk tinja yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radiaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran seperti insinerator, dapur, perlengkapan generator, anestesi, dan pembuatan obat sitotoksik.

Pengelolaan limbah medis tentunya berbeda dengan limbah domestik atau limbah rumah tangga. Penempatan limbah medis dilakukan pada wadah yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia, radioaktif, dan volumenya. Limbah medis yang telah terkumpul tidak diperbolehkan untuk langsung dibuang ke tempat pembuangan limbah domestik tetapi harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Untuk limbah medis yang berbentuk gas dilengkapi alat pereduksi emisi gas dan debu pada proses pembuangannya. Selain itu perlu dilakukan pula upaya minimalisasi limbah yaitu dengan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*). Penghijauan juga baik dilakukan untuk mengurangi polusi dari limbah yang berbentuk gas dan untuk menyerap debu.

GAMBAR 7.9

**PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN
LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR TAHUN 2015**



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Pada Gambar 7.9, cakupan rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar pada tahun 2015 di Indonesia sebesar 10,29%. Ada 11 provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, NTT, NTB dan Bengkulu yang seluruh rumah sakit di dalamnya belum melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar. Rincian lengkap tentang persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 7.8.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah medis, seperti masih sedikit fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar, banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan alat kesehatan yang bermerkuri, hambatan teknis dan perizinan dalam pengolahan limbah medis.

Oleh karena itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah di atas, di antaranya dengan:

1. Mempermudah proses perizinan pengolah limbah terutama dengan metode non insinerasi.
2. Mengadakan pelatihan tingkat internasional bagi Kementerian Kesehatan dan RSUP.

3. Menyusun peraturan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) fasilitas pelayanan kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
4. Mengembangkan sistem pengumpulan data dan informasi elektronik serta manajemen data sebagai bahan penentu kebijakan.
5. Mencetak media poster pengamanan limbah medis.



LAMPIRAN



Lampiran 1.1

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2015

No	Provinsi	Pembagian Wilayah					
		Kabupaten	Kota	Kabupaten + Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	18	5	23	289	0	6.474
2	Sumatera Utara	25	8	33	436	691	5.389
3	Sumatera Barat	12	7	19	179	259	880
4	Riau	10	2	12	163	243	1.592
5	Jambi	9	2	11	138	163	1.398
6	Sumatera Selatan	13	4	17	231	377	2.817
7	Bengkulu	9	1	10	126	172	1.341
8	Lampung	13	2	15	225	205	2.435
9	Kepulauan Bangka Belitung	6	1	7	47	78	309
10	Kepulauan Riau	5	2	7	66	141	275
11	DKI Jakarta	1	5	6	44	267	0
12	Jawa Barat	18	9	27	626	641	5.319
13	Jawa Tengah	29	6	35	573	750	7.809
14	DI Yogyakarta	4	1	5	78	46	392
15	Jawa Timur	29	9	38	664	776	7.723
16	Banten	4	4	8	155	313	1.238
17	Bali	8	1	9	57	80	636
18	Nusa Tenggara Barat	8	2	10	116	142	995
19	Nusa Tenggara Timur	21	1	22	306	318	2.950
20	Kalimantan Barat	12	2	14	174	89	1.908
21	Kalimantan Tengah	13	1	14	136	138	1.434
22	Kalimantan Selatan	11	2	13	152	143	1.864
23	Kalimantan Timur	7	3	10	103	196	833
24	Kalimantan Utara	4	1	5	50	35	447
25	Sulawesi Utara	11	4	15	167	332	1.490
26	Sulawesi Tengah	12	1	13	174	168	1.839
27	Sulawesi Selatan	21	3	24	306	785	2.253
28	Sulawesi Tenggara	15	2	17	209	377	1.820
29	Gorontalo	5	1	6	77	72	657
30	Sulawesi Barat	6	0	6	69	71	576
31	Maluku	9	2	11	118	33	1.191
32	Maluku Utara	8	2	10	113	117	1.063
33	Papua Barat	12	1	13	203	87	1.628
34	Papua	28	1	29	524	107	5.118
	Indonesia	416	98	514	7.094	8.412	74.093

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015

Lampiran 1.2

ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN RASIO JENIS KELAMIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2015

No	Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	2.497.491	2.504.462	5.001.953	100
2	Sumatera Utara	6.954.552	6.983.245	13.937.797	100
3	Sumatera Barat	2.584.192	2.612.097	5.196.289	99
4	Riau	3.257.561	3.086.841	6.344.402	106
5	Jambi	1.736.049	1.666.003	3.402.052	104
6	Sumatera Selatan	4.092.177	3.960.138	8.052.315	103
7	Bengkulu	956.265	918.679	1.874.944	104
8	Lampung	4.162.437	3.954.831	8.117.268	105
9	Kepulauan Bangka Belitung	713.223	659.590	1.372.813	108
10	Kepulauan Riau	1.007.979	965.064	1.973.043	104
11	DKI Jakarta	5.115.357	5.062.567	10.177.924	101
12	Jawa Barat	23.680.927	23.028.642	46.709.569	103
13	Jawa Tengah	16.750.898	17.023.243	33.774.141	98
14	DI Yogyakarta	1.818.765	1.860.411	3.679.176	98
15	Jawa Timur	19.172.610	19.674.951	38.847.561	97
16	Banten	6.097.184	5.858.059	11.955.243	104
17	Bali	2.091.005	2.061.828	4.152.833	101
18	Nusa Tenggara Barat	2.345.811	2.489.766	4.835.577	94
19	Nusa Tenggara Timur	2.536.872	2.583.189	5.120.061	98
20	Kalimantan Barat	2.439.892	2.349.682	4.789.574	104
21	Kalimantan Tengah	1.302.796	1.192.239	2.495.035	109
22	Kalimantan Selatan	2.021.963	1.967.830	3.989.793	103
23	Kalimantan Timur	1.797.297	1.629.341	3.426.638	110
24	Kalimantan Utara	340.811	301.125	641.936	113
25	Sulawesi Utara	1.230.810	1.181.308	2.412.118	104
26	Sulawesi Tengah	1.469.626	1.407.063	2.876.689	104
27	Sulawesi Selatan	4.160.975	4.359.329	8.520.304	95
28	Sulawesi Tenggara	1.256.056	1.243.484	2.499.540	101
29	Gorontalo	567.695	565.542	1.133.237	100
30	Sulawesi Barat	643.118	639.044	1.282.162	101
31	Maluku	850.637	835.832	1.686.469	102
32	Maluku Utara	593.197	569.148	1.162.345	104
33	Papua Barat	459.271	412.239	871.510	111
34	Papua	1.661.219	1.488.156	3.149.375	112
	Indonesia	128.366.718	127.094.968	255.461.686	101,0

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemendes RI, 2015

Lampiran 1.3

ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2015

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0-4	12.273.316	11.792.190	24.065.506
2	5-9	11.974.377	11.355.980	23.330.357
3	10-14	11.507.227	10.954.316	22.461.543
4	15-19	11.289.036	10.806.354	22.095.390
5	20-24	10.829.314	10.618.554	21.447.868
6	25-29	10.455.522	10.354.892	20.810.414
7	30-34	10.169.165	10.279.152	20.448.317
8	35-39	9.893.966	9.922.175	19.816.141
9	40-44	9.195.435	9.099.707	18.295.142
10	45-49	8.152.079	8.114.449	16.266.528
11	50-54	6.865.710	6.900.791	13.766.501
12	55-59	5.527.072	5.445.581	10.972.653
13	60-64	4.017.494	3.937.840	7.955.334
14	65-69	2.643.601	2.845.978	5.489.579
15	70-74	1.759.184	2.092.768	3.851.952
16	75+	1.814.220	2.574.241	4.388.461
Jumlah		128.366.718	127.094.968	255.461.686

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 1.4

ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, LUAS WILAYAH DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2015

No	Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Total	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	2.497.491,00	2.504.462,00	5.001.953,00	57.956,00	86,31
2	Sumatera Utara	6.954.552,00	6.983.245,00	13.937.797,00	72.981,23	190,98
3	Sumatera Barat	2.584.192,00	2.612.097,00	5.196.289,00	42.012,89	123,68
4	Riau	3.257.561,00	3.086.841,00	6.344.402,00	87.023,66	72,90
5	Jambi	1.736.049,00	1.666.003,00	3.402.052,00	50.058,16	67,96
6	Sumatera Selatan	4.092.177,00	3.960.138,00	8.052.315,00	91.592,43	87,91
7	Bengkulu	956.265,00	918.679,00	1.874.944,00	19.919,33	94,13
8	Lampung	4.162.437,00	3.954.831,00	8.117.268,00	34.623,80	234,44
9	Kepulauan Bangka Belitung	713.223,00	659.590,00	1.372.813,00	16.424,06	83,59
10	Kepulauan Riau	1.007.979,00	965.064,00	1.973.043,00	8.201,72	240,56
11	DKI Jakarta	5.115.357,00	5.062.567,00	10.177.924,00	664,01	15.327,97
12	Jawa Barat	23.680.927,00	23.028.642,00	46.709.569,00	35.377,76	1.320,31
13	Jawa Tengah	16.750.898,00	17.023.243,00	33.774.141,00	32.800,69	1.029,68
14	DI Yogyakarta	1.818.765,00	1.860.411,00	3.679.176,00	3.133,15	1.174,27
15	Jawa Timur	19.172.610,00	19.674.951,00	38.847.561,00	47.799,75	812,71
16	Banten	6.097.184,00	5.858.059,00	11.955.243,00	9.662,92	1.237,23
17	Bali	2.091.005,00	2.061.828,00	4.152.833,00	5.780,06	718,48
18	Nusa Tenggara Barat	2.345.811,00	2.489.766,00	4.835.577,00	18.572,32	260,36
19	Nusa Tenggara Timur	2.536.872,00	2.583.189,00	5.120.061,00	48.718,10	105,10
20	Kalimantan Barat	2.439.892,00	2.349.682,00	4.789.574,00	147.307,00	32,51
21	Kalimantan Tengah	1.302.796,00	1.192.239,00	2.495.035,00	153.564,50	16,25
22	Kalimantan Selatan	2.021.963,00	1.967.830,00	3.989.793,00	38.744,23	102,98
23	Kalimantan Timur	1.797.297,00	1.629.341,00	3.426.638,00	129.066,64	26,55
24	Kalimantan Utara	340.811,00	301.125,00	641.936,00	75.467,70	8,51
25	Sulawesi Utara	1.230.810,00	1.181.308,00	2.412.118,00	13.851,64	174,14
26	Sulawesi Tengah	1.469.626,00	1.407.063,00	2.876.689,00	61.841,29	46,52
27	Sulawesi Selatan	4.160.975,00	4.359.329,00	8.520.304,00	46.717,48	182,38
28	Sulawesi Tenggara	1.256.056,00	1.243.484,00	2.499.540,00	38.067,70	65,66
29	Gorontalo	567.695,00	565.542,00	1.133.237,00	11.257,07	100,67
30	Sulawesi Barat	643.118,00	639.044,00	1.282.162,00	16.787,18	76,38
31	Maluku	850.637,00	835.832,00	1.686.469,00	46.914,03	35,95
32	Maluku Utara	593.197,00	569.148,00	1.162.345,00	31.982,50	36,34
33	Papua Barat	459.271,00	412.239,00	871.510,00	99.671,63	8,74
34	Papua	1.661.219,00	1.488.156,00	3.149.375,00	319.036,05	9,87
	Indonesia	128.366.718	127.094.968	255.461.686	1.913.578,68	133,50

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, Kemendagri, 2015

Lampiran 1.5

**ESTIMASI JUMLAH LAHIR HIDUP, JUMLAH BAYI (0 TAHUN), JUMLAH BATITA (0-2 TAHUN), JUMLAH ANAK BALITA (1 - 4 TAHUN), JUMLAH BALITA (0 - 4 TAHUN)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Bayi (0 tahun)			Jumlah Batita (0-2 tahun)			Jumlah Anak Balita (1 - 4 tahun)			Jumlah Balita (0 - 4 tahun)		
			Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	116.841	58714	56347	115061	174595	167824	342419	289412	278368	567780	288262	277305	565567
2	Sumatera Utara	316.134	157554	151596	309150	474811	457894	932705	788721	761312	1550033	796736	769300	1566036
3	Sumatera Barat	112.152	56003	53801	109804	167495	161250	328745	277750	267609	545359	278893	268810	547703
4	Riau	152.061	75501	72420	147921	223400	214592	437992	370775	356354	727129	367071	352914	719985
5	Jambi	67.033	33219	31832	65051	99450	95427	194877	165066	158469	323535	165483	158906	324389
6	Sumatera Selatan	165.934	82259	79062	161321	246880	237761	484641	410421	395580	806001	411848	397104	808952
7	Bengkulu	37.628	18647	17921	36568	55836	53777	109613	93016	89659	182675	92973	89652	182625
8	Lampung	160.460	79666	76542	156208	241394	232365	473759	401490	386765	788255	406680	391952	798632
9	Kep. Bangka Belitung	27.012	13462	12915	26377	40118	38560	78678	67080	64515	131595	66437	63920	130357
10	Kep. Riau	42.959	21926	21101	43027	66400	64048	130448	111464	107632	219096	111251	107478	218729
11	DKI Jakarta	179.001	92528	88873	181401	283365	272571	555936	476133	458289	934422	481928	464027	945955
12	Jawa Barat	890.429	448536	429090	877626	1344197	1287296	2631493	2232791	2139016	4371807	2238191	2145141	4383332
13	Jawa Tengah	548.272	277014	263413	540427	837056	794899	1631955	1391554	1320699	2712253	1408716	1337097	2745813
14	DI Yogyakarta	53.955	27727	26512	54239	83616	80005	163621	140719	134691	275410	140063	134089	274152
15	Jawa Timur	585.052	295132	283094	578226	890039	855020	1745059	1478383	1421037	2899420	1493678	1436212	2929890
16	Banten	246.861	123794	118989	242783	373437	359674	733111	624705	602204	1226909	625816	603504	1229320
17	Bali	65.434	32942	31609	64551	99187	95322	194509	165750	159401	325151	166154	159863	326017
18	Nusa Tenggara Barat	106.430	51963	49936	101899	154870	149322	304192	256395	247465	503860	257633	248797	506430
19	Nusa Tenggara Timur	133.937	65293	62799	128092	192365	185582	377947	319199	308272	627471	316752	306005	622757
20	Kalimantan Barat	102.987	50967	48890	99857	152745	146772	299517	253769	244001	497770	254421	244717	499138
21	Kalimantan Tengah	53.435	26094	25152	51246	77307	74695	152002	128115	123920	252035	127419	123266	250685
22	Kalimantan Selatan	83.856	41252	39629	80881	124341	119745	244086	207082	199613	406695	208758	201303	410061
23	Kalimantan Timur	74.544	36120	34566	70686	107582	103038	210620	178282	170756	349038	177869	170462	348331
24	Kalimantan Utara	12.098	7343	6986	14329	21872	20823	42695	36822	35105	71927	36162	34449	70611
25	Sulawesi Utara	42.088	21107	20236	41343	63821	61276	125097	106443	102258	208701	107350	103162	210512
26	Sulawesi Tengah	63.290	31007	29748	60755	92161	88639	180800	152699	146979	299678	152715	147060	299775
27	Sulawesi Selatan	171.746	85253	81749	167002	255789	245701	501490	425586	409060	834646	427238	410783	838021
28	Sulawesi Tenggara	61.691	30397	29095	59492	90349	86606	176955	150493	144327	294820	149379	143319	292698
29	Gorontalo	23.527	11509	11029	22538	34021	32678	66699	56579	54386	110965	56144	53983	110127
30	Sulawesi Barat	31.947	15351	14777	30128	44942	43436	88378	74571	72166	146737	73605	71272	144877
31	Maluku	43.699	21057	20251	41308	61963	59785	121748	102779	99269	202048	101932	98494	200426
32	Maluku Utara	28.997	14239	13676	27915	42299	40726	83025	70314	67757	138071	70054	67522	137576
33	Papua Barat	21.112	10199	9848	20047	29877	28944	58821	49434	47960	97394	48761	47325	96086
34	Papua	70.833	34270	33262	67532	101365	98756	200121	167838	163786	331624	166944	162997	329941
	Indonesia	4.893.435	2.448.045	2.346.746	4.794.791	7.348.945	7.054.809	14.403.754	12.221.630	11.738.680	23.960.310	12.273.316	11.792.190	24.065.506

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 1.6

**ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDUDUK USIA MUDA, USIA PRODUKTIF DAN USIA NON PRODUKTIF
MENURUT JENIS KELAMIN PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Usia Muda (<15 Tahun)			Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun)			Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (65+ Tahun)		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	803.671	770.357	1.574.028	1.609.169	1.624.120	3.233.289	84.651	109.985	194.636
2	Sumatera Utara	2.280.487	2.183.364	4.463.851	4.433.260	4.480.249	8.913.509	240.805	319.632	560.437
3	Sumatera Barat	801.773	770.126	1.571.899	1.661.272	1.678.692	3.339.964	121.147	163.279	284.426
4	Riau	1.014.245	966.856	1.981.101	2.156.984	2.029.214	4.186.198	86.332	90.771	177.103
5	Jambi	487.205	472.476	959.681	1.184.605	1.125.373	2.309.978	64.239	68.154	132.393
6	Sumatera Selatan	1.191.426	1.135.766	2.327.192	2.741.198	2.640.446	5.381.644	159.553	183.926	343.479
7	Bengkulu	273.409	260.117	533.526	647.428	620.049	1.267.477	35.428	38.513	73.941
8	Lampung	1.173.093	1.116.288	2.289.381	2.792.747	2.634.180	5.426.927	196.597	204.363	400.960
9	Kep. Bangka Belitung	193.738	184.933	378.671	493.665	446.217	939.882	25.820	28.440	54.260
10	Kep. Riau	311.767	297.313	609.080	674.247	645.011	1.319.258	21.965	22.740	44.705
11	DKI Jakarta	1.291.606	1.232.109	2.523.715	3.646.360	3.631.956	7.278.316	177.391	198.502	375.893
12	Jawa Barat	6.503.458	6.189.550	12.693.008	16.071.441	15.570.252	31.641.693	1.106.028	1.268.840	2.374.868
13	Jawa Tengah	4.273.066	4.055.586	8.328.652	11.299.279	11.506.354	22.805.633	1.178.553	1.461.303	2.639.856
14	DI Yogyakarta	411.697	391.609	803.306	1.259.524	1.277.032	2.536.556	147.544	191.770	339.314
15	Jawa Timur	4.603.733	4.405.843	9.009.576	13.306.924	13.629.830	26.936.754	1.261.953	1.639.278	2.901.231
16	Banten	1.749.935	1.667.561	3.417.496	4.173.751	3.991.838	8.165.589	173.498	198.660	372.158
17	Bali	523.802	495.510	1.019.312	1.438.384	1.413.433	2.851.817	128.819	152.885	281.704
18	Nusa Tenggara Barat	743.039	711.669	1.454.708	1.494.165	1.651.448	3.145.613	108.607	126.649	235.256
19	Nusa Tenggara Timur	914.436	884.585	1.799.021	1.505.925	1.564.850	3.070.775	116.511	133.754	250.265
20	Kalimantan Barat	724.278	692.533	1.416.811	1.618.394	1.556.226	3.174.620	97.220	100.923	198.143
21	Kalimantan Tengah	364.718	348.291	713.009	900.322	806.114	1.706.436	37.756	37.834	75.590
22	Kalimantan Selatan	588.428	560.806	1.149.234	1.364.937	1.318.778	2.683.715	68.598	88.246	156.844
23	Kalimantan Timur	498.307	470.986	969.293	1.248.264	1.110.356	2.358.620	50.726	47.999	98.725
24	Kalimantan Utara	102.070	96.691	198.761	228.446	195.628	424.074	10.295	8.806	19.101
25	Sulawesi Utara	319.258	303.417	622.675	846.519	799.310	1.645.829	65.033	78.581	143.614
26	Sulawesi Tengah	427.011	405.764	832.775	978.712	933.960	1.912.672	63.903	67.339	131.242
27	Sulawesi Selatan	1.253.601	1.198.924	2.452.525	2.698.255	2.872.557	5.570.812	209.119	287.848	496.967
28	Sulawesi Tenggara	431.357	409.832	841.189	778.928	778.976	1.557.904	45.771	54.676	100.447
29	Gorontalo	164.855	157.407	322.262	381.347	381.395	762.742	21.493	26.740	48.233
30	Sulawesi Barat	208.873	199.106	407.979	410.339	411.606	821.945	23.906	28.332	52.238
31	Maluku	288.515	273.780	562.295	529.508	525.580	1.055.088	32.614	36.472	69.086
32	Maluku Utara	200.267	191.972	392.239	374.437	358.166	732.603	18.493	19.010	37.503
33	Papua Barat	139.479	132.506	271.985	309.899	271.477	581.376	9.893	8.256	18.149
34	Papua	498.317	468.853	967.170	1.136.158	998.822	2.134.980	26.744	20.481	47.225
Indonesia		35.754.920	34.102.486	69.857.406	86.394.793	85.479.495	171.874.288	6.217.005	7.512.987	13.729.992

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 1.7

ESTIMASI JUMLAH WANITA USIA SUBUR (15 - 49 TAHUN), WUS IMUNISASI (15 - 39 TAHUN),
IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2015

No	Provinsi	Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 tahun)	Jumlah WUS Imunisasi (15 - 39 tahun)	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Ibu Bersalin/Nifas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1.372.625	1.082.128	128.525	122.683
2	Sumatera Utara	3.649.309	2.802.117	347.747	331.940
3	Sumatera Barat	1.335.056	1.018.237	123.367	117.760
4	Riau	1.748.713	1.370.879	167.267	159.664
5	Jambi	942.424	726.631	73.736	70.385
6	Sumatera Selatan	2.184.998	1.685.712	182.527	174.231
7	Bengkulu	519.614	400.229	41.391	39.509
8	Lampung	2.156.174	1.625.865	176.506	168.483
9	Kepulauan Bangka Belitung	370.666	285.490	29.713	28.363
10	Kepulauan Riau	572.713	455.582	47.255	45.107
11	DKI Jakarta	3.015.390	2.311.332	196.901	187.951
12	Jawa Barat	12.749.261	9.632.597	979.472	934.950
13	Jawa Tengah	8.826.742	6.380.775	603.099	575.685
14	DI Yogyakarta	972.980	705.271	59.351	56.653
15	Jawa Timur	10.461.219	7.484.427	643.557	614.304
16	Banten	3.409.538	2.630.535	271.547	259.204
17	Bali	1.119.355	799.528	71.977	68.706
18	Nusa Tenggara Barat	1.365.639	1.047.527	117.073	111.752
19	Nusa Tenggara Timur	1.284.810	993.483	147.331	140.634
20	Kalimantan Barat	1.296.560	1.008.301	113.286	108.136
21	Kalimantan Tengah	691.503	535.947	58.779	56.107
22	Kalimantan Selatan	1.094.085	821.280	92.242	88.049
23	Kalimantan Timur	946.160	723.606	81.998	78.271
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	166.726	130.507	13.308	12.703
26	Sulawesi Tengah	626.929	459.948	46.297	44.192
27	Sulawesi Selatan	777.091	591.236	69.619	66.455
28	Sulawesi Tenggara	2.337.286	1.768.709	188.921	180.333
29	Gorontalo	659.943	516.114	67.860	64.776
30	Sulawesi Barat	316.037	241.517	25.880	24.703
31	Maluku	351.179	272.449	35.142	33.544
32	Maluku Utara	438.821	347.161	48.069	45.884
33	Papua Barat	304.721	240.549	31.897	30.447
34	Papua	236.555	188.956	23.223	22.168
	Indonesia	894.461	696.502	77.916	74.375

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2015

Lampiran 1.8

**ESTIMASI JUMLAH ANAK PRA SEKOLAH, JUMLAH ANAK USIA KELAS 1 SD/SETINGKAT, DAN JUMLAH ANAK USIA SD/SETINGKAT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Anak Prasekolah (5 - 6 tahun)			Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat (7 Tahun)			Jumlah Anak Usia SD/Setingkat (7 - 12 Tahun)		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	113.036	108.245	221.281	53.816	51.196	105.012	306.517	292.969	599.486
2	Sumatera Utara	316.128	303.454	619.582	153.504	145.183	298.687	886.789	842.590	1.729.379
3	Sumatera Barat	109.775	105.132	214.907	53.716	51.510	105.226	313.085	299.876	612.961
4	Riau	138.153	130.691	268.844	66.212	62.198	128.410	386.995	366.846	753.841
5	Jambi	63.839	62.327	126.166	32.563	31.455	64.018	194.750	189.683	384.433
6	Sumatera Selatan	162.116	153.078	315.194	79.556	74.953	154.509	466.352	441.954	908.306
7	Bengkulu	36.771	34.607	71.378	18.370	17.243	35.613	108.515	102.467	210.982
8	Lampung	162.046	152.468	314.514	78.736	74.332	153.068	456.561	432.271	888.832
9	Kep. Bangka Belitung	25.962	24.655	50.617	12.917	12.252	25.169	76.514	72.767	149.281
10	Kep. Riau	44.418	42.268	86.686	21.280	20.005	41.285	121.830	115.194	237.024
11	DKI Jakarta	184.192	176.858	361.050	86.904	81.184	168.088	480.753	451.355	932.108
12	Jawa Barat	872.244	822.319	1.694.563	428.868	403.980	832.848	2.545.767	2.415.056	4.960.823
13	Jawa Tengah	570.539	536.338	1.106.877	287.192	271.629	558.821	1.713.722	1.631.393	3.345.115
14	DI Yogyakarta	55.795	52.895	108.690	27.126	25.566	52.692	162.118	153.471	315.589
15	Jawa Timur	616.063	586.777	1.202.840	311.750	296.020	607.770	1.865.444	1.781.972	3.647.416
16	Banten	244.229	230.455	474.684	117.510	110.701	228.211	666.200	631.471	1.297.671
17	Bali	70.623	65.912	136.535	36.316	33.979	70.295	217.710	204.700	422.410
18	Nusa Tenggara Barat	102.579	97.725	200.304	50.409	47.791	98.200	289.928	276.584	566.512
19	Nusa Tenggara Timur	122.815	120.913	243.728	60.110	59.735	119.845	360.082	348.474	708.556
20	Kalimantan Barat	97.813	92.950	190.763	47.932	45.375	93.307	280.761	267.572	548.333
21	Kalimantan Tengah	48.472	45.636	94.108	24.352	22.905	47.257	142.672	135.157	277.829
22	Kalimantan Selatan	81.734	77.857	159.591	39.405	37.057	76.462	226.514	214.098	440.612
23	Kalimantan Timur	66.914	62.564	129.478	32.691	30.518	63.209	191.696	179.820	371.516
24	Kalimantan Utara	13.842	12.984	26.826	6.763	6.334	13.097	39.426	37.243	76.669
25	Sulawesi Utara	41.897	39.502	81.399	20.931	20.157	41.088	127.738	121.005	248.743
26	Sulawesi Tengah	57.599	54.751	112.350	27.512	25.690	53.202	162.929	153.214	316.143
27	Sulawesi Selatan	167.148	160.132	327.280	82.981	79.374	162.355	493.826	470.748	964.574
28	Sulawesi Tenggara	62.000	58.506	120.506	29.971	28.159	58.130	168.116	158.902	327.018
29	Gorontalo	21.950	20.854	42.804	10.901	10.275	21.176	64.845	61.547	126.392
30	Sulawesi Barat	28.108	26.526	54.634	13.842	12.972	26.814	80.427	75.956	156.383
31	Maluku	38.925	36.305	75.230	19.012	17.723	36.735	111.103	104.579	215.682
32	Maluku Utara	27.134	26.051	53.185	13.516	12.803	26.319	78.641	75.198	153.839
33	Papua Barat	18.477	17.237	35.714	9.261	8.642	17.903	54.731	51.492	106.223
34	Papua	66.014	63.621	129.635	32.789	31.318	64.107	197.718	183.281	380.999
	Indonesia	4.849.350	4.602.593	9.451.943	2.388.714	2.260.214	4.648.928	14.040.775	13.340.905	27.381.680

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemendes RI, 2015

Lampiran 1.9

**JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN GARIS KEMISKINAN
TAHUN 2000 - 2015**

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2000	12,31	26,43	38,74	14,6	22,38	19,14	91.632,00	73.648,00
2	2001	8,60	29,27	37,87	9,79	24,84	18,41	100.011,00	80.382,00
3	2002	13,32	25,08	38,39	14,46	21,1	18,2	130.499,00	96.512,00
4	2003	12,26	25,08	37,34	13,57	20,23	17,42	138.803,00	105.888,00
5	2004	11,37	24,78	36,15	12,13	20,11	16,66	143.455,00	108.725,00
6	2005	12,40	22,7	35,1	11,68	19,98	15,97	165.565,00	117.365,00
7	2006	14,49	24,81	39,3	13,47	21,81	17,75	174.290,00	130.584,00
8	2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58	187.942,00	146.837,00
9	2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42	204.895,99	161.830,79
10	2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15	222.123,10	179.834,57
11	2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33	232.989,00	192.353,83
12	Maret 2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49	253.015,51	213.394,51
13	September 2011	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36	263.593,84	223.180,69
14	Maret 2012	10,65	18,49	29,13	8,78	15,12	11,96	267.407,53	229.225,78
15	September 2012	10,51	18,09	28,59	8,6	14,7	11,66	277.381,99	240.441,35
16	Maret 2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37	289.042,00	253.273,00
17	September 2013	10,63	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47	308.626,00	275.779,00
18	Maret 2014	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25	318.514,00	286.097,00
19	September 2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96	326.853,00	296.681,00
20	Maret 2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22	342.541,00	317.881,00
21	September 2015	10,62	17,89	28,51	8,22	14,09	11,13	356.378,00	333.034,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Lampiran 1.10

GARIS KEMISKINAN, JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH TAHUN 2015

No	Provinsi	Maret						September								
		Perkotaan			Perdesaan			Kota			Desa			Total		
		Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	410.414	157,57	11,13	382.117	694,01	19,44	420.324	155,81	10,92	394.419	703,60	19,56	401.773	859,41	17,11
2	Sumatera Utara	364.320	699,30	10,16	331.895	764,37	10,89	379.898	727,76	10,51	352.637	780,38	11,06	366.137	1.508,14	10,79
3	Sumatera Barat	406.335	118,03	5,73	369.753	261,57	8,35	423.339	118,48	5,73	391.178	231,05	7,35	403.947	349,53	6,71
4	Riau	404.802	166,45	6,79	395.659	364,94	9,46	417.768	174,79	7,05	416.780	388,13	9,95	417.164	562,92	8,82
5	Jambi	406.074	119,54	11,60	316.838	181,17	7,67	423.855	125,60	12,11	329.895	185,97	7,82	358.426	311,57	9,12
6	Sumatera Selatan	365.336	390,87	13,62	305.581	754,76	14,60	378.739	360,73	12,51	319.994	751,80	14,47	340.958	1.112,53	13,77
7	Bengkulu	397.489	103,13	17,79	372.171	230,94	17,93	425.642	106,00	18,15	404.179	216,83	16,71	410.840	322,83	17,16
8	Lampung	370.839	233,27	10,94	326.283	930,22	15,56	386.728	197,94	9,25	346.088	902,74	15,05	356.771	1.100,68	13,53
9	Kep. Bangka Belitung	475.478	20,13	2,98	501.532	53,96	7,75	516.835	18,83	2,77	542.732	47,79	6,83	529.979	66,62	4,83
10	Kep. Riau	454.147	89,48	5,46	420.638	32,92	10,23	485.496	83,09	5,00	456.933	31,75	9,75	480.812	114,84	5,78
11	DKI Jakarta	487.388	398,92	3,93	-	-	-	503.038	368,67	3,61	-	-	-	503.038	368,67	3,61
12	Jawa Barat	307.487	2.638,38	8,43	305.618	1.797,32	11,82	318.297	2.706,52	8,58	319.228	1.779,13	11,61	318.602	4.485,66	9,57
13	Jawa Tengah	299.011	1.837,19	11,85	296.864	2.739,85	15,05	308.163	1.789,57	11,50	310.295	2.716,21	14,86	309.314	4.505,78	13,32
14	DI Yogyakarta	347.787	329,65	13,43	312.249	220,57	17,85	359.470	292,64	11,93	324.386	192,91	15,62	347.721	485,56	13,16
15	Jawa Timur	304.918	1.524,62	8,19	305.404	3.264,50	16,18	314.320	1.571,15	8,41	318.443	3.204,82	15,84	316.464	4.775,97	12,28
16	Banten	344.855	408,53	5,03	318.497	293,87	7,78	365.672	418,95	5,11	336.592	271,71	7,12	356.436	690,66	5,75
17	Bali	332.999	109,80	4,31	304.005	86,92	5,44	341.554	115,80	4,52	314.218	102,99	6,42	331.028	218,79	5,25
18	Nusa Tenggara Barat	328.125	391,88	19,24	304.068	432,01	15,53	335.284	377,28	18,40	313.466	425,01	15,18	322.689	802,29	16,54
19	Nusa Tenggara Timur	364.920	116,16	11,28	281.022	1.043,68	25,46	374.355	97,06	9,41	290.363	1.063,47	25,89	307.224	1.160,53	22,58
20	Kalimantan Barat	334.575	82,05	5,62	318.792	301,65	9,09	347.516	88,15	6,00	337.288	317,36	9,51	340.413	405,51	8,44
21	Kalimantan Tengah	328.674	41,32	4,86	360.670	106,38	6,50	339.239	48,72	5,68	374.938	99,41	6,02	362.729	148,13	5,91
22	Kalimantan Selatan	354.103	65,96	3,91	331.966	132,48	5,78	371.793	72,48	4,27	352.972	116,68	5,06	360.949	189,16	4,72
23	Kalimantan Timur	485.887	86,82	4,03	452.999	126,06	9,96	504.551	80,82	3,73	476.614	129,16	10,13	494.207	209,98	6,10
24	Kalimantan Utara	489.129	13,05	3,67	458.490	26,64	9,49	505.262	13,32	3,68	477.645	27,61	9,67	493.086	40,93	6,32
25	Sulawesi Utara	290.820	60,71	5,52	299.177	147,83	11,27	302.378	58,00	5,26	311.068	159,14	12,10	307.104	217,14	8,98
26	Sulawesi Tengah	358.399	77,97	10,93	331.855	343,66	15,90	376.496	79,25	11,06	353.080	327,09	15,07	358.892	406,34	14,07
27	Sulawesi Selatan	262.163	146,42	4,61	240.175	651,30	12,23	274.140	157,18	4,93	254.524	707,34	13,22	261.854	864,52	10,12
28	Sulawesi Tenggara	269.703	52,06	7,24	252.636	269,82	15,19	282.230	56,77	7,84	264.371	288,25	16,12	269.516	345,02	13,74
29	Gorontalo	263.288	25,36	6,48	263.846	181,48	24,62	274.581	27,01	6,84	275.163	179,51	24,17	274.961	206,52	18,16
30	Sulawesi Barat	257.004	27,39	10,52	263.110	133,09	12,87	269.080	22,51	8,69	279.594	130,69	12,70	277.479	153,21	11,90
31	Maluku	400.347	51,77	7,91	399.176	276,64	26,90	404.929	51,60	7,83	405.502	276,17	26,70	405.279	327,77	19,36
32	Maluku Utara	360.933	12,25	3,85	337.789	67,65	7,95	378.538	8,29	2,61	356.325	64,35	7,57	362.370	72,64	6,22
33	Papua Barat	452.022	19,34	5,86	435.207	206,03	37,97	478.699	18,82	5,68	457.222	206,72	37,94	465.348	225,54	25,73
34	Papua	440.697	37,27	4,61	388.095	821,88	36,66	445.057	30,28	3,61	392.446	867,93	37,34	406.385	898,21	28,40
Indonesia		342.541	10.652,64	8,29	317.881	17.940,15	14,21	356.378	10.619,87	8,22	333.034	17.893,71	14,09	344.809	28.513,60	11,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Lampiran 1.11

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2015

No	Provinsi	Maret						September					
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**			Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**		
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	2,24	3,44	3,10	0,66	0,90	0,83	1,84	3,61	3,11	0,50	0,98	0,84
2	Sumatera Utara	1,60	1,70	1,65	0,38	0,46	0,42	1,57	2,21	1,89	0,35	0,69	0,52
3	Sumatera Barat	0,79	1,10	0,98	0,16	0,24	0,21	1,06	1,39	1,26	0,25	0,32	0,29
4	Riau	1,09	1,57	1,38	0,27	0,41	0,36	0,83	1,85	1,45	0,21	0,60	0,45
5	Jambi	2,13	1,12	1,42	0,53	0,26	0,35	1,61	1,60	1,60	0,40	0,45	0,44
6	Sumatera Selatan	2,35	2,53	2,46	0,62	0,65	0,64	1,27	2,21	1,88	0,25	0,54	0,44
7	Bengkulu	3,93	3,28	3,48	1,21	0,86	0,97	4,19	3,38	3,63	1,32	1,09	1,16
8	Lampung	1,67	2,60	2,36	0,38	0,66	0,59	1,54	2,65	2,36	0,36	0,69	0,60
9	Kep. Bangka Belitung	0,38	0,95	0,67	0,09	0,19	0,14	0,57	1,22	0,90	0,15	0,28	0,22
10	Kep. Riau	0,91	1,26	0,97	0,25	0,22	0,25	0,80	1,20	0,86	0,23	0,26	0,23
11	DKI Jakarta	0,52	0,00	0,52	0,10	-	0,10	0,27	-	0,27	0,04	-	0,04
12	Jawa Barat	1,51	1,87	1,63	0,42	0,47	0,43	1,40	2,23	1,67	0,40	0,68	0,49
13	Jawa Tengah	2,02	2,80	2,44	0,52	0,76	0,65	2,03	2,28	2,17	0,60	0,58	0,59
14	DI Yogyakarta	2,55	3,70	2,93	0,71	1,09	0,83	2,19	2,57	2,32	0,60	0,68	0,63
15	Jawa Timur	1,28	2,79	2,06	0,31	0,72	0,52	1,28	2,90	2,13	0,37	0,83	0,61
16	Banten	0,87	1,08	0,94	0,23	0,22	0,23	0,82	1,07	0,90	0,20	0,23	0,21
17	Bali	0,63	0,71	0,66	0,14	0,15	0,14	1,09	1,20	1,13	0,35	0,34	0,35
18	Nusa Tenggara Barat	4,05	2,66	3,25	1,23	0,68	0,91	2,68	2,76	2,72	0,73	0,72	0,73
19	Nusa Tenggara Timur	1,66	4,66	4,06	0,41	1,24	1,07	1,78	5,33	4,62	0,51	1,67	1,44
20	Kalimantan Barat	0,86	1,48	1,29	0,20	0,37	0,32	0,77	1,23	1,09	0,21	0,25	0,24
21	Kalimantan Tengah	0,73	0,97	0,89	0,17	0,23	0,21	1,05	1,00	1,02	0,24	0,23	0,23
22	Kalimantan Selatan	0,55	0,89	0,74	0,12	0,22	0,18	1,13	0,87	0,98	0,42	0,22	0,30
23	Kalimantan Timur	0,62	1,38	0,90	0,16	0,33	0,22	0,29	1,37	0,69	0,08	0,32	0,17
24	Kalimantan Utara	0,51	1,14	0,79	0,14	0,22	0,18	0,41	1,08	0,70	0,09	0,27	0,17
25	Sulawesi Utara	0,82	1,78	1,34	0,18	0,47	0,33	0,63	2,30	1,54	0,13	0,71	0,44
26	Sulawesi Tengah	1,78	2,76	2,52	0,43	0,74	0,66	1,41	2,69	2,37	0,31	0,70	0,60
27	Sulawesi Selatan	0,66	2,30	1,69	0,16	0,63	0,45	0,41	2,28	1,58	0,08	0,68	0,45
28	Sulawesi Tenggara	1,29	3,18	2,64	0,40	0,95	0,79	1,71	2,19	2,05	0,46	0,49	0,49
29	Gorontalo	1,02	5,53	3,97	0,23	1,78	1,24	1,32	4,01	3,08	0,38	1,14	0,88
30	Sulawesi Barat	1,49	2,04	1,93	0,36	0,49	0,46	0,90	1,70	1,54	0,13	0,35	0,31
31	Maluku	1,36	4,89	3,52	0,33	1,30	0,92	1,98	6,57	4,79	0,66	2,29	1,66
32	Maluku Utara	0,29	0,86	0,70	0,04	0,16	0,13	0,61	1,35	1,15	0,14	0,32	0,27
33	Papua Barat	0,72	9,60	6,24	0,18	3,64	2,33	0,82	8,02	5,29	0,17	2,65	1,71
34	Papua	0,79	11,72	8,82	0,21	5,07	3,78	0,18	1,09	0,85	0,02	0,08	0,07
	Indonesia	1,40	2,55	1,97	0,36	0,71	0,53	1,29	2,40	1,84	0,35	0,67	0,51

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Catatan :

*) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing - masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan,

**) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Lampiran 1.12

INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 - 2015

No	Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	0,33	0,32	0,34	0,34	0,33
2	Sumatera Utara	0,35	0,33	0,35	0,31	0,34
3	Sumatera Barat	0,35	0,36	0,36	0,33	0,34
4	Riau	0,36	0,40	0,37	0,38	0,36
5	Jambi	0,34	0,34	0,35	0,34	0,36
6	Sumatera Selatan	0,34	0,40	0,38	0,38	0,36
7	Bengkulu	0,36	0,35	0,39	0,36	0,38
8	Lampung	0,37	0,36	0,36	0,33	0,38
9	Kep. Bangka Belitung	0,30	0,29	0,31	0,30	0,28
10	Kep. Riau	0,32	0,35	0,36	0,44	0,36
11	DKI Jakarta	0,44	0,42	0,43	0,44	0,43
12	Jawa Barat	0,41	0,41	0,41	0,40	0,41
13	Jawa Tengah	0,38	0,38	0,39	0,39	0,38
14	DI Yogyakarta	0,40	0,43	0,44	0,43	0,43
15	Jawa Timur	0,37	0,36	0,36	0,40	0,42
16	Banten	0,40	0,39	0,40	0,42	0,40
17	Bali	0,41	0,43	0,40	0,44	0,38
18	Nusa Tenggara Barat	0,36	0,35	0,36	0,39	0,37
19	Nusa Tenggara Timur	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34
20	Kalimantan Barat	0,40	0,38	0,40	0,40	0,33
21	Kalimantan Tengah	0,34	0,33	0,35	0,36	0,33
22	Kalimantan Selatan	0,37	0,38	0,36	0,33	0,35
23	Kalimantan Timur	0,38	0,36	0,37	0,36	0,32
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	0,29
25	Sulawesi Utara	0,39	0,43	0,42	0,44	0,37
26	Sulawesi Tengah	0,38	0,40	0,41	0,35	0,37
27	Sulawesi Selatan	0,41	0,41	0,43	0,45	0,42
28	Sulawesi Tenggara	0,41	0,40	0,43	0,40	0,40
29	Gorontalo	0,46	0,44	0,44	0,45	0,42
30	Sulawesi Barat	0,34	0,31	0,35	0,38	0,36
31	Maluku	0,41	0,38	0,37	0,33	0,34
32	Maluku Utara	0,33	0,34	0,32	0,32	0,28
33	Papua Barat	0,40	0,43	0,43	0,41	0,44
34	Papua	0,42	0,44	0,44	0,46	0,42
	Indonesia	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Keterangan : Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau pemerataan distribusi pendapatan, nilai koefisien adalah 0 - 1

Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata dan nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang

Lampiran 1.13

**PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT
KELOMPOK BARANG TAHUN 2014**

No	Kelompok Barang	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (%)
(1)	(2)	(3)
I	Makanan	
1	Padi-padian	7,76
2	Umbi-umbian	0,46
3	Ikan	4,10
4	Daging	1,93
5	Telur dan Susu	3,08
6	Sayur-sayuran	3,87
7	Kacang-kacangan	1,33
8	Buah-buahan	2,48
9	Minyak dan Lemak	1,64
10	Bahan minuman	1,73
11	Bumbu-bumbuan	0,95
12	Konsumsi lainnya	1,01
13	Makanan dan Minuman Jadi	13,37
14	Tembakau dan sirih	6,33
	Jumlah Makanan	50,04
II	Bukan Makanan	
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	20,75
2	Barang dan jasa	12,35
3	Pendidikan	3,92
4	Kesehatan	3,29
5	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	1,91
6	Barang-barang tahan lama	4,45
7	Pajak dan suransi	1,78
8	Keperluan pesta dan upacara	1,51
	Jumlah Bukan Makanan	49,96
	Jumlah Makanan + Bukan Makanan	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Keterangan : Susenas, Maret 2014

Lampiran 1.14

PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN BUKAN MAKANAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2014

No	Provinsi	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	Aneka barang dan jasa	Pendidikan	Kesehatan	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	Barang-barang tahan lama	Pajak, pungutan dan asuransi	Keperluan pesta dan upacara	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	41,08	29,32	7,96	6,98	4,71	4,02	3,13	2,80	100
2	Sumatera Utara	41,19	29,46	8,10	6,06	5,75	3,62	3,56	2,26	100
3	Sumatera Barat	38,46	26,68	9,52	7,01	4,05	7,45	2,99	3,84	100
4	Riau	43,12	27,12	8,90	6,60	4,09	3,82	4,20	2,15	100
5	Jambi	43,00	27,44	5,64	5,04	3,58	7,99	3,17	4,14	100
6	Sumatera Selatan	40,29	26,71	8,72	5,76	5,72	5,90	2,93	3,97	100
7	Bengkulu	39,65	26,68	8,07	4,16	3,61	12,32	3,18	2,33	100
8	Lampung	41,23	27,05	9,49	5,22	4,30	6,73	3,71	2,27	100
9	Kepulauan Bangka Belitung	47,10	24,36	5,87	6,02	4,79	6,94	3,97	0,95	100
10	Kepulauan Riau	46,24	26,52	5,00	4,53	4,13	9,45	2,59	1,54	100
11	DKI Jakarta	47,85	22,11	6,21	5,15	3,67	7,60	3,93	3,48	100
12	Jawa Barat	44,20	23,96	8,66	5,68	3,08	7,95	3,60	2,87	100
13	Jawa Tengah	33,95	23,75	8,31	10,45	3,32	12,83	3,62	3,77	100
14	DI Yogyakarta	34,87	26,46	12,84	7,15	3,27	8,61	3,73	3,07	100
15	Jawa Timur	36,00	23,84	7,82	9,31	2,86	13,85	3,56	2,76	100
16	Banten	41,96	26,48	8,32	4,82	3,04	8,42	5,15	1,81	100
17	Bali	41,94	20,45	7,64	5,74	3,32	8,94	4,87	7,10	100
18	Nusa Tenggara Barat	45,40	23,18	8,68	5,69	3,86	9,27	2,39	1,53	100
19	Nusa Tenggara Timur	45,69	23,66	8,94	4,37	7,85	5,64	2,15	1,70	100
20	Kalimantan Barat	42,75	25,66	7,47	5,58	5,65	8,55	2,62	1,72	100
21	Kalimantan Tengah	44,90	24,91	4,09	6,27	3,52	9,77	2,28	4,26	100
22	Kalimantan Selatan	42,04	22,01	5,56	6,93	4,06	13,53	2,89	2,98	100
23	Kalimantan Timur	49,59	25,11	6,20	6,19	3,34	4,04	3,64	1,89	100
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	41,54	23,58	6,58	5,50	10,42	4,17	3,70	4,51	100
26	Sulawesi Tengah	42,55	24,57	6,80	7,21	4,68	7,49	2,36	4,34	100
27	Sulawesi Selatan	36,26	26,11	8,26	5,89	4,58	12,18	3,46	3,26	100
28	Sulawesi Tenggara	42,72	23,88	6,21	3,82	4,06	14,02	2,90	2,39	100
29	Gorontalo	40,67	29,22	6,99	6,30	3,89	6,21	2,36	4,36	100
30	Sulawesi Barat	38,31	22,73	5,47	7,32	5,10	15,84	2,89	2,34	100
31	Maluku	49,09	27,32	5,69	2,47	7,59	4,96	0,99	1,89	100
32	Maluku Utara	59,71	24,02	4,79	2,14	5,01	2,24	1,02	1,07	100
33	Papua Barat	48,06	28,16	2,84	3,42	4,50	5,67	1,85	5,50	100
34	Papua	35,68	36,28	6,80	3,05	7,80	4,90	2,05	3,44	100
	Indonesia	41,54	24,71	7,84	6,58	3,82	8,92	3,57	3,02	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Lampiran 1.15

**JUMLAH PENGANGURAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Februari		Agustus	
		Jumlah (1000 orang)	TPT (%)	Jumlah (1000 orang)	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1,86	3,53	4,98	8,39
2	Sumatera Utara	1,85	2,75	2,98	5,75
3	Sumatera Barat	1,48	3,43	4,45	6,19
4	R i a u	1,53	4,13	3,83	5,36
5	J a m b i	0,77	2,29	1,79	5,10
6	Sumatera Selatan	0,79	1,82	2,17	4,34
7	Bengkulu	0,00	1,66	1,47	2,88
8	Lampung	0,70	2,08	2,45	4,37
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,78	1,89	3,71	6,06
10	Kepulauan Riau	0,90	1,74	5,36	5,90
11	DKI Jakarta	24,75	12,28	9,34	9,56
12	Jawa Barat	3,26	3,35	4,91	12,08
13	Jawa Tengah	2,47	2,99	4,13	7,77
14	DI Yogyakarta	0,00	0,60	1,38	2,26
15	Jawa Timur	0,40	1,07	2,35	5,73
16	Banten	2,24	4,12	7,19	11,99
17	B a l i	0,70	0,42	0,60	1,78
18	Nusa Tenggara Barat	1,91	1,81	3,86	6,04
19	Nusa Tenggara Timur	0,49	0,97	1,65	2,92
20	Kalimantan Barat	0,91	2,19	2,31	4,31
21	Kalimantan Tengah	1,35	1,26	1,83	3,17
22	Kalimantan Selatan	0,00	1,58	1,87	4,93
23	Kalimantan Timur	0,91	3,30	4,56	7,48
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	0,00	3,74	3,47	5,55
26	Sulawesi Tengah	0,51	1,22	2,33	2,94
27	Sulawesi Selatan	0,48	1,28	2,17	4,50
28	Sulawesi Tenggara	1,23	0,76	1,80	2,64
29	Gorontalo	0,00	1,59	1,92	5,48
30	Sulawesi Barat	1,30	2,69	2,07	0,84
31	Maluku	0,94	2,01	3,50	3,77
32	Maluku Utara	0,00	2,28	1,60	3,31
33	Papua Barat	0,00	1,19	1,25	3,56
34	Papua	0,90	1,59	2,19	3,67
	Indonesia	1,42	2,40	3,60	7,15

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Lampiran 1.16

RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2015

No	Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Total		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	11,11	10,90	11,00	8,90	8,40	8,65	9,54	9,11	9,32
2	Sumatera Utara	10,51	10,19	10,35	8,58	8,01	8,29	9,57	9,12	9,34
3	Sumatera Barat	10,43	10,50	10,46	7,68	7,79	7,74	8,80	8,89	8,85
4	R i a u	10,66	10,47	10,57	8,03	7,57	7,81	9,06	8,72	8,89
5	J a m b i	10,48	9,96	10,22	8,05	7,19	7,63	8,79	8,06	8,43
6	Sumatera Selatan	10,28	9,86	10,07	7,53	6,94	7,24	8,50	8,02	8,26
7	Bengkulu	11,21	10,90	11,06	8,01	7,34	7,69	8,99	8,48	8,74
8	Lampung	10,03	9,67	9,85	7,61	7,07	7,35	8,24	7,77	8,01
9	Kepulauan Bangka Belitung	9,19	8,93	9,07	6,79	6,43	6,62	7,97	7,69	7,83
10	Kepulauan Riau	10,60	10,32	10,47	6,97	6,36	6,68	9,99	9,70	9,85
11	DKI Jakarta	11,27	10,52	10,90	-	-	-	11,27	10,52	10,90
12	Jawa Barat	9,53	8,79	9,16	6,92	6,17	6,55	8,68	7,94	8,31
13	Jawa Tengah	9,05	8,25	8,64	7,08	6,23	6,65	7,99	7,16	7,57
14	DI Yogyakarta	11,14	10,18	10,66	8,00	7,03	7,49	10,11	9,10	9,59
15	Jawa Timur	9,52	8,67	9,09	6,95	5,96	6,44	8,19	7,25	7,71
16	Banten	10,13	9,22	9,68	6,96	5,99	6,48	9,16	8,22	8,70
17	B a l i	10,53	9,20	9,87	7,92	6,25	7,08	9,55	8,05	8,80
18	Nusa Tenggara Barat	9,24	7,92	8,54	7,35	6,19	6,74	8,15	6,93	7,51
19	Nusa Tenggara Timur	10,71	10,28	10,50	6,72	6,41	6,56	7,59	7,22	7,40
20	Kalimantan Barat	9,68	9,17	9,43	6,87	6,08	6,49	7,73	7,07	7,41
21	Kalimantan Tengah	10,30	9,76	10,04	7,83	7,18	7,53	8,67	8,10	8,40
22	Kalimantan Selatan	10,01	9,28	9,65	7,44	6,58	7,01	8,54	7,73	8,14
23	Kalimantan Timur	10,68	10,06	10,38	8,41	7,57	8,02	9,83	9,17	9,52
24	Kalimantan Utara	9,78	9,32	9,56	7,89	7,16	7,56	8,92	8,38	8,67
25	Sulawesi Utara	10,12	10,28	10,20	8,27	8,36	8,31	9,11	9,27	9,19
26	Sulawesi Tengah	11,12	10,50	10,81	7,67	7,35	7,52	8,53	8,17	8,35
27	Sulawesi Selatan	10,49	10,19	10,34	7,08	6,73	6,89	8,38	8,03	8,20
28	Sulawesi Tenggara	11,27	10,66	10,96	8,14	7,44	7,79	9,07	8,42	8,74
29	Gorontalo	9,36	9,79	9,58	6,06	6,91	6,48	7,21	7,95	7,58
30	Sulawesi Barat	9,23	9,26	9,25	7,18	6,88	7,03	7,59	7,38	7,49
31	Maluku	11,15	11,13	11,14	8,64	8,20	8,42	9,66	9,41	9,54
32	Maluku Utara	11,24	10,37	10,81	8,40	7,58	8,00	9,21	8,40	8,81
33	Papua Barat	10,90	10,84	10,87	8,99	8,12	8,59	9,73	9,17	9,47
34	Papua	10,66	10,03	10,38	5,58	3,73	4,69	7,04	5,40	6,27
Indonesia		9,96	9,26	9,61	7,35	6,61	6,98	8,69	7,96	8,32

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Lampiran 1.17

PERSENTASE IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI (PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN) PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2015

No	Provinsi	Laki-laki						Perempuan						Laki-laki+Perempuan					
		Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B	SMA/MA/SMK/Paket C	PT	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B	SMA/MA/SMK/Paket C	PT	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B	SMA/MA/SMK/Paket C	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	1,89	7,66	22,77	26,00	33,41	8,27	4,78	10,30	23,48	22,82	26,61	12,01	3,35	8,99	23,13	24,39	29,97	10,16
2	Sumatera Utara	1,64	8,41	20,35	28,83	33,23	7,54	3,56	10,82	20,68	26,84	29,47	8,62	2,62	9,63	20,52	27,82	31,33	8,09
3	Sumatera Barat	1,66	18,14	22,02	22,22	27,79	8,17	3,24	18,05	19,93	20,51	26,45	11,83	2,46	18,09	20,96	21,35	27,11	10,03
4	Riau	1,48	11,04	26,49	22,94	31,40	6,65	3,62	12,76	25,43	23,10	25,93	9,16	2,52	11,88	25,98	23,02	28,73	7,88
5	Jambi	2,05	12,10	27,80	24,07	25,78	8,19	5,77	14,64	29,17	21,43	20,79	8,20	3,87	13,34	28,47	22,78	23,34	8,19
6	Sumatera Selatan	1,86	13,33	30,59	22,86	24,70	6,66	3,56	16,82	30,68	20,49	20,76	7,69	2,70	15,05	30,64	21,69	22,75	7,17
7	Bengkulu	2,28	12,48	26,33	23,01	26,61	9,29	6,10	14,19	24,41	21,68	23,39	10,23	4,16	13,32	25,38	22,36	25,03	9,75
8	Lampung	2,13	14,11	30,18	26,52	21,70	5,36	5,68	15,37	28,90	25,40	18,57	6,08	3,86	14,72	29,56	25,97	20,17	5,71
9	Kep. Bangka Belitung	3,01	17,81	29,23	20,75	23,45	5,75	5,68	18,85	27,42	20,83	20,26	6,95	4,28	18,31	28,37	20,79	21,93	6,32
10	Kep. Riau	2,51	6,49	17,83	18,10	45,66	8,96	3,89	8,03	17,73	18,71	41,70	9,95	3,18	7,47	17,78	18,40	43,73	9,44
11	DKI Jakarta	0,62	3,35	13,91	18,71	44,91	18,52	2,06	5,86	16,15	19,71	39,36	16,85	1,34	4,60	15,02	19,21	42,15	17,68
12	Jawa Barat	2,36	10,11	32,55	21,51	25,90	7,58	5,46	12,29	34,17	20,67	20,84	6,57	3,89	11,19	33,35	21,09	23,40	7,08
13	Jawa Tengah	4,03	13,78	32,72	22,78	20,68	6,02	10,53	15,24	30,51	21,55	16,16	6,01	7,35	14,52	31,59	22,15	18,37	6,02
14	DI Yogyakarta	3,41	6,97	18,58	20,79	36,68	13,57	9,80	8,98	19,21	17,93	30,70	13,38	6,68	8,00	18,90	19,32	33,62	13,47
15	Jawa Timur	5,67	12,57	29,52	21,57	24,00	6,68	12,46	13,88	29,08	20,03	18,17	6,39	9,14	13,24	29,29	20,78	21,02	6,53
16	Banten	2,69	9,86	25,61	20,91	32,14	8,79	6,77	12,09	27,42	21,99	24,14	7,60	4,69	10,95	26,50	21,44	28,21	8,20
17	Bali	3,95	9,22	21,76	17,53	35,07	12,47	12,54	11,06	23,70	16,22	26,37	10,12	8,23	10,14	22,73	16,88	30,73	11,29
18	Nusa Tenggara Barat	9,89	14,05	23,07	20,94	23,27	8,79	17,90	15,26	23,11	19,88	17,06	6,79	14,11	14,69	23,09	20,38	20,00	7,74
19	Nusa Tenggara Timur	7,10	20,27	30,82	25,47	18,87	7,46	9,55	18,79	33,29	15,60	15,70	7,07	8,35	19,51	32,08	15,54	17,25	7,26
20	Kalimantan Barat	5,70	16,72	30,30	21,68	19,82	5,78	12,16	16,71	28,10	20,67	16,92	5,44	8,86	16,72	29,22	21,19	18,40	5,61
21	Kalimantan Tengah	1,97	11,07	32,45	22,43	24,79	7,30	3,92	13,70	33,08	22,18	19,90	7,22	2,89	12,31	32,75	22,31	22,48	7,26
22	Kalimantan Selatan	2,24	14,95	27,77	22,58	24,63	7,83	5,14	18,83	27,96	21,83	19,22	7,02	3,68	16,88	27,87	22,21	21,95	7,43
23	Kalimantan Timur	1,69	6,73	22,65	20,60	38,71	9,63	3,78	8,73	25,19	22,45	29,77	10,09	2,67	7,67	23,84	21,47	34,51	9,84
24	Kalimantan Utara	3,36	12,75	23,87	21,21	30,37	8,44	6,20	15,45	23,88	20,51	24,32	9,64	4,68	14,01	23,88	20,88	27,55	9,00
25	Sulawesi Utara	0,74	17,05	20,26	23,91	30,30	7,75	1,10	16,18	20,00	22,12	31,34	9,26	0,91	16,63	20,13	23,03	30,81	8,49
26	Sulawesi Tengah	2,69	13,71	30,87	20,43	24,44	7,85	4,24	15,45	31,60	19,72	20,35	8,63	3,45	14,56	31,23	20,09	22,44	8,23
27	Sulawesi Selatan	7,12	15,72	23,47	18,53	25,10	10,07	10,45	15,14	24,07	18,00	20,83	11,51	8,86	15,41	23,78	18,25	22,88	10,82
28	Sulawesi Tenggara	3,87	13,26	22,78	21,11	27,76	11,23	8,23	13,29	23,72	20,95	23,41	10,40	6,08	13,27	23,26	21,03	25,56	10,81
29	Gorontalo	1,77	33,31	26,10	14,80	17,46	6,57	1,46	26,34	26,78	18,04	18,14	9,24	1,61	29,82	26,44	16,43	17,80	7,91
30	Sulawesi Barat	6,60	20,06	28,15	19,20	18,50	7,49	10,46	15,95	28,66	21,75	15,60	7,59	8,55	17,98	28,41	20,49	17,03	7,54
31	Maluku	1,42	9,28	22,83	23,17	34,01	9,28	2,91	10,76	23,67	20,33	30,58	11,76	2,17	10,02	23,25	21,75	32,29	10,52
32	Maluku Utara	1,27	12,23	26,07	22,42	29,40	8,61	3,02	17,22	28,03	19,89	22,85	9,00	2,12	14,67	27,03	21,19	26,20	8,80
33	Papua Barat	4,00	7,84	19,54	22,40	34,72	11,50	8,13	9,35	16,49	23,00	32,96	10,06	5,91	8,54	18,13	22,68	33,91	10,83
34	Papua	28,24	5,66	16,64	19,01	23,72	6,73	39,30	8,67	16,83	14,30	16,13	4,76	33,44	7,08	16,73	16,80	20,15	5,81
Indonesia		3,72	11,79	27,71	21,95	26,85	7,98	8,06	13,45	27,87	20,93	21,77	7,92	5,9	12,62	27,79	21,44	24,3	7,95

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Lampiran 1.18

ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2011 - 2015

No	Provinsi	Laki-Laki					Perempuan					Total				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	97,62	97,88	98,32	98,41	98,75	93,69	94,25	95,06	96,45	96,53	95,63	96,04	96,66	97,42	97,63
2	Sumatera Utara	98,19	98,57	98,86	99,28	99,32	95,42	96,08	96,79	97,88	98,04	96,78	97,31	97,81	98,57	98,68
3	Sumatera Barat	97,60	97,80	98,41	98,94	99,29	94,69	95,48	96,40	97,95	97,85	96,12	96,62	97,38	98,44	98,56
4	Riau	98,43	98,66	98,78	99,28	99,55	96,31	96,59	96,94	98,18	98,16	97,40	97,65	97,88	98,75	98,87
5	Jambi	97,58	98,00	98,27	98,76	98,88	93,06	93,48	95,10	96,73	96,75	95,37	95,79	96,72	97,77	97,84
6	Sumatera Selatan	98,02	98,33	98,43	98,96	98,90	94,97	95,24	96,01	97,29	97,52	96,52	96,80	97,24	98,14	98,22
7	Bengkulu	97,54	97,81	98,52	99,13	98,94	92,39	93,24	94,37	95,85	96,27	95,02	95,56	96,48	97,52	97,63
8	Lampung	97,28	97,21	97,84	97,38	98,41	92,17	92,44	93,66	95,66	94,89	94,80	94,89	95,81	96,54	96,67
9	Kep. Bangka Belitung	97,37	97,80	97,77	98,65	99,03	93,36	93,40	94,94	96,47	96,78	95,46	95,70	96,41	97,60	97,63
10	Kep. Riau	98,11	98,38	98,97	99,26	99,84	96,47	96,79	96,82	98,14	98,53	97,31	97,60	97,91	98,71	98,79
11	DKI Jakarta	99,39	99,63	99,65	99,90	98,84	98,22	98,37	98,62	99,17	99,33	98,81	99,00	99,14	99,54	99,59
12	Jawa Barat	97,46	97,69	99,28	98,92	98,86	93,71	94,16	95,09	96,97	97,14	95,61	95,95	96,70	97,96	98,01
13	Jawa Tengah	94,09	94,20	95,33	95,64	96,36	85,58	85,83	87,38	90,42	90,01	89,75	89,93	91,27	92,98	93,12
14	DI Yogyakarta	95,91	95,77	96,74	96,99	97,35	86,38	88,42	89,06	91,98	91,78	91,04	92,00	92,82	94,44	94,50
15	Jawa Timur	92,77	93,26	94,42	93,89	94,94	83,08	84,62	86,07	88,96	88,17	87,80	88,82	90,14	91,36	91,47
16	Banten	97,74	98,30	98,34	98,51	98,57	93,86	94,19	94,89	95,92	96,14	95,84	96,28	96,64	97,24	97,37
17	Bali	94,41	95,16	95,93	96,28	90,83	83	84,65	85,73	88,85	88,94	88,69	89,92	90,84	92,56	92,77
18	Nusa Tenggara Barat	88,14	88,31	89,22	90,56	92,84	77,73	78,12	80,60	83,76	83,50	82,65	82,92	84,67	86,96	86,97
19	Nusa Tenggara Timur	89,98	90,58	92,13	92,39	95,41	85,83	87,05	88,69	90,04	90,12	87,85	88,77	90,36	91,18	91,45
20	Kalimantan Barat	94,23	94,61	95,33	95,36	99,26	84,92	86,70	87,21	89,14	89,10	89,64	90,72	91,34	92,30	92,32
21	Kalimantan Tengah	98,13	98,44	98,84	99,46	99,23	95,02	96,31	96,91	98,12	98,45	96,66	97,43	97,93	98,82	98,88
22	Kalimantan Selatan	97,57	98,06	98,72	99,32	99,20	93,33	94,34	95,34	97,05	97,17	95,46	96,20	97,04	98,19	98,21
23	Kalimantan Timur	97,96	98,26	98,52	99,19	96,66	95,22	96,30	96,38	97,92	98,12	96,68	97,34	97,51	98,59	98,69
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	99,69	-	-	-	-	93,08	-	-	-	-	94,99
25	Sulawesi Utara	98,94	99,02	99,32	99,78	99,69	98,60	98,63	98,92	99,42	99,56	98,77	98,83	99,13	99,60	99,63
26	Sulawesi Tengah	95,88	95,92	96,98	97,99	98,24	92,52	93,34	94,87	96,11	96,41	94,23	94,66	95,95	97,08	97,34
27	Sulawesi Selatan	90,05	90,69	92,53	93,10	93,26	85,49	86,50	87,99	89,58	89,47	87,66	88,50	90,16	91,26	91,29
28	Sulawesi Tenggara	94,33	94,07	95,75	96,82	96,57	87,31	88,35	89,55	91,29	91,69	90,79	91,18	92,61	94,03	94,10
29	Gorontalo	94,30	94,94	96,56	97,16	98,02	94,92	95,30	97,10	98,63	98,45	94,61	95,12	96,83	97,90	98,24
30	Sulawesi Barat	91,47	91,12	93,58	93,79	94,44	84,12	86,79	88,06	90,77	90,88	87,75	88,93	90,79	92,27	92,64
31	Maluku	97,54	98,02	98,53	99,17	99,31	95,64	96,15	97,14	98,38	98,39	96,59	97,09	97,83	98,77	98,85
32	Maluku Utara	97,35	97,75	98,34	99,18	99,08	94,17	94,90	96,37	97,51	97,87	95,79	96,35	97,37	98,36	98,49
33	Papua Barat	95,17	96,02	97,51	98,72	98,07	89,65	90,94	93,41	94,49	95,50	92,58	93,62	95,59	96,75	96,88
34	Papua	71,26	71,28	73,63	76,70	75,59	56,77	58,49	60,15	64,13	65,47	64,53	65,30	67,31	70,78	70,83
	Indonesia	95,39	95,69	96,47	96,79	97,11	89,51	90,27	91,4	93,45	93,3357	92,44	92,97	93,92	95,12	95,22

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Keterangan : Angka Melek Huruf tahun 2011-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035

Lampiran 1.19

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 - 2015

No	Provinsi	2012				2013				2014				2015																			
		7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)																
1	Aceh	99,36	94,34	74,59	28,55	99,66	95,23	74,70	29,18	99,84	97,38	80,89	32,93	99,90	97,71	81,43	33,07																
2	Sumatera Utara	98,60	90,83	69,86	17,27	99,03	92,11	71,24	21,81	99,26	96,06	75,78	24,82	99,35	96,34	76,23	25,16																
3	Sumatera Barat	98,34	90,50	71,24	27,55	98,81	92,20	74,10	30,66	99,27	95,84	81,97	32,89	99,44	95,98	82,53	33,13																
4	Riau	98,13	88,01	66,55	15,81	98,59	90,35	69,79	22,04	98,67	94,36	75,30	24,48	98,79	94,48	75,57	24,85																
5	Jambi	98,70	91,11	59,71	15,22	98,81	91,96	63,97	20,25	99,46	94,88	70,41	22,11	99,55	95,06	70,75	22,22																
6	Sumatera Selatan	98,11	88,75	58,66	13,91	98,57	89,47	60,74	14,08	99,47	93,36	67,84	16,87	99,53	93,52	68,40	17,00																
7	Bengkulu	98,97	93,22	67,76	19,64	99,50	93,16	71,21	24,12	99,45	96,71	77,92	28,14	99,65	96,83	78,16	28,37																
8	Lampung	98,64	90,00	60,43	11,90	99,03	91,06	64,41	16,19	99,56	94,01	68,75	18,67	99,62	94,24	69,04	18,81																
9	Kep. Bangka Belitung	97,72	84,09	52,02	9,30	98,13	84,63	56,42	9,46	99,16	91,53	65,78	12,22	99,22	91,82	66,17	12,73																
10	Kep. Riau	98,44	94,93	70,94	10,14	98,63	96,67	73,66	14,85	99,12	98,56	81,57	17,40	99,34	98,67	81,84	17,69																
11	DKI Jakarta	99,04	94,07	61,87	18,02	99,40	95,47	66,09	19,65	99,47	96,69	70,23	22,52	99,56	97,19	70,73	22,71																
12	Jawa Barat	98,36	88,68	56,30	12,25	98,85	89,40	59,98	17,34	99,30	92,84	65,48	19,27	99,57	93,19	65,72	19,40																
13	Jawa Tengah	98,87	89,59	58,65	11,83	99,28	90,73	59,88	17,42	99,51	94,85	67,54	20,48	99,56	95,30	67,66	20,57																
14	DI Yogyakarta	99,77	98,35	80,04	44,69	99,96	96,79	81,41	45,86	99,94	99,48	86,44	49,08	99,89	99,68	86,78	49,17																
15	Jawa Timur	98,26	91,10	59,80	15,97	98,60	91,32	62,89	18,08	99,38	96,36	70,25	21,84	99,45	96,53	70,44	21,95																
16	Banten	98,65	91,62	61,87	14,59	99,05	92,83	62,32	19,49	99,29	94,87	66,25	19,61	99,41	95,29	66,73	19,68																
17	Bali	99,18	95,04	71,44	18,99	99,26	95,90	74,03	19,84	99,36	97,23	81,59	23,59	99,41	97,41	81,69	23,75																
18	Nusa Tenggara Barat	98,18	91,25	61,07	17,82	98,20	92,23	66,40	22,64	99,11	97,27	75,68	26,73	99,48	97,44	75,86	26,84																
19	Nusa Tenggara Timur	96,15	88,62	61,92	17,92	97,34	89,43	64,81	22,88	97,99	94,26	73,96	26,22	98,13	94,39	74,25	26,54																
20	Kalimantan Barat	96,66	85,52	55,13	14,17	96,91	85,94	58,80	19,27	98,18	91,76	66,48	23,18	98,27	91,91	66,83	23,32																
21	Kalimantan Tengah	98,62	85,68	55,06	14,04	99,05	86,14	59,18	19,89	99,46	92,94	65,84	22,31	99,54	93,13	66,00	22,47																
22	Kalimantan Selatan	97,85	85,62	58,16	16,48	98,76	86,60	60,19	16,95	99,24	91,83	67,18	20,36	99,43	91,91	67,49	20,53																
23	Kalimantan Timur	99,12	96,32	71,73	20,33	99,46	96,49	73,92	25,04	99,35	97,89	80,50	27,34	99,63	97,92	80,68	27,55																
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,39	93,55	74,41	17,87																
25	Sulawesi Utara	98,16	88,34	65,28	16,12	98,92	90,48	66,88	16,36	98,95	94,34	71,98	20,91	99,33	94,59	72,22	21,31																
26	Sulawesi Tengah	96,87	85,81	61,05	16,74	97,70	87,49	66,12	21,76	97,71	91,23	73,64	25,05	98,02	91,80	73,80	25,13																
27	Sulawesi Selatan	97,62	87,85	62,16	23,17	98,24	89,66	62,67	27,80	98,91	92,57	69,38	30,23	99,03	92,66	69,66	30,64																
28	Sulawesi Tenggara	97,57	88,25	65,04	23,62	98,00	89,12	65,84	24,00	99,11	93,53	72,25	28,78	99,30	93,67	72,42	28,89																
29	Gorontalo	97,74	82,91	59,37	20,46	97,90	86,23	59,91	23,27	98,40	90,47	68,69	27,94	98,69	90,75	69,03	28,38																
30	Sulawesi Barat	96,19	82,17	56,80	14,65	95,20	84,55	59,62	18,04	97,91	89,26	66,97	21,53	98,00	89,84	67,14	21,97																
31	Maluku	98,27	94,76	68,33	28,98	98,79	94,44	70,28	33,80	99,19	96,35	77,48	36,44	99,38	96,44	77,87	36,60																
32	Maluku Utara	98,31	90,83	69,01	21,79	98,02	93,40	69,04	26,42	98,89	96,24	74,83	30,85	99,08	96,68	75,16	31,25																
33	Papua Barat	95,59	91,13	65,04	20,03	95,59	92,94	71,89	24,10	96,65	96,28	79,87	29,66	96,74	96,58	79,99	29,96																
34	Papua	75,45	69,07	50,01	13,86	75,23	72,64	53,19	17,50	80,69	78,07	61,63	22,48	81,04	78,14	61,96	22,55																
Indonesia		98,02				61,49				98,42				63,84				98,92				70,31				99,09				70,61			

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Keterangan : APS tahun 2011-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035

Lampiran 1.20

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2015

No	Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	100,00	97,51	80,49	27,82	99,80	97,93	82,43	38,57	99,90	97,71	81,43	33,07
2	Sumatera Utara	99,28	95,69	72,78	21,12	99,41	97,00	79,99	29,32	99,35	96,34	76,23	25,16
3	Sumatera Barat	99,55	94,02	77,59	26,96	99,34	98,07	87,47	39,59	99,44	95,98	82,53	33,13
4	Riau	99,21	92,53	73,76	22,95	98,34	96,59	77,37	26,84	98,79	94,48	75,57	24,85
5	Jambi	99,43	94,58	65,72	19,72	99,68	95,54	75,93	24,99	99,55	95,06	70,75	22,22
6	Sumatera Selatan	99,51	93,66	65,97	15,67	99,55	93,38	70,97	18,45	99,53	93,52	68,40	17,00
7	Bengkulu	99,50	96,09	76,84	23,01	99,81	97,63	79,58	33,84	99,65	96,83	78,16	28,37
8	Lampung	99,62	93,79	67,02	16,74	99,62	94,73	71,35	21,05	99,62	94,24	69,04	18,81
9	Kepulauan Bangka Belitung	98,86	88,74	67,10	11,84	99,57	95,05	65,19	13,74	99,22	91,82	66,17	12,73
10	Kepulauan Riau	99,35	98,49	77,90	15,41	99,33	98,87	85,98	19,97	99,34	98,67	81,84	17,69
11	DKI Jakarta	99,13	98,09	71,10	22,02	100,00	96,28	70,34	23,38	99,56	97,19	70,73	22,71
12	Jawa Barat	99,63	91,94	63,44	17,36	99,51	94,49	68,25	21,46	99,57	93,19	65,72	19,40
13	Jawa Tengah	99,47	94,29	68,25	19,86	99,65	96,39	67,03	21,29	99,56	95,30	67,66	20,57
14	DI Yogyakarta	99,80	99,69	84,78	49,28	100,00	99,66	88,91	49,06	99,89	99,68	86,78	49,17
15	Jawa Timur	99,43	97,10	71,24	22,00	99,47	95,94	69,57	21,91	99,45	96,53	70,44	21,95
16	Banten	99,25	94,69	63,78	19,43	99,59	95,92	70,06	19,93	99,41	95,29	66,73	19,68
17	B a l i	99,70	97,62	87,32	25,90	99,12	97,19	74,83	21,62	99,41	97,41	81,69	23,75
18	Nusa Tenggara Barat	99,68	97,71	77,24	27,59	99,26	97,18	74,31	26,15	99,48	97,44	75,86	26,84
19	Nusa Tenggara Timur	97,60	92,14	71,25	27,86	98,67	96,70	77,39	25,20	98,13	94,39	74,25	26,54
20	Kalimantan Barat	98,06	89,78	64,28	24,01	98,49	93,94	69,74	22,59	98,27	91,91	66,83	23,32
21	Kalimantan Tengah	99,17	92,06	63,76	22,51	99,93	94,13	68,65	22,42	99,54	93,13	66,00	22,47
22	Kalimantan Selatan	99,43	91,78	65,02	21,14	99,43	92,03	70,14	19,85	99,43	91,91	67,49	20,53
23	Kalimantan Timur	99,68	98,83	79,81	25,38	99,58	96,93	81,73	30,15	99,63	97,92	80,68	27,55
24	Kalimantan Utara	98,83	92,18	79,52	17,46	97,90	95,07	69,34	18,42	98,39	93,55	74,41	17,87
25	Sulawesi Utara	98,96	93,03	70,91	18,35	99,70	96,23	73,64	24,73	99,33	94,59	72,22	21,31
26	Sulawesi Tengah	97,32	91,60	69,09	22,86	98,76	92,00	78,88	27,41	98,02	91,80	73,80	25,13
27	Sulawesi Selatan	99,11	91,46	68,05	26,71	98,95	93,90	71,34	34,63	99,03	92,66	69,66	30,64
28	Sulawesi Tenggara	99,02	94,37	68,46	26,57	99,62	92,95	76,46	31,15	99,30	93,67	72,42	28,89
29	Gorontalo	97,85	85,98	66,12	24,91	99,53	96,00	72,19	31,57	98,69	90,75	69,03	28,38
30	Sulawesi Barat	97,25	87,99	64,65	22,72	98,87	91,71	69,92	21,26	98,00	89,84	67,14	21,97
31	Maluku	99,32	95,83	77,62	36,68	99,43	97,09	78,17	36,51	99,38	96,44	77,87	36,60
32	Maluku Utara	99,22	98,70	78,67	28,02	98,93	94,80	71,16	34,87	99,08	96,68	75,16	31,25
33	Papua Barat	96,12	94,93	84,90	28,54	97,41	98,20	74,65	31,64	96,74	96,58	79,99	29,96
34	Papua	80,74	80,85	64,79	24,40	81,36	75,23	58,40	20,43	81,04	78,14	61,96	22,55
	Indonesia	99,02	94,11	69,39	21,57	99,15	95,35	71,94	24,35	99,09	94,72	70,61	22,95

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Lampiran 1.21

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 - 2015

No	Provinsi	2012			2013			2014			2015		
		SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	108,69	96,47	77,62	110,71	94,39	75,09	111,66	95,87	81,53	113,36	97,88	83,33
2	Sumatera Utara	106,41	88,59	80,81	110,01	86,84	77,15	110,34	90,29	82,96	112,62	95,41	84,14
3	Sumatera Barat	107,00	87,81	72,53	109,92	85,46	71,00	110,89	88,05	80,46	113,25	90,94	81,42
4	Riau	103,57	93,30	68,73	107,30	88,49	69,60	109,42	90,79	76,33	110,40	94,14	76,16
5	Jambi	106,73	88,11	65,80	109,41	85,17	65,61	110,73	87,83	73,63	111,99	91,78	76,12
6	Sumatera Selatan	106,12	86,65	69,73	110,74	86,07	63,78	112,01	88,43	72,51	114,47	93,56	73,18
7	Bengkulu	107,60	95,93	67,42	111,36	85,00	72,71	113,95	88,23	79,49	116,16	88,79	82,79
8	Lampung	106,57	93,41	62,03	110,73	85,47	63,81	112,74	86,76	68,49	113,38	100,83	73,90
9	Kep. Bangka Belitung	109,50	78,35	59,69	109,97	73,38	68,50	113,22	82,52	75,51	111,07	87,60	76,41
10	Kep. Riau	105,59	92,45	74,38	108,85	90,21	80,26	108,99	91,06	81,36	108,27	92,38	93,20
11	DKI Jakarta	98,37	94,58	75,34	103,91	86,35	72,72	104,18	90,86	74,71	105,26	88,35	76,35
12	Jawa Barat	103,28	87,44	64,90	106,75	85,26	60,12	106,98	87,50	68,55	109,42	90,07	70,23
13	Jawa Tengah	104,92	91,51	67,03	108,95	87,42	64,02	110,18	89,40	73,55	110,36	91,40	82,15
14	DI Yogyakarta	107,18	89,05	83,02	108,50	83,37	90,04	109,11	90,66	94,62	106,69	97,88	82,64
15	Jawa Timur	102,37	93,60	67,25	105,82	90,34	62,91	106,88	91,98	72,24	108,64	91,13	80,02
16	Banten	104,79	87,96	69,65	107,47	89,85	63,32	109,89	89,55	72,94	112,07	92,27	69,76
17	Bali	98,79	94,78	86,83	105,60	93,88	79,92	105,59	95,99	85,27	105,00	96,82	86,61
18	Nusa Tenggara Barat	104,91	93,89	68,52	107,90	88,72	65,00	109,08	92,44	76,68	111,54	91,94	89,51
19	Nusa Tenggara Timur	112,29	82,05	59,96	113,44	80,25	64,85	114,68	88,66	71,86	116,46	88,96	75,54
20	Kalimantan Barat	108,16	82,24	52,57	110,61	75,68	59,02	113,75	80,15	65,72	114,82	82,30	81,88
21	Kalimantan Tengah	109,19	79,20	60,65	110,83	80,85	58,85	112,01	84,89	67,74	114,76	95,94	70,70
22	Kalimantan Selatan	104,47	84,55	66,75	108,81	79,52	62,14	110,52	82,45	71,36	111,14	82,81	73,88
23	Kalimantan Timur	107,05	92,90	81,33	107,14	90,79	83,02	110,43	92,04	85,97	112,61	97,90	90,31
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,66	100,48	83,77
25	Sulawesi Utara	104,69	94,02	74,58	107,39	84,68	80,88	108,86	87,70	83,48	111,23	91,06	86,30
26	Sulawesi Tengah	103,13	81,22	71,83	103,12	86,10	77,98	104,71	88,53	83,35	107,28	90,73	82,87
27	Sulawesi Selatan	102,81	88,30	74,87	108,48	78,72	74,71	109,06	82,77	78,51	111,33	85,56	78,03
28	Sulawesi Tenggara	108,17	89,83	71,55	110,22	81,91	72,31	112,40	85,97	82,22	111,56	87,39	81,39
29	Gorontalo	105,44	81,34	62,39	109,79	73,88	65,60	111,88	78,64	76,95	110,58	81,87	86,74
30	Sulawesi Barat	102,64	81,06	64,16	105,84	70,13	71,57	108,42	80,41	76,30	105,92	80,25	84,98
31	Maluku	107,90	91,16	83,08	109,74	87,77	85,44	111,35	90,50	86,04	112,99	88,92	95,13
32	Maluku Utara	107,85	87,57	85,45	110,55	82,08	81,19	110,75	86,06	84,23	115,41	93,90	84,61
33	Papua Barat	106,44	89,15	67,83	105,23	87,45	73,24	109,36	87,86	83,12	113,46	90,33	89,00
34	Papua	84,32	71,71	44,23	85,95	65,01	53,48	90,67	71,02	61,53	95,15	73,59	66,97
	Indonesia	104,33	89,49	68,80	107,71	85,96	66,61	108,88	88,63	74,26	110,50	91,17	78,02

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Keterangan : APK tahun 2011-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035

Lampiran 1.22

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2015

No	Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	113,17	99,97	85,63	27,22	113,55	95,68	80,85	41,80	113,36	97,88	83,33	34,34
2	Sumatera Utara	112,71	96,39	79,88	16,89	112,53	94,41	88,76	26,67	112,62	95,41	84,14	21,70
3	Sumatera Barat	115,70	86,18	76,87	25,83	110,83	95,99	85,97	38,69	113,25	90,94	81,42	32,11
4	Riau	111,76	93,36	72,11	21,96	108,96	94,97	80,18	26,88	110,40	94,14	76,16	24,36
5	Jambi	114,02	86,68	74,58	19,05	109,89	96,94	77,72	24,29	111,99	91,78	76,12	21,53
6	Sumatera Selatan	116,14	93,21	69,32	12,80	112,74	93,91	77,27	17,80	114,47	93,56	73,18	15,19
7	Bengkulu	117,90	90,32	79,98	22,24	114,34	87,13	85,81	36,84	116,16	88,79	82,79	29,46
8	Lampung	112,30	101,89	68,03	8,44	114,48	99,72	80,64	12,13	113,38	100,83	73,90	10,21
9	Kepulauan Bangka Belitung	111,86	86,84	76,61	6,82	110,31	88,41	76,20	11,85	111,07	87,60	76,41	9,16
10	Kepulauan Riau	108,86	93,52	86,78	14,17	107,65	91,16	99,95	19,15	108,27	92,38	93,20	16,66
11	DKI Jakarta	105,67	85,59	80,41	24,91	104,83	91,13	72,03	28,74	105,26	88,35	76,35	26,84
12	Jawa Barat	108,67	87,88	67,90	17,19	110,23	92,35	72,82	18,34	109,42	90,07	70,23	17,76
13	Jawa Tengah	111,35	90,38	80,71	14,16	109,32	92,49	83,67	17,78	110,36	91,40	82,15	15,97
14	DI Yogyakarta	108,56	92,70	86,28	55,96	104,63	103,33	78,79	53,72	106,69	97,88	82,64	54,87
15	Jawa Timur	109,48	90,60	79,78	18,64	107,79	91,69	80,27	18,06	108,64	91,13	80,02	18,34
16	Banten	113,01	88,22	69,13	18,01	111,06	96,49	70,47	20,72	112,07	92,27	69,76	19,34
17	B a l i	105,89	97,45	91,72	27,64	104,11	96,16	80,40	25,36	105,00	96,82	86,61	26,50
18	Nusa Tenggara Barat	111,03	91,55	89,70	22,27	112,11	92,30	89,29	21,61	111,54	91,94	89,51	21,93
19	Nusa Tenggara Timur	116,39	84,13	74,89	19,23	116,54	93,91	76,22	20,75	116,46	88,96	75,54	19,99
20	Kalimantan Barat	114,26	83,47	79,15	15,64	115,40	81,17	85,00	15,94	114,82	82,30	81,88	15,79
21	Kalimantan Tengah	115,89	96,29	67,01	15,66	113,60	95,61	75,05	18,70	114,76	95,94	70,70	17,08
22	Kalimantan Selatan	111,79	85,20	71,68	18,54	110,47	80,37	76,25	22,57	111,14	82,81	73,88	20,46
23	Kalimantan Timur	114,32	100,90	83,83	21,28	110,83	94,62	98,21	26,90	112,61	97,90	90,31	23,83
24	Kalimantan Utara	103,30	95,47	93,02	14,12	99,84	106,07	74,60	16,61	101,66	100,48	83,77	15,18
25	Sulawesi Utara	112,39	89,77	83,04	20,28	110,04	92,41	89,88	26,72	111,23	91,06	86,30	23,26
26	Sulawesi Tengah	108,89	86,82	76,35	23,89	105,58	94,79	89,88	28,44	107,28	90,73	82,87	26,16
27	Sulawesi Selatan	111,18	85,38	78,08	28,38	111,49	85,75	77,98	37,73	111,33	85,56	78,03	33,01
28	Sulawesi Tenggara	110,23	91,41	77,98	31,13	113,04	83,19	84,86	39,73	111,56	87,39	81,39	35,49
29	Gorontalo	108,94	86,05	75,36	21,09	112,20	77,25	99,06	29,27	110,58	81,87	86,74	25,36
30	Sulawesi Barat	105,12	79,64	82,13	19,89	106,85	80,87	88,17	22,42	105,92	80,25	84,98	21,20
31	Maluku	114,05	89,71	96,13	31,67	111,89	88,08	93,97	41,70	112,99	88,92	95,13	36,60
32	Maluku Utara	114,29	104,60	83,89	22,10	116,62	83,88	85,43	33,65	115,41	93,90	84,61	27,55
33	Papua Barat	116,41	88,25	90,96	23,79	110,24	92,39	86,88	30,53	113,46	90,33	89,00	26,87
34	Papua	96,66	75,14	68,72	14,46	93,53	71,92	64,76	11,84	95,15	73,59	66,97	13,24
	Indonesia	110,88	90,22	76,40	19,20	110,09	92,15	79,77	22,63	110,50	91,17	78,02	20,89

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Lampiran 1.23

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 - 2015

No	Provinsi	2012			2013			2014			2015		
		SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	94,66	78,61	61,82	97,09	82,57	63,43	97,80	85,20	69,20	97,99	85,55	69,82
2	Sumatera Utara	93,35	70,57	60,29	95,64	73,98	62,19	96,29	78,33	65,80	96,47	78,48	66,69
3	Sumatera Barat	95,77	70,08	55,68	97,10	72,56	61,00	97,92	75,61	66,52	98,12	76,00	66,90
4	Riau	92,62	70,18	53,06	95,33	74,23	58,74	96,42	77,67	62,31	96,63	78,22	62,60
5	Jambi	94,10	69,56	46,09	96,43	73,23	52,13	97,15	77,34	59,22	97,68	77,94	59,41
6	Sumatera Selatan	92,79	67,94	49,34	95,12	72,06	51,67	96,13	75,87	57,92	96,41	76,18	58,27
7	Bengkulu	94,10	71,97	50,83	97,37	73,07	60,32	98,03	76,44	64,61	98,10	76,88	64,97
8	Lampung	93,50	72,08	46,14	97,41	74,96	53,48	97,98	77,98	57,64	98,32	78,20	58,39
9	Kep. Bangka Belitung	94,12	63,28	42,93	95,72	63,83	50,80	96,49	71,83	56,93	96,66	72,42	57,02
10	Kep. Riau	94,50	78,67	63,53	97,64	83,31	67,62	98,22	83,36	70,52	98,68	83,77	71,23
11	DKI Jakarta	90,48	70,31	54,25	96,07	75,46	55,40	96,84	79,61	58,79	96,91	80,20	59,04
12	Jawa Barat	93,41	73,54	51,24	97,08	76,76	52,25	97,60	79,30	56,48	97,68	79,55	56,73
13	Jawa Tengah	92,05	72,52	51,11	95,68	74,94	51,81	96,45	78,57	58,11	96,57	78,66	58,27
14	DI Yogyakarta	96,11	72,44	63,54	98,75	75,64	64,86	98,98	82,20	68,46	99,23	82,86	68,60
15	Jawa Timur	92,93	74,42	52,36	96,10	77,36	53,30	96,98	80,94	60,00	97,38	81,16	60,31
16	Banten	93,67	73,79	53,00	96,24	78,17	53,28	96,69	79,56	56,87	96,98	79,84	57,04
17	Bali	91,01	74,46	63,55	94,11	80,69	67,04	95,29	84,58	70,83	95,64	84,78	71,53
18	Nusa Tenggara Barat	93,61	77,44	53,81	96,71	80,21	58,00	97,62	82,29	64,11	97,80	82,83	64,97
19	Nusa Tenggara Timur	92,16	55,83	38,19	93,53	59,32	47,30	94,56	65,86	52,15	94,95	66,32	52,51
20	Kalimantan Barat	92,93	59,72	37,44	94,39	59,53	44,79	95,75	64,23	50,06	96,09	64,55	50,32
21	Kalimantan Tengah	96,03	65,11	43,55	97,41	68,15	45,43	98,13	75,40	51,75	98,54	75,76	52,36
22	Kalimantan Selatan	93,16	66,94	49,39	96,74	69,57	50,05	97,44	72,40	55,04	97,75	72,51	55,58
23	Kalimantan Timur	94,06	74,12	60,34	95,76	75,79	62,91	96,81	78,96	67,41	97,00	79,06	67,78
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,83	77,25	62,34
25	Sulawesi Utara	87,78	62,39	51,15	91,61	64,55	57,26	93,42	72,32	61,69	93,97	73,02	62,23
26	Sulawesi Tengah	90,79	62,36	52,25	90,27	63,72	58,38	91,77	70,62	63,13	92,35	71,10	63,32
27	Sulawesi Selatan	90,61	69,68	54,20	95,67	69,79	54,26	96,39	73,18	59,10	96,84	73,51	59,47
28	Sulawesi Tenggara	92,54	68,84	50,67	95,15	69,68	55,50	95,97	74,77	61,91	96,15	75,43	62,23
29	Gorontalo	92,00	60,48	45,47	95,93	64,26	48,91	96,74	68,29	56,07	97,09	68,71	56,24
30	Sulawesi Barat	91,29	61,75	44,54	93,52	62,00	52,22	94,97	68,37	56,65	95,29	68,92	56,78
31	Maluku	90,05	66,03	50,20	92,25	67,06	55,59	93,74	73,10	62,60	94,34	73,29	63,07
32	Maluku Utara	92,59	64,43	56,76	95,47	70,73	59,54	96,21	75,03	63,10	96,65	75,38	63,20
33	Papua Barat	88,84	57,90	44,98	89,71	60,90	53,80	92,76	68,18	62,29	92,90	68,29	62,40
34	Papua	70,78	43,61	29,16	72,57	45,76	36,73	78,36	53,68	43,11	78,56	54,21	43,22
	Indonesia	92,54	70,93	51,88	95,59	73,88	54,25	96,45	77,53	59,35	96,7	77,82	59,71

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Keterangan : APM tahun 2011-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035

Lampiran 1.24

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERINGKAT TAHUN 2010 - 2015

No	Provinsi	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	67,09	10	67,45	10	67,81	10	68,3	11	68,81	11	69,45	13
2	Sumatera Utara	67,09	10	67,34	11	67,74	11	68,36	10	68,87	10	69,51	10
3	Sumatera Barat	67,25	9	67,81	9	68,36	9	68,91	9	69,36	9	69,98	9
4	Riau	68,65	6	68,90	6	69,15	6	69,91	6	70,33	6	70,84	6
5	Jambi	65,39	18	66,14	18	66,94	17	67,76	17	68,24	17	68,89	17
6	Sumatera Selatan	64,44	22	65,12	22	65,79	22	66,16	23	66,75	23	67,46	23
7	Bengkulu	65,35	20	65,96	20	66,61	21	67,50	20	68,06	20	68,59	20
8	Lampung	63,71	24	64,20	25	64,87	25	65,73	26	66,42	26	66,95	25
9	Kepulauan Bangka Belitung	66,02	14	66,59	15	67,21	14	67,92	15	68,27	16	69,05	15
10	Kepulauan Riau	71,13	4	71,61	4	72,36	4	73,02	4	73,40	4	73,75	4
11	DKI Jakarta	76,31	1	76,98	1	77,53	1	78,08	1	78,39	1	78,99	1
12	Jawa Barat	66,15	12	66,67	12	67,32	12	68,25	12	68,80	12	69,50	11
13	Jawa Tengah	66,08	13	66,64	14	67,21	14	68,02	13	68,78	13	69,49	12
14	DI Yogyakarta	75,37	2	75,93	2	76,15	2	76,44	2	76,81	2	77,59	2
15	Jawa Timur	65,36	19	66,06	19	66,74	18	67,55	18	68,14	18	68,95	16
16	Banten	67,54	8	68,22	8	68,92	8	69,47	8	69,89	8	70,27	8
17	Bali	70,10	5	70,87	5	71,62	5	72,09	5	72,48	5	73,27	5
18	Nusa Tenggara Barat	61,16	29	62,14	29	62,98	29	63,76	30	64,31	30	65,19	30
19	Nusa Tenggara Timur	59,21	32	60,24	31	60,81	31	61,68	31	62,26	31	62,67	32
20	Kalimantan Barat	61,97	28	62,35	28	63,41	28	64,30	29	64,89	29	65,59	29
21	Kalimantan Tengah	65,96	17	66,38	17	66,66	20	67,41	21	67,77	21	68,53	21
22	Kalimantan Selatan	65,20	21	65,89	21	66,68	19	67,17	22	67,63	22	68,38	22
23	Kalimantan Timur	71,31	3	72,02	3	72,62	3	73,21	3	73,82	3	74,17	3
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	67,99	14	68,64	14	68,76	18
25	Sulawesi Utara	67,83	7	68,31	7	69,04	7	69,49	7	69,96	7	70,39	7
26	Sulawesi Tengah	63,29	25	64,27	24	65,00	24	65,79	25	66,43	25	66,76	26
27	Sulawesi Selatan	66,00	15	66,65	13	67,26	13	67,92	15	68,49	15	69,15	14
28	Sulawesi Tenggara	65,99	16	66,52	16	67,07	16	67,55	18	68,07	19	68,75	19
29	Gorontalo	62,65	27	63,48	26	64,16	26	64,70	28	65,17	28	65,86	28
30	Sulawesi Barat	59,74	30	60,63	30	61,01	30	61,53	32	62,24	32	62,96	31
31	Maluku	64,27	23	64,75	23	65,43	23	66,09	24	66,74	24	67,05	24
32	Maluku Utara	62,79	26	63,19	27	63,93	27	64,78	27	65,18	27	65,91	27
33	Papua Barat	59,60	31	59,90	32	60,30	32	60,91	33	61,28	33	61,73	33
34	Papua	54,45	33	55,01	33	55,55	33	56,25	34	56,75	34	57,25	34
	Indonesia	66,53		67,09		67,70		68,31		68,90		69,55	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Lampiran 1.25

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 - 2015

No	Provinsi	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp 000)		Capaian		Pertumbuhan
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	69,35	69,50	13,53	13,73	8,71	8,77	8297	8533	68,81	69,45	0,93
2	Sumatera Utara	68,04	69,29	12,16	12,82	8,93	9,03	9391	9563	68,87	69,51	0,93
3	Sumatera Barat	68,32	68,66	13,48	13,60	8,29	8,42	9621	9804	69,36	69,98	0,98
4	Riau	70,76	70,93	12,45	12,74	8,47	8,49	10262	10364	70,33	70,84	0,73
5	Jambi	70,43	70,56	12,38	12,57	7,92	7,96	9141	9446	68,24	68,89	0,95
6	Sumatera Selatan	68,93	69,14	11,75	12,02	7,66	7,77	9302	9474	66,75	67,46	0,06
7	Bengkulu	68,37	68,50	13,01	13,18	8,28	8,29	8864	9123	68,06	68,59	0,78
8	Lampung	69,66	69,90	12,24	12,25	7,48	7,56	8476	8729	66,42	66,95	0,80
9	Kepulauan Bangka Belitung	69,72	69,88	11,18	11,60	7,35	7,46	11691	11781	68,27	69,05	1,14
10	Kepulauan Riau	69,15	69,41	12,51	12,60	9,64	9,65	13019	13177	73,40	73,75	0,48
11	DKI Jakarta	72,72	72,43	12,38	12,59	10,54	10,7	16896	17075	78,39	78,99	0,77
12	Jawa Barat	72,23	72,41	12,08	12,15	7,71	7,86	9447	9778	68,80	69,50	1,02
13	Jawa Tengah	73,88	73,96	12,17	12,38	6,93	7,03	9640	9930	68,78	69,49	1,03
14	DI Yogyakarta	74,50	74,68	14,85	15,03	8,84	9,00	12294	12684	76,81	77,59	1,02
15	Jawa Timur	70,45	70,68	12,45	12,66	7,05	7,14	10012	10383	68,14	68,95	1,19
16	Banten	69,13	69,43	12,31	12,35	8,19	8,27	11150	11261	69,89	70,27	0,54
17	Bali	71,20	71,35	12,64	12,97	8,11	8,26	12831	13078	72,48	73,27	1,09
18	Nusa Tenggara Barat	64,90	65,38	12,73	12,04	6,67	6,71	8987	9241	64,31	65,19	1,37
19	Nusa Tenggara Timur	65,91	65,96	12,65	12,84	6,85	6,93	6934	7003	62,26	62,67	0,66
20	Kalimantan Barat	69,76	69,87	11,89	12,25	6,83	6,93	8175	8279	64,89	65,59	1,084
21	Kalimantan Tengah	69,39	69,54	11,93	12,22	7,82	8,03	9682	9809	67,77	68,53	1,12
22	Kalimantan Selatan	67,47	67,80	11,96	12,21	7,60	7,76	10748	10891	67,63	68,38	1,11
23	Kalimantan Timur	73,62	73,65	13,17	13,18	9,04	9,15	11019	11229	73,82	74,17	0,47
24	Kalimantan Utara	72,12	72,16	12,52	12,54	8,35	8,36	8289	8354	68,64	68,76	0,17
25	Sulawesi Utara	70,94	70,99	12,16	12,43	8,86	8,88	9628	9729	69,96	70,39	0,61
26	Sulawesi Tengah	67,18	67,26	12,71	12,72	7,89	7,97	8602	8768	66,43	66,76	0,50
27	Sulawesi Selatan	69,60	69,80	12,90	12,99	7,49	7,64	8723	9992	68,49	69,15	0,96
28	Sulawesi Tenggara	70,39	70,44	12,78	13,07	8,02	8,18	8555	8697	68,07	68,75	1,00
29	Gorontalo	67,00	67,12	12,49	12,70	6,97	7,05	8762	9035	65,17	65,86	1,06
30	Sulawesi Barat	64,04	64,22	11,78	12,22	6,88	6,94	8170	8260	62,24	62,96	1,16
31	Maluku	65,01	65,31	13,53	13,56	9,15	9,16	7925	8026	66,74	67,05	0,46
32	Maluku Utara	67,34	67,44	12,72	13,10	8,34	8,37	7234	7423	65,18	65,91	1,12
33	Papua Barat	65,14	65,19	11,87	12,06	6,96	7,01	6944	7064	61,28	61,73	0,73
34	Papua	64,84	65,09	9,94	9,95	5,76	5,99	6416	6469	56,75	57,25	0,88
	Indonesia	70,59	70,84	12,39	12,55	7,73	7,84	9903	10150	68,9	69,55	0,94

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Lampiran 2.1

**JUMLAH PUSKESMAS DAN RASIONYA TERHADAP PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 - 2015**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas					Rasio Puskesmas per 30.000 Penduduk				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	325	330	334	337	339	2,14	2,15	2,14	2,14	2,03
2	Sumatera Utara	542	555	570	570	571	1,24	1,26	1,28	1,26	1,23
3	Sumatera Barat	254	260	262	264	264	1,55	1,57	1,56	1,55	1,52
4	Riau	203	207	207	211	212	1,06	1,05	1,01	1,00	1,00
5	Jambi	174	176	176	176	176	1,65	1,63	1,59	1,55	1,55
6	Sumatera Selatan	304	317	319	321	322	1,20	1,23	1,22	1,20	1,20
7	Bengkulu	178	178	180	180	180	3,06	3,01	3,00	2,95	2,88
8	Lampung	269	276	280	290	291	1,05	1,06	1,07	1,09	1,08
9	Kepulauan Bangka Belitung	58	60	60	61	62	1,38	1,38	1,34	1,33	1,35
10	Kepulauan Riau	67	69	70	73	72	1,14	1,12	1,08	1,08	1,09
11	DKI Jakarta	340	340	340	340	340	1,05	1,03	1,02	1,01	1,00
12	Jawa Barat	1.046	1.046	1.050	1.050	1.050	0,72	0,70	0,69	0,68	0,67
13	Jawa Tengah	867	873	873	875	875	0,80	0,80	0,80	0,80	0,78
14	DI Yogyakarta	121	121	121	121	121	1,04	1,03	1,02	1,01	0,99
15	Jawa Timur	956	960	960	960	960	0,76	0,76	0,75	0,75	0,74
16	Banten	226	228	230	231	233	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58
17	Bali	114	118	120	120	120	0,86	0,87	0,87	0,85	0,87
18	Nusa Tenggara Barat	152	157	158	158	158	1,00	1,02	1,02	1,01	0,98
19	Nusa Tenggara Timur	342	349	362	370	371	2,15	2,15	2,18	2,19	2,17
20	Kalimantan Barat	235	237	237	238	238	1,59	1,59	1,58	1,57	1,30
21	Kalimantan Tengah	179	190	194	195	195	2,39	2,49	2,50	2,47	3,27
22	Kalimantan Selatan	224	226	228	228	230	1,82	1,80	1,78	1,75	1,73
23	Kalimantan Timur	215	217	222	174	174	1,75	1,70	1,68	1,49	1,52
24	Kalimantan Utara	-	-	-	48	49	-	-	-	2,37	2,29
25	Sulawesi Utara	170	177	183	187	187	2,22	2,28	2,33	2,35	2,33
26	Sulawesi Tengah	173	176	183	184	189	1,93	1,93	1,97	1,94	1,97
27	Sulawesi Selatan	421	425	440	446	448	1,55	1,55	1,59	1,59	1,58
28	Sulawesi Tenggara	249	258	264	269	269	3,28	3,33	3,34	3,34	3,23
29	Gorontalo	86	87	91	93	93	2,43	2,40	2,46	2,46	2,46
30	Sulawesi Barat	86	91	92	94	94	2,17	2,24	2,20	2,20	2,20
31	Maluku	170	178	190	197	199	3,24	3,30	3,43	3,46	3,54
32	Maluku Utara	115	119	125	127	127	3,24	3,28	3,36	3,34	3,28
33	Papua Barat	126	128	143	149	151	4,80	4,70	5,07	5,09	5,20
34	Papua	334	381	391	394	394	3,36	3,64	3,54	3,39	3,75
	Indonesia	9.321	9.510	9.655	9.731	9.754	1,16	1,17	1,17	1,16	1,15

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 2.2

**JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 - 2015**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas Rawat Inap					Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	137	144	149	143	143	188	186	185	194	196
2	Sumatera Utara	153	157	164	164	164	389	398	406	406	407
3	Sumatera Barat	86	89	88	91	91	168	171	174	173	173
4	Riau	55	63	75	79	79	148	144	132	132	133
5	Jambi	62	62	68	68	68	112	114	108	108	108
6	Sumatera Selatan	86	106	95	95	95	218	211	224	226	227
7	Bengkulu	43	43	45	45	46	135	135	135	135	134
8	Lampung	60	69	91	101	112	209	207	189	189	179
9	Kepulauan Bangka Belitung	19	20	20	20	21	39	40	40	41	41
10	Kepulauan Riau	26	26	26	29	28	41	43	44	44	44
11	DKI Jakarta	52	52	30	30	30	288	288	310	310	310
12	Jawa Barat	220	220	176	176	176	826	826	874	874	874
13	Jawa Tengah	265	268	309	318	320	602	605	564	557	555
14	DI Yogyakarta	40	42	42	42	43	81	79	79	79	78
15	Jawa Timur	400	441	504	518	519	556	519	456	442	441
16	Banten	53	56	56	56	56	173	172	174	175	177
17	Bali	28	29	34	34	35	86	89	86	86	85
18	Nusa Tenggara Barat	84	84	109	109	109	68	73	49	49	49
19	Nusa Tenggara Timur	123	128	128	137	137	219	221	234	233	234
20	Kalimantan Barat	94	96	94	95	95	141	141	143	143	143
21	Kalimantan Tengah	69	70	73	73	73	110	120	121	122	122
22	Kalimantan Selatan	48	49	45	45	46	176	177	183	183	184
23	Kalimantan Timur	94	94	127	95	95	121	123	95	79	79
24	Kalimantan Utara	-	-	-	32	32	-	-	-	16	17
25	Sulawesi Utara	85	88	88	92	92	85	89	95	95	95
26	Sulawesi Tengah	72	72	78	78	79	101	104	105	106	110
27	Sulawesi Selatan	218	225	225	228	227	203	200	215	218	221
28	Sulawesi Tenggara	74	74	79	78	80	175	184	185	191	189
29	Gorontalo	23	23	25	25	23	63	64	66	68	70
30	Sulawesi Barat	35	35	43	44	44	51	56	49	50	50
31	Maluku	56	61	63	64	64	114	117	127	133	135
32	Maluku Utara	28	28	27	27	27	87	91	98	100	100
33	Papua Barat	39	39	39	43	43	87	89	104	106	108
34	Papua	92	99	102	104	104	242	282	289	290	290
	Indonesia	3.019	3.152	3.317	3.378	3.396	6.302	6.358	6.338	6.353	6.358

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 2.3

**JUMLAH PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DENGAN PELAYANAN PENGEMBANGAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Puskesmas					Rumah Sakit yang dilatih Akupuntur dan Herbal
		Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	Upaya Kesehatan Kerja	Upaya Kesehatan Olahraga	Upaya Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	153	47	37	41	90	5
2	Sumatera Utara	171	134	13	99	910	6
3	Sumatera Barat	112	8	26	26	45	7
4	Riau	76	60	32	55	39	7
5	Jambi	58	85	117	9	33	6
6	Sumatera Selatan	132	86	36	70	33	5
7	Bengkulu	87	-	127	32	52	3
8	Lampung	111	107	27	51	90	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	52	49	33	29	23	4
10	Kepulauan Riau	46	37	6	49	37	3
11	DKI Jakarta	44	37	16	48	44	0
12	Jawa Barat	524	712	75	50	140	11
13	Jawa Tengah	285	39	123	88	256	12
14	DI Yogyakarta	76	-	8	56	30	3
15	Jawa Timur	283	611	71	61	184	8
16	Banten	148	167	63	92	47	5
17	Bali	84	91	62	82	43	4
18	Nusa Tenggara Barat	83	90	29	40	27	3
19	Nusa Tenggara Timur	146	-	4	17	137	3
20	Kalimantan Barat	125	-	12	66	83	3
21	Kalimantan Tengah	23	33	10	26	23	4
22	Kalimantan Selatan	38	81	113	10	40	3
23	Kalimantan Timur	36	43	7	41	47	1
24	Kalimantan Utara	18	19	4	-	16	0
25	Sulawesi Utara	52	-	42	45	59	2
26	Sulawesi Tengah	8	36	4	12	22	2
27	Sulawesi Selatan	105	215	116	135	59	4
28	Sulawesi Tenggara	49	22	4	28	25	2
29	Gorontalo	24	75	33	27	15	4
30	Sulawesi Barat	15	-	4	32	28	3
31	Maluku	46	-	2	72	21	1
32	Maluku Utara	9	-	4	13	14	1
33	Papua Barat	24	8	1	7	40	2
34	Papua	0	10	1	23	19	2
Indonesia		3.243	2.902	1.262	1.532	2.771	133

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Ditjen. P2P, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 2.4

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Tenaga Kesehatan Puskesmas Terlatih	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Tenaga Kesehatan Puskesmas Terlatih	Jumlah Puskesmas Dengan Tenaga Kesehatan Terlatih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	11	47,8	41
2	Sumatera Utara	29	87,9	99
3	Sumatera Barat	9	47,4	26
4	Riau	12	100,0	55
5	Jambi	4	36,4	9
6	Sumatera Selatan	17	100,0	70
7	Bengkulu	4	40,0	32
8	Lampung	14	93,3	51
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	100,0	29
10	Kepulauan Riau	5	71,4	49
11	DKI Jakarta	6	100,0	48
12	Jawa Barat	21	77,8	50
13	Jawa Tengah	23	65,7	88
14	DI Yogyakarta	5	100,0	56
15	Jawa Timur	34	89,5	61
16	Banten	8	100,0	92
17	Bali	9	100,0	82
18	Nusa Tenggara Barat	10	100,0	40
19	Nusa Tenggara Timur	8	34,8	17
20	Kalimantan Barat	14	100,0	66
21	Kalimantan Tengah	10	71,4	26
22	Kalimantan Selatan	4	30,8	10
23	Kalimantan Timur	9	90,0	41
24	Kalimantan Utara	-	-	-
25	Sulawesi Utara	11	73,3	45
26	Sulawesi Tengah	4	30,8	12
27	Sulawesi Selatan	24	100,0	135
28	Sulawesi Tenggara	12	70,6	28
29	Gorontalo	6	100,0	27
30	Sulawesi Barat	6	100,0	32
31	Maluku	11	100,0	72
32	Maluku Utara	7	70,0	13
33	Papua Barat	4	30,8	7
34	Papua	4	13,8	23
Indonesia		362	71,0	1.532

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 2.5

**JUMLAH RUMAH SAKIT DI INDONESIA
MENURUT PENGELOLA DAN PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Rumah Sakit Publik															Rumah Sakit Privat					
		Kemenkes			Pemda			TNI/POLRI			Kementerian Lain			Swasta Non Profit			Swasta			BUMN		
		RS Umum	RS Khusus	Jumlah	RS Umum	RS Khusus	Jumlah	RS Umum	RS Khusus	Jumlah	RS Umum	RS Khusus	Jumlah	RS Umum	RS Khusus	Jumlah	RS Umum	RS Khusus	Jumlah	RS Umum	RS Khusus	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Aceh	0	0	0	24	2	26	5	0	5	0	0	0	16	0	16	15	1	16	3	0	3
2	Sumatera Utara	1	0	1	34	3	37	9	0	9	0	0	0	67	8	75	41	6	47	14	1	15
3	Sumatera Barat	1	1	2	19	2	21	4	0	4	0	0	0	11	9	20	4	13	17	1	0	1
4	Riau	0	0	0	16	2	18	4	0	4	1	0	1	4	1	5	27	10	37	3	0	3
5	Jambi	0	0	0	13	1	14	2	0	2	0	0	0	1	1	2	13	3	16	0	0	0
6	Sumatera Selatan	1	1	2	21	4	25	4	0	4	0	0	0	9	3	12	7	8	15	5	0	5
7	Bengkulu	0	0	0	12	1	13	3	0	3	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	13	1	14	2	0	2	0	0	0	11	3	14	19	12	31	0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	9	1	10	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	1	4	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	11	0	11	2	0	2	0	0	0	4	2	6	4	1	5	1	0	1
11	DKI Jakarta	3	7	10	23	2	25	9	3	12	3	0	3	31	22	53	44	27	71	4	1	5
12	Jawa Barat	1	4	5	41	4	45	13	0	13	0	0	0	55	19	74	119	51	170	4	1	5
13	Jawa Tengah	2	3	5	51	5	56	12	0	12	1	1	2	103	26	129	49	25	74	2	0	2
14	DI Yogyakarta	1	0	1	7	2	9	4	0	4	0	0	0	26	13	39	15	5	20	0	1	1
15	Jawa Timur	0	1	1	58	9	67	29	2	31	1	0	1	86	30	116	79	53	132	11	2	13
16	Banten	0	1	1	10	0	10	2	0	2	0	0	0	11	5	16	35	23	58	1	0	1
17	Bali	1	0	1	9	2	11	3	0	3	0	0	0	15	3	18	18	4	22	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	12	1	13	2	0	2	0	0	0	4	0	4	8	1	9	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	19	0	19	5	0	5	0	0	0	13	4	17	3	0	3	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	16	3	19	6	0	6	0	0	0	7	0	7	7	5	12	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	16	1	17	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	14	2	16	4	0	4	0	0	0	3	4	7	3	3	6	2	0	2
23	Kalimantan Timur	0	0	0	13	2	15	4	0	4	0	0	0	4	1	5	12	9	21	2	0	2
24	Kalimantan Utara	0	0	0	5	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
25	Sulawesi Utara	2	0	2	15	1	16	4	0	4	0	1	1	14	0	14	3	2	5	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	16	1	17	2	0	2	0	0	0	4	4	8	1	3	4	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	1	1	2	30	3	33	7	0	7	0	0	0	12	8	20	12	10	22	0	1	1
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	17	1	18	2	0	2	0	0	0	4	0	4	1	3	4	1	0	1
29	Gorontalo	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	15	1	16	4	0	4	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	13	0	13	2	0	2	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	9	0	9	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	0	1
34	Papua	0	0	0	23	2	25	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	1	3	0	0	0
	Indonesia	14	19	33	621	59	680	162	5	167	6	2	8	538	167	705	553	280	833	55	7	62

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Keterangan : 1. Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

Lampiran 2.6

**JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN TEMPAT TIDUR
MENURUT PENGELOLA TAHUN 2011 - 2015**

No	Pengelola	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		RS	TT	RS	TT	RS	TT	RS	TT	RS	TT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian Kesehatan	14	9.724	14	10.832	14	11.028	14	10.673	14	11.343
2	Pemerintah Provinsi	47	14.065	49	16.292	53	18.526	52	17.030	68	20.832
3	Pemerintah Kab/Kota	472	52.536	508	74.741	525	84.694	537	81.954	553	95.254
4	TNI/POLRI	132	12.272	151	19.830	155	20.832	163	20.312	162	21.887
5	Kementerian Lain dan BUMN	73	8.535	71	8.040	63	7.444	65	7.285	61	7.507
6	Swasta dan Swasta Non Profit	634	52.694	815	74.033	915	102.816	1.024	99.356	1.091	117.193
Jumlah		1.372	149.826	1.608	203.768	1.725	245.340	1.855	236.610	1.949	274.016

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Keterangan : Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

Lampiran 2.7

**JUMLAH RUMAH SAKIT KHUSUS DAN TEMPAT TIDUR
MENURUT JENIS RUMAH SAKIT TAHUN 2011 - 2015**

No	Jenis Rumah Sakit	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		RS	TT	RS	TT	RS	TT	RS	TT	RS	TT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	RS Jiwa	52	7.541	53	8.542	51	10.349	51	10.585	45	10.394
2	RS Kusta	23	1.854	22	1.989	18	2.048	16	1.807	13	1.631
3	RS Tuberkulosa Paru	10	778	12	915	11	919	12	933	11	934
4	RS Mata	13	519	14	520	15	647	18	637	20	747
5	RS Bersalin	65	2.334	94	3.150	99	3.457	113	3.631	106	3.970
6	RS Ibu dan Anak	114	5.267	169	7.697	159	8.147	233	10.761	178	9.018
7	RS Khusus Lainnya	72	2.537	111	4.851	150	7.543	108	4.779	166	8.436
Jumlah		349	20.830	475	27.664	503	33.110	551	33.133	539	35.130

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Keterangan : Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

Lampiran 2.8

**JUMLAH RUMAH SAKIT, TEMPAT TIDUR, DAN RASIO TEMPAT TIDUR PER 1.000 PENDUDUK
MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk 2015	Kelas A			Kelas B			Kelas C			Kelas D			Belum Ditetapkan Kelas			Total		
			RS		TT	RS		TT	RS		TT	RS		TT	RS		TT	RS	TT	
			Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Aceh	5.001.953	2	3,03	924	7	10,61	1.943	25	37,88	3.269	7	10,61	538	25	37,88	1.650	66	8.324	1,66
2	Sumatera Utara	13.937.797	1	0,54	745	27	14,67	7.032	59	32,07	7.332	21	11,41	1.841	76	41,30	5.348	184	22.298	1,60
3	Sumatera Barat	5.196.289	1	1,54	316	5	7,69	1.698	28	43,08	3.467	9	13,85	633	22	33,85	846	65	6.960	1,34
4	Riau	6.344.402	1	1,47	182	8	11,76	2.056	26	38,24	2.797	17	25,00	1.010	16	23,53	665	68	6.710	1,06
5	Jambi	3.402.052	0	0,00	0	4	11,76	1.103	18	52,94	2.035	6	17,65	459	6	17,65	286	34	3.883	1,14
6	Sumatera Selatan	8.052.315	3	4,76	1568	5	7,94	1.082	26	41,27	3.902	13	20,63	961	16	25,40	995	63	8.508	1,06
7	Bengkulu	1.874.944	0	0,00	0	2	10,00	748	7	35,00	801	8	40,00	450	3	15,00	249	20	2.248	1,20
8	Lampung	8.117.268	0	0,00	0	5	8,20	1.585	27	44,26	3.289	12	19,67	890	17	27,87	1.256	61	7.020	0,86
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.372.813	0	0,00	0	1	5,88	1.25	10	58,82	1.184	4	23,53	341	2	11,76	46	17	1.696	1,24
10	Kepulauan Riau	1.973.043	0	0,00	0	6	24,00	1.257	12	48,00	1.324	2	8,00	109	5	20,00	136	25	2.826	1,43
11	DKI Jakarta	10.177.924	11	6,15	5074	44	24,58	10.843	37	20,67	3.099	19	10,61	1.029	68	37,99	4.651	179	24.696	2,43
12	Jawa Barat	46.709.569	9	2,88	2845	50	16,03	13.305	126	40,38	14.146	40	12,82	2.940	87	27,88	6.072	312	39.308	0,84
13	Jawa Tengah	33.774.141	8	2,86	3880	33	11,79	11.587	105	37,50	14.734	73	26,07	5.645	61	21,79	3.610	280	39.456	1,17
14	DI Yogyakarta	3.679.176	3	4,05	1097	12	16,22	2.674	11	14,86	879	24	32,43	1.404	24	32,43	4.779	74	10.833	2,94
15	Jawa Timur	38.847.561	5	1,39	4521	37	10,25	10.392	82	22,71	12.027	42	11,63	3.192	195	54,02	11.297	361	41.429	1,07
16	Banten	11.955.243	1	1,14	228	18	20,45	4.476	35	39,77	3.869	7	7,95	620	27	30,68	1.775	88	10.968	0,92
17	Bali	4.152.833	3	5,45	1260	6	10,91	1.567	19	34,55	2.372	10	18,18	788	17	30,91	858	55	6.845	1,65
18	Nusa Tenggara Barat	4.835.577	0	0,00	0	3	10,71	671	13	46,43	1.803	7	25,00	804	5	17,86	230	28	3.508	0,73
19	Nusa Tenggara Timur	5.120.061	0	0,00	0	1	2,27	376	15	34,09	2.004	18	40,91	1.469	10	22,73	675	44	4.524	0,88
20	Kalimantan Barat	5.493.891	1	2,27	482	4	9,09	1.208	18	40,91	2.386	8	18,18	760	13	29,55	772	44	5.608	1,02
21	Kalimantan Tengah	1.790.718	0	0,00	0	2	10,00	562	7	35,00	886	6	30,00	425	5	25,00	210	20	2.083	1,16
22	Kalimantan Selatan	3.989.793	2	5,71	1232	4	11,43	784	17	48,57	2.204	4	11,43	328	8	22,86	275	35	4.823	1,21
23	Kalimantan Timur	3.426.638	2	4,26	1229	7	14,89	1.760	17	36,17	2.449	6	12,77	352	15	31,91	650	47	6.440	1,88
24	Kalimantan Utara	641.936	0	0,00	0	1	14,29	306	3	42,86	520	3	42,86	113	0	0,00	0	7	939	1,46
25	Sulawesi Utara	2.412.118	1	2,38	1017	1	2,38	287	16	38,10	2.364	6	14,29	448	18	42,86	1.387	42	5.503	2,28
26	Sulawesi Tengah	2.876.689	0	0,00	0	3	9,68	1.207	12	38,71	1.837	6	19,35	420	10	32,26	557	31	4.021	1,40
27	Sulawesi Selatan	8.520.304	3	3,53	1555	22	25,88	5.298	29	34,12	4.417	8	9,41	564	23	27,06	1.036	85	12.870	1,51
28	Sulawesi Tenggara	2.499.540	0	0,00	0	2	6,90	603	10	34,48	1.008	6	20,69	387	11	37,93	500	29	2.498	1,00
29	Gorontalo	1.133.237	0	0,00	0	2	16,67	711	3	25,00	387	2	16,67	174	5	41,67	303	12	1.575	1,39
30	Sulawesi Barat	1.282.162	0	0,00	0	0	0,00	0	2	20,00	410	1	10,00	111	7	70,00	481	10	1.002	0,78
31	Maluku	1.686.469	0	0,00	0	3	11,11	665	5	18,52	599	12	44,44	751	7	25,93	402	27	2.417	1,43
32	Maluku Utara	1.162.345	0	0,00	0	1	5,26	328	3	15,79	352	7	36,84	530	8	42,11	290	19	1.500	1,29
33	Papua Barat	871.510	0	0,00	0	0	0,00	0	5	31,25	854	1	6,25	63	10	62,50	623	16	1.540	1,77
34	Papua	3.149.375	0	0,00	0	2	5,00	508	9	22,50	2.124	8	20,00	790	21	52,50	865	40	4.287	1,36
	Indonesia	255.461.686	57	2,29	28.155	328	13,18	88.747	837	33,64	107.130	423	17,00	31.339	843	33,88	53.775	2.488	309.146	1,21

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Ket: 1. Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

Lampiran 2.9

**JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT
MENURUT KELAS PERAWATAN DAN PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Total Tempat Tidur*	Kelas Perawatan												Ruang Non Rawat Inap***	
			V V I P		V I P		Kelas I		Kelas II		Kelas III		Ruang Rawat Inap Lainnya**		Jumlah	%
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	8.324	168	2,02	485	5,83	827	9,94	1.080	12,97	4.040	48,53	924	11,10	800	9,61
2	Sumatera Utara	22.298	395	1,77	1.546	6,93	2.939	13,18	4.528	20,31	8.642	38,76	2.595	11,64	1.653	7,41
3	Sumatera Barat	6.960	124	1,78	488	7,01	908	13,05	1.240	17,82	2.730	39,22	826	11,87	644	9,25
4	R i a u	6.710	180	2,68	527	7,85	840	12,52	1.074	16,01	2.486	37,05	976	14,55	627	9,34
5	J a m b i	3.883	84	2,16	329	8,47	459	11,82	613	15,79	1.547	39,84	469	12,08	382	9,84
6	Sumatera Selatan	8.508	164	1,93	509	5,98	1.124	13,21	1.719	20,20	3.438	40,41	952	11,19	602	7,08
7	Bengkulu	2.248	37	1,65	145	6,45	213	9,48	423	18,82	854	37,99	303	13,48	273	12,14
8	Lampung	7.020	136	1,94	525	7,48	802	11,42	1.167	16,62	2.699	38,45	1.022	14,56	669	9,53
9	Bangka Belitung	1.696	29	1,71	91	5,37	188	11,08	343	20,22	635	37,44	208	12,26	202	11,91
10	Kepulauan Riau	2.826	30	1,06	181	6,40	281	9,94	456	16,14	1.223	43,28	382	13,52	273	9,66
11	DKI Jakarta	24.696	657	2,66	2.270	9,19	3.100	12,55	4.519	18,30	8.789	35,59	3.396	13,75	1.965	7,96
12	Jawa Barat	39.308	598	1,52	2.950	7,50	4.821	12,26	7.705	19,60	13.888	35,33	5.581	14,20	3.765	9,58
13	Jawa Tengah	39.456	699	1,77	3.890	9,86	5.029	12,75	6.570	16,65	14.927	37,83	5.059	12,82	3.282	8,32
14	DI Yogyakarta	10.833	160	1,48	681	6,29	771	7,12	1.543	14,24	6.246	57,66	887	8,19	545	5,03
15	Jawa Timur	41.429	648	1,56	3.278	7,91	5.302	12,80	7.823	18,88	15.527	37,48	5.399	13,03	3.452	8,33
16	Banten	10.968	134	1,22	733	6,68	1.466	13,37	2.260	20,61	3.701	33,74	1.486	13,55	1.188	10,83
17	B a l i	6.845	153	2,24	1.022	14,93	790	11,54	953	13,92	2.282	33,34	906	13,24	739	10,80
18	Nusa Tenggara Barat	3.508	47	1,34	321	9,15	416	11,86	441	12,57	1.405	40,05	481	13,71	397	11,32
19	Nusa Tenggara Timur	4.524	36	0,80	245	5,42	367	8,11	703	15,54	2.144	47,39	531	11,74	498	11,01
20	Kalimantan Barat	5.608	40	0,71	274	4,89	534	9,52	916	16,33	2.547	45,42	758	13,52	539	9,61
21	Kalimantan Tengah	2.083	13	0,62	198	9,51	188	9,03	350	16,80	782	37,54	310	14,88	242	11,62
22	Kalimantan Selatan	4.823	77	1,60	431	8,94	583	12,09	840	17,42	1.912	39,64	607	12,59	373	7,73
23	Kalimantan Timur	6.440	117	1,82	538	8,35	818	12,70	1.158	17,98	2.417	37,53	787	12,22	605	9,39
24	Kalimantan Utara	939	15	1,60	59	6,28	56	5,96	146	15,55	378	40,26	177	18,85	108	11,50
25	Sulawesi Utara	5.503	97	1,76	272	4,94	536	9,74	1.056	19,19	2.443	44,39	668	12,14	431	7,83
26	Sulawesi Tengah	4.021	26	0,65	263	6,54	457	11,37	574	14,28	1.699	42,25	634	15,77	368	9,15
27	Sulawesi Selatan	12.870	297	2,31	1.292	10,04	1.608	12,49	1.904	14,79	4.703	36,54	1.744	13,55	1.322	10,27
28	Sulawesi Tenggara	2.498	19	0,76	150	6,00	213	8,53	356	14,25	1.148	45,96	283	11,33	329	13,17
29	Gorontalo	1.575	27	1,71	129	8,19	107	6,79	226	14,35	697	44,25	202	12,83	187	11,87
30	Sulawesi Barat	1.002	24	2,40	63	6,29	134	13,37	185	18,46	422	42,12	85	8,48	89	8,88
31	Maluku	2.417	15	0,62	121	5,01	208	8,61	394	16,30	1.211	50,10	197	8,15	271	11,21
32	Maluku Utara	1.500	40	2,67	138	9,20	157	10,47	229	15,27	573	38,20	202	13,47	161	10,73
33	Papua Barat	1.540	10	0,65	63	4,09	103	6,69	282	18,31	760	49,35	132	8,57	190	12,34
34	Papua	4.287	27	0,63	141	3,29	348	8,12	726	16,93	2.120	49,45	412	9,61	513	11,97
	Indonesia	309.146	5.323	1,72	24.348	7,88	36.693	11,87	54.502	17,63	121.015	39,14	39.581	12,80	27.684	8,95

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Keterangan :

* Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, dan Tempat tidur di ruang rawat inap lainnya

** Tempat tidur di ruang rawat inap lainnya mencakup ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi

*** Tempat tidur di ruang non rawat inap mencakup tempat tidur di IGD, Kamar Bersalin dan Ruang Operasi. Persentase terhadap total tempat tidur perawatan

Lampiran 2.10

**JUMLAH LAYANAN HIV AIDS DAN INFEKSI PENYAKIT MENULAR SEKSUAL (IMS)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Rumah Sakit Rujukan ODHA	Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA)	Konseling dan Tes HIV	Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan	Layanan Program Terapi Rumatan Metadon	Layanan TB HIV	Layanan Infeksi Menular Seksual (IMS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	8	1	8	8	-	3	6
2	Sumatera Utara	21	2	81	21	4	14	42
3	Sumatera Barat	3	3	33	3	1	2	21
4	Riau	17	2	64	17	1	4	41
5	Jambi	12	3	47	12	1	2	17
6	Sumatera Selatan	10	2	20	10	2	5	14
7	Bengkulu	2	1	11	2	-	2	10
8	Lampung	2	1	35	2	1	5	7
9	Kepulauan Bangka Belitung	3	2	17	3	-	4	13
10	Kepulauan Riau	8	3	29	8	1	7	7
11	DKI Jakarta	57	22	75	57	18	19	52
12	Jawa Barat	48	16	453	48	16	19	415
13	Jawa Tengah	53	28	333	53	8	16	137
14	DI Yogyakarta	9	1	46	9	5	8	35
15	Jawa Timur	48	10	313	48	10	20	289
16	Banten	11	28	85	11	7	5	163
17	Bali	12	4	103	12	6	6	23
18	Nusa Tenggara Barat	7	4	22	7	-	6	37
19	Nusa Tenggara Timur	9	2	9	9	-	2	6
20	Kalimantan Barat	9	4	32	9	3	6	19
21	Kalimantan Tengah	8	4	17	8	-	3	25
22	Kalimantan Selatan	3	5	11	3	-	4	7
23	Kalimantan Timur	7	2	34	7	2	5	35
24	Kalimantan Utara	3	1	11	3	-	2	8
25	Sulawesi Utara	5	3	33	5	-	5	20
26	Sulawesi Tengah	10	2	8	10	-	2	10
27	Sulawesi Selatan	25	4	100	25	6	10	39
28	Sulawesi Tenggara	2	1	8	2	-	3	21
29	Gorontalo	1	-	1	1	-	1	10
30	Sulawesi Barat	1	-	3	1	-	2	2
31	Maluku	3	1	12	3	-	3	10
32	Maluku Utara	3	1	1	3	-	2	2
33	Papua Barat	25	43	54	25	-	7	35
34	Papua	83	55	112	83	-	21	65
Indonesia		528	261	2.221	528	92	225	1.643

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 2.11

**JUMLAH PROGRAM STUDI DIPLOMA IV INSTITUSI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES)
SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2015**

No	Poltekkes	Jurusan/Program Studi														Total	
		Keperawatan			Kefarmasian	Kesehatan Masyarakat	Gizi	Keterapi Fisik				Keteknisian Medis					
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Farmasi	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Analisis Kesehatan	Teknik Elektromedik	Teknik Radiodiagnostik	Ortotik Prostetik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Aceh	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2	Medan	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3	Padang	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4	Riau	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	Jambi	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	Palembang	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	Bengkulu	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	Tanjung Karang	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
9	Tanjung Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jakarta I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Jakarta II	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4
13	Jakarta III	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
14	Bandung	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
15	Tasikmalaya	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
16	Semarang	2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8
17	Surakarta	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	7
18	DI Yogyakarta	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
19	Surabaya	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6
20	Malang	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
21	Banten	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Denpasar	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
23	Mataram	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
24	Kupang	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
25	Pontianak	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
26	Palangkaraya	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
27	Banjarmasin	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
28	Kalimantan Timur	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
29	Manado	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
30	Palu	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
31	Makassar	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	8
32	Kendari	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
33	Gorontalo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
34	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ternate	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37	Jayapura	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
38	Sorong	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Jumlah		33	36	9	1	13	19	3	1	1	1	9	2	2	2	132	

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemendes RI, 2016

Lampiran 2.12

JUMLAH PESERTA DIDIK PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKES BERDASARKAN JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2015

No	Poltekkes	Keperawatan			Kefarmasian	Kesmas	Gizi	Keterampilan Fisik				Keteknisian Medis				Jumlah
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Farmasi	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Analisis Kesehatan	Teknik Elektromedik	Teknik Radio Diagnostik	Ortotik Prostetik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	110	109	155	0	117	189	0	0	0	0	0	0	0	0	680
2	Medan	0	58	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	263
3	Padang	0	106	0	0	80	122	0	0	0	0	0	0	0	0	308
4	Riau	77	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
5	Jambi	91	115	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273
6	Palembang	89	78	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	204
7	Bengkulu	40	38	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	150
8	Tanjung Karang	117	231	0	0	99	0	0	0	0	0	115	0	0	0	562
9	Tanjung Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jakarta I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	62
12	Jakarta II	0	0	0	0	188	179	0	0	0	0	0	274	244	0	885
13	Jakarta III	0	39	0	0	0	0	146	0	0	0	40	0	0	0	225
14	Bandung	0	0	0	0	76	77	0	0	0	0	83	0	0	0	236
15	Tasikmalaya	0	219	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315
16	Semarang	250	241	167	0	172	173	0	0	0	0	0	0	240	0	1.243
17	Surakarta	95	77	0	0	0	0	178	98	96	82	0	0	0	90	716
18	DI Yogyakarta	160	199	109	0	159	165	0	0	0	0	106	0	0	0	898
19	Surabaya	0	76	63	0	87	0	0	0	0	0	48	75	0	0	349
20	Malang	224	387	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	756
21	Banten	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
22	Denpasar	79	59	0	0	51	54	0	0	0	0	0	0	0	0	243
23	Mataram	240	148	0	0	0	118	0	0	0	0	139	0	0	0	645
24	Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Pontianak	166	212	0	0	169	151	0	0	0	0	202	0	0	0	900
26	Palangkaraya	40	40	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	167
27	Banjarmasin	118	123	121	0	114	128	0	0	0	0	126	0	0	0	730
28	Kalimantan Timur	119	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237
29	Manado	178	170	0	0	176	174	0	0	0	0	0	0	0	0	698
30	Palu	85	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
31	Makassar	50	48	49	0	95	97	95	0	0	0	97	0	0	0	531
32	Kendari	0	69	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	112
33	Gorontalo	280	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559
36	Ternate	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
37	Jayapura	156	194	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	477
38	Sorong	95	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202
Total		2.988	3.721	827	0	1.583	2.343	419	98	96	82	956	349	484	152	14.098

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

**JUMLAH JURUSAN/PROGRAM STUDI DIPLOMA III INSTITUSI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES)
MENURUT JURUSAN DAN PROVINSI TAHUN 2015**

No	Poltekkes	Jurusan / Program Studi																	Total	
		Keperawatan			Kefarmasian			Kesmas	Gizi	Keterampilan Fisik				Keteknisian Medis						
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Farmasi	Analisis Farmasi & Makanan	Jamu	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Analisis Kesehatan	Teknik Elektromedik	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Teknik Gigi	Ortotik Prostetik		Perekam Informasi Kesehatan
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
1	Aceh	3	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2	Medan	1	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9
3	Padang	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
4	Riau	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5	Jambi	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6	Palembang	3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8
7	Bengkulu	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7
8	Tanjung Karang	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	10
9	Tanjung Pinang	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10	Pangkal Pinang	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
11	Jakarta I	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
12	Jakarta II	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	7
13	Jakarta III	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
14	Bandung	2	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10
15	Tasikmalaya	2	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10
16	Semarang	5	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	16
17	Surakarta	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	8
18	DI Yogyakarta	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
19	Surabaya	4	3	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	13
20	Malang	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
21	Banten	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
22	Denpasar	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
23	Mataram	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
24	Kupang	3	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9
25	Pontianak	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
26	Palangkaraya	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
27	Banjarmasin	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
28	Kalimantan Timur	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
29	Manado	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7
30	Palu	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
31	Makassar	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9
32	Kendari	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
33	Gorontalo	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
34	Mamuju	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
35	Maluku	3	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8
36	Ternate	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
37	Jayapura	7	4	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	16
38	Sorong	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Jumlah		71	62	18	12	1	1	25	32	2	1	1	1	22	2	3	2	2	4	262

Lampiran 2.14

JUMLAH PESERTA DIDIK PROGRAM DIPLOMA III POLTEKKES BERDASARKAN JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2015

No	Poltekkes	Keperawatan			Kefarmasian			Kesmas	Gizi	Keterapian Fisik				Keteknisian Medis					Jumlah	
		Keperawatan	Kehidanan	Keperawatan Gigi	Farmasi	Analisis Farmasi dan Makanan	Jamu	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Teknik Gigi	Analisis Kesehatan	Teknik Radio Diagnostik	Teknik Elektromedik	Ortotik Prostetik		Perekam Informasi Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Aceh	846	583	265	270	0	0	122	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.283
2	Medan	331	900	378	293	0	0	268	293	0	0	0	0	0	292	0	0	0	0	2.755
3	Padang	605	576	242	0	0	0	278	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.980
4	Riau	79	154	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387
5	Jambi	208	238	147	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725
6	Palembang	733	236	172	211	0	0	0	197	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	1.694
7	Bengkulu	328	303	0	0	0	0	141	57	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	957
8	Tanjung Karang	517	454	116	126	0	0	237	156	0	0	0	0	90	265	0	0	0	0	1.961
9	Tanjung Pinang	69	69	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297
10	Pangkal Pinang	83	76	0	126	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412
11	Jakarta I	234	233	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624
12	Jakarta II	0	0	0	280	223	0	171	168	0	0	0	0	120	0	186	158	0	0	1.306
13	Jakarta III	390	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	905
14	Bandung	561	563	152	200	0	0	180	223	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	2.136
15	Tasikmalaya	526	339	123	123	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	1.602
16	Semarang	1.374	723	244	0	0	0	259	178	0	0	0	0	0	201	374	0	0	138	3.491
17	Surakarta	392	303	0	0	0	214	0	0	254	201	191	201	0	0	0	0	129	0	1.885
18	DI Yogyakarta	157	200	176	0	0	0	247	144	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	1.030
19	Surabaya	526	314	229	0	0	0	342	34	0	0	0	0	0	59	0	208	0	0	1.712
20	Malang	899	786	0	0	0	0	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	2.129
21	Banten	348	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	865
22	Denpasar	292	175	119	0	0	0	128	148	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	995
23	Mataram	480	354	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	1.145
24	Kupang	1.030	561	196	244	0	0	257	208	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	2.724
25	Pontianak	308	222	234	0	0	0	161	213	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	1.342
26	Palangkaraya	220	201	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517
27	Banjarmasin	157	199	124	0	0	0	117	123	0	0	0	0	0	123	0	0	0	0	843
28	Kalimantan Timur	331	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0	906
29	Manado	332	303	174	198	0	0	198	169	0	0	0	0	0	274	0	0	0	0	1.648
30	Palu	30	133	0	0	0	0	134	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421
31	Makassar	841	285	292	315	0	0	268	274	283	0	0	0	0	282	0	0	0	0	2.840
32	Kendari	45	301	0	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	620
33	Gorontalo	448	430	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.110
34	Mamuju	95	173	0	0	0	0	80	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477
35	Maluku	1.028	242	0	0	0	0	312	208	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	1.926
36	Ternate	327	366	0	0	0	0	145	133	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	1.130
37	Jayapura	2.065	835	0	151	0	0	194	149	0	0	0	0	0	194	0	0	0	0	3.588
38	Sorong	544	313	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892
Total		17.779	13.082	3.540	2.537	223	214	4.530	5.355	537	201	191	201	210	4.114	560	366	129	491	54.260

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 2.15

**JUMLAH PESERTA DIDIK DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN
TAHUN AJARAN 2013/2014 SAMPAI DENGAN 2015/2016**

No	Institusi Poltekkes	Peserta Didik Poltekkes			Jumlah
		2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	KEPERAWATAN				
	1 Keperawatan	22.250	20.524	17.779	60.553
	2 Kebidanan	19.278	15.503	13.082	47.863
	3 Keperawatan Gigi	5.870	3.248	3.540	12.658
	Sub Total	47.398	39.275	34.401	121.074
B	KEFARMASIAN				
	1 Analis Farmasi dan Makanan	222	148	223	593
	2 Farmasi	2.490	2.602	2.537	7.629
	3 Jamu	75	76	214	365
	Sub Total	2.787	2.826	2.974	8.587
C	KESEHATAN MASYARAKAT				
	1 Kesehatan Lingkungan	5.945	5.158	4.530	15.633
	Sub Total	5.945	5.158	4.530	15.633
D	GIZI				
	1 Gizi	6.097	6.009	5.355	17.461
	Sub Total	6.097	6.009	5.355	17.461
E	KETERAPIAN FISIK				
	1 Fisioterapi	944	335	537	1.816
	2 Okupasi Terapi	334	94	201	629
	3 Terapi Wicara	259	89	191	539
	4 Akupunktur	191	45	201	437
	Sub Total	1.728	563	1.130	3.421
F	KETEKNISIAN MEDIS				
	1 Analis Kesehatan	4.766	4.763	4.114	13.643
	2 Teknik Gigi	294	164	210	668
	3 Teknik Radiologi & Radioterapi	910	579	560	2.049
	4 Rekam Medis dan Info Kes	119	421	491	1.031
	5 Teknik Elektro Medik	503	332	366	1.201
	6 Ortotik Prostetik	201	68	129	398
	Sub Total	6.793	6.327	5.870	18.990
	Total	70.748	60.158	54.260	185.166

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 2.16

**JUMLAH SARANA PRODUKSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Industri Farmasi	Industri Obat Tradisional (IOT)	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Produksi Alat Kesehatan	Produksi Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT)	Industri Kosmetika
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	0	0	9	0	0	0
2	Sumatera Utara	4	0	6	8	9	13
3	Sumatera Barat	1	0	20	0	1	4
4	Riau	0	0	17	0	1	0
5	Jambi	0	0	2	1	1	1
6	Sumatera Selatan	1	0	0	2	1	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	5	1	0	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	4	3	1	0
11	DKI Jakarta	35	10	105	50	41	76
12	Jawa Barat	81	19	222	45	40	97
13	Jawa Tengah	21	16	283	14	23	46
14	DI Yogyakarta	1	0	73	3	1	11
15	Jawa Timur	43	5	226	25	24	92
16	Banten	24	9	68	11	23	70
17	Bali	0	1	10	0	0	25
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	8	1	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	7	0	0	1
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	13	0	0	2
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	8	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	1	18	0	0	2
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	1	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	2	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	0	14	0	0	0
Indonesia		211	61	1.121	164	166	443

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemkes RI, 2016

Lampiran 2.17

**JUMLAH SARANA DISTRIBUSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Pedagang Besar Farmasi	Apotek	Toko Obat	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	27	327	638	40
2	Sumatera Utara	89	1.277	889	75
3	Sumatera Barat	49	511	328	42
4	Riau	51	516	286	32
5	Jambi	37	159	55	24
6	Sumatera Selatan	60	418	134	71
7	Bengkulu	24	223	72	23
8	Lampung	51	517	121	33
9	Kepulauan Bangka Belitung	8	154	98	3
10	Kepulauan Riau	36	239	324	21
11	DKI Jakarta	208	2.526	513	1.136
12	Jawa Barat	250	4.143	1.286	322
13	Jawa Tengah	237	3.467	335	146
14	DI Yogyakarta	44	625	58	39
15	Jawa Timur	296	3.673	453	283
16	Banten	58	996	166	128
17	Bali	68	600	258	46
18	Nusa Tenggara Barat	28	109	117	36
19	Nusa Tenggara Timur	26	279	117	36
20	Kalimantan Barat	46	235	341	47
21	Kalimantan Tengah	7	306	208	32
22	Kalimantan Selatan	46	379	488	28
23	Kalimantan Timur	49	486	213	38
24	Kalimantan Utara	2	63	33	0
25	Sulawesi Utara	32	186	105	19
26	Sulawesi Tengah	26	330	163	9
27	Sulawesi Selatan	93	767	377	127
28	Sulawesi Tenggara	18	321	110	10
29	Gorontalo	6	121	41	0
30	Sulawesi Barat	1	103	48	0
31	Maluku	14	169	113	11
32	Maluku Utara	6	103	21	6
33	Papua Barat	15	126	52	1
34	Papua	37	262	54	27
Indonesia		2.045	24.716	8.615	2.891

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 2.18

**PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYEDIAKAN OBAT DAN VAKSIN MENURUT *ITEM* OBAT
TRIWULAN IV TAHUN 2015**

No	Nama Obat	Satuan	Puskesmas yang Menyediakan Item Obat dan Vaksin	
			Jumlah	%*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Albendazol tab	Tablet	550	54,3
2	Amoxicillin 500 mg tab	Tablet	935	92,3
3	Amoxicillin syrup	Botol	898	88,6
4	Deksametason tab	Tablet	884	87,3
5	Diazepam injeksi 5 mg/mL	Ampul	522	51,5
6	Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL)	Ampul	730	72,1
7	Fitomenadion (Vitamin K) injeksi	Ampul	806	79,6
8	Furosemid tablet 40 mg	Tablet	872	86,1
9	Garam oralit	Kantong	949	93,7
10	Glibenklamid	Tablet	909	89,7
11	Kaptopril tab	Tablet	962	95,0
12	Magnesium Sulfat injeksi 20 %	Vial	457	45,1
13	Metilergometrin Maleat inj 0,200 mg-1 ml	Ampul	625	61,7
14	Obat Anti Tuberculosis dewasa	Paket	816	80,6
15	Oksitosin injeksi	Ampul	645	63,7
16	Parasetamol 500 mg tab	Tablet	977	96,4
17	Tablet Tambah Darah	Tablet	799	78,9
18	Vaksin BCG	Vial	919	90,7
19	Vaksin TT	Vial	909	89,7
20	Vaksin DPT/ DPT-HB/ DPT-HB-Hib	Vial	918	90,6

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Keterangan: Jumlah Puskesmas yang melapor sebanyak 1.013 Puskesmas dari 1.328 Puskesmas pemantauan yang dipilih berdasarkan *proportional random sampling* berbasis provinsi

* Persentase jumlah Puskesmas yang menyediakan obat dan vaksin terhadap Puskesmas yang melapor

Lampiran 2.19

**PERSENTASE INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA (IFK) YANG MELAKUKAN MANAJEMEN
PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN SESUAI STANDAR TRIWULAN IV TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah IFK	IFK Sesuai Standar	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	1	4,35
2	Sumatera Utara	33	4	12,12
3	Sumatera Barat	19	15	78,95
4	Riau	12	8	66,67
5	Jambi	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	15	88,24
7	Bengkulu	10	7	70,00
8	Lampung	15	10	66,67
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	85,71
10	Kepulauan Riau	7	4	57,14
11	DKI Jakarta	6	0	0,00
12	Jawa Barat	27	21	77,78
13	Jawa Tengah	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	21	55,26
16	Banten	8	5	62,50
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	7	70,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	10	45,45
20	Kalimantan Barat	14	10	71,43
21	Kalimantan Tengah	14	8	57,14
22	Kalimantan Selatan	13	11	84,62
23	Kalimantan Timur	10	7	70,00
24	Kalimantan Utara	5	3	60,00
25	Sulawesi Utara	15	6	40,00
26	Sulawesi Tengah	13	11	84,62
27	Sulawesi Selatan	24	3	12,50
28	Sulawesi Tenggara	14	8	57,14
29	Gorontalo	6	5	83,33
30	Sulawesi Barat	6	1	16,67
31	Maluku	11	3	27,27
32	Maluku Utara	10	2	20,00
33	Papua Barat	13	6	46,15
34	Papua	29	15	51,72
Jumlah		511	293	57,34

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 3.1

**REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan																	Tenaga Penunjang Kesehatan	Total SDM Kesehatan
		Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi Spesialis	Dokter Gigi	Tenaga Psikologi Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterampilan Fisik	Tenaga Keteknisian Medis	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Kesehatan Tradisional	Tenaga Kesehatan lain	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Aceh	1.322	1.550	16	282	37	8.421	6.217	1.165	3.156	851	736	399	674	1.043	0	6.099	31.968	5.626	37.594
2	Sumatera Utara	3.697	3.324	25	910	26	10.009	8.758	1.478	2.835	542	1.119	244	652	1.178	0	8.294	43.091	9.599	52.690
3	Sumatera Barat	970	1.015	18	397	13	5.852	4.303	924	713	373	484	107	939	769	0	946	17.823	5.172	22.995
4	Riau	1.131	1.076	21	346	23	5.562	4.327	949	465	234	303	99	464	516	0	673	16.189	5.161	21.350
5	Jambi	430	639	3	175	11	3.694	2.468	516	1.007	367	210	81	440	478	0	1.181	11.700	2.950	14.650
6	Sumatera Selatan	1.414	1.199	17	250	25	9.068	7.021	1.059	1.766	636	453	155	690	803	2	1.679	26.237	8.052	34.289
7	Bengkulu	166	377	3	91	5	2.693	2.485	284	552	147	192	37	108	275	0	637	8.052	1.927	9.979
8	Lampung	727	1.074	18	279	8	4.120	2.477	488	1.222	409	207	86	387	576	0	3.203	15.281	4.406	19.687
9	Kepulauan Bangka Belitung	176	335	3	86	7	2.397	925	266	295	218	139	73	250	281	0	520	5.971	2.368	8.339
10	Kepulauan Riau	360	528	8	137	13	2.401	985	231	209	82	109	38	267	251	0	1.333	6.952	2.115	9.067
11	DKI Jakarta	5.726	2.645	113	952	34	11.729	2.159	2.629	394	230	417	281	1.010	1.325	0	1.155	30.799	21.570	52.369
12	Jawa Barat	7.231	5.116	253	1.672	54	22.282	9.705	3.243	1.638	932	1.132	495	1.883	2.669	0	7.847	66.152	28.659	94.811
13	Jawa Tengah	5.724	4.682	148	1.228	114	29.154	12.573	3.608	3.145	1.251	1.629	817	2.217	3.455	0	7.074	76.819	32.492	109.311
14	DI Yogyakarta	1.513	1.039	45	326	18	4.516	977	689	207	282	305	148	588	713	0	878	12.244	6.457	18.701
15	Jawa Timur	6.146	4.457	120	1.482	670	27.047	14.499	3.839	911	1.150	1.544	455	1.742	2.962	3	2.378	69.405	34.569	103.974
16	Banten	2.485	1.397	97	460	26	8.072	4.949	1.219	641	241	395	253	1.112	955	0	313	22.615	8.257	30.872
17	Bali	1.749	1.154	14	309	12	4.178	1.823	406	859	319	342	78	285	527	0	1.378	13.433	7.301	20.734
18	Nusa Tenggara Barat	386	553	14	118	10	3.882	1.707	392	200	385	417	53	327	383	1	322	9.150	3.651	12.801
19	Nusa Tenggara Timur	354	676	1	153	10	4.896	1.900	615	886	580	415	97	451	520	0	2.677	14.231	4.524	18.755
20	Kalimantan Barat	456	676	14	139	10	4.276	1.974	542	475	297	375	72	744	581	0	4.056	14.687	3.354	18.041
21	Kalimantan Tengah	227	515	6	97	7	3.885	1.424	377	620	222	372	32	241	333	0	1.742	10.100	2.138	12.238
22	Kalimantan Selatan	728	706	6	169	11	3.992	1.873	505	783	283	385	45	619	446	0	2.290	12.841	3.206	16.047
23	Kalimantan Timur	544	858	29	242	8	6.412	2.225	716	200	192	255	81	244	526	0	370	12.902	5.747	18.649
24	Kalimantan Utara	57	203	2	52	1	1.355	471	120	213	41	55	9	52	92	0	164	2.887	488	3.375
25	Sulawesi Utara	644	945	2	87	7	3.432	789	428	351	309	345	86	210	111	0	1.736	9.482	2.690	12.172
26	Sulawesi Tengah	393	520	7	110	19	4.033	1.419	556	1.325	314	167	56	272	180	0	3.757	13.128	1.748	14.876
27	Sulawesi Selatan	2.082	1.441	26	608	10	11.174	4.585	1.378	1.545	688	890	281	942	1.207	0	1.599	28.456	6.245	34.701
28	Sulawesi Tenggara	184	384	2	116	8	2.724	1.096	389	998	421	475	62	207	183	0	1.678	8.927	1.312	10.239
29	Gorontalo	144	249	4	44	0	1.086	725	225	331	191	233	18	68	77	0	166	3.561	1.733	5.294
30	Sulawesi Barat	76	162	4	68	0	1.769	1.218	170	148	119	104	29	120	113	0	132	4.232	984	5.216
31	Maluku	134	318	6	91	7	2.645	812	184	330	269	300	22	75	99	0	1.673	6.965	1.233	8.198
32	Maluku Utara	83	241	3	52	0	1.808	1.279	199	600	85	223	21	102	109	0	452	5.257	745	6.002
33	Papua Barat	114	217	0	41	4	1.449	456	149	285	104	108	16	55	120	0	1.373	4.491	784	5.275
34	Papua	276	755	6	117	3	3.897	1.132	391	939	285	386	40	73	305	0	2.537	11.142	2.551	13.693
	Indonesia	47.849	41.026	1.054	11.686	1.211	223.910	111.736	30.329	30.244	13.049	15.221	4.866	18.510	24.161	6	72.312	647.170	229.814	876.984

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemendes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

Lampiran 3.2

**JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI PUSKESMAS
MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan										Tenaga Penunjang Kesehatan	Total SDM Kesehatan
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Gizi	Tenaga Kefarmasian	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	762	156	3.201	4.509	1.949	537	186	432	586	12.318	1.248	13.566
2	Sumatera Utara	1.419	523	3.602	7.154	1.055	281	191	564	307	15.096	709	15.805
3	Sumatera Barat	424	266	1.998	3.527	392	256	260	291	353	7.767	1.009	8.776
4	Riau	482	207	2.821	3.279	212	156	166	160	251	7.734	935	8.669
5	Jambi	302	110	1.639	1.843	361	187	140	94	169	4.845	377	5.222
6	Sumatera Selatan	441	116	4.145	4.939	975	367	149	251	343	11.726	1.440	13.166
7	Bengkulu	192	57	1.522	2.070	330	85	50	111	111	4.528	641	5.169
8	Lampung	507	191	1.768	1.655	719	227	120	96	153	5.436	582	6.018
9	Kepulauan Bangka Belitung	132	45	762	493	152	66	42	59	65	1.816	345	2.161
10	Kepulauan Riau	317	95	869	621	174	58	35	59	52	2.280	360	2.640
11	DKI Jakarta	767	425	1.024	905	196	137	90	100	359	4.003	2.516	6.519
12	Jawa Barat	1.880	801	5.565	6.607	930	565	320	547	239	17.454	3.918	21.372
13	Jawa Tengah	1.859	714	5.915	8.931	1.745	671	575	810	623	21.843	5.650	27.493
14	DI Yogyakarta	365	177	658	516	93	137	105	159	52	2.262	1.265	3.527
15	Jawa Timur	1.667	883	8.889	10.889	462	684	654	744	798	25.670	7.781	33.451
16	Banten	358	189	1.891	3.772	259	159	128	238	175	7.169	967	8.136
17	B a l i	320	170	659	765	404	118	44	109	21	2.610	509	3.119
18	Nusa Tenggara Barat	203	83	1.828	1.308	89	280	116	297	131	4.335	962	5.297
19	Nusa Tenggara Timur	315	97	2.496	1.264	507	416	186	277	241	5.799	745	6.544
20	Kalimantan Barat	324	80	2.006	1.468	340	217	191	248	222	5.096	822	5.918
21	Kalimantan Tengah	283	57	1.945	1.009	287	133	90	197	136	4.137	475	4.612
22	Kalimantan Selatan	353	111	1.568	1.343	605	177	126	233	181	4.697	494	5.191
23	Kalimantan Timur	367	162	1.938	1.406	149	142	112	159	215	4.650	1.422	6.072
24	Kalimantan Utara	126	38	618	324	138	33	31	41	61	1.410	130	1.540
25	Sulawesi Utara	459	27	1.310	517	147	193	1	229	161	3.044	226	3.270
26	Sulawesi Tengah	241	62	1.330	675	844	181	23	83	171	3.610	360	3.970
27	Sulawesi Selatan	625	378	3.626	3.153	843	432	245	512	434	10.248	991	11.239
28	Sulawesi Tenggara	244	67	1.469	698	515	315	19	324	185	3.836	355	4.191
29	Gorontalo	109	25	570	522	214	135	3	163	119	1.860	371	2.231
30	Sulawesi Barat	82	49	805	805	66	69	40	72	65	2.053	244	2.297
31	Maluku	151	60	1.450	504	162	137	13	198	55	2.730	220	2.950
32	Maluku Utara	150	36	888	1.014	250	62	35	156	88	2.679	175	2.854
33	Papua Barat	79	18	650	223	167	68	15	66	22	1.308	56	1.364
34	Papua	351	62	1.886	606	406	163	58	197	82	3.811	408	4.219
Indonesia		16.656	6.537	73.311	79.314	16.137	7.844	4.559	8.276	7.226	219.860	38.708	258.568

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdk.kemkes.go.id>)

Lampiran 3.3

KECUKUPAN DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS*
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015

No	Provinsi	Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter Gigi			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Perawat			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Bidan		
		Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	24,29	12,62	63,09	39,12	56,47	4,42	6,62	28,71	64,67	4,73	17,67	77,60
2	Sumatera Utara	26,77	8,80	64,44	42,45	34,80	22,75	9,75	49,33	40,92	2,87	20,46	76,67
3	Sumatera Barat	43,41	20,93	35,66	57,36	23,26	19,38	8,14	39,53	52,33	2,33	10,85	86,82
4	Riau	22,55	20,59	56,86	48,53	31,37	20,10	8,82	17,16	74,02	3,43	7,35	89,22
5	Jambi	37,93	24,14	37,93	47,13	44,83	8,05	9,77	27,01	63,22	6,90	17,24	75,86
6	Sumatera Selatan	39,62	30,99	29,39	30,03	66,77	3,19	9,58	25,24	65,18	3,51	25,88	70,61
7	Bengkulu	43,02	35,20	21,79	27,93	70,39	1,68	11,73	27,93	60,34	5,03	12,29	82,68
8	Lampung	38,11	14,72	47,17	24,53	56,98	18,49	8,30	50,94	40,75	8,30	50,94	40,75
9	Kepulauan Bangka Belitung	25,86	13,79	60,34	53,45	34,48	12,07	8,62	15,52	75,86	6,90	34,48	58,62
10	Kepulauan Riau	9,23	1,54	89,23	44,62	12,31	43,08	3,08	4,62	92,31	3,08	16,92	80,00
11	DKI Jakarta	51,78	21,60	26,63	61,83	22,78	15,38	0,59	86,69	12,72	1,48	87,57	10,95
12	Jawa Barat	50,10	8,38	41,52	45,76	41,43	12,81	10,60	54,34	35,07	8,96	34,30	56,74
13	Jawa Tengah	35,52	10,03	54,44	54,79	32,41	12,80	12,23	50,17	37,60	5,54	22,03	72,43
14	DI Yogyakarta	19,83	0,83	79,34	59,50	1,65	38,84	15,70	58,68	25,62	18,18	60,33	21,49
15	Jawa Timur	37,78	28,96	33,26	54,98	28,44	16,58	9,86	29,38	60,76	6,61	13,22	80,17
16	Banten	20,87	37,39	41,74	35,65	42,61	21,74	8,70	31,30	60,00	5,65	6,09	88,26
17	Bali	10,62	15,93	73,45	35,40	18,58	46,02	14,16	43,36	42,48	7,08	33,63	59,29
18	Nusa Tenggara Barat	31,01	51,27	17,72	47,47	50,00	2,53	7,59	20,25	72,15	10,76	37,97	51,27
19	Nusa Tenggara Timur	40,56	49,54	9,91	29,41	70,28	0,31	8,36	56,04	35,60	5,57	69,66	24,77
20	Kalimantan Barat	44,87	33,33	21,79	28,21	68,80	2,99	11,11	39,32	49,57	8,97	53,42	37,61
21	Kalimantan Tengah	43,02	26,82	30,17	24,58	72,07	3,35	5,59	17,88	76,54	6,70	52,51	40,78
22	Kalimantan Selatan	27,93	27,03	45,05	33,33	58,56	8,11	7,66	36,04	56,31	6,31	41,44	52,25
23	Kalimantan Timur	34,88	20,93	44,19	55,23	26,16	18,60	5,23	29,65	65,12	9,30	33,72	56,98
24	Kalimantan Utara	27,03	5,41	67,57	45,95	32,43	21,62	2,70	27,03	70,27	8,11	54,05	37,84
25	Sulawesi Utara	27,06	16,47	56,47	13,53	85,29	1,18	4,12	46,47	49,41	3,53	77,06	19,41
26	Sulawesi Tengah	43,37	33,73	22,89	30,12	66,27	3,61	7,83	39,16	53,01	9,64	70,48	19,88
27	Sulawesi Selatan	32,48	40,84	26,68	45,94	35,73	18,33	7,19	37,12	55,68	11,83	41,53	46,64
28	Sulawesi Tenggara	36,32	44,87	18,80	19,66	76,50	3,85	8,55	53,42	38,03	6,41	75,64	17,95
29	Gorontalo	48,31	29,21	22,47	25,84	73,03	1,12	7,87	51,69	40,45	12,36	37,08	50,56
30	Sulawesi Barat	36,56	56,99	6,45	41,94	52,69	5,38	5,38	32,26	62,37	4,30	23,66	72,04
31	Maluku	22,54	60,12	17,34	12,14	76,88	10,98	7,51	39,88	52,60	5,78	77,46	16,76
32	Maluku Utara	44,26	32,79	22,95	18,03	77,05	4,92	13,11	34,43	52,46	6,56	29,51	63,93
33	Papua Barat	25,93	65,74	8,33	11,11	87,04	1,85	5,56	59,26	35,19	3,70	87,96	8,33
34	Papua	23,22	56,04	20,74	6,81	87,31	5,88	4,64	60,99	34,37	3,41	87,00	9,60
	Indonesia	35,90	25,57	38,53	40,46	46,97	12,56	8,76	42,46	48,78	6,40	37,60	56,00

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bpsdmk.kemkes.go.id>)-(diolah oleh Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI)

Catatan : *dari 95% puskesmas yang melaporkan data

Lampiran 3.4

**JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI LIMA JENIS TENAGA KESEHATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas*	Jumlah Puskesmas Yang Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan Promotif Dan Preventif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	339	43
2	Sumatera Utara	571	39
3	Sumatera Barat	264	79
4	Riau	211	33
5	Jambi	176	15
6	Sumatera Selatan	322	46
7	Bengkulu	180	22
8	Lampung	290	22
9	Kepulauan Bangka Belitung	61	12
10	Kepulauan Riau	72	14
11	DKI Jakarta	340	16
12	Jawa Barat	1.050	37
13	Jawa Tengah	875	153
14	DI Yogyakarta	121	9
15	Jawa Timur	960	139
16	Banten	231	14
17	Bali	120	9
18	Nusa Tenggara Barat	158	14
19	Nusa Tenggara Timur	370	65
20	Kalimantan Barat	239	33
21	Kalimantan Tengah	195	26
22	Kalimantan Selatan	229	24
23	Kalimantan Timur	174	28
24	Kalimantan Utara	49	15
25	Sulawesi Utara	187	1
26	Sulawesi Tengah	187	9
27	Sulawesi Selatan	446	81
28	Sulawesi Tenggara	269	10
29	Gorontalo	93	2
30	Sulawesi Barat	94	16
31	Maluku	199	3
32	Maluku Utara	127	12
33	Papua Barat	149	1
34	Papua	394	17
	Indonesia	9.742	1.059

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

Catatan : *puskesmas yang melaporkan data

Lampiran 3.5

**JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan															Tenaga Penunjang Kesehatan	Total SDM Kesehatan
		Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi Spesialis	Dokter Gigi	Psikologi Klinis	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medis	Teknik Biomedika	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Aceh	1.319	725	16	113	37	5.034	1.613	464	168	179	151	227	460	795	11.301	3.592	14.893
2	Sumatera Utara	3.677	1.653	25	310	26	6.029	1.497	967	179	109	266	194	390	754	16.076	7.301	23.377
3	Sumatera Barat	968	548	18	129	12	3.754	739	534	68	82	160	101	502	491	8.106	3.416	11.522
4	Riau	1.128	582	21	129	21	2.695	1.025	670	86	50	125	93	259	321	7.205	3.704	10.909
5	Jambi	417	325	3	64	11	1.982	602	288	79	87	82	67	232	321	4.560	2.144	6.704
6	Sumatera Selatan	1.404	710	17	133	23	4.373	1.392	638	130	134	156	130	414	603	10.257	5.319	15.576
7	Bengkulu	161	185	3	34	3	1.083	395	141	41	37	64	29	60	180	2.416	880	3.296
8	Lampung	722	536	18	70	8	2.245	794	268	39	105	82	85	155	431	5.558	3.481	9.039
9	Kepulauan Bangka Belitung	172	177	3	35	7	1.361	326	166	57	123	58	42	149	219	2.895	1.542	4.437
10	Kepulauan Riau	353	202	8	41	13	1.498	352	163	10	18	44	35	99	206	3.042	1.733	4.775
11	DKI Jakarta	5.714	1.859	113	520	34	10.699	1.244	2.267	198	92	315	276	861	1.214	25.406	18.904	44.310
12	Jawa Barat	7.221	3.097	253	841	54	16.516	3.018	2.935	204	240	499	484	1.340	2.306	39.008	23.383	62.391
13	Jawa Tengah	5.715	2.705	148	481	114	23.103	3.534	2.886	144	417	674	720	1.493	2.721	44.855	25.058	69.913
14	DI Yogyakarta	1.510	650	45	128	18	3.788	444	618	35	102	122	130	372	575	8.537	4.621	13.158
15	Jawa Timur	6.121	2.729	119	561	668	18.063	3.538	2.966	132	372	749	411	1.091	2.222	39.742	24.803	64.545
16	Banten	2.483	1.018	96	264	23	6.087	1.105	1.017	280	56	141	243	377	762	13.952	6.852	20.804
17	Bali	1.749	767	14	127	12	3.472	1.030	355	51	99	201	73	206	466	8.622	6.355	14.977
18	Nusa Tenggara Barat	386	347	14	35	8	2.022	383	230	19	46	96	48	149	244	4.027	2.102	6.129
19	Nusa Tenggara Timur	351	339	1	52	9	2.285	594	304	58	100	100	78	239	318	4.828	3.299	8.127
20	Kalimantan Barat	455	340	14	55	10	2.257	505	316	43	78	123	69	170	385	4.820	2.456	7.276
21	Kalimantan Tengah	219	205	6	34	6	1.884	387	208	27	37	149	31	130	224	3.547	1.143	4.690
22	Kalimantan Selatan	664	349	6	56	11	2.402	513	301	48	95	138	44	140	273	5.040	2.552	7.592
23	Kalimantan Timur	544	481	28	75	8	4.466	810	495	16	38	91	75	161	404	7.692	3.338	11.030
24	Kalimantan Utara	57	73	2	12	1	722	139	53	6	4	9	9	26	50	1.163	222	1.385
25	Sulawesi Utara	634	386	2	57	6	2.012	252	203	80	85	83	61	80	109	4.050	2.176	6.226
26	Sulawesi Tengah	393	273	7	46	19	2.687	735	368	195	103	75	55	94	153	5.203	1.280	6.483
27	Sulawesi Selatan	2.077	795	26	225	10	7.512	1.416	861	406	165	340	255	537	936	15.561	4.433	19.994
28	Sulawesi Tenggara	174	129	2	47	7	1.206	369	146	152	47	94	45	92	139	2.649	643	3.292
29	Gorontalo	144	132	4	19	0	475	181	91	28	22	57	16	30	69	1.268	1.044	2.312
30	Sulawesi Barat	75	77	4	19	0	956	410	93	54	34	29	22	63	70	1.906	448	2.354
31	Maluku	131	158	2	29	6	1.124	281	105	75	80	74	17	39	80	2.201	770	2.971
32	Maluku Utara	81	82	2	15	0	867	228	81	79	8	43	18	14	68	1.586	351	1.937
33	Papua Barat	112	115	0	21	4	757	223	104	29	24	30	14	50	101	1.584	589	2.173
34	Papua	274	381	6	54	3	1.848	487	247	82	78	147	38	56	243	3.944	1.315	5.259
	Indonesia	47.605	23.130	1.046	4.831	1.192	147.264	30.561	21.549	3.298	3.346	5.567	4.235	10.530	18.453	322.607	171.249	493.856

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdm.kemkes.go.id>)

Lampiran 3.6

**JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang					Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Total
		Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Radiologi	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Rehabilitasi Medik			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	167	153	145	125	44	81	31	11	10	552	16	1.335
2	Sumatera Utara	355	367	453	301	112	220	110	52	19	1.688	25	3.702
3	Sumatera Barat	116	93	119	107	21	62	22	8	4	416	18	986
4	Riau	118	135	143	100	40	85	25	6	15	461	21	1.149
5	Jambi	48	49	63	46	22	28	17	7	2	135	3	420
6	Sumatera Selatan	188	151	210	112	47	85	20	24	12	555	17	1.421
7	Bengkulu	23	26	25	20	3	11	7	3	0	43	3	164
8	Lampung	81	97	106	80	40	54	23	12	5	224	18	740
9	Kepulauan Bangka Belitung	23	23	24	15	14	14	7	3	0	49	3	175
10	Kepulauan Riau	34	44	49	30	16	28	9	9	4	130	8	361
11	DKI Jakarta	508	614	691	405	227	387	145	63	111	2.563	113	5.827
12	Jawa Barat	667	904	985	569	369	577	181	78	174	2.717	253	7.474
13	Jawa Tengah	664	612	678	562	336	461	126	58	116	2.102	148	5.863
14	DI Yogyakarta	180	168	163	141	102	100	46	18	21	571	45	1.555
15	Jawa Timur	671	743	810	580	321	454	129	56	104	2.253	119	6.240
16	Banten	228	316	335	164	123	198	57	19	51	992	96	2.579
17	Bali	216	191	240	166	67	162	31	16	15	645	14	1.763
18	Nusa Tenggara Barat	51	53	47	48	13	32	14	2	1	125	14	400
19	Nusa Tenggara Timur	53	58	56	42	15	28	12	4	3	80	1	352
20	Kalimantan Barat	60	62	71	53	22	40	15	6	3	123	14	469
21	Kalimantan Tengah	30	28	25	21	10	17	14	2	5	67	6	225
22	Kalimantan Selatan	84	77	91	54	30	46	19	11	9	243	6	670
23	Kalimantan Timur	67	73	70	45	28	47	22	3	8	181	28	572
24	Kalimantan Utara	9	7	7	7	4	4	4	0	1	14	2	59
25	Sulawesi Utara	81	99	103	73	27	42	10	6	15	178	2	636
26	Sulawesi Tengah	50	44	49	46	17	31	8	3	1	144	7	400
27	Sulawesi Selatan	236	205	257	180	109	145	73	35	7	830	26	2.103
28	Sulawesi Tenggara	19	27	25	20	12	12	6	2	0	51	2	176
29	Gorontalo	21	16	21	15	9	11	6	0	0	45	4	148
30	Sulawesi Barat	7	9	9	11	4	7	1	0	0	27	4	79
31	Maluku	14	9	14	16	9	10	2	2	1	54	2	133
32	Maluku Utara	14	10	9	10	6	6	4	0	0	22	2	83
33	Papua Barat	18	23	21	19	5	7	3	1	0	15	0	112
34	Papua	29	38	47	43	11	23	11	1	3	68	6	280
	Indonesia	5.130	5.524	6.161	4.226	2.235	3.515	1.210	521	720	18.363	1.046	48.651

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

Lampiran 3.7

**PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS PENUNJANG
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota Kelas C*	Jumlah RS yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	12	3	25,00
2	Sumatera Utara	16	4	25,00
3	Sumatera Barat	16	1	6,25
4	Riau	12	4	33,33
5	Jambi	8	2	25,00
6	Sumatera Selatan	11	2	18,18
7	Bengkulu	6	0	0,00
8	Lampung	9	3	33,33
9	Kepulauan Bangka Belitung	6	5	83,33
10	Kepulauan Riau	6	1	16,67
11	DKI Jakarta**	-	-	-
12	Jawa Barat	18	10	55,56
13	Jawa Tengah	23	18	78,26
14	DI Yogyakarta	2	1	50,00
15	Jawa Timur	25	12	48,00
16	Banten	5	4	80,00
17	Bali	3	3	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	9	3	33,33
19	Nusa Tenggara Timur	11	0	0,00
20	Kalimantan Barat	9	1	11,11
21	Kalimantan Tengah	7	1	14,29
22	Kalimantan Selatan	9	1	11,11
23	Kalimantan Timur	8	6	75,00
24	Kalimantan Utara	3	2	66,67
25	Sulawesi Utara	6	0	0,00
26	Sulawesi Tengah	8	2	25,00
27	Sulawesi Selatan	18	8	44,44
28	Sulawesi Tenggara	8	1	12,50
29	Gorontalo	3	1	33,33
30	Sulawesi Barat	2	0	0,00
31	Maluku	4	0	0,00
32	Maluku Utara	2	0	0,00
33	Papua Barat	5	2	40,00
34	Papua	6	3	50,00
	Indonesia	296	104	35,14

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016 (<http://bppsdmk.kemkes.go.id>)

Catatan: *rumah sakit yang melaporkan data

**tidak ada data

Lampiran 3.8

**JUMLAH DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI
MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2015**

No	Provinsi	Dokter Umum	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang				Spesialis Lain	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis Dasar								Total
			Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anestesiologi	Spesialis Radiologi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi			Spesialis Bedah Mulut dan Maksillofasial	Spesialis Konservasi Gigi	Spesialis Periodonsia	Spesialis Ortodonsia	Spesialis Prostodonsia	Spesialis Kedokteran Gigi Anak	Spesialis Penyakit Mulut	Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Aceh	2.860	67	67	43	55	28	12	15	5	178	329	3	3	3	2	4	2	1	0	3.677
2	Sumatera Utara	8.410	239	252	161	268	94	39	88	43	644	1.744	14	11	4	38	3	6	1	2	12.061
3	Sumatera Barat	2.763	103	68	67	82	24	13	24	16	276	707	4	3	1	5	2	2	0	1	4.161
4	Riau	2.881	57	74	47	95	30	15	14	11	180	671	4	4	1	10	2	1	0	0	4.097
5	Jambi	1.179	29	23	19	38	13	5	6	7	58	203	1	0	0	2	1	0	0	0	1.584
6	Sumatera Selatan	2.681	137	97	74	155	30	13	11	24	228	398	3	3	1	4	2	2	0	0	3.863
7	Bengkulu	595	11	13	14	19	7	4	4	2	20	115	1	0	0	1	1	0	0	0	807
8	Lampung	2.010	42	40	43	50	19	17	14	6	87	263	3	1	0	3	2	2	0	0	2.602
9	Kepulauan Bangka Belitung	386	12	11	11	15	4	5	4	2	22	83	1	3	0	0	0	1	0	0	560
10	Kepulauan Riau	788	18	34	16	38	14	9	6	6	63	213	3	0	1	1	2	2	0	0	1.214
11	DKI Jakarta	16.747	585	698	347	770	383	238	168	77	2.724	5.311	96	208	72	199	111	89	32	2	28.857
12	Jawa Barat	17.002	431	595	308	519	284	185	160	59	1.601	4.099	86	85	28	122	58	73	11	8	25.714
13	Jawa Tengah	10.481	402	308	280	338	197	136	97	42	1.135	1.719	21	38	10	39	16	13	0	0	15.272
14	DI Yogyakarta	3.394	167	143	99	125	64	53	49	22	413	1.003	28	56	12	60	22	34	1	1	5.746
15	Jawa Timur	13.431	418	434	297	490	258	217	196	85	1.822	4.024	45	195	50	124	84	90	19	4	22.283
16	Banten	5.294	114	166	77	151	81	41	32	10	453	1.619	17	33	9	18	17	26	4	0	8.162
17	Bali	3.364	119	127	91	174	102	34	17	23	374	968	4	8	3	7	6	7	1	1	5.430
18	Nusa Tenggara Barat	962	22	18	13	27	9	7	8	2	65	184	1	1	1	2	1	2	1	0	1.326
19	Nusa Tenggara Timur	699	24	13	13	18	4	10	6	4	23	175	0	0	0	0	1	0	0	1	991
20	Kalimantan Barat	948	28	27	24	34	14	16	9	3	65	181	3	0	0	1	1	2	2	0	1.358
21	Kalimantan Tengah	603	22	11	13	18	7	9	10	2	36	104	1	0	2	1	0	2	0	0	841
22	Kalimantan Selatan	1.185	38	34	24	36	18	9	20	7	105	231	2	7	2	2	1	1	1	0	1.723
23	Kalimantan Timur	1.652	44	44	39	64	27	16	19	6	160	406	10	6	0	10	2	4	0	0	2.509
24	Kalimantan Utara	205	8	8	4	8	1	2	4	0	12	57	1	1	0	0	0	2	0	0	313
25	Sulawesi Utara	2.363	80	66	37	68	18	8	6	7	153	155	2	3	0	2	0	1	0	0	2.969
26	Sulawesi Tengah	525	20	15	18	21	6	11	5	2	53	105	1	1	0	0	0	0	0	0	783
27	Sulawesi Selatan	3.874	152	126	128	152	93	83	63	25	486	1.340	11	15	3	8	15	8	0	1	6.583
28	Sulawesi Tenggara	449	14	12	12	19	6	6	9	2	32	165	0	0	0	0	0	1	0	0	727
29	Gorontalo	282	12	12	8	10	6	4	4	0	27	42	1	1	0	0	0	1	0	0	410
30	Sulawesi Barat	123	4	7	4	6	1	1	3	0	8	66	1	1	0	0	1	0	0	0	226
31	Maluku	296	7	4	8	9	1	2	2	2	26	59	0	2	0	0	0	1	0	0	419
32	Maluku Utara	193	7	5	5	6	0	1	2	0	8	40	1	3	0	1	0	1	0	0	273
33	Papua Barat	227	6	7	8	10	2	4	2	0	5	35	0	0	0	0	0	0	0	0	306
34	Papua	745	10	27	22	15	6	3	7	1	41	96	1	0	1	0	0	0	1	0	976
	Indonesia	109.597	3.449	3.586	2.374	3.903	1.851	1.228	1.084	503	11.583	26.910	370	692	204	663	354	376	76	20	168.823

Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2016

Lampiran 3.9

**JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 - 2015**

No	Provinsi	Perawat	Bidan	Fisioterapi	Perawat Gigi	Refraksi Optisien	Terapi Wicara	Radiografi	Okupasi Terapis	Gizi	Rekam Medis	Teknik Gigi	Kesehatan Lingkungan	Elektromedik	Analisis Kesehatan	Perawat Anestesi	Akupunktur	Fisikawan Medis	Ortotis Prostetik	Transfusi Darah	Teknik Kardiovaskular	Kesehatan Masyarakat	Promosi Kesehatan	Tradisional Komplementer	Psikologi Klinis	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
1	Aceh	22.036	24.639	584	1.171	63	1	349	1	1.084	305	17	465	217	1.405	34	0	5	3	14	0	2.341	0	0	0	8	54.742
2	Sumatera Utara	26.362	45.733	552	967	266	7	575	5	1.429	238	10	644	270	1.584	101	0	37	6	10	0	172	0	0	7	78.975	
3	Sumatera Barat	9.497	14.446	329	760	310	8	396	4	1.082	594	35	141	146	809	96	0	3	2	10	0	726	0	0	12	29.406	
4	Riau	12.910	18.810	202	266	64	10	138	7	549	349	49	15	38	847	108	0	1	2	11	0	12	0	0	0	34.388	
5	Jambi	6.706	5.791	96	453	13	3	75	0	417	22	7	671	15	696	30	0	1	0	6	0	362	0	0	4	15.368	
6	Sumatera Selatan	15.624	15.165	342	708	191	9	492	10	775	310	18	1.066	28	1.109	52	0	4	0	8	0	789	0	0	10	36.710	
7	Bengkulu	4.127	5.376	18	169	11	0	82	0	591	0	8	256	18	492	33	0	1	0	0	0	423	0	0	2	11.607	
8	Lampung	9.750	12.727	81	556	44	4	379	8	556	48	49	922	22	1.198	83	0	0	0	23	0	143	0	0	6	26.599	
9	Kepulauan Bangka Belitung	3.745	1.720	42	109	9	1	72	0	273	40	20	129	18	187	14	0	1	0	2	0	157	0	0	0	6.539	
10	Kepulauan Riau	3.012	2.419	30	72	30	0	65	10	86	4	5	144	26	155	7	2	0	0	7	0	2	0	0	0	6.076	
11	DKI Jakarta	30.083	16.158	1.129	1.213	914	437	1.514	223	1.770	740	149	703	659	2.296	251	0	91	50	490	54	184	0	0	68	59.176	
12	Jawa Barat	37.990	36.932	919	1.782	352	148	919	120	1.967	1.135	48	549	196	4.074	449	0	10	5	116	0	263	0	0	12	87.986	
13	Jawa Tengah	58.652	45.557	2.096	1.617	754	258	1.829	200	2.999	2.538	15	1.449	522	4.777	381	114	80	144	51	0	2.324	0	0	79	126.436	
14	DI Yogyakarta	8.427	6.974	329	761	93	13	532	14	1.243	801	0	923	79	1.828	175	0	13	1	546	0	1.018	0	0	51	23.821	
15	Jawa Timur	10.707	25.796	321	814	549	45	512	80	533	994	250	793	621	2.181	531	192	13	8	97	0	2.183	0	0	54	47.274	
16	Banten	9.439	9.216	238	246	75	7	270	0	323	123	11	228	49	931	76	0	1	2	57	0	119	0	0	1	21.412	
17	Bali	5.493	5.385	204	588	42	7	274	14	564	18	10	59	45	430	160	0	9	1	6	0	124	0	0	7	13.440	
18	Nusa Tenggara Barat	6.107	5.435	51	283	25	1	96	2	921	140	7	69	43	750	42	0	1	0	12	0	337	0	0	2	14.324	
19	Nusa Tenggara Timur	7.727	4.937	113	602	21	1	46	0	693	91	1	391	11	582	52	0	1	0	20	0	0	0	0	0	15.289	
20	Kalimantan Barat	7.571	4.278	86	680	35	1	24	0	586	25	2	719	17	663	31	0	0	0	4	0	431	0	0	4	15.157	
21	Kalimantan Tengah	4.159	4.017	60	187	7	2	54	2	427	9	4	52	27	183	29	0	3	0	2	0	23	0	0	4	9.251	
22	Kalimantan Selatan	7.755	6.676	56	740	36	1	278	6	855	116	15	371	24	831	41	0	4	0	15	0	904	0	0	10	18.734	
23	Kalimantan Timur	8.134	4.462	115	153	10	3	129	8	436	60	13	318	46	853	68	0	0	0	29	0	533	0	0	0	15.370	
24	Kalimantan Utara	306	130	0	3	0	0	0	0	3	0	0	8	6	2	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	512	
25	Sulawesi Utara	4.895	1.169	218	332	16	2	28	10	424	1	18	599	17	39	29	0	1	2	11	0	0	0	0	0	7.811	
26	Sulawesi Tengah	3.896	2.756	54	94	3	2	54	1	185	0	0	14	15	130	24	0	0	0	1	0	1.096	0	0	0	8.325	
27	Sulawesi Selatan	33.248	28.366	754	1.236	25	5	647	12	1.775	824	113	1.462	316	2.239	87	0	52	1	29	0	3.551	0	0	0	74.742	
28	Sulawesi Tenggara	7.619	5.725	59	197	8	0	16	1	1.165	15	7	879	11	421	23	0	0	0	7	0	2.217	0	0	0	18.370	
29	Gorontalo	1.470	1.447	22	57	7	0	26	0	568	3	0	12	22	63	10	0	0	0	7	0	644	0	0	0	4.358	
30	Sulawesi Barat	3.650	2.364	17	37	0	0	24	0	54	9	4	47	9	31	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	6.337	
31	Maluku	4.084	2.195	17	41	4	0	5	0	700	6	1	142	35	76	20	0	0	0	3	0	340	0	0	0	7.669	
32	Maluku Utara	1.679	476	28	11	0	0	60	0	325	0	6	20	0	165	20	0	0	0	4	0	600	0	0	0	3.394	
33	Papua Barat	2.753	928	17	45	1	0	14	0	256	8	0	34	10	261	6	0	0	0	5	0	43	0	0	0	4.381	
34	Papua	5.358	1.790	52	77	0	0	33	1	481	10	5	189	6	672	21	0	0	0	12	0	278	0	0	0	8.985	
	Indonesia	384.971	369.995	9.231	17.027	3.978	976	10.007	739	26.095	9.576	897	14.483	3.584	32.960	3.084	308	332	227	1.615	54	22.484	0	0	341	912.964	

Sumber: Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemendes RI, 2016

Lampiran 3.10

**JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Perawat	Bidan	Fisioterapi	Perawat Gigi	Refraksi Optisien	Terapi Wicara	Radiografi	Okupasi Terapis	Gizi	Rekam Medis	Teknik Gigi	Kesehatan Lingkungan	Elektromedik	Analisis Kesehatan	Perawat Anestesi	Akupunktur	Fisikawan Medis	Ortotis Prostetik	Transfusi Darah	Teknik Kardiovaskular	Kesehatan Masyarakat	Promosi Kesehatan	Tradisional Komplementer	Psikologi Klinis	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	Aceh	5.346	5.996	56	257	8	0	44	0	240	62	1	294	31	350	0	0	0	0	0	0	2.341	0	0	8	15.034
2	Sumatera Utara	10.696	11.290	200	329	103	1	177	0	242	143	4	214	98	1.096	18	0	6	0	1	0	172	0	0	7	24.797
3	Sumatera Barat	1.303	1.991	80	88	58	0	97	0	299	0	17	91	36	345	5	0	0	0	0	0	726	0	0	12	5.148
4	Riau	1.652	1.731	11	12	4	0	11	2	126	94	3	0	8	149	4	0	0	0	0	0	12	0	0	0	3.819
5	Jambi	2.105	2.383	17	79	1	0	18	0	36	16	0	64	1	298	0	0	0	0	0	0	362	0	0	4	5.384
6	Sumatera Selatan	4.185	3.977	60	108	14	0	169	2	148	130	15	120	3	384	12	0	1	0	0	0	789	0	0	10	10.127
7	Bengkulu	1.011	900	2	113	0	0	41	0	182	0	0	130	2	263	4	0	0	0	0	0	423	0	0	2	3.073
8	Lampung	2.007	2.863	4	319	2	0	142	0	35	12	5	166	0	161	0	0	0	0	0	0	143	0	0	6	5.865
9	Kepulauan Bangka Belitung	657	72	3	1	6	0	7	0	40	36	0	8	0	32	3	0	1	0	0	0	157	0	0	0	1.023
10	Kepulauan Riau	637	270	4	8	0	0	4	0	7	2	0	59	0	17	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1.012
11	DKI Jakarta	8.588	2.608	216	176	156	40	345	23	737	148	14	116	1	163	0	0	57	11	96	54	184	0	0	68	13.801
12	Jawa Barat	18.663	15.087	91	159	74	40	221	19	445	255	12	134	21	1.624	24	0	0	0	0	0	263	0	0	12	37.144
13	Jawa Tengah	13.249	11.001	620	61	41	93	772	11	417	682	3	498	161	957	27	81	0	27	0	0	2.324	0	0	79	31.104
14	DI Yogyakarta	3.413	2.211	117	145	36	0	95	0	739	170	0	205	21	898	0	0	0	0	130	0	1.018	0	0	51	9.249
15	Jawa Timur	1.294	3.835	5	4	39	0	2	22	12	237	54	20	296	8	45	0	0	0	0	0	2.183	0	0	54	8.110
16	Banten	3.538	1.620	0	23	18	0	22	0	1	50	0	0	0	240	19	0	0	0	0	0	119	0	0	1	5.651
17	Bali	1.970	1.416	146	90	6	0	94	0	51	0	0	41	0	181	38	0	3	0	0	0	124	0	0	7	4.167
18	Nusa Tenggara Barat	1.567	1.624	44	98	1	0	12	1	79	72	0	18	0	171	0	0	0	0	1	0	337	0	0	2	4.027
19	Nusa Tenggara Timur	796	1.434	9	6	0	0	1	0	75	2	0	7	0	133	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2.464
20	Kalimantan Barat	799	2.702	7	84	15	0	2	0	42	0	0	64	0	30	3	0	0	0	0	0	431	0	0	4	4.183
21	Kalimantan Tengah	451	252	21	11	4	0	25	0	6	2	0	22	0	177	2	0	0	0	0	2	23	0	0	4	1.000
22	Kalimantan Selatan	2.444	2.172	10	72	6	0	54	0	117	68	6	8	0	197	3	0	0	0	0	0	904	0	0	10	6.071
23	Kalimantan Timur	2.804	1.285	1	14	3	0	35	0	25	3	0	18	1	223	1	0	0	0	0	0	533	0	0	0	4.946
24	Kalimantan Utara	306	130	0	3	0	0	0	0	3	0	0	8	6	2	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	512
25	Sulawesi Utara	847	446	95	21	7	0	7	5	11	0	17	24	0	26	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.524
26	Sulawesi Tengah	1.814	1.571	0	39	0	0	0	0	12	0	0	4	0	118	0	0	0	0	0	0	1.096	0	0	0	4.654
27	Sulawesi Selatan	5.470	4.568	522	391	8	0	162	0	271	336	5	155	81	926	16	0	14	0	14	0	3.551	0	0	0	16.490
28	Sulawesi Tenggara	2.329	1.833	34	81	4	0	16	1	232	14	3	171	1	158	0	0	0	0	1	0	2.217	0	0	0	7.095
29	Gorontalo	491	129	2	1	1	0	2	0	107	0	0	2	3	12	0	0	0	0	0	0	644	0	0	0	1.394
30	Sulawesi Barat	337	644	6	3	0	0	0	0	20	0	0	17	1	11	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	1.130
31	Maluku	934	312	7	4	0	0	1	0	59	1	0	65	4	13	1	0	0	0	0	0	340	0	0	0	1.741
32	Maluku Utara	537	463	13	10	0	0	29	0	54	0	4	20	0	103	13	0	0	0	0	0	600	0	0	0	1.846
33	Papua Barat	476	354	4	7	1	0	3	0	48	0	0	7	0	12	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	955
34	Papua	1.144	562	11	3	0	0	15	0	85	2	0	134	1	114	3	0	0	0	3	0	278	0	0	0	2.355
	Indonesia	103.860	89.732	2.418	2.820	616	174	2.625	86	5.003	2.537	163	2.904	777	9.592	259	83	82	38	247	54	22.484	0	0	341	246.895

Sumber: Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemendes RI, 2016

Lampiran 3.11

**JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG DIANGKAT DAN AKTIF SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2015**

No	Provinsi	Pengangkatan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Sebagai PTT				Jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Sebagai PTT Aktif			
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	Jumlah	Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	2	0	0	2	2	0	0	2
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riau	0	1	0	1	0	2	0	2
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	2	2	0	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	1	0	1
11	DKI Jakarta	1	0	0	1	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	2	0	0	2
14	DI Yogyakarta	0	1	0	1	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Banten	0	1	0	1	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	0	1	0	2	0	2
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	1	0	1
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	3	0	3
22	Kalimantan Selatan	0	1	0	1	0	1	0	1
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	2	0	2
26	Sulawesi Tengah	0	1	0	1	0	1	0	1
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	5	0	5	0	1	0	1
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	1	0	1
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	3	0	3
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	2	0	2
34	Papua	0	0	0	0	0	1	0	1
Indonesia		3	11	0	14	6	23	0	29

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 3.12

**JUMLAH DOKTER UMUM YANG DIANGKAT DAN AKTIF SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2015**

No	Provinsi	Pangkatan Dokter Umum Sebagai PTT				Jumlah Dokter Umum Sebagai PTT Aktif			
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	Jumlah	Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	0	51	29	80	7	75	37	119
2	Sumatera Utara	0	72	34	106	12	78	29	119
3	Sumatera Barat	0	9	10	19	0	19	17	36
4	Riau	2	11	5	18	20	15	9	44
5	Jambi	0	32	12	44	0	38	15	53
6	Sumatera Selatan	0	14	1	15	0	14	1	15
7	Bengkulu	0	41	12	53	0	43	12	55
8	Lampung	0	16	8	24	13	21	9	43
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	4	3	7
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	8	2	10
11	DKI Jakarta	2	0	0	2	0	0	0	0
12	Jawa Barat	1	0	0	1	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	5	0	0	5	3	0	0	3
14	DI Yogyakarta	1	20	33	54	1	0	0	1
15	Jawa Timur	1	16	47	64	6	0	0	6
16	Banten	1	16	14	31	0	0	0	0
17	Bali	0	9	6	15	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	1	9	10	1	18	11	30
19	Nusa Tenggara Timur	0	34	47	81	0	24	157	181
20	Kalimantan Barat	0	23	44	67	1	18	34	53
21	Kalimantan Tengah	1	41	7	49	1	13	39	53
22	Kalimantan Selatan	0	24	58	82	1	21	18	40
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	10	6	16
24	Kalimantan Utara	1	18	11	30	0	2	12	14
25	Sulawesi Utara	0	21	94	115	0	41	56	97
26	Sulawesi Tengah	0	13	53	66	0	27	43	70
27	Sulawesi Selatan	1	12	98	111	1	52	17	70
28	Sulawesi Tenggara	0	12	39	51	0	31	82	113
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	19	14	33
30	Sulawesi Barat	0	4	2	6	1	7	5	13
31	Maluku	0	17	14	31	0	10	74	84
32	Maluku Utara	0	6	1	7	0	6	41	47
33	Papua Barat	0	5	43	48	0	14	58	72
34	Papua	1	8	6	15	1	16	145	162
Indonesia		17	546	737	1300	69	644	946	1.659

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 3.13

**JUMLAH DOKTER GIGI YANG DIANGKAT DAN AKTIF SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2015**

No	Provinsi	Pangkatan Dokter Gigi Sebagai PTT				Jumlah Dokter Gigi Sebagai PTT Aktif			
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	Jumlah	Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	0	44	16	60	0	52	20	72
2	Sumatera Utara	0	41	7	48	4	48	12	64
3	Sumatera Barat	0	8	4	12	0	17	5	22
4	Riau	0	9	3	12	0	22	6	28
5	Jambi	0	25	15	40	0	31	14	45
6	Sumatera Selatan	0	9	0	9	0	13	0	13
7	Bengkulu	0	14	5	19	0	19	15	34
8	Lampung	0	16	9	25	1	20	11	32
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	4	1	5
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	3	6	9
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	4	0	0	4	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	6	0	0	6	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	4	9	13	4	0	0	4
15	Jawa Timur	0	10	8	18	10	0	0	10
16	Banten	1	17	4	22	0	0	0	0
17	Bali	0	5	4	9	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	3	3	0	8	5	13
19	Nusa Tenggara Timur	0	11	16	27	0	6	49	55
20	Kalimantan Barat	0	22	22	44	0	6	17	23
21	Kalimantan Tengah	1	30	3	34	0	9	11	20
22	Kalimantan Selatan	0	12	25	37	1	15	4	20
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	7	6	13
24	Kalimantan Utara	0	4	4	8	0	0	4	4
25	Sulawesi Utara	0	4	38	42	0	22	24	46
26	Sulawesi Tengah	0	3	21	24	0	24	27	51
27	Sulawesi Selatan	0	3	14	17	1	46	9	56
28	Sulawesi Tenggara	0	1	6	7	0	19	38	57
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	11	6	17
30	Sulawesi Barat	0	3	0	3	0	3	6	9
31	Maluku	0	11	7	18	0	4	30	34
32	Maluku Utara	0	4	5	9	0	2	12	14
33	Papua Barat	0	4	7	11	0	4	8	12
34	Papua	0	2	3	5	0	4	17	21
	Indonesia	12	316	258	586	21	419	363	803

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 3.14

**JUMLAH BIDAN YANG DIANGKAT DAN AKTIF SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2015**

No	Provinsi	Pengangkatan Bidan Sebagai PTT				Jumlah Bidan Sebagai PTT Aktif			
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	Jumlah	Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	136	868	676	1.680	293	2.336	1.623	4.252
2	Sumatera Utara	1.037	606	362	2.005	3.118	2.319	548	5.985
3	Sumatera Barat	440	174	69	683	1.164	434	176	1.774
4	Riau	188	170	68	426	556	607	259	1.422
5	Jambi	174	171	70	415	486	532	214	1.232
6	Sumatera Selatan	164	73	0	237	621	249	5	875
7	Bengkulu	59	170	61	290	137	502	151	790
8	Lampung	522	172	58	752	1.398	516	167	2.081
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	46	31	9	86
10	Kepulauan Riau	781	102	0	883	83	86	43	212
11	DKI Jakarta	1.786	35	0	1.821	0	0	0	0
12	Jawa Barat	101	0	0	101	2.137	330	0	2.467
13	Jawa Tengah	1.111	17	37	1.165	4.858	59	0	4.917
14	DI Yogyakarta	15	91	238	344	273	0	0	273
15	Jawa Timur	9	49	74	132	3.211	49	87	3.347
16	Banten	16	116	45	177	766	205	0	971
17	Bali	19	36	18	73	403	24	0	427
18	Nusa Tenggara Barat	0	6	13	19	347	212	93	652
19	Nusa Tenggara Timur	30	59	67	156	1	185	1.064	1.250
20	Kalimantan Barat	0	104	245	349	39	202	447	688
21	Kalimantan Tengah	310	169	105	584	15	145	170	330
22	Kalimantan Selatan	23	238	375	636	46	246	111	403
23	Kalimantan Timur	137	0	0	137	66	104	76	246
24	Kalimantan Utara	155	58	37	250	3	29	60	92
25	Sulawesi Utara	0	80	433	513	44	74	94	212
26	Sulawesi Tengah	0	0	104	104	0	345	570	915
27	Sulawesi Selatan	2	25	102	129	922	498	216	1.636
28	Sulawesi Tenggara	0	56	341	397	45	457	842	1.344
29	Gorontalo	247	81	0	328	88	129	133	350
30	Sulawesi Barat	15	3	1	19	104	222	217	543
31	Maluku	70	52	54	176	0	0	292	292
32	Maluku Utara	18	33	13	64	0	87	555	642
33	Papua Barat	0	15	184	199	0	57	539	596
34	Papua	36	102	118	256	6	80	570	656
	Indonesia	7.601	3.931	3.968	15.500	21.276	11.351	9.331	41.958

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 3.15

**JUMLAH PENGANGKATAN DAN KEBERADAAN AKTIF TENAGA RESIDEN
DI KABUPATEN PRIORITAS DTPK DAN DBK MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Pengangkatan	Jumlah Keberadaan Aktif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	53	14
2	Sumatera Utara	61	15
3	Sumatera Barat	26	5
4	Riau	42	17
5	Jambi	12	3
6	Sumatera Selatan	31	13
7	Bengkulu	20	5
8	Lampung	7	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	14	5
10	Kepulauan Riau	20	6
11	DKI Jakarta	0	0
12	Jawa Barat	31	11
13	Jawa Tengah	21	7
14	DI Yogyakarta	0	0
15	Jawa Timur	31	14
16	Banten	13	5
17	Bali	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	26	7
19	Nusa Tenggara Timur	18	5
20	Kalimantan Barat	25	9
21	Kalimantan Tengah	13	5
22	Kalimantan Selatan	13	2
23	Kalimantan Timur	6	4
24	Kalimantan Utara	24	11
25	Sulawesi Utara	6	2
26	Sulawesi Tengah	42	15
27	Sulawesi Selatan	27	7
28	Sulawesi Tenggara	38	17
29	Gorontalo	13	4
30	Sulawesi Barat	3	0
31	Maluku	23	12
32	Maluku Utara	43	12
33	Papua Barat	22	5
34	Papua	24	5
Indonesia		748	246

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 3.16

**JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2013-2015**

No	Institusi Diknakes	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	KEPERAWATAN			
	1 Keperawatan	6.608	6.909	6.835
	2 Kebidanan	7.604	6.112	5.721
	3 Keperawatan Gigi	1.569	1.372	1.150
	Sub Total	15.781	14.393	13.706
B	KEFARMASIAN			
	1 Analisa Farmasi dan Makanan	72	68	77
	2 Farmasi	672	726	663
	3 Jamu	0	31	64
	Sub Total	744	825	804
C	KESEHATAN MASYARAKAT			
	1 Kesehatan Lingkungan	1.676	1.559	1.698
	Sub Total	1.676	1.559	1.698
D	GIZI			
	1 Gizi	2.034	1.903	2.030
	Sub Total	2.034	1.903	2.030
E	KETERAPIAN FISIK			
	1 Fisioterapi	243	133	181
	2 Okupasi Terapi	99	94	94
	3 Terapi Wicara	46	89	96
	4 Akupunktur	42	45	93
	Sub Total	430	361	464
F	KETEKNISIAN MEDIS			
	1 Analis Kesehatan	1.384	1.561	1.669
	2 Teknik Gigi	80	79	94
	3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	346	243	253
	4 Rekam Medis dan Infokes	38	40	39
	5 Teknik Elektro Medik	230	162	204
	6 Ortetik Prostetik	44	40	59
	Sub Total	2.122	2.125	2.318
Total		22.787	21.166	21.020

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 3.17

**JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES
MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2015**

No	Nama Poltekkes	PROGRAM STUDI																		Total
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Farmasi	Analisis Kesehatan	Teknik Elektro Medik	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Teknik Gigi	Analisis Farmasi Dan Makanan	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Ortetik Prostetik	Terapi Wicara	Akupunktur	Jamu	Perekam dan Informasi Kesehatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Aceh	240	180	66	85	57	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
2	Medan	107	310	72	91	95	83	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838
3	Padang	195	193	47	96	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639
4	Pekanbaru	84	75	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233
5	Jambi	74	130	33	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
6	Bengkulu	155	218	0	74	75	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570
7	Palembang	302	86	74	0	70	70	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648
8	Tanjung Karang	193	218	37	105	82	40	110	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	811
9	Gorontalo	128	145	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362
10	Jakarta I	73	69	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
11	Jakarta II	0	0	0	79	79	106	0	124	79	68	77	0	0	0	0	0	0	0	612
12	Jakarta III	202	192	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
13	Bandung	145	230	75	62	76	17	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723
14	Tasikmalaya	193	112	68	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	492
15	Semarang	498	313	75	73	82	0	99	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.314
16	Surakarta	137	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	94	59	96	93	64	0	777
17	Yogyakarta	108	76	78	61	95	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561
18	Malang	282	279	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677
19	Surabaya	277	211	81	138	34	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901
20	Denpasar	187	59	78	80	47	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536
21	Mataram	210	158	0	0	45	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456
22	Kupang	339	273	52	81	81	80	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003
23	Pontianak	109	131	65	60	56	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469
24	Palangkaraya	85	221	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349
25	Banjarmasin	74	77	68	39	44	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347
26	Samarinda	103	150	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321
27	Manado	71	95	70	75	48	45	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471
28	Palu	158	106	0	78	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393
29	Makassar	274	86	88	69	77	74	96	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	855
30	Kendari	92	107	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265
31	Ambon	323	132	0	111	83	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711
32	Ternate	141	143	0	34	42	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
33	Jayapura	765	354	0	54	23	24	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.264
34	Tanjung Pinang	62	87	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225
35	Pangkal Pinang	59	64	0	0	53	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228
36	Banten	121	83	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248
37	Mamuju	36	51	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
38	Sorong	233	163	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421
Total		6.835	5.721	1.150	1.698	2.030	663	1.669	204	253	94	77	181	94	59	96	93	64	39	21.020

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 3.18

JUMLAH LULUSAN PRORAM DIPLOMA IV POLTEKKES BERDASARKAN JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2015

No	Poltekkes	Keperawatan			Kefarmasian	Kesmas	Gizi	Keterampilan Fisik				Keteknisian Medis				Jumlah
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Farmasi	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Analisis Kesehatan	Teknik Elektromedik	Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi	Ortodik Prostetik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Medan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Padang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Tanjung Karang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tanjung Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jakarta I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jakarta II	0	0	0	0	36	45	0	0	0	0	0	46	76	0	203
13	Jakarta III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	44
14	Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Semarang	26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
17	Surakarta	82	1	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	26	160
18	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Surabaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Malang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Denpasar	19	109	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	154
23	Mataram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Pontianak	44	0	0	0	56	2	0	0	0	0	0	0	0	0	102
26	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Manado	0	26	0	0	10	17	0	0	0	0	0	0	0	0	53
30	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Makassar	0	96	0	0	22	30	21	0	0	0	49	0	0	0	218
32	Kendari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ternate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Sorong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		174	232	0	0	125	120	72	0	0	0	93	46	76	26	964

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 3.19

**JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSHIP
MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Pemberangkatan				Jumlah
		Februari	Mei	Oktober	November	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	0	131	73	73	277
2	Sumatera Utara	35	156	0	91	282
3	Sumatera Barat	49	72	0	143	264
4	Riau	63	54	0	128	245
5	Jambi	70	60	0	70	200
6	Sumatera Selatan	0	36	46	184	266
7	Bengkulu	65	0	72	94	231
8	Lampung	0	90	0	118	208
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	96	96
10	Kepulauan Riau	0	90	0	78	168
11	DKI Jakarta	336	24	0	36	396
12	Jawa Barat	240	181	0	191	612
13	Jawa Tengah	0	366	0	363	729
14	DI Yogyakarta	42	72	0	120	234
15	Jawa Timur	315	306	108	524	1.253
16	Banten	42	42	0	56	140
17	Bali	0	18	0	287	305
18	Nusa Tenggara Barat	63	18	0	108	189
19	Nusa Tenggara Timur	161	12	0	66	239
20	Kalimantan Barat	55	54	38	55	202
21	Kalimantan Tengah	49	18	0	0	67
22	Kalimantan Selatan	161	6	0	90	257
23	Kalimantan Timur	70	36	0	184	290
24	Kalimantan Utara	0	36	0	18	54
25	Sulawesi Utara	28	18	0	80	126
26	Sulawesi Tengah	46	36	31	18	131
27	Sulawesi Selatan	84	125	0	93	302
28	Sulawesi Tenggara	91	6	0	12	109
29	Gorontalo	30	18	0	54	102
30	Sulawesi Barat	59	0	0	0	59
31	Maluku	17	47	0	0	64
32	Maluku Utara	21	0	0	24	45
33	Papua Barat	59	0	0	0	59
34	Papua	35	30	10	36	111
Indonesia		2.286	2.158	378	3.490	8.312

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 3.20

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT
MENURUT PERIODE TAHUN 2015**

No	Provinsi	Periode I		Periode II	
		Jumlah Kabupaten	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten	Jumlah Puskesmas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1	1	1	1
2	Sumatera Utara	-	-	2	2
3	Riau	-	-	5	6
4	Bengkulu	1	1	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	5	7
6	Nusa Tenggara Timur	4	4	7	24
7	Kalimantan Barat	3	4	5	10
8	Kalimantan Timur	1	1	2	2
9	Kalimantan Utara	2	2	2	11
10	Sulawesi Utara	2	2	4	7
11	Sulawesi Tengah	-	-	1	1
12	Maluku	1	1	3	11
13	Maluku Utara	-	-	1	3
14	Papua Barat	-	-	1	1
15	Papua	4	4	7	14
Indonesia		19	20	46	100

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Catatan:
- = tidak ada penempatan

Lampiran 3.21

**PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT
MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS TAHUN 2015**

No	Provinsi	Periode I		Periode II		No	Provinsi	Periode I		Periode II	
		Kabupaten/Kota	Puskesmas	Kabupaten/Kota	Puskesmas			Kabupaten/Kota	Puskesmas	Kabupaten/Kota	Puskesmas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	Simeuleu	Simeuleu Cut	Kota Sabang	Iboih	8	Kalimantan Timur	Mahakam Hulu	Long Pahangai	Berau	Maratua Bohe Bukit
2	Sumatera Utara	-	-	Nias Selatan	Pulau Tello	9	Kalimantan Utara	Malinau	Long Ampung	Mahakam Hulu	Tiong Ohang
3	Riau	-	-	Serdang Bedagai	Tanjung Beringin			Nunukan	Seimenggaris	Malinau	Long Nawang
				Indragiri Hilir	Sungai Guntung					Nunukan	Data Dian
				Bengkalis	Tanjung Medang						Long Pujungan
				Rokan Hilir	Selat Baru						Long Alango
				Kepulauan Meranti	Sinaboi						Binter
				Kota Dumai	Tanjung Samak						Long Layu
4	Bengkulu	Bengkulu Utara	Enggano	-	Dumai Kota						Long Bawan
5	Kepulauan Riau	-	-	Karimun	-						Sanur
				Bintan	Tebing						Aji Kuning
				Natuna	Tambelan						Sungai Nyamuk
					P. Laut						Setabu
					Subi	10	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	Marore	Kepulauan Sangihe	Kendahe
					Serasan Timur			Siau Tagulandang Biaro	Makalehi	Kepulauan Talaud	Dapalan
					Jemaja Timur						Gemeh
					Belakang Padang						Karatung
6	Nusa Tenggara Timur	Belu	Silawan	Kupang	Naikliu						Miangas
		Alor	Maritaing	Timor Tengah Utara	Oepoli						Tinongko
		Rote Ndao	Ndao		Eban						Siau Tagulandang Biaro
		Malaka	Namfalus		Oeolo	11	Sulawesi Tengah	-	-		Toli-toli
					Tasinifu	12	Maluku	Kepulauan Aru	Longgar Apari		Maluku Tenggara Barat
					Napan						Adaut
					Manamas						Namtabung
					Wini						Larat
					Webora						Waturu
					Haliwen						Koijabi
					Weluli						Maluku Barat Daya
					Wedomu						Ustutun
					Haeksak						Ilwaki
					Laktulus						Wonreli
					Nualain						Serwaru
					Buraga						Lelang
					Kalunan	13	Maluku Utara	-	-		Pulau Morotai
					Padang Alang						Wayabula
					Rote Ndao						Sopi
					Sabu Raijua	14	Papua Barat	-	-		Raja Ampat
					Malaka	15	Papua	Merauke	Kimaam		Merauke
								Boven Digoel	Ninati		Sota
								Pegunungan Bintang	Iwur		Naukenjerai
								Keerom	Ubrub		Bupul
											Ulilin
											Kombut
7	Kalimantan Barat	Sambas	Sajingan Besar	Sambas	Temanjuk						Batom
		Sanggau	Balai Karang	Bengkayang	Paloh						Sarmi
		Kapuas Hulu	Puring Kencana		Jagoi Babang						Keerom
			Badau		Siding						Towe Hitam
					Sanggau						Senggi
					Sintang						Waris
					Kapuas Hulu						Supiori
											Kota Jayapura
											Sabar Miokre
											Koya Barat
											Skow Mabo

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 3.22

**JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Tenaga									Total
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Gizi	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	1	0	2	2	1	2	2	2	1	13
2	Sumatera Utara	0	0	1	2	0	2	1	2	2	10
3	Riau	1	0	4	6	4	2	6	6	4	33
4	Bengkulu	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8
5	Kepulauan Riau	0	0	4	7	5	5	6	7	4	38
6	Nusa Tenggara Timur	2	0	23	28	9	26	27	28	19	162
7	Kalimantan Barat	2	0	14	14	3	14	12	13	7	79
8	Kalimantan Timur	1	1	2	3	2	3	3	3	1	19
9	Kalimantan Utara	2	0	12	13	6	11	13	12	9	78
10	Sulawesi Utara	1	0	4	9	4	7	9	8	9	51
11	Sulawesi Tengah	0	0	0	1	0	1	1	1	1	5
12	Maluku	2	0	12	11	4	11	12	11	7	70
13	Maluku Utara	0	0	3	3	0	2	3	3	1	15
14	Papua Barat	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
15	Papua	3	0	14	17	9	15	18	15	16	107
Indonesia		16	1	97	118	49	103	115	113	83	695

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 3.23

**JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KERJA KESEHATAN INDONESIA (TKKI)
MENURUT JENIS PERMINTAAN NEGARA PENGGUNA TAHUN 2015**

No	Negara	Jumlah TKKI											Total	
		Nurse	Assistant Nurse	Operation Theatre Nurse	ICU Staff Nurse	House Nurse	Child Nurse	Speech Therapist	Therapist	Caregiver	Caretaker	Female Caregiver		Hospital Cleaning Labour
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Brunei Darussalam	3	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	9
2	Malaysia	0	0	13	0	7	0	0	2	7	35	0	0	64
3	Singapura	2	8	0	0	14	2	0	0	14	137	0	0	177
4	India	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8
5	Sri Lanka	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
6	Hong Kong	1	0	0	0	3	1	0	0	16	127	0	0	148
7	Jepang	128	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	277
8	Korea Selatan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Taiwan	167	0	2	1	7	15	0	0	433	0	0	0	625
10	Arab Saudi	67	0	0	0	1	1	0	5	68	31	1	105	279
11	Bahrain	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
12	Kuwait	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
13	Lebanon	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
14	Oman	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
15	Qatar	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4
16	Uni Emirat Arab	2	0	0	0	4	0	0	1	1	0	0	0	8
17	Afghanistan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
18	Tajikistan	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
19	Rusia	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
20	Turki	0	0	0	0	0	0	1	195	0	0	0	0	196
21	Seychelles	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
22	Togo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
23	Kanada	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
24	Republik Palau	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Indonesia		375	8	15	2	37	19	1	226	701	332	1	105	1.822

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 3.24**JUMLAH TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
MENURUT NEGARA ASAL TAHUN 2015**

No	Negara	Jumlah
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1	Filipina	4
2	Kamboja	1
3	Malaysia	7
4	Singapura	5
5	Afganistan	3
6	India	13
7	Nepal	1
8	Jepang	7
9	Korea Selatan	1
10	Belanda	7
11	Belgia	1
12	Denmark	1
13	Jerman	1
14	Inggris	4
15	Perancis	5
16	Spanyol	2
17	Swedia	1
18	Afrika Selatan	17
19	Tanzania	1
20	Amerika Serikat	10
21	Kanada	1
22	Meksiko	2
23	Uruguay	1
24	Australia	9
25	Selandia Baru	2
Indonesia		107

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 4.1

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT ESELON I TAHUN 2015**

No	Unit Eselon I	Anggaran Kementerian Kesehatan														
		Kantor Pusat			Kantor Daerah			Dekonsentrasi			Tugas Pembantuan			Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Sekretariat Jenderal	24.109.430.118.000	22.764.826.686.410	94,42%	-	-	-	174.179.760.000	140.408.543.872	80,61%	-	-	-	24.283.609.878.000	22.905.235.230.282	94,32%
2	Inspektorat Jenderal	102.971.000.000,00	82.715.773.073,00	80,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.971.000.000	82.715.773.073	80,33%
3	Ditjen Bina Gizi dan KIA	855.595.374.000,00	663.903.533.350,00	77,60%	16.016.926.000	14.720.560.964	91,91%	465.389.627.000	304.488.073.362	65,43%	1.380.467.771.000	1.349.553.976.411	97,76%	2.717.469.698.000	2.332.666.144.087	85,84%
4	Ditjen Bina Upaya Kesehatan	961.458.985.000,00	329.446.388.812,00	34,27%	14.713.115.294.000	13.464.753.371.189	91,52%	86.007.974.000	64.654.585.035	75,17%	3.091.673.420.000	2.387.243.233.205	77,22%	18.852.255.673.000	16.246.097.578.241	86,18%
5	Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1.667.006.919.000,00	1.400.485.440.288,00	84,01%	693.090.694.000	588.130.908.969	84,86%	221.063.331.000	157.055.815.077	71,05%	116.165.495.000	99.836.393.306	85,94%	2.697.326.439.000	2.245.508.557.640	83,25%
6	Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.826.654.713.000,00	1.737.654.105.036,00	95,13%	-	-	-	37.314.966.000	30.457.631.196	81,62%	-	-	-	1.863.969.679.000	1.768.111.736.232	94,86%
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	367.931.195.000,00	261.961.835.674,00	71,20%	391.195.001.000	290.379.964.439	74,23%	-	-	-	-	-	-	759.126.196.000	552.341.800.113	72,76%
8	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	1.177.624.555.000,00	1.037.683.763.193,00	88,12%	1.883.166.312.000	1.682.270.867.737	89,33%	-	-	-	-	-	-	3.060.790.867.000	2.719.954.630.930	88,86%
Kementerian Kesehatan		31.068.672.859.000	28.278.677.525.836	91,02	17.696.584.227.000	16.040.255.673.298	90,64	983.955.658.000	697.064.648.542	70,84	4.588.306.686.000	3.836.633.602.922	83,62	54.337.519.430.000	48.852.631.450.598	89,91

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2016

Ket - : tidak ada alokasi anggaran

Lampiran 4.2

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KONDISI PER 31 DESEMBER 2015
BERDASARKAN JENIS BELANJA**

No	Jenis Belanja	Unit Eselon I								
		Setjen	Itjen	Bina Gizi dan KIA	BUK	PP dan PL	Bina Kefarmasian dan Alkes	Badan Litbangkes	Badan PPSDM Kesehatan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	BELANJA PEGAWAI									
	Anggaran	2.616.761.907.000	56.209.009.000	2.655.564.807.000	10.626.145.289.000	1.894.562.356.000	1.817.066.377.000	382.257.451.000	1.769.560.728.000	21.818.127.924.000
	Realisasi	2.111.622.399.694	49.622.788.474	2.274.564.121.174	9.720.562.925.793	1.586.411.953.596	1.735.769.667.289	283.829.700.120	1.510.214.620.950	19.272.598.177.090
	%	80,70%	88,28%	85,65%	91,48%	83,74%	95,53%	74,25%	85,34%	88,33%
B.	BELANJA BARANG									
	Anggaran	1.216.317.509.000	8.288.346.000	12.402.480.000	2.343.097.786.000	342.581.433.000	17.751.536.000	144.782.147.000	286.342.947.000	4.371.564.184.000
	Realisasi	869.183.580.371	4.214.952.930	10.287.818.580	2.052.466.796.100	272.812.672.893	8.034.543.954	134.493.932.650	252.199.836.322	3.603.694.133.800
	%	71,46%	50,85%	82,95%	87,60%	79,63%	45,26%	92,89%	88,08%	82,43%
C.	BELANJA MODAL									
	Anggaran	90.450.462.000	38.473.645.000	49.502.411.000	5.883.012.598.000	460.182.650.000	29.151.766.000	232.086.598.000	1.004.887.192.000	7.787.747.322.000
	Realisasi	40.064.965.017	28.878.031.669	47.814.204.333	4.473.067.856.348	386.283.931.151	24.307.524.989	134.018.167.343	957.540.173.658	6.091.974.854.508
	%	44,29%	75,06%	96,59%	76,03%	83,94%	83,38%	57,74%	95,29%	78,23%
D.	BELANJA BANSOS									
	Anggaran	20.360.080.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20.360.080.000.000
	Realisasi	19.884.364.285.200	-	-	-	-	-	-	-	19.884.364.285.200
	%	97,66%								97,66%
	TOTAL									
	Anggaran	24.283.609.878.000	102.971.000.000	2.717.469.698.000	18.852.255.673.000	2.697.326.439.000	1.863.969.679.000	759.126.196.000	3.060.790.867.000	54.337.519.430.000
	Realisasi	22.905.235.230.282	82.715.773.073	2.332.666.144.087	16.246.097.578.241	2.245.508.557.640	1.768.111.736.232	552.341.800.113	2.719.954.630.930	48.852.631.450.598
	%	94,32	80,33	85,84	86,18	83,25	94,86	72,76	88,86	89,91

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2016

Ket - : tidak ada alokasi anggaran

Lampiran 4.3

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015
KONDISI PER 31 DESEMBER
BERDASARKAN SUMBER DANA

No	Sumber Dana	Unit Eselon I								Total
		Setjen	Itjen	Bina Gizi dan KIA	BUK	PP dan PL	Bina Kefarmasian dan Alkes	Badan Litbangkes	Badan PPSDM Kesehatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	RUPIAH MURNI									
	Anggaran	24.270.157.114.000	102.971.000.000	2.686.233.046.000	8.779.020.900.000	2.014.656.191.000	1.737.720.600.000	742.091.900.000	2.462.015.297.000	42.794.866.048.000
	Realisasi	22.893.921.514.103	82.715.773.073	2.305.202.330.369	7.083.936.789.975	1.641.195.495.849	1.648.227.092.935	535.499.208.973	2.216.784.558.391	38.407.482.763.668
	%	94,33%	80,33%	85,82%	80,69%	81,46%	94,85%	72,16%	90,04%	89,75%
B.	PINJAMAN LUAR NEGERI									
	Anggaran	-	-	-	12.818.483.000	-	-	-	-	12.818.483.000
	Realisasi	-	-	-	1.019.648.958	-	-	-	-	1.019.648.958
	%	-	-	-	7,95%	-	-	-	-	7,95%
C.	RUPIAH MURNI PENDAMPING									
	Anggaran	-	-	-	-	20.885.589.000	-	-	-	20.885.589.000
	Realisasi	-	-	-	-	14.880.733.928	-	-	-	14.880.733.928
	%	-	-	-	-	71,25%	-	-	-	71,25%
D.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK									
	Anggaran	4.941.300.000	-	528.800.000	16.306.894.000	128.196.457.000	10.132.200.000	2.591.200.000	283.037.771.000	445.734.622.000
	Realisasi	4.094.234.044	-	512.358.635	13.400.117.279	102.590.811.727	5.526.701.166	2.403.369.446	234.993.895.033	363.521.487.330
	%	82,86%	-	96,89%	82,17%	80,03%	54,55%	92,75%	83,03%	81,56%
E.	BADAN LAYANAN UMUM									
	Anggaran	-	-	-	10.043.511.183.000	-	-	-	315.737.799.000	10.359.248.982.000
	Realisasi	-	-	-	9.147.142.809.029	-	-	-	268.176.177.506	9.415.318.986.535
	%	-	-	-	91,08%	-	-	-	84,94%	90,89%
F.	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI (HLL)									
	Anggaran	8.511.464.000	-	30.707.852.000	598.213.000	490.913.121.000	116.116.879.000	14.443.096.000	-	661.290.625.000
	Realisasi	7.219.482.135	-	26.951.455.083	598.213.000	458.886.220.964	114.357.942.131	14.439.221.694	-	622.452.535.007
	%	84,82%	-	87,77%	100,00%	93,48%	98,49%	99,97%	-	94,13%
G.	HIBAH LUAR NEGERI (HLN)									
	Anggaran	-	-	-	-	42.675.081.000	-	-	-	42.675.081.000
	Realisasi	-	-	-	-	27.955.295.172	-	-	-	27.955.295.172
	%	-	-	-	-	65,51%	-	-	-	65,51%
	TOTAL									
	Anggaran	24.283.609.878.000	102.971.000.000	2.717.469.698.000	18.852.255.673.000	2.697.326.439.000	1.863.969.679.000	759.126.196.000	3.060.790.867.000	54.337.519.430.000
	Realisasi	22.905.235.230.282	82.715.773.073	2.332.666.144.087	16.246.097.578.241	2.245.508.557.640	1.768.111.736.232	552.341.800.113	2.719.954.630.930	48.852.631.450.598
	%	94,32	80,33	85,84	86,18	83,25	94,86	72,76	88,86	89,91

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2016

Ket - : tidak ada alokasi anggaran

Lampiran 4.4

**REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Pagu RKA-KL DIPA (Rp)	Realisasi-DIPA (Rp)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	31.903.899.000	20.511.768.708	64,29
2	Sumatera Utara	44.352.924.000	32.485.991.093	73,24
3	Sumatera Barat	29.756.919.000	23.681.426.527	79,58
4	Riau	21.796.706.000	16.819.678.099	77,17
5	Jambi	21.575.347.000	19.043.233.748	88,26
6	Sumatera Selatan	27.681.672.000	21.770.890.447	78,65
7	Bengkulu	22.362.374.000	19.987.742.743	89,38
8	Lampung	30.694.582.000	27.917.146.986	90,95
9	Kepulauan Bangka Belitung	18.107.054.000	12.981.536.650	71,69
10	Kepulauan Riau	16.313.539.000	10.783.916.184	66,10
11	DKI Jakarta	17.268.854.000	9.637.199.160	55,81
12	Jawa Barat	49.841.792.000	19.500.545.113	39,12
13	Jawa Tengah	57.784.599.000	42.800.585.614	74,07
14	D.I. Yogyakarta	18.378.268.000	13.802.217.164	75,10
15	Jawa Timur	75.915.527.000	22.087.751.843	29,10
16	Banten	23.609.995.000	17.385.595.043	73,64
17	Bali	21.891.339.000	16.386.437.289	74,85
18	Nusa Tenggara Barat	23.404.005.000	18.083.084.720	77,26
19	Nusa Tenggara Timur	35.554.880.000	31.407.015.876	88,33
20	Kalimantan Barat	29.306.599.000	21.889.315.288	74,69
21	Kalimantan Tengah	24.838.187.000	19.864.752.183	79,98
22	Kalimantan Selatan	29.399.196.000	24.636.173.821	83,80
23	Kalimantan Timur	20.282.391.000	13.603.236.014	67,07
24	Kalimantan Utara	8.870.618.000	3.856.321.312	43,47
25	Sulawesi Utara	27.861.157.000	25.412.616.622	91,21
26	Sulawesi Tengah	27.344.253.000	24.559.756.942	89,82
27	Sulawesi Selatan	45.680.749.000	42.778.192.064	93,65
28	Sulawesi Tenggara	24.869.040.000	22.874.206.866	91,98
29	Gorontalo	17.888.412.000	15.961.952.569	89,23
30	Sulawesi Barat	18.354.084.000	9.971.420.616	54,33
31	Maluku	28.931.727.000	14.658.745.485	50,67
32	Maluku Utara	22.858.118.000	16.952.882.097	74,17
33	Papua Barat	30.093.533.000	17.725.089.411	58,90
34	Papua	39.183.319.000	25.246.224.245	64,43
Dekonsentrasi Kemenkes		983.955.658.000	697.064.648.542	70,84

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2016

Ket : RKA-KL : Rencana Kerja dan Anggaran - Kementerian dan Lembaga

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Lampiran 4.5

**ALOKASI DAN REALISASI TUGAS PEMBANTUAN KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Pagu RKA-KL DIPA (Rp)	Realisasi-DIPA (Rp)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	205.171.423.000	184.179.211.687	89,77
2	Sumatera Utara	141.876.097.000	123.458.823.878	87,02
3	Sumatera Barat	133.064.776.000	102.559.161.233	77,07
4	Riau	93.793.934.000	73.272.533.337	78,12
5	Jambi	92.109.477.000	61.203.558.647	66,45
6	Sumatera Selatan	137.440.947.000	108.190.245.822	78,72
7	Bengkulu	124.162.650.000	101.959.703.504	82,12
8	Lampung	99.314.656.000	92.012.346.558	92,65
9	Kepulauan Bangka Belitung	65.630.302.000	43.618.478.874	66,46
10	Kepulauan Riau	58.301.337.000	39.036.316.545	66,96
11	DKI Jakarta	9.137.000.000	8.429.887.904	92,26
12	Jawa Barat	246.552.995.000	212.862.256.809	86,34
13	Jawa Tengah	280.912.612.000	241.675.373.002	86,03
14	D.I. Yogyakarta	32.171.759.000	28.483.323.284	88,54
15	Jawa Timur	278.630.668.000	259.939.262.341	93,29
16	Banten	75.951.194.000	61.855.199.750	81,44
17	Bali	106.932.158.000	62.717.459.372	58,65
18	Nusa Tenggara Barat	115.066.134.000	103.537.344.575	89,98
19	Nusa Tenggara Timur	235.368.614.000	172.094.567.712	73,12
20	Kalimantan Barat	168.308.257.000	138.081.360.186	82,04
21	Kalimantan Tengah	123.016.110.000	100.151.691.082	81,41
22	Kalimantan Selatan	137.400.524.000	118.406.722.559	86,18
23	Kalimantan Timur	70.899.610.000	61.003.344.650	86,04
24	Kalimantan Utara	38.090.536.000	16.312.608.228	42,83
25	Sulawesi Utara	93.437.813.000	80.448.185.146	86,10
26	Sulawesi Tengah	219.889.534.000	203.909.563.451	92,73
27	Sulawesi Selatan	266.994.342.000	251.934.133.229	94,36
28	Sulawesi Tenggara	132.403.454.000	113.395.263.773	85,64
29	Gorontalo	66.901.680.000	48.613.335.534	72,66
30	Sulawesi Barat	93.365.373.000	65.680.622.898	70,35
31	Maluku	115.215.506.000	99.846.538.580	86,66
32	Maluku Utara	110.814.141.000	82.305.081.575	74,27
33	Papua Barat	88.761.571.000	72.627.602.796	81,82
34	Papua	331.219.502.000	302.832.494.401	91,43
Tugas Pembantuan Kemenkes		4.588.306.686.000	3.836.633.602.922	83,62

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 4.6

**ALOKASI DAN REALISASI TP - BOK
MENURUT PROVINSI S.D. DESEMBER 2015**

No	Provinsi	Jumlah Satker	Alokasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinkes Prov. Aceh	23	50.159.192.000	48.698.126.858	97,09
2	Dinkes Prov. Sumatera Utara	33	76.138.519.000	75.398.137.340	99,03
3	Dinkes Prov. Sumatera Barat	19	34.924.684.000	33.664.661.970	96,39
4	Dinkes Prov. Riau	12	26.284.682.000	25.942.812.887	98,70
5	Dinkes Prov. Jambi	11	21.821.494.000	21.631.767.940	99,13
6	Dinkes Prov. Sumatera Selatan	17	46.853.749.000	46.472.299.336	99,19
7	Dinkes Prov. Bengkulu	10	24.437.789.000	24.223.510.500	99,12
8	Dinkes Prov. Lampung	15	40.687.102.000	39.410.257.200	96,86
9	Dinkes Prov. Kep Bangka Belitung	7	7.452.174.000	7.397.485.985	99,27
10	Dinkes Prov. Kepulauan Riau	7	8.503.997.000	8.185.088.917	96,25
11	Dinkes Prov. DKI Jakarta	1	9.137.000.000	8.571.940.500	93,82
12	Dinkes Prov. Jawa Barat	27	142.501.803.000	141.045.852.167	98,98
13	Dinkes Prov. Jawa Tengah	35	104.717.697.000	103.896.296.264	99,22
14	Dinkes Prov. DI Yogyakarta	5	13.592.789.000	13.478.056.162	99,16
15	Dinkes Prov. Jawa Timur	38	116.541.933.000	113.466.628.684	97,36
16	Dinkes Prov. Banten	8	28.477.532.000	27.895.694.175	97,96
17	Dinkes Prov. Bali	9	13.448.058.000	13.390.729.750	99,57
18	Dinkes Prov. NTB	10	29.375.518.000	29.157.159.256	99,26
19	Dinkes Prov. NTT	22	79.266.244.000	78.214.656.684	98,67
20	Dinkes Prov. Kalimantan Barat	14	43.580.732.000	43.020.206.610	98,71
21	Dinkes Prov. Kalimantan Tengah	14	28.657.040.000	28.033.561.200	97,82
22	Dinkes Prov. Kalimantan Selatan	13	32.496.055.000	31.525.390.908	97,01
23	Dinkes Prov. Kalimantan Timur	10	17.034.610.000	15.561.753.275	91,35
24	Dinkes Prov. Kalimantan Utara	5	3.980.000.000	3.795.255.013	95,36
25	Dinkes Prov. Sulawesi Utara	15	26.532.922.000	26.037.975.246	98,13
26	Dinkes Prov. Sulawesi Tengah	13	31.478.401.000	31.308.525.614	99,46
27	Dinkes Prov. Sulawesi Selatan	24	67.877.131.000	67.443.163.700	99,36
28	Dinkes Prov. Sulawesi Tenggara	14	44.839.354.000	44.641.288.766	99,56
29	Dinkes Prov. Gorontalo	6	13.620.680.000	13.476.738.070	98,94
30	Dinkes Prov. Sulawesi Barat	6	17.441.434.000	17.285.657.499	99,11
31	Dinkes Prov. Maluku	11	38.830.226.000	37.514.573.683	96,61
32	Dinkes Prov. Maluku Utara	10	25.077.141.000	23.916.988.000	95,37
33	Dinkes Prov. Papua Barat	13	29.009.892.000	28.369.400.950	97,79
34	Dinkes Prov. Papua	29	84.490.197.000	81.984.337.355	97,03
Indonesia		506	1.379.267.771.000	1.354.055.978.464	98,17

Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, 2016

- cut off data 10 Januari 2016

- Untuk Provinsi DKI Jakarta, penyaluran dana TP-BOK melalui Dinkes Provinsi DKI Jakarta

- Data bersumber dari SAI

Lampiran 4.7

**CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
PER 31 DESEMBER 2015**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	PBI (Penerima Bantuan Iuran)		Non PBI			Total	%
			APBN	APBD	Pekerja Penerima Upah	Pekerja Bukan Penerima Upah	Bukan Pekerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	5.001.953	2.210.041	2.075.689	693.742	31.823	111.661	5.122.956	102,42
2	Sumatera Utara	13.937.797	4.237.938	874.126	1.937.725	865.560	284.169	8.199.518	58,83
3	Sumatera Barat	5.196.289	1.553.217	592.086	696.866	398.422	121.090	3.361.681	64,69
4	Riau	6.344.402	1.319.482	320.567	1.043.349	394.774	43.427	3.121.599	49,20
5	Jambi	3.402.052	831.219	73.310	483.764	257.914	45.950	1.692.157	49,74
6	Sumatera Selatan	8.052.315	2.471.549	-	940.423	433.855	121.987	3.967.814	49,28
7	Bengkulu	1.874.944	640.179	39.341	266.298	134.113	26.616	1.106.547	59,02
8	Lampung	8.117.268	3.147.903	249.280	772.280	432.564	98.647	4.700.674	57,91
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.372.813	215.891	146.027	207.392	133.361	16.260	718.931	52,37
10	Kepulauan Riau	1.973.043	336.197	98.185	583.977	197.682	13.269	1.229.310	62,31
11	DKI Jakarta	10.177.924	1.283.778	2.874.678	5.873.142	1.376.219	350.368	11.758.185	115,53
12	Jawa Barat	46.709.569	15.008.872	893.900	5.865.134	3.353.652	864.272	25.985.830	55,63
13	Jawa Tengah	33.774.141	14.419.356	518.972	3.650.925	1.649.436	753.734	20.992.423	62,16
14	D I Yogyakarta	3.679.176	1.590.391	4	566.110	191.922	155.184	2.503.611	68,05
15	Jawa Timur	38.847.561	14.295.854	568.334	4.402.270	1.637.028	831.553	21.735.039	55,95
16	Banten	11.955.243	3.264.541	87.557	2.230.139	902.797	130.699	6.615.733	55,34
17	Bali	4.152.833	912.613	-	836.801	227.593	95.646	2.072.653	49,91
18	Nusa Tenggara Barat	4.835.577	2.308.637	76.528	418.070	162.420	56.577	3.022.232	62,50
19	Nusa Tenggara Timur	5.120.061	2.738.957	190.050	465.260	122.927	79.867	3.597.061	70,25
20	Kalimantan Barat	4.789.574	1.360.024	102.296	604.497	287.528	66.002	2.420.347	50,53
21	Kalimantan Tengah	2.495.035	453.549	137.576	484.713	127.741	38.500	1.242.079	49,78
22	Kalimantan Selatan	3.989.793	760.924	12.220	579.639	173.696	77.116	1.603.595	40,19
23	Kalimantan Timur	3.426.638	647.329	122.805	899.115	259.130	45.860	1.974.239	57,61
24	Kalimantan Utara	641.936	146.085	25.222	143.224	79.591	7.332	401.454	62,54
25	Sulawesi Utara	2.412.118	800.370	147.587	340.247	214.167	84.801	1.587.172	65,80
26	Sulawesi Tengah	2.876.689	1.152.087	32.378	359.752	120.144	44.411	1.708.772	59,40
27	Sulawesi Selatan	8.520.304	2.987.280	288.675	1.005.527	467.494	235.102	4.984.078	58,50
28	Sulawesi Tenggara	2.499.540	1.002.803	31.596	312.055	76.110	34.691	1.457.255	58,30
29	Gorontalo	1.133.237	512.225	351.169	127.075	31.573	17.673	1.039.715	91,75
30	Sulawesi Barat	1.282.162	513.731	203.006	132.800	53.036	20.425	922.998	71,99
31	Maluku	1.686.469	770.336	-	234.368	36.114	34.023	1.074.841	63,73
32	Maluku Utara	1.162.345	331.975	27.896	157.842	26.177	15.214	559.104	48,10
33	Papua Barat	871.510	765.127	6	160.471	35.874	15.476	976.954	112,10
34	Papua	3.149.375	2.838.153	9.549	387.530	69.331	29.167	3.333.730	105,85
Total		255.461.686	87.828.613	11.170.615	37.862.522	14.961.768	4.966.769	156.790.287	61,38

Sumber : BPJS Kesehatan, Desember 2015

Keterangan : Data kumulatif sampai dengan 31 Desember 2015, Data Jumlah Penduduk Indonesia: BPS, 2015

Lampiran 4.8

**FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2015**

No	Provinsi	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama							Total
		Dokter Praktik Perorangan	Klinik POLRI	Klinik Pratama	Klinik TNI	Puskesmas	RS Tipe D Pratama	Praktik Dokter Gigi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	65	26	81	25	336	-	6	539
2	Sumatera Utara	94	36	320	31	577	1	9	1.068
3	Sumatera Barat	83	22	70	16	262	-	34	487
4	Riau	79	14	121	15	216	-	22	467
5	Jambi	67	12	25	5	186	-	13	308
6	Sumatera Selatan	176	18	102	21	325	-	27	669
7	Bengkulu	81	13	10	5	180	-	9	298
8	Lampung	100	11	106	14	291	-	11	533
9	Kepulauan Bangka Belitung	51	8	6	4	61	1	4	135
10	Kepulauan Riau	8	7	88	18	75	-	3	199
11	DKI Jakarta	10	22	175	64	332	1	2	606
12	Jawa Barat	478	44	756	66	1.057	-	80	2.481
13	Jawa Tengah	1.031	42	347	55	876	-	305	2.656
14	D I Yogyakarta	106	6	55	9	121	-	34	331
15	Jawa Timur	589	46	384	97	962	-	203	2.281
16	Banten	9	14	273	10	234	-	6	546
17	Bali	272	12	55	15	120	-	78	552
18	Nusa Tenggara Barat	82	12	11	10	159	-	10	284
19	Nusa Tenggara Timur	91	21	23	20	381	-	23	559
20	Kalimantan Barat	56	16	18	23	238	-	17	368
21	Kalimantan Tengah	53	18	19	8	198	-	4	300
22	Kalimantan Selatan	126	17	20	20	229	-	29	441
23	Kalimantan Timur	112	13	64	22	179	-	53	443
24	Kalimantan Utara	28	4	2	12	49	-	8	103
25	Sulawesi Utara	121	14	13	14	188	-	17	367
26	Sulawesi Tengah	39	12	18	8	187	-	12	276
27	Sulawesi Selatan	179	31	63	40	451	-	77	841
28	Sulawesi Tenggara	48	13	12	8	271	1	8	361
29	Gorontalo	30	8	10	7	93	-	5	153
30	Sulawesi Barat	25	5	5	3	94	-	8	140
31	Maluku	30	9	1	12	193	-	7	252
32	Maluku Utara	40	9	3	8	128	3	9	200
33	Papua Barat	31	5	10	6	149	1	4	206
34	Papua	51	11	14	29	401	2	11	519
Total		4.441	571	3.280	720	9.799	10	1.148	19.969

Sumber: BPJS Kesehatan, Desember 2015

Lampiran 4.9

**FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2015**

No	Provinsi	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan									Total
		RS Pemerintah Tipe A	RS Pemerintah Tipe B	RS Pemerintah Tipe C	RS Pemerintah Tipe D	RS TNI/POLRI	RS Khusus Jiwa	RS Khusus	RS Swasta	Klinik Utama	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	1	6	14	6	5	1	1	28	4	66
2	Sumatera Utara	1	10	26	7	8	1	3	61	6	123
3	Sumatera Barat	-	3	17	1	4	1	4	12	2	44
4	Riau	-	2	8	6	3	1	3	16	-	39
5	Jambi	-	2	8	3	2	1	1	9	-	26
6	Sumatera Selatan	1	1	9	10	4	1	5	15	-	46
7	Bengkulu	-	1	6	4	2	1	-	5	1	20
8	Lampung	-	2	11	-	2	1	3	20	1	40
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	5	2	-	1	1	6	6	21
10	Kepulauan Riau	-	2	7	3	1	-	1	7	-	21
11	DKI Jakarta	4	6	3	16	10	3	23	34	9	108
12	Jawa Barat	1	21	18	5	12	2	30	133	17	239
13	Jawa Tengah	2	22	23	6	10	4	20	126	21	234
14	D I Yogyakarta	1	5	2	1	3	1	9	35	4	61
15	Jawa Timur	2	26	30	15	25	2	25	100	3	228
16	Banten	-	4	4	2	2	-	9	30	2	53
17	Bali	1	6	3	-	3	1	3	26	1	44
18	Nusa Tenggara Barat	-	2	7	2	2	1	1	9	1	25
19	Nusa Tenggara Timur	-	1	11	8	3	-	4	15	-	42
20	Kalimantan Barat	-	2	10	5	5	2	4	4	4	36
21	Kalimantan Tengah	-	2	6	6	2	1	-	1	-	18
22	Kalimantan Selatan	1	3	9	3	4	1	1	1	2	25
23	Kalimantan Timur	1	4	9	-	4	1	2	10	3	34
24	Kalimantan Utara	-	1	2	2	1	-	-	-	-	6
25	Sulawesi Utara	1	-	7	7	4	1	1	13	-	34
26	Sulawesi Tengah	-	2	7	5	2	1	2	2	-	21
27	Sulawesi Selatan	1	7	20	2	8	1	9	17	4	69
28	Sulawesi Tenggara	-	1	7	5	2	1	-	6	-	22
29	Gorontalo	-	2	3	4	-	-	1	2	1	13
30	Sulawesi Barat	-	-	2	4	-	-	-	1	-	7
31	Maluku	-	1	3	11	4	1	-	6	3	29
32	Maluku Utara	-	1	2	7	1	-	-	3	-	14
33	Papua Barat	-	-	4	6	2	-	-	2	-	14
34	Papua	-	1	6	9	5	1	-	3	-	25
Total		18	149	309	173	145	34	166	758	95	1.847

Sumber : BPJS Kesehatan, Desember 2015

Lampiran 5.1

**CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K1, K4, PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN , DAN KUNJUNGAN NIFAS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Ibu Hamil					Jumlah Ibu Bersalin/Nifas	Ibu Bersalin		Ibu Nifas	
		Jumlah	K1	% K1	K4	% K4		Ditolong Nakes	% Ditolong Nakes	Kunjungan Nifas 3 kali	% Kf-3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	128.525	106.943	83,21	97.258	75,67	122.683	95.689	78,00	90.166	73,50
2	Sumatera Utara	348.021	286.903	82,44	262.768	75,50	332.203	253.038	76,17	288.897	86,96
3	Sumatera Barat	123.173	108.620	88,18	97.535	79,19	117.760	96.405	81,87	87.272	74,11
4	Riau	155.360	142.787	91,91	133.099	85,67	147.877	124.849	84,43	93.080	62,94
5	Jambi	78.840	78.392	99,43	74.045	93,92	74.930	70.050	93,49	69.319	92,51
6	Sumatera Selatan	189.366	184.927	97,66	176.958	93,45	179.897	162.199	90,16	154.296	85,77
7	Bengkulu	41.391	39.702	95,92	37.026	89,45	39.511	34.939	88,43	32.490	82,23
8	Lampung	176.506	169.282	95,91	158.189	89,62	168.483	150.401	89,27	152.036	90,24
9	Kepulauan Bangka Belitung	30.065	29.572	98,36	27.764	92,35	28.532	26.850	94,10	26.708	93,61
10	Kepulauan Riau	47.255	49.491	104,73	46.400	98,19	45.107	45.019	99,80	50.921	112,89
11	DKI Jakarta	196.901	196.418	99,75	187.481	95,22	187.951	180.741	96,16	175.879	93,58
12	Jawa Barat	979.472	1.021.335	104,27	959.603	97,97	934.950	897.039	95,95	909.080	97,23
13	Jawa Tengah	612.292	603.607	98,58	569.732	93,05	564.409	553.630	98,09	521.912	92,47
14	DI Yogyakarta	50.065	50.064	100,00	46.356	92,59	43.745	43.725	99,95	43.085	98,49
15	Jawa Timur	643.557	635.512	98,75	587.209	91,24	614.304	588.560	95,81	588.013	95,72
16	Banten	256.613	246.512	96,06	219.852	85,67	240.899	184.798	76,71	208.009	86,35
17	Bali	70.697	69.775	98,70	65.974	93,32	67.454	65.959	97,78	65.557	97,19
18	Nusa Tenggara Barat	118.677	118.680	100,00	109.269	92,07	113.296	101.723	89,79	84.734	74,79
19	Nusa Tenggara Timur	125.743	106.813	84,95	77.495	61,63	120.027	83.984	69,97	83.174	69,30
20	Kalimantan Barat	112.925	106.398	94,22	95.627	84,68	107.474	88.389	82,24	81.888	76,19
21	Kalimantan Tengah	55.719	51.995	93,32	47.780	85,75	51.737	43.045	83,20	41.113	79,47
22	Kalimantan Selatan	83.758	83.257	99,40	67.857	81,02	78.615	70.027	89,08	67.173	85,45
23	Kalimantan Timur	79.772	79.472	99,62	69.438	87,05	76.471	69.791	91,26	60.976	79,74
24	Kalimantan Utara	14.572	13.586	93,23	11.824	81,14	13.905	11.940	85,87	11.387	81,89
25	Sulawesi Utara	46.299	44.552	96,23	39.867	86,11	44.119	37.917	85,94	37.148	84,20
26	Sulawesi Tengah	69.619	58.356	83,82	49.480	71,07	66.455	48.184	72,51	47.066	70,82
27	Sulawesi Selatan	166.479	165.608	99,48	152.689	91,72	154.956	140.970	90,97	141.960	91,61
28	Sulawesi Tenggara	55.211	52.223	94,59	44.658	80,89	52.254	45.089	86,29	44.319	84,81
29	Gorontalo	22.922	23.028	100,46	20.190	88,08	21.997	20.311	92,34	17.867	81,22
30	Sulawesi Barat	32.093	30.247	94,25	24.405	76,04	28.461	24.350	85,56	20.053	70,46
31	Maluku	43.050	24.077	55,93	18.892	43,88	41.480	19.455	46,90	17.998	43,39
32	Maluku Utara	29.661	25.687	86,60	21.366	72,03	28.707	19.992	69,64	18.402	64,10
33	Papua Barat	23.245	13.645	58,70	7.067	30,40	22.167	9.287	41,90	6.317	28,50
34	Papua	77.916	43.646	56,02	19.047	24,45	74.375	25.393	34,14	21.080	28,34
	Indonesia	5.285.759	5.061.112	95,75	4.624.200	87,48	5.007.191	4.433.738	88,55	4.359.374	87,06

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 5.2

**CAKUPAN PEMBERIAN 90 TABLET TAMBAH DARAH PADA IBU HAMIL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	Ibu Hamil Mendapat 90 Tablet Tambah Darah	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	128.525	94.065	73,19
2	Sumatera Utara	342.218	254.695	74,42
3	Sumatera Barat	123.367	97.658	79,16
4	Riau	157.174	130.778	83,21
5	Jambi	81.711	73.774	90,29
6	Sumatera Selatan	163.542	139.512	85,31
7	Bengkulu	41.392	36.101	87,22
8	Lampung	188.327	156.155	82,92
9	Kepulauan Bangka Belitung	30.766	27.755	90,21
10	Kepulauan Riau	49.765	39.350	79,07
11	DKI Jakarta	196.901	191.225	97,12
12	Jawa Barat	979.472	935.461	95,51
13	Jawa Tengah	612.292	564.078	92,13
14	DI Yogyakarta	49.837	44.362	89,01
15	Jawa Timur	643.557	577.493	89,73
16	Banten	254.369	193.309	76,00
17	Bali	70.908	67.409	95,07
18	Nusa Tenggara Barat	118.177	109.555	92,70
19	Nusa Tenggara Timur	125.733	93.590	74,44
20	Kalimantan Barat	110.814	89.128	80,43
21	Kalimantan Tengah	58.779	41.857	71,21
22	Kalimantan Selatan	76.705	67.344	87,80
23	Kalimantan Timur	79.643	59.847	75,14
24	Kalimantan Utara	13.308	11.706	87,96
25	Sulawesi Utara	46.030	36.621	79,56
26	Sulawesi Tengah	69.619	44.153	63,42
27	Sulawesi Selatan	167.230	146.365	87,52
28	Sulawesi Tenggara	57.398	42.417	73,90
29	Gorontalo	22.935	19.503	85,04
30	Sulawesi Barat	31.959	23.304	72,92
31	Maluku	41.906	19.761	47,16
32	Maluku Utara	28.675	20.020	69,82
33	Papua Barat	22.649	10.712	47,30
34	Papua	69.598	16.953	24,36
Indonesia		5.255.281	4.476.016	85,17

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 5.3

**CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Perkiraan Komplikasi Kebidanan	Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	25.705	14.150	55,05
2	Sumatera Utara	69.604	21.478	30,86
3	Sumatera Barat	24.635	11.707	47,52
4	Riau	31.072	14.612	47,03
5	Jambi	15.768	12.240	77,63
6	Sumatera Selatan	37.873	19.554	51,63
7	Bengkulu	8.278	5.674	68,54
8	Lampung	35.301	27.296	77,32
9	Kepulauan Bangka Belitung	6.013	5.348	88,94
10	Kepulauan Riau	9.451	8.886	94,02
11	DKI Jakarta	39.380	34.567	87,78
12	Jawa Barat	195.894	185.068	94,47
13	Jawa Tengah	122.458	145.174	118,55
14	DI Yogyakarta	10.013	9.201	91,89
15	Jawa Timur	128.711	125.912	97,83
16	Banten	51.323	39.502	76,97
17	Bali	14.139	13.265	93,82
18	Nusa Tenggara Barat	47.471	26.091	54,96
19	Nusa Tenggara Timur	25.149	12.680	50,42
20	Kalimantan Barat	22.585	15.838	70,13
21	Kalimantan Tengah	11.144	4.045	36,30
22	Kalimantan Selatan	16.752	17.637	105,29
23	Kalimantan Timur	15.954	14.829	92,95
24	Kalimantan Utara	2.914	1.981	67,97
25	Sulawesi Utara	9.260	8.007	86,47
26	Sulawesi Tengah	13.924	8.823	63,37
27	Sulawesi Selatan	33.296	24.521	73,65
28	Sulawesi Tenggara	11.042	6.018	54,50
29	Gorontalo	4.584	4.312	94,06
30	Sulawesi Barat	6.419	3.903	60,81
31	Maluku	-	-	-
32	Maluku Utara	5.932	3.319	55,95
33	Papua Barat	4.649	852	18,33
34	Papua	15.583	1.987	12,75
Indonesia		1.072.277	848.477	79,13

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 5.4

**CAKUPAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN
MENURUT TEMPAT PERSALINAN DAN PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Ibu Bersalin	Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan (PN)					
			PN		PN di Fasyankes		PN di Non Fasyankes	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	122.683	95.689	78,00	89.535	72,98	6.154	5,02
2	Sumatera Utara	332.203	253.038	76,17	212.113	63,85	40.925	12,32
3	Sumatera Barat	117.760	96.405	81,87	92.502	78,55	3.903	3,31
4	Riau	147.877	124.849	84,43	84.465	57,12	40.384	27,31
5	Jambi	74.930	70.050	93,49	42.166	56,27	27.884	37,21
6	Sumatera Selatan	179.897	162.199	90,16	130.751	72,68	31.448	17,48
7	Bengkulu	39.511	34.939	88,43	23.000	58,21	11.939	30,22
8	Lampung	168.483	150.401	89,27	139.654	82,89	10.747	6,38
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.532	26.850	94,10	23.988	84,07	2.862	10,03
10	Kepulauan Riau	45.107	45.019	99,80	43.010	95,35	2.009	4,45
11	DKI Jakarta	187.951	180.741	96,16	164.019	87,27	16.722	8,90
12	Jawa Barat	934.950	897.039	95,95	840.928	89,94	56.111	6,00
13	Jawa Tengah	564.409	553.630	98,09	535.939	94,96	17.691	3,13
14	DI Yogyakarta	43.745	43.725	99,95	43.663	99,81	62	0,14
15	Jawa Timur	614.304	588.560	95,81	582.126	94,76	6.434	1,05
16	Banten	240.899	184.798	76,71	182.762	75,87	2.036	0,85
17	Bali	67.454	65.959	97,78	49.695	73,67	16.264	24,11
18	Nusa Tenggara Barat	113.296	101.723	89,79	100.309	88,54	1.414	1,25
19	Nusa Tenggara Timur	120.027	83.984	69,97	79.163	65,95	4.821	4,02
20	Kalimantan Barat	107.474	88.389	82,24	60.230	56,04	28.159	26,20
21	Kalimantan Tengah	51.737	43.045	83,20	20.796	40,20	22.249	43,00
22	Kalimantan Selatan	78.615	70.027	89,08	51.549	65,57	18.478	23,50
23	Kalimantan Timur	76.471	69.791	91,26	58.613	76,65	11.178	14,62
24	Kalimantan Utara	13.905	11.940	85,87	10.217	73,48	1.723	12,39
25	Sulawesi Utara	44.119	37.917	85,94	35.244	79,88	2.673	6,06
26	Sulawesi Tengah	66.455	48.184	72,51	37.320	56,16	10.864	16,35
27	Sulawesi Selatan	154.956	140.970	90,97	134.671	86,91	6.299	4,07
28	Sulawesi Tenggara	52.254	45.089	86,29	27.327	52,30	17.762	33,99
29	Gorontalo	21.997	20.311	92,34	19.934	90,62	377	1,71
30	Sulawesi Barat	28.461	24.350	85,56	21.780	76,53	2.570	9,03
31	Maluku	41.480	19.455	46,90	12.478	30,08	6.977	16,82
32	Maluku Utara	28.707	19.992	69,64	15.229	53,05	4.763	16,59
33	Papua Barat	22.167	9.287	41,90	7.065	31,87	2.222	10,02
34	Papua	74.375	25.393	34,14	19.592	26,34	5.801	7,80
	Indonesia	5.007.191	4.433.738	88,55	3.991.833	79,72	441.906	8,83

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 5.5

**CAKUPAN PESERTA KB BARU DAN PESERTA KB AKTIF
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah PUS	Peserta KB Baru		Peserta KB Aktif	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	844.310	119.951	14,21	641.553	75,99
2	Sumatera Utara	2.206.808	289.741	13,13	1.528.779	69,28
3	Sumatera Barat	843.913	128.373	15,21	611.854	72,50
4	Riau	1.088.559	169.329	15,56	794.527	72,99
5	Jambi	713.392	104.281	14,62	559.919	78,49
6	Sumatera Selatan	1.694.186	232.157	13,70	1.289.728	76,13
7	Bengkulu	325.659	66.560	20,44	286.649	88,02
8	Lampung	1.733.944	227.926	13,14	1.233.577	71,14
9	Kepulauan Bangka Belitung	251.304	38.711	15,40	205.072	81,60
10	Kepulauan Riau	353.530	48.829	13,81	283.702	80,25
11	DKI Jakarta	1.361.094	423.874	31,14	1.082.195	79,51
12	Jawa Barat	9.541.148	1.280.875	13,42	7.114.256	74,56
13	Jawa Tengah	6.736.249	839.796	12,47	5.270.734	78,24
14	DI Yogyakarta	543.115	49.269	9,07	431.418	79,43
15	Jawa Timur	8.215.650	887.397	10,80	6.299.424	76,68
16	Banten	2.359.628	264.492	11,21	1.681.548	71,26
17	Bali	665.592	62.900	9,45	539.953	81,12
18	Nusa Tenggara Barat	1.082.022	144.011	13,31	792.183	73,21
19	Nusa Tenggara Timur	691.626	81.762	11,82	422.588	61,10
20	Kalimantan Barat	790.541	107.447	13,59	559.864	70,82
21	Kalimantan Tengah	483.385	62.740	12,98	376.606	77,91
22	Kalimantan Selatan	812.991	122.076	15,02	638.063	78,48
23	Kalimantan Timur	563.650	70.705	12,54	402.883	71,48
24	Sulawesi Utara	451.167	55.963	12,40	377.367	83,64
25	Sulawesi Tengah	495.453	71.226	14,38	396.601	80,05
26	Sulawesi Selatan	1.381.722	211.931	15,34	976.933	70,70
27	Sulawesi Tenggara	372.198	60.133	16,16	278.754	74,89
28	Gorontalo	217.520	31.739	14,59	180.319	82,90
29	Sulawesi Barat	214.750	32.048	14,92	153.529	71,49
30	Maluku	220.968	55.391	25,07	147.766	66,87
31	Maluku Utara	31.962	18.489	57,85	24.136	75,51
32	Papua Barat	95.836	13.967	14,57	63.652	66,42
33	Papua	281.975	40.222	14,26	149.428	52,99
Indonesia		47.665.847	6.414.311	13,46	35.795.560	75,10

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2016

Lampiran 5.6

**PERSENTASE PESERTA KB BARU
MENURUT METODE KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah PUS	Peserta KB Baru		Peserta KB Baru Menurut Metode														Total
					Kondom		Pil		Suntik		IUD		Implan		MOW		MOP		
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	844.310	119.951	14,21	10.235	8,53	41.832	34,87	58.004	48,36	4.484	3,74	3.970	3,31	1.412	1,18	14	0,01	119.951
2	Sumatera Utara	2.206.808	289.741	13,13	36.732	12,68	111.836	38,60	73.667	25,43	20.184	6,97	35.829	12,37	8.876	3,06	2.617	0,90	289.741
3	Sumatera Barat	843.913	128.373	15,21	9.041	7,04	26.986	21,02	62.934	49,02	10.306	8,03	15.743	12,26	2.948	2,30	415	0,32	128.373
4	Riau	1.088.559	169.329	15,56	13.718	8,10	50.341	29,73	82.924	48,97	6.613	3,91	13.201	7,80	2.352	1,39	180	0,11	169.329
5	Jambi	713.392	104.281	14,62	4.579	4,39	32.971	31,62	51.877	49,75	3.834	3,68	10.053	9,64	945	0,91	22	0,02	104.281
6	Sumatera Selatan	1.694.186	232.157	13,70	21.488	9,26	76.161	32,81	89.905	38,73	7.108	3,06	35.200	15,16	1.955	0,84	340	0,15	232.157
7	Bengkulu	325.659	66.560	20,44	5.093	7,65	17.114	25,71	29.959	45,01	3.255	4,89	10.654	16,01	459	0,69	26	0,04	66.560
8	Lampung	1.733.944	227.926	13,14	14.545	6,38	87.609	38,44	78.287	34,35	14.935	6,55	30.322	13,30	2.049	0,90	179	0,08	227.926
9	Kepulauan Bangka Belitung	251.304	38.711	15,40	2.068	5,34	12.067	31,17	20.118	51,97	1.376	3,55	2.391	6,18	638	1,65	53	0,14	38.711
10	Kepulauan Riau	353.530	48.829	13,81	3.397	6,96	19.361	39,65	19.955	40,87	3.120	6,39	2.127	4,36	860	1,76	9	0,02	48.829
11	DKI Jakarta	1.361.094	423.874	31,14	25.638	6,05	106.936	25,23	226.638	53,47	43.255	10,20	16.118	3,80	4.792	1,13	497	0,12	423.874
12	Jawa Barat	9.541.148	1.280.875	13,42	43.948	3,43	406.947	31,77	635.281	49,60	96.601	7,54	80.300	6,27	17.058	1,33	740	0,06	1.280.875
13	Jawa Tengah	6.736.249	839.796	12,47	37.849	4,51	128.320	15,28	482.321	57,43	62.769	7,47	109.940	13,09	17.896	2,13	701	0,08	839.796
14	DI Yogyakarta	543.115	49.269	9,07	3.392	6,88	3.799	7,71	21.967	44,59	13.583	27,57	4.502	9,14	1.562	3,17	464	0,94	49.269
15	Jawa Timur	8.215.650	887.397	10,80	28.292	3,19	185.775	20,93	521.644	58,78	55.993	6,31	78.933	8,89	15.812	1,78	948	0,11	887.397
16	Banten	2.359.628	264.492	11,21	16.072	6,08	71.631	27,08	136.353	51,55	12.470	4,71	26.155	9,89	1.604	0,61	207	0,08	264.492
17	Bali	665.592	62.900	9,45	4.668	7,42	4.844	7,70	25.382	40,35	21.287	33,84	3.124	4,97	3.339	5,31	256	0,41	62.900
18	Nusa Tenggara Barat	1.082.022	144.011	13,31	4.482	3,11	20.638	14,33	78.428	54,46	12.756	8,86	26.011	18,06	1.083	0,75	613	0,43	144.011
19	Nusa Tenggara Timur	691.626	81.762	11,82	2.705	3,31	8.134	9,95	40.454	49,48	5.275	6,45	22.346	27,33	2.808	3,43	40	0,05	81.762
20	Kalimantan Barat	790.541	107.447	13,59	4.820	4,49	32.988	30,70	54.031	50,29	5.789	5,39	6.504	6,05	2.389	2,22	926	0,86	107.447
21	Kalimantan Tengah	483.385	62.740	12,98	1.509	2,41	20.885	33,29	34.838	55,53	947	1,51	3.842	6,12	692	1,10	27	0,04	62.740
22	Kalimantan Selatan	812.991	122.076	15,02	3.271	2,68	48.291	39,56	60.489	49,55	1.664	1,36	7.238	5,93	896	0,73	227	0,19	122.076
23	Kalimantan Timur	563.650	70.705	12,54	3.682	5,21	15.285	21,62	40.217	56,88	5.524	7,81	3.518	4,98	2.430	3,44	49	0,07	70.705
24	Sulawesi Utara	451.167	55.963	12,40	3.251	5,81	12.170	21,75	26.304	47,00	4.556	8,14	8.385	14,98	1.283	2,29	14	0,03	55.963
25	Sulawesi Tengah	495.453	71.226	14,38	2.116	2,97	24.886	34,94	30.202	42,40	4.960	6,96	7.143	10,03	1.790	2,51	129	0,18	71.226
26	Sulawesi Selatan	1.381.722	211.931	15,34	12.079	5,70	60.339	28,47	106.269	50,14	7.275	3,43	22.001	10,38	3.768	1,78	200	0,09	211.931
27	Sulawesi Tenggara	372.198	60.133	16,16	3.692	6,14	21.257	35,35	24.929	41,46	1.243	2,07	8.491	14,12	428	0,71	93	0,15	60.133
28	Gorontalo	217.520	31.739	14,59	913	2,88	7.368	23,21	13.523	42,61	1.990	6,27	7.102	22,38	706	2,22	137	0,43	31.739
29	Sulawesi Barat	214.750	32.048	14,92	2.309	7,20	10.645	33,22	16.371	51,08	651	2,03	1.653	5,16	323	1,01	96	0,30	32.048
30	Maluku	220.968	55.391	25,07	6.640	11,99	12.888	23,27	26.807	48,40	1.409	2,54	7.099	12,82	324	0,58	224	0,40	55.391
31	Maluku Utara	31.962	18.489	57,85	555	3,00	2.720	14,71	10.385	56,17	466	2,52	4.037	21,83	299	1,62	27	0,15	18.489
32	Papua Barat	95.836	13.967	14,57	921	6,59	3.054	21,87	7.652	54,79	398	2,85	1.559	11,16	362	2,59	21	0,15	13.967
33	Papua	281.975	40.222	14,26	16.992	42,25	4.632	11,52	14.809	36,82	495	1,23	2.477	6,16	792	1,97	25	0,06	40.222
Indonesia		47.665.847	6.414.311	13,46	350.692	5,47	1.690.710	26,36	3.202.924	49,93	436.571	6,81	617.968	9,63	104.930	1,64	10.516	0,16	6.414.311

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2016

Lampiran 5.7

**PERSENTASE PESERTA KB AKTIF
MENURUT METODE KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif		Peserta KB Aktif Menurut Metode													
					Kondom		Pii		Suntikan		IUD		Implan		MOW		MOP	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(14)	(15)	(18)	(19)	(16)	(17)	(6)	(7)	(12)	(13)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	844.310	641.553	75,99	52.932	8,25	237.162	36,97	303.227	47,26	19.814	3,09	21.437	3,34	6.822	1,06	159	0,02
2	Sumatera Utara	2.206.808	1.528.779	69,28	123.526	8,08	457.200	29,91	470.813	30,80	156.214	10,22	197.716	12,93	109.119	7,14	14.191	0,93
3	Sumatera Barat	843.913	611.854	72,50	29.898	4,89	106.524	17,41	310.575	50,76	57.725	9,43	83.751	13,69	20.670	3,38	2.711	0,44
4	Riau	1.088.559	794.527	72,99	36.418	4,58	247.757	31,18	379.707	47,79	42.303	5,32	75.184	9,46	11.344	1,43	1.814	0,23
5	Jambi	713.392	559.919	78,49	13.263	2,37	180.932	32,31	243.952	43,57	32.929	5,88	82.474	14,73	5.182	0,93	1.187	0,21
6	Sumatera Selatan	1.694.186	1.289.728	76,13	74.195	5,75	308.954	23,95	518.243	40,18	61.839	4,79	277.256	21,50	42.236	3,27	7.005	0,54
7	Bengkulu	325.659	286.649	88,02	11.016	3,84	66.467	23,19	125.098	43,64	20.698	7,22	56.082	19,56	6.210	2,17	1.078	0,38
8	Lampung	1.733.944	1.233.577	71,14	35.421	2,87	362.239	29,36	412.316	33,42	172.168	13,96	219.325	17,78	18.672	1,51	13.436	1,09
9	Kepulauan Bangka Belitung	251.304	205.072	81,60	8.190	3,99	60.273	29,39	101.704	49,59	9.684	4,72	20.076	9,79	4.717	2,30	428	0,21
10	Kepulauan Riau	353.530	283.702	80,25	19.138	6,75	103.056	36,33	114.643	40,41	19.996	7,05	19.014	6,70	6.817	2,40	1.038	0,37
11	DKI Jakarta	1.361.094	1.082.195	79,51	46.229	4,27	261.537	24,17	397.216	36,70	233.592	21,59	89.307	8,25	40.913	3,78	13.401	1,24
12	Jawa Barat	9.541.148	7.114.256	74,56	123.898	1,74	1.827.262	25,68	3.647.005	51,26	855.911	12,03	411.062	5,78	192.910	2,71	56.208	0,79
13	Jawa Tengah	6.736.249	5.270.734	78,24	126.958	2,41	743.971	14,12	2.964.201	56,24	476.701	9,04	632.526	12,00	278.427	5,28	47.950	0,91
14	DI Yogyakarta	543.115	431.418	79,43	28.992	6,72	49.404	11,45	193.468	44,84	105.781	24,52	29.532	6,85	20.829	4,83	3.412	0,79
15	Jawa Timur	8.215.650	6.299.424	76,68	109.045	1,73	1.251.466	19,87	3.167.069	50,28	815.448	12,94	631.103	10,02	298.167	4,73	27.126	0,43
16	Banten	2.359.628	1.681.548	71,26	54.692	3,25	390.478	23,22	888.453	52,84	132.749	7,89	170.658	10,15	29.177	1,74	15.341	0,91
17	Bali	665.592	539.953	81,12	19.671	3,64	52.940	9,80	204.982	37,96	220.708	40,88	14.539	2,69	24.034	4,45	3.079	0,57
18	Nusa Tenggara Barat	1.082.022	792.183	73,21	16.050	2,03	130.005	16,41	390.472	49,29	98.233	12,40	136.844	17,27	16.015	2,02	4.564	0,58
19	Nusa Tenggara Timur	691.626	422.588	61,10	7.590	1,80	45.974	10,88	205.620	48,66	45.885	10,86	88.644	20,98	26.331	6,23	2.544	0,60
20	Kalimantan Barat	790.541	559.864	70,82	14.909	2,66	199.114	35,56	250.394	44,72	40.295	7,20	41.581	7,43	9.103	1,63	4.468	0,80
21	Kalimantan Tengah	483.385	376.606	77,91	10.150	2,70	128.570	34,14	181.110	48,09	10.945	2,91	41.069	10,91	4.144	1,10	618	0,16
22	Kalimantan Selatan	812.991	638.063	78,48	14.822	2,32	308.908	48,41	241.907	37,91	11.985	1,88	49.804	7,81	7.901	1,24	2.736	0,43
23	Kalimantan Timur	563.650	402.883	71,48	12.754	3,17	134.668	33,43	176.397	43,78	45.231	11,23	22.603	5,61	10.146	2,52	1.084	0,27
24	Sulawesi Utara	451.167	377.367	83,64	9.402	2,49	93.885	24,88	151.742	40,21	35.333	9,36	77.275	20,48	8.678	2,30	1.052	0,28
25	Sulawesi Tengah	495.453	396.601	80,05	7.023	1,77	145.341	36,65	173.199	43,67	24.809	6,26	36.990	9,33	8.171	2,06	1.068	0,27
26	Sulawesi Selatan	1.381.722	976.933	70,70	50.783	5,20	272.969	27,94	460.690	47,16	47.557	4,87	123.805	12,67	19.234	1,97	1.895	0,19
27	Sulawesi Tenggara	372.198	278.754	74,89	13.550	4,86	99.315	35,63	114.567	41,10	7.937	2,85	36.189	12,98	6.037	2,17	1.159	0,42
28	Gorontalo	217.520	180.319	82,90	4.365	2,42	43.315	24,02	68.437	37,95	17.760	9,85	41.611	23,08	3.768	2,09	1.063	0,59
29	Sulawesi Barat	214.750	153.529	71,49	11.028	7,18	57.138	37,22	61.023	39,75	5.907	3,85	15.292	9,96	2.537	1,65	604	0,39
30	Maluku	220.968	147.766	66,87	6.082	4,12	34.238	23,17	71.168	48,16	6.880	4,66	24.277	16,43	4.175	2,83	946	0,64
31	Maluku Utara	31.962	24.136	75,51	910	3,77	4.475	18,54	12.094	50,11	929	3,85	4.530	18,77	678	2,81	520	2,15
32	Papua Barat	95.836	63.652	66,42	3.494	5,49	19.110	30,02	31.739	49,86	2.919	4,59	4.716	7,41	1.608	2,53	66	0,10
33	Papua	281.975	149.428	52,99	34.979	23,41	23.325	15,61	71.109	47,59	3.291	2,20	11.877	7,95	4.592	3,07	255	0,17
	Indonesia	47.665.847	35.795.560	75,10	1.131.373	3,16	8.447.972	23,60	17.104.340	47,78	3.840.156	10,73	3.788.149	10,58	1.249.364	3,49	234.206	0,65

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2016

Lampiran 5.8

**PERSENTASE PESERTA KB BARU
MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Tempat Pelayanan KB										Jumlah Peserta
		Faskes KB Pemerintah		Faskes KB Swasta		Praktik Dokter		Praktik Bidan Mandiri		Jejaring Lainnya		
		Peserta	%	Peserta	%	Peserta	%	Peserta	%	Peserta	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	82.484	68,76	13.330	11,11	614	0,51	17.426	14,53	6.097	5,08	119.951
2	Sumatera Utara	204.227	70,49	43.704	15,08	2.370	0,82	30.172	10,41	9.268	3,20	289.741
3	Sumatera Barat	72.786	56,70	2.071	1,61	2.662	2,07	45.598	35,52	5.256	4,09	128.373
4	Riau	99.561	58,80	14.963	8,84	5.498	3,25	43.975	25,97	5.332	3,15	169.329
5	Jambi	50.931	48,84	3.324	3,19	2.431	2,33	28.294	27,13	19.301	18,51	104.281
6	Sumatera Selatan	148.766	64,08	29.729	12,81	3.732	1,61	44.300	19,08	5.630	2,43	232.157
7	Bengkulu	42.982	64,58	3.034	4,56	2.103	3,16	18.425	27,68	16	0,02	66.560
8	Lampung	136.944	60,08	5.543	2,43	8.747	3,84	51.238	22,48	25.454	11,17	227.926
9	Kepulauan Bangka Belitung	18.605	48,06	2.397	6,19	370	0,96	7.870	20,33	9.469	24,46	38.711
10	Kepulauan Riau	17.617	36,08	9.998	20,48	1.673	3,43	19.370	39,67	171	0,35	48.829
11	DKI Jakarta	141.541	33,39	30.296	7,15	42.951	10,13	209.076	49,33	10	0,00	423.874
12	Jawa Barat	633.201	49,44	148.915	11,63	19.532	1,52	424.785	33,16	54.442	4,25	1.280.875
13	Jawa Tengah	423.662	50,45	67.619	8,05	18.299	2,18	321.194	38,25	9.022	1,07	839.796
14	DI Yogyakarta	17.597	35,72	15.622	31,71	667	1,35	15.373	31,20	10	0,02	49.269
15	Jawa Timur	471.305	53,11	37.684	4,25	8.495	0,96	300.634	33,88	69.279	7,81	887.397
16	Banten	153.429	58,01	27.882	10,54	3.328	1,26	74.457	28,15	5.396	2,04	264.492
17	Bali	24.706	39,28	8.716	13,86	1.443	2,29	25.989	41,32	2.046	3,25	62.900
18	Nusa Tenggara Barat	124.178	86,23	5.534	3,84	222	0,15	13.136	9,12	941	0,65	144.011
19	Nusa Tenggara Timur	79.031	96,66	1.935	2,37	27	0,03	769	0,94	0	0,00	81.762
20	Kalimantan Barat	78.018	72,61	17.123	15,94	517	0,48	11.265	10,48	524	0,49	107.447
21	Kalimantan Tengah	46.490	74,10	8.561	13,65	868	1,38	6.354	10,13	467	0,74	62.740
22	Kalimantan Selatan	75.208	61,61	3.538	2,90	1.211	0,99	40.348	33,05	1.771	1,45	122.076
23	Kalimantan Timur	44.857	63,44	11.258	15,92	957	1,35	13.131	18,57	502	0,71	70.705
24	Sulawesi Utara	39.459	70,51	13.140	23,48	701	1,25	2.190	3,91	473	0,85	55.963
25	Sulawesi Tengah	60.010	84,25	3.701	5,20	628	0,88	6.887	9,67	0	0,00	71.226
26	Sulawesi Selatan	181.949	85,85	11.668	5,51	1.753	0,83	14.087	6,65	2.474	1,17	211.931
27	Sulawesi Tenggara	56.253	93,55	1.896	3,15	150	0,25	1.819	3,02	15	0,02	60.133
28	Gorontalo	28.179	88,78	1.953	6,15	39	0,12	1.290	4,06	278	0,88	31.739
29	Sulawesi Barat	25.677	80,12	1.144	3,57	7	0,02	4.420	13,79	800	2,50	32.048
30	Maluku	49.908	90,10	2.583	4,66	544	0,98	2.356	4,25	0	0,00	55.391
31	Maluku Utara	15.553	84,12	1.929	10,43	199	1,08	808	4,37	0	0,00	18.489
32	Papua Barat	13.231	94,73	159	1,14	199	1,42	378	2,71	0	0,00	13.967
33	Papua	34.919	86,82	5.226	12,99	44	0,11	33	0,08	0	0,00	40.222
	Indonesia	3.693.264	57,58	556.175	8,67	132.981	2,07	1.797.447	28,02	234.444	3,66	6.414.311

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2016

Lampiran 5.9

JUMLAH TEMPAT PELAYANAN KB MENURUT PROVINSI TAHUN 2015

No	Provinsi	Jumlah Klinik KB	Tempat Pelayanan KB									
			Faskes KB Pemerintah		Faskes KB Swasta		Praktik Dokter		Praktik Bidan Mandiri		Jejaring Lainnya	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	2.354	428	18,18	138	5,86	688	29,23	823	34,96	277	11,77
2	Sumatera Utara	3.126	962	30,77	353	11,29	415	13,28	1.266	40,50	130	4,16
3	Sumatera Barat	3.301	400	12,12	23	0,70	490	14,84	2.146	65,01	242	7,33
4	Riau	2.849	301	10,57	102	3,58	437	15,34	1.556	54,62	453	15,90
5	Jambi	2.455	219	8,92	48	1,96	400	16,29	1.114	45,38	674	27,45
6	Sumatera Selatan	4.042	1.065	26,35	263	6,51	402	9,95	1.987	49,16	325	8,04
7	Bengkulu	1.550	340	21,94	27	1,74	171	11,03	1.010	65,16	2	0,13
8	Lampung	3.165	436	13,78	52	1,64	722	22,81	1.599	50,52	356	11,25
9	Kepulauan Bangka Belitung	455	128	28,13	11	2,42	68	14,95	122	26,81	126	27,69
10	Kepulauan Riau	636	127	19,97	64	10,06	96	15,09	313	49,21	36	5,66
11	DKI Jakarta	2.121	424	19,99	107	5,04	425	20,04	1.164	54,88	1	0,05
12	Jawa Barat	13.580	1.498	11,03	1.342	9,88	2.099	15,46	7.718	56,83	923	6,80
13	Jawa Tengah	15.077	1.083	7,18	646	4,28	2.474	16,41	10.404	69,01	470	3,12
14	DI Yogyakarta	1.127	146	12,95	173	15,35	130	11,54	642	56,97	36	3,19
15	Jawa Timur	13.994	1.287	9,20	487	3,48	1.712	12,23	7.864	56,20	2.644	18,89
16	Banten	2.224	252	11,33	277	12,46	234	10,52	1.233	55,44	228	10,25
17	Bali	2.008	163	8,12	141	7,02	373	18,58	922	45,92	409	20,37
18	Nusa Tenggara Barat	1.934	1.037	53,62	78	4,03	196	10,13	548	28,34	75	3,88
19	Nusa Tenggara Timur	595	498	83,70	38	6,39	26	4,37	33	5,55	0	0,00
20	Kalimantan Barat	1.527	300	19,65	138	9,04	203	13,29	812	53,18	74	4,85
21	Kalimantan Tengah	1.673	614	36,70	148	8,85	146	8,73	616	36,82	149	8,91
22	Kalimantan Selatan	2.419	315	13,02	43	1,78	369	15,25	1.630	67,38	62	2,56
23	Kalimantan Timur	1.387	353	25,45	123	8,87	220	15,86	612	44,12	79	5,70
24	Sulawesi Utara	765	229	29,93	153	20,00	137	17,91	241	31,50	5	0,65
25	Sulawesi Tengah	1.183	895	75,66	58	4,90	84	7,10	143	12,09	3	0,25
26	Sulawesi Selatan	2.249	750	33,35	92	4,09	345	15,34	799	35,53	263	11,69
27	Sulawesi Tenggara	601	436	72,55	15	2,50	83	13,81	61	10,15	6	1,00
28	Gorontalo	457	124	27,13	23	5,03	77	16,85	178	38,95	55	12,04
29	Sulawesi Barat	391	151	38,62	18	4,60	44	11,25	88	22,51	90	23,02
30	Maluku	355	205	57,75	45	12,68	24	6,76	81	22,82	0	0,00
31	Maluku Utara	257	162	63,04	45	17,51	17	6,61	29	11,28	4	1,56
32	Papua Barat	236	166	70,34	14	5,93	13	5,51	42	17,80	1	0,42
33	Papua	422	326	77,25	36	8,53	13	3,08	47	11,14	0	0,00
	Indonesia	90.515	15.820	17,48	5.321	5,88	13.333	14,73	47.843	52,86	8.198	9,06

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2016

Lampiran 5.10

**HASIL PELAYANAN PESERTA KB BARU PASCA PERSALINAN/PASCA KEGUGURAN (PP/PK)
MENURUT METODE KONTRASEPSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Metode Kontrasepsi														Jumlah
		Kondom		Pil		Suntik		IUD		Implan		MOW		MOP		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	1.578	5,61	9.132	32,46	14.098	50,11	1.429	5,08	1.238	4,40	661	2,35	0	0,00	28.136
2	Sumatera Utara	2.350	11,97	6.222	31,68	4.940	25,15	1.536	7,82	1.826	9,30	2.764	14,07	1	0,01	19.639
3	Sumatera Barat	927	4,10	2.927	12,93	10.870	48,02	3.668	16,20	2.917	12,89	1.308	5,78	18	0,08	22.635
4	Riau	2.562	9,27	6.915	25,03	13.649	49,41	1.358	4,92	2.007	7,27	1.131	4,09	1	0,00	27.623
5	Jambi	1.011	3,82	6.538	24,70	15.322	57,89	1.356	5,12	1.699	6,42	540	2,04	1	0,00	26.467
6	Sumatera Selatan	3.706	6,98	15.068	28,38	24.855	46,82	2.444	4,60	5.940	11,19	1.067	2,01	9	0,02	53.089
7	Bengkulu	819	6,68	2.737	22,32	6.090	49,65	666	5,43	1.833	14,94	119	0,97	1	0,01	12.265
8	Lampung	1.162	4,44	7.076	27,07	10.097	38,62	3.300	12,62	3.279	12,54	1.227	4,69	3	0,01	26.144
9	Kepulauan Bangka Belitung	374	2,43	4.115	26,77	9.618	62,58	313	2,04	678	4,41	270	1,76	2	0,01	15.370
10	Kepulauan Riau	1.116	4,75	11.843	50,45	7.756	33,04	1.468	6,25	935	3,98	357	1,52	0	0,00	23.475
11	DKI Jakarta	559	3,29	2.412	14,18	6.543	38,46	5.861	34,45	827	4,86	808	4,75	2	0,01	17.012
12	Jawa Barat	7.318	2,20	79.729	23,97	175.410	52,75	38.976	11,72	22.897	6,89	8.178	2,46	47	0,01	332.555
13	Jawa Tengah	4.159	2,60	12.262	7,67	95.010	59,41	21.359	13,35	19.821	12,39	7.275	4,55	47	0,03	159.933
14	DI Yogyakarta	346	3,19	318	2,94	2.304	21,27	6.574	60,70	595	5,49	674	6,22	20	0,18	10.831
15	Jawa Timur	3.550	2,10	21.316	12,62	105.638	62,54	20.031	11,86	10.279	6,09	8.049	4,77	44	0,03	168.907
16	Banten	1.504	3,11	10.603	21,93	28.036	57,98	3.124	6,46	4.285	8,86	796	1,65	5	0,01	48.353
17	Bali	1.695	6,64	1.485	5,81	8.989	35,19	10.421	40,80	1.104	4,32	1.812	7,09	37	0,14	25.543
18	Nusa Tenggara Barat	521	1,57	3.080	9,28	19.742	59,50	4.004	12,07	5.232	15,77	570	1,72	33	0,10	33.182
19	Nusa Tenggara Timur	372	1,79	1.627	7,83	10.335	49,75	1.919	9,24	4.728	22,76	1.788	8,61	5	0,02	20.774
20	Kalimantan Barat	677	2,48	6.625	24,27	15.616	57,21	2.107	7,72	846	3,10	1.418	5,20	6	0,02	27.295
21	Kalimantan Tengah	246	1,41	5.248	30,11	10.408	59,71	351	2,01	852	4,89	317	1,82	10	0,06	17.432
22	Kalimantan Selatan	358	1,24	9.225	31,93	17.316	59,93	699	2,42	873	3,02	422	1,46	2	0,01	28.895
23	Kalimantan Timur	782	4,44	2.910	16,53	9.376	53,27	2.516	14,30	847	4,81	1.162	6,60	7	0,04	17.600
24	Sulawesi Utara	436	3,08	1.902	13,46	8.078	57,14	1.507	10,66	1.593	11,27	615	4,35	5	0,04	14.136
25	Sulawesi Tengah	245	1,67	4.274	29,09	6.846	46,60	1.405	9,56	843	5,74	1.078	7,34	1	0,01	14.692
26	Sulawesi Selatan	1.025	2,20	9.717	20,83	26.882	57,64	3.158	6,77	3.454	7,41	2.392	5,13	11	0,02	46.639
27	Sulawesi Tenggara	438	3,91	4.025	35,94	5.479	48,92	326	2,91	799	7,13	132	1,18	0	0,00	11.199
28	Gorontalo	98	1,25	1.192	15,18	3.594	45,77	672	8,56	1.799	22,91	497	6,33	1	0,01	7.853
29	Sulawesi Barat	248	5,03	1.492	30,27	2.867	58,17	68	1,38	192	3,90	62	1,26	0	0,00	4.929
30	Maluku	376	7,56	1.089	21,91	2.607	52,44	84	1,69	705	14,18	110	2,21	0	0,00	4.971
31	Maluku Utara	30	0,91	218	6,61	2.068	62,69	163	4,94	656	19,88	164	4,97	0	0,00	3.299
32	Papua Barat	39	2,06	324	17,08	1.073	56,56	62	3,27	262	13,81	137	7,22	0	0,00	1.897
33	Papua	8	1,41	71	12,52	409	72,13	3	0,53	62	10,93	14	2,47	0	0,00	567
Indonesia		40.635	3,19	253.717	19,93	681.921	53,55	142.928	11,22	105.903	8,32	47.914	3,76	319	0,03	1.273.337

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2016

Lampiran 5.11

**JUMLAH DAN PERSENTASE PUS BUKAN PESERTA KB (UNMET NEED)
HASIL PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2015**

No	Provinsi	Alasan Unmet Need				Total Unmet Need	
		Ingin Anak Ditunda	%	Tidak Ingin Anak Lagi	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	59.592	7,06	52.476	6,22	112.068	13,27
2	Sumatera Utara	171.704	7,78	186.331	8,44	358.035	16,22
3	Sumatera Barat	55.357	6,56	56.651	6,71	112.008	13,27
4	Riau	87.604	8,05	96.093	8,83	183.697	16,88
5	Jambi	43.011	6,03	40.016	5,61	83.027	11,64
6	Sumatera Selatan	111.714	6,59	103.417	6,10	215.131	12,70
7	Bengkulu	8.934	2,74	10.929	3,36	19.863	6,10
8	Lampung	144.296	8,32	134.478	7,76	278.774	16,08
9	Kepulauan Bangka Belitung	11.466	4,56	16.627	6,62	28.093	11,18
10	Kepulauan Riau	19.024	5,38	23.091	6,53	42.115	11,91
11	DKI Jakarta	71.070	5,22	93.114	6,84	164.184	12,06
12	Jawa Barat	563.519	5,91	679.778	7,12	1.243.297	13,03
13	Jawa Tengah	330.078	4,90	376.110	5,58	706.188	10,48
14	DI Yogyakarta	19.936	3,67	22.028	4,06	41.964	7,73
15	Jawa Timur	405.471	4,94	412.640	5,02	818.111	9,96
16	Banten	166.332	7,05	199.480	8,45	365.812	15,50
17	Bali	19.409	2,92	17.850	2,68	37.259	5,60
18	Nusa Tenggara Barat	79.077	7,31	66.634	6,16	145.711	13,47
19	Nusa Tenggara Timur	83.068	12,01	67.946	9,82	151.014	21,83
20	Kalimantan Barat	63.310	8,01	64.886	8,21	128.196	16,22
21	Kalimantan Tengah	29.047	6,01	28.872	5,97	57.919	11,98
22	Kalimantan Selatan	44.541	5,48	53.715	6,61	98.256	12,09
23	Kalimantan Timur	43.204	7,67	47.919	8,50	91.123	16,17
24	Sulawesi Utara	19.620	4,35	21.253	4,71	40.873	9,06
25	Sulawesi Tengah	26.317	5,31	28.195	5,69	54.512	11,00
26	Sulawesi Selatan	109.834	7,95	98.885	7,16	208.719	15,11
27	Sulawesi Tenggara	31.233	8,39	27.174	7,30	58.407	15,69
28	Gorontalo	8.308	3,82	8.719	4,01	17.027	7,83
29	Sulawesi Barat	18.497	8,61	14.730	6,86	33.227	15,47
30	Maluku	24.030	10,87	22.601	10,23	46.631	21,10
31	Maluku Utara	2.025	6,34	2.283	7,14	4.308	13,48
32	Papua Barat	14.968	15,62	7.682	8,02	22.650	23,63
33	Papua	44.771	15,88	38.984	13,83	83.755	29,70
	Indonesia	2.930.367	6,15	3.121.587	6,55	6.051.954	12,70

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2016

Lampiran 5.12

**CAKUPAN IMUNISASI TT PADA WANITA USIA SUBUR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Wanita Usia Subur (WUS)	Jumlah Wanita Usia Subur Diimunisasi									
			TT1		TT2		TT3		TT4		TT5	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	1.082.128	46.014	4,25	40.159	3,71	29.301	2,71	23.413	2,16	21.237	1,96
2	Sumatera Utara	2.802.117	40.871	1,46	37.901	1,35	13.093	0,47	10.049	0,36	8.386	0,30
3	Sumatera Barat	1.018.237	31.186	3,06	27.060	2,66	23.914	2,35	19.879	1,95	19.674	1,93
4	Riau	1.370.879	16.072	1,17	16.580	1,21	19.933	1,45	19.159	1,40	18.414	1,34
5	Jambi	726.631	42.038	5,79	38.180	5,25	20.145	2,77	13.270	1,83	9.900	1,36
6	Sumatera Selatan	1.685.712	100.923	5,99	97.222	5,77	18.002	1,07	14.305	0,85	11.918	0,71
7	Bengkulu	400.229	16.327	4,08	15.055	3,76	3.063	0,77	3.472	0,87	3.482	0,87
8	Lampung	1.625.865	33.253	2,05	31.327	1,93	25.444	1,56	26.957	1,66	25.210	1,55
9	Kepulauan Bangka Belitung	285.490	1.367	0,48	4.530	1,59	7.222	2,53	7.120	2,49	10.583	3,71
10	Kepulauan Riau	455.582	16.792	3,69	14.240	3,13	10.074	2,21	8.247	1,81	7.108	1,56
11	DKI Jakarta	2.311.332	30.962	1,34	28.373	1,23	24.079	1,04	26.197	1,13	24.638	1,07
12	Jawa Barat	9.632.597	618.375	6,42	557.773	5,79	174.170	1,81	105.627	1,10	78.281	0,81
13	Jawa Tengah	6.380.775	349.903	5,48	321.391	5,04	321.949	5,05	245.862	3,85	264.449	4,14
14	DI Yogyakarta	705.271	1.004	0,14	1.824	0,26	25.275	3,58	18.230	2,58	14.090	2,00
15	Jawa Timur	7.484.427	413.300	5,52	183.702	2,45	543.311	7,26	686.521	9,17	1.617.854	21,62
16	Banten	2.630.535	113.886	4,33	110.008	4,18	51.949	1,97	39.850	1,51	43.543	1,66
17	Bali	799.528	84	0,01	165	0,02	2.280	0,29	11.394	1,43	35.832	4,48
18	Nusa Tenggara Barat	1.047.527	45.733	4,37	44.689	4,27	23.315	2,23	17.734	1,69	13.566	1,30
19	Nusa Tenggara Timur	993.483	20.000	2,01	16.218	1,63	9.471	0,95	5.764	0,58	6.188	0,62
20	Kalimantan Barat	1.008.301	26.241	2,60	25.252	2,50	17.550	1,74	15.514	1,54	18.090	1,79
21	Kalimantan Tengah	535.947	19.609	3,66	16.326	3,05	4.491	0,84	2.681	0,50	2.127	0,40
22	Kalimantan Selatan	821.280	32.401	3,95	28.792	3,51	14.101	1,72	9.007	1,10	5.962	0,73
23	Kalimantan Timur	723.606	12.781	1,77	10.595	1,46	7.319	1,01	6.851	0,95	7.722	1,07
24	Kalimantan Utara	130.507	415	0,32	355	0,27	304	0,23	296	0,23	275	0,21
25	Sulawesi Utara	459.948	19.604	4,26	16.755	3,64	2.443	0,53	1.097	0,24	967	0,21
26	Sulawesi Tengah	591.236	17.167	2,90	15.583	2,64	10.362	1,75	9.184	1,55	9.140	1,55
27	Sulawesi Selatan	1.768.709	81.054	4,58	67.891	3,84	21.227	1,20	11.782	0,67	9.776	0,55
28	Sulawesi Tenggara	516.114	825	0,16	18.041	3,50	8.773	1,70	6.174	1,20	5.773	1,12
29	Gorontalo	241.517	20.862	8,64	18.514	7,67	3.321	1,38	1.403	0,58	1.042	0,43
30	Sulawesi Barat	272.449	11.680	4,29	9.662	3,55	5.088	1,87	2.290	0,84	2.123	0,78
31	Maluku	347.161	35.436	10,21	29.892	8,61	17.689	5,10	12.031	3,47	11.534	3,32
32	Maluku Utara	240.549	18.203	7,57	13.772	5,73	5.094	2,12	2.597	1,08	2.252	0,94
33	Papua Barat	188.956	2.959	1,57	3.556	1,88	3.713	1,97	3.150	1,67	4.030	2,13
34	Papua	696.502	202	0,03	226	0,03	196	0,03	162	0,02	236	0,03
Indonesia		51.981.127	2.237.529	4,30	1.861.609	3,58	1.467.661	2,82	1.387.269	2,67	2.315.402	4,45

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2016
Update sampai dengan 30 Juni 2016 (data sasaran menggunakan data Sekjen)

Lampiran 5.13

**CAKUPAN IMUNISASI TT PADA IBU HAMIL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Diimunisasi										TT 2+	
			TT1		TT2		TT3		TT4		TT5		Jumlah	%
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Aceh	128.525	30.612	23,82	29.205	22,72	18.005	14,01	12.133	9,44	11.326	8,81	70.669	54,98
2	Sumatera Utara	347.747	38.304	11,01	35.576	10,23	11.943	3,43	9.098	2,62	7.526	2,16	64.143	18,45
3	Sumatera Barat	123.367	22.615	18,33	22.729	18,42	17.749	14,39	15.346	12,44	13.456	10,91	69.280	56,16
4	Riau	167.267	14.156	8,46	15.399	9,21	17.676	10,57	18.020	10,77	17.388	10,40	68.483	40,94
5	Jambi	73.736	29.979	40,66	30.129	40,86	16.147	21,90	10.541	14,30	7.836	10,63	64.653	87,68
6	Sumatera Selatan	182.527	99.960	54,76	96.368	52,80	17.888	9,80	14.201	7,78	11.823	6,48	140.280	76,85
7	Bengkulu	41.391	15.761	38,08	14.764	35,67	2.883	6,97	3.268	7,90	3.324	8,03	24.239	58,56
8	Lampung	176.506	27.366	15,50	25.817	14,63	19.752	11,19	22.087	12,51	20.702	11,73	88.358	50,06
9	Kepulauan Bangka Belitung	29.713	1.142	3,84	4.212	14,18	6.635	22,33	6.508	21,90	9.744	32,79	27.099	91,20
10	Kepulauan Riau	47.255	11.705	24,77	10.681	22,60	7.615	16,11	5.836	12,35	5.186	10,97	29.318	62,04
11	DKI Jakarta	196.901	29.527	15,00	27.022	13,72	23.358	11,86	25.311	12,85	24.168	12,27	99.859	50,72
12	Jawa Barat	979.472	618.375	63,13	557.773	56,95	174.170	17,78	105.627	10,78	78.281	7,99	915.851	93,50
13	Jawa Tengah	603.099	126.366	20,95	142.034	23,55	139.036	23,05	95.264	15,80	82.515	13,68	458.849	76,08
14	DI Yogyakarta	59.351	528	0,89	1.430	2,41	15.094	25,43	16.215	27,32	12.705	21,41	45.444	76,57
15	Jawa Timur	643.557	145.398	22,59	38.035	5,91	113.076	17,57	129.993	20,20	230.392	35,80	511.496	79,48
16	Banten	271.547	107.931	39,75	101.802	37,49	41.476	15,27	28.906	10,64	26.420	9,73	198.604	73,14
17	Bali	71.977	75	0,10	155	0,22	2.196	3,05	10.955	15,22	35.349	49,11	48.655	67,60
18	Nusa Tenggara Barat	117.073	45.733	39,06	44.689	38,17	23.315	19,91	17.734	15,15	13.566	11,59	99.304	84,82
19	Nusa Tenggara Timur	147.331	18.770	12,74	15.379	10,44	8.993	6,10	5.361	3,64	5.786	3,93	35.519	24,11
20	Kalimantan Barat	113.286	21.776	19,22	20.848	18,40	12.144	10,72	9.525	8,41	9.820	8,67	52.337	46,20
21	Kalimantan Tengah	58.779	16.866	28,69	14.641	24,91	3.693	6,28	2.256	3,84	1.754	2,98	22.344	38,01
22	Kalimantan Selatan	92.242	20.069	21,76	21.990	23,84	10.074	10,92	6.629	7,19	4.473	4,85	43.166	46,80
23	Kalimantan Timur	81.998	9.153	11,16	8.323	10,15	4.345	5,30	3.775	4,60	4.176	5,09	20.619	25,15
24	Kalimantan Utara	13.308	294	2,21	265	1,99	201	1,51	175	1,31	183	1,38	824	6,19
25	Sulawesi Utara	46.297	18.170	39,25	16.624	35,91	2.314	5,00	1.077	2,33	947	2,05	20.962	45,28
26	Sulawesi Tengah	69.619	17.067	24,51	15.496	22,26	10.236	14,70	9.103	13,08	9.072	13,03	43.907	63,07
27	Sulawesi Selatan	188.921	71.141	37,66	65.626	34,74	20.143	10,66	11.154	5,90	9.289	4,92	106.212	56,22
28	Sulawesi Tenggara	67.860	18.660	27,50	17.193	25,34	8.207	12,09	5.741	8,46	5.530	8,15	36.671	54,04
29	Gorontalo	25.880	18.733	72,38	16.681	64,46	2.170	8,38	1.245	4,81	976	3,77	21.072	81,42
30	Sulawesi Barat	35.142	11.313	32,19	9.532	27,12	4.799	13,66	2.082	5,92	1.711	4,87	18.124	51,57
31	Maluku	48.069	21.841	45,44	18.429	38,34	8.445	17,57	4.266	8,87	3.826	7,96	34.966	72,74
32	Maluku Utara	31.897	14.546	45,60	12.192	38,22	3.359	10,53	1.688	5,29	1.587	4,98	18.826	59,02
33	Papua Barat	23.223	2.346	10,10	2.290	9,86	2.032	8,75	1.695	7,30	2.388	10,28	8.405	36,19
34	Papua	77.916	202	0,26	225	0,29	195	0,25	161	0,21	231	0,30	812	1,04
Indonesia		5.382.779	1.646.480	30,59	1.453.554	27,00	769.364	14,29	612.976	11,39	673.456	12,51	3.509.350	65,20

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2016

Update sampai dengan 30 Juni 2016 (data sasaran menggunakan data Sekjen)

Lampiran 5.14

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2015

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Kunjungan Neonatus			
			KN1	% KN1	KN Lengkap	%KN Lengkap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	116.841	97.837	83,74	94.089	80,53
2	Sumatera Utara	316.134	241.407	76,36	162.283	51,33
3	Sumatera Barat	112.152	85.557	76,29	79.568	70,95
4	Riau	152.061	120.622	79,32	115.077	75,68
5	Jambi	67.033	64.198	95,77	55.717	83,12
6	Sumatera Selatan	165.934	114.938	69,27	76.597	46,16
7	Bengkulu	37.628	35.003	93,02	33.491	89,01
8	Lampung	160.460	151.503	94,42	146.822	91,50
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.012	26.722	98,93	26.363	97,60
10	Kepulauan Riau	42.959	36.258	84,40	34.310	79,87
11	DKI Jakarta	179.001	176.695	98,71	173.828	97,11
12	Jawa Barat	890.429	830.829	93,31	772.280	86,73
13	Jawa Tengah	548.272	548.607	100,06	539.266	98,36
14	D I Yogyakarta	53.955	43.546	80,71	41.620	77,14
15	Jawa Timur	585.052	587.468	100,41	572.217	97,81
16	Banten	246.861	222.409	90,09	204.778	82,95
17	Bali	65.434	65.642	100,32	48.714	74,45
18	Nusa Tenggara Barat	106.430	101.976	95,82	99.984	93,94
19	Nusa Tenggara Timur	133.937	56.140	41,92	52.458	39,17
20	Kalimantan Barat	102.987	77.275	75,03	74.700	72,53
21	Kalimantan Tengah	53.435	43.282	81,00	42.014	78,63
22	Kalimantan Selatan	83.856	69.644	83,05	67.590	80,60
23	Kalimantan Timur	74.544	67.418	90,44	61.231	82,14
24	Kalimantan Utara	12.098	9.548	78,92	8.787	72,63
25	Sulawesi Utara	42.088	31.754	75,45	29.801	70,81
26	Sulawesi Tengah	63.290	32.849	51,90	26.060	41,18
27	Sulawesi Selatan	171.746	18.058	10,51	17.418	10,14
28	Sulawesi Tenggara	61.691	47.636	77,22	45.822	74,28
29	Gorontalo	23.527	16.812	71,46	15.056	63,99
30	Sulawesi Barat	31.947	23.501	73,56	22.267	69,70
31	Maluku	43.699	19.530	44,69	18.615	42,60
32	Maluku Utara	28.997	14.795	51,02	13.687	47,20
33	Papua Barat	21.112	4.306	20,40	3.917	18,55
34	Papua	70.833	10.589	14,95	6.823	9,63
Indonesia		4.893.435	4.094.354	83,67	3.783.250	77,31

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 5.15

**CAKUPAN PENANGANAN NEONATAL DENGAN KOMPLIKASI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Neonatal Komplikasi	Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi	
				Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	116.841	17.526	8.853	50,51
2	Sumatera Utara	316.134	47.420	6.961	14,68
3	Sumatera Barat	112.152	16.823	4.924	29,27
4	Riau	152.061	22.809	8.535	37,42
5	Jambi	67.033	10.055	6.115	60,82
6	Sumatera Selatan	165.934	24.890	8.259	33,18
7	Bengkulu	37.628	5.636	3.494	61,99
8	Lampung	160.460	24.069	8.704	36,16
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.012	4.052	3.647	90,01
10	Kepulauan Riau	42.959	6.444	2.316	35,94
11	DKI Jakarta	179.001	26.850	18.836	70,15
12	Jawa Barat	890.429	133.564	68.825	51,53
13	Jawa Tengah	548.272	82.241	73.381	89,23
14	DI Yogyakarta	53.955	8.093	6.203	76,64
15	Jawa Timur	585.052	87.758	72.763	82,91
16	Banten	246.861	37.029	20.551	55,50
17	Bali	65.434	9.815	4.965	50,59
18	Nusa Tenggara Barat	106.430	15.965	13.037	81,66
19	Nusa Tenggara Timur	133.937	20.091	2.132	10,61
20	Kalimantan Barat	102.987	15.448	6.549	42,39
21	Kalimantan Tengah	53.435	8.015	1.943	24,24
22	Kalimantan Selatan	83.856	12.578	6.585	52,35
23	Kalimantan Timur	74.544	11.182	6.094	54,50
24	Kalimantan Utara	12.098	1.815	1.169	64,42
25	Sulawesi Utara	42.088	6.313	2.820	44,67
26	Sulawesi Tengah	63.290	9.494	1.700	17,91
27	Sulawesi Selatan	171.746	25.762	677	2,63
28	Sulawesi Tenggara	61.691	9.254	2.366	25,57
29	Gorontalo	23.527	3.529	1.056	29,92
30	Sulawesi Barat	31.947	4.792	899	18,76
31	Maluku	43.699	6.555	581	8,86
32	Maluku Utara	28.997	4.015	1.265	31,51
33	Papua Barat	21.112	3.167	344	10,86
34	Papua	70.833	10.625	551	5,19
Indonesia		4.893.435	733.673	377.100	51,37

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 5.16

**CAKUPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Kelahiran Hidup	Sasaran Surviving Infants	BCG		HB<7 HARI		DPT/HB1 dan DPT- HB-HiB (1)		DPT/HB3 dan DPT- HB-HiB (3)		Polio 4		Campak		Imunisasi Dasar Lengkap	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	116.841	115.061	85.126	72,9	87.045	74,5	86.420	75,1	79.932	69,5	80.909	70,3	80.086	69,6	77.154	67,1
2	Sumatera Utara	316.134	309.150	281.591	89,1	253.715	80,3	288.359	93,3	281.988	91,2	276.990	89,6	278.439	90,1	247.082	79,9
3	Sumatera Barat	112.152	109.804	91.424	81,5	88.635	79,0	92.292	84,1	88.555	80,6	87.898	80,0	85.438	77,8	81.373	74,1
4	Riau	152.061	147.921	124.872	82,1	103.111	67,8	126.355	85,4	121.569	82,2	121.463	82,1	119.618	80,9	110.144	74,5
5	Jambi	67.033	65.051	68.547	102,3	65.108	97,1	68.301	105,0	65.523	100,7	67.636	104,0	66.674	102,5	64.953	99,8
6	Sumatera Selatan	165.934	161.321	164.123	98,9	149.129	89,9	167.525	103,8	166.961	103,5	164.109	101,7	163.513	101,4	158.239	98,1
7	Bengkulu	37.628	36.568	33.280	88,4	29.752	79,1	33.145	90,6	32.335	88,4	31.744	86,8	31.908	87,3	30.808	84,2
8	Lampung	160.460	156.208	156.630	97,6	144.692	90,2	156.078	99,9	156.706	100,3	156.281	100,0	156.518	100,2	154.992	99,2
9	Kep. Bangka Belitung	27.012	26.377	26.165	96,9	25.988	96,2	26.584	100,8	25.719	97,5	25.755	97,6	26.176	99,2	25.842	98,0
10	Kepulauan Riau	42.959	43.027	38.343	89,3	35.500	82,6	39.098	90,9	39.101	90,9	38.434	89,3	38.247	88,9	37.717	87,7
11	DKI Jakarta	179.001	181.401	179.327	100,2	161.829	90,4	179.907	99,2	179.606	99,0	179.535	99,0	179.371	98,9	177.536	97,9
12	Jawa Barat	890.429	877.626	887.643	99,7	853.795	95,9	894.687	101,9	871.158	99,3	862.657	98,3	861.423	98,2	723.894	82,5
13	Jawa Tengah	548.272	540.427	548.066	100,0	529.753	96,6	544.500	100,8	549.524	101,7	540.663	100,0	543.217	100,5	535.847	99,2
14	DI Yogyakarta	43.704	43.381	42.662	97,6	42.813	98,0	42.553	98,1	42.401	97,7	42.392	97,7	42.247	97,4	42.168	97,2
15	Jawa Timur	585.052	578.226	562.718	96,2	547.723	93,6	563.534	97,5	559.207	96,7	554.920	96,0	560.775	97,0	569.130	98,4
16	Banten	246.861	242.783	220.730	89,4	210.588	85,3	223.954	92,2	218.547	90,0	217.156	89,4	215.997	89,0	193.452	79,7
17	Bali	65.434	64.551	65.806	100,6	63.037	96,3	65.567	101,6	63.920	99,0	63.850	98,9	64.167	99,4	63.974	99,1
18	Nusa Tenggara Barat	106.430	101.899	100.925	94,8	97.890	92,0	105.009	103,1	105.994	104,0	106.255	104,3	104.033	102,1	101.206	99,3
19	Nusa Tenggara Timur	133.937	128.092	95.950	71,6	71.199	53,2	99.919	78,0	96.356	75,2	96.263	75,2	96.340	75,2	89.775	70,1
20	Kalimantan Barat	102.987	99.857	86.650	84,1	71.936	69,8	86.492	86,6	83.223	83,3	81.748	81,9	83.204	83,3	81.422	81,5
21	Kalimantan Tengah	53.435	51.246	42.152	78,9	33.606	62,9	42.244	82,4	40.556	79,1	39.001	76,1	39.537	77,2	33.239	64,9
22	Kalimantan Selatan	83.856	80.881	69.526	82,9	65.114	77,6	70.188	86,8	67.971	84,0	67.030	82,9	66.506	82,2	65.159	80,6
23	Kalimantan Timur	74.544	70.686	67.009	89,9	56.758	76,1	69.420	98,2	66.204	93,7	65.650	92,9	64.809	91,7	62.027	87,8
24	Kalimantan Utara	12.098	14.329	10.652	88,0	9.148	75,6	10.824	75,5	10.161	70,9	9.939	69,4	10.747	75,0	10.356	72,3
25	Sulawesi Utara	42.088	41.343	36.931	87,7	28.646	68,1	37.478	90,7	36.810	89,0	36.148	87,4	35.317	85,4	33.620	81,3
26	Sulawesi Tengah	63.290	60.755	49.702	78,5	42.123	66,6	50.486	83,1	48.042	79,1	48.228	79,4	47.621	78,4	45.739	75,3
27	Sulawesi Selatan	171.746	167.002	152.343	88,7	143.024	83,3	155.954	93,4	154.858	92,7	150.137	89,9	148.415	88,9	143.394	85,9
28	Sulawesi Tenggara	61.691	59.492	50.588	82,0	37.536	60,8	51.390	86,4	48.595	81,7	48.560	81,6	48.848	82,1	42.622	71,6
29	Gorontalo	23.527	22.538	20.672	87,9	20.260	86,1	21.008	93,2	21.225	94,2	20.856	92,5	20.564	91,2	19.507	86,6
30	Sulawesi Barat	31.947	30.128	23.816	74,5	22.488	70,4	23.969	79,6	24.326	80,7	23.309	77,4	23.450	77,8	23.122	76,7
31	Maluku	43.699	41.308	34.198	78,3	24.165	55,3	36.020	87,2	34.700	84,0	34.344	83,1	34.123	82,6	30.660	74,2
32	Maluku Utara	28.997	27.915	21.859	75,4	18.132	62,5	22.983	82,3	20.765	74,4	20.666	74,0	20.607	73,8	20.380	73,0
33	Papua Barat	21.112	20.047	17.347	82,2	11.485	54,4	17.214	85,9	14.917	74,4	15.177	75,7	14.773	73,7	11.448	57,1
34	Papua	70.833	67.532	43.874	61,9	26.328	37,2	45.076	66,7	37.859	56,1	37.038	54,8	42.121	62,4	31.922	47,3
Indonesia		4.883.184	4.783.933	4.501.247	92,2	4.172.051	85,4	4.544.533	95,0	4.455.314	93,1	4.412.741	92,2	4.414.829	92,3	4.139.903	86,5

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2016 (update s.d. 25 Mei 2016)

Catatan : sejak tahun 2013 sesuai kebijakan nasional, Provinsi DI Yogyakarta hanya memberikan tiga dosis polio secara suntik melalui pemberian IPV, cakupan imunisasi polio di DI Yogyakarta merupakan Polio 3

Lampiran 5.17

**DROP OUT RATE CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB(1) - CAMPAK DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB(1) - DPT/HB(3)
PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2013-2015**

No	Provinsi	Tahun					
		2013		2014		2015	
		DPT/HB(1)-Campak	DPT/HB(1) - DPT/HB(3)	DPT/HB(1)-Campak	DPT/HB(1) - DPT/HB(3)	DPT/HB(1)-Campak	DPT/HB(1) - DPT/HB(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	5,7	5,8	21,2	10,4	7,3	7,5
2	Sumatera Utara	3,3	2,7	14,1	6,3	3,4	2,2
3	Sumatera Barat	6,4	3,7	17,9	6,4	7,4	4,0
4	Riau	4,2	2,4	12,6	10,3	5,3	3,8
5	Jambi	2,6	1,1	5,1	-3,0	2,4	4,1
6	Sumatera Selatan	3,1	1,8	5,2	2,2	2,4	0,3
7	Bengkulu	4,6	4,7	3,2	0,3	3,7	2,4
8	Lampung	0,5	-0,9	-6,6	-10,3	-0,3	-0,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	2,9	3,6	9,8	5,5	1,5	3,3
10	Kepulauan Riau	2,9	0,3	14,6	-7,2	2,2	0,0
11	DKI Jakarta	3,5	2,0	5,4	0,1	0,3	0,2
12	Jawa Barat	3,9	1,0	1,1	0,5	3,7	2,6
13	Jawa Tengah	0,4	-0,2	-4,0	-5,3	0,2	-0,9
14	DI Yogyakarta	2,2	5,1	12,5	-9,0	0,7	0,4
15	Jawa Timur	1,9	0,8	-4,7	-2,9	0,5	0,8
16	Banten	5,2	3,6	8,5	0,1	3,6	2,4
17	Bali	1,7	2,5	-3,0	1,0	2,1	2,5
18	Nusa Tenggara Barat	-0,9	0,2	-8,6	-4,4	0,9	-0,9
19	Nusa Tenggara Timur	7,5	5,7	-0,4	11,7	3,6	3,6
20	Kalimantan Barat	6,6	4,1	3,9	4,4	3,8	3,8
21	Kalimantan Tengah	5,8	4,0	6,8	1,5	6,4	4,0
22	Kalimantan Selatan	7,5	5,2	-	-	5,2	3,2
23	Kalimantan Timur	5,7	3,0	2,2	0,9	6,6	4,6
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	0,7	6,1
25	Sulawesi Utara	5,5	1,2	-	-	5,8	1,8
26	Sulawesi Tengah	6,8	3,6	10,9	6,3	5,7	4,8
27	Sulawesi Selatan	3,1	1,8	7,5	6,5	4,8	0,7
28	Sulawesi Tenggara	7,5	7,6	2,5	0,3	4,9	5,4
29	Gorontalo	0,5	-1,8	5,5	4,7	2,1	-1,0
30	Sulawesi Barat	0,8	-11,4	-1,7	-0,4	2,2	-1,5
31	Maluku	5,8	5,0	5,7		5,3	3,7
32	Maluku Utara	5,6	3,7	8,7	10,9	10,3	9,7
33	Papua Barat	0,5	-1,7	28,2	20,0	14,2	13,3
34	Papua	7,9	13,9	8,3	18,5	6,6	16,0
	Indonesia	3,3	1,8	2,6	0,3	2,9	1,6

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2016 (update s.d. 25 Mei 2016)

Lampiran 5.18

CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013-2015

No	Provinsi	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
		Jumlah Desa	Desa UCI	%	Jumlah Desa	Desa UCI	%	Jumlah Desa	Desa UCI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	6.489	4.622	71,23	6.489	4.530	69,81	6.491	4.385	67,56
2	Sumatera Utara	5.797	4.393	75,78	5.797	4.522	78,01	6.103	4.601	75,39
3	Sumatera Barat	3.959	2.817	71,15	3.959	3.064	77,39	3.996	2.992	74,87
4	Riau	1.655	1.327	80,18	1.655	1.226	74,08	1.852	1.068	57,67
5	Jambi	1.416	1.416	100,00	1.416	1.461	103,18	1.551	1.471	94,84
6	Sumatera Selatan	3.167	2.900	91,57	3.167	2.958	93,40	3.236	2.956	91,35
7	Bengkulu	1.508	1.334	88,46	1.508	1.347	89,32	1.535	1.370	89,25
8	Lampung	2.463	2.445	99,27	2.463	2.580	104,75	2.646	2.528	95,54
9	Kepulauan Bangka Belitung	366	354	96,72	366	369	100,82	387	375	96,90
10	Kepulauan Riau	353	250	70,82	353	331	93,77	415	335	80,72
11	DKI Jakarta	267	267	100,00	267	267	100,00	267	267	100,00
12	Jawa Barat	5.905	5.687	96,31	5.905	5.576	94,43	5.962	5.341	89,58
13	Jawa Tengah	8.577	8.503	99,14	8.577	8.551	99,70	8.578	8.574	99,95
14	DI Yogyakarta	438	438	100,00	438	438	100,00	438	438	100,00
15	Jawa Timur	8.503	7.215	84,85	8.503	7.299	85,84	8.501	6.501	76,47
16	Banten	1.535	1.259	82,02	1.535	1.195	77,85	1.551	1.235	79,63
17	Bali	716	689	96,23	716	705	98,46	716	707	98,74
18	Nusa Tenggara Barat	1.079	1.028	95,27	1.079	983	91,10	1.136	1.023	90,05
19	Nusa Tenggara Timur	2.893	2.248	77,70	2.893	2.213	76,49	-	-	-
20	Kalimantan Barat	1.967	1.370	69,65	1.967	1.531	77,83	2.123	1.540	72,54
21	Kalimantan Tengah	1.527	1.136	74,39	1.527	1.022	66,93	1.572	1.066	67,81
22	Kalimantan Selatan	2.000	1.628	81,40	2.000	1.669	83,45	2.006	1.697	84,60
23	Kalimantan Timur	1.465	1.097	74,88	1.489	1.067	71,66	1.024	833	81,35
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	1.691	1.414	83,62	1.691	1.341	79,30	1.831	1.457	79,57
26	Sulawesi Tengah	1.815	1.599	88,10	1.815	1.649	90,85	1.990	1.597	80,25
27	Sulawesi Selatan	2.982	2.720	91,21	2.982	2.873	96,34	3.027	2.883	95,24
28	Sulawesi Tenggara	2.154	1.217	56,50	2.154	1.925	89,37	2.263	1.871	82,68
29	Gorontalo	723	584	80,77	723	616	85,20	732	637	87,02
30	Sulawesi Barat	641	525	81,90	641	457	71,29	640	498	77,81
31	Maluku	998	733	73,45	998	782	78,36	1.173	809	68,97
32	Maluku Utara	1.071	817	76,28	1.071	864	80,67	461	380	82,43
33	Papua Barat	1.427	588	41,21	1.427	493	34,55	1.330	727	54,66
34	Papua	3.579	467	13,05	3.579	489	13,66	-	-	-
	Indonesia	81.126	65.087	80,23	81.150	66.393	81,82	75.533	62.162	82,30

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2016 (update s.d. 25 Mei 2016)

Lampiran 5.19

CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2015

No	Provinsi	Sasaran (Siswa SD/Sederajat)					Campak (Kelas 1)		DT (Kelas 1)		Td (Kelas 2)		Td (Kelas 3)		Td (Kelas 2+3)	
		Kelas 1 Campak	Kelas 1 DT	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 2+3	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	106.686	106.686	107.774	105.247	213.021	92.263	86,5	51.867	48,6	92.535	85,9	89.827	85,3	182.362	85,6
2	Sumatera Utara	309.763	309.763	298.137	297.291	595.428	289.079	93,3	273.965	88,4	261.489	87,7	264.241	88,9	525.730	88,3
3	Sumatera Barat	114.084	70.696	69.186	68.781	137.967	106.054	93,0	65.379	92,5	64.189	92,8	64.479	93,7	128.668	93,3
4	Riau	150.947	150.947	146.639	143.211	289.850	144.973	96,0	104.738	69,4	136.523	93,1	136.649	95,4	273.172	94,2
5	Jambi	75.347	75.347	74.250	72.076	146.326	73.196	97,1	42.974	57,0	69.567	93,7	53.599	74,4	123.166	84,2
6	Sumatera Selatan	187.454	187.454	180.955	175.899	356.854	183.477	97,9	182.882	97,6	177.848	98,3	171.062	97,3	348.910	97,8
7	Bengkulu	40.590	40.801	40.007	40.021	80.028	38.153	94,0	0	0,0	37.725	94,3	37.746	94,3	75.471	94,3
8	Lampung	171.538	167.151	136.811	134.822	271.633	166.895	97,3	162.892	97,5	133.713	97,7	131.469	97,5	265.182	97,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	25.028	21.056	22.019	21.588	43.607	24.494	97,9	13.574	64,5	21.515	97,7	21.181	98,1	42.696	97,9
10	Kepulauan Riau	39.425	39.425	37.596	35.667	73.263	35.543	84,9	37.748	95,7	35.635	94,8	34.211	95,9	69.846	95,3
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	828.327	851.353	780.819	787.034	1.567.853	-	-	804.350	94	741.175	94,9	740.924	94,1	1.482.099	94,5
13	Jawa Tengah	589.719	588.411	597.760	586.521	1.184.281	584.442	99,1	583.376	99,1	587.085	98,2	587.067	100,1	1.174.152	99,1
14	DI Yogyakarta	54.186	53.846	54.229	51.733	105.962	53.559	98,8	53.226	98,8	53.580	98,8	51.064	98,7	104.644	98,8
15	Jawa Timur	624.502	624.502	608.922	600.416	1.209.338	596.738	95,6	593.757	95,1	588.381	96,6	566.256	94,3	1.154.637	95,5
16	Banten	231.329	210.323	228.303	226.290	454.593	221.987	96,0	203.743	96,9	215.031	94,2	212.392	93,9	427.423	94,0
17	Bali	69.644	69.644	70.536	70.648	141.184	69.035	4.851,4	53.012	76,1	69.408	98,4	69.557	98,5	138.965	98,4
18	Nusa Tenggara Barat	92.538	92.538	88.750	88.596	177.346	87.799	236,8	59.353	64,1	84.163	94,8	84.225	95,1	168.388	94,9
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	116.193	116.193	110.862	112.523	223.385	110.065	94,7	65.713	56,6	103.092	93,0	105.211	93,5	208.303	93,2
21	Kalimantan Tengah	29.357	29.357	27.500	27.049	54.549	25.254	86,0	14.266	48,6	20.376	74,1	20.263	74,9	40.639	74,5
22	Kalimantan Selatan	57.456	55.938	55.556	49.198	104.754	-	-	52.815	94,4	52.820	95,1	46.773	95,1	99.593	95,1
23	Kalimantan Timur	77.626	77.626	74.464	71.481	145.945	73.881	95,2	42.532	54,8	59.531	79,9	57.251	80,1	116.782	80,0
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	35.758	35.758	37.341	35.371	72.712	33.193	92,8	20.006	55,9	29.780	79,8	31.720	89,7	61.500	84,6
26	Sulawesi Tengah	63.902	63.902	63.734	61.832	125.566	57.810	90,5	31.919	49,9	57.994	91,0	56.229	90,9	114.223	91,0
27	Sulawesi Selatan	153.461	153.461	164.565	166.698	331.263	136.686	89,1	138.494	90,2	146.480	89,0	149.055	89,4	295.535	89,2
28	Sulawesi Tenggara	54.888	54.888	57.155	61.743	118.898	52.494	95,6	48.058	87,6	51.370	89,9	57.705	93,5	109.075	91,7
29	Gorontalo	20.354	20.354	20.743	20.213	40.956	19.059	93,6	13.456	66,1	19.800	95,5	19.543	96,7	39.343	96,1
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	29876	29.876	26.698	26.960	53.658	-	-	27.123	90,8	24.324	91,1	25.057	92,9	49.381	92,0
32	Maluku Utara	11.663	11.663	12.559	12.474	25.033	10.596	90,9	10.575	90,7	10.757	85,7	10.675	85,6	21.432	85,6
33	Papua Barat	14.732	14.732	12.092	11.391	23.483	12.832	87,1	11.987	81,4	8.906	73,7	8.743	76,8	17.649	75,2
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indonesia	4.376.373	4.323.691	4.205.962	4.162.774	8.368.736	3.299.557	75,39	3.763.780	87,05	3.954.792	94,03	3.904.174	93,79	7.858.966	93,91

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemkes RI, 2016 (update s.d. 25 Mei 2016)

Lampiran 5.20

**PERSENTASE KAB/KOTA YANG MELAKUKAN
TATA LAKSANA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Sasaran	Puskesmas yang melakukan tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak (target 4 puskesmas per kab./kota)		
				Jumlah puskesmas	jumlah kab/kota	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	23	-	90	9	40,91
2	Sumatera Utara	33	-	910	6	18,18
3	Sumatera Barat	19	-	45	4	22,22
4	Riau	12	221	39	1	8,33
5	Jambi	11	-	33	1	9,09
6	Sumatera Selatan	17	-	33	1	5,88
7	Bengkulu	10	180	52	7	70,00
8	Lampung	15	292	90	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	62	23	2	28,57
10	Kepulauan Riau	7	76	37	5	71,43
11	DKI Jakarta	6	44	44	6	100,00
12	Jawa Barat	27	1.065	140	11	40,74
13	Jawa Tengah	35	875	256	20	57,14
14	DI Yogyakarta	5	121	30	5	100,00
15	Jawa Timur	38	960	184	9	23,68
16	Banten	8	-	47	4	50,00
17	Bali	9	120	43	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	0	27	2	20,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	368	137	17	77,27
20	Kalimantan Barat	14	239	83	6	42,86
21	Kalimantan Tengah	14	195	23	1	7,14
22	Kalimantan Selatan	13	-	40	4	30,77
23	Kalimantan Timur	10	-	47	3	30,00
24	Kalimantan Utara	5	59	16	2	40,00
25	Sulawesi Utara	15	192	59	8	53,33
26	Sulawesi Tengah	13	-	22	0	0,00
27	Sulawesi Selatan	24	-	59	4	16,67
28	Sulawesi Tenggara	17	275	25	8	47,06
29	Gorontalo	6	93	15	0	0,00
30	Sulawesi Barat	6	95	28	4	66,67
31	Maluku	11	189	21	3	27,27
32	Maluku Utara	10	-	14	0	0,00
33	Papua Barat	13	-	40	9	81,82
34	Papua	29	-	19	0	0,00
Indonesia		514	5.721	2.771	186	36,19

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 5.21

**PERSENTASE PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN KEGIATAN KESEHATAN REMAJA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Menyelenggarakan PKPR	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan PKPR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	337	153	45,40
2	Sumatera Utara	570	171	30,00
3	Sumatera Barat	264	112	42,42
4	Riau	211	76	36,02
5	Jambi	176	58	32,95
6	Sumatera Selatan	321	132	41,12
7	Bengkulu	180	87	48,33
8	Lampung	290	111	38,28
9	Kepulauan Bangka Belitung	61	52	85,25
10	Kepulauan Riau	73	46	63,01
11	DKI Jakarta	340	44	12,94
12	Jawa Barat	1.050	524	49,90
13	Jawa Tengah	875	285	32,57
14	DI Yogyakarta	121	76	62,81
15	Jawa Timur	960	283	29,48
16	Banten	231	148	64,07
17	Bali	120	84	70,00
18	Nusa Tenggara Barat	158	83	52,53
19	Nusa Tenggara Timur	370	146	39,46
20	Kalimantan Barat	238	125	52,52
21	Kalimantan Tengah	195	23	11,79
22	Kalimantan Selatan	228	38	16,67
23	Kalimantan Timur	174	36	20,69
24	Kalimantan Utara	48	18	37,50
25	Sulawesi Utara	187	52	27,81
26	Sulawesi Tengah	184	8	4,35
27	Sulawesi Selatan	446	105	23,54
28	Sulawesi Tenggara	269	49	18,22
29	Gorontalo	93	24	25,81
30	Sulawesi Barat	94	15	15,96
31	Maluku	197	46	23,35
32	Maluku Utara	127	9,00	7,09
33	Papua Barat	149	24	16,11
34	Papua	394	0	0,00
	Indonesia	9.731	3.243	33,33

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 5.22

CAKUPAN PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN
PESERTA DIDIK KELAS I MENURUT PROVINSI TAHUN 2015

No	Provinsi	Jumlah PKM	PKM Melaksanakan Penjaringan Peserta Didik Kelas I	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	337	258	76,56
2	Sumatera Utara	570	208	36,49
3	Sumatera Barat	264	242	91,67
4	Riau	211	154	72,99
5	Jambi	176	115	65,34
6	Sumatera Selatan	321	-	-
7	Bengkulu	180	149	82,78
8	Lampung	290	286	98,62
9	Kepulauan Bangka Belitung	61	62	101,64
10	Kepulauan Riau	73	43	58,90
11	DKI Jakarta	340	44	12,94
12	Jawa Barat	1.050	817	77,81
13	Jawa Tengah	875	734	83,89
14	DI Yogyakarta	121	121	100,00
15	Jawa Timur	960	960	100,00
16	Banten	231	175	75,76
17	Bali	120	120	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	158	158	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	370	-	-
20	Kalimantan Barat	238	42	17,65
21	Kalimantan Tengah	195	-	-
22	Kalimantan Selatan	228	75	32,89
23	Kalimantan Timur	174	134	77,01
24	Kalimantan Utara	48	18	37,50
25	Sulawesi Utara	187	126	67,38
26	Sulawesi Tengah	184	15	8,15
27	Sulawesi Selatan	446	48	10,76
28	Sulawesi Tenggara	269	224	83,27
29	Gorontalo	93	91	97,85
30	Sulawesi Barat	94	46	48,94
31	Maluku	197	23	11,68
32	Maluku Utara	127	-	-
33	Papua Barat	149	32	21,48
34	Papua	394	21	5,33
	Indonesia	9.731	5.541	56,94

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 5.23

**CAKUPAN PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN PESERTA DIDIK KELAS VII DAN X
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah PKM	PKM Melaksanakan Penjaringan Peserta Didik Kelas VII dan X	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	337	169	50,15
2	Sumatera Utara	570	170	29,82
3	Sumatera Barat	264	223	84,47
4	Riau	211	138	65,40
5	Jambi	176	87	49,43
6	Sumatera Selatan	321	-	-
7	Bengkulu	180	77	42,78
8	Lampung	290	269	92,76
9	Kepulauan Bangka Belitung	61	54	88,52
10	Kepulauan Riau	73	29	39,73
11	DKI Jakarta	340	44	12,94
12	Jawa Barat	1.050	596	56,76
13	Jawa Tengah	875	677	77,35
14	DI Yogyakarta	121	107	88,43
15	Jawa Timur	960	960	100,00
16	Banten	231	172	74,46
17	Bali	120	120	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	158	112	70,89
19	Nusa Tenggara Timur	370	0	0,00
20	Kalimantan Barat	238	31	13,03
21	Kalimantan Tengah	195	0	0,00
22	Kalimantan Selatan	228	56	24,56
23	Kalimantan Timur	174	105	60,34
24	Kalimantan Utara	48	20	41,67
25	Sulawesi Utara	187	103	55,08
26	Sulawesi Tengah	184	15	8,15
27	Sulawesi Selatan	446	0	0,00
28	Sulawesi Tenggara	269	215	79,93
29	Gorontalo	93	35	37,63
30	Sulawesi Barat	94	59	62,77
31	Maluku	197	52	26,40
32	Maluku Utara	127	-	-
33	Papua Barat	149	24	16,11
34	Papua	394	0	0,00
Indonesia		9.731	4.719	48,49

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 5.24

**CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA 6 - 59 BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Vitamin A Bayi 6-11 Bulan			Vitamin A Anak Balita 12-59 Bulan			Vitamin A Balita 6-59 Bulan		
		Jumlah Bayi 6-11 Bulan	Dapat Vitamin A	%	Jumlah Anak Balita 12-59 Bulan	Dapat Vitamin A	%	Jumlah Balita 6-59 Bulan	Dapat Vitamin A	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	107.453	98.339	91,5	691.462	636.933	92,1	798.915	735.272	92,0
2	Sumatera Utara	1.350.342	220.862	16,4	2.055.630	1.590.937	77,4	3.405.972	1.811.799	53,2
3	Sumatera Barat	103.478	92.314	89,2	678.224	617.357	91,0	781.702	709.671	90,8
4	Riau	641.189	529.685	82,6	1.866.412	1.538.335	82,4	2.507.601	2.068.020	82,5
5	Jambi	77.484	72.848	94,0	501.950	452.701	90,2	579.434	525.549	90,7
6	Sumatera Selatan	190.241	166.697	87,6	1.366.069	1.164.278	85,2	1.556.310	1.330.975	85,5
7	Bengkulu	40.586	37.785	93,1	239.491	219.889	91,8	280.077	257.674	92,0
8	Lampung	185.775	149.374	80,4	1.343.957	1.105.135	82,2	1.529.732	1.254.509	82,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	25.160	23.421	93,1	185.242	166.199	89,7	210.402	189.620	90,1
10	Kepulauan Riau	46.382	38.369	82,7	381.304	289.690	76,0	427.686	328.059	76,7
11	DKI Jakarta	181.404	128.606	70,9	1.529.108	844.948	55,3	1.710.512	973.554	56,9
12	Jawa Barat	877.626	866.262	98,7	7.011.412	5.800.995	82,7	7.889.038	6.667.257	84,5
13	Jawa Tengah	589.455	583.179	98,9	3.940.186	3.885.284	98,6	4.529.641	4.468.463	98,6
14	DI Yogyakarta	44.889	44.568	99,3	342.723	338.342	98,7	387.612	382.910	98,8
15	Jawa Timur	578.266	573.533	99,2	4.703.328	4.314.729	91,7	5.281.594	4.888.261	92,6
16	Banten	237.304	224.012	94,4	1.877.388	1.563.214	83,3	2.114.692	1.787.226	84,5
17	Bali	58.123	55.640	95,7	378.201	359.175	95,0	436.324	414.815	95,1
18	Nusa Tenggara Barat	109.126	107.215	98,2	751.594	726.319	96,6	860.720	833.534	96,8
19	Nusa Tenggara Timur	110.171	97.750	88,7	678.912	605.230	89,1	789.083	702.980	89,1
20	Kalimantan Barat	100.570	83.470	83,0	741.534	570.109	76,9	842.104	653.579	77,6
21	Kalimantan Tengah	52.801	39.871	75,5	354.668	273.084	77,0	407.469	312.955	76,8
22	Kalimantan Selatan	72.653	67.623	93,1	595.692	503.290	84,5	668.345	570.913	85,4
23	Kalimantan Timur	79.064	66.578	84,2	772.289	495.412	64,1	851.353	561.990	66,0
24	Kalimantan Utara	11.307	7.968	70,5	91.750	64.028	69,8	103.057	71.996	69,9
25	Sulawesi Utara	33.286	29.362	88,2	193.720	172.934	89,3	227.006	202.296	89,1
26	Sulawesi Tengah	51.904	46.901	90,4	324.820	289.956	89,3	376.724	336.857	89,4
27	Sulawesi Selatan	149.087	134.481	90,2	1.162.194	927.343	79,8	1.311.281	1.061.824	81,0
28	Sulawesi Tenggara	55.226	49.176	89,0	393.496	323.104	82,1	448.722	372.280	83,0
29	Gorontalo	21.495	21.046	97,9	147.315	144.707	98,2	168.810	165.753	98,2
30	Sulawesi Barat	45.158	35.887	79,5	212.332	165.907	78,1	257.490	201.794	78,4
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	25.156	19.465	77,4	150.988	125.184	82,9	176.144	144.649	82,1
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indonesia	6.252.161	4.712.286	75,4	35.663.391	30.274.747	84,9	41.915.552	34.987.034	83,5

Sumber: Ditjen. Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 5.25

**CAKUPAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 0-6 BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Bayi 0-6 Bulan	Eksklusif	Persentase Mendapat ASI Eksklusif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	95.491	55.715	58,3
2	Sumatera Utara	189.985	62.777	33,0
3	Sumatera Barat	69.676	52.269	75,0
4	Riau	93.243	63.488	68,1
5	Jambi	50.997	35.498	69,6
6	Sumatera Selatan	135.874	81.868	60,3
7	Bengkulu	24.668	18.782	76,1
8	Lampung	163.215	89.550	54,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	19.609	11.340	57,8
10	Kepulauan Riau	30.759	17.486	56,8
11	DKI Jakarta	54.965	36.907	67,1
12	Jawa Barat	877.626	309.665	35,3
16	Jawa Tengah	398.358	223.385	56,1
13	DI Yogyakarta	31.103	22.276	71,6
14	Jawa Timur	507.094	375.737	74,1
15	Banten	141.791	93.369	65,8
17	Bali	38.127	28.109	73,7
18	Nusa Tenggara Barat	92.550	80.412	86,9
19	Nusa Tenggara Timur	71.234	54.839	77,0
20	Kalimantan Barat	39.990	27.350	68,4
21	Kalimantan Tengah	21.164	8.078	38,2
22	Kalimantan Selatan	65.391	40.176	61,4
23	Kalimantan Timur	51.322	25.431	49,6
24	Kalimantan Utara	6.925	3.890	56,2
25	Sulawesi Utara	36.702	9.657	26,3
26	Sulawesi Tengah	34.661	19.191	55,4
27	Sulawesi Selatan	102.526	73.339	71,5
28	Sulawesi Tenggara	33.195	17.972	54,1
29	Gorontalo	16.101	7.528	46,8
30	Sulawesi Barat	22.033	13.778	62,5
31	Maluku	21.611	8.578	39,7
32	Maluku Utara	11.663	7.505	64,3
33	Papua Barat	11.968	7.121	59,5
34	Papua	-	-	-
	Indonesia	3.561.617	1.983.066	55,7

Sumber: Ditjen. Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 5.26

**CAKUPAN BALITA DITIMBANG
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Balita (S)*	Balita Ditimbang (D)	
			Jumlah	Cakupan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	416.531	345.567	83,0
2	Sumatera Utara	1.529.533	1.153.612	75,4
3	Sumatera Barat	547.703	395.991	72,3
4	Riau	706.247	437.713	62,0
5	Jambi	301.460	228.752	75,9
6	Sumatera Selatan	413.306	298.229	72,2
7	Bengkulu	153.253	117.697	76,8
8	Lampung	850.131	629.484	74,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	130.552	92.765	71,1
10	Kepulauan Riau	241.486	142.432	59,0
11	DKI Jakarta	488.796	356.767	73,0
12	Jawa Barat	4.383.332	3.059.457	69,8
13	Jawa Tengah	2.525.320	2.052.431	81,3
14	DI Yogyakarta	205.920	162.863	79,1
15	Jawa Timur	2.929.890	2.314.966	79,0
16	Banten	1.113.805	812.038	72,9
17	Bali	228.528	185.429	81,1
18	Nusa Tenggara Barat	562.881	485.913	86,3
19	Nusa Tenggara Timur	125.742	94.702	75,3
20	Kalimantan Barat	288.977	157.329	54,4
21	Kalimantan Tengah	188.501	123.947	65,8
22	Kalimantan Selatan	381.111	274.746	72,1
23	Kalimantan Timur	363.006	187.536	51,7
24	Kalimantan Utara	61.931	32.797	53,0
25	Sulawesi Utara	166.349	121.739	73,2
26	Sulawesi Tengah	180.729	129.193	71,5
27	Sulawesi Selatan	742.083	567.001	76,4
28	Sulawesi Tenggara	243.649	190.301	78,1
29	Gorontalo	116.269	83.923	72,2
30	Sulawesi Barat	130.454	93.429	71,6
31	Maluku	211.232	129.692	61,4
32	Maluku Utara	102.274	73.056	71,4
33	Papua Barat	76.018	32.079	42,2
34	Papua	329.941	82.455	25,0
Indonesia		21.436.940	15.646.031	73,0

Sumber: Ditjen. Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Keterangan: jumlah balita yang terdaftar di posyandu yang melapor

Lampiran 5.27

**KASUS GIZI BURUK PADA BALITA DITEMUKAN DAN MENDAPAT PERAWATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Kasus Gizi Buruk Mendapat Perawatan		
		Kasus Gizi Buruk Ditemukan	Kasus Gizi Buruk Dirawat	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	212	212	100
2	Sumatera Utara	1.194	1.194	100
3	Sumatera Barat	490	490	100
4	Riau	79	79	100
5	Jambi	90	90	100
6	Sumatera Selatan	367	367	100
7	Bengkulu	103	103	100
8	Lampung	136	136	100
9	Kepulauan Bangka Belitung	61	61	100
10	Kepulauan Riau	285	285	100
11	DKI Jakarta	2.282	2.282	100
12	Jawa Barat	2.895	2.895	100
13	Jawa Tengah	922	922	100
14	DI Yogyakarta	187	187	100
15	Jawa Timur	6.019	6.019	100
16	Banten	1.051	1.051	100
17	Bali	99	99	100
18	Nusa Tenggara Barat	362	362	100
19	Nusa Tenggara Timur	3.340	3.340	100
20	Kalimantan Barat	349	349	100
21	Kalimantan Tengah	68	68	100
22	Kalimantan Selatan	145	145	100
23	Kalimantan Timur	329	329	100
24	Kalimantan Utara	190	190	100
25	Sulawesi Utara	40	40	100
26	Sulawesi Tengah	399	399	100
27	Sulawesi Selatan	184	184	100
28	Sulawesi Tenggara	241	241	100
29	Gorontalo	362	362	100
30	Sulawesi Barat	228	228	100
31	Maluku	127	127	100
32	Maluku Utara	438	438	100
33	Papua Barat	479	479	100
34	Papua	2.765	2.765	100
Indonesia		26.518	26.518	100

Sumber: Ditjen. Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 5.28

**RERATA TINGKAT KECUKUPAN ENERGI PADA UMUR 0-59 BULAN
MENURUT TIPE DAERAH DAN PROVINSI, STUDI DIET TOTAL 2014**

No	Provinsi	Angka kecukupan energi (% AKE)		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	99,1	96,1	96,9
2	Sumatera Utara	104,2	97,2	100,2
3	Sumatera Barat	100,4	95,1	97,3
4	Riau	102,3	94,4	96,9
5	Jambi	108,9	100,7	103
6	Sumatera Selatan	109,8	101,3	104,4
7	Bengkulu	107,3	96,0	98,9
8	Lampung	96,8	95,6	95,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	101,7	101,4	101,6
10	Kepulauan Riau	104,7	100,8	104,5
11	DKI Jakarta	114,4		114,4
12	Jawa Barat	102,7	97,9	101,1
13	Jawa Tengah	102,5	100,3	101,4
14	DI Yogyakarta	110,7	106,2	109,1
15	Jawa Timur	102,9	97,0	100,1
16	Banten	105,9	99,4	103,6
17	Bali	102,3	98,2	101,1
18	Nusa Tenggara Barat	100,6	107,2	104,2
19	Nusa Tenggara Timur	90,1	92,8	92,3
20	Kalimantan Barat	104,5	94,0	97,2
21	Kalimantan Tengah	96,4	103,1	100,7
22	Kalimantan Selatan	105,4	98,0	101,2
23	Kalimantan Timur	102,7	101,9	102,5
24	Sulawesi Utara	106,5	93,0	98,6
25	Sulawesi Tengah	101,4	94,1	95,2
26	Sulawesi Selatan	103,6	96,7	99,3
27	Sulawesi Tenggara	96,8	97,7	97,4
28	Gorontalo	103,1	91,2	94,8
29	Sulawesi Barat	96,1	98,4	98
30	Maluku	107,3	96,9	100,7
31	Maluku Utara	97,2	102,9	101,5
32	Papua Barat	94,0	98,5	97,3
33	Papua	98,2	93,6	94,6
	Indonesia	104,1	97,7	101,0

Sumber: Balitbangkes, Studi Diet Total 2014

Lampiran 5.29

**RERATA TINGKAT KECUKUPAN ENERGI PADA PENDUDUK UMUR >55 TAHUN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI, STUDI DIET TOTAL 2014**

No	Provinsi	Angka kecukupan energi (% AKE)		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	82,0	80,1	81,0
2	Sumatera Utara	76,8	82,2	79,7
3	Sumatera Barat	78,3	82,2	80,4
4	Riau	75,8	75,4	75,6
5	Jambi	77,2	76,9	77,0
6	Sumatera Selatan	74,8	77,8	76,4
7	Bengkulu	80,3	75,4	77,9
8	Lampung	72,0	74,4	73,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	86,4	76,2	81,3
10	Kepulauan Riau	83,6	83,1	83,3
11	DKI Jakarta	89,4	81,8	85,5
12	Jawa Barat	79,0	76,3	77,6
13	Jawa Tengah	78,9	77,8	78,3
14	DI Yogyakarta	80,0	77,1	78,5
15	Jawa Timur	78,4	77,5	77,9
16	Banten	81,6	76,2	78,9
17	Bali	84,8	82,5	83,6
18	Nusa Tenggara Barat	82,9	78,0	80,4
19	Nusa Tenggara Timur	72,5	71,2	71,8
20	Kalimantan Barat	78,2	76,6	77,4
21	Kalimantan Tengah	74,3	71,9	73,2
22	Kalimantan Selatan	79,7	76,0	77,8
23	Kalimantan Timur	69,9	71,3	70,5
24	Sulawesi Utara	72,3	72,3	72,3
25	Sulawesi Tengah	79,4	70,4	74,9
26	Sulawesi Selatan	81,5	75,8	78,3
27	Sulawesi Tenggara	76,4	70,1	73,2
28	Gorontalo	78,2	71,3	74,5
29	Sulawesi Barat	81,1	70,6	75,6
30	Maluku	71,8	76,4	74,2
31	Maluku Utara	81,2	90,0	85,5
32	Papua Barat	66,3	77,6	71,5
33	Papua	76,9	76,0	76,5
Indonesia		78,8	77,3	78,0

Sumber: Balitbangkes, Studi Diet Total 2014

Lampiran 5.30

**PROPORSI PENDUDUK MENURUT KLASIFIKASI TINGKAT KECUKUPAN ENERGI DAN PROVINSI
STUDI DIET TOTAL 2014**

No	Provinsi	Tingkat kecukupan energi			
		<70% AKE	70-<100 AKE	100-<130% AKE	≥130% AKE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	43,5	38,7	14,0	3,8
2	Sumatera Utara	50,2	33,4	12,1	4,3
3	Sumatera Barat	42,5	37,7	14,6	5,2
4	Riau	50,8	33,5	11,2	4,4
5	Jambi	50,4	33,9	11,5	4,3
6	Sumatera Selatan	46,1	33,1	15	5,8
7	Bengkulu	50,6	33,4	12,4	3,7
8	Lampung	58,3	31,2	8,4	2,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	38,7	31,7	18,1	11,6
10	Kepulauan Riau	32,7	37,4	21,9	8,2
11	DKI Jakarta	28,8	37,1	21,7	12,4
12	Jawa Barat	45,0	33,2	15,2	6,7
13	Jawa Tengah	44,0	35,2	14,9	6,0
14	DI Yogyakarta	41,6	35,9	16,5	6,1
15	Jawa Timur	45,6	33,7	14,7	5,9
16	Banten	42,6	35,4	16,3	5,8
17	Bali	40,9	34,0	17,5	7,6
18	Nusa Tenggara Barat	35,9	37,9	17,9	8,3
19	Nusa Tenggara Timur	59,9	29,4	7,9	2,8
20	Kalimantan Barat	48,9	30,5	14,2	6,4
21	Kalimantan Tengah	50,9	31,6	13,1	4,4
22	Kalimantan Selatan	42,4	34,5	16,1	7,0
23	Kalimantan Timur	48,8	31,1	13,4	6,7
24	Sulawesi Utara	61,7	27,6	8,3	2,4
25	Sulawesi Tengah	53,2	30,2	12,2	4,3
26	Sulawesi Selatan	44,0	34,4	15,1	6,4
27	Sulawesi Tenggara	47,8	33,0	14,7	4,4
28	Gorontalo	53,3	32,9	11,1	2,8
29	Sulawesi Barat	51,4	36,9	9,2	2,5
30	Maluku	55,8	29,8	10,3	4,1
31	Maluku Utara	45,7	36,0	13,1	5,2
32	Papua Barat	48,7	35,5	12,8	3,0
33	Papua	58,8	26,3	10,1	4,8
	Indonesia	45,7	33,9	14,5	5,9

Sumber: Balitbangkes, Studi Diet Total 2014

Lampiran 5.31

**RERATA TINGKAT KECUKUPAN PROTEIN PADA UMUR 0-59 BULAN
MENURUT TIPE DAERAH DAN PROVINSI, STUDI DIET TOTAL 2014**

No	Provinsi	Angka kecukupan protein (% AKP)		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	168,5	158,8	161,6
2	Sumatera Utara	190,2	148,7	166,6
3	Sumatera Barat	146,8	130,4	137,3
4	Riau	150,4	141,8	144,6
5	Jambi	171,6	143,4	151,6
6	Sumatera Selatan	166,9	134,1	146,1
7	Bengkulu	165,6	126,3	136,3
8	Lampung	150,7	131,5	136,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	161,1	142,6	152,4
10	Kepulauan Riau	154,7	149,7	154,5
11	DKI Jakarta	136,8	-	136,8
12	Jawa Barat	124,4	107,9	119,1
13	Jawa Tengah	131,6	119,8	125,4
14	DI Yogyakarta	151,4	145,5	149,3
15	Jawa Timur	142,9	126,0	134,8
16	Banten	155,9	123,0	144,5
17	Bali	145,2	131,3	141,1
18	Nusa Tenggara Barat	126,6	139,3	133,4
19	Nusa Tenggara Timur	128,8	99,6	104,7
20	Kalimantan Barat	152,3	113,9	125,4
21	Kalimantan Tengah	165,7	139,7	148,8
22	Kalimantan Selatan	144,4	120,5	130,9
23	Kalimantan Timur	152,2	132,1	145,4
24	Sulawesi Utara	155,3	158,0	156,9
25	Sulawesi Tengah	136,4	120,8	123,2
26	Sulawesi Selatan	146,0	117,2	128,1
27	Sulawesi Tenggara	146,8	149,7	148,8
28	Gorontalo	164,6	141,4	148,3
29	Sulawesi Barat	134,0	127,9	129,0
30	Maluku	217,1	135,0	164,9
31	Maluku Utara	165,3	161,0	162,1
32	Papua Barat	127,2	126,1	126,4
33	Papua	135,2	83,5	95,0
	Indonesia	142,5	126,2	134,5

Sumber: Balitbangkes, Studi Diet Total 2014

Lampiran 5.32

**RERATA TINGKAT KECUKUPAN PROTEIN PADA PENDUDUK UMUR >55 TAHUN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI, STUDI DIET TOTAL 2014**

No	Provinsi	Angka kecukupan protein (% AKP)		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	112,4	107,2	109,6
2	Sumatera Utara	107,4	110,8	109,3
3	Sumatera Barat	99,8	98,2	98,9
4	Riau	106,0	102,8	104,5
5	Jambi	101,8	90,9	96,5
6	Sumatera Selatan	93,9	90,4	92,1
7	Bengkulu	106,4	95,1	100,8
8	Lampung	85,6	85,2	85,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	127,5	106,7	117,1
10	Kepulauan Riau	127,0	114,1	120,7
11	DKI Jakarta	108,2	90,8	99,3
12	Jawa Barat	95,3	84,6	89,8
13	Jawa Tengah	90,1	82,4	86,1
14	DI Yogyakarta	89,2	79,7	84,1
15	Jawa Timur	93,4	88,9	91,0
16	Banten	104,2	93,5	98,8
17	Bali	103,9	90,6	97,0
18	Nusa Tenggara Barat	105,0	88,1	96,2
19	Nusa Tenggara Timur	77,1	69,8	73,3
20	Kalimantan Barat	108,3	101,4	104,9
21	Kalimantan Tengah	101,4	105,0	103,2
22	Kalimantan Selatan	109,0	94,5	101,3
23	Kalimantan Timur	102,7	101,8	102,3
24	Sulawesi Utara	110,8	109,5	110,1
25	Sulawesi Tengah	105,4	86,7	96,1
26	Sulawesi Selatan	104,0	88,6	95,4
27	Sulawesi Tenggara	113,7	104,3	108,8
28	Gorontalo	114,3	99,2	106,3
29	Sulawesi Barat	102,1	90,1	95,8
30	Maluku	85,1	84,9	85,0
31	Maluku Utara	116,9	113,9	115,4
32	Papua Barat	83,8	95,2	89,0
33	Papua	87,3	69,8	80,1
	Indonesia	96,9	89,3	93,0

Sumber: Balitbangkes, Studi Diet Total 2014

Lampiran 5.33

**PROPORSI PENDUDUK MENURUT KLASIFIKASI TINGKAT KECUKUPAN PROTEIN DAN PROVINSI
STUDI DIET TOTAL 2014**

No	Provinsi	Tingkat kecukupan protein			
		<80% AKP	80-<100 AKP	100-<120% AKP	≥120% AKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	23,8	16,1	16,9	43,2
2	Sumatera Utara	32,3	16,6	14,0	37,1
3	Sumatera Barat	30,7	19,3	14,8	35,3
4	Riau	32,1	15,8	15,0	37,1
5	Jambi	37,4	15,8	13,5	33,3
6	Sumatera Selatan	35,7	17,9	14,1	32,2
7	Bengkulu	38,7	15,2	10,7	35,4
8	Lampung	45,9	18,6	12,5	22,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	19,2	15,2	13,4	52,2
10	Kepulauan Riau	18,0	15,4	16,3	50,3
11	DKI Jakarta	21,7	15,2	17,3	45,7
12	Jawa Barat	39,4	18,1	14,8	27,7
13	Jawa Tengah	40,0	18,9	14,2	26,9
14	DI Yogyakarta	38,0	19,7	14,0	28,3
15	Jawa Timur	36,0	18,0	14,7	31,3
16	Banten	30,8	18,4	16,6	34,2
17	Bali	31,5	16,7	14,3	37,4
18	Nusa Tenggara Barat	32,1	15,7	14,1	38,1
19	Nusa Tenggara Timur	61,6	12,0	8,5	18,0
20	Kalimantan Barat	39,0	13,9	12,8	34,3
21	Kalimantan Tengah	31,2	15,7	13,7	39,4
22	Kalimantan Selatan	30,4	15,4	14,9	39,2
23	Kalimantan Timur	29,5	16,4	14,1	40,0
24	Sulawesi Utara	30,9	16,2	14,9	38,0
25	Sulawesi Tengah	36,2	19,1	14,5	30,2
26	Sulawesi Selatan	32,7	18,4	14,9	33,9
27	Sulawesi Tenggara	25,1	14,7	16	44,2
28	Gorontalo	32,2	15,6	14,3	37,9
29	Sulawesi Barat	33,9	21,8	15	29,2
30	Maluku	38,2	15,3	14,4	32,1
31	Maluku Utara	25,5	17,3	16,4	40,8
32	Papua Barat	42,5	11,8	14,4	31,3
33	Papua	67,1	9,1	6,1	17,7
Indonesia		36,1	17,3	14,4	32,1

Sumber: Balitbangkes, Studi Diet Total 2014

Lampiran 6.1

**JUMLAH KASUS BARU TUBERKULOSIS PARU BTA POSITIF
MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jenis Kelamin				
		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+ Perempuan
		Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	2.604	64,7	1.419	35,3	4.023
2	Sumatera Utara	11.062	65,2	5.893	34,8	16.955
3	Sumatera Barat	2.997	65,7	1.564	34,3	4.561
4	Riau	2.719	66,9	1.346	33,1	4.065
5	Jambi	1.991	61,0	1.275	39,0	3.266
6	Sumatera Selatan	3.735	62,4	2.250	37,6	5.985
7	Bengkulu	818	62,7	487	37,3	1.305
8	Lampung	3.595	61,0	2.295	39,0	5.890
9	Kep. Bangka Belitung	603	65,0	324	35,0	927
10	Kepulauan Riau	684	64,0	385	36,0	1.069
11	DKI Jakarta	5.589	62,8	3.315	37,2	8.904
12	Jawa Barat	18.329	58,7	12.902	41,3	31.231
13	Jawa Tengah	11.463	58,2	8.249	41,8	19.712
14	DI Yogyakarta	736	59,3	505	40,7	1.241
15	Jawa Timur	13.788	58,7	9.699	41,3	23.487
16	Banten	4.801	60,2	3.177	39,8	7.978
17	Bali	925	62,6	552	37,4	1.477
18	Nusa Tenggara Barat	2.575	62,1	1.574	37,9	4.149
19	Nusa Tenggara Timur	1.921	56,1	1.503	43,9	3.424
20	Kalimantan Barat	2.273	63,8	1.292	36,2	3.565
21	Kalimantan Tengah	889	63,5	511	36,5	1.400
22	Kalimantan Selatan	1.975	63,1	1.153	36,9	3.128
23	Kalimantan Timur	1.384	63,4	799	36,6	2.183
24	Kalimantan Utara	247	61,4	155	38,6	402
25	Sulawesi Utara	3.203	63,6	1.831	36,4	5.034
26	Sulawesi Tengah	1.581	61,2	1.003	38,8	2.584
27	Sulawesi Selatan	4.970	58,7	3.495	41,3	8.465
28	Sulawesi Tenggara	1.870	60,8	1.208	39,2	3.078
29	Gorontalo	710	58,3	508	41,7	1.218
30	Sulawesi Barat	758	59,7	512	40,3	1.270
31	Maluku	1.152	56,5	886	43,5	2.038
32	Maluku Utara	649	61,2	411	38,8	1.060
33	Papua Barat	449	56,6	344	43,4	793
34	Papua	1.479	58,3	1.059	41,7	2.538
	Indonesia	114.524	60,8	73.881	39,2	188.405

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

(Per Tanggal 21 Juni 2016, kab/kota yang sudah melaporkan 96%)

Lampiran 6.2

**JUMLAH KASUS BARU TUBERKULOSIS PARU BTA POSITIF
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																Total		
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		L	P	T		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	Aceh	47	24	382	341	679	395	736	376	792	434	673	367	475	214	3.784	2.151	5.935		
2	Sumatera Utara	492	383	1.900	1.563	2.725	1.579	2.932	1.577	3.125	1.453	2.541	1.075	1.176	481	14.891	8.111	23.002		
3	Sumatera Barat	311	262	594	433	768	424	679	411	795	414	791	353	555	198	4.493	2.495	6.988		
4	Riau	141	136	512	381	707	449	760	359	809	338	535	222	300	103	3.764	1.988	5.752		
5	Jambi	85	97	276	262	440	319	441	318	464	283	357	187	253	82	2.316	1.548	3.864		
6	Sumatera Selatan	326	258	615	551	1.097	768	1.059	677	1.041	633	945	460	637	271	5.720	3.618	9.338		
7	Bengkulu	82	88	139	113	185	161	198	118	188	115	202	89	140	53	1.134	737	1.871		
8	Lampung	301	272	587	491	888	640	960	669	954	595	827	423	585	300	5.102	3.390	8.492		
9	Kep. Bangka Belitung	101	77	106	93	195	118	172	85	160	80	144	65	90	39	968	557	1.525		
10	Kepulauan Riau	89	80	247	211	475	327	396	201	297	121	217	82	144	44	1.865	1.066	2.931		
11	DKI Jakarta	1.304	1.202	2.168	1.782	2.836	1.975	2.367	1.525	2.189	1.437	1.561	916	877	415	13.302	9.252	22.554		
12	Jawa Barat	5.150	4.865	5.708	5.897	6.639	5.338	5.794	4.509	5.582	3.946	4.642	2.672	3.038	1.495	36.553	28.722	65.275		
13	Jawa Tengah	1.724	1.568	2.560	2.926	3.454	2.944	3.217	2.676	3.846	2.721	3.689	2.128	2.632	1.311	21.122	16.274	37.396		
14	DI Yogyakarta	145	104	267	295	272	200	202	177	229	152	236	119	181	104	1.532	1.151	2.683		
15	Jawa Timur	1.351	1.212	3.102	3.375	3.734	3.376	4.026	3.322	5.022	3.638	4.692	2.710	3.066	1.460	24.993	19.093	44.086		
16	Banten	609	658	1.312	1.227	1.762	1.203	1.499	1.072	1.399	940	1.002	551	438	227	8.021	5.878	13.899		
17	Bali	82	71	239	160	348	279	332	226	312	193	213	114	224	96	1.750	1.139	2.889		
18	Nusa Tenggara Barat	95	121	412	374	669	460	620	420	720	480	676	346	480	193	3.672	2.394	6.066		
19	Nusa Tenggara Timur	178	195	463	481	617	526	447	352	501	369	481	342	480	255	3.167	2.520	5.687		
20	Kalimantan Barat	115	138	399	327	597	413	627	361	606	336	475	202	308	127	3.127	1.904	5.031		
21	Kalimantan Tengah	94	83	163	151	264	186	303	178	326	146	268	116	152	54	1.570	914	2.484		
22	Kalimantan Selatan	237	218	322	262	469	332	523	412	636	370	543	316	315	143	3.045	2.053	5.098		
23	Kalimantan Timur	156	181	346	316	460	345	472	308	436	248	344	172	224	84	2.438	1.654	4.092		
24	Kalimantan Utara	13	16	63	53	66	59	71	26	71	39	80	27	54	16	418	236	654		
25	Sulawesi Utara	50	50	482	383	605	370	741	417	744	401	644	295	380	181	3.646	2.097	5.743		
26	Sulawesi Tengah	106	97	267	239	404	295	461	288	440	293	417	183	284	125	2.379	1.520	3.899		
27	Sulawesi Selatan	310	286	956	942	1.382	977	1.347	958	1.473	1.044	1.223	761	895	489	7.586	5.457	13.043		
28	Sulawesi Tenggara	23	27	306	283	426	307	405	266	427	271	324	157	236	90	2.147	1.401	3.548		
29	Gorontalo	10	13	127	102	137	103	175	117	171	130	124	65	76	50	820	580	1.400		
30	Sulawesi Barat	22	10	139	115	160	134	177	109	172	106	136	89	93	44	899	607	1.506		
31	Maluku	118	124	316	327	401	299	335	290	323	243	264	183	240	126	1.997	1.592	3.589		
32	Maluku Utara	62	50	164	176	217	148	207	114	160	102	144	76	85	36	1.039	702	1.741		
33	Papua Barat	169	185	204	257	275	215	190	103	139	80	96	52	53	26	1.126	918	2.044		
34	Papua	583	596	943	911	932	752	568	387	387	259	195	127	109	56	3.717	3.088	6.805		
Indonesia		14.681	13.747	26.786	25.800	35.285	26.416	33.439	23.404	34.936	22.410	29.701	16.042	19.275	8.988	194.103	136.807	330.910		
		8,59%		15,89%		18,65%		17,18%		17,33%		13,82%		8,54%		100,0%				

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan
(Per Tanggal 21 Juni 2016, kab/kota yang sudah melaporkan 96%)

Lampiran 6.3

**HASIL CAKUPAN PENEMUAN KASUS PENYAKIT TUBERKULOSIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah penduduk	Cakupan Penemuan							
			Semua Kasus			BTA Positif			Case Notification Rate (CNR)	
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Semua Kasus	BTA Positif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	5.001.953	3.784	2.151	5.935	2.604	1.419	4.023	119	80
2	Sumatera Utara	13.937.797	14.891	8.111	23.002	11.062	5.893	16.955	165	122
3	Sumatera Barat	5.196.289	4.493	2.495	6.988	2.997	1.564	4.561	134	88
4	Riau	6.344.402	3.764	1.988	5.752	2.719	1.346	4.065	91	64
5	Jambi	3.402.052	2.316	1.548	3.864	1.991	1.275	3.266	114	96
6	Sumatera Selatan	8.052.315	5.720	3.618	9.338	3.735	2.250	5.985	116	74
7	Bengkulu	1.874.944	1.134	737	1.871	818	487	1.305	100	70
8	Lampung	8.117.268	5.102	3.390	8.492	3.595	2.295	5.890	105	73
9	Kep. Bangka Belitung	1.372.813	968	557	1.525	603	324	927	111	68
10	Kepulauan Riau	1.973.043	1.865	1.066	2.931	684	385	1.069	149	54
11	DKI Jakarta	10.177.924	13.302	9.252	22.554	5.589	3.315	8.904	222	87
12	Jawa Barat	46.709.569	36.553	28.722	65.275	18.329	12.902	31.231	140	67
13	Jawa Tengah	33.774.141	21.122	16.274	37.396	11.463	8.249	19.712	111	58
14	DI Yogyakarta	3.679.176	1.532	1.151	2.683	736	505	1.241	73	34
15	Jawa Timur	38.847.561	24.993	19.093	44.086	13.788	9.699	23.487	113	60
16	Banten	11.955.243	8.021	5.878	13.899	4.801	3.177	7.978	116	67
17	Bali	4.152.833	1.750	1.139	2.889	925	552	1.477	70	36
18	Nusa Tenggara Barat	4.835.577	3.672	2.394	6.066	2.575	1.574	4.149	125	86
19	Nusa Tenggara Timur	5.120.061	3.167	2.520	5.687	1.921	1.503	3.424	111	67
20	Kalimantan Barat	4.789.574	3.127	1.904	5.031	2.273	1.292	3.565	105	74
21	Kalimantan Tengah	2.495.035	1.570	914	2.484	889	511	1.400	100	56
22	Kalimantan Selatan	3.989.793	3.045	2.053	5.098	1.975	1.153	3.128	128	78
23	Kalimantan Timur	3.469.798	2.438	1.654	4.092	1.384	799	2.183	118	63
24	Kalimantan Utara	598.776	418	236	654	247	155	402	109	67
25	Sulawesi Utara	2.412.118	3.646	2.097	5.743	3.203	1.831	5.034	238	209
26	Sulawesi Tengah	2.876.689	2.379	1.520	3.899	1.581	1.003	2.584	136	90
27	Sulawesi Selatan	8.520.304	7.586	5.457	13.043	4.970	3.495	8.465	153	99
28	Sulawesi Tenggara	2.499.540	2.147	1.401	3.548	1.870	1.208	3.078	142	123
29	Gorontalo	1.133.237	820	580	1.400	710	508	1.218	124	107
30	Sulawesi Barat	1.282.162	899	607	1.506	758	512	1.270	117	99
31	Maluku	1.686.469	1.997	1.592	3.589	1.152	886	2.038	213	121
32	Maluku Utara	1.162.345	1.039	702	1.741	649	411	1.060	150	91
33	Papua Barat	871.510	1.126	918	2.044	449	344	793	235	91
34	Papua	3.149.375	3.717	3.088	6.805	1.479	1.059	2.538	216	81
Indonesia		255.461.686	194.103	136.807	330.910	114.524	73.881	188.405	130	74
Case Detection Rate		73,75%								

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

(Per Tanggal 21 Juni 2016, kab/kota yang sudah melaporkan 96%)

Lampiran 6.4

**CAKUPAN TUBERKULOSIS PARU BTA POSITIF SEMBUH, PENGOBATAN LENGKAP,
DAN ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE) MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Kasus BTA Positif*	Sembuh		Pengobatan Lengkap		Kebhasilan Pengobatan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	Success Rate / Angka Keberhasilan Pengobatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	4.457	3.156	70,8	444	10,0	3.600	80,8
2	Sumatera Utara	16.946	14.901	87,9	873	5,2	15.774	93,1
3	Sumatera Barat	4.779	3.507	73,4	196	4,1	3.703	77,5
4	Riau	4.085	2.949	72,2	303	7,4	3.252	79,6
5	Jambi	3.360	2.956	88,0	128	3,8	3.084	91,8
6	Sumatera Selatan	5.877	4.697	79,9	349	5,9	5.046	85,9
7	Bengkulu	1.581	1.267	80,1	113	7,1	1.380	87,3
8	Lampung	5.542	5.070	91,5	204	3,7	5.274	95,2
9	Kep. Bangka Belitung	925	714	77,2	33	3,6	747	80,8
10	Kepulauan Riau	1.414	767	54,2	251	17,8	1.018	72,0
11	DKI Jakarta	9.684	5.169	53,4	929	9,6	6.098	63,0
12	Jawa Barat	31.834	26.041	81,8	2.470	7,8	28.511	89,6
13	Jawa Tengah	19.840	15.688	79,1	976	4,9	16.664	84,0
14	DI Yogyakarta	1.267	1.032	81,5	78	6,2	1.110	87,6
15	Jawa Timur	22.827	19.344	84,7	1.487	6,5	20.831	91,3
16	Banten	7.357	5.835	79,3	730	9,9	6.565	89,2
17	Bali	1.612	1.146	71,1	287	17,8	1.433	88,9
18	Nusa Tenggara Barat	4.191	3.532	84,3	302	7,2	3.834	91,5
19	Nusa Tenggara Timur	3.601	2.962	82,3	225	6,2	3.187	88,5
20	Kalimantan Barat	4.315	3.784	87,7	88	2,0	3.872	89,7
21	Kalimantan Tengah	1.600	477	29,8	150	9,4	627	39,2
22	Kalimantan Selatan	3.416	2.355	68,9	136	4,0	2.491	72,9
23	Kalimantan Timur	2.670	2.002	75,0	441	16,5	2.443	91,5
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	5.242	4.686	89,4	244	4,7	4.930	94,0
26	Sulawesi Tengah	3.005	2.042	68,0	207	6,9	2.249	74,8
27	Sulawesi Selatan	9.325	7.093	76,1	687	7,4	7.780	83,4
28	Sulawesi Tenggara	4.064	2.982	73,4	160	3,9	3.142	77,3
29	Gorontalo	1.560	723	46,3	59	3,8	782	50,1
30	Sulawesi Barat	1.220	827	67,8	133	10,9	960	78,7
31	Maluku	2.114	1.415	66,9	253	12,0	1.668	78,9
32	Maluku Utara	1.024	431	42,1	339	33,1	770	75,2
33	Papua Barat	685	252	36,8	210	30,7	462	67,4
34	Papua	2.255	926	41,1	192	8,5	1.118	49,6
	Indonesia	193.320	150.728	78,0	13.677	7,1	164.405	85,0

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Keterangan: *kohort tahun 2014, Kaltara tergabung dengan Kaltim

(Per Tanggal 21 Juni 2016, kab/kota yang sudah melaporkan 96%)

- = tidak ada data

Lampiran 6.5

**JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS
MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015**

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru			Jumlah Kasus Kumulatif
		2013	2014	2015	1987-2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	47	56	49	270
2	Sumatera Utara	927	231	53	3.761
3	Sumatera Barat	150	240	-	1.192
4	Riau	172	171	253	1.426
5	Jambi	83	59	52	552
6	Sumatera Selatan	-	87	175	584
7	Bengkulu	37	19	24	254
8	Lampung	94	95	111	629
9	Kepulauan Bangka Belitung	59	33	61	397
10	Kepulauan Riau	221	44	212	852
11	DKI Jakarta	996	130	130	8.093
12	Jawa Barat	33	61	657	4.870
13	Jawa Tengah	524	740	963	5.042
14	DI Yogyakarta	195	199	91	1.249
15	Jawa Timur	2.583	1.456	647	13.623
16	Banten	253	209	134	1.450
17	Bali	682	880	957	5.921
18	Nusa Tenggara Barat	80	80	89	616
19	Nusa Tenggara Timur	335	389	-	1.927
20	Kalimantan Barat	221	168	179	2.457
21	Kalimantan Tengah	11	23	26	148
22	Kalimantan Selatan	83	76	-	429
23	Kalimantan Timur	151	226	254	990
24	Kalimantan Utara	25	36	43	174
25	Sulawesi Utara	146	163	180	1.141
26	Sulawesi Tengah	83	116	112	452
27	Sulawesi Selatan	340	279	145	2.239
28	Sulawesi Tenggara	51	54	60	326
29	Gorontalo	16	6	25	112
30	Sulawesi Barat	4	3	-	10
31	Maluku	142	118	62	439
32	Maluku Utara	65	77	104	418
33	Papua Barat	626	13	7	1.741
34	Papua	2.058	1.338	226	13.328
Indonesia		11.493	7.875	6.081	77.112

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Data per 6 Januari 2016

Keterangan: - = tidak ada data

Lampiran 6.6

**JUMLAH KASUS BARU INFEKSI HIV
MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 - 2015**

No	Provinsi	Jumlah infeksi HIV		
		2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	46	60	48
2	Sumatera Utara	1.603	1.628	1.491
3	Sumatera Barat	222	321	243
4	Riau	412	550	586
5	Jambi	208	170	148
6	Sumatera Selatan	262	252	265
7	Bengkulu	79	92	87
8	Lampung	189	256	345
9	Kepulauan Bangka Belitung	97	113	147
10	Kepulauan Riau	926	973	885
11	DKI Jakarta	5.865	5.851	4.695
12	Jawa Barat	3.041	3.740	3.741
13	Jawa Tengah	2.322	2.867	3.005
14	DI Yogyakarta	489	614	531
15	Jawa Timur	3.391	4.508	4.155
16	Banten	502	680	649
17	Bali	1.690	2.129	2.028
18	Nusa Tenggara Barat	170	149	194
19	Nusa Tenggara Timur	259	249	299
20	Kalimantan Barat	525	699	456
21	Kalimantan Tengah	57	113	134
22	Kalimantan Selatan	174	227	250
23	Kalimantan Timur	467	539	504
24	Kalimantan Utara	-	-	84
25	Sulawesi Utara	264	392	311
26	Sulawesi Tengah	147	131	138
27	Sulawesi Selatan	792	839	700
28	Sulawesi Tenggara	100	160	129
29	Gorontalo	26	24	24
30	Sulawesi Barat	0	30	13
31	Maluku	236	414	409
32	Maluku Utara	54	63	45
33	Papua Barat	448	600	702
34	Papua	3.974	3.278	3.494
Indonesia		29.037	32.711	30.935

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Keterangan: - = tidak ada data (data Kalimantan Utara masuk ke data Kalimantan Timur)

Lampiran 6.7

**JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU)
MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015**

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru AIDS	Jumlah Kasus Baru AIDS pada IDU	Persentase Kasus Baru AIDS pada IDU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	49	-	-
2	Sumatera Utara	53	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-
4	Riau	253	7	3%
5	Jambi	52	3	6%
6	Sumatera Selatan	175	9	5%
7	Bengkulu	24	1	4%
8	Lampung	111	5	5%
9	Kepulauan Bangka Belitung	61	1	2%
10	Kepulauan Riau	212	-	-
11	DKI Jakarta	130	24	18%
12	Jawa Barat	657	41	6%
13	Jawa Tengah	963	9	1%
14	DI Yogyakarta	91	-	-
15	Jawa Timur	647	18	3%
16	Banten	134	10	7%
17	Bali	957	6	1%
18	Nusa Tenggara Barat	89	2	2%
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20	Kalimantan Barat	179	1	1%
21	Kalimantan Tengah	26	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-
23	Kalimantan Timur	254	11	4%
24	Kalimantan Utara	43	-	-
25	Sulawesi Utara	180	1	1%
26	Sulawesi Tengah	112	-	-
27	Sulawesi Selatan	145	6	4%
28	Sulawesi Tenggara	60	-	-
29	Gorontalo	25	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-
31	Maluku	62	-	-
32	Maluku Utara	104	4	4%
33	Papua Barat	7	-	-
34	Papua	226	-	-
	Indonesia	6.081	159	2,6

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Data per 6 Januari 2016

Lampiran 6.8

**JUMLAH LAYANAN DAN KUNJUNGAN KONSELING DAN TES HIV
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Layanan	Jumlah Klien Berkunjung	Jumlah Klien Mengikuti Konseling Sebelum Tes HIV	Jumlah Klien Menjalani Tes HIV	Jumlah Klien Mengikuti Konseling Setelah Tes HIV	Jumlah Klien Positif HIV	% Klien Positif HIV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	8	2.756	2.752	2.756	2.753	48	1,7
2	Sumatera Utara	81	54.683	54.673	54.636	54.420	1.491	2,7
3	Sumatera Barat	33	20.818	20.776	20.570	20.519	243	1,2
4	Riau	64	34.885	34.867	34.743	34.542	586	1,7
5	Jambi	47	6.466	6.283	6.301	6.298	148	2,3
6	Sumatera Selatan	20	17.328	17.328	17.327	17.321	265	1,5
7	Bengkulu	11	6.695	6.694	6.697	6.696	87	1,3
8	Lampung	35	6.152	6.152	6.149	6.134	345	5,6
9	Kep. Bangka Belitung	17	2.721	2.409	2.402	2.397	147	6,1
10	Kepulauan Riau	29	36.906	35.381	35.476	34.827	884	2,5
11	DKI Jakarta	75	139.012	137.137	136.750	135.820	4.696	3,4
12	Jawa Barat	453	228.058	228.010	227.967	227.160	3.741	1,6
13	Jawa Tengah	333	201.819	201.647	201.535	199.383	3.005	1,5
14	DI Yogyakarta	46	19.166	19.162	19.029	19.161	531	2,8
15	Jawa Timur	313	108.362	108.113	107.523	107.139	4.155	3,9
16	Banten	85	30.906	30.632	30.144	30.088	649	2,2
17	Bali	103	46.513	46.478	46.355	45.853	2.028	4,4
18	Nusa Tenggara Barat	22	21.064	21.008	20.687	20.479	194	0,9
19	Nusa Tenggara Timur	9	7.252	5.463	5.461	5.466	299	5,5
20	Kalimantan Barat	32	24.410	24.344	24.223	24.023	456	1,9
21	Kalimantan Tengah	17	3.538	3.247	3.265	3.280	250	7,7
22	Kalimantan Selatan	11	15.413	15.323	15.313	15.242	504	3,3
23	Kalimantan Timur	34	1.947	1.897	1.889	1.862	134	7,1
24	Kalimantan Utara	11	4.626	4.625	4.603	4.572	84	1,8
25	Sulawesi Utara	33	36.601	36.598	36.446	36.176	311	0,9
26	Sulawesi Tengah	8	3.377	3.377	3.377	3.370	138	4,1
27	Sulawesi Selatan	100	54.491	54.448	54.488	54.409	700	1,3
28	Sulawesi Tenggara	8	11.904	11.904	11.899	11.899	129	1,1
29	Gorontalo	1	1.102	1.102	1.102	1.101	24	2,2
30	Sulawesi Barat	3	766	766	766	765	13	1,7
31	Maluku	12	13.294	13.291	13.291	13.291	409	3,1
32	Maluku Utara	1	692	688	688	685	45	6,5
33	Papua Barat	54	26.085	26.084	25.588	25.483	702	2,7
34	Papua	112	85.828	84.321	84.425	83.664	3.494	4,1
Indonesia		2.221	1.275.636	1.266.980	1.263.871	1.256.278	30.935	2,4

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016
Data per 6 Januari 2016

Lampiran 6.9

**JUMLAH KASUS PNEUMONIA PADA BALITA
MENURUT PROVINSI DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2015**

No	Provinsi	Target Penemuan Pneumonia Balita	Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Balita							
			Pneumonia		Pneumonia Berat		Jumlah		Jumlah	%
			< 1 Tahun	1-4 Tahun	< 1 Tahun	1-4 Tahun	< 1 Tahun	1-4 Tahun		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	17.043	238	838	19	34	257	872	1.129	6,62
2	Sumatera Utara	48.570	7.339	9.665	103	119	7.442	9.784	17.226	35,47
3	Sumatera Barat	17.976	4.110	10.788	183	292	4.293	11.080	15.373	85,52
4	Riau	21.132	2.742	6.730	48	32	2.790	6.762	9.552	45,20
5	Jambi	12.077	1.480	4.814	205	615	1.685	5.429	7.114	58,90
6	Sumatera Selatan	28.565	5.821	10.949	209	275	6.030	11.224	17.254	60,40
7	Bengkulu	6.501	368	666	4	1	372	667	1.039	15,98
8	Lampung	28.459	2.228	4.517	148	49	2.376	4.566	6.942	24,39
9	Kep. Bangka Belitung	4.776	2.106	5.629	78	56	2.184	5.685	7.869	164,77
10	Kepulauan Riau	2.030	256	480	108	15	364	495	859	42,32
11	DKI Jakarta	36.132	12.342	26.477	556	380	12.898	26.857	39.755	110,03
12	Jawa Barat	164.343	61.863	110.106	4.687	3.701	66.550	113.807	180.357	109,74
13	Jawa Tengah	118.145	10.267	24.289	846	877	11.113	25.166	36.279	30,71
14	DI Yogyakarta	12.912	787	1.940	55	47	842	1.987	2.829	21,91
15	Jawa Timur	136.789	28.730	63.540	2.062	1.755	30.792	65.295	96.087	70,24
16	Banten	40.262	11.067	20.975	485	451	11.552	21.426	32.978	81,91
17	Bali	14.094	1.713	3.888	54	76	1.767	3.964	5.731	40,66
18	Nusa Tenggara Barat	16.826	8.940	14.151	799	982	9.739	15.133	24.872	147,82
19	Nusa Tenggara Timur	17.872	793	928	214	429	1.007	1.357	2.364	13,23
20	Kalimantan Barat	16.676	870	1.844	32	45	902	1.889	2.791	16,74
21	Kalimantan Tengah	8.316	141	257	5	5	146	262	408	4,91
22	Kalimantan Selatan	21.180	4.280	8.000	851	1.633	5.131	9.633	14.764	69,71
23	Kalimantan Timur	10.797	2.583	4.846	206	193	2.789	5.039	7.828	72,50
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	8.045	196	548	6	3	202	551	753	9,36
26	Sulawesi Tengah	9.917	3.272	6.503	205	172	3.477	6.675	10.152	102,37
27	Sulawesi Selatan	28.241	658	1.714	24	49	682	1.763	2.445	8,66
28	Sulawesi Tenggara	8.467	915	2.214	57	76	972	2.290	3.262	38,52
29	Gorontalo	4.109	1.609	2.574	31	12	1.640	2.586	4.226	102,85
30	Sulawesi Barat	4.397	389	1.040	42	61	431	1.101	1.532	34,84
31	Maluku	5.421	97	148	1	1	98	149	247	4,56
32	Maluku Utara	4.126	220	384	14	15	234	399	633	15,34
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indonesia	874.195	178.420	351.442	12.337	12.451	190.757	363.893	554.650	63,45

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Keterangan: - = tidak ada data

Data Kaltara tergabung dengan Kaltim

Lampiran 6.10

**CASE FATALITY RATE PNEUMONIA PADA BALITA
MENURUT PROVINSI DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2015**

No	Provinsi	Penderita Pneumonia			Jumlah Kematian Balita Karena Pneumonia			CFR (%)		
		< 1 Tahun	1-4 Tahun	Jumlah	< 1 Tahun	1-4 Tahun	Jumlah	< 1 Tahun	1-4 Tahun	0-4 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	257	872	1.129	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Sumatera Utara	7.442	9.784	17.226	4	10	14	0,05	0,10	0,08
3	Sumatera Barat	4.293	11.080	15.373	0	1	1	0,00	0,01	0,01
4	Riau	2.790	6.762	9.552	6	0	6	0,22	0,00	0,06
5	Jambi	1.685	5.429	7.114	0	2	2	0,00	0,04	0,03
6	Sumatera Selatan	6.030	11.224	17.254	2	8	10	0,03	0,07	0,06
7	Bengkulu	372	667	1.039	33	101	134	8,87	15,14	12,90
8	Lampung	2.376	4.566	6.942	14	26	40	0,59	0,57	0,58
9	Kep. Bangka Belitung	2.184	5.685	7.869	5	19	24	0,23	0,33	0,30
10	Kepulauan Riau	364	495	859	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	DKI Jakarta	12.898	26.857	39.755	16	35	51	0,12	0,13	0,13
12	Jawa Barat	66.550	113.807	180.357	72	0	72	0,11	0,00	0,04
13	Jawa Tengah	11.113	25.166	36.279	0	1	1	0,00	0,00	0,00
14	DI Yogyakarta	842	1.987	2.829	46	84	130	5,46	4,23	4,60
15	Jawa Timur	30.792	65.295	96.087	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	Banten	11.552	21.426	32.978	15	30	45	0,13	0,14	0,14
17	Bali	1.767	3.964	5.731	8	8	16	0,45	0,20	0,28
18	Nusa Tenggara Barat	9.739	15.133	24.872	3	5	8	0,03	0,03	0,03
19	Nusa Tenggara Timur	1.007	1.357	2.364	3	5	8	0,30	0,37	0,34
20	Kalimantan Barat	902	1.889	2.791	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Kalimantan Tengah	146	262	408	2	4	6	1,37	1,53	1,47
22	Kalimantan Selatan	5.131	9.633	14.764	27	44	71	0,53	0,46	0,48
23	Kalimantan Timur	2.789	5.039	7.828	0	1	1	0,00	0,02	0,01
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	202	551	753	4	5	9	1,98	0,91	1,20
26	Sulawesi Tengah	3.477	6.675	10.152	1	1	2	0,03	0,01	0,02
27	Sulawesi Selatan	682	1.763	2.445	1	1	2	0,15	0,06	0,08
28	Sulawesi Tenggara	972	2.290	3.262	2	4	6	0,21	0,17	0,18
29	Gorontalo	1.640	2.586	4.226	42	72	114	2,56	2,78	2,70
30	Sulawesi Barat	431	1.101	1.532	2	10	12	0,46	0,91	0,78
31	Maluku	98	149	247	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	Maluku Utara	234	399	633	17	75	92	7,26	18,80	14,53
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		190.757	363.893	554.650	325	552	877	0,17	0,15	0,16

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Keterangan: - = tidak ada data

Lampiran 6.11

**PENEMUAN KASUS DIARE DITANGANI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Perkiraan Diare di Fasilitas Kesehatan	Diare Ditangani	% Diare Ditangani
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	101.368	64.589	63,7
2	Sumatera Utara	289.498	229.557	79,3
3	Sumatera Barat	109.114	178.761	163,8
4	Riau	134.955	104.649	77,5
5	Jambi	73.027	56.994	78,0
6	Sumatera Selatan	170.549	148.248	86,9
7	Bengkulu	39.125	26.115	66,7
8	Lampung	174.175	312.119	179,2
9	Kep. Bangka Belitung	216.890	188.108	86,7
10	Kepulauan Riau	999.809	708.976	70,9
11	DKI Jakarta	701.488	357.799	51,0
12	Jawa Barat	78.734	50.868	64,6
13	Jawa Tengah	824.531	503.509	61,1
14	DI Yogyakarta	104.041	147.807	142,1
15	Jawa Timur	49.405	28.979	58,7
16	Banten	83.758	59.694	71,3
17	Bali	83.839	93.333	111,3
18	Nusa Tenggara Barat	11.120	18.125	163,0
19	Nusa Tenggara Timur	53.166	21.086	39,7
20	Kalimantan Barat	60.282	31.616	52,4
21	Kalimantan Tengah	179.669	119.037	66,3
22	Kalimantan Selatan	51.416	31.314	60,9
23	Kalimantan Timur	90.423	34.647	38,3
24	Kalimantan Utara	100.631	167.846	166,8
25	Sulawesi Utara	106.592	59.614	55,9
26	Sulawesi Tengah	32.676	12.803	39,2
27	Sulawesi Selatan	67.397	28.221	41,9
28	Sulawesi Tenggara	253.249	115.878	45,8
29	Gorontalo	23.689	14.086	59,5
30	Sulawesi Barat	24.278	14.723	60,6
31	Maluku	26.247	20.736	79,0
32	Maluku Utara	18.650	5.003	26,8
33	Papua Barat	43.483	16.437	37,8
34	Papua	27.959	46.584	166,6
Indonesia		5.405.235	4.017.861	74,3

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016
Data per 8 Juni 2016

Lampiran 6.12

**JUMLAH KASUS BARU KUSTA DAN CASE DETECTION RATE (CDR) PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2015**

No	Provinsi	Penduduk			Klasifikasi		Jenis Kelamin		Jumlah Kasus Baru	Case Detection Rate per 100.000 Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	PB	MB	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	2.497.491	2.504.462	5.001.953	139	385	295	229	524	10,48
2	Sumatera Utara	6.954.552	6.983.245	13.937.797	25	172	136	61	197	1,41
3	Sumatera Barat	2.584.192	2.612.097	5.196.289	13	41	38	16	54	1,04
4	Riau	3.257.561	3.086.841	6.344.402	11	97	88	20	108	1,70
5	Jambi	1.736.049	1.666.003	3.402.052	9	63	50	22	72	2,12
6	Sumatera Selatan	4.092.177	3.960.138	8.052.315	45	285	184	146	330	4,10
7	Bengkulu	956.265	918.679	1.874.944	0	17	11	6	17	0,91
8	Lampung	4.162.437	3.954.831	8.117.268	3	50	34	19	53	0,65
9	Kepulauan Bangka Belitung	713.223	659.590	1.372.813	6	29	21	14	35	2,55
10	Kepulauan Riau	1.007.979	965.064	1.973.043	6	18	24	0	24	1,22
11	DKI Jakarta	5.115.357	5.062.567	10.177.924	41	276	223	94	317	3,11
12	Jawa Barat	23.680.927	23.028.642	46.709.569	193	1.833	1327	699	2.026	4,34
13	Jawa Tengah	16.750.898	17.023.243	33.774.141	207	1.600	1150	657	1.807	5,35
14	DI Yogyakarta	1.818.765	1.860.411	3.679.176	22	83	71	34	105	2,85
15	Jawa Timur	19.172.610	19.674.951	38.847.561	508	3.505	2359	1654	4.013	10,33
16	Banten	6.097.184	5.858.059	11.955.243	147	879	624	402	1.026	8,58
17	Bali	2.091.005	2.061.828	4.152.833	9	52	41	20	61	1,47
18	Nusa Tenggara Barat	2.345.811	2.489.766	4.835.577	56	236	192	100	292	6,04
19	Nusa Tenggara Timur	2.536.872	2.583.189	5.120.061	46	234	217	63	280	5,47
20	Kalimantan Barat	2.439.892	2.349.682	4.789.574	7	50	47	10	57	1,19
21	Kalimantan Tengah	1.302.796	1.192.239	2.495.035	0	26	23	3	26	1,04
22	Kalimantan Selatan	2.021.963	1.967.830	3.989.793	18	127	125	20	145	3,63
23	Kalimantan Timur	1.797.297	1.629.341	3.426.638	26	150	109	67	176	5,14
24	Kalimantan Utara	340.811	301.125	641.936	4	37	34	7	41	6,39
25	Sulawesi Utara	1.230.810	1.181.308	2.412.118	50	377	295	132	427	17,70
26	Sulawesi Tengah	1.469.626	1.407.063	2.876.689	106	388	308	186	494	17,17
27	Sulawesi Selatan	4.160.975	4.359.329	8.520.304	194	1026	711	509	1.220	14,32
28	Sulawesi Tenggara	1.256.056	1.243.484	2.499.540	28	253	188	93	281	11,24
29	Gorontalo	567.695	565.542	1.133.237	20	203	151	72	223	19,68
30	Sulawesi Barat	643.118	639.044	1.282.162	43	172	165	50	215	16,77
31	Maluku	850.637	835.832	1.686.469	26	185	137	74	211	12,51
32	Maluku Utara	593.197	569.148	1.162.345	133	411	318	226	544	46,80
33	Papua Barat	459.271	412.239	871.510	225	492	420	297	717	82,27
34	Papua	1.661.219	1.488.156	3.149.375	291	793	665	419	1.084	34,42
	Indonesia	128.366.718	127.094.968	255.461.686	2.657	14.545	10.781	6421	17.202	6,73

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016
Data per 24 Juni 2016

Lampiran 6.13

**PROPORSI KECACATAN KUSTA DAN KASUS KUSTA PADA ANAK 0-14 TAHUN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Penderita Baru	Cacat Tingkat 1		Cacat Tingkat 2		0 - 14 Tahun	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	524	37	7,06	47	8,97	76	14,50
2	Sumatera Utara	197	34	17,26	44	22,34	20	10,15
3	Sumatera Barat	54	0	0,00	11	20,37	2	3,70
4	Riau	108	3	2,78	9	8,33	11	10,19
5	Jambi	72	3	4,17	3	4,17	4	5,56
6	Sumatera Selatan	330	28	8,48	45	13,64	25	7,58
7	Bengkulu	17	3	17,65	4	23,53	1	5,88
8	Lampung	53	11	20,75	2	3,77	2	3,77
9	Kepulauan Bangka Belitung	35	1	2,86	1	2,86	4	11,43
10	Kepulauan Riau	24	0	0,00	0	0,00	2	8,33
11	DKI Jakarta	317	8	2,52	15	4,73	33	10,41
12	Jawa Barat	2026	490	24,19	257	12,69	174	8,59
13	Jawa Tengah	1807	218	12,06	209	11,57	130	7,19
14	DI Yogyakarta	105	31	29,52	16	15,24	12	11,43
15	Jawa Timur	4013	618	15,40	492	12,26	335	8,35
16	Banten	1026	132	12,87	108	10,53	138	13,45
17	Bali	61	0	0,00	2	3,28	3	4,92
18	Nusa Tenggara Barat	292	10	3,42	12	4,11	28	9,59
19	Nusa Tenggara Timur	280	37	13,21	22	7,86	46	16,43
20	Kalimantan Barat	57	5	8,77	8	14,04	4	7,02
21	Kalimantan Tengah	26	0	0,00	0	0,00	5	19,23
22	Kalimantan Selatan	145	8	5,52	26	17,93	7	4,83
23	Kalimantan Timur	176	12	6,82	18	10,23	11	6,25
24	Kalimantan Utara	41	8	19,51	8	19,51	4	9,76
25	Sulawesi Utara	427	23	5,39	51	11,94	30	7,03
26	Sulawesi Tengah	494	57	11,54	15	3,04	69	13,97
27	Sulawesi Selatan	1220	161	13,20	131	10,74	94	7,70
28	Sulawesi Tenggara	281	3	1,07	8	2,85	25	8,90
29	Gorontalo	223	9	4,04	21	9,42	15	6,73
30	Sulawesi Barat	215	1	0,47	0	0,00	11	5,12
31	Maluku	211	31	14,69	23	10,90	26	12,32
32	Maluku Utara	544	19	3,49	21	3,86	106	19,49
33	Papua Barat	717	15	2,09	17	2,37	221	30,82
34	Papua	1084	66	6,09	41	3,78	256	23,62
Indonesia		17.202	2.082	12,10	1.687	9,81	1.930	11,22

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Data per 24 Juni 2016

Lampiran 6.14

JUMLAH KASUS KUSTA YANG TERCATAT DAN ANGKA PREVALENSI
PER 10.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2015

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	PB	MB	PB + MB	Angka Prevalensi per 10.000 penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	5.001.953	73	424	497	0,99
2	Sumatera Utara	13.937.797	12	204	216	0,15
3	Sumatera Barat	5.196.289	25	79	104	0,20
4	Riau	6.344.402	22	142	164	0,26
5	Jambi	3.402.052	33	167	200	0,59
6	Sumatera Selatan	8.052.315	47	284	331	0,41
7	Bengkulu	1.874.944	0	18	18	0,10
8	Lampung	8.117.268	9	109	118	0,15
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.372.813	4	59	63	0,46
10	Kepulauan Riau	1.973.043	3	33	36	0,18
11	DKI Jakarta	10.177.924	24	364	388	0,38
12	Jawa Barat	46.709.569	125	2.223	2.348	0,50
13	Jawa Tengah	33.774.141	145	1.966	2.111	0,63
14	DI Yogyakarta	3.679.176	17	90	107	0,29
15	Jawa Timur	38.847.561	256	3.696	3.952	1,02
16	Banten	11.955.243	70	949	1.019	0,85
17	Bali	4.152.833	15	53	68	0,16
18	Nusa Tenggara Barat	4.835.577	27	276	303	0,63
19	Nusa Tenggara Timur	5.120.061	94	652	746	1,46
20	Kalimantan Barat	4.789.574	6	60	66	0,14
21	Kalimantan Tengah	2.495.035	1	96	97	0,39
22	Kalimantan Selatan	3.989.793	5	194	199	0,50
23	Kalimantan Timur	3.426.638	22	176	198	0,58
24	Kalimantan Utara	641.936	6	57	63	0,98
25	Sulawesi Utara	2.412.118	25	388	413	1,71
26	Sulawesi Tengah	2.876.689	65	403	468	1,63
27	Sulawesi Selatan	8.520.304	84	1.071	1.155	1,36
28	Sulawesi Tenggara	2.499.540	17	316	333	1,33
29	Gorontalo	1.133.237	20	240	260	2,29
30	Sulawesi Barat	1.282.162	53	255	308	2,40
31	Maluku	1.686.469	67	481	548	3,25
32	Maluku Utara	1.162.345	99	557	656	5,64
33	Papua Barat	871.510	249	680	929	10,66
34	Papua	3.149.375	266	1.412	1.678	5,33
Indonesia		255.461.686	1.986	18.174	20.160	0,79

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016
Data per 24 Juni 2016

Lampiran 6.15

**JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Total	Meninggal	Case Fatality Rate (%)	Faktor Risiko																								
					Pemeriksaan Kehamilan					Status Imunisasi				Penolong Persalinan				Perawatan Tali Pusat				Pemotongan Tali Pusat				Dirawat di RS			
					Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tanpa pemeriksaan	Tidak Diketahui	TT2+	TT1	Tidak Dihumisasi	Tidak Diketahui	Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tidak Diketahui	Alkohol/Iodium	Tradisional	Lain-lain	Tidak Diketahui	Gunting	Bambu	Lain-lain	Tidak Diketahui	Ya	Tidak	Tidak Diketahui	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	
1	Aceh	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Sumatera Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Sumatera Barat	3	0	0,0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	2	1	0	2	1	0	2	0	1	
4	Riau	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Jambi	2	0	0,0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	
6	Sumatera Selatan	1	1	100,0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
7	Bengkulu	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Lampung	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kep. Bangka Belitung	1	0	0,0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
10	Kepulauan Riau	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	DKI Jakarta	1	0	0,0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	
12	Jawa Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Jawa Tengah	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	DI Yogyakarta	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Jawa Timur	21	13	61,9	1	16	0	4	0	2	3	16	0	1	8	10	3	0	15	4	13	5	3	0	16	4	0	0	
16	Banten	12	6	50,0	0	6	0	5	1	4	0	7	1	0	2	10	0	3	2	6	1	8	2	1	1	12	0	0	
17	Bali	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Kalimantan Barat	5	3	60,0	1	3	0	1	0	0	3	2	0	1	1	3	1	0	2	2	3	1	3	2	0	2	3	1	
21	Kalimantan Tengah	2	1	50,0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	
22	Kalimantan Selatan	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Kalimantan Timur	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Sulawesi Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Sulawesi Tengah	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Sulawesi Selatan	1	1	100,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
28	Sulawesi Tenggara	1	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	
29	Gorontalo	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Sulawesi Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Maluku	2	2	100,0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Papua Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Papua	1	0	0,0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	
	Indonesia	53	27	50,9	51	30	2	15	2	7	9	32	5	2	14	33	4	6	21	15	24	22	12	6	18	29	5	2	

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

data per 31 Januari 2016

Keterangan: - = tidak ada data

Lampiran 6.16

**JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN *INCIDENCE RATE* (IR) CAMPAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus	Incidence Rate (per 100.000 Penduduk)	Meninggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	5.001.953	14	0,28	0
2	Sumatera Utara	13.937.797	80	0,57	0
3	Sumatera Barat	5.196.289	425	8,18	0
4	Riau	6.344.402	18	0,28	0
5	Jambi	3.402.052	491	14,43	1
6	Sumatera Selatan	8.052.315	415	5,15	0
7	Bengkulu	1.874.944	142	7,57	0
8	Lampung	8.117.268	37	0,46	0
9	Kep. Bangka Belitung	1.372.813	63	4,59	0
10	Kepulauan Riau	1.973.043	158	8,01	0
11	DKI Jakarta	10.177.924	1.209	11,88	0
12	Jawa Barat	46.709.569	650	1,39	0
13	Jawa Tengah	33.774.141	-	-	-
14	DI Yogyakarta	3.679.176	37	1,01	0
15	Jawa Timur	38.847.561	1.072	2,76	0
16	Banten	11.955.243	606	5,07	0
17	Bali	4.152.833	141	3,40	0
18	Nusa Tenggara Barat	4.835.577	3	0,06	0
19	Nusa Tenggara Timur	5.120.061	-	-	-
20	Kalimantan Barat	4.789.574	254	5,30	0
21	Kalimantan Tengah	2.495.035	311	12,46	0
22	Kalimantan Selatan	3.989.793	-	-	-
23	Kalimantan Timur	3.426.638	-	-	-
24	Kalimantan Utara	641.936	-	-	-
25	Sulawesi Utara	2.412.118	62	2,57	0
26	Sulawesi Tengah	2.876.689	450	15,64	0
27	Sulawesi Selatan	8.520.304	836	9,81	0
28	Sulawesi Tenggara	2.499.540	101	4,04	0
29	Gorontalo	1.133.237	43	3,79	0
30	Sulawesi Barat	1.282.162	-	-	-
31	Maluku	1.686.469	23	1,36	0
32	Maluku Utara	1.162.345	126	10,84	0
33	Papua Barat	871.510	-	-	-
34	Papua	3.149.375	418	13,27	0
Indonesia		255.461.686	8.185	3,20	1

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016
Data per 15 Maret 2016

Keterangan: - = tidak ada data

Lampiran 6.17

**JUMLAH KASUS CAMPAK DAN KASUS CAMPAK YANG DIVAKSINASI
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)										Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi terhadap Kasus
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		≥ 15 Tahun				
		Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	3	0	0	0	6	0	0	0	5	0	14	0	0,00
2	Sumatera Utara	0	0	30	5	27	11	21	15	2	2	80	33	41,25
3	Sumatera Barat	45	11	121	58	148	71	61	32	50	9	425	181	42,59
4	Riau	2	2	4	3	9	5	3	2	0	0	18	12	66,67
5	Jambi	43	9	79	44	150	75	99	60	120	57	491	245	49,90
6	Sumatera Selatan	50	33	122	94	116	91	68	49	59	41	415	308	74,22
7	Bengkulu	6	2	18	18	43	42	23	24	52	49	142	135	95,07
8	Lampung	4	1	10	9	13	15	6	6	4	4	37	35	94,59
9	Kep. Bangka Belitung	8	0	17	5	16	8	9	6	13	8	63	27	42,86
10	Kepulauan Riau	23	7	31	29	48	45	31	29	25	7	158	117	74,05
11	DKI Jakarta	166	27	369	157	393	159	146	55	135	25	1.209	423	34,99
12	Jawa Barat	61	10	170	71	271	133	101	48	47	13	650	275	42,31
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	3	0	7	4	6	3	2	1	19	14	37	22	59,46
15	Jawa Timur	73	11	217	96	352	135	152	50	278	38	1.072	330	30,78
16	Banten	58	4	148	42	219	87	99	34	82	13	606	180	29,70
17	Bali	10	2	24	12	54	39	30	16	23	12	141	81	57,45
18	Nusa Tenggara Barat	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	20	3	60	25	59	35	64	13	51	8	254	84	33,07
21	Kalimantan Tengah	39	9	67	33	94	39	48	14	63	11	311	106	34,08
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	4	0	13	8	23	15	10	4	12	6	62	33	53,23
26	Sulawesi Tengah	17	17	63	59	188	184	112	112	70	70	450	442	98,22
27	Sulawesi Selatan	52	18	177	135	215	170	138	99	254	111	836	533	63,76
28	Sulawesi Tenggara	7	0	24	3	16	0	24	3	30	2	101	8	7,92
29	Gorontalo	6	1	12	0	13	3	7	0	5	1	43	5	11,63
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	2	0	13	6	6	4	1	0	1	0	23	10	43,48
32	Maluku Utara	5	0	51	24	65	23	5	0	0	0	126	47	37,30
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	69	13	231	66	81	24	17	10	20	7	418	120	28,71
Indonesia		778	182	2.078	1.006	2.632	1.417	1.277	682	1.420	508	8.185	3.795	46,37

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Data per 31 Maret 2016

Keterangan: - = tidak ada data

Lampiran 6.18

**FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA KLB CAMPAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Laporan KLB					
		Total KLB	Frekuensi KLB dengan Spesimen > 5	Frekuensi KLB dengan Investigasi Penuh	Frekuensi KLB dengan Laporan ke Pusat	Total Kasus	Meninggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	7	2	2	0	77	0
3	Sumatera Barat	8	8	5	3	92	0
4	Riau	4	4	4	0	38	0
5	Jambi	6	5	0	0	39	0
6	Sumatera Selatan	5	4	1	0	68	0
7	Bengkulu	1	1	1	0	12	0
8	Lampung	1	1	1	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0
16	Banten	0	0	0	0	0	0
17	Bali	1	0	0	0	14	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	10	8	8	6	39	0
21	Kalimantan Tengah	1	0	0	0	10	0
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	3	1	0	0	34	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	3	3	2	0	40	0
28	Sulawesi Tenggara	4	3	0	0	33	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
34	Papua	14	6	0	0	335	0
Indonesia		68	46	24	9	831	0

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016
Data per 15 Maret 2016
Keterangan: - = tidak ada data

Lampiran 6.19

**KLB CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Konfirmasi Laboratorium										Tanpa Spesimen		
		Total Darah (Serum) Sampel	Campak		Rubella		Gabungan (Campak dan Rubella)		Negatif		Pending Lab.			
			Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	26	2	11	1	12	1	4	0	0	1	15	0	0
3	Sumatera Barat	56	0	0	2	63	0	0	1	5	1	16	0	0
4	Riau	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	38	4	25	1	9	0	0	0	0	1	5	0	0
6	Sumatera Selatan	36	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0
7	Bengkulu	6	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	3	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	72	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	9	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	15	1	10	0	0	0	0	2	30	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	19	3	28	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	42	3	112	1	12	0	0	0	0	9	204	0	0
Indonesia		347	19	227	7	108	1	4	5	40	14	256	0	0

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Data per 15 Maret 2016

Keterangan: - = tidak ada data

Lampiran 6.20

**JUMLAH KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI
TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)										Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi Terhadap Total Kasus	Total Meninggal	Case Fatality Rate (%)
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		≥ 15 Tahun						
		Kasus	Divaksinasi	Kasus	Divaksinasi	Kasus	Divaksinasi	Kasus	Divaksinasi	Kasus	Divaksinasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
3	Sumatera Barat	2	1	34	22	47	40	18	16	9	1	110	80	72,73	1	0,91
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
5	Jambi	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	3	2	66,67	0	0,00
6	Sumatera Selatan	0	0	1	1	2	0	1	1	1	0	5	2	40,00	0	0,00
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
8	Lampung	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0	0,00
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
11	DKI Jakarta	0	0	1	0	3	3	1	0	3	2	8	5	62,50	0	0,00
12	Jawa Barat	0	0	4	2	8	4	1	0	8	1	21	7	33,33	0	0,00
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
15	Jawa Timur	0	0	15	13	28	20	6	3	18	5	67	41	61,19	0	0,00
16	Banten	0	0	7	3	5	2	3	2	1	0	16	7	43,75	2	12,50
17	Bali	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	100	0	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
20	Kalimantan Barat	1	1	5	2	2	3	3	2	2	0	13	8	61,54	2	15,38
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
25	Sulawesi Utara	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	100,00	0	0,00
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	100,00	0	0,00
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
34	Papua	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	100,00	0	0,00
	Indonesia	3	2	71	46	102	79	33	24	43	9	252	160	63,49	5	1,98

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016
data per 18 April 2016

Lampiran 6.21

**NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN
DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Kasus Non Polio AFP	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun	Spesimen adekuat (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	24	1,50	79,1
2	Sumatera Utara	98	2,18	75,0
3	Sumatera Barat	23	1,44	91,6
4	Riau	28	1,40	89,6
5	Jambi	20	2,00	80,9
6	Sumatera Selatan	49	2,09	80,3
7	Bengkulu	13	2,36	92,3
8	Lampung	46	2,00	93,4
9	Kep. Bangka Belitung	2	0,50	50,0
10	Kepulauan Riau	14	2,15	100,0
11	DKI Jakarta	47	1,84	71,1
12	Jawa Barat	276	2,17	89,9
13	Jawa Tengah	156	1,87	96,8
14	DI Yogyakarta	20	2,35	90,9
15	Jawa Timur	180	1,99	95,0
16	Banten	71	2,06	94,4
17	Bali	30	2,86	81,2
18	Nusa Tenggara Barat	34	2,27	62,8
19	Nusa Tenggara Timur	43	2,39	85,1
20	Kalimantan Barat	31	2,14	93,5
21	Kalimantan Tengah	14	1,87	71,4
22	Kalimantan Selatan	20	1,74	79,1
23	Kalimantan Timur	7	0,70	50,0
24	Kalimantan Utara	1	0,50	0,0
25	Sulawesi Utara	18	2,77	100,0
26	Sulawesi Tengah	19	2,24	89,4
27	Sulawesi Selatan	40	1,60	100,0
28	Sulawesi Tenggara	13	1,53	73,3
29	Gorontalo	17	4,86	73,6
30	Sulawesi Barat	1	0,22	100,0
31	Maluku	2	0,33	33,3
32	Maluku Utara	2	0,50	100,0
33	Papua Barat	-	-	-
34	Papua	7	0,70	71,4
	Indonesia	1.366	1,93	87,5

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016
data per 18 April 2016

Keterangan: - = tidak ada data

Lampiran 6.22

**JUMLAH KASUS DAN ANGKA KESAKITAN MALARIA PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Populasi Berisiko	Suspek	Sediaan Darah Diperiksa			Positif	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk
				Pemeriksaan Mikroskopik	Rapid Diagnostic Test	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Aceh	5.001.953	53.921	44.749	9.049	53.798	422	0,08
2	Sumatera Utara	13.937.797	87.177	32.908	48.168	81.076	6.840	0,49
3	Sumatera Barat	5.196.289	6.404	5.343	641	5.984	752	0,14
4	Riau	6.344.402	15.649	10.174	5.475	15.649	625	0,10
5	Jambi	3.402.052	34.944	23.845	8.152	31.997	1.612	0,47
6	Sumatera Selatan	8.052.315	40.629	22.809	9.792	32.601	2.495	0,31
7	Bengkulu	1.874.944	32.457	21.649	6.631	28.280	3.814	2,03
8	Lampung	8.117.268	26.379	19.873	6.329	26.202	3.991	0,49
9	Kep. Bangka Belitung	1.372.813	67.960	60.232	7.728	67.960	1.484	1,08
10	Kepulauan Riau	1.973.043	5.627	4.076	1.327	5.403	688	0,35
11	DKI Jakarta	10.177.924	23	23	-	23	23	0,00
12	Jawa Barat	46.709.569	174	143	31	174	179	0,00
13	Jawa Tengah	33.774.141	50.654	49.794	860	50.654	2.190	0,06
14	DI Yogyakarta	3.679.176	126	126	-	126	126	0,03
15	Jawa Timur	38.847.561	3.515	3.514	1	3.515	25	0,00
16	Banten	11.955.243	401	149	252	401	28	0,00
17	Bali	4.152.833	5.283	4.905	-	4.905	5	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	4.835.577	101.990	88.262	13.728	101.990	2.014	0,42
19	Nusa Tenggara Timur	5.120.061	283.112	260.012	20.494	280.506	36.039	7,04
20	Kalimantan Barat	4.789.574	49.128	21.658	27.470	49.128	640	0,13
21	Kalimantan Tengah	2.495.035	23.909	12.733	11.176	23.909	1.047	0,42
22	Kalimantan Selatan	3.989.793	14.056	8.363	5.693	14.056	2.716	0,68
23	Kalimantan Timur	3.426.638	15.229	7.257	7.972	15.229	1.562	0,46
24	Kalimantan Utara	641.936	4.240	3.127	1.113	4.240	18	0,03
25	Sulawesi Utara	2.412.118	22.274	12.033	10.241	22.274	2.128	0,88
26	Sulawesi Tengah	2.876.689	36.657	18.086	17.065	35.151	1.953	0,68
27	Sulawesi Selatan	8.520.304	24.811	18.765	5.860	24.625	818	0,10
28	Sulawesi Tenggara	2.626.222	14.403	7.062	7.252	14.403	1.073	0,41
29	Gorontalo	1.133.237	18.635	14.502	4.129	18.631	649	0,57
30	Sulawesi Barat	1.282.162	32.817	22.348	10.469	32.817	220	0,17
31	Maluku	1.686.469	66.474	44.796	15.939	60.735	9.802	5,81
32	Maluku Utara	1.162.345	25.349	19.526	5.184	24.710	3.220	2,77
33	Papua Barat	871.510	121.257	95.077	21.268	116.345	27.266	31,29
34	Papua	3.149.375	327.113	266.585	53.457	320.042	100.561	31,93
	Indonesia	255.602.872	1.612.777	1.224.504	342.946	1.567.539	217.025	0,85

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Catatan : Sulawesi Tenggara menggunakan data jumlah kab. yang sudah pemekaran yaitu ad 17 Kab/kota (Buton Tengah, Buton Selatan dan Muna Barat)

Lampiran 6.23

**ANNUAL PARASITE INSIDENCE (API) MALARIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2012-2015**

No	Provinsi	API			
		2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	0,44	0,44	0,16	0,08
2	Sumatera Utara	0,84	1,30	0,69	0,49
3	Sumatera Barat	0,25	0,26	0,18	0,14
4	Riau	0,20	0,23	0,13	0,10
5	Jambi	1,29	1,11	0,84	0,47
6	Sumatera Selatan	0,20	0,39	0,30	0,31
7	Bengkulu	5,32	3,89	2,17	2,03
8	Lampung	0,18	0,34	0,55	0,49
9	Kepulauan Bangka Belitung	2,66	1,28	0,86	1,08
10	Kepulauan Riau	2,47	0,49	0,41	0,35
11	DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Jawa Barat	0,01	0,00	0,01	0,00
13	Jawa Tengah	0,03	0,04	0,05	0,06
14	DI Yogyakarta	0,06	0,02	0,02	0,03
15	Jawa Timur	0,02	0,00	0,01	0,00
16	Banten	0,02	0,01	0,00	0,00
17	Bali	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	0,82	0,57	0,78	0,42
19	Nusa Tenggara Timur	19,41	16,37	12,81	7,04
20	Kalimantan Barat	0,85	0,23	0,17	0,13
21	Kalimantan Tengah	3,48	2,00	1,32	0,42
22	Kalimantan Selatan	2,06	1,43	1,35	0,68
23	Kalimantan Timur	1,15	0,47	0,32	0,46
24	Kalimantan Utara	-	-	0,09	0,03
25	Sulawesi Utara	2,35	1,11	0,94	0,88
26	Sulawesi Tengah	2,49	1,13	0,80	0,68
27	Sulawesi Selatan	0,19	0,25	0,10	0,10
28	Sulawesi Tenggara	0,79	0,62	0,46	0,41
29	Gorontalo	1,64	1,08	0,84	0,57
30	Sulawesi Barat	1,23	0,40	0,25	0,17
31	Maluku	7,42	8,25	6,00	5,81
32	Maluku Utara	5,08	4,51	3,32	2,77
33	Papua Barat	52,27	38,44	20,85	31,29
34	Papua	60,56	42,65	29,57	31,93
Indonesia		1,69	1,38	0,99	0,85

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 6.24

**JUMLAH PENDERITA, INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK, KASUS MENINGGAL, DAN CASE FATALITY RATE (%)
DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD/DHF)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Demam Berdarah Dengue			
			Jumlah Kasus	Incidence Rate per 100.000 Penduduk	Jumlah Kasus Meninggal	Case Fatality Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	5.001.953	1.509	30,17	6	0,40
2	Sumatera Utara	13.937.797	5.274	37,84	30	0,57
3	Sumatera Barat	5.196.289	3.806	73,24	22	0,58
4	Riau	6.344.402	3.261	51,40	22	0,67
5	Jambi	3.402.052	1.354	39,80	8	0,59
6	Sumatera Selatan	8.052.315	3.396	42,17	16	0,47
7	Bengkulu	1.874.944	1.003	53,49	20	1,99
8	Lampung	8.117.268	3.145	38,74	32	1,02
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.372.813	623	45,38	6	0,96
10	Kepulauan Riau	1.973.043	1.795	90,98	16	0,89
11	DKI Jakarta	10.177.924	4.954	48,67	11	0,22
12	Jawa Barat	46.709.569	21.237	45,47	14	0,07
13	Jawa Tengah	33.774.141	16.398	48,55	255	1,56
14	DI Yogyakarta	3.679.176	3.420	92,96	35	1,02
15	Jawa Timur	38.847.561	20.138	51,84	283	1,41
16	Banten	11.955.243	3.011	25,19	43	1,43
17	Bali	4.152.833	10.704	257,75	28	0,26
18	Nusa Tenggara Barat	4.835.577	1.252	25,89	5	0,40
19	Nusa Tenggara Timur	5.120.061	506	9,88	1	0,20
20	Kalimantan Barat	4.789.574	1.115	23,28	15	1,35
21	Kalimantan Tengah	2.495.035	1.502	60,20	10	0,67
22	Kalimantan Selatan	3.989.793	3.668	91,93	40	1,09
23	Kalimantan Timur	3.426.638	6.458	188,46	65	1,01
24	Kalimantan Utara	641.936	719	112,00	2	0,28
25	Sulawesi Utara	2.412.118	730	30,26	17	2,33
26	Sulawesi Tengah	2.876.689	1.571	54,61	13	0,83
27	Sulawesi Selatan	8.520.304	3.974	46,64	19	0,48
28	Sulawesi Tenggara	2.499.540	1.500	60,01	9	0,60
29	Gorontalo	1.133.237	231	20,38	14	6,06
30	Sulawesi Barat	1.282.162	486	37,90	0	0,00
31	Maluku	1.686.469	78	4,63	6	7,69
32	Maluku Utara	1.162.345	119	10,24	2	1,68
33	Papua Barat	871.510	66	7,57	3	4,55
34	Papua	3.149.375	647	20,54	3	0,46
Indonesia		255.461.686	129.650	50,75	1.071	0,83

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 6.25

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 - 2015**

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota			Kabupaten/kota terjangkit					
		2013	2014	2015	2013		2014		2015	
					Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	23	23	23	20	86,96	21	91,30	21	91,30
2	Sumatera Utara	33	33	33	26	78,79	30	90,91	31	93,94
3	Sumatera Barat	19	19	19	17	89,47	18	94,74	18	94,74
4	Riau	12	12	12	12	100	12	100,00	10	83,33
5	Jambi	11	11	11	11	100,00	10	90,91	11	100,00
6	Sumatera Selatan	15	17	17	13	86,67	16	94,12	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	10	10	100	10	100	10	100,00
8	Lampung	14	15	15	14	100,00	15	100	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	7	7	100	7	100	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	7	4	57,14	5	71,43	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	6	6	100	5	83	6	100,00
12	Jawa Barat	26	27	27	26	100	27	100	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	35	35	100	35	100	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	5	5	100	5	100	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	38	38	100	38	100	38	100,00
16	Banten	8	8	8	8	100	8	100	8	100,00
17	Bali	9	9	9	9	100	9	100	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	10	9	90,00	10	100,00	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	21	22	22	7	33,33	6	27,27	11	50,00
20	Kalimantan Barat	14	14	14	12	86	14	100,00	14	100,00
21	Kalimantan Tengah	14	14	14	12	85,71	14	100,00	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	13	13	100	13	100	13	100,00
23	Kalimantan Timur	14	10	10	14	100	10	100	10	100,00
24	Kalimantan Utara		5	5	-	-	5	100,00	5	100,00
25	Sulawesi Utara	15	15	15	14	93,33	14	93,33	14	93,33
26	Sulawesi Tengah	11	13	13	11	100	13	100	12	92,31
27	Sulawesi Selatan	24	24	24	22	91,67	22	91,67	23	95,83
28	Sulawesi Tenggara	12	14	17	8	66,67	9	64,29	12	70,59
29	Gorontalo	6	6	6	6	100	6	100	6	100,00
30	Sulawesi Barat	5	6	6	5	100,00	6	100	5	83,33
31	Maluku	11	11	11	4	36,36	4	36,36	6	54,55
32	Maluku Utara	9	10	10	7	77,78	6	60,00	6	60,00
33	Papua Barat	11	13	13	6	54,55	3	23,08	5	38,46
34	Papua	29	29	29	1	3,45	7	24,14	5	17,24
	Indonesia	497	511	514	412	82,90	433	84,74	446	86,77

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 6.26

SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2013-2015

No	Provinsi	2013			2014			2015		
		GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	524	323	1	607	375	1	740	521	1
2	Sumatera Utara	3.468	2.721	5	3.255	2.514	10	4.158	3.038	14
3	Sumatera Barat	3.037	2.274	8	3.262	2.435	8	3.358	2.531	7
4	Riau	5.106	4.359	12	848	716	3	1.539	1.290	2
5	Jambi	778	638	0	630	570	0	755	718	1
6	Sumatera Selatan	772	234	0	114	62	0	852	880	2
7	Bengkulu	926	736	3	804	559	5	1.017	782	6
8	Lampung	1.102	945	0	626	461	3	1.041	940	0
9	Kep. Bangka Belitung*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	396	317	0	112	58	0	522	365	3
13	Jawa Tengah*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Banten	48	18	0	23	8	0	9	9	0
17	Bali	37.066	30.359	1	46.877	39.468	2	42.630	29.495	15
18	Nusa Tenggara Barat*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	5.067	4.172	6	5.340	4.582	0	7.386	6.153	2
20	Kalimantan Barat	0	0	0	188	142	14	599	599	5
21	Kalimantan Tengah	778	581	0	991	862	5	1.904	1.383	8
22	Kalimantan Selatan	241	201	0	175	165	1	100	79	0
23	Kalimantan Timur	141	111	2	867	687	0	670	611	0
24	Kalimantan Utara	-	-	-	38	15	0	*	0	0
25	Sulawesi Utara	2.795	1.331	30	3.601	1.701	22	4.346	2.171	28
26	Sulawesi Tengah	1.239	1.066	8	1.212	968	4	1.672	1.379	2
27	Sulawesi Selatan	2.022	997	6	775	444	0	3.722	1.999	2
28	Sulawesi Tenggara	614	541	12	632	571	3	1.187	1.140	2
29	Gorontalo	507	350	8	563	391	5	674	510	6
30	Sulawesi Barat	678	215	1	425	425	0	30	30	0
31	Maluku	1.528	1.275	11	1.532	1.098	6	927	716	4
32	Maluku Utara	303	295	5	270	264	6	565	560	8
33	Papua Barat*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		69.136	54.059	119	73.767	59.541	98	80.403	57.899	118
Persentase VAR/GHPR		78,2%			80,7%			72,0%		

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Ket : GHPR = Gigitan Hewan Penular Rabies (belum confirmed lab), VAR = Kasus digigit yang diberi Vaksin Anti Rabies, LYSSA = Positif rabies dan mati
* daerah bebas rabies

Lampiran 6.27

**JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) LEPTOSPIROSIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 - 2015**

No	Provinsi	2013			2014			2015		
		K	M	CFR	K	M	CFR	K	M	CFR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	DKI Jakarta	66	7	10,61	106	18	16,98	37	4	10,81
2	Jawa Barat	1	0	0	26	-	-	2	1	50,00
3	Jawa Tengah	156	17	10,90	198	32	16,16	149	24	16,11
4	DI Yogyakarta	163	8	4,91	154	9	5,84	144	19	13,19
5	Jawa Timur	244	25	10,25	61	2	3,28	3	0	0,00
6	Banten	10	3	-	0	-	-	31	17	54,84
7	Kalimantan Selatan	0	0	0	5	1	20,00	0	0	0,00
Indonesia		640	60	9,38	550	62	11,27	366	65	17,76

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Ket. : K= Kasus, M= Meninggal, CFR=Case Fatality Rate

Lampiran 6.28

**JUMLAH BENCANA DAN KORBAN MENURUT JENIS BENCANA
TAHUN 2015**

No	Provinsi	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Rawat Inap	Rawat Jalan	Hilang	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Banjir	204	28	35	40	24.292	3	191.105
2	Tanah Longsor	114	15	96	52	249	42	4.194
3	Angin Puting Beliung	100	18	37	28	102	0	411
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	84	14	22	2	465.612	0	0
5	Kecelakaan Transportasi	84	22	475	397	639	118	0
6	Kebakaran	72	17	62	177	751	0	9.550
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	66	21	7	1.714	2.077	0	0
8	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	56	15	45	118	241	0	2.480
9	Banjir Bandang	51	16	20	8	157	4	11.925
10	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	45	20	66	208	162	0	0
11	Gempa Bumi	20	16	2	29	1.441	0	14.016
12	Gagal Teknologi	18	8	23	94	93	0	0
13	Letusan Gunung Api	11	5	1	2	12.746	0	21.659
14	Banjir dan Tanah Longsor	6	4	2	0	2	2	322
15	Kekeringan	4	3	0	0	0	0	0
16	Kecelakaan Industri	1	1	0	0	1	0	0
17	Aksi Teror dan Sabotase	1	1	0	6	0	0	0
Indonesia		937	224	893	2.875	508.565	169	255.662

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 6.29

**JUMLAH BENCANA DAN KORBAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2015**

No	Provinsi	Frekuensi	Meninggal	Rawat Inap	Rawat Jalan	Hilang	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	63	12	387	898	9	95.146
2	Sumatera Utara	56	180	252	13.181	14	21.913
3	Sumatera Barat	29	23	21	272	0	1.148
4	Riau	27	14	66	107.413	0	210
5	Jambi	25	6	64	155.811	0	460
6	Sumatera Selatan	52	44	46	88.538	0	2
7	Bengkulu	5	7	22	1	14	156
8	Lampung	13	5	65	162	0	80
9	Kepulauan Bangka Belitung	3	1	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	1	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	35	30	104	1.537	0	26.828
12	Jawa Barat	87	117	519	2.416	17	14.140
13	Jawa Tengah	68	41	63	1.781	11	19.425
14	DI Yogyakarta	13	9	18	67	0	690
15	Jawa Timur	181	62	251	4.116	12	2.125
16	Banten	12	2	37	13.623	10	15.555
17	Bali	12	12	12	3	1	0
18	Nusa Tenggara Barat	23	6	266	1.129	0	12.321
19	Nusa Tenggara Timur	12	8	38	214	3	2.584
20	Kalimantan Barat	29	15	186	45.947	7	5.688
21	Kalimantan Tengah	22	1	37	67.603	0	0
22	Kalimantan Selatan	3	0	0	599	0	0
23	Kalimantan Timur	12	7	0	51	3	39
24	Kalimantan Utara	5	6	30	1.142	0	13.214
25	Sulawesi Utara	14	12	86	149	0	6.674
26	Sulawesi Tengah	16	15	29	3	0	995
27	Sulawesi Selatan	56	110	161	131	20	874
28	Sulawesi Tenggara	3	0	1	0	0	0
29	Gorontalo	12	6	37	89	0	1.088
30	Sulawesi Barat	6	6	8	7	30	12
31	Maluku	13	13	11	32	7	0
32	Maluku Utara	6	2	7	1.591	2	13.535
33	Papua Barat	4	2	21	45	0	502
34	Papua	19	119	30	14	9	258
	Indonesia	937	893	2.875	508.565	169	255.662

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 6.30

**KABUPATEN/KOTA YANG MELAPORKAN KLB DBD
MENURUT PROVINSI TAHUN 2015**

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kasus		CFR
			Penderita	Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Sumatera Utara	Kabupaten Dairi	5	1	20,00
		Kabupaten Serdang Bedagai	15	3	20,00
2	Sumatera Barat	Kabupaten Pariaman	16	0	0,00
		Kota Padang	5	1	20,00
		Kota Sawahlunto	1	1	100,00
		Kota Padang Panjang	1	1	100,00
		Kabupaten Dharmasraya	8	0	0,00
		Kabupaten Sijunjung	10	1	10,00
3	Riau	Kota Pekanbaru	203	6	2,96
4	Lampung	Kabupaten Lampung Utara	28	1	3,57
		Kota Bandar Lampung	71	3	4,23
		Kabupaten Pesisir Barat	1	1	100,00
5	Jawa Tengah	Kabupaten Sragen	74	2	2,70
		Kabupaten Kudus	112	4	3,57
		Kabupaten Sukoharjo	89	0	0,00
6	DI Yogyakarta	Kabupaten Gunung Kidul	1	1	100,00
7	Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi	247	1	0,40
		Kabupaten Jombang	153	4	2,61
		Kabupaten Kediri	366	5	1,37
		Kota Kediri	57	0	0,00
		Kabupaten Madiun	102	2	1,96
		Kota Madiun	76	0	0,00
		Kabupaten Mojokerto	93	4	4,30
		Kabupaten Probolinggo	264	3	1,14
		Kabupaten Sumenep	522	5	0,96
		Kabupaten Trenggalek	209	0	0,00
		Kabupaten Tulungagung	352	1	0,28
		Kabupaten Lamongan	240	1	0,42
		Kabupaten Magetan	74	2	2,70
		Kabupaten Nganjuk	238	6	2,52
		Kabupaten Ngawi	254	4	1,57
Kabupaten Pamekasan	189	7	3,70		
Kabupaten Ponorogo	206	1	0,49		
Kabupaten Pacitan	475	2	0,42		
Kabupaten Sampang	250	3	1,20		
Kabupaten Bangkalan	447	4	0,89		
Kabupaten Bondowoso	238	2	0,84		
Kabupaten Malang	210	1	0,48		

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total Kasus		CFR
			Penderita	Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		Kabupaten Blitar	194	3	1,55
		Kabupaten Bojonegoro	171	2	1,17
		Kabupaten Pasuruan	144	5	3,47
		Kabupaten Situbondo	90	4	4,44
		Kota Pasuruan	16	0	0,00
		Kota Batu	15	0	0,00
		Kota Blitar	23	0	0,00
8	Bali	Kota Denpasar	11	11	100,00
		Kota Gianyar	1	1	100,00
9	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Manggarai Barat	40	0	0,00
10	Kalimantan Barat	Kabupaten Ketapang	31	1	3,23
11	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kapuas	82	2	2,44
12	Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	191	3	1,57
		Kabupaten Hulu Sungai Utara	111	4	3,60
		Kabupaten Hulu Sungai Tengah	143	2	1,40
		Kabupaten Balangan	63	2	3,17
		Kabupaten Banjar	102	0	0,00
13	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	89	2	2,25
14	Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa Utara	88	2	2,27
		Kota Bitung	26	0	0,00
		Kota Manado	115	3	2,61
		Kota Tomohon	17	0	0,00
		Kabupaten Sitaro	16	1	6,25
		Kabupaten Bolaang Mongondow	14	0	0,00
		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	6	0	0,00
		Kabupaten Minahasa Selatan	11	0	0,00
		Kabupaten Minahasa	69	0	0,00
		15	Sulawesi Tengah	Kabupaten Buol	15
		Kabupaten Poso	5	1	20,00
16	Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu	10	0	0,00
17	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Wakatobi	14	2	14,29
		Kabupaten Muna Barat	3	1	33,33
18	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	30	4	13,33
19	Sulawesi Barat	Kabupaten Polewali Mandar	17	1	5,88
20	Maluku	Kabupaten Buru	3	0	0,00
		Kabupaten Tual	12	2	16,67
21	Papua	Kabupaten Jayapura	37	1	2,70
		Kabupaten Merauke	61	0	0,00

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 7.1

**JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN 2013-2015**

No	Provinsi	2013			2014			2015		
		Jumlah Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa STBM	%	Jumlah Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa STBM	%	Jumlah Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan STBM	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	6.464	122	1,89	6.474	409	6,32	6.502	849	13,06
2	Sumatera Utara	5.945	121	2,04	6.080	466	7,66	5.924	503	8,49
3	Sumatera Barat	1.145	647	56,51	1.139	405	35,56	1.140	445	39,04
4	Riau	1.835	387	21,09	1.835	176	9,59	1.814	584	32,19
5	Jambi	1.553	169	10,88	1.561	296	18,96	1.547	361	23,34
6	Sumatera Selatan	3.144	633	20,13	3.194	710	22,23	3.189	1.031	32,33
7	Bengkulu	1.524	125	8,20	1.513	172	11,37	1.523	386	25,34
8	Lampung	2.580	256	9,92	2.640	528	20,00	2.626	848	32,29
9	Kep. Bangka Belitung	380	95	25,00	387	250	64,60	381	284	74,54
10	Kepulauan Riau	415	96	23,13	416	102	24,52	386	135	34,97
11	DKI Jakarta	267	2	0,75	267	5	1,87	267	5	1,87
12	Jawa Barat	5.934	779	13,13	5.960	1.816	30,47	5.936	2.135	35,97
13	Jawa Tengah	8.578	2.817	32,84	8.559	3.257	38,05	8.577	4.125	48,09
14	DI Yogyakarta	438	63	14,38	438	377	86,07	438	411	93,84
15	Jawa Timur	8.505	3.618	42,54	8.499	4.737	55,74	8.497	5.197	61,16
16	Banten	1.551	149	9,61	1.551	144	9,28	1.551	379	24,44
17	Bali	714	672	94,12	716	246	34,36	716	313	43,72
18	Nusa Tenggara Barat	1.080	1.071	99,17	1.137	932	81,97	1.137	1.034	90,94
19	Nusa Tenggara Timur	3.200	1.531	47,84	3.268	1.678	51,35	3.266	2.013	61,64
20	Kalimantan Barat	1.986	252	12,69	1.997	295	14,77	1.983	398	20,07
21	Kalimantan Tengah	1.558	451	28,95	1.572	380	24,17	1.565	601	38,40
22	Kalimantan Selatan	2.009	391	19,46	2.007	557	27,75	2.008	824	41,04
23	Kalimantan Timur	1.492	56	3,75	1.029	6	0,58	1.013	84	8,29
24	Kalimantan Utara *	-	-	-	482	89	18,46	479	18	3,76
25	Sulawesi Utara	1.790	50	2,79	1.822	338	18,55	1.738	114	6,56
26	Sulawesi Tengah	1.936	318	16,43	2.007	818	40,76	1.950	499	25,59
27	Sulawesi Selatan	3.024	331	10,95	3.038	232	7,64	3.023	978	32,35
28	Sulawesi Tenggara	2.142	118	5,51	2.197	188	8,56	2.247	568	25,28
29	Gorontalo	729	319	43,76	729	358	49,11	730	242	33,15
30	Sulawesi Barat	604	192	31,79	647	77	11,90	649	349	53,78
31	Maluku	1.169	77	6,59	1.224	138	11,27	1.076	88	8,18
32	Maluku Utara	1.151	107	9,30	1.180	166	14,07	1.194	159	13,32
33	Papua Barat	1.554	100	6,44	1.715	131	7,64	1.447	244	16,86
34	Papua	4.857	113	2,33	5.225	18	0,34	3.757	213	5,67
	Indonesia	81.253	16.228	19,97	82.505	20.497	24,84	80.276	26.417	32,91

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Catatan: *) Data Kalimantan Utara tahun 2013 masih bergabung dengan Kalimantan Timur

Lampiran 7.2

**KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN TATANAN KAWASAN SEHAT
TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota Penyelenggara Tatanan Kawasan Sehat	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	6	26,09
2	Sumatera Utara	33	122	369,70
3	Sumatera Barat	19	19	100,00
4	Riau	12	10	83,33
5	Jambi	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	13	76,47
7	Bengkulu	10	8	80,00
8	Lampung	15	9	60,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	3	42,86
11	DKI Jakarta	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	26	96,30
13	Jawa Tengah	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00
16	Banten	8	6	75,00
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	7	31,82
20	Kalimantan Barat	14	8	57,14
21	Kalimantan Tengah	14	2	14,29
22	Kalimantan Selatan	13	10	76,92
23	Kalimantan Timur	10	9	90,00
24	Kalimantan Utara	5	4	80,00
25	Sulawesi Utara	15	13	86,67
26	Sulawesi Tengah	13	6	46,15
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	9	52,94
29	Gorontalo	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	4	66,67
31	Maluku	11	3	27,27
32	Maluku Utara	10	2	20,00
33	Papua Barat	13	-	-
34	Papua	29	1	3,45
Indonesia		514	451	87,74

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 7.3

PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM LAYAK
TAHUN 2014-2015

No	Provinsi	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	58,74	61,23
2	Sumatera Utara	66,86	71,41
3	Sumatera Barat	62,60	66,58
4	Riau	72,55	74,24
5	Jambi	62,01	62,75
6	Sumatera Selatan	60,75	65,16
7	Bengkulu	37,47	41,08
8	Lampung	49,92	55,06
9	Kep. Bangka Belitung	63,20	68,03
10	Kepulauan Riau	81,04	84,12
11	DKI Jakarta	92,10	93,40
12	Jawa Barat	65,01	67,20
13	Jawa Tengah	71,11	73,63
14	DI Yogyakarta	77,28	80,99
15	Jawa Timur	75,64	76,64
16	Banten	66,60	67,68
17	Bali	89,09	91,27
18	Nusa Tenggara Barat	64,33	71,70
19	Nusa Tenggara Timur	54,88	62,72
20	Kalimantan Barat	63,04	68,39
21	Kalimantan Tengah	56,05	57,01
22	Kalimantan Selatan	61,72	62,23
23	Kalimantan Timur	78,48	78,13
24	Kalimantan Utara	-	84,59
25	Sulawesi Utara	69,32	71,53
26	Sulawesi Tengah	58,99	61,49
27	Sulawesi Selatan	68,89	72,07
28	Sulawesi Tenggara	68,74	77,19
29	Gorontalo	63,30	66,47
30	Sulawesi Barat	47,07	53,89
31	Maluku	60,77	64,96
32	Maluku Utara	57,03	60,07
33	Papua Barat	66,87	68,85
34	Papua	48,99	51,27
Indonesia		68,38	70,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Kor 2014- 2015

Lampiran 7.4

PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN
TAHUN 2015

No	Provinsi	Jumlah Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang Diawasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	3.948	122	56,36
2	Sumatera Utara	139	-	-
3	Sumatera Barat	3.344	-	-
4	Riau	3.385	952	28,12
5	Jambi	70.376	15.652	22,24
6	Sumatera Selatan	1.597	-	-
7	Bengkulu	450	-	-
8	Lampung	3.414	1.798	52,67
9	Kep. Bangka Belitung	492	-	-
10	Kepulauan Riau	123	110	89,43
11	DKI Jakarta	89	-	-
12	Jawa Barat	92.514	74.154	80,15
13	Jawa Tengah	18.685	3.530	18,89
14	DI Yogyakarta	35	-	-
15	Jawa Timur	1.701	603	35,45
16	Banten	833	-	-
17	Bali	546	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	515	14	2,72
19	Nusa Tenggara Timur	460	-	-
20	Kalimantan Barat	1.345	-	-
21	Kalimantan Tengah	804	5	0,62
22	Kalimantan Selatan	1.914	117	6,11
23	Kalimantan Timur	20.376	387	1,90
24	Kalimantan Utara	5	-	-
25	Sulawesi Utara	425	2	0,47
26	Sulawesi Tengah	1.067	389	36,46
27	Sulawesi Selatan	350	-	-
28	Sulawesi Tenggara	27	-	-
29	Gorontalo	1.261	1.171	92,86
30	Sulawesi Barat	279	46	16,49
31	Maluku	607	0	-
32	Maluku Utara	72	1	1,39
33	Papua Barat	562	-	-
34	Papua	2.262	816	36,07
	Indonesia	234.002	99.869	42,68

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 7.5

**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2014-2015**

No	Provinsi	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	33,68	54,68
2	Sumatera Utara	66,92	67,89
3	Sumatera Barat	42,34	45,02
4	Riau	48,74	51,30
5	Jambi	58,58	58,21
6	Sumatera Selatan	59,79	61,30
7	Bengkulu	33,18	39,22
8	Lampung	37,27	44,83
9	Kep. Bangka Belitung	75,67	80,80
10	Kepulauan Riau	63,45	71,97
11	DKI Jakarta	87,05	89,28
12	Jawa Barat	61,00	59,43
13	Jawa Tengah	67,43	67,20
14	DI Yogyakarta	82,50	86,31
15	Jawa Timur	63,70	63,48
16	Banten	69,51	67,04
17	Bali	79,38	85,46
18	Nusa Tenggara Barat	59,41	63,72
19	Nusa Tenggara Timur	16,12	23,90
20	Kalimantan Barat	48,59	39,78
21	Kalimantan Tengah	30,85	35,88
22	Kalimantan Selatan	48,44	60,13
23	Kalimantan Timur	72,65	68,83
24	Kalimantan Utara	-	48,40
25	Sulawesi Utara	69,82	66,79
26	Sulawesi Tengah	52,47	55,37
27	Sulawesi Selatan	71,07	72,36
28	Sulawesi Tenggara	61,26	63,62
29	Gorontalo	54,07	54,96
30	Sulawesi Barat	52,45	51,21
31	Maluku	62,87	60,02
32	Maluku Utara	55,75	59,17
33	Papua Barat	61,85	62,81
34	Papua	21,66	28,04
	Indonesia	61,08	62,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Kor 2014- 2015

Catatan: Mulai tahun 2015, konsep sanitasi layak ditambah dengan memasukkan plengsengan dengan tutup sebagai jamban/kloset yang dianggap layak

Lampiran 7.6

PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
TAHUN 2015

No	Provinsi	Jumlah Tempat-tempat Umum (TTU)	TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan	TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	546	265	48,53
2	Sumatera Utara	713	354	49,65
3	Sumatera Barat	21.423	15.290	71,37
4	Riau	165	108	65,45
5	Jambi	166	100	60,24
6	Sumatera Selatan	251	185	73,71
7	Bengkulu	2.123	1.724	81,21
8	Lampung	8.208	5.620	68,47
9	Kep. Bangka Belitung	1.334	966	72,41
10	Kepulauan Riau	277	118	42,60
11	DKI Jakarta	633	185	29,23
12	Jawa Barat	33.035	18.661	56,49
13	Jawa Tengah	30.871	23.501	76,13
14	DI. Yogyakarta	699	365	52,22
15	Jawa Timur	2.455	1.838	74,87
16	Banten	18.724	7.482	39,96
17	Bali	1.520	1.147	75,46
18	Nusa Tenggara Barat	5.792	4.567	78,85
19	Nusa Tenggara Timur	267	161	60,30
20	Kalimantan Barat	288	164	56,94
21	Kalimantan Tengah	265	123	46,42
22	Kalimantan Selatan	175	101	57,71
23	Kalimantan Timur	375	219	58,40
24	Kalimantan Utara	114	91	79,82
25	Sulawesi Utara	616	244	39,61
26	Sulawesi Tengah	165	129	78,18
27	Sulawesi Selatan	11.568	4.210	36,39
28	Sulawesi Tenggara	223	171	76,68
29	Gorontalo	92	60	65,22
30	Sulawesi Barat	134	52	38,81
31	Maluku	2.418	1.271	52,56
32	Maluku Utara	2.241	1.579	70,46
33	Papua Barat	258	79	30,62
34	Papua	456	163	35,75
	Indonesia	148.590	91.293	61,44

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 7.7

**PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah TPM	TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan	TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	2.606	36	1,38
2	Sumatera Utara	285	45	15,79
3	Sumatera Barat	3.100	878	28,32
4	Riau	1.950	299	15,33
5	Jambi	2.192	318	14,51
6	Sumatera Selatan	956	33	3,45
7	Bengkulu	1.870	485	25,94
8	Lampung	3.157	135	4,28
9	Kep. Bangka Belitung	2.342	405	17,29
10	Kepulauan Riau	1.600	116	7,25
11	DKI Jakarta	661	39	5,90
12	Jawa Barat	9.388	976	10,40
13	Jawa Tengah	6.405	318	4,96
14	DI Yogyakarta	1.033	120	11,62
15	Jawa Timur	1.128	80	7,09
16	Banten	4.241	339	7,99
17	Bali	1.518	73	4,81
18	Nusa Tenggara Barat	951	67	7,05
19	Nusa Tenggara Timur	461	27	5,86
20	Kalimantan Barat	1.429	113	7,91
21	Kalimantan Tengah	1.557	155	9,96
22	Kalimantan Selatan	5.669	593	10,46
23	Kalimantan Timur	2.264	176	7,77
24	Kalimantan Utara	345	43	12,46
25	Sulawesi Utara	1.160	163	14,05
26	Sulawesi Tengah	388	21	5,41
27	Sulawesi Selatan	1.843	33	1,79
28	Sulawesi Tenggara	1.453	111	7,64
29	Gorontalo	1.846	304	16,47
30	Sulawesi Barat	688	130	18,90
31	Maluku	79	3	3,80
32	Maluku Utara	558	155	27,78
33	Papua Barat	309	13	4,21
34	Papua	30	0	0
	Indonesia	65.462	6.802	10,39

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Lampiran 7.8

**PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR
TAHUN 2015**

No	Provinsi	Jumlah RS	Jumlah RS yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	66	4	6,06
2	Sumatera Utara	184	2	1,09
3	Sumatera Barat	65	37	56,92
4	Riau	68	14	20,59
5	Jambi	34	5	14,71
6	Sumatera Selatan	63	2	3,17
7	Bengkulu	20	-	-
8	Lampung	61	40	65,57
9	Kep. Bangka Belitung	17	2	11,76
10	Kepulauan Riau	25	1	4,00
11	DKI Jakarta	179	37	20,67
12	Jawa Barat	312	7	2,24
13	Jawa Tengah	280	3	1,07
14	DI Yogyakarta	74	45	60,81
15	Jawa Timur	361	4	1,11
16	Banten	88	10	11,36
17	Bali	55	13	23,64
18	Nusa Tenggara Barat	28	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	44	-	-
20	Kalimantan Barat	44	-	-
21	Kalimantan Tengah	20	5	25,00
22	Kalimantan Selatan	35	4	11,43
23	Kalimantan Timur	47	9	19,15
24	Kalimantan Utara	7	-	-
25	Sulawesi Utara	42	-	-
26	Sulawesi Tengah	31	-	-
27	Sulawesi Selatan	85	2	2,35
28	Sulawesi Tenggara	29	-	-
29	Gorontalo	12	5	41,67
30	Sulawesi Barat	10	-	-
31	Maluku	27	2	7,41
32	Maluku Utara	19	3	15,79
33	Papua Barat	16	-	-
34	Papua	40	-	-
	Indonesia	2.488	256	10,29

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2016

Copyright ©
Pusat Data dan Informasi
Kementerian Kesehatan RI
2016

ISBN 978-602-416-065-4

